MENGAPA PARTAI ISLAM KALAH?

Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden

Deliar Noer
Nurcholish Madjid
Yusril Ihza Mahendra
M Amien Rais
Abdurrahman Wahid
Ahmad Syafii Maarif
Azyumardi Azra
Kuntowijoyo
Hamzah Haz
Greg Barton
Mitsuo Nakamura
Robert William Hefner
Saiful Mujani
Eep Saefulloh Fatah
Moeslim Abdurrahman
Ulil Abshar-Abdalla
Hartono Mardjono
Bahtiar Effendy

Editor
Hamid Basyaib
Hamid Abidin

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Noer, Deliar (et. al.)
Mengapa Partai Islam Kalah? —Perjalanan Politik Islam dari Pra-pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden.
Editor; Hamid Basyaib dan Hamid Abidin
Cet. 1 —Jakarta: AlvaBet, Oktober 1999
376 hlm. 23 cm.

Bibliografi; hlm. i - xiv : 377 - 383
ISBN 979-95821-1-3

1. Islam dan Politik   2. Partai Politik Islam
I. Noer, Deliar (et. al.)   II. Basyaib, Hamid
III. Abidin, Hamid   297.6

MENGAPA PARTAI ISLAM KALAH?

Oleh Deliar Noer, (et. al.)

Editor: Hamid Basyaib dan Hamid Abidin

Cetakan 1, Oktober 1999

Diterbitkan oleh ALVABET
Komplek TRILOKA No. 18
Pancoran - Jakarta Selatan
Telp. (021) 7945561 - Fax. (021) 79197226

e-mail: ridee@cbn.net.id

Desain sampul: Dede Riana

GAMBAR SAMPUL: *Jongan*, atau kipas ritual, merupakan perangkat kerajaan para sultan Riau-Lingga, terbuat dari emas dan bertuliskan teks Melayu-Arab (*Jawi*). Tulisannya berisi pujian kepada Tuhan dan pernyataan bahwa kipas itu adalah milik seorang penguasa dari Bukit Seguntang (tempat asal semua penguasa Melayu di Sumatera), dan keturunan Iskandar Zulkarnain. Sang Raja disebut adil dan kedaulatannya meliputi tahta kerajaan dan lencana serta segenap keagungan di permukiman-permukiman (*negeri*) itu yang menghampar di kawasan Tanah Melayu. Bentuk kipas ini mirip *gunungan*, lempengan simbol gunung yang ditancapkan sebagai pusat dalam pertunjukan wayang kulit. (Sumber: *Indonesian Heritage: Early Modern History*, Jilid 3).

Mengapa Partai Islam, Mengapa Kalah

Catatan Editor

KEKALAHAN partai-partai berazas Islam dalam pemilihan umum 7 Juni 1999 benar-benar telak. Hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meraih suara signifikan dan masuk lima besar; perolehan Partai Bulan Bintang (PBB) jauh di bawah perkiraan, meski berhasil membentuk fraksi sendiri di DPR dengan 13 anggota. Partai Keadilan (PK) hanya memetik 7 kursi DPR, gagal memenuhi ketentuan perolehan minimal (*threshold*) dua persen dari total, dan dengan demikian terlikuidasi untuk pemilu 2004.

Ketiga partai itu hanya minoritas dari 12 partai Islam yang bertarung (plus lima partai lainnya yang berazas "Islam dan Pancasila"). Dengan kata lain, kesiapan dan kelengkapan administratif mereka sebenarnya bagus, terbukti dengan lolosnya 17 partai itu dari seleksi ketat Tim 11 yang akhirnya meloloskan hanya 48 kontestan dari sekitar 160 parpol yang mendaftar. Artinya, lebih dari sepertiga peserta pemilu 1999 adalah partai Islam. Kesiapan administratif ini mengagumkan, mengingat mereka semua (kecuali hanya PPP) adalah partai baru, dan mengingat bahwa persyaratan kesertaan yang ditetapkan penyelenggara pemilu cukup ketat, misalnya bahwa setiap partai harus sedikitnya punya cabang di 14 provinsi.

Kesiapan perangkat dan administrasi yang beres hanya dalam beberapa bulan itu tak tecermin dalam perolehan suara mereka. Sesudah semua kartu suara dihitung, terungkap bahwa gabungan perolehan seluruh partai Islam itu kalah jauh dari PDI Perjuangan, yang meraup sekitar 34 persen suara.

Dibanding pemilu 1955, eleksi pertama dan satu-satunya yang dianggap demokratis sebelum pemilu tahun ini, perolehan partai-par-

tai Islam pada pemilu yang baru lalu itu merosot jauh. Dalam pemilu 1955 gabungan seluruh partai Islam (lima partai, dari 29 parpol dan golongan yang berkontes) mengantungi hampir 45 persen suara. Pada pemilu 1999, gabungan partai-partai Islam hanya meraih tak sampai separuh persentase itu.

Dan jika pembandingan kita teruskan, akan terungkap fakta menarik lainnya. Pada pemilu yang pertama, muncul empat besar, yaitu Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdhatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia. Bahkan PNI dan Masyumi menjadi "juara bersama," dengan masing-masing mengantungi 57 kursi. Empat puluh lima tahun kemudian, jurang perbedaan di antara mereka menganga sangat lebar. PDI-P, yang bisa dikatakan "reinkarnasi" PNI —kalaupun tidak disertai unsur-unsur lain— menduduki 153 kursi, bahkan meski ia terbelah menjadi lima partai lain yaitu PNI Front Marhaen, PNI Massa Marhaen, PNI Supeni, Partai Nasional Demokrat dan PDI. Sementara PBB, yang mengklaim diri atau dapat disebut reinkarnasi Masyumi —dan meminjam lambang bulan bintangnya untuk nama partai— hanya menempati 13 kursi, atau hanya meraih tiga kursi lebih banyak dari ambang penalti *threshold*. Malah, dua partai lain yang secara harfiah mencantumkan nama Masyumi (Partai Masyumi Baru dan Partai Politik Islam Masyumi) terpuruk total, tanpa meraih satu pun kursi.

Setelah hampir setengah abad berlalu, kejayaan Masyumi dan wajah Islam modern-demokrat yang ditampilkannya secara mengesankan, ternyata tak sanggup lagi memikat hati para pemilih dari bilik suara partai-partai nasionalis-sekular seperti PDI- P dan Golkar. Sementara para pemilih NU kini banyak beralih ke Partai Kebangkitan Bangsa, satu-satunya partai politik yang "direstui" Pengurus Besar NU untuk warga nahdhiyin, kendati partai ini tak berazas Islam. Mereka ternyata kurang berminat pada tiga parpol lain dari kalangan NU, yang berazas Islam. Adapun warga Muhammadiyah, tampaknya tak sedikit yang mencoblos Partai Amanat Nasional (PAN), yang dipimpin mantan Ketua PP Muhammadiyah, dan banyak pengurusnya, terutama di daerah, adalah tokoh organisasi massa Islam terbesar kedua itu. Tapi bagaimanapun, PAN adalah partai yang tidak berazas Islam, dan sejumlah pengurus pusatnya bukan aktivis Islam, termasuk tokoh Kristen dan keturunan Tionghoa.

Apa yang sesungguhnya sedang terjadi pada umat Islam di negeri Muslim terbesar di dunia ini? Mengapa Islam tampak kurang kuat

sebagai azas formal untuk menarik dukungan? Mengapa mayoritas Muslim justeru mendukung partai-partai Nasionalis-Kristen dan sekular? Apakah fakta ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin kurang percaya bahwa aspirasi mereka akan diakomodasi secara layak oleh partai-partai Islam; dan justeru lebih yakin aspirasi itu akan lebih terakomodasi oleh partai-partai non-Islam? Jika memang ada ketakpercayaan semacam itu, apa penyebabnya; apakah karena para politisi Islam yang mewakili partai-partai itu dianggap tidak kredibel, baik secara moral, intelektual maupun teknikal?

Lebih mendasar lagi, apakah hasil pemilu ini merupakan sinyal yang jelas bahwa mayoritas Muslim sudah tak lagi menganggap penting simbol-simbol Islam dalam politik dan lebih peduli pada substansi? Jika memang demikian, ini mungkin bisa dilihat dari dua arah yang saling terkait. Pertama, kaum Muslim lebih peduli untuk menjadikan Islam sebagai etika sosial, lebih mementingkan agar segala urusan kemasyarakatan —termasuk politik— dipengaruhi dan disemangati oleh nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, dan sebagainya. Kesimpulan ini boleh ditarik, mengingat dalam limabelas tahun terakhir "Islam kultural" jelas menampakkan perkembangan yang sangat mengesankan di negeri ini. Jadi "ketidakpedulian" mereka pada "Islam politik" bukan karena mereka menganggap politik tidak penting, melainkan justeru karena meningkatnya kesadaran keagamaan mereka pada hal-hal yang jauh lebih penting daripada simbol. Kedua, berkaitan dengan itu, umat Muslim makin percaya bahwa adalah mungkin kepentingan umat Islam diperjuangkan pewujudannya oleh para politisi dari luar lingkungan "Islam politik", atau bahkan kalangan non-Muslim.

Pada hari-hari terakhir menjelang pemilu 7 Juni, Majelis Ulama Indonesia bagai tergopoh-gopoh mengingatkan umat Islam bahwa banyak calon legislatif PDI-P yang non-Muslim; terlepas dari maksud pokok surat edaran MUI ini —yang mungkin sekadar didasari kecemasan pihak tertentu akan kemungkinan kalah dalam kontes— faktanya imbauan itu disebarluaskan. Ternyata tak ada yang menggubris. Bila benar bahwa yang terjadi adalah makin sadarnya umat Islam akan substansi ketimbang simbol, ini bisa disebut kemajuan yang berarti, bukan hanya secara politik, tapi justeru secara religius.

Kesimpulan kedua ini bisa diperdebatkan. Dan untuk memulai perdebatan, barangkali partai-partai Islam boleh memaparkan program atau *platform* mereka yang berisi definisi dan cakupan dari apa

yang mereka maksud dengan "aspirasi umat Islam" —hal yang sejauh ini rupanya dianggap *taken for granted* dan tak pernah dirumuskan secara elaboratif oleh partai-partai Islam tersebut. Ini tentu saja penting, sebab dari situ orang mungkin mengidentifikasi apa saja aspirasi umat Islam tersebut dan, yang tak kalah penting, apa yang membedakannya dari aspirasi para warganegara lain di Indonesia.

Fenomena kekalahan partai-partai Islam ini makin menarik jika kita ingat bahwa Islam oleh para penganjurnya sering dirumuskan sebagai agama yang tidak memisahkan urusan politik dari agama. Dalam ungkapan para ulama, Islam adalah *ad-din wa daulah*. Benar bahwa pada agama-agama lain pun terbukti agama tidak dipisahkan dari politik. Bahkan, dalam dua dekade ini tampak jelas kebangkitan agama-agama di seluruh dunia, dan meningkat pula partisipasi mereka dalam upaya mempengaruhi proses politik, atas nama agama. Di Israel, yang berstatus Negara Yahudi, kalangan ortodoks dan "fundamentalis" makin aktif berpolitik. Ormas-ormas keagamaan seperti Gush Emunim bahkan mengalami radikalisasi sejak 15 tahun terakhir. Partai-partai kecil Yahudi garis-keras pun bermunculan, dan ada kecenderungan perolehan suara mereka terus meningkat. Dan penembak Yithzak Rabin adalah seorang pemuda religius, yang membunuh sang PM atas nama Tuhan, karena Rabin dinilai merugikan kepentingan Yahudi dalam perundingan dengan Palestina.

Di India, partai Hindu menguat secara signifikan. (Juga, lagi-lagi, pembunuh Gandhi adalah seorang Hindu fanatik). Di Thailand, para biksu Budha —agama yang resminya "anti-politik"— tak jarang melakukan demonstrasi politik. Di kalangan Kristen, agama yang doktrin resminya apolitis, kecenderungan politisasi juga sangat kuat. Yang paling mencolok, selain di Masyarakat Eropa, agaknya di Amerika Serikat. Christian Coalition makin aktif. Evangelis Pat Robertson bahkan pernah mencalonkan diri sebagai kandidat presiden dari Partai Republik, sementara Pendeta Jesse Jackson hampir menjadi kandidat Partai Demokrat. Di sejumlah negara bagian AS, sekolah-sekolah negeri mulai mengizinkan kegiatan-kegiatan keagamaan dilakukan di lingkungan sekolah, misalnya doa bersama di dalam kelas, karena tekanan konstituen untuk meruntuhkan tembok yang memisahkan agama dan negara. Jelas terlihat bahwa para *born-again Christian*, misalnya yang berhimpun dalam Promise Keepers —kelompok religius baru yang berkembang sangat pesat dalam lima tahun terakhir— makin peduli pada politik.

Tapi perlu dicatat bahwa hanya Islam yang para pemukanya mengajarkan doktrin *ad-din wa daulah* itu. Begitupun, setidaknya dalam kasus Indonesia, doktrin ini rupanya kurang digubris oleh mayoritas *voters* pemilu 1999. Jika di banyak tempat lain *identity politics* menguat, di Indonesia rupanya politik identitas itu justeru melemah.

Bagaimanapun, kekalahan partai-partai Islam itu merangsang banyak pengamat dan aktornya untuk mengulas. Begitulah, fenomena ini direkam oleh banyak ulasan di media massa. Kami menganggap analisis dan pandangan-pandangan mereka terlalu penting untuk tak dihimpun dalam sebuah buku. Maka jadilah bunga-rampai ini, yang dikumpulkan lewat seleksi yang cukup ketat, mengingat kelewat banyaknya tulisan yang muncul. Dan hampir semua tulisan yang dihimpun berasal dari media yang terbit di ibukota. Ini kami pandang tak mengurangi makna *representativeness* mengingat tak sedikit para penulisnya adalah "orang daerah."

Sebagian besar dari naskah artikel ditampilkan apa adanya. Kami hanya menyunting ejaan seperlunya, tanpa mengubah substansinya. Maka pengulangan tak terhindarkan. Kami hanya bisa meminta pembaca memaafkan dan memaklumi pengulangan yang mungkin membosankan ini. Penyuntingan hanya dilakukan terhadap wawancara untuk memilih materi yang relevan dengan tema pokok.

Karena fenomena kekalahan partai-partai Islam hanyalah sebuah babak dalam perjalanan politik Islam, setidaknya di era Reformasi, maka kami merasa perlu untuk menyertakan awal perjalanan itu, berupa hiruk-pikuk pembentukan partai-partai tersebut, juga pelbagai saran, evaluasi, dan ikhtiar yang perlu dilakukan oleh partai-partai itu. Maka jadilah kumpulan ini dipilah menjadi lima bagian.

Bagian Pertama menampilkan sejumlah tulisan di seputar pro-kontra pembentukan partai Islam. Bagian Kedua, menampilkan beberapa artikel yang menyoroti kiprah partai Islam di pentas pemilu. Bagian Ketiga berisi tentang artikel dan wawancara yang mengupas kegagalan partai Islam pada pemilu ini. Serangkaian tulisan yang membahas pembenahan yang perlu dilakukan oleh partai Islam pasca pemilu disajikan pada Bagian Keempat. Bagian Kelima memuat tulisan-tulisan yang menyoroti berbagai manuver para elit partai Islam menjelang Sidang Umum MPR dan pemilihan presiden RI, termasuk gagasan tentang fraksi Islam dan kiprah Poros Tengah.

Dalam menyeleksi naskah-naskah, kami berusaha membuat perimbangan antara pengamat dan praktisi. Perimbangan ini kami pan-

dang penting, agar pembaca dapat melihat segi-segi persamaan maupun perbedaan antara apa yang dilihat oleh orang luar dan apa yang dirasakan dan dialami orang dalam partai-partai itu sendiri. Keterangan singkat tentang para kontributor dapat dilihat pada Sumber Tulisan di halaman belakang.

Karena cepatnya proses perubahan politik di tanah air, kami tentu tidak berani menyatakan bahwa antologi ini sudah mewakili seluruh aspek yang melingkupi kiprah dan peran partai Islam di pentas politik nasional. Kami hanya berusaha untuk mendekatinya dengan melakukan penambahan dan pengurangan terhadap naskah yang diseleksi agar tema yang dibahas tetap relevan dan aktual. Bahkan, pada saat buku ini dicetak, polemik seputar kiprah partai Islam di SU MPR, terutama Poros Tengah, masih terus bergulir.

Tentu saja kami wajib berterima kasih pada banyak pihak. Terutama sekali kepada para penulis yang merelakan tulisan-tulisan mereka dimuat ulang dalam buku ini. Terima kasih pula kepada para pemimpin redaksi media tempat tulisan-tulisan ini pertama kali terbit. Sambutan dan tanggapan simpatik dari mereka semua sungguh membuat kami berbesar hati.

Para sahabat di jajaran redaksi tabloid *Madani* berjasa memberikan sebagian bahan dan saran dalam penyusunan buku ini. Kepada mereka, Ibrahim Ali-Fauzi, Jamal D. Rahman, Fajar W. Hermawan, dan Mimin Rukmini, kami berterima kasih. Teman dan para bekas kolega lainnya, yang sering mengingatkan agar kami tak henti bekerja, juga sangat kami hargai.

Dede Riana begitu sabar dan tekun merancang desain isi dan sampul buku ini. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Juga kepada Novita, yang ikut membantu mengetik ulang naskah-naskah.

Akhirnya, kalaupun mungkin kurang bermakna sebagai dokumen politik, semoga buku ini berguna sebagai rekaman historis tentang partai-partai Islam pada satu periode penting dalam sejarah Indonesia, yaitu transisi menuju demokrasi.

Wassalam

Jakarta, awal Oktober 1999
Hamid Basyaib & **Hamid Abidin**

Daftar Isi

Bab I

Pro-Kontra Partai Islam

Agama Berdimensi Banyak, Politik Berdimensi Tunggal

Oleh **Kuntowijoyo**

PENGALAMAN traumatis masa lalu telah mendorong umat Islam untuk mendirikan parpol. NU berpengalaman bahwa selama 32 tahun orde baru sama sekali tidak diberi kesempatan duduk dalam kabinet, padahal sebelumnya ada kursi tinggi seperti Waperdam. "Dulu berpuasa, sekarang saatnya kita berbuka," demikian pernyataan seorang tokoh NU. Itulah sebabnya akan ada "Partai NU" atau Partai Kebangkitan Umat.

Di pihak lain, para eks Masyumi lebih lama lagi dalam mengalami pahit getirnya sejarah politik. Bukan saja sejak tahun 1960 tidak pernah dapat jatah kursi, tapi malah tokoh-tokohnya dari semua tingkat dimasukkan penjara, diburu macam penjahat dan disingkiri macam "kucing kurapan", difitnah, dan dituduh akan mendirikan negara Islam.

Nasib para eks Masyumi tidak pernah menjadi lebih baik selama Orde Baru: Rehabilitasi masyumi tidak pernah diijinkan, NII, DI/TII, ekstrem kanan, dan komando jihad dengan mudah mengalir dari bibir pejabat. Jangankan bintang jasa, tokoh-tokohnya pun tidak pernah dikembalikan nama baiknya. Mohammad Natsir dengan mosi integral dihapus dari sejarah, Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden PDRI digelapkan, dan Burhanuddin Harahap, perdana menteri penyelenggara Pemilu I yang demokratis, dilupakan. *Jaja bangmawinga-winga*, dada merah membara. Kita marah dengan ketidakadilan.

Pada jaman orde lama, menuntut keadilan itu kontra-revolusi. Pada jaman orde baru, menuntut keadilan itu dilarang. Mengingat

pengalaman-pengalaman traumatis itu, kita cenderung untuk menyetujui hasrat mereka untuk mendirikan parpol. Kita sedang marah. Tapi sabar, berhenti, sabar. "Jangan mengambil keputusan waktu marah," begitu diajarkan.

Kalau dihitung-hitung soal penderitaan, lama dan intensitasnya, Masjumi perlu diberi prioritas, baru kemudian NU. Akan tetapi, tulisan ini dengan perasaan haru dan hormat terpaksa mengatakan: "Ya kami sungguh-sungguh mengerti penderitaan itu. Tapi maaf, Masjumi dan NU sebagai parpol Islam adalah masa lalu." Hampir-hampir sama dengan Kasospol ABRI Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan: "Soekarno dan Soeharto adalah masa lalu."

Agama. Agama (Islam) itu berdimensi banyak, sedangkan politik itu hanya berdimensi tunggal, yaitu dimensi rasional. Agama terdiri dari akidah, akhlak, ibadah, syariah, dan muamalah. Dalam muamalah-lah terletak politik. Muamalah masih harus dirinci lagi: politik, ekonomi, sosial, kesenian, pendidikan, kelas, perkumpulan, dan sebagainya. Dalam kegiatan ekonomi, mendirikan perusahaan tidak diatur agama. Dalam kesenian, jadi ekspresionis atau impresionis tidak diatur agama. Dalam pendidikan, belajar matematika atau sosiologi tidak diatur agama. Dalam masyarakat, merasa bagian dari kelas menengah atau kelas bawah tidak diatur agama. Mau bergabung dengan perkumpulan sepak bola atau tenis tidak diatur agama. Demikian pula dalam politik, di masa lalu ikut PPP, atau Golkar, atau PDI, tidak diatur agama. Politik hanya bagian sangat kecil dari agama, sepersekiannya. Semua boleh, kecuali yang dilarang. Mendirikan "Partai NU" boleh, membangkitkan Masjumi tidak dilarang. Tapi tunggu! Pertimbangkan manfaat dan mudharatnya.

Kemungkinanya sangat besar bahwa kegiatan politik akan melahirkan *political man*. Manusia berdimensi tunggal ini tentu saja bukan manusia berdimensi banyak, manusia yang utuh. Definisi politik sebagai *"the art of the possible"* atau "tidak ada kawan abadi, yang ada ialah kepentingan abadi" cenderung berlaku. Akibatnya, politik yang dalam pandangan Islam seharusnya *istiqamah* (memegang teguh kaidah, konsisten) dan transparan menjadi oportunistik dan tertutup.

Itulah yang terjadi antara NU dan Masjumi yang saling bersaingan di masa lalu. Itulah yang terjadi dengan Partai Islam Perti (dulu) pada pra-1965. Sebagai partai kecil, keberadaan Partai Islam Perti akan diakui bila waktu itu mau mendukung PKI. Eksistensi partai

berada di atas eksistensi Islam. Bukan tidak mungkin terjadi kasus tanpa kaidah, kasak-kusuk, dan "dagang sapi" bagi parpol Islam.

Political man bisa berubah menjadi *political animal*, yaitu kalau orang sudah mengidap penyakit, katakanlah namanya *politico complex*. Politik akan mengakhiri sifat berdimensi banyak dari agama. Jika politik sudah meninggalkan akidah, akhlak, ibadah dan syariah, maka berarti anak sudah membunuh bapaknya sendiri. "Itu hanya kekhawatiran, tidak akan terjadi," kata orang. Kita pesimis, sejarah adalah guru yang jujur. Sejarah cenderung terjadi lagi.

Sejarah mengajar bahwa reduksionisme agama-agama yang berdimensi banyak menjadi politik yang berdimensi tunggal akan menjebak umat dalam petualangan politik yang berbahaya bagi *ukhuwah islamiah*.

Politik. Politik orde baru adalah guru yang jelek. Pada waktu itu, negara betul-betul *ambaudhendha* (serba kuasa). Negara berkuasa untuk membagikan kemakmuran ekonomi (KKN, proyek-proyek), berkuasa untuk membagikan kemakmuran sosial (bintang jasa, hadiah-hadiah), berkuasa untuk memberi kekuasaan (pengangkatan, promosi), dan berkuasa atas sistem simbol (memasukkan aliran kepercayaan dalam GBHN, penataran P4, ijin pementasan).

Hanya dalam sebuah rejim totaliter seperti orde baru itu semua dapat terjadi, politik menjadi irasional. "politik sebagai panglima" diterapkan secara diam-diam, meskipun di permukaan namanya adalah "pembangunan sebagai panglima". Apa yang yang dalam orde lama diterapkan secara terang-terangan, oleh orde baru diambil alih di bawah tangan.

Oleh karena itu, sifat format politik harus dirampingkan. Dengan kata lain, dibuat rasional. Negara yang mempuanyai kekuasaan aktual dan simbolis tidak terbatas harus dipangkas. Digantikan oleh kekuasaan yang aktual yang terbatas kepada hal-hal rasional, seperti mengatur ekonomi, perpajakan, perumahan, pendidikan, *law enforcement*, keamanan, ketertiban, dan hubungan internasional. Negara sama sekali lepas tangan dari kekuasaan atas sistem simbol, seperti agama, kepercayaan, kebudayaan, sistem pengetahuan, dan kepribadian bangsa.

Dapat saja sebuah departemen teknis diminta untuk mengurusi hal-hal simbolis, tapi tak diatur oleh negara. Jadi, gambaran kita tentang politik yang rasional ialah negara yang terbatas, dibatasi oleh wewenangan masyarakat. Kalau politik menjadi semata-mata ra-

sional, teknis, dan objektif, maka tidak perlulah ada partai-partai agama. Partai agama diperlukan karena dalam benak kita tergambar negara totaliter semacam negara dalam Orde Baru yang menguasai segala-galanya. Kalau totalitarianisme itu hilang, agama hanya perlu sampai ke tingkat ormas, bukan parpol.

Agama yang hanya sampai di tingkat ormas bukan berarti tidak berarti agama yang banci, mandul, dan impoten. Banyak cara bagi ormas agama untuk menunjukkan kepedulian kepada bidang politik. Agama hanya sampai pada tingkat ormas ialah untuk menjaga jangan sampai agama kena getah politik. Keberadaan parpol itu hanya timbul tenggelam. Bisa saja sebuah parpol menjadi mayoritas kemarin, besok pagi bisa menjadi minoritas. Kalau ada parpol Islam, parpol Islampun akan timbul tenggelam dalam sejarah politik. Untuk itulah, seyogyanya NU tetap pada *khittah* 1926 dan Muhammadiyah tetap ber-*high politics*, bergerak dalam politik murni, tetapi tidak terlibat dalam politik praktis.

Agenda Nasional. Pada 1945, umat dengan suka rela memberi konsesi kepada nasionalisme dengan menghapus tujuh kata ("dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya") dari Piagam Jakarta. yang kemudian menjadi pembukaan UUD 1945. Penghapusan kata-kata itu menunjukkan kepedulian umat dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Tampaknya, sekali lagi dalam jaman orde reformasi ini konsesi semacam yang terjadi pada tahun 1945 itu sangat diperlukan, kali ini dua macam. *Pertama*, umat Islam perlu melepaskan hak-haknya yang sah untuk mendirikan parpol, demi masa depan bangsa. *Kedua*, umat Islam mempelopori pembentukan sistem politik yang rasional.

Tentu saja hal itu tidak mudah, sebab akan ditentang oleh umat sendiri. Tidak ada kelompok sosial yang selama ini menganggap peristiwa 1945 itu sebagai konsesi. Ketika Masjumi menjadi partai terlarang di jaman Orla, ketika NU dikucilkan di jaman Orba, ketika umat mengalami marginalisasi (1970-1990), ketika terjadi peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, ketika para Dai harus punya SIM (Surat ijin Mubaligh) tidak ada kekuatan sosial dalam tubuh bangsa yang membela. Tiba-tiba sekarang umat Islam diminta memberikan konsesi kepada bangsa. "politik macam apa ini? Umat diminta untuk bunuh diri? Ingat, *Islamo-fobia* selalu siap menerkam," begitu kira-kira tanggapan umat.

Kalau begitu mentalitas umat Islam, maka telah terjadi pe-

nyusutan peran. Umat Islam mau tidak mau adalah mayoritas. Kalau penyusutan peran itu terjadi, maka umat yang mayoritas itu hanya menganggap dirinya sebagai penumpang, bukan pengemudi. Pengemudinya adalah negara atau kelompok non-Islam. Karena itu, umat Islam harus berada di garis depan, bukan di garis belakang. Sekarang ini justru merupakan momentum yang tepat bagi umat Islam untuk berbuat sesuatu. Mumpung ada pencairan di bidang politik. Bila umat Islam bersedia memberikan konsesi, bangsa Indonesia akan meloncat ke depan. Bila sebaliknya yang terjadi, sejarah bangsa ini akan bergerak mundur Empat puluh lima tahun kalau dihitung sejak pemilu 1955, atau lima puluh tiga tahun kalau dihitung sejak 1945. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan bangsa ini terletak di tangan umat Islam.

Kesimpulan. Kita setidaknya sudah mempertimbangkan tiga hal. *Pertama*, agama berdimensi banyak, politik berdimensi tunggal. menjadikan agama sebagai politik adalah sebuah reduksi besar-besaran atas makna agama. *Kedua*, politik kenegaraan adalah urusan yang rasional, teknis, dan objektif saja. Umat harus kembali ke khittah 1926 atau memberlakukan *high politics*. *Ketiga,* umat harus berada di garis depan sejarah dalam pembentukan sistem poltik yang rasional. Jangan ada penyusutan peran. Umat bukan penumpang, melainkan pengemudi. Kesimpulan akhir kita ialah bahwa pembentukan parpol Islam lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Atau, dengan satu kata: Jangan!□

Islam dan Politik

Oleh **Deliar Noer**

TULISAN INI didorong dua perkembangan, yang sebenarnya berkaitan erat sesamanya. *Pertama*, gencarnya pembahasan tentang apa yang disebut "Islam kultural" dan "Islam politik" di pihak lain. *Kedua*, penilaian sebagian kalangan bahwa penggunaan kata Islam (umpamanya dalam partai politik) lebih dimotivasi oleh simbol, bukan isi; atau pun penilaian bahwa Islam merupakan akhlak, tercermin dalam sikap dan perbuatan, sehingga tidak diperlukan kata Islam ini dikaitkan dengan kehidupan politik (mungkin juga dalam pikiran yang bersangkutan dalam ekonomi, sosial, budaya); atau pun "Islam politik" itu mencerminkan perasaan "emosional" saja; atau, berkaitan dengan ini, partai Islam didirikan karena "alasan-alasan emosional semata."

Gencarnya pembagian yang (dikesankan sebagai pemisahan) "Islam kultural" dan "Islam politik" sudah agak lama dimulai, dengan disertai sikap seakan-akan yang "Islam politik" kurang atau tidak cocok dengan masa sekarang (dan ini sudah diperdengarkan sejak awal Orde Baru). Yang "Islam kultural" itulah yang yang dinilai akan menyampaikan umat Islam pada kejayaannya.

Secara Teori. Pembagian ini perlu dipertanyakan, baik secara teori maupun historis. Apalagi kalau pembagian ini diartikan sebagai pemisah. Dalam teori, yang disebut budaya (kultur) mencakup politik —jadi budaya mencakup bidang bidang yang dibahas dalam humaniora, ilmu-ilmu sosial (termasuk ilmu politik), dan ilmu alamiah. Jadi, bidang politik dibahas juga, umpamanya, oleh Antropologi (yang kadang dimasukkan dalam humaniora, kadang dalam ilmu sosial). Sifat dan tingkah laku manusia bisa dikaji dalam humaniora,

tetapi juga —bila berkaitan dengan politik— dalam ilmu politik. Pendekatan tingkah laku (behavioural approach) merupakan salah satu pendekatan dalam ilmu politik. Demikian juga nilai-nilai.

Malah dalam soal nilai-nilai, ajaran tak bisa dilepaskan. Secara mudah bisa kita katakan bahwa nilai-nilai yang ditegakkan oleh Islam —amanah, ikhlas, jujur, adil, satu kata dengan perbuatan, dan sebagainya- harus juga ditegakkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Masalah moral memang menurut Islam harus ditegakkan dalam kehidupan di dunia. Sebagai contoh, masa yang kita hadapi sekarang ini dengan segala macam krisis yang melanda negeri ini. Secara mudah dapat kita katakan bahwa penyebab utamanya adalah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) —hal yang berlawanan dengan nilai dan moral tadi. Oleh karena itu, nilai moral, termasuk agama, perlu dibawakan ke dalam politik dan dalam kehidupan dunia umumnya.

Perlu juga diperhatikan bahwa Islam mengandung hukum, yang isinya bukan sekedar suruhan dan larangan, melainkan juga pembiaran (mubah), "yang dipujikan" atau anjuran (sunnah), dan "yang tidak disukai" walau boleh (makruh). Maka, tiap sikap dan perbuatan dalam Islam bisa termasuk ke dalam salah satu katagori yang lima ini. Ini berbeda dari hukum pada umumnya yang berlaku dalam jaman modern yang dipengaruhi oleh barat, yang pada umumnya membatasi pada masalah "boleh" dan "tidak boleh". Yang pertama bisa dibiarkan, yang kedua dilarang dan oleh karenanya bisa dihukum.

Oleh sebab itu, secara teori dan paham, tiap bidang termasuk hal yang sangat dipedulikan oleh Islam, disertai dengan akibat-akibat hukumnya. Pemahaman seperti inilah yang ingin ditegakkan oleh seorang Muslim, secara pribadi, masyarakat, maupun negara — dalam prinsip yang diharapkan bisa terwujud dalam kenyataan.

Hitoris. Secara historis dapat kita katakan bahwa pelopor pergerakan nasional adalah Syarikat Islam (1912) yang berasal dari Sjarikat Dagang Islam. Benar bahwa Boedi Oetomo didirikan pada tahun 1908, tetapi ketika itu, malah setelah tahun belasan juga, pahamnya lebih untuk menegakkan *Groot Java* (Jawa Raya), seperti yang memang disebut dalam anggaran dasarnya. Yang dimaksudkan dengan Jawa Raya adalah pulau Jawa, Madura, dan Bali, sehingga orang-orang yang berasal dari luar ketiga pulau itu baru jauh kemudian (sekitar tahun 1930-an) bisa menjadi anggota Boedi

Oetomo. Pada tahun 1916, pada saat Sjarikat Islam sudah mulai bicara tentang nasionalisme Indonesia, beberapa tokoh Boedi Oetomo masih mempertahankan *Javaansch nationalisme* (nasionalisme Jawa).

Perasaan kebangsaan seperti ini terus dipegang oleh organisasi sosial dan partai-partai Islam kemudian, juga sesudah kita merdeka. Pertanyaan memang bisa dikemukakan tentang Darul Islam dan Negara Islam Indonesia. Tetapi seperti yang dikatakan oleh H. Agus salim (dalam kuliahnya di Universitas Cornell pada 1953), persoalan Darul Islam dan NII di Jawa Barat ini disebabkan oleh pendekatan yang kurang memperhatikan segi psikologis mereka yang tergabung dalam Hisbullah dan Sabilillah di daerah ini.

Ketika TNI Angkatan Darat pada akhir tahun 1948 kembali berhijrah dari Yogjakarta ke Jawa Barat —sebagai akibat persetujuan Renville; Hisbullah dan Sabilillah tidak ikut pindah ke Yogjakarta karena ingin terus mempertahankan Jawa Barat dari pihak Belanda— saling pengertian menghadapi Belanda kurang terbina. Juga kemudian setelah kabinet Natsir pada tahun 1950 menjalankan pendekatan persuasif terhadap Kartosuwiryo agar kembali ke pangkuan RI, pertimbangan psikologis tidak atau sangat kurang diperhatikan pihak Angkatan Darat. Padahal, sudah terdapat tanda-tanda bahwa Kartosuwiryo akan kembali ke pangkuan RI.

Pada umumnya kebangsaan yang itu kuat pada Masjumi, NU, dan partai Islam yang lain, juga setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949. Malah kerja sama dengan pihak lain, termasuk Katolik, Protestan, nasionalis, dan sosialis, bisa dijalin terus. Tetapi, kerja sama ini tidak dilakukan dengan PKI. Sekiranya Konstituante dibiarkan menyelesaikan pekerjaannya, sudah jelas lembaga undang-undang dasar yang baru ini akan berhasil.

Masalah PRRI bukanlah soal yang berkaitan dengan masalah agama. Dalam PRRI tersebut ikut juga, malah ada kalanya di depan, orang-orang yang beragama Kristen, atau pun panglima daerah (diantaranya ada yang beragama kristen juga). Pada pergolakan tahun 1965 dan belakangan tahun 1998, umat Islam turut memberikan sahamnya (seperti juga umat beragama lain). Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa dalam lintasan sejarah di negara kita, ajaran dan nilai-nilai Islam bukan merupakan masalah dalam menegakkan negara dan bangsa Indonesia.

Contoh dari Nabi. Lebih-lebih lagi kalau kita perhatikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Moral baginya harus benar-benar ditegak-

kan. Hukum Islam ditegakkan dengan toleransi terhadap berlakunya hukum agama lain, termasuk Kristen dan Yahudi. Dalam pengertian di masa modern ini, moral ini terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga dalam menghadapi agama-agama lain. Nabi Muhammad SAW juga menghormati orang-orang Nasrani yang datang dari Najran di Madinah dan menerapkan hukum agama Yahudi bila ada orang Yahudi yang yang melanggar ketentuan yang tertera dalam Piagam Madinah (Piagam Madinah ini bisa disamakan dengan konstitusi dalam negara modern). Ia sengaja pergi mengunjungi pendeta yahudi untuk keperluan tersebut.

Dan selama masa khalifah yang ratusan tahun itu (terakhir Khalifah Usmaniah di Turki pada tahun 1920-an), pengadilan terbagi atas hukum agama: Islam untuk umat Islam, Kristen untuk orang Katolik dan Protestan serta Ortodoks Yunani (dengan ketentuan masing-masing); Yahudi untuk orang Yahudi; juga orang Kopt (agama tua di Mesir), punya pengadilan sendiri.

Sebagai catatan, perlu juga disebutkan bahwa kalangan Islam di Konstituante merelakan berlakunya hukum agama yang berbeda-beda di Indonesia (Islam, Protestan, dan Katolik) bagi penganut masing-masing.

Tetapi kalau kita bicara secara historis, maka pemisahan antara "Islam Kultural" dan "Islam Politik" mengingatkan kita pada kebijaksanaan yang dianjurkan oleh pakar Islam C. Snouck Hurgronje kepada pemerintahan Hindia Belanda sekitar permulaan abad ini. Yaitu, agar pemerintahan Hindia Belanda membiarkan "Islam ibadah", tetapi menghalangi, malah melarang, "Islam politik". Dalam rangka ibadah itu, pemerintah Belanda malah turut membantu orang-orang Islam, antara lain dengan membantu mendirikan beberapa masjid di Kota Raja, Palembang, dan sebagainya. Mereka malah melarang gereja didirikan di Aceh dan di Banten. Juga perjalanan ibadah haji, yang pada abad lalu dipersulit, dengan nasihat Snouck Hurgronje dipermudah oleh pemerintah Belanda.

Perlu Kesatuan. Akan tetapi, dan ini berkaitan dengan penilaian "Islam sebagai moral, sikap dan perbuatan" di atas, dan tidak mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik juga kita perhatikan bahwa moral dan nilai agama itu bisa putus dari kehidupan masyarakat dan negara. Akibatnya, seperti dikatakan di atas, KKN pun merajalela.

Baik juga diingat bahwa dalam jaman pergerakan dahulu hu-

bungan tokoh-tokoh organisasi sosial Islam dengan dengan organisasi partai politik Islam, juga sesudah merdeka tetapi di masa sebelum demokrasi terpimpin, sangat intim, sekurang-kurangnya tidak mengandung kecurigaan, apalagi secara terbuka. Umpamanya, pada tahun 1938 terbentuk Majelis Islam A'laa Indonesia yang mencakup organisasi sosial Islam (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) dan juga partai politik (PSII).

Di masa revolusi, partai politik Masjumi mulanya praktis mencakup organisasi-organisasi sosial Islam (Kecuali Perti, dan mulai 1947 PSII kembali menjadi partai). Tetapi yang sangat menggembirakan adalah tokoh-tokoh organisasi sosial tersebut (termasuk tokoh-tokoh pendidikan, baik di pesantren maupun di sekolah yang sudah modern) tidak hanya membiarkan atau menonton saja dalam mengikuti perkembangan organisasi politik Islam, melainkan banyak membantunya: dengan buah pikiran, dan kalau mungkin dengan dukungan atau cegahan. *Amar ma'ruf nahi munkar* memang ciri khas dalam sikap dan perbuatan Muslim dan Muslimah.

Hal seperti ini perlu dibangkitkan kembali pada masa sekarang dan masa depan. Agaknya, disinilah terletak *ukhuwah Islamiyah* itu, persaudaraan yang diterapkan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam rangka inilah, baik emosi (yang tidak berlebihan tentunya) maupun rasio (akal pikiran), menuntut kita bersikap demikian. Emosi saja atau pun rasio saja, akan membuat kita lepas dari keseimbangan. Kita memang seharusnya merupakan *ummatan wasathan*, umat menengah, dalam sikap dan perbuatan. Oleh sebab itu, kesatuan berbagai bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, (semua termasuk dalam budaya, atau pun budaya tercermin dalam bidang itu), merupakan hal yang biasa. Demikian juga hubungan sosial perasaan (emosi) dengan rasio (akal). Dalam hubungan dengan Islam, tentu Islam itu mencakup semuanya; dan ini, seperti dikemukakan di atas, dicerminkan dalam pengertian hukum dalam Islam.

Mudah-mudahan pencakupan yang demikian yang ditegakkan oleh partai-partai Islam, dan didukung oleh organisasi masyarakat Islam dalam berbagai bidang, juga oleh Muslim dan muslimah yang berada umpamanya diluar organisasi Islam; sesuai pula dengan ajaran bahwa Islam itu "rahmat bagi sekalian alam". Dengan demikian,memang partai politik Islam diperlukan sekali. Semoga Allah SWT memberi kita taufik dan hidayah-Nya. Amin.□

Islam Politik dan Islam Struktural

Oleh **Masykuri Abdillah**

DALAM wacana tentang orientasi, gerakan atau aktivitas Islam di negara ini sering digunakan istilah-istilah : "Islam kultural", "Islam struktural" dan "Islam politik". Istilah "Islam kultural" dan "Islam struktural" tidak lazim dipergunakan dalam wacana Islam di luar Indonesia, meskipun istilah-istilah ini sebenarnya cukup tepat untuk menjelaskan fenomena perkembangan Islam yang terjadi di Indonesia maupun di dunia Islam lainnya.

Memang terdapat sedikit perbedaan antara orientasi dan gerakan Islam di Indonesia dengan di luar, yakni adanya orientasi hampir semua gerakan Islam di luar Indonesia pada Islam struktural dan ideologis, meski tidak semuanya mendukung atau terlibat dalam Islam politik. Namun penggunaan istilah-istilah ini sering kurang pas, terutama tentang "Islam struktural" dan "Islam politik" yang sering di anggap identik.

Untuk memperjelas hal tersebut kita perlu membedakan karakterisasi Islam ke dalam dua perspektif. *Pertama* adalah sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam, termasuk dalam konteks tranformasi sosial dan pembentukan sistem nasional, yang dikelompokkan ke dalam Islam kultural dan Islam struktural. Islam kultural mengandung pengertian bahwa sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam dilakukan melalui upaya-upaya yang menekankan pada perubahan kesadaran dan tingkah laku umat/masyarakat tanpa keterlibatan negara dan tanpa perubahan sistem nasional menjadi sistem yang Islami. Sedangkan Islam struktural menekankan upaya-upaya ini melalui penetapan sistem nasional maupun kebijakan publik yang Islami. Upaya semacam ini tidak seharusnya dilakukan melalui par-

tai politik Islam, meskipun tentu saja mengharuskan adanya *political will* dari para pengambil kebijakan publik ini.

Kedua adalah gerakan atau aktivitas Islam, yang dikelompokkan ke dalam gerakan Islam kultural dan Islam politik. Gerakan Islam kultural adalah aktivitas umat Islam untuk memperjuangkan aspirasinya melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat non-politik, seperti melalui organisasi massa, aktivitas dakwah, lembaga-lembaga sosial, dan sebagainya. Sedangkan pengertian gerakan Islam politik sudah jelas, yakni aktivitas Islam melalui partai politik Islam, yang bisa diidentifikasikan melalui penggunaan nama, asas, tujuan ataupun simbol Islam. Sebagaimana dalam hal Islam struktural, Islam politik ini bisa hidup secara wajar jika didukung sistem dan iklim politik yang memberikan kebebasan munculnya multipartai, termasuk partai agama.

Meskipun hubungan antara kedua perspektif tersebut sangat dekat dan sulit dipisahkan, tetapi terdapat perbedaan yang jelas di antara keduanya, terutama dalam hal pengertian Islam struktural dan Islam politik. Memang pada umumnya orang yang mendukung Islam struktural akan mendukung Islam politik; dan sebaliknya, orang yang mendukung Islam politik akan mendukung Islam struktural. Namun dalam kenyataannya tidak selalu demikian, yang dibuktikan baik oleh sikap politik para tokoh Islam maupun praktik politik yang ada di Indonesia. Yang hampir dapat dipastikan adalah bahwa semua pendukung Islam struktural dan Islam politik mendukung juga Islam kultural, tetapi para pendukung Islam kultural umumnya tidak mendukung Islam struktural maupun Islam politik, meskipun akhir-akhir ini terjadi pula perubahan orientasi pada tokoh-tokoh tertentu.

Pada masa demokrasi parlementer, memang tidak ada perbedaan antara Islam struktural dan Islam politik, karena para tokoh partai Islam mendukung keduanya. Mereka mendukung partai Islam dan pembentukan sistem yang Islami, termasuk dukungan kepada gagasan Islam sebagai dasar negara dalam sidang-sidang Konstituante, yang kemudian dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Demikian pula pada masa-masa Orde Baru, kondisi semacam ini masih sama. Namun hal ini kemudian berubah, dengan kebijakan pemerintah Orba tentang deideologisasi partai politik dan depolitisasi Islam. Pada tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, baik Islam struktural maupun Islam politik mendapatkan restriksi dari pemerintah,

sehingga muncul gerakan-gerakan dan orientasi Islam kultural, terutama yang ditokohi oleh Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Keduanya pun cenderung menolak Islam politik dan Islam struktural.

Di sisi lain, meskipun Islam politik di masa Orba tidak bisa hidup, banyak tokoh Islam yang masih memiliki orientasi Islam struktural. Tentu saja hal ini tidak diekspresikan melalui partai-partai politik, melainkan melalui sarana-sarana lain, seperti ormas-ormas Islam yang dapat berperan juga sebagai interest group atau melalui tulisan-tulisan mereka. Amien Rais (sebelum era reformasi) dan Deliar Noer adalah termasuk tokoh utama berorientasi Islam struktural ini. Sedangkan organisasi Islam yang paling representatif bagi Islam struktural ini adalah Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII), yang didirikan oleh para mantan tokoh Masyumi.

Orientasi ini dalam hal-hal tertentu diakomodasi oleh pemerintah Orde Baru di massa-masa akhir pemerintahannya. Meskipun partai politik Islam —jika PPP dianggap sebagai partai Islam— tidak kuat dan tidak memiliki pengaruh politik yang berarti, ternyata Islam struktural ini dalam beberapa hal mendapat dukungan. Misalnya, dukungan negara pada sistem pendidikan nasional yang mengakomodasi aspirasi keagamaan (Islam), UU Peradilan Agama, dan sebagainya. Dengan alasan mendukung sepenuhnya Islam kultural, beberapa tokoh Islam menolak pelembagaan Islam semacam ini.

Kondisi pada era reformasi ini hampir mirip pada kondisi era demokrasi perlementer, terutama adanya kebebasan berekspresi, mendirikan partai dengan berbagai alirannya, dan sebagainya. Hal ini membawa akibat munculnya kembali orientasi Islam struktural dan Islam politik secara bersamaan dan tanpa hambatan, meskipun dalam kenyataannya terjadi pula perubahan orientasi sejumlah tokoh di atas yang justru berbeda dengan logika ini. Perubahan ini justru mengarah kepada orientasi kebangsaan yang lebih besar daripada orientasi keislaman.

Abdurrahman Wahid, misalnya, semula pendukung Islam kultural, baik dari perspektif institusionalisasinya maupun gerakannya. Kini ia mendukung Islam politik (melalui Partai Kebangkitan Bangsa), tetapi tetap menolak Islam struktural, karena baginya Islam justru harus dipraktikkan oleh umatnya dengan penuh kesadaran tanpa ada campur tangan negara. Ia masih tetap mendukung sosialisasi dan institusionalisasi Islam secara kultural. Dalam konteks politik,

Islam hanya dijadikan sebagai kekuatan politik (*political force*) yang tidak bersifat ideologis, sehingga dalam konteks kehidupan negara, Islam hanya sebagai landasan etika dan moral.

Amien Rais, yang semula merupakan pendukung terkemuka Islam struktural dan Islam politik meskipun tidak terlibat dalam politik praktis, kini terjun memimpin partai politik (Partai Amanat Nasional). Jika disimak dari pernyataan-pernyataannya, ia kini tidak lagi sebagai pendukung Islam struktural, bahkan tidak juga sebagai pendukung Islam politik secara penuh, mengingat keberadaan PAN itu sendiri sebagai partai terbuka. Partai ini tidak hanya didukung oleh umat Islam (terutama warga Muhammadiyah), tetapi juga umat non-Muslim. Perubahan Amien Rais ini bisa jadi karena sejak terjun ke dunia politik praktis ia lebih berorientasi pada realisme politik daripada idealisme politik. Berbeda dengan Deliar Noer, sebagai tokoh pendukung Islam struktural dan Islam politik, kini masih konsisten dengan pendiriannya, dengan mendirikan dan memimpin sebuah partai Islam (Partai Ummat Islam), yang memang berasas dan berorientasi Islam. Sedangkan Nurcholish Madjid sampai kini masih konsisten mendukung Islam kultural, dan nampaknya masih tetap enggan untuk mendukung Islam struktural dan Islam politik.

Meskipun ia terlibat dalam proses pemilu dengan menjadi Ketua Tim 11, tetapi hal ini dilakukan dalam kerangka tanggung jawab moralnya sebagai "guru bangsa" yang nampaknya menjadi pilihannya.

Meskipun banyak dari tokoh Islam yang tidak terlibat dalam Islam politik, mereka masih tetap konsisten dengan Islam struktural, yang diperjuangkan tidak melalui jalur partai politik melainkan melalui lembaga-lembaga sosial maupun ormas-ormas Islam. Salah seorang yang perlu disebutkan disini adalah mantan Hakim Agung, Busthanul Arifin. Sebagai Ketua Sub Komisi Hukum dan Perundangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ia berusaha agar semua perundangan di negara ini sedapat mungkin sesuai dengan Islam, yakni dengan cara pengkajian Rancangan Undang-Undang (RUU) dan memberi masukan-masukan dalam proses penetapan RUU ini menjadi UU.

Kebijakan pemerintah Orba tentang depolitisasi Islam ternyata membawa juga rahmat terselubung (*blessing in disguised*). Karena dengan kebijakan ini para tokoh Islam kemudian tidak hanya mengidentikkan perjuangan Islam dengan partai politik, tetapi juga aktivitas-aktivitas non-politik yang tak kalah strategisnya, yakni pendi-

dikan dan dakwah serta upaya-upaya untuk meningkatkan taraf hidup umat. Kini era reformasi memberi kebebasan kepada warga negara untuk mendirikan partai dengan berbagai aliran, termasuk partai Islam. Banyak tokoh Islam merespons hal ini dengan berlomba-lomba mendirikan partai baru, meski sebenarnya mereka berlatar belakang organisasi atau basis massa yang sama dengan partai lain yang sudah berdiri, atau malahan tidak memiliki basis massa pendukung yang memadai. Demikian pula, banyak tokoh Islam nasional maupun lokal yang kemudian aktif di partai, baik sebagai pengurus, caleg maupun jurkam. Dan dana pun telah banyak dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan partai itu.

Keadaan tersebut tentu mempengaruhi aktivitas Islam di bidang sosial dan ekonomi. Berapa banyak tenaga yang telah tercurahkan dan berapa milyar rupiah dana yang telah dihabiskan untuk aktivitas politik ini. Kalau banyak tokoh ormas Islam atau da'i yang kini beralih ke dunia politik, maka mereka akan mudah digantikan tokoh-tokoh lain yang tadinya belum terjun ke bidang ini karena tiadanya kesempatan. Secara kualitatif tokoh-tokoh baru itu bahkan mungkin tidak kalah dengan mereka yang pindah ke dunia politik. Namun dana untuk aktivitas sosial dan ekonomi akan mengalami pengurangan yang cukup besar, termasuk dana untuk dakwah serta peningkatan kualitas pendidikan dan pendapatan umat yang kini masih rendah. Demikian pula, dana untuk bantuan sembilan bahan pokok (sembako) bagi orang-orang miskin yang jumlahnya kini semakin banyak sebagai akibat krisis ekonomi yang belum berakhir.

Bukan berarti bahwa aktivitas politik itu tidak diperlukan, melainkan bagaimana hal ini dilakukan dengan tetap tidak mengabaikan aktivitas sosial dan ekonomi umat.□

Partai-Partai Islam Indonesia Saat Ini: Antara Formalisme dan Pengembangan Nilai-Nilai Islam

Oleh **Abd A'la**

PADA garis besarnya, partai-partai politik yang didirikan tokoh-tokoh umat Islam dewasa ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar. *Pertama*, partai yang menjadikan Islam sebagai asas dan program formal. *Kedua*, partai yang mementingkan pengembangan nilai-nilai Islam daripada simbol-simbol Islam. Kedua kelompok tersebut memiliki perbedaan pendekatan dalam menangkap ajaran Islam sebagaimana juga keduanya mempunyai perbedaan dalam orientasi dan program.

Pada kelompok partai yang pertama, terjadi ramifikasi dari yang moderat sampai yang fundamentalis meskipun semuanya memiliki pandangan dasar yang sama, yaitu aplikasi Islam dalam tataran formal. Bagi kelompok yang fundamentalis, Islam dilihat sebagai suatu agama yang sudah "jadi". Idiom-idiom dan simbol-simbol Islam bagi kelompok ini sama pentingnya —atau mungkin lebih penting dari esensi ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, orientasi dan program kelompok itu menyebutkan dengan tegas ungkapan-ungkapan yang bersifat Islami.

Sedangkan bagi kelompok partai yang kedua, Islam lebih merupakan nilai-nilai universal yang tidak terbatas pada sekadar idiom-idiom dan simbol-simbol Islam. Dalam anggapan kelompok ini, Islam disamping menentukan dan mengajarkan ritual-ritual formal, secara lebih luas ia juga memberikan landasan nilai-nilai moral universal yang tidak harus dibakukan secara kaku dalam tema-tema for-

mal yang menyebutkan secara tegas kata Islam. Melalui paradigma semacam itu, kelompok ini berupaya memasukkan ke dalam programnya segala dimensi aktivitas yang berorientasi kemanusiaan yang dibingkai dengan nilai-nilai agama yang esensial.

Dengan menggunakan tipologi yang dikembangkan Fazlur Rahman, disini dapat dinyatakan bahwa kelompok partai yang pertama dapat dimasukkan sebagai bagian dari gerakan keislaman yang lebih besar yang sering disebut dengan gerakan neo-revivalisme. Sedangkan kelompok partai yang kedua lebih dekat kepada gerakan neo-modernisme.

Dalam sejarahnya, gerakan revivalisme dalam bentuknya yang fundamentalis sangat menekankan pada slogan-slogan formal. Pada satu sisi, kelompok ini menyatakan bahwa intelektualisme tanpa hubungan dengan dunia praksis hanyalah merupakan alkoholisme intelektual; suatu pernyataan yang perlu mendapat dukungan. Namun pada sisi yang lain, gerakan ini berasumsi bahwa umat Islam dapat mengatasi persoalan-persoalan dunia praktis dengan hanya menggunakan *catchy slogan*, semacam simbol dan slogan-slogan formal. Semua itu dapat dicapai meskipun tanpa dibarengi usaha intelektual serius yang memadai karena dalam anggapan kelompok ini Islam telah mencakup dan memberikan segalanya; bentuk, pendekatan dan nilainya sekaligus.

Menjelaskan gerakan revivalisme, Azyumardi Azra mengungkapkan empat prinsip dasar yang terdapat pada gerakan tersebut. *Pertama*, fundamentalisme dalam agama manapun, termasuk revivalise Islam, mengambil bentuk perlawanan yang kadang-kadang keras terhadap ancaman yang "dianggap" membahayakan eksistensi agama; *kedua*, mereka menolak sikap kritis terhadap *teks* (dicetak miring karena teks adalah yang tersurat, bukan mencakup yang tersirat) dan interpretasinya. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadis harus dipahami secara literal sebagaimana apa adanya; *ketiga*, mereka menolak pluralisme dan relativisme dalam pemahaman agama. Pemahaman yang benar adalah hanya milik mereka, sedangkan pemahaman kelompok lain di anggap kurang, atau tidak benar; dan keempat, mereka juga menolak perkembangan historis dan sosiologis dalam kehidupan dunia. Dengan penolakannya ini, mereka menekankan penyesuaian perkembangan masyarakat kepada teks Kitab Suci, dan bukan menafsirkan teks itu sesuai dengan konteks zamannya.

Dengan keempat prinsip itu, kelompok revivalisme melihat ke-

hidupan dalam batas-batas yang ekstrem tanpa nuansa yang beragam. Kelompok itu memandang pola-pola perkembangan pemikiran dan hasil-hasilnya secara hitam-putih, serta mereka menggunakan pendekatan wacana "kita-mereka". Segala sesuatu yang ada pada "kita" adalah benar dan baik, sedangkan segala sesuatu yang ada pada "mereka" adalah kurang atau tidak benar dan tidak boleh masuk ke dalam dunia "kita".

Sedangkan kelompok neo-modernisme merupakan suatu gerakan dengan paradigma yang melihat Islam dengan dasar Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai suatu kumpulan nilai-nilai komprehensif yang tak terbatas pada dataran formal-simbolik-belaka. Ciri-ciri yang dimiliki gerakan neo-modernisme adalah sikapnya yang menekankan pemikiran Islam harus mampu merespon secara positif dan kreatif terhadap berbagai persoalan dan tantangan modernitas serta perubahan sosial yang terjadi. Demikian pula, kelompok ini sangat peduli terhadap rasionalitas untuk mempertanyakan secara kritis peradaban Islam dalam berbagai dimensinya; politik, sosial, ekonomi dan budaya keagamaan. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa pengetahuan dan segala institusinya harus dipahami secara dinamis dalam kerangka nilai-nilai humanitarianisme-religius.

Melalui sudut pandang semacam itu, kelompok neo-modernisme bersikap apresiatif dan sekaligus kritis terhadap semua pandangan dan nilai-nilai. Semuanya adalah baik selama tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran dasar Islam. Melalui pendangannya ini, mereka memiliki pandangan dan sikap yang toleran kepada kelompok dan pemikiran-pemikiran lain yang berkembang disekitarnya.

Secara tentatif, tipologi revivalisme-neo-modernisme dapat diaplikasikan ke dalam partai-partai politik berbasis umat Islam yang ada di Indonesia saat ini. Sebagaimana telah dijelaskan partai-partai politik yang mempertahankan dengan teguh simbol-simbol Islam dapat dimasukkan kedalam kategori gerakan revivalisme, sedangkan partai-partai politik yang lebih berorientasi pada nilai-nilai Islam bisa dikategorikan ke dalam gerakan neo-modernisme.

Tentu saja kategorisasi ini tidak dapat diterapkan secara kaku tanpa memandang adanya partai-partai politik yang berada di antara dua kutub itu, misalnya Partai Bulan Bintang-nya Yusril. Partai Bulan Bintang menyatakan secara tegas sebagai partai Islam, tetapi orientasi dan programnya sangat memperhatikan dimensi nilai dan

esensi ajaran Islam tanpa terperangkap ke dalam slogan-slogan simbolik. Meskipun demikian, kategori itu tetap dapat diaplikasikan secara umum kepada partai-partai Islam Indonesia saat ini. Hal itu dapat dibuktikan melalui munculnya perbedaan dan bahkan "serangan" dari satu partai politik yang menganggap dirinya Islam kepada partai politik lain yang berbasis umat Islam. Serangan-serangan itu bukan hanya dalam bentuk yang moderat, tetapi mengarah kepada sikap untuk mengkafirkan kelompok lain. Sikap ini jelas menunjukkan sifat-sifat yang bernuansa fundamentalis. Di pihak lain, ada partai dengan pendukung umat Islam yang tidak perlu mengungkap secara tegas simbol-simbol Islam meskipun berjuang untuk kepentingan Islam universal. Pada sisi ini tipologi itu mempunyai relevansi untuk dijadikan dasar analisis. Selanjutnya, melalui tipologi tersebut, dapat diketahui posisi partai-partai yang ada dalam rangka pengembangan kesadaran yang bertujuan meminimalisasikan segala sesuatu yang negatif dan mengembangkan segala hal yang positif.

Anggapan bahwa kelompok sendiri yang paling benar dan kelompok lain sesat atau keliru merupakan anggapan yang harus disikapi dan dikaji secara bijak oleh para pemimpin agama dan partai. Dalam perspektif ini, Komaruddin Hidayat mengingatkan bahwa doktrin keagamaan tidak pernah lepas dari keterlibatan subyektif yang berbentuk penafsiran dan kecenderungan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, siapapun orangnya atau apa pun kelompoknya, ia akan dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan fakultas pribadi atau kemampuan yang dimilikinya dalam memahami dan menghayati agamanya. Adanya perbedaan tidak harus dinafikan, namun sebaliknya ditanggapi secara arif oleh mereka secara bersama-sama. Dalam tataran ini, diperlukan suatu kesadaran dari mereka, khususnya elit pemimpin partai dan agama untuk memahami realitas keberagamaan yang ada tanpa harus memaksakan keyakinannya sendiri, apalagi sampai menyerang kelompok lain. Apa pun bentuknya, semua partai yang berbasis massa Islam mempunyai orientasi dan program kepada pengembangan Islam sebagai rahmat bagi bumi dan penduduk Indonesia secara khusus, dan dunia global secara umum, sebagaimana sering dinyatakan sendiri oleh para pemimpinnya.

Sebagai suatu realitas, adanya perbedaan itu tidak dapat diabaikan. Perbedaan itu menuntut adanya kesadaran bagi mereka semua yang terlibat bahwa masing-masing harus menghargai orang atau

kelompok lain karena kebenaran yang diraih manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran absolut. Demikian pula kesadaran bahwa masing-masing berupaya untuk mendekati kebenaran yang hakiki tanpa menafikan upaya orang atau kelompok lain yang juga berbuat hal yang sama. Melalui kesadaran ini, diharapkan munculnya dialog yang kondusif untuk mengembangkan sikap saling memahami di kalangan elit pemimpin partai dan agama, yang kemudian disosialisasikan kepada kalangan *grass root* yang mayoritas. Model pendekatan ini merupakan salah satu cara bagi penciptaan kehidupan yang lebih damai, penuh persahabatan dan kerja sama; dan selanjutnya mudah-mudahan akan meniadakan sikap mau menang sendiri dan menyalahkan orang atau kelompok lain yang akhirnya hanya akan menjadikan negeri ini sebagai neraka bagi kita sendiri.□

Antara Asas Islam dan Asas Pancasila

Oleh **Abdurrahman Wahid**

DALAM salah satu "serangan" mereka terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), para mubalig sebuah partai selalu menyatakan bahwa PKB bukanlah partai Islam. Sebab, menurut mereka, PKB tidak mencantumkan asas Islam dalam Anggaran Dasar (AD)-nya, melainkan berasaskan Pancasila. Benarkah ini? Apa sebabnya sampai menjadi demikian? Dengan begitu, apakah PKB tidak meninggalkan agama terakhir tersebut?

Sederetan pertanyaan itu, tentunya mengganggu pikiran banyak warga NU, karena organisasi ini adalah organisasi agama. Dengan demikian, harapan para anggota dan simpatisannya agar partai itu berasaskan Islam, agaknya semakin jauh dari kenyataan yang ada. Kalau begitu, menjadi relevanlah tuduhan tersebut.

Untuk memberikan jawaban atas semua masalah itu, sebenarnya sangatlah sederhana. Yaitu, bahwa PKB memang bukan partai Islam. Karena apa? Karena, kita memang tidak memerlukan partai berasaskan tersebut, meskipun para anggota dan simpatisannya kebanyakan berasal dari NU, sebuah organisasi Islam. Mengapakah demikian?

Karena, yang demikian itu merupakan kenyataan sejarah yang sejak dulu selalu diabaikan oleh para pemimpin umat Islam, sebagai akibat banyaknya mereka yang bukan anggota organisasi Islam tidak mau mencoblos tanda gambar partai yang tidak berasaskan Islam. Dan sebaliknya pula, kebanyakan warga organisasi yang tidak berasaskan Islam itu, juga segan mencoblos partai yang berasas Islam, sebagai akibatnya.

Ini adalah sebuah pengkotakan terhadap mereka yang menggu-

nakan asas Islam dengan mereka yang tidak dalam berorganisasi maupun berpartai. Ini berarti pula, telah terjadi pembatasan dalam "perjuangan Islam " yang hanya diperuntukkan bagi mereka yang menggunakan organisasi dan partai yang berasaskan Islam belaka. Yakni, sesuatu yang tidak menjadi keinginan kita bersama, karena umat Islam lalu hanya dibatasi pada warga organisasi atau partai yang berasaskan Islam saja.

Padahal, dalam kenyataan tidaklah demikian halnya. Mereka yang beragama Islam banyak yang menjadi warga organisasi atau partai yang tidak berasaskan Islam. Dengan kata lain, sebenarnya, kita sendiri yang membatasi jumlah umat Islam di negeri kita yang jumlah penduduknya lebih dari 85% beragama Islam.

Tetap memperjuangkan ajaran Islam

Persoalannya, apakah dengan tidak mencatumkan asas Islam PKB lalu tidak memperjuangkan Islam? Dalam kenyataannya, hal itu tidaklah demikian. PKB tetap memperjuangkan tegaknya ajaran Islam. Tapi, tidak melalui pelaksanaan hukum Islam dalam sebuah negara yang menjadi milik kita bersama.

Miliknya mereka yang beragama Islam maupun yang bukan, warga negara yang berasal dari ras Indonesia asli maupun yang tidak serta bagi mereka yang melarat maupun yang kaya. Artinya, PKB memperjuangkan berlakunya hukum Islam melalui cara lain; pendidikan dan dakwah. Ini berarti, bahwa perjuangan penegakan hukum Islam bukan hanya terletak di bidang politik, melainkan pada penegakan moralitas atau akhlak bangsa.

Kita lihat, misalnya, mereka yang —katanya memperjuangkan kepentingan Islam melalui negara, kebanyakan hanyalah memperjuangkan kepentingan politik atau ideologis yang mereka miliki sendiri. Bahwa, "kepentingan Islam" yang selalu ribut dipersoalkan akhirnya menutup kepentingan politik sendiri tanpa henti-hentinya. Bahkan tindak kekerasan pun mereka lakukan, semuanya atas nama Islam.

Contoh utama dalam hal ini adalah apa yang terjadi di Ambon pada saat sekarang ini. Bukankah atas nama Islam telah dilakukan pembunuhan dan pembantaian atas diri orang-orang Kristen. Bukankah itu dilakukan karena "membalas" serangan orang-orang beragama lain?.

Padahal, belum tentu demikian kenyataannya, karena uraian me-

reka yang menjadi korban ternyata jumlahnya cukup besar, dibandingkan dengan orang Islam sendiri yang turut melakukan "serangan". Lalu, apa yang mendorong mereka untuk melakukan hal itu, kalau bukan karena kepentingan ideologis maupun politik.

Bukankah, dengan begitu, berarti Islam digunakan untuk kepentingan kelompok? Dengan menghalalkan segala cara? Padahal, kaum muslimim sejak awal telah dilarang untuk bertindak keras kecuali kalau diserang.

Sedangkan untuk membuktikan adanya serangan itu apakah dari kalangan non Muslim, haruslah dikaji secara mendalam, bukannya ditentukan secara serampangan. Bukankah sudah dinyatakan "jika datang orang munafik dengan sebuah berita hendaknya kalian menggali dengan jelas (*idza jaa'a faasiqun binaba'in fatabayyanuu*)".

Bukankah kitab suci Al-Qur'an telah menyatakan bahwa kita memang dibuat berbeda-beda; "Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal mengenal" (*Wajaalnaakum syu'uban wa qabaa ilaa li ta'aarafu*). Tentu, ada yang menyanggah pernyataan di atas dengan mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen justru akan melawan hal ini.

"Tidaklah orang-orang Yahudi dan Kristen rela kepada-Mu (wahai Muhammad) sampai engkau mengikuti agama mereka" (*wa lantardlo anka al-yahudu wa la An-Nashoro hatta tattahi'a millatahum*). Ternyata, jawabnya mudah sekali; bahwa yang dimaksudkan di sini bukanlah persoalan mu'amalat atau amal perbuatan kita, melainkan kita tidak boleh berganti keyakinan hanya karena mengikuti kepercayaan orang lain.

Bukan masalah prinsip

Maka, jelaslah, dengan demikian bahwa pelaksanaan hukum Islam tidak hanya dihasilkan oleh perjuangan politik atau ideologis, melainkan bisa juga dengan pendidikan dan tablig. Terlebih lagi, ini diperlukan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, di negeri yang demikian besar keragamannya seperti negara kita.

Apa yang tidak bisa dihasilkan melalui perjuangan politik maupun ideologis haruslah ditekuni melalui perjuangan pendidikan dan penyiaran agama, dengan sebutan lain secara moral.

Inilah rahasia Al-Qur'an seperti yang dimaksudkan oleh ayat, "*fatabayyana arrushdhu minal ghayyi*". Telah jelas mana yang lurus dan mana yang palsu. Juga, dari sudut pandang ini harus dipahami fir-

man Allah SWT. "Tiada paksaan dalam beragama" (*laa ikraha fi ad-dien*). Bahkan, Allah memerintahkan manusia untuk beragam agama, "bagimu agamamu dan bagiku agamaku" (*lakum dinukum waliya-dien*).

Bahkan, dalam hal perbedaan agama, kita diperintahkan berbeda keyakinan, tetapi boleh bersama-sama dalam hal perbuatan. "Bagi kami amal perbuatan kami dan bagi kamu amal perbuatan kamu" (*walana a'maluna walakum a'malukum*).

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa perbedaan cara dan metode bukanlah masalah prinsip, hingga membahayakan persatuan dan kesatuan. Amal perbuatan bolehlah sama, yang membedakan hanyalah keyakinan yang melatarbelakanginya.

Karena itu, tidaklah tepat kalau kita mencapuradukkan antara yang prinsip dan yang bukan, karena asas organisasi bukan menjadi sesuatu yang prinsip dalam perjuangan kita. Oleh karena itu, boleh saja kita berbeda asas tapi masih tetap menjadi orang Islam.

Dengan uraian di atas, menjadi jelaslah, bahwa berpikir tanpa asas Islam dalam perjuangan, bukanlah sesuatu yang ditentang oleh Islam. Bukankah nanti hasilnya adalah sebuah moralitas berdasarkan agama? Bukankah ini yang menentukan corak perjuangan yang tidak menggunakan kekerasan dan menghindari tindakan yang merobek-robek kesatuan dan persatuan bangsa?

Padahal, kenyataan tersebut merupakan sejarah dari masa lampau yang tidak patut diteruskan pada masa mendatang. Bukankah keberagaman kita sebagai bangsa mengharuskan kita menggunakan prinsip itu? Dan bukankah sebaliknya, memaksakan hukum Islam melalui instrumen (perangkat) negara, hanyalah merupakan sesuatu yang bersifat pemaksaan?

Di alam penjajahan, kita sebagai bangsa tidak ingin dipaksa-paksa oleh orang dengan alasan apa pun. Bukankah dengan demikian berarti kita dilarang melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kehendak juga?□

Reformasi Politik Islam

Oleh **Fikri Yathir**

IBNU SYUJA'I, bukan nama bohongan, adalah kiai kampung. Usianya sudah lanjut. Orang-orang di kampungnya tahu bahwa masa muda kiai itu dihabiskannya dalam perjuangan Islam. Pada zaman Belanda ia dijebloskan ke penjara. Pada zaman Jepang, ia pernah disiksa Kenpetai. Pada zaman Orde Lama, ia diuber-uber karena dianggap memberontak. Pada zaman Orde Baru, ia dapat beristirahat, kecuali pada waktu pemilu. Dalam usia tuanya ia masih saja harus berurusan dengan Koramil setempat.

Saya menyarankan kepadanya agar mengikuti saran Pak Koramil. Tak ada gunanya membela PPP karena PPP tidak begitu berbeda dengan Golkar. Tetapi ia membentak saya. "Selama masih ada wadah umat Islam, sampai mati saya akan mempertahankan wadah itu." Memang terbukti, di kampungnya pemilu dimenangkan oleh partai berlambang bintang itu. Jalan aspal dibangun dari jalan raya utama dan berakhir sebelum sampai ke kampungnya. Hampir-hampir listrik pun tak sampai ke situ.

Ia tidak suka Sukarno karena, menurutnya, presiden Indonesia yang pertama itu menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunis. Selama tiga puluh tahun Orde Baru, ia tidak suka Soeharto. Sampailah satu malam yang sangat historis —malam Lebaran. Ia menyaksikan Soeharto muncul dipanggung dengan mengenakan peci putih dan baju takwa. Soeharto mengambil mikrofon, dan dengan suara yang serak-serak basah melantunkan takbir. Ibnu Syuja'i tua merebahkan dirinya sujud. Air matanya membasahi tempat sujudnya. Tiba-tiba Ibnu Syuja'i pemberontak berubah menjadi Ibnu Syuja'i yang sangat mencintai Soeharto.

Saya tidak tahu bagaimana reaksinya ketika menyaksikan lengser keprabon-nya. Ia sudah sangat sepuh. Ia tak sempat lagi menonton televisi hitam putihnya, Ia juga sudah tidak bisa mendengar dengan baik, walau tak bisa disebut tuli sama sekali. Saya juga hampir melupakan dia. Minggu-minggu belakangan ini, ketika banyak umat Islam mendirikan partai Islam, saya teringat lagi kepadanya. Ibnu Syuja'i mencerminkan banyak —bahkan boleh jadi kebanyakan— orang Islam yang hatinya terpaut dengan "wadah" Islam, tanpa mempersoalkan apa isi wadah itu.

Ia pernah berpesan agar jenazahnya dibungkus dengan bendera orsospol Islam yang sudah mati. Ia menyimpan bendera itu dengan penuh kecintaan. Ia bersedia mempersembahkan nyawanya untuk mengibarkan bendera itu. Ketika para pemimpinnya tidak lagi berkiprah dalam politik, ketika orsospol yang diikutinya sudah dilebur dalam fusi PPP, tidak sulit baginya untuk memindahkan kesetiannya kepada PPP. Dan tidak soal baginya apakah PPP mendukung atau menentang rezim yang menindas.

Kepentingan politik siapa pun dapat dengan mudah mempengaruhi —bahkan memanipulasi— orang-orang Islam seperti dia dengan menggunakan simbol-simbol keislaman. Datanglah kepada mereka dengan memakai sorban dan berbicaralah didepannya dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Mereka akan menaruh respek yang luar biasa kepada Anda, sekalipun sehari sebelumnya Anda membantai umat Islam.

Dalam politik, mereka tidak berkepentingan dengan program. Program terlalu sulit untuk dicerna dan sukar disederhanakan. Mereka lebih tertarik pada nama dan bendera. Mereka tidak akan mempersoalkan integritas moral pemimpin mereka. Tetapi mereka akan mempertanyakan latar belakang golongan dan pengetahuan Islam para politisi. Sri-Bintang Pamungkas diragukan sebagai pemimpin Islam karena namanya tidak berasal dari bahasa Arab, tidak diketahui berasal dari lingkungan aktivis Islam, tidak menulis buku-buku keislaman, kurang mengutip Al-Qur'an dan Hadis, dan mendirikan partai yang tak ada nama Islam-nya disitu. Bergabung dengan PUDI tidak dapat disebut sebagai berjihad *fi sabilillah*.

Sekiranya ada orang yang tidak dikenal, tetapi bernama Namun akhir, mendirikan Partai Uni Demokrasi Islam, yang lambangnya dalam pemilu berwarna hijau, lalu berjuang untuk menegakkan syariat Islam, orang-orang seperti Ibnu Suja'i akan bersedia mengor-

bankan harta dan jiwanya. Semoga Allah merahmati mereka yang dengan tulus mengorbankan dirinya untuk Islam, walaupun untuk namanya saja. Terkutuklah orang-orang yang memanfaatkan keluguan kaum muslimin untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Ketika Nurcholish Madjid berkata "Islam, yes; partai Islam, no", banyak rekannya menuding dia sebagai tokoh sekularisme. Ketika Amien Rais bermaksud mendirikan Partai Amanat Rakyat, dengan melibatkan pihak non-Muslim, banyak orang mempertanyakan kesetiaan Amien Rais kepada Islam. Ketika Abdurrahman Wahid mau bergabung dengan Megawati, banyak aktivis Muslim mengecamnya sebagai oportunisme politik.

Sungguh menarik bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah tokoh-tokoh Islam itu sampai pada kesimpulan yang sama: pejuangan Islam tidak selalu harus mengenakan label-label Islam. Perjuangan Islam harus ditujukan untuk mencapai cita-cita Islam, seperti keadilan, kesejahteraan rakyat, dan penghormatan pada kemanusiaan.

Para tokoh itu mengerti bahwa dalam *platform* cita-cita Islam, tak satu kelompok pun yang keberatan, apa pun agamanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW memulai perjuangannya dengan mengkritik ketimpangan sosial ekonomi dan mengakhirinya dengan menundukkan semua warga negara pada pemerintahan hukum ?

Jutaan pengikut para tokoh itu belum sampai ke situ. Seperti Ibnu Syuja'i, mereka berkutat dalam perjuangan simbolis. Masih jauh perjalanan yang harus ditempuh dalam mensosialisasikan cita-cita perjuangan Islam. "Akan datang satu zaman," sabda Nabi SAW, "ketika tidak tersisa dari Islam kecuali namanya dan dari Al-Qur'an kecuali lambangnya. Masjid-masjidnya ramai dengan kegiatan, tetapi kosong dari petunjuk. Orang yang paling buruk di zaman itu adalah para ulamanya. Dari mereka fitnah berasal, kepada mereka fitnah itu kembali.□

Dilema Politik Islam

Oleh **Din Syamsuddin**

PERLU terlebih dahulu dijelaskan bahwa yang dimaksud politik Islam dalam tulisan ini adalah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (baca: pemeluk agama Islam), karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam. Sebagai pendukung cita-cita Islam, kelompok politik Islam juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khitah perjuangan, serta wacana politik.

Keberadaan kelompok politik Islam dalam perpolitikan Indonesia merupakan kelanjutan dari adanya dikotomi santri-abangan di kalangan umat Islam, di samping juga berkembang dari adanya kemajemukan di kalangan kelompok Islam itu sendiri. Adalah suatu kenyataan yang tak dapat dimungkiri bahwa kelompok politik Islam bukanlah merupakan satu kelompok kepentingan tunggal. Hal ini ditandai oleh banyaknya partai-partai di kalangan kelompok Islam, baik yang mendasarkan diri pada ideologi dan simbol keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Pada era reformasi dewasa ini terdapat banyak partai Islam atau partai yang berbasis dukungan umat Islam. Fenomena tersebut merupakan refleksi kemajemukan umat Islam dan keberagaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah euforia politik yang tak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang se-

lama 30 tahun lebih terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.

Dilematis. Banyaknya partai Islam akan dengan sendirinya meniscayakan politik Islam berinteraksi dengan kekuasaan dan negara. Dalam hal ini politik Islam sering berada pada posisi dilematis. Dilema yang dihadapai menyangkut tarik-menarik antara tuntutan untuk aktualisasi diri secara determinan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik (real politik) yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut. Sebagai akibatnya, politik Islam dihadapkan pada beberapa pilihan strategis yang masing-masing mengandung konsekuensi dalam dirinya. *Pertama*, strategi akomodatif-justikatif terhadap kekuasaan negara yang sering tidak mencerminkan idealisme Islam, dengan konsekuensi menerima penghujatan dari kalangan "garis keras" umat Islam.

Kedua, strategi isolatif-oposisional, yaitu menolak dan memisahkan diri dari kekuasaan negara untuk membangun kekuatan sendiri, dengan konsekuensi kehilangan faktor pendukung, yaitu kekuatan negara itu sendiri, yang kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain.

Ketiga, strategi integratif-kritis, yaitu mengintegrasikan diri ke dalam kekuasaan negara, tetapi tetap kritis terhadap penyelewengan kekuasaan dalam suatu perjuangan dari dalan (*struggle from within*). Namun, strategi ini sering berhadapan dengan hegemoni negara itu sendiri, sehingga efektivitas perjuangan akan dipertanyakan.

Salah satu isu politik yang sering menempatkan kelompok Islam pada posisi dilematis itu adalah adanya pemosisian Islam *vis a vis* negara yang berdasarkan Pancasila. Walaupun umat Islam punya andil yang sangat besar dalam menegakkan negara melalui perjuangan yang panjang dalam melawan penjajahan dan menegakkan kemerdekaan, toh untuk mengisi negara merdeka kelompok Islam tak selalu pada posisi yang menentukan.

Koalisi. Sekarang, pada era reformasi ini, gejala demikian mungkin terulang kembali. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa Islam, dalam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun pada perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada dalam pengendalian kelompok Islam. Pengendalian reformasi dan kehidupan politik nasional akan berada pada pihak atau kelompok kepentingan politik yang menguasai sumber-sumber kekuatan politik (*political resources*). Pada masa modern sekarang ini sumber-sumber kekuatan politik tidak hanya bertumpu pa-

da massa, tetapi juga pada materi, ide, dan informasi. Kelompok politik Islam mungkin mempunyai kekuatan massa atau ide, tetapi kurang pada materi dan informasi yang justru dimiliki oleh kelompok-kelompok kepentingan politik lain.

Situasi dilematis politik Islam sering diperburuk oleh ketidakmampuan untuk keluar dari dilema itu sendiri. Hal ni antara lain disebabkan oleh kurang adanya pemaduan antara semangat politik dan pengetahuan politik. Semangat politik yang tinggi, yang tidak disertai oleh pengetahuan yang luas dan mendalam tentang perkembangan politik, sering mengakibatkan terabainya penguatan taktik dan strategi politik —dua hal yang sangat di perlukan dalam praktis dan permainan politik.

Berbagai problema tersebut harus mampu di atas oleh partai-partai Islam pada era reformasi dewasa ini. Adanya penggabungan secara menyeluruh tampaknya tidak realistik, kecuali mungkin di antara partai-partai Islam yang berasal dari rumpun yang sama. Alternatif lain yang tersedia adalah koalisi, sehingga hanya ada beberapa partai Islam saja yang mengikuti pemilu beberapa bulan mendatang. Wallahu'alam.□

Fenomena Partai Islam

Oleh **Bahtiar Effendy**

REFORMASI Mei 1998 —kalau gerakan yang berhasil membuat Pak Harto mundur bisa disebut demikian— telah mendatangkan liberalisasi dan relaksasi politik. Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Di antara organisasi politik yang muncul itu ada partai-partai yang mempunyai *social origin* Islam. Sebagai kelanjutan dari asal-usul sosial yang demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini terutama tampak dalam simbol dan asas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam. Meskipun begitu, publik tetap menganggapnya sebagai partai Islam. Bagaimana tidak, secara mencolok, pendukung partai-partai itu —baik yang menyatakan diri secara resmi sebagai partai Islam maupun yang tidak— adalah komunitas Islam.

Munculnya partai Islam ini, dalam jumlah yang lebih banyak daripada partai Islam yang pernah ada pada 1950-an dan 1960-an, mengundang spekulasi. Ada yang melihatnya sebagai "masuknya kembali Islam dalam dunia politik." Ada pula yang secara serta-merta menyuarakan *alarmism* —bagian dari, meminjam istilah Oliver Roy, "imajinasi politik" akan ketidakterpisahan antara wilayah agama, hukum, ekonomi, dan politik. Akibat yang mungkin ditimbulkan dari "imajinasi politik" seperti itu adalah "tidak diperkenankannya mengembangkan wilayah politik yang otonom beserta tatanan hukum dan nilai-nilai yang dianutnya." Itu artinya "*...the state is never considered in terms of a territorialized nation-state: the ideal is to have a power that would rule over the entirety of the umma, the community of the faithful...*" Dalam konteks Indonesia, tentu *alarmism* seperti itu di-

bangun dan dipengaruhi oleh stigma ideologi-politik tertentu!

Tanpa bermaksud menafikan penilaian-penilaian yang ada, bagaimana fenomena kemunculan kembali partai-partai Islam itu dipahami?Apakah kenyataan itu secara otomatis merupakan *dejavu* dan repetisi dari pengalaman Indonesia lama, di mana kehadiran partai-partai Islam dapat menimbulkan ketegangan tertentu —atau apa yang oleh Leonard Binder disebut *uneasy synthesis*— dalam hubungannya dengan negara?

Dalam perspektif legal formal, perjalanan "partai-partai Islam" tidak seberuntung *counterpart* mereka yang "bukan partai Islam ". Untuk waktu yang cukup lama, pemerintah memandang partai-partai Islam sebagai pesaing politik utama yang dapat mengganggu landasan ideologi negara. Karena itu, pemerintah berupaya melemahkan dan menjinakkan partai-partai Islam. Akibatnya, para aktivis dan pemimpin politik Islam tidak saja gagal menjadikan Islam sebagai dasar dan agama negara menjelang Indonesia merdeka —yang kemudian diulang dalam persidangan yang melelahkan di Majelis Konstituante— tapi juga, sebagai kekuatan politik, mereka menempati posisi sebagai kelompok minoritas atau *outsider*.

Melalui rekayasa pelemahan dan penjinakan, lagi-lagi dalam perspektif legal formal, politik Islam —dilihat Don Emmerson— terkalahkan secara konstitusional, fisik, birokratis, elektoral, dan simbolik. Yang lebih menyedihkan, politik Islam sering dijadikan *ideological and political scapegoat* —menjadi sasaran ketidakpercayaan, dicurigai menentang ideologi Pancasila.

Kenyataan yang tidak menggembirakan ini mendorong generasi pemikir dan aktivis politik Islam baru, yang muncul pada 1970-an, mengubah panggung politik Islam, baik dalam konteks pemikiran maupun dalam aktivisme politik. Melalui tiga mahzab pemikiran baru yang dikembangkan —pembaruan keagamaan, pembangunan politik/birokrasi, dan transformasi sosial kemasyarakatan— mereka sampai pada kesimpulan bahwa format politik Islam hendaknya lebih mengutamakan isi daripada bentuk, makna daripada simbol, dan inklusivisme daripada sektarianisme atau *partisanship*.

Transformasi pemikiran dan aktivisme politik Islam yang telah berlangsung dua dasawarsa lebih itu membuahkan hasil. Hal itu tidak saja secara berangsur-angsur telah menjembatani hubungan politik Islam negara yang semula tegang dan hostile, tapi juga telah menyebabkan diakodasinya sejumlah kepentingan Islam —sosial ke-

agamaan, ekonomi, dan politik. Berkaitan dengan itu, politik Islam berkembang diluar sekat-sekat *party politics*. Para aktivis politik Islam tak lagi terikat —meskipun bukan tidak boleh— dalam wadah politik formal (Islam).

Barangkali memang tidak ada *concerted actions* di antara mereka. Tapi, melalui PPP, Golkar, dan bahkan PDI, kemudian juga melalui NU, Muhammadiyah, ICMI, dan lembaga sosial keagamaan lainnya, mereka berpolitik. Dari sinilah terbentuk suatu kesadaran baru akan makna politik Islam dan bagaimana merealisasikannya. Dalam konteks transformasi di atas, dan belajar dari pengalaman masa lalu, politik Islam yang dikembangkan bertumpu pada penciptaan *common platform* yang sesuai dengan lingkungan masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

Dalam suasana di mana akomodasi negara terhadap Islam dan sebaliknya mulai terjalin, secara agak tiba-tiba dasar-dasar politik Orde Baru rontok. Dan, seperti diuraikan di awal tulisan ini, “kotak pandora” pun terbuka lebar. Apa yang selama masa pemerintahan Orde Baru tersimpan di bawah karpet (karena begitu eksesifnya doktrin stabilitas diterjemahkan) mencuat kembali. Itu semua merupakan ekspresi psikologis dari masyarakat yang membutuhkan *public space* yang memadai.

Dalam perspektif seperti itu, kemunculan partai-partai Islam dan partai lain yang mempunyai kekhususan sebanding —hendaknya dipahami. Sebagai reaksi atas tatanan politik yang monolitis yang menafikan keragaman ciri dan aspirasi (seperti di tunjukkan oleh kebijakan asas tunggal), kemunculan partai-partai Islam seperti yang kita saksikan sekarang ini, dengan seluruh kekentalan bahasa dan simbolisme politik mereka, merupakan sesuatu yang niscaya. Apakah kenyataan seperti itu merupakan pengulangan dari wacana politik Islam lama, merupakan hal lain.

Di permukaan, kehadiran partai-partai Islam mengesankan pengingkaran terhadap logika transformasi pemikiran dan praktek politik Islam yang telah berlangsung selama dua dasawarsa lebih ini. Menonjolnya bahasa dan sombol politik Islam merupakan indikasi utama —kalau bukan malah satu-satunya. Meskipun demikian, hal tersebut tidak mendorong mereka merumuskan *platform* partai yang bersifat legalistik-formalistik dan eksklusif. Alih-alih, semuanya justru berbicara tentang perlunya penciptaan dasar-dasar ekonomi politik baru, yang berbeda dengan apa yang selama ini berkembang—se-

suatu yang juga dirumuskan oleh partai lain yang bersifat lintas agama. Ini berarti kekhususan ciri tidak secara serta-merta meniscayakan program partai yang sektarian.

Dengan kenyataan seperti ini, menilai kehadiran partai-partai Islam sebagai repetisi dari pengalaman masa lalu —dengan seluruh implikasinya— merupakan sesuatu yang tergesa-gesa tapi juga bersifat jauh panggang dari api. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa struktur masyarakat Indonesia telah berubah secara cukup berarti. Mobilitas sosial —dalam bentuknya yang luas— yang dialami komunitas Islam merupakan faktor penting dalam perjalanan mereka selama dua dasawarsa lebih ini. *Down the road*, inilah faktor yang akan mempengaruhi artikulasi pemikiran dan praktek politik Islam.

Kalau simbol politik Islam tampak kental pada sebagian besar partai Islam di awal kelahiran mereka, itu semua merupakan reaksi logis dari sebuah tatanan politik yang tidak kompetitif di satu pihak dan euforia reformasi di pihak lain. Dengan itu, mereka ingin menunjukkan bahwa sama dengan pelaku politik lainnya mereka memerlukan otonomi relatif (sesuatu yang selama ini dianggap tidak ada) untuk menentukan sendiri asas dan simbol politik mereka. Meskipun demikian, dengan melihat masa lalu sebagai *political backlash*, dan gaya politik Islam akan disesuaikan dengan situasi keragaman sosial budaya dan kegamaan masyarakat Nusantara, diharapkan langgam politik yang seperti itu tidak akan menciptakan ketegangan yang tidak perlu.□

Fundamentalisme Islam

Oleh **Azyumardi Azra**

KEMUNCULAN banyak partai politik berasaskan agama, baik Islam maupun Kristen, merupakan salah satu fenomena politik menarik pada masa pasca-Soeharto. Kebangkitan partai-partai seperti ini, khususnya Islam, mendorong munculnya semacam kekhawatiran kalangan sementara pihak baik di dalam maupun luar negeri. Saya sendiri dari waktu ke waktu, misalnya, selalu ditanya media internasional seperti *BBC* London, *NHK* Tokyo, dan *The New York Book Review* yang mencerminkan kekhawatiran itu. Inti pertanyaan yang selalu muncul: apakah kebangkitan parpol-parpol Islam itu merupakan indikasi dari kemunculan "fundamentalisme Islam" di Indonesia?

Kekhawatiran itu tidak diragukan lagi bersumber dari pandangan dan citra terhadap fenomena gerakan militan dan radikal Islam di Timur Tengah yang sering disebut sebagai "fundamentalisme" Islam. Merebaknya "fundamentalisme Islam" wajar menimbulkan kekhawatiran. Kelompok atau gerakan Islam radikal ini bukan hanya menentang dan berusaha menumbangkan dominasi negara oleh rezim-rezim sekuler dan *hostile* terhadap Islam, tapi juga kekuatan Barat yang mereka percayai sebagai patron pemerintahan sekuler dan kekuatan anti-Islam. Sebab itulah gerakan-gerakan militan Islam di Mesir seperti Jama'ah Tafkir wa al-Hijrah, yang merupakan *splintering offshoot* organisasi al-Ikhwan al-Muslimun, mempunyai ruang gerak operasi tidak hanya di Timur Tengah, juga di wilayah internasional, khususnya di Barat.

Memandang radikalisme kelompok fundamentalisme Jama'ah Tafkir wa al-Hijrah dan kelompok-kelompok lain semacamnya di

Timur Tengah, dan kemudian mengasosiasikan, apalagi menyimpulkan bahwa kemunculan parpol-parpol Islam di Indonesia merupakan indikasi bangkitnya fundamentalisme Islam di negeri ini, hemat saya merupakan cara berpikir dan logika yang sangat simplistis. Alasannya sederhana; pertama, lingkungan sosiologis politis Islam bagi tumbuhnya organisasi atau kelompok itu berbeda dengan Indonesia; kedua, ideologi atau dasar negara masing-masing, juga berbeda; dan ketiga, nature rezim-rezim yang berkuasa di negara-negara Timur Tengah itu berbeda pula dengan rezim penguasa di Indonesia. Ketiga faktor inilah yang terutama menjadi alasan pokok atau *raison d'etre* kemunculan gerakan atau kelompok radikal di Timur Tengah yang disebut sebagai "fundamentalis" Islam.

Berbeda degan Islam di Timur Tengah yang sering dipandang dalam kerangka Robert Redfield sebagai *great tradition*, lingkungan sosio-historis, 1slam di Indonesia merupakan "*little*" atau "*Local tradition*" yang telah mengalami indigenisasi atau kontekstualisasi dengan lingkungan 1okal Indonesia. Karena itu, penampilan dan ekspresi Islam di Indonesia cenderung lebih akomodatif dan, karena itu, lebih moderat vis-a-vis Islam di Timur Tengah. Karena faktor sosiohistoris inilah gerakan militan dan radikal Islam tidak pernah populer dan mendapatkan *ground* yang kuat di Indonesia. Kalaupun ada gerakan radikal itu, seperti gerakan Padri di Minangkabau pada awal abad ke-l9, usianya pendek.

Kedua, di pasca-Perang Dunia II banyak negara di Timur Tengah, mengadopsi ideologi sekuler, khususnya sekularisme (Turki), atau sosialisme (Mesir, Irak, dan lain lain). Ideologi ideologi seperti ini bukan hanya *alien* dalam lingkungan masyarakat Muslim, tapi dalam segi-segi tertentu tidak compatible atau bahkan bertentangan dengan prinsip prinsip Islam. Kenyataan ini menjadi *raison d'atre* pokok bagi kemunculan gerakan radikal atau "fundamentalis" yang bertujuan mengubah ideologi non-Islamis ini menjadi yang mereka sebut sebagai *nizham al Islami* (tatanan politik Islam) di bawah *hakimiyyah* (kedaulatan) Allah

Pada pihak lain, ideologi atau dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang religius dan tidak bertentangan dengan Islam. Bagi banyak Muslim Indonesia Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Arskal Salim dari Pusat Penelitian lAIN Jakarta, lebih dari 60 persen responden (pimpinan parpol parpol Islam) menegaskan finalitas Pancasila sebagai dasar ne-

gara. Kenyataan ini menunjukkan bahwa persoalan ideologi dan dasar negara tidak lagi menjadi *concern* dan wacana publik parpol parpol Islam dan, karena itu, memperkecil terjadinya peluang radikalisasi di kalangan gerakan Islam tertentu yang bertujuan mengubah dasar negara Pancasila.

Terakhir, nature rezim-rezim penguasa di Timur Tengah yang cenderung sangat opresif, yang sering mempraktikkan terorisme negara untuk menindas setiap bentuk *dissent* dan oposisi. Terorisme negara ini mendorong gerakan gerakan Islam tersebut melakukan *counter terror*, sehingga pada akhirnya menciptakan *circle of violence* dan *state of terror* yang seolah tidak akan pemah berakhir.

Sebaliknya rezim-rezim di Indonesia, seperti Soeharto, mi salnya, sampai akhir tahun 1980-an paling banter dapat disebut sebagai *soft-oppressive regime*. Selanjutnya, sejak awal tahun 1990 sampai jatuhnya Orde Baru, Soeharto —terlepas dari alasan apapun— mengambil kebijakan akomodatif dan rekonsiliatif dengan kaum Muslim. *Rapprochement* dan rekonsiliasi itu pada gilirannya membuat kemungkinan radikalisme kelompok-kelompok Islam tertentu kehilangan *raison d'etre-nya.*

Memperhatikan ketiga faktor di atas, jelas bahwa kemunculan "fundamentalisme" Islam tidaklah sesederhana yang diduga sebagian orang. Sebagaimana jelas terlihat, gerakan-gerakan radikal Islam tersebut timbul sebagai hasil dari proses sosio-historis dan politik yang sangat kompleks dan karena itu sering merupakan hasil dari perkembangan politis yang kita ciptakan.

Jadi, untuk, mengantisipasi dan mencegah munculnya "fundamentalisme" Islam di Indonesia, seyogyanyalah perkembangan politik kita masa pasca Soeharto ini tidak mengarah kepada pertumbuhan faktor-faktor pokok tadi yang menjadi raison *d'atre* kelompok fundamentalisme Islam.□

Partai Islam, Negara Islam

Opini **Majalah TEMPO**

DULU, sekitar 20 tahun yang lalu, Nurcholish Madjid menyerukan semboyan: "Islam, yes! Partai Islam, no!" Satu generasi umat Islam Indonesia sejak itu memegang Islam sebagai "kesalehan pribadi" yang tak perlu disangkutpautkan dengan lembaga publik yang bernama partai. Kalaupun tampil sebagai ekspresi ke luar, ke masyarakat, perwujudannya adalah aktivitas atau organisasi yang jauh dari kehidupan partai. Singkat cerita, bagi sebagian besar generasi Islam yang lahir dalam pengaruh Orde Baru, partai adalah barang aneh, bahkan agak menjijikkan.

Sekarang lain. Sikap "ogah-partai" masih kuat, tapi lebih dari 10 partai muncul dan tanpa rasa kikuk menggunakan Islam sebagai asas. Langkah mundur dari keadaan sebelumnya? Ya dan Tidak.

Ada argumen untuk tidak suka melihat menguatnya "aliran" dalam politik lagi. Penduduk Indonesia beragam, tak ada yang bisa menguasai seluruh Republik sendirian. Maka, loyalitas politik yang mengikat seluruh warga untuk membangun rumah bernama "Indonesia " itu perlu, dan itu bukan ikatan agama, tetapi pertalian aneka ragam kelompok.

Argumen lain berhubungan dengan sifat dasar dari praksis politik itu sendiri, yakni negosiasi. Dalam politik yang melalui perwakilan rakyat, selalu terjadi tawar-menawar untuk mencapai suatu kebijakan yang dipandang akan membawa kemashlahatan umum. Partai yang membawa janji dan simbol Islam cepat atau lambat akan menghadapkan publik pada isu-isu agama, misalnya dalam produk undang-undang. Pada umumnya, sifat dasar dari isu agama adalah "tidak-bisa ditawar". Ia sulit didiskusikan dan dirundingkan. Sanda-

rannya bukanlah akal manusia yang bisa dibantah, melainkan "otoritas ilahiah".

Arena politik, menurut cara pikir kritik semacam ini, sebaiknya digunakan untuk negosiasi hal yang bersifat duniawiah. Disitu, suatu pendapat bisa diuji atau ditampik tanpa ada risiko dicap "kafir" atau "murtad".

Kebajikan Kompromi

Bagaimanapun partai Islam sudah lahir. Kiranya kalangan minoritas yang bukan Islam tidak perlu terlampau cemas. Berdirinya partai Islam bisa punya pengaruh yang positif. Sepanjang semuanya punya komitmen untuk menempuh proses pemilihan umum yang jujur dan teratur, adanya partai Islam dapat menunjukkan seberapa jauh mereka mewakili keadaan masyarakat. Dapat pula mendorong pelbagai kelompok Islam untuk transparan, agar dinilai publik dan pemilih. Pada saat yang sama, sifat radikal akan menjadi problem. Seperti dikatakan tadi, sifat dasar dari praksis politik adalah negosiasi. Dalam proses politik, apalagi yang demokratis, kompromi merupakan kelaziman. Bahkan dalam demokrasi ada yang disebut "kebajikannya kompromi".

Memang, ada hal yang dianggap tidak akan bisa dikompromikan. Tuduhan "kafir" atau "murtad" bisa jadi akan tetap dipakai untuk menghabisi mereka yang berbeda pendapat. Tetapi salah satu hal yang penting dicatat ialah bahwa Indonesia kini punya lebih dari 10 partai Islam. Bukan sebuah kekuatan raksasa yang monolitis. Bahkan ada tokoh Islam seperti Amien Rais yang tak masuk ke dalam partai Islam apa pun. Ini menunjukkan bahwa meskipun mitos "ukhuwah" Islam akan terus kuat, "ukhuwah" itu sendiri akan mengambil bermacam-macam wujud, tidak hanya sebagai keseragaman pendapat serta persamaan *platform* politik. Dalam keadaan itu, menuduh "kafir", "murtad", "dosa", atau "halal darahnya", tidak bisa selamanya laku.

Memang, bisa saja terjadi kompetisi antar partai Islam untuk menunjukkan siapa yang "paling Islam". Jika itu terjadi, akibatnya akan ada eskalasi, sehingga partai yang moderat pun akan terdesak mengikuti partai yang lebih "keras". Dalam proses politik kelak, hal ini bisa mendesakkan agenda Islamis yang tidak luwes ke dalam kehidupan bersama.

Dalam hubungan ini, perlu diingat: partai-partai Islam sekarang

tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ada partai lain yang sifatnya pluralis, seperti PDI, PAN, dan dalam arti tertentu pengimbang, sehingga agenda Islamis yang kaku tidak akan bisa diberlakukan, kecuali kalau mereka nanti kalah total dalam pemilihan umum.

Melihat semua itu, berlebihan bila takut akan lahirnya sebuah "negara Islam" di Indonesia. Pengertian "negara Islam" itu sendiri tak pernah secara persis dirumuskan. Ketika pelbagai eksperimen untuk mendirikan "negara Islam " di dunia pada abad ke-20 ini ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang gilang-gemilang, ide "negara Islam " itu kian lama kian menjauh. Bahkan mulai timbul pengertian bahwa sangat tidak bijaksana mencampuradukkan negara dan kekuasaannya dengan bendera Islam. Sebab, kekuasaan bisa dengan mudah menyeleweng, atau melakukan penyesuaian diri dengan hal-hal yang tidak "murni", sementara agama harus dijaga kesuciannya.

Pada akhirnya sikap pragmatis tampak tak akan terelakkan. Ketika Revolusi Iran menang dan harus menghadapi kenyataan politik yang tidak bisa sepenuhnya "dipaksa", sesuai dengan kemurnian cita-cita revolusi, maka cita-cita itu akhirnya harus berkompromi. Ali Khamenei lebih pragmatis ketimbang Imam Khomein yang digantikannya. Rafsanjani lebih pragmatis lagi jika dibandingkan dengan Khamenei. Dan begitu pula Khatami, pengganti Rafsanjani. Dan semua itu terjadi karena berlangsungnya proses demokratis di Republik Iran. Proses itu menyebabkan kehidupan tak sepenuhnya dapat didikte oleh kata-kata para ayatullah.

Walhasil, kita kembali kepada soal perlunya demokratisasi. Diperlukan pertumbuhan institusi, termasuk partai politik, yang menjaga agar Indonesia tidak berantakan oleh konflik antar kaum, antargolongan. Sebenarnya, masih banyak harapan.□

Hatta dan Partai Islam

Oleh **Deliar Noer**

PARTAI baru sangat banyak bermunculan kini, termasuk di dalamnya partai-partai Islam. Di satu pihak hal ini mencerminkan kebebasan, di pihak lain tampak pula kecenderungan "asal" mendirikan partai saja. Kenapa bisa kesimpulan negatif ini diambil? Karena sejarah kepartaian kita masa lalu, termasuk masa pergerakan nasional, masa revolusi, dan masa permulaan 1950-an (masa demokrasi parlementer), jumlah partai memang banyak tetapi tidak sampai sebanyak sekarang.

Dalam sejarah, kita catat ada tokoh nasionalis yang malah turut mendirikan partai Islam, termasuk almarhum Mohammad Hatta, salah seorang proklamator, dan diakui merupakan salah seorang pemimpin nasional. Apa sebabnya Bung Hatta mendirikan partai Islam?

Hal ini terjadi tahun 1966-1967, dalam masa demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno sudah sangat terpengaruh oleh kekuasaan. Ia hanya membenarkan partai yang bisa menurut kepadanya. Maka Masyumi dan PSI pun ia bubarkan. Dalam keadaan seperti itu, masih banyak kalangan masyarakat, termasuk yang menginginkan demokrasi, kebebasan, dan hak berpolitik, sesekali —dengan secara yang kurang terbuka— membicarakan keadaan Tanah Air yang mencekam ketika itu.

Hatta menjadi tumpuan dan harapan mereka yang menginginkan kebebasan saat itu. Aspirasinya datang dari beragam pihak. Selain muncul dari kalangan nasionalis dan Kristen, juga dari tokoh gerakan Islam. Yang terakhir ini termasuk kalangan yang lebih muda, para alumni HMI, kalangan PII, malah juga bekas GPII serta sebagian

yang bergabung ke PSII, juga NU. Barangkali perlu juga dicatat bahwa pada zaman Jepang, K.H.A. Wahid Hasjim (almarhum) pernah menawarkan kepemimpinan ormas NU kepada Bung Hatta.

Orang-orang Islam tadi begitu sangat mempercayai Hatta, terutama dan berpolitik, lantaran banyak faktor: baik karena kepribadiannya maupun kecenderungan pada agama Islam, serta ketaatannya beribadah (termasuk ketika belajar di negeri Belanda). Tentu pihak yang lain juga bersikap demikian pada Hatta, tetapi karena judul makalah ini menyangkut kalangan Islam, kalangan ini yang ditekankan disini.

Sejak masa demokrasi terpimpin itu, Hatta sering mengadakan pertemuan dengan mereka. Di antara yang muda tentu ada yang tak sabar melihat perkembangan keadaan, tapi Hatta berusaha dengan tenang menyabarkan mereka. Soekarno pasti jatuh, tuturnya, walaupun prediksinya lebih cepat dari kenyataan. Kadang-kadang memang Hatta berkata kepada mereka yang mengunjunginya, dan ini terutama tahun 1964 bahwa "seharusnya Soekarno sudah jatuh, tetapi masih belum juga".

Dalam berbincang-bincang itu muncul juga masalah tentang Indonesia yang dicita-citakan bersama. Hatta tentu mudah menjawab hal seperti ini karena karangannya memang sudah bertaburan tentang masalah ini. Tetapi kalau untuk kami yang Islam, bagaimana? Demikian kira-kira pertanyaan yang muncul. Hatta dengan tenang menjawab: bila masyarakat telah Islami, tak ada masalah. Masalahnya, kata dia, walaupun orang Islam mayoritas, ada kesenjangan pemahamannya tentang Islam.

Hatta mengakui bahwa Islam bukan semata-mata soal ibadah (dalam arti sempit), melainkan soal ajaran yang ditegakkan pada diri, juga masyarakat. Sekurang-kurangnya berimbas pada masyarakat, sehingga kemauan negara pun terpengaruh olehnya. Ia memang kerap menekankan soal moral yang harus terbawa dalam sikap dan perbuatan, baik itu di bidang sosial, ekonomi, maupun politik.

Perlu juga dicatat dalam hubungan ini, bahwa Hatta turut mengirim surat ke Pejabat Presiden Soeharto sekitar tahun 1967. Ketika itu ada peristiwa di Meulaboh, Aceh, yang menjadi berita hangat: kalangan Kristen ingin mendirikan gereja di sana padahal masyarakat Kristen masih bisa dihitung dengan jari. Agar ketenangan di jaga, tulis Hatta, hendaknya pemerintah tidak membolehkan gereja tersebut didirikan. Hatta melihat bahwa pendirian gereja itu bagai dipaksa-

kan, bukan didukung oleh keperluan.

Agak jauh kemudian Hatta juga melayangkan surat ke Presiden Soeharto (tahun 1973) agar mernarik kembali RUU Perkawinan. Pula, hendaknya ada upaya untuk menyesuaikannya dengan tuntutan agama (khususnya Islam). Dalam perbincangan tertulis atau pun dalam pertemuan, Hatta memang menekankan dirinya lebih sebagai orang Islam yang sedikit banyak tahu tentang Islam, dan tidak tentang agama lain. Karena itu dapat pula diambil kesimpulan bahwa seorang nasionalis baginya bisa Islami, bisa Kristiani, atau yang lainnya.

Pertemuan dengan kalangan muda Islam tadi akhirnya berlanjut dengan persoalan: apakah bisa ajaran Islam itu tegak semata-mata dengan organisasi sosial, budaya, ekonomi (ingatlah bahwa Sarekat Islam dimulai dengan Sarekat Dagang Islam), dan tanpa organisasi politik? Hatta masih mengemukakan bahwa ajaran Islam itu diutamakan tegak dalam masyarakat. Tetapi akhirnya mengakui juga bahwa diperlukan partai Islam yang akan memberi contoh dalam menegakkan ajaran Islam dalam berpolitik.

Maka disepakatilah secara bersama-sama rancangan anggaran dasar Partai Demokrari Islam Indonesia, disingkat PDII. Rancangan ini disusun sendiri oleh Hatta, tentu dengan segala masukan dari yang muda. Setelah disusun konsepnya, dibicarakan bersama lagi dengan yang lain. Dan ini dilakukan berkali-kali. Baik juga diingat bahwa Hatta sangat tertib dan jeli dalam mempergunakan kalimat, kata, malah juga titik koma segala. Dan mudahlah dimengerti mengapa penyusunan anggaran dasar tersebut memakan waktu juga. Tetapi tampak pula bahwa penyusunannya sangat demokratis.

Masalah yang sangat pula mendasar adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai oleh negara kita, termasuk oleh partai. Ketika itu Hatta lebih melihat pada cita-cita kemerdekaan: masyarakat adil, makmur, bangsa yang cerdas, hidup rukun dan damai. Adil, katanya, harus dimulai pada saat melangkah; kalau miskin, sama-sama miskin. Tetapi ia juga mengakui bahwa kemakmuran tidak bisa tercipta dalam sekejap: waktu diperlukan untuk ini. Kecerdasan bangsa perlu diprogramkan, digalakkan, malah sering-sering dalam pembicaraan dikedepankan hadis Nabi yang mengemukakan bahwa "menuntut ilmu itu wajib bagi Muslim dan muslimah", bahwa "belajar itu dari buaian ke liang kubur". Fakir miskin dan anak yatim pun tidak bisa dibiarkan begitu saja (UUD 1945 menyebutkan bahwa ne-

gara wajib memeliharanya).

Dengan demikian, pembicaraan di antara kalangan muda yang Islami tadi bagaikan bertemu tanpa sengaja diatur dengan pemikiran seorang nasionalis seperti Hatta —yang memang taat beragama.

Sayang, maksud mendirikan PDII tadi kandas di tengah jalan. Adalah Presiden Soeharto sendiri yang melarangnya. Ketika bertemu dengan Soeharto membicarakan masalah ini. Soeharto berkata bahwa maksud Hatta itu akan ia pertimbangkan. Tak lama kemudian datang suratnya: menolak sama sekali maksud tadi. Maka PDII pun tak jadi berdiri.

Hatta menyuruh pada pendukung PDII bersabar. Hatta, dalam suasana tahun-tahun permulaan Orde Baru, turut mempertimbangkan ketenangan, juga kerukunan. Tapi ketika pemilihan umum tahun 1971 tidak berarti sama sekali —karena banyak anggota DPR, apalagi MPR yang diangkat— ia dengan keras menolaknya. Agaknya Hatta ketika itu sudah melihat bahwa Soeharto sudah mulai sangat menyimpang dari cita-cita demokrasi.

Padahal dalam soal PDII, di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Palembang (orang ingat bahwa bapak tiri Hatta berasal dari sana; perasaan bersama masih kental juga rupanya), Sulawesi Selatan (Hatta ketika itu sudah mulai mengajar di Universitas Hasanuddin), serta terutama kota-kota universitas di Jawa (bukankah kalangan HMI dan PII bertebaran di kota-kota ini?) persiapan sudah mulai dilakukan.

Sambutan mereka yang dahulu bergerak dalam Masyumi pun menggembirakan. Anwar Harjono, misalnya, sudah menyatakan bergabung ke PDII. Tapi hanya karena mantan pemimpin-pemimpin Masyumi keluar penjara, ia berubah lagi; kembali berencana untuk mendirikan Masyumi. Beberapa ustazd di Jakarta seperti K.H. Abdullah Syafei, Ustadz Jamalulail, dan beberapa lagi yang lain sudah menyatakan sikap: setuju dan bergabung dengan PDII.

Maka menarik disimak perkataan Nurcholish Madjid kepada penulis ketika kami bertemu di Chicago pada 1980. Ketika kami singgah sejenak dan menikmati kota besar itu dari kejauhan, Nurcholish berujar, kurang lebih begini: Kalau sekiranya Partai Demokrasi Islam Indonesia yang dipimpin Hatta jadi berdiri, keadaan di Tanah Air agaknya tidak separah yang kita hadapi. Entahlan. Manusia hanya berusaha, Tuhan menentukan!□

Noblese Oblige

Oleh **Hajriyanto Y. Thohari**

PRESTASI bangsa Indonesia kini bertambah lagi. Bukan hanya sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia, juga terkaya dengan partai Islam. Betapa tidak, pada era eurofia kebebasan ini, jumlah partai Islam membengkak —untuk tidak mengatakan tercabik— menjadi hampir 30 partai. Bagi sementara kalangan yang mempunyai obsesi "persatuan Islam" (Pan Islamisme), apapun arti yang dimaksud oleh istilah itu, tentu "prestasi" ini dipandang sebagai sebuah tragedi. Tapi sungguh ajaib, Kongres Umat Islam III (1998) malah mengeluarkan deklarasi bahwa pluralisme partai Islam merupakan *sunnatullah*. Jadi, *sunnatullah* dulu berarti satu, kini seribu!

Nahdlatul Ulama (NU), yang sejak dulu secara politik terkenal solid, konservatif (baca: tidak gampang berubah), dan memiliki kemampuan bertahan luar biasa mengagumkan, pecah berkeping menjadi empat partai politik: Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Umat, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Suni. Partai Persatuan Pembangunan pun kini bukan hanya dipimpin NU, melainkan juga "kembali " ke (asal) Islam dan Ka'bah.

Yang terjadi pada kalangan reformis tidak kurang tragisnya. Dari keluarga besar Masyumi —partai legendaris yang menjadi simbol persatuan Islam politik— lahir Partai Bulan Bintang, Partai Umat Islam, Partai Keadilan, Partai Masyumi, Masyumi Baru, dan lain-lain. Ini belum menghitung Partai Amanat Nasional yang "Muhammadiyah" dan partai-partai "gurem" lainnya. Jadi, etos Masyumi gagal mencegah faksionalisme di kalangan "anak cucu"-nya. Dan yang lebih dramatis lagi, PSII partai warisan H.O.S. Tjokroaminoto yang kecil cabai rawit itu pun terkena sindrom perpecahan: terbelah men-

jadi dua. Ini *sunnatullah*, kata Kongres Umat Islam.

Mudah diduga, partai-partai Islam ini akan menggunakan Islam sebagai *rallying appeal* untuk menarik massa. Bahkan, lazimnya partai-partai "sekuler" pun akan ikut terseret menganut "ideologi" *me too-ism*: "Saya juga Islam, lho." Bayangkan, 25 partai Islam dengan *platform*, jargon, *appeal*, dan bendera yang nyaris sama terjun ke gelanggang Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, memperebutkan *captive market* yang sama pula: kekuatan elektoral Islam yang melimpah. Yang menarik diamati adalah bagaimana kira-kira pola respons massa Islam terhadap fenomena multipartai ini.

Golongan yang pesimistis akan membayangkan dahsyatnya kebingungan umat —terutama di tingkat akar rumput— manakala mendengar setiap juru kampanye secara verbal meneriakkan jargon-jargon, *li 'ilai kalimatillah hiyal 'ulya: 'izzul Islam wal muslimin*, dan bentuk-bentuk simbolik keislaman lainnya. Sungguh sulit membayangkan kriteria macam apakah yang akan digunakan mereka untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Mungkin membayangkan, masjid-masjid mengadakan salat istikharah meminta "campur tangan"-Nya untuk menunjukkan partai mana yang paling afdal dipilih dalam pemilu.

Tapi golongan yang optimis akan mengatakan bahwa massa Islam bakal merespons secara lebih dewasa, cerdas, dan rasional. Umat tidak lagi mudah terpedaya dengan slogan-slogan verbalistik dan simbolistik seperti *tempo doeloe*. Partai, meski berjubah Islam, hanyalah instrumen. Artikulasi politik ekspresif dan simbolik —yang dulu mendominasi corak politik sebagian besar umat— kini bergeser menjadi bersifat instrumental. Umat tidak lagi mementingkan simbol-simbol atau perlambang, melainkan isi dan substansi.

Ada beberapa argumen yang bisa diajukan. *Pertama*, pross deformalisasi atau desakralisasi partai-partai Islam diam-diam terus berlangsung secara signifikan, seiring dengan dinamikan intelektualisme Islam yang berkembang sangat dahsyat sejak beberapa dekade terakhir. Jumlah umat yang makin progresif dan liberal dalam memahami doktrin Islam tentang politik makin meningkat tajam: tidak lagi bersifat legalistik, formalistik, dan simbolistik, melainkan lebih substansialistik.

Akibatnya, identifikasi politik umat Islam terhadap partai Islam tak lagi *taken for granted* seperti *tempo doeloe*. Malah, meski gradual, cenderung makin permisif. Mafhum mukhalafah-nya, dalam bahasa

Cak Nur dan murid-murid protagonisnya: penganut "Islam, yes; partai Islam, no" kian hari kian bertambah, karena hadirnya kesadaran bahwa yang penting adalah substansi, bukan format.

Kedua, tidak seperti pada dekade 1950 tatkala perbedaan antara partai Islam dan partai "sekuler" sangat ekstrem, kini perbedaan antara partai yang "Islam" dan yang "sekuler" tidak lagi signifikan. Dari segi *platform* dan figur kepemimpinan, rasanya sulit mencari perbedaan keberislaman antara partai-partai Islam dan partai-partai sekuler. Golkar, misalnya kini bukan hanya telah tampil dengan paradigma dan visi baru —antara lain memahami doktrin karya kekaryaan sama dengan konsep amal salih dalam Islam— melainkan juga dipimpin banyak kader bangsa yang memiliki *social origin* gerakan Islam.

Kesadaran politik umat agaknya makin dewasa, tidak lagi mudah silau dan terpedaya dengan simbol-simbol eksoteris. Partai apa pun, bahkan yang berjubah Islam sekalipun, akan diuji kesejatiannya: apakah mereka menjadikan Islam hanya sebagai basis solidaritas politik untuk memobilisasi dukungan yang berarti memobilitisasi agama, ataukah penegak nilai-nilai universal Islam yang sejati. Politisasi agama berarti mendistorsikan agama menjadi sekadar komoditas politik, atau alat legitimasi pencapaian kepentingan politik terbatas.

Kepedulian umat kini agaknya lebih substansial, yakni tegaknya nilai-nilai ideal menurut Islam seperti keadilan, persamaan, dan demokrasi. Bukan lagi pada simbol-simbol hasil manipulasi para demagog. Setiap partai, terlebih yang Islam, harus sadar bahwa cara-cara lama tak lagi viable untuk digunakan. Membentuk partai Islam bukan sekadar demi meraih suara sebanyak-banyaknya dengan memanipulasi simbol, melainkan juga untuk mendewasakan diri dan umatnya. Inilah kewajiban mulia. *Noblese oblige*.□

Desakralisasi Partai Islam

Oleh **Sukidi**

PEMILU 7 Juni nanti akan diramaikan 48 partai politik. Uniknya, kontestan pemilu kali ini juga diikuti tak kurang dari 10 partai Islam. Apapun bentuk retorika politik yang dikampanyekan, toh ujung-ujungnya cuma satu: Bagaimana partai Islam sukses merayu umat Islam, entah dengan memperagakan slogan, janji, maupun simbol-simbol keislaman.

Saat ini hal itu sudah tercium aromanya. Yakni, konstruksi sosial-politik-keagamaan oleh elit politik (Muslim) bahwa keislaman seseorang itu seolah terkait dengan pilihan politiknya. Di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) misalnya, terdengar kabar santer bahwa bagi warga NU hukumnya "wajib" mencoblos Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Karena, inilah partai warga NU yang direstui Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid, dibandingkan tiga partai politik lainnya yang berdiri di lingkungan NU (Partai Kebangkitan Ummat, Partai Nahdlatur Ummah, dan Partai SUNI). Akibatnya, jika warga NU tak mau mencoblos PKB, ia dituding telah "keluar" dari identitas ke NU-annya.

Paling tidak, kabar demikian dibenarkan oleh Ir. Shalahudin Wahid. Ia menuding kakaknya, Abdurrahman Wahid, telah mengeksploitasi warga NU: "Sejak Gus Dur mendirikan PKB, di daerah-daerah malah terjadi benturan yang hebat antarwarga NU. Sebab, ada anggapan bahwa yang tak mendukung PKB bukanlah warga NU lagi," papar Shalahuddin Wahid dalam *Merdeka* (10/4/1999).

Begitulah realitas aktual-faktual saat ini. Yakni, konstruksi sosial-politik-keagamaan oleh elit politik kita bahwa partai Islam itu sakral, dan karenanya wajib dicoblos oleh umat Islam. Jika tidak, ia diang-

gap telah berkurang identitas keislamannya. Dengan begitu, keislaman seseorang memiliki relasi-politik dengan pilihan politiknya, berupa pencoblosan partai Islam pada pemilu nanti.

"Rumusan politik" demikian, dari sudut pandang keagamaan jelas sangat menyedihkan, jika bukan membahayakan. Bahayanya, maraknya kecenderungan elit politik (Muslim) untuk "mensakralisasikan" partai Islam, oleh karena terkait dengan identitas keislaman seorang Muslim. Pada wilayah inilah, urgen sekali dikedepankan proyek "desakralisasi partai Islam".

Desakralisasi partai Islam

Desakralisasi partai Islam, sejatinya merupakan proyek pengembalian: Mana yang sakral sebagai sakral dan yang profan sebagai profan. Partai Islam, yang tadinya dianggap sakral kini hendak "didesakralisasikan" alias dikembalikan ke wilayah profan.

Itulah yang —dalam wacana sosiologi— diistilahkan dengan makna "sekularisasi", yang secara epistemologis dimaksudkan sebagai "devaluasi radikal" (meminjam istilah sosiolog terkenal, Robert N Bellah) atau "*liberating development*" (istilah Harvey Cox, teolog dari Universitas Harvard AS) atau "demitologisasi" atas apa saja yang bertentangan dengan ide tawhid.

Berpijak pada konsep demikian, kita sejujurnya mau menyampaikan pesan penting bahwa: Partai Islam itu bukan hal esensial dan substantif, serta (sama sekali) tidak terkait dengan keislaman seseorang untuk memilih partai Islam tertentu. Itulah sebabnya, desakralisasi partai Islam ini lebih dimaksudkan untuk membebaskan (umat) Islam dari politik yang bersifat partisan. Malahan, lebih dari itu, proyek ini mempunyai arti penting bagi pembebasan (umat) dari stigma dan beban sejarah yang tidak kondusif bagi pengembangan umat Islam.

Maka lewat konsep desakralisasi partai Islam ini, kita sebenarnya juga bermaksud untuk mengembalikan Islam sebagai basis kemanusiaan yang universal, tidak lagi sebatas simbol dan perekat eksklufis bernama partai. Sebab, ketika Islam tersubordinasikan ke dalam partai yang cenderung mengutamakan kepentingan kelompok partai dengan berbagai aturan verbal, maka makna Islam menjadi sempit dan cenderung eksklusif. Sehingga mudah terjebak pada penilaian bahwa umat Islam yang tidak menjadi anggota/pengikut partai Islam, dicap sebagai "kurang islami".

Untuk itu, desakralisasi partai Islam yang mengumandangkan konsep keislaman seorang Muslim tidak terkait dengan partai Islam tertentu, maka konsekuensi logisnya adalah: Setiap Muslim berhak menyalurkan aspirasi politiknya ke partai manapun, asal sesuai suara harinya. Dan, perlu dicamkan sekali lagi bahwa sikap politik semacam itu tidaklah mempengaruhi keislaman seorang Muslim. Oleh karenanya, dalam wacana-praksis politik, konsep desakralisasi partai Islam ini sesungguhnya proyek pelepasan kesakralan dari objek-objek yang mestinya tidak sakral.

Dengan proyek demikian, maka cita-cita Islam dan politik (Islam) lebih berlaku secara universal, untuk kebaikan semua umat dan tidak sebatas perekat ekslusif bernama partai. Watak, karakter, dan visi politiknya, dengan begitu lebih bercorak inklusif dan pluralis. Yakni, sebuah cita-cita politik (Islam) yang disandarkan pada kemaslahatan semua umat manusia, tanpa diskriminasi SARA.

Slogan klasiknya: Rahmat semangat alam. Karena, cita-cita keislaman yang fitri, sesungguhnya merupakan cita-cita kemanusiaan secara universal, maka cita-cita politik (Islam) pun tidak hanya diorientasikan demi kebaikan umat Islam semata, tetapi juga diorientasikan demi kebaikan semua umat manusia, tanpa kecuali.□

Partai Islam yang Rasional

Wawancara **Yusril Ihza Mahendra**

BEGITU banyak kekhawatiran yang diarahkan kepada gagasan pendirian partai keagamaan, termasuk partai Islam, yang acap dikaitkan dengan masalah disintegrasi bangsa. "Ini *prejudice*, antipati, dan bagian dari propaganda politik," kata **Prof. Dr. Jusril Ihza Mahendra**, ketua jurusan hukum Tata Negara UI yang sedang berencana mendirikan partai baru berlabel Islam. Berikut hasil wawancaranya dalam dua kesempatan terpisah.

Bisa Anda jabarkan gagasan mendirikan partai Islam?

Partai keagamaan itu sah dan konstitusional, asal dasar dan tujuannya tidak bertentangan dengan dasar negara, serta tidak memusuhi demokrasi. Fobia terhadap partai keagamaan, yang dikait-kaitkan dengan disintegrasi bangsa, merupakan konsep warisan Orde Baru (Orba). Dari sejarah, tidak ada bukti bahwa sebuah partai semacam itu pernah menampilkan, apalagi melakukan, pemberontakan untuk disintegrasi. Pada pemilu 1955 tak terjadi bentrokan. Dalam sebuah kampanye, Masyumi dan PNI bisa berbagi satu lapangan bola. Di jaman Orba, ketika semua partai memiliki asas tunggal, malah berkelahi terus.

ABRI menyatakan agar partai tidak didasarkan agama.

Itu yang saya sebut masih dalam konteks Orba dan harus diganti. Berpikirlah logis bahwa distorsi atau ancaman disintegrasi ada pada semua golongan. Di sini pentingnya politik diletakkan pada landasan etika yang tinggi. Dan saya harap Islam bisa menjadi pelopor seperti dulu dilakukan Masjumi Rasa-rasanya di mata para pastor dan pendeta, saya tidak tampak seperti orang ekstrem.

Soal sikap absolutisme dan eksklusifisme?

Pertanyaan yang sama bisa diajukan kepada partai nasionalis atau partai demokrasi. Seolah-olah hanya mereka yang nasionalis dan demokratis.

Mungkinkah terjadi distorsi Islam, dari rujukan etika bangsa menjadi milik sekelompok orang?

Sama saja. Demokrasi kan nilai yang universal. Apa dengan mendirikan PUDI berarti mendistorsi demokrasi dari nilai-nilai universal? Apa partai nasionalis berarti mendistorsi nasionalisme?

Tapi, gambaran perpecahan dan sikap saling mengkafirkan di tingkat bawah memang ada.

Agama itu punya sisi normatif dan empirik. Orang seperti Nurcholish Madjid saya kira tahu, Islam tidak mengajarkan absolutisme. Tapi, dalam level bawah, bahkan mungkin level elit bisa terjadi kesalahan implementasi. Kalau kita mendirikan masjid, secara normatif untuk membawa kebaikan, tapi dipakai untuk berbuat macam-macam, bukan berarti tak perlu ada masjid. Ini pesimisme.

Anda memaksudkan ini sebagai wadah tunggal politik Islam?

Siapa yang mengatakan perlu wadah tunggal? Itu produk Orba dan tidak demokratis. Saya memang pernah menganjurkan umat Islam menjadi kekuatan politik. Ada satu kekuatan politik Islam yang bisa saja merupakan aliansi berbagai kelompok. Mungkin saja ada beberapa kelompok dan itu tak perlu dihalang-halangi.

Apa visi partai Anda?

Partai ini bertujuan menerapkan alinea keempat UUD 1945 berdasarkan etika dan moral Islam. Islam yang universal tidak ditolak oleh siapapun kecuali orang yang apriori. Ketika mengatakan sebaiknya partai yang bervisi universal, seperti keadilan, kebenaran dan HAM, saya kira Nurcholish Madjid tahu bahwa Islam mengajarkan hal-hal itu. Bahwa di level bawah bisa terjadi distorsi, itu bukan kasus spesifik partai Islam, melainkan pada semua partai. Saya kecewa di berbagai media orang berbicara seolah-olah distorsi hanya akan terjadi pada partai Islam. Itu *prejudice*, antipati, dan bagian dari propaganda politik.

Bagaimana dengan kekhawatiran berdirinya negara Islam?

Apakah mendirikan Partai Golkar berarti akan mendirikan negara Golkar? Satu negara disebut negara Islam kan bukan hanya soal

nama. Dalam hal ini saya sependirian dengan Nurcholish, lebih mementingkan esensi daripada simbol. Bagi saya, disebut negara Islam atau bukan, bukanlah hal pokok. Keyakinan saya sama dengan orang Masjumi bahwa UUDS 1950 telah memenuhi syarat minimal Islam tentang sebuah negara. Jadi, Indonesia tidak menjadi negara sekuler dan tidak perlu juga menjadi agama teokratik.

Perspektif terhadap minoritas?

Seperti termuat dalam piagam Madinah, Islam membangun dan menghargai hak-hak orang lain. Kalau ada orang merusak gereja, sinagoga, umat Islam wajib membela dan mencegah perusakan itu. Anda lihat waktu Natsir menyusun kabinet. Lima dari 17 menteri beragama Kristen. Pemimpin Kebatinan diangkat menjadi menteri kehakiman.

Kelompok mana yang akan Anda incar sebagai konstituen?

Saya tidak akan menyebut segmen, apalagi mengklaim jumlah pendukung. Saya berharap, partai ini didukung oleh orang-orang yang berpikir rasional mengenai bagaimana negara ini harus diurus dengan baik dan benar. Mungkin ada ikatan emosional pada lambang bulan bintangnya, tapi kita tidak mendidik orang untuk untuk menganut fanatisme. Tentu basisnya adalah umat Islam, tapi saya yakin akan meluas. Sampai hari ini banyak orang dari agama lain dan etnis Cina datang kepada saya. Saya katakan, Islam tak seperti yang diprasangkakan orang. Saya memang tak mengadakan doa bersama di rumah saya. Itu artifisial.

Ada yang berpandangan bahwa partai-partai Islam hanya memanfaatkan Islam untuk menangguk suara

Kalau soal kepentingan, sebenarnya semua partaipun akan memanfaatkan hal yang sama. PDI, misalnya, mengeksploitasi demokrasi untuk kepentingan politiknya. Partai Cinta Kasih Bangsa akan mengeksploitasi Kristen untuk kepentingan politiknya. Tapi, maksud kita kan tidak demikian. Kita menempatkan Islam itu sebagai sumber nilai, sumber inspirasi, dan sumber motivasi, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami bangsa dan negara kita sekarang.

Lalu, apa yang akan PBB perjuangkan untuk kepentingan politik Islam?

Yang kita perjuangkan adalah umat Islam dan bangsa Indonesia.

Sebab, kita mendirikan partai politik yang bekerja di sebuah negara untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Dengan mendirikan partai ini, *insya allah* kita masuk ke perjuangan kekuasaan politik. Dan dengan kekuasaan politik inilah, kita akan memperbaiki persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa.

Kita tidak hanya berjuang di dataran moral akademis. Sebab, strategi untuk melakukan perubahan atau perbaikan memerlukan kekuatan politik. Itu sebabnya kita mendirikan partai.

Banyaknya partai Islam tidakkah menunjukkan adanya egoisme politik, yang targetnya cuma menang atau kalah?

Kami tidak berpikir begitu. Dalam segmen-segmen politik yang kami kemukakan selama ini, kami tak terlalu mengedepankan jiwa murni sebagai kelompok politik. Sudah banyak analisis yang dibuat media massa, yang melihat bahwa apakah tak terlampau idealis buat PBB karena dia memperjuangkan sistem dan bukan memperjuangkan orang.

Dalam praktik, Anda lihat sendiri, PBB dan partai islam yang lain tidak memperlihatkan egoisme itu. Di pihak lain, di suatu daerah, partai lain justru dilarang mengibarkan bendera. Pergilah ke Semarang: dulu kuningisasi, sekarang merahisasi. Banyak juga partai yang sama-sama memakai lambang banteng. Mengapa tidak mempersoalkan hal itu.

Mengapa partai Islam tidak berkoalisi saja?

Pada saatnya kita akan berkoalisi. Saya kira, titik temunya banyak sekali. Tapi, mungkin juga itu merupakan strategi Islam: biarkan berjalan dulu, dan nanti secara demokratis biar rakyat yang menentukan. Jika partai A tak mendapat dukungan, dia tidak bisa bertahan. Jika nanti ada partai Islam yang paling kuat, yang lain-lain bisa dikomando oleh partai tersebut.

Tapi di sisi lain, beberapa partai Islam malah memojokkan tokoh Islam juga. Amien Rais, misalnya, dituduh zionis dan menerima uang dari Amerika. Bukankah ini menunjukkan kekurangdewasaan dalam berpolitik?

Ya. Tapi PBB juga tak kurang difitnah. Misalnya, kami dinyatakan didanai oleh Soeharto. Saya pikir, masyarakat akan tahu. Tidak perlu saling menghujat.

Beberapa partai Islam mendirikan Forum Silaturrahmi Partai

Islam. Bagaimana Anda melihatnya?

Positif saja. Cuma, lembaga ini jangan diformalkan. Dan jangan nanti ada satu yang menjadi ketua partai-partai islam. Kan jadi *nggak* enak.

Kenapa PBB tidak bergabung ke sana?

Kalau yang dimaksud adalah forum partai-partai Islam, kita memang nggak mau. Semula mereka tidak ingin mengajak PBB. Sebab, ketika forum itu dibentuk, PBB masih mencantumkan akidah Islam dan asas Pancasila. Jadi, yang diundang adalah partai-partai yang berasaskan Islam. Ya, sudahlah kalau begitu. Sebaliknya, saya kan juga bisa bikin forum partai-partai berakidah Islam. Mereka nggak saya ajak juga. Karena, mereka cuma asasnya yang Islam, akidahnya *nggak* Islam.□

Era Baru, Butuh Wahana Baru

Wawancara **Dr M Amien Rais**

AKHIRNYA, setelah sekian lama menimbang-nimbang, **Dr Amien Rais** memutuskan mendeklarasikan partainya sendiri. Itulah Partai Amanat Nasional (PAN). Amien memahami, kalau langkah-langkahnya dinilai terlalu lamban. "Tapi saya bukan peragu atau pebimbang," kilahnya. Tokoh reformasi ini sebelumnya menolak "pinangan" PPP dan PBB untuk memimpin kedua partai Islam itu.

Sejak itu, garis politik yang ditempuh Amien dengan Partai Amanat Nasional (PAN)-nya seakan kian jauh dari kawan-kawan Islam-nya. Banyak kawan seiring yang pernah dekat kini menjauhinya. Bahkan menuduhnya telah berubah kiblat. Tuduhan ini ramai-ramai dialamatkan, terutama oleh kalangan tokoh partai Islam, sejak dia "mengundang" intervensi moral Amerika Serikat untuk penyelesaian masalah Ambon.

Tapi, bagi Amien, tudingan atau serangan terhadap dirinya hanyalah karena kesalahpahaman saja. "Saya yakin, teman-teman dari kalangan Islam yang betul-betul jernih berpikirnya bisa tetap memahami dan menghormati apa yang saya perjuangkan saat ini," katanya. Mengapa ia lebih tertarik untuk mendarikan partai terbuka ketimbang memimpin partai Islam? Bagaimana strategi perjuangan yang akan dikembangkannya di PAN? Berikut rangkuman wawancara dengan *Tokoh Ummat 1998* ini yang dirangkum dari majalah *Ummat* edisi 24 Agustus 1998 dan 26 April 1999.

Akhirnya Anda menyatakan mendirikan PAN. Bagaimana ceritanya?

Memang, dalam menentukan langkah politik, saya tidak cepat mengambil keputusan. Saya akui, jadinya terkesan lamban. Tapi itu

bukan karena saya jadi peragu atau pebimbang. Saya ingin melihat masalah supaya mengalami kristalisasi lebih dulu. Baru setelah itu saya melangkah.

Memang, saya mula-mula diajak bergabung ke Partai Bulan Bintang (PBB). Tapi setelah ada pertimbangan yang agak matang, saya berkesimpulan untuk tidak bergabung.

Kemudian dengan PPP, sesungguhnya sudah lebih jauh lagi. Saya bahkan pernah membuat surat pernyataan bersedia masuk ke Majelis Pakar PPP. Menurut sebagian teman-teman pimpinan PPP, itu akan memuluskan jalan saya dalam muktamar PPP, bahkan sampai menjadi pucuk pimpinan PPP.

Lalu?

Tapi, setelah saya mengambil keputusan cukup mantap, ternyata gambaran di PPP sendiri tidak mulus. Dari sementara unsur Muslimin Indonesia (MI) saja ada semacam resistensi. Kemudian, dari NU mungkin juga ada resistensi atas kehadiran saya. Ibaratnya, kalau masuk ke PPP itu saya masuk ke sebuah rumah yang penghuninya sudah punya kavling sendiri-sendiri. Sehingga, kehadiran saya mungkin tidak diterima dengan ramah seratus persen.

Jadi, penerimaannya mungkin hanya karena perhitungan politik belaka —dan bukan karena perhitungan hal-hal yang bersifat ideal jangka panjang. Itulah yang akhirnya membuat saya harus memproklamasikan Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang bisa dimulai dengan awal yang sehat dan segar dan tidak dimulai dengan konflik.

Jadi, inilah sikap saya kepada PPP. Saya harus terpaksa mendirikan partai sendiri dan saya mendoakan supaya PBB mau pun PPP dan juga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nanti bisa berkarya di tempat masing-masing. Kalau bisa, berkoalisi di masa depan.

Apakah ada semacam *ijtihad* politik dalam hal ini?

Ya. Dalam ijtihad politik saya, kita memang perlu wahana baru dalam era yang baru. Saya mengharapkan, mudah-mudahan dengan *platform* perjuangan partai yang segar, PAN bisa benar-benar mengemban seperti nama partai, yaitu amanat bangsa untuk membawa Indonesia ke kesejahteraan sosial, keadilan bagi seluruh rakyat, dan menjadikan masa depan sebagai masa-masa pencerdasan kehidupan bangsa seperti tercantum dalam amanat UUD 1945.

Jadi, saya *bismillah* ingin mencoba dengan tulus sekuat mungkin

beserta teman-teman untuk melakukan terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan sosial yang memang cenderung sudah macet seperti sekarang ini.

Banyak orang "risih" terhadap keterlibatan tokoh-tokoh non-Islam dalam PAN. Tanggapan Anda?

Sesungguhnya sebuah partai di dalam pemikiran saya adalah alat *muamalah maanas*. Alat bekerja sama antar hamba-hamba Tuhan dan sesama umat manusia. Jadi, di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, menurut saya bekerja sama dengan orang yang datangnya dari agama lain untuk membangun masyarakat yang teduh dan berkeadilan sosial-ekonomi, dan dilandaskan dalam asas saling menghormati.

Itu sesuatu yang justru direkomendasikan oleh agama Islam. Dalam Piagam Madinah sendiri, saya kira Nabi juga memberikan tempat kepada minoritas Nasrani dan Yahudi, dan mereka tidak dikucilkan.

Kita juga bisa melihatnya dalam tarikh Islam. Tatkala umat Islam diserahi *khilafah* (kekuasaan) untuk memakmurkan bumi Allah, itu jelas-jelas sekali perlakuannya kepada anak cucu Adam. Itu betul-betul adil, tidak ada diskriminasi atas dasar agama, ras, suku, warna kulit, mau pun tradisi.

Artinya?

Saya melihat partai politik bukan sesuatu yang sakral seperti halnya kita shalat di masjid —tempat di mana kalau kita sedang beribadah orang non-Muslim dilarang masuk ke sana. Tapi kalau kita berdagang bersama orang Nasrani, kita membangun sarana infrastruktur ekonomi dengan orang Hindu, kemudian kita memajukan pertanian atau perikanan dengan orang Budha, dalam pemahaman saya tak ada halangan sama sekali.

Lihatlah Pak Mohammad Natsir. Pimpinan Masyumi memang semuanya Islam. Tapi kabinet yang dibentuk Masyumi juga menyertakan orang-orang Kristen, Sosialis, Nasionalis, dan Katolik. Nah, kalau sekarang partai itu bertugas untuk melaksanakan pembagian kekuasaan, juga mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi secara adil, keberadaan tokoh-tokoh dari Nasrani, Hindu dan Budha dalam PAN justru cerminan kebhineka-tunggal-ikaan Indonesia itu.

Jadi, lebih tepat partai terbuka?

Buat saya sungguh tepat kalau menamakan partai terbuka atau inklusif. Lalu, secara konkret duduk di dalamnya saudara-saudara kita dari agama lain mau pun dari berbagai suku. Akan menjadi aneh kalau kita mengajakkan partai terbuka dan inklusif, tapi ternyata semuanya dari satu kandang. Akan ada kontradiksi antara yang kita katakan dengan yang kita laksanakan.

Menurut saya, selama pimpinan itu ada di tangan orang-orang yang memegang amanah Allah, yang jujur, bisa saling mengoreksi tatkala kita membuat kekhilafan, bisa *watawasawbil haq, watawa sawbis sabr*, ya mengapa tidak?

Tapi, saya bisa memahami kalau saudara-saudara saya pada tingkatan akar rumput belum bisa menerima kalau, misalnya, Amien Rais memimpin partai yang di dalamnya ada seorang Cina, Hindu, Budha, Kristen, atau Katolik. Jika nanti terbukti bahwa yang kita usahakan itu untuk memajukan kesejahteraan bersama, saling menghormati, toleransi tinggi, dan tidak didasarkan atas *alal itsmi wal 'udwan* (permusuhan dan kebencian), saya harap kesalahpahaman itu bisa hilang bersama berjalannya waktu.

Apakah nantinya warga Muhammadiyah yang berada di partai lain akan ditarik masuk ke PAN?

Tidak. Muhammadiyah itu rasionya sudah sangat dewasa. Dia 33 tahun lebih tua dari Republik. Orang-orang Muhammadiyah sudah paham betul bagaimana menghadapi kehidupan politik yang kadang-kadang rumit, penuh dengan lubang-lubang dan perangkap-perangkap yang menjerat kalau kita tidak hati-hati.

Jadi, buat orang Muhammadiyah, pilihan politiknya kita serahkan kembali secara bebas dan bertanggung jawab. Yang paling bagus, tentu kalau sebagian warga Muhammadiyah mengambil langkah yang sama. Tapi itu juga tidak gampang. Kalau sebagian warga Muhammadiyah mengambil langkah yang berbeda, selama tidak bertabrakan, masih paralel, dan tidak destruktif, buat saya itu silakan.

Sebagai Ketua PAN, masihkah Anda aktif di Muhammadiyah?

Jabatan nomor satu Muhammadiyah akan diambil alih oleh Prof Syafii Maarif bersama-sama Drs Soetrisno Muhdam. Kedua tokoh ini adalah dua Wakil Ketua di PP Muhammadiyah. Saya akan tetap aktif dalam rapat-rapat Muhammadiyah dan saya tetap di PP Muhammadiyah. Cuma lebih dari 85% energi dan waktu saya akan saya konsentrasikan ke partai.

Program apa yang diajukan PAN untuk kalangan tradisionalis?

Sesuai dengan *platform*-nya, di bidang ekonomi kita akan melenyapkan setiap bentuk monopoli, mendorong mekanisme pasar secara konstruktif supaya bekerja secara alami, tidak ada intervensi tata niaga, memperbaiki sistem perbankan, dan sebagainya. Itu sudah jelas sekali.

Dalam bidang politik, tentu kita akan membatasi masa jabatan presiden. Kemudian memperbarui proses rekrutmen politik atas dasar meritokrasi, bukan nepotisme. Memberikan otonomi yang lebih besar pada daerah supaya tidak resah. Kemudian, mendorong terus kebebasan pers, kebebasan berbicara. Nilai-nilai demokrasi kita dorong terus. Di bidang hukum, kita tentu akan melaksanakan hukum tanpa diskriminasi. Itu semua saya kira cukup ideal dan tidak bertentangan dengan agama.

Seandainya PAN dalam pemilu yang akan datang kalah, lantas Anda tidak jadi presiden, bagaimana program Anda selanjutnya? Akan kembali ke Muhammadiyah atau terus akan memperjuangkan partai itu untuk pemilu berikutnya?

Saya akan melihat situasi realistis pada waktu itu dan juga kemampuan saya sendiri. Kalau beban yang saya pikul masih masuk akal, saya akan terus. Tapi kalau ternyata beban itu sudah di luar kemampuan saya, tentu saya akan memikul beban-beban saya yang belum sempat saya pikul. Jadi, itu masih hal masa depan yang belum bisa saya tentukan sekarang.

Selama ini Anda dianggap sebagai tokoh kontroversial. Bagaimana Anda menyikapi tuduhan-tuduhan tersebut?

Pro-kontra terhadap gagasan-gagasan saya adalah hal yang lumrah dan amat normal. Apalagi seorang Amien Rais yang tidak ada sekuku hitamnya Nabi. Nabi yang maksum dan sempurna saja masih menghadapi pro-kontra.

Perjuangan Anda dianggap tidak mewakili aspirasi umat Islam, bagaimana komentar Anda?

Saya pikir memang sangat sulit mengatakan siapa wakil umat Islam yang merupakan 89% bangsa Indonesia. Anda angkat siapa pun tokoh Islam, sulit dikatakan dia mewakili 180 juta umat Islam di Indonesia. Bukan hanya sekarang. Ketika menjadi Perdana Menteri, Pak Natsir dulu hanya dianggap mewakili Masyumi, dan Kiai Idham

Chalid mewakili NU. Wakil Islam siapa? Tidak ketemu.

Anda dituding telah berganti kiblat ke Amerika. Bagaimana sebetulnya sikap politik Anda?

Anggapan itu tidak benar sama sekali. Sampai saya mati, kiblat saya di bidang politik, sosial, dan ekonomi tetap pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Nah, dalam rangka membela kepentingan bangsa itulah saya sejak dini ingin membuka komunikasi seluas mungkin.

Sebetulnya, saya tidak menjalin komunikasi ke Amerika saja, tapi juga ke Arab Saudi, Hongkong, Australia, Jepang, dan negara-negara Eropa. Bahkan beberapa negara musuh Amerika, seperti Iran, Irak, Libya. Yang jelas, saya ke luar negeri bukan untuk minum kopi atau menyaksikan konser, tapi untuk berceramah, seminar, dan melakukan lobi dengan para tokoh di negara-negara maju itu.

Banyak tokoh Islam yang dulu dekat dengan Anda kini menyerang Anda. Ini bagaimana?

Saya kira itu karena soal kesalahpahaman saja. Mungkin karena cara pandang yang berbeda. Itu hal biasa saja. Saya tak akan marah atau pun gembira, karena ini proses alami. Saya yakin teman-teman dari kalangan Islam yang betul-betul jernih berpikirnya bisa tetap memahami dan menghormati apa yang saya perjuangkan saat ini.

Anda memimpin partai yang bukan partai Islam. Lalu bagaimana konsep Anda dalam memperjuangkan aspirasi politik umat Islam?

Ya, kepentingan politik Islam menurut saya mungkin akan berbeda dengan orang-orang yang tidak setuju dengan saya. Karena itu, saya tak akan buang-buang waktu. Toh, itu nantinya juga tidak akan cocok lagi.

Apa tidak lebih baik kalau umat Islam bersatu dalam satu partai politik Islam?

Oh, kalau itu bisa, saya kira itulah yang terbagus. Tapi secara sosiologis, politis, dan juga historis mungkin sudah sulit sekali. Karena menggabungkan 180 juta umat Islam dalam satu wadah partai, itu tugas yang mungkin di luar jangkauan manusia sekaliber saya ini. Mungkin memerlukan kemampuan manusia yang cukup dahsyat.

Lihat saja di Malaysia, yang rasa keberagamaannya juga tinggi. Delapan belas juta penduduknya yang sekitar 60%-nya Muslim tak

bisa bergabung dalam satu partai Islam.

Bagaimana Anda melihat prospek koalisi partai-partai Islam?

Sesungguhnya, kalau kita kembali ke resep Al-Qur'an, sangat gampang membangun kerja sama antarpartai Islam. Dalam Al-Qur'an sudah terang-benderang supaya orang beriman bekerja sama untuk menegakkan kebajikan dan takwa, dan jangan bekerja sama untuk menegakkan dosa dan permusuhan.

Jadi, kalau partai Islam atau pun partai-partai yang berbasis massa umat Islam memegang resep Al-Qur'an tadi, kita tidak usah "kamu *ngalor* saya *ngidul*". Kembalilah kepada apa yang kita perjuangkan. Kalau bersandar pada takwa dan kebajikan, kita akan sangat mudah berkoalisi.

PAN tidak gentar menghadapi koalisi partai-partai Islam?

PAN adalah partai yang penuh keyakinan diri kepada pertolongan Allah. Kalau ada partai yang akan meninggalkan PAN, maka PAN juga akan meninggalkan mereka.

Tokoh partai Islam, seperti Yusril, menantang Anda berdebat, tapi katanya Anda selalu mengelak. Bagaimana sebenarnya?

Yusril pernah mengatakan saya tak berani debat dengannya. Mendengar itu, saya sangat kaget. *Wong* saya berdebat dalam bahasa Inggris dengan tokoh-tokoh Amerika saja berani, apalagi dengan seorang Yusril. Jadi, kata-kata Yusril itu terasa arogan sekali. Nah, kalau dimulai dari arogansi, justru saya jadi tersenyum, *gitu aja*.

Kalau Anda jadi presiden, apa langkah Anda, misalnya, untuk mengatasi kerusuhan Sambas, Ambon, dan sebagainya?

Saya segera menginstruksikan kepada pimpinan TNI dan Polri untuk bertindak seserius mungkin menangkap dalang kerusuhan dan provokatornya. Saya bukan ahli intelijen atau militer. Tapi buat saya —dengan pikiran sederhana— dalang dan provokator itu bisa diketahui secara mudah.

Ambon kan kota kecil, penduduknya terbatas, sehingga setiap gerak-langkah orang-orang di masyarakat bisa terlihat jelas. Sungguh amat aneh bila dikatakan hingga kini tidak diketahui sebab-musababnya. Kalau saya jadi pimpinan negara ini, saya instruksikan dalam tempo sependek mungkin kerusuhan berdarah harus dihentikan.

Kasus Aceh, Tanjung Priok, Kupang, Ambon, Sambas akan menjadi perhatian Anda untuk diselesaikan?

Bukan saja harus, itu adalah kewajiban keagamaan, kewajiban kemanusiaan, kewajiban politik dan hukum. Penyelesaian kasus-kasus kebiadaban seperti itu menempati puncak prioritas saya.□

Tak Mungkin Indonesia Jadi Negara Islam

Wawancara **Franz Magnis-Suseno**

PEMERINTAH Orde Baru sebetulnya keliru melakukan kebijakan asimilasi. Keberhasilan memupuk kerukunan antarumat beragama dan antaretnis ditampakkan secara artifisial tanpa tahu bahwa persoalan substansial masyarakat multikultur kita terletak pada kurangnya komunikasi.

Hubungan antarumat beragama di Indonesia, khususnya antara Islam dan Kristen, belakangan ini kembali agak terganggu terutama setelah pecahnya peristiwa Ketapang dan Kupang beberapa waktu lalu. Lepas dari pemicu awal dan siapa dalang utamanya, kedua peristiwa tersebut tentu saja turut mencoreng harmonisasi hubungan kedua agama yang terjalin baik selama ini. Dan, kontan saja banyak tokoh dari kedua agama ini, termasuk dari pemerintah, yang menyesalkan kedua peristiwa itu.

Dalam konteks yang lebih luas, rohaniwan dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara **Franz Magnis-Suseno**, berpendapat bahwa selama ini pemerintah Orde Baru telah mematikan pengelolaan konflik secara wajar. Masyarakat Indonesia merasa tidak bisa mengungkapkan penolakan, harapan, kepentingan, tuntutan, dan kritik yang sebetulnya terbilang wajar. Mereka harus menerima apa yang dipaksakan oleh pemerintah. "Akibatnya," kata Romo Magnis, "masyarakat tidak punya pengalaman untuk mengkompromikan konflik kepentingan, emosional maupun ideologis."

Selain soal hubungan antarumat beragama, peraih gelar Doktor Filsafat dari Universitas Munchen (1973) ini juga bicara soal politik Islam mutakhir, termasuk soal keberadaan partai-partai Islam. Berikut wawancaranya.

Bagaimana Anda melihat hubungan antara umat Islam dan non-Islam yang akhir-akhir ini diwarnai pertentangan?

Saya punya obsesi dari sudut pandang seluruh bangsa Indonesia dan minoritas Kristen bahwa masyarakat minoritas akan merasa tenteram dan aman apabila masyarakat mayoritas juga merasa tenteram dan aman. Ada hubungan timbal balik yang berlaku secara nasional dan regional. Meskipun mayoritas masyarakat beragama Islam, tetapi penting juga untuk tetap memelihara hubungan baik dengan masyarakat minoritas. Sewaktu diadakan *lailatul ijtima`* di rumah Gus Dur beberapa waktu lalu, saya juga datang, meski mungkin dari sudut pandang lain saya bisa dianggap "murtad". Tapi, terus terang, meski waktu itu saya berada di antara para kiai, saya tetap merasa terlindung dan aman.

Itulah sebabnya mengapa yang mayoritas mesti bertanggung jawab terhadap yang minoritas. Dan, ini hanya mungkin dilakukan kalau yang mayoritas sudah merasa mantap. Kalau misalnya sebagian umat Islam yang punya aspirasi politik merasa tersingkir, jelas tidak mungkin akan ada ketenteraman di masyarakat karena terus saling mencurigai. Dulu Kristen dan NU tidak begitu dekat karena NU punya budaya sendiri yang kental dan tidak mudah dimasuki orang luar. Kultur ini berubah sejak kepemimpinan Gus Dur, bahkan kini tidak Gus Dur saja yang bersikap demikian. Menariknya, sejak kasus Situbondo hubungan Kristen Katolik dan NU di Jawa Timur membaik karena mereka bekerja sama.

Anda melihat ada gejala sekelompok umat Islam yang merasa tidak terlindungi?

Mungkin bukan tidak terlindungi, tetapi merasa tersingkir pada awal Orde Baru. Saya kira ini menimpa Islam modernis, yakni Masyumi, sehingga ketika pertama kali datang Masyumi punya nama baik, tetapi sesudah kejatuhan Orde Lama mereka mendapat caci maki. Kenyataan bahwa Orde Baru tidak mau merehabilitasi nama baik Masyumi, menurut saya ini kesalahan politis. Saya kira ini tidak semata-mata kesalahan CSIS. Tapi jelas, pada permulaan Orde Baru dan Golkar, Katolik memainkan peranan besar sehingga saya bisa merasakan bagaimana Masyumi punya pandangan bahwa Katolik berniat menyingkirkan mereka.

Saya justru ingin hal-hal semacam itu diatasi. Dengan Paramadina Mulya saya menjalin hubungan baik, dengan Muhammadiyah

saya sering bertemu. Meski terus terang dulu Muhammadiyah terasa "kering". Mestinya Katolik menjalin hubungan tidak cuma dengan kalangan Muhammadiyah, tetapi juga membangun hubungan dengan kalangan Islam lain.

Ketersingkiran umat Islam dari aspek politis menurut Anda bisa diperbaiki dengan cara apa?

Dulu, sebenarnya ada kekeliruan persepsi mengenai Islam politik itu sendiri. Ada satu orang yang menunjukkan bagaimana seharusnya Islam bersikap, yakni dengan ucapan "Islam yes; partai Islam no". Wajar bila kemudian Masyumi yang pernah menjadi partai utama merasa terpukul dengan ucapan itu. Namun, sebenarnya dalam berpolitik sekarang ini Nurcholish Madjid adalah orang yang paling cerdas. Dia konsisten, cerdas, meski dia bukan politikus. Waktu itu andaikata Islam politik tidak begitu terikat pada partai, tentu dia akan lebih mudah masuk ke Golkar.

Di situ dia akan lebih mudah diterima. Sebab partai baru memang mau menghancurkan realita partai. Dan ini tidak cuma terjadi dalam partai-partai Islam saja, tetapi dalam partai Katolik pun ada pertentangan. Katakanlah antara partai Katolik yang tergabung dalam KWI dan Katolik Golkar. Ada pertentangan keras antara Frans Seda dan Harry Tjan Silalahi. Di Flores guru-guru Katolik yang menjadi tokoh partai Katolik yang ikut Pemilu 1971 dipecat oleh Kanwil yang terdiri atas orang-orang Golkar yang Katolik juga. Saya kira untuk mendamaikan umat Islam dibentuklah ICMI. Tapi, cara pendekatan ICMI sendiri masih dalam kerangka Orde Baru.

Apakah ICMI dibentuk masih dalam kaitan paradigma Nurcholish Madjid bahwa "Islam yes partai Islam no"?

Saya kira tidak secara eksplisit begitu. Sebab, Cak Nur berpikir lebih luas dan itu menghasilkan perubahan cara berpikir terhadap Pancasila. Pancasila tidak lagi dilihat secara konfrontatif sebab sebetulnya nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan tidak pula menghambat perkembangan Islam. Harapan saya sekarang dengan terbukanya kemungkinan memapankan demokrasi karena dengan demokrasi masalah agama mayoritas dan minoritas akan kehilangan relevansinya. Katakanlah minoritas Kristen tidak akan takut dengan mayoritas Islam.

Bagaimana Anda melihat fenomena munculnya partai-partai

agama?

Tidak menjadi masalah. Entah PUI, PKB, PBB, dan lain-lain, yang jelas unsur primordial atau SARA tidak mungkin terjadi.

Tapi mengapa banyak orang merasa keberatan dengan munculnya partai agama?

Mereka memandang kemungkinan munculnya bahaya primordialisme. Saya berpendapat primordialisme muncul kalau aspirasi agama tidak ditampung. Kalau kita melihat sekian banyak orang mau masuk politik dengan inspirasi yang sama, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, tidak masalah. Sebab, secara nyata diakui setiap warga negara punya hak untuk itu. Dulu pada 1950-an juga tidak masalah.

Artinya partai agama tidak masalah sepanjang masih dalam kerangka negara kebangsaan?

Ya. Negara kita memang kebangsaan. Tentu kalau ada partai yang hendak menjadikan negara agama, tidak akan disetujui. Sulit. Tapi saya tidak melihat tendensi pembentukan negara agama karena jelas itu tidak demokratis.

Apakah Anda tidak melihat kemungkinan partai-partai Islam bersatu lantas bergerak untuk mengubah *platform* negara kebangsaan?

Saya melihat itu masih jauh sekali. Islam Indonesia terdiri atas garis pokok yang selama ini dilihat dari kejauhan. Pertama, Islam abangan atau Islam yang dalam dimensi politik tidak mempunyai aspirasi religius islami. Kedua, Islam tradisional terutama NU. Ketiga, mungkin juga ada Islam modernis. Di kalangan mereka sudah jelas ada yang menginginkan penyegaran, diselenggarakan secara terbuka dan nonsektarian. Saya kira tidak mungkin Indonesia jadi negara Islam ala Malaysia. Malah saya mengharapkan demokrasi Indonesia punya landasan kuat sehingga seluruh spektrum golongan Islam mampu terlibat dalam konsensus. Kalau dari keseluruhan umat Islam baik kiri maupun kanan, ada sekitar 5%-10% yang ekstrem, saya kira bukan masalah.

Apakah tidak mungkin menimbulkan konvergensi satu sama lain?

Saya berpendapat kalau kita hendak membentuk demokrasi sungguh-sungguh, minat mengubah pola negara akan sangat berku-

rang. Sebab, pada zaman Orde Baru yang sebetulnya tengah terjadi adalah "demokrasi terpimpin", ketika semua pihak berebut pengaruh pada pimpinan, maka terjadilah kecemburuan dan prasangka politik. Kalau yang sekularis lebih dekat ke pemimpin nasional, yang islamis akan amat curiga dan khawatir sehingga mereka mencoba mendekati lantas menggeser lawannya itu. Sebaliknya, kalau islamis yang dekat, sekularis akan curiga. Inilah yang sebetulnya diinginkan oleh pemerintahan yang otoriter.

Namun, kalau kita punya keterbukaan seperti pada 1950-an, rasa iri hati tidak ada. Kalaupun ada itu terwujud dalam kampanye antarpartai. Kalau kita mengharapkan 80% umat Islam di negara ini berkumpul dalam satu blok, jelas ini tidak realistis. Dalam demokrasi hampir tidak ada kemungkinan pihak minoritas memanipulasi negara. Dengan demikian banyak motivasi yang menghalangi hubungan Islam dan Kristen menjadi hilang dengan sendirinya.

Islamisasi —dalam arti santrinisasi— akan mengurangi kadar kelompok abangan. Apakah ini tidak akan menghasilkan kelompok Islam yang secara politis lebih kuat?

Pengalaman saya bersama para kiai dan santri, mereka semua justru orang yang terbuka sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Generasi muda santri justru orang-orang yang terbuka. Saya kira mungkin juga akan timbul apa yang disebut ekstremis Islam, tidak mungkin tidak. Tapi ini akan diselesaikan dalam Islam sendiri sebab tidak mungkin cuma ada satu potongan santri. Saya tidak tahu apakah disfungsi antara Islam modernis dan tradisionalis akan terus terjadi. Namun yang jelas di situ ada dua budaya internal yang akan berjalan terus. Contohnya hubungan antara Kristen dan Protestan sejak dulu susah, sekarang sudah membaik. Tapi budaya internal tetap berbeda.

Ada kecenderungan Islam sekularis makin menguat di Indonesia. Menurut Anda?

Saya membuat perbedaan sendiri. Kalau Islam "fundamentalis" dianggap sebagai orang-orang yang tanpa melihat kiri-kanan berpegang pada salah satu interpretasi islami tentang Islam. Buat mereka "demokrasi", "hak asasi manusia", tidak bisa diterima karena istilah itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Orang-orang semacam ini belum saya lihat dalam spektrum politik Islam sekarang. Dua-tiga kali mungkin pernah bertemu dengan orang-orang semacam itu. Pendapat saya orang-orang itu lain sekali dengan spektrum politik yang ada.

Namun, di sisi lain ada juga Islam militan, yang tidak mesti fundamentalis. Saya tidak tahu apa sebenarnya tujuan dan harapan mereka. Saya berpendapat sebagian militansi mereka adalah karena frustrasi atau kekecewaan akibat tersingkirnya Islam dari kekuasaan dalam negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Militansi lebih bersifat reaksi atas kekecewaan yang mereka alami. Di luar itu saya tidak tahu. Beberapa kali saya mendengar istilah "taliban" dari kalangan Muslim sendiri. Orang-orang juga mungkin tidak tahu persis arti istilah itu.

Kelompok Islam radikal di Indonesia, dalam batasan tertentu, apakah masih bisa dipahami?

Dipahami memang bisa, tetapi mungkin menimbulkan kesulitan. Saya tidak tahu sejauh mana mereka betul-betul mendukung struktur politis yang kita miliki. Karena tidak punya hubungan dengan mereka, saya tidak tahu persis apa yang mereka lakukan. Saya tidak tahu apakah memang betul ada pihak-pihak yang betul-betul membenci Kristen sehingga secara aktif membuat permusuhan seperti misalnya membakar gereja. Kemungkinan ini ada sebab kadang-kadang ada orang yang menghasut untuk membakar gereja. Apakah ini sesuatu yang terorganisasi atau bersifat kebetulan semata, saya tidak tahu.

Beberapa waktu lalu, ketika Gus Dur mengadakan apel akbar, timbul kekhawatiran negara kita akan mengalami nasib seperti Aljazair. Pendapat Anda?

Sebetulnya situasi di Indonesia cukup jauh berbeda dengan yang ada di Aljazair. Di sana tidak ada minoritas Kristen. Saya belum melihat sesuatu, serupa Front Penyelamatan Islam di Aljazair. Sejak dulu Aljazair punya pemerintahan militer. Mereka sangat islami, tapi selama 30 tahun tidak menghasilkan perbaikan nasib rakyat sama sekali. Padahal Aljazair adalah negara dengan tingkat pendidikan tinggi, dengan pendapatan per kapita lumayan karena punya minyak bumi dan sumber daya manusia bagus. Tiga puluh tahun sesudah perang antikolonial yang amat kejam itu, kondisi rakyat terus memburuk. Situasi ini yang menarik opsi fundamentalistik. Berbeda kondisinya dengan di Indonesia karena masyarakat kita majemuk. Kemajemukan ini justru menghindarkan negara dari bahaya karena tidak ada kelompok ekstrem yang bisa mengambil alih negara, kecuali militer.

Apakah ada pengaruh unsur budaya, misalnya Jawa, sehingga kekerasan dan kecenderungan fundamentalis tidak mendapat dukungan di sini?

Susah mengatakannya sebab Indonesia cenderung kurang ekstrem dan keras. Kesan saya masyarakat Indonesia cenderung tahu diri, dalam arti tidak suka melebih-lebihkan. Dan ini bukan cuma milik orang Jawa. Budaya toleransi ada di sini.

Mengapa dalam masyarakat mayoritas beragama Islam pembentukan partai Islam kurang mendapat dukungan? Tidak seperti di Malaysia, misalnya?

Di Malaysia Islam relatif sedikit. Paling 60%. UMNO bukan partai Islam. Umat Islam biasanya bersikap biasa-biasa saja. Mereka memilih partai yang seimbang. Kalau semua diagamakan, oleh partai yang ekstrem Islam, itu tidak cukup menarik bagi sebagian besar masyarakat lainnya. Di situlah golongan garis keras kurang mengetahui kecenderungan umat. Tak cuma pada agama Islam, tetapi juga pada agama-agama lain golongan garis keras cenderung meremehkan yang lain. Misalnya di Katolik, mereka yang berada di garis keras curiga kepada Konsili Vatikan dan cenderung meremehkan umat Katolik liberal yang sudah mereka anggap setengah kafir. Itu biasa. Tapi sebagian umat pasti memiliki naluri religius yang cukup sehat.

Menurut Anda, apakah aspirasi negara Islam masih hidup dalam konteks politik umat Islam?

Dalam konteks politik praktis hilang total karena sudah dieksko-munikasi. Jadi tidak ada orang beraspirasi politik yang berani bicara mengenai negara Islam. Maka sebetulnya perlu ada konferensi untuk tidak mengganggu-gugat Pancasila secara formal. Bukan karena Pancasila sakti dan menurut saya Pancasila itu tidak sakti, tetapi karena secara politis sudah sulit. Aspirasi ini mungkin tidak akan muncul secara terbuka. Yang lebih mungkin muncul adalah budaya Islam. Tapi ini pun tidak seluruhnya gampang dimunculkan seperti halnya berpuasa ketika orang yang tidak berpuasa tidak bisa makan di depan umum. Untuk masalah berpakaian bagi kaum wanita, di kalangan Islam tampak tidak bisa muncul uniformitas karena semua mendasarkan diri pada interpretasi wajar dalam kehidupan beragama.

Konteks negara Islam sudah ditransformasikan menjadi masya-

rakat Islam. Apakah ada relevansinya secara teologis dan politis?

Secara politis punya relevansi. Dalam arti itikad membentuk negara Islam berbahaya ataukah tidak, tak terlalu banyak artinya. Sekarang yang lebih penting adalah belajar memasuki kehidupan bangsa yang majemuk. Dan itu tidak saya batasi pada hubungan Kristen-Islam. Bangsa Indonesia majemuk betul, yang orang-orangnya masuk dalam berbagai agama dan agama itu sendiri memiliki banyak variasi. Kesan saya persatuan makin rawan, retak-retak. Apakah kebetulan itu muncul sebagai konflik agama seperti di Ketapang dan Kupang, ataukah karena konflik masyarakat daerah belaka.

Menurut saya terjadi penyempitan wawasan kemampuan untuk menghayati cipta sebagai warga satu bangsa menjadi sebatas "kami" dan "mereka". Itu sangat berbahaya. Akan terus terjadi penciutan. Kalau identifikasi "kami" bersifat agama, ini akan menciut bahwa yang masuk golongan "kami" tidak seluruh umat melainkan hanya mereka yang beriman dengan benar. Hal ini menjadi masalah karena Orde Baru mematikan pengelolaan konflik secara wajar. Masyarakat merasa "penolakan, harapan, kepentingan, tuntutan, kritik" yang dirasa wajar tidak bisa diungkapkan, melainkan harus menerima apa yang dipaksakan oleh pemerintah.

Masyarakat tidak memiliki pengalaman mengkompromikan konflik kepentingan, emosional, maupun ideologis. Barangkali juga adanya transformasi masyarakat tradisional menjadi pascatradisional membawa banyak ketegangan. Bagi masyarakat kelas menengah, modernisasi membawa kemungkinan baru yang lebih asyik. Tapi, bagi masyarakat secara keseluruhan, modernisasi mungkin membawa disorientasi seperti urbanisasi, ancaman terhadap eksistensi, dan disorientasi terhadap segala persoalan yang menimbulkan ancaman terhadap kemampuan "merasa satu". Kita harus belajar hidup bersama dalam situasi multikultural karena agama cuma subaspek dari itu.

Terhadap legislasi hukum Islam dalam negara dan bangsa?

Ini jelas sesuatu yang cukup sulit. Kesan saya sebetulnya di kalangan Islam tidak ada kesatuan paham mengenai apa yang semestinya diatur dalam UU nasional dan apa yang diserahkan kepada kesadaran umat. Saya punya jalan keluar bahwa pada hakikatnya agama menyumbangkan etika. Mereka menuntut kehidupan nasional dijalankan secara etis. Menurut saya di antara agama-agama yang

ada, khusus untuk masalah keadilan dan hak asasi manusia, tidak ada perbedaan. Saya menentang mereka yang punya tuntutan penghapusan Departemen Agama. Memang pembentukan Departemen Agama dilakukan setelah terjadi penghapusan "tujuh kata" pada Piagam Jakarta. Tapi itu ada logikanya sebab Islam punya pandangan berbeda mengenai bagian-bagian mana yang patut diatur negara. Misalnya haji, perkawinan, warisan. Wajar bila peranan negara agak kelihatan apalagi agama itu mayoritas.

Sejauh mana legislasi hukum-hukum Islam bisa dilakukan dalam sebuah negara?

Saya sendiri pada hakikatnya mengharap perundang-undangan bersifat nasional. Tidak berlaku cuma untuk satu umat dalam masyarakat. Maka alangkah baiknya tercapai suatu konsensus.

Kalau undang-undang nasional tetapi substansinya dari suatu agama tertentu, apakah mungkin dilakukan?

Ini tentu akan menimbulkan kesulitan besar sekali. Kalau negara itu demokratis, tentu undang-undang ditentukan secara demokratis pula. Namun, di situ tentu terlibat paham-paham yang mendasar mengenai mana yang cocok dan mana yang tidak. Dan saya kira, kami orang Kristen mengharapkan di kalangan Islam ada interpretasi.

Kalau suara umat Islam dalam lembaga perwakilan yang berhak mengadakan legislasi bersifat mayoritas dan secara mayoritas berhasil meloloskan itu, bagaimana?

Tentu oleh pihak minoritas akan dilihat sebagai pemaksaan yang tidak rela disetujui. Tapi mau berbuat apa? Minoritas akan tetap menerima tapi akan melihat hal itu sebagai sesuatu yang tidak wajar. Saya sendiri tidak melihatnya sebagai masalah aktual sebab di kalangan Islam yang saya ketahui hal-hal seperti itu tidak diusulkan. Di kalangan intelektual Islam usulan semacam ini tidak pernah ada dan saya juga tidak suka bertanya sebab itu pertanyaan sensitif untuk kaum muslimin sendiri.

Tapi rasanya persoalan itu perlu dibuka. Sebab, seperti Pakistan, ketika mayoritas yang beragama Islam memenangkan percaturan politik, lantas memberlakukan undang-undang nasional berdasar hukum Islam?

Justru kalangan Islam sendiri perlu membicarakannya. Tokoh-tokoh seperti Anda (Masdar F. Mas'udi), Nurcholish Madjid, dan

Gus Dur harus membicarakannya. Tapi di Indonesia kita punya spektrum politik cukup stabil sehingga keinginan kelompok ekstrem tidak punya harapan besar. Taliban di Afganistan, misalnya, sangat ekstrem. Bahkan lebih ekstrem ketimbang sebelum terjadinya revolusi Afganistan. Taliban adalah reaksi terhadap modernitas. Mereka tidak datang begitu saja. Tapi tidak semua negara yang mayoritas beragama Islam ada kelompok Taliban. Saya kira para teolog Islam perlu mencernakan modernisasi dalam berbagai dimensi.

Tantangan menyeluruh modernitas terutama dalam masalah etika. Islam belum berhasil melewatinya. Kristen pun begitu pula. Cuma dalam masalah politik mereka terpaksa menerima karena mereka hidup dalam negara sekularis garis keras. Kristen tidak punya masalah dengan modernitas. Tapi dengan budaya modernitas masih ada masalah. Katakan saja masalah revolusi seksual. Ada uskup agung Lutheran di Swedia secara aktif mendukung sepasang pastur Lutheran yang homoseks. Mereka hidup dalam hubungan perkawinan di mana para uskup Lutheran lain serta banyak umat menentang itu dengan keras. Saya kira masyarakat Islam Indonesia masih mengalami persoalan politis sehingga seluruh dampak modernitas secara kultural belum seluruhnya sampai.

Mengapa antarmasyarakat masih sering terjadi benturan bahkan mengarah pada kekacauan yang disebabkan persoalan agama?

Kebijakan asimilasi pemerintah Orde Baru pada dasarnya keliru. Masalahnya bukan pada asimilasi, tetapi komunikasi. Persoalan bukan terletak pada orang Tionghoa masih memakai nama Tionghoa. Kalau komunikasi tidak berjalan, pemakaian nama Melayu, Arab, Sansekerta, tidak akan sedikit pun mengubah situasi. Sebaliknya kalau ia tetap memakai nama Tionghoa, tapi tidak sedikit pun membuat orang pribumi marah, tentu tidak muncul persoalan. Persoalan penting adalah bagaimana kita bisa menaikkan komunikasi. Antarumat beragama penting sekali melakukan komunikasi. Misalnya pastur lokal berkenalan dengan tokoh-tokoh Islam atau orang Hindu melakukan silaturahmi dengan masyarakat Islam.□

Kalangan Islam Harus Tampil Percaya Diri

Wawancara **H. A. Malik Fadjar**

BANYAK fenomena menarik terjadi di era reformasi ini, di antaranya lahirnya banyak partai politik. Tak terkecuali, kalangan Islam juga mengambil bagian, suatu hal yang mustahil di era Orde Baru. **Prof. Ahmad Malik Fadjar, M.Sc.**, menteri Agama RI, yang selama ini juga dikenal sebagai salah seorang pembaru pemikiran Islam dan keagamaan, menyoroti persoalan tersebut dalam sebuah pemikiran yang moderat. Baginya, munculnya banyak partai politik Islam itu sebenarnya akibat ketertekanan pada era sebelumnya. "Karenanya ketika dibuka peluang, kelihatan aslinya," katanya.

Maraknya pendirian partai Islam, menurut master *educational risearch* lulusan Florida State University, AS ini, adalah potensi lama yang selama ini terpendam. Hal itu kenyataan dari dinamika. Akan menguntungkan jika komitmen mereka sama, khususnya dalam hal keislaman dan keindonesiaan. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini lebih memandang kesamaan *platform* sebagai hal penting di antara partai Islam.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana gagasan-gagasannya, Hajriyanto Y. Thohari, redaktur khusus *Panji*, yang juga mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah, secara khusus mewawancarai Malik Fadjar. Berikut petikannya.

Sebagai menteri agama dan dikenal sebagai salah seorang pembaru pemikiran Islam dan keagamaan, bagaimana Anda melihat maraknya pendirian partai-partai Islam belakangan ini?

Sesungguhnya dalam sejarah perjalanan bangsa ini, khususnya

perjalanan umat Islam, penyaluran aspirasi melalui wadah-wadah yang lebih spesifik itu sudah ada. Saya sepakat dengan sebuah artikel yang mengatakan bahwa kalau bicara Indonesia, siapa pun tidak bisa luput dari persoalan agama, terutama Islam, karena memang realitasnya begitu. Dan, kalau bicara soal agama, maka di dalamnya sarat dengan paham atau aliran yang sudah melekat dan membentuk jamaah. Saat mengekspresikan aspirasi tersebut dalam bentuk politik, di situlah muncul wadah-wadah yang demikian banyak.

Apakah dengan demikian bisa dikatakan sebagai akibat dari kegagalan gerakan pembaruan?

Bukan kegagalan. Tapi, inilah bagian dari proses perjalanan sejarah perpolitikan kita, yang dalam konteks kehidupan yang lebih rasional tidak diikuti keinginan membentuk wadah-wadah. Sebagai contoh, selama Orde Baru, demokrasi tidak berkembang. Padahal pendekatan pembaruan lebih mendukung berkembangnya kehidupan yang lebih rasional. Sayangnya, saat itu suasana monolitik yang lebih dominan. Kalau kita jujur, umat ini masih terendam dalam suasana ketertekanan yang lama dan tiba-tiba memperoleh peluang serta kesempatan yang luas. Maka secara cepat, muncul dan kelihatan aslinya. Jadi bukan kegagalan gerakan pembaruan. Gerakan itu sendiri sebuah proses yang telah menghasilkan sesuatu yang luar biasa.

PAN dan PKB lahir dari ormas Islam mapan. Tapi banyak partai lain, yang diprakarsai gerakan Islam kontemporer, tampil secara eksplisit sebagai partai Islam. Bagaimana soal ini?

Saya melihatnya bukan karena faktor agama sendiri. Tetapi, partai-partai tersebut tampil dalam rangka melihat masa silam dengan melepas ikatan masa lalu. Karena itu kemunculannya juga diwarnai oleh dua-tiga figur yang selalu terpadukan. Taruhlah orang yang sudah duduk di kursi roda pun masih dijadikan penasihat partai karena komitmennya masih punya kekuatan daya serap. Dalam bahasa pemilunya, tokoh demikian bisa sebagai *votegetter*. Sebetulnya di Indonesia, jualan politik tanpa label Islam juga susah. Tengok saja Golkar atau PDI. Apakah mereka tidak memasang figur "haji"? Bahkan tidak cukup itu, seperti di PDI, mereka masih juga didukung dengan organisasi dakwah pendukungnya seperti Majelis Muslimin Indonesia (MMI).

Jadi, banyaknya partai Islam menguntungkan tidak bagi umat

Islam sendiri?

Tidak bisa dilihat menguntungkan atau tidak. Itu adalah kenyataan dari dinamika. Sekali lagi, ada atau tidak partai Islam, umat sudah diwakili oleh aliran-aliran tadi. Komitmen *ukhuwah islamiyah* itu kan tidak mewujud secara fisik, melainkan ide. Dalam konteks ini, Islam memberi kerangka yang bagus, yakni *fastabiqul khairat* itu. Sebenarnya banyaknya partai Islam itu nggak apa-apa, yang penting mempunyai *common platform* bagus yang sama. Persoalannya, sampai saat ini belum ada kontak di antara mereka sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan umat. Padahal, dulu hanya ada satu, yakni Masyumi.

Satu pun ternyata tidak bisa tahan lama. Buktinya, upaya-upaya menyatukan itu toh sudah dilakukan. Dulu ada MIAI, ada Majelis Syura. Tetapi di dalamnya sarat dengan perbedaan aliran. Sekali kita menyatu, mestinya ada *sharing, take and give* antaraliran. Hal itu tidak menjadi masalah kalau mampu membangun cara pandang dan komitmen yang sama. Jadi jelas, bukan suatu pekerjaan sederhana. Semua sadar, upaya untuk menjembatani antara satu tokoh dan tokoh lainnya sudah dilakukan. Umumnya, yang bersedia melakukan itu adalah orang-orang yang lebih rasional, rasa *tasamuh*-nya besar. Di sini perlu seorang figur. Dan suka atau tidak, setuju atau tidak, orang sering berharap pada sosok Cak Nun (Emha Ainun Nadjib) karena dia dipandang mempunyai kekuatan daya pemersatu, lepas dari kekurangannya. Ini bisa muncul lima atau sepuluh tahun lagi, orang mulai berpikir rasional.

Dalam bentuk apa?

Wadahnya biarkan beragam, tetapi komitmennya sama, khususnya keislaman dan keindonesiaan. Makanya tema keindonesiaan dan keislaman tetap hidup. Itu menggambarkan, di balik rasa emosional dan ikatan sentrisnya, menyembul juga keinginan *sharing*.

Beberapa saat lalu, upaya *sharing* telah dilakukan di rumah Ismail Suny. Konon upaya itu gagal menyatukan visi di antara mereka. Apa komentar Anda?

Kalau ukuran persatuan itu masih model formal, tidak akan tahan lama. Itu harus muncul dari kedalaman dan wawasan ke depan, bukan rekayasa. Tidak bisa hanya berkumpul dan membuat deklarasi.

Menurut Ismail Suny, "tidak bersatunya" justru bukan per-

soalan fundamental, tapi lebih karena persoalan politik praktis dan egosentris, yakni semuanya ingin jadi presiden.

Saya kira betul. Dulu pada 1959 juga demikian. Ayat Kursi yang dibaca satu, tapi kalau sudah bicara kursi jabatan, semuanya main. Itu tidak cukup hanya pada satu partai tetapi juga antarpartai. Ada yang bisa menahan diri, ada juga yang tidak.

Anda melihat adanya kecenderungan di kalangan Islam untuk kembali ke era 1950-an dengan memunculkan partai-partai Islam. Soalnya, di sisi lain, pandangan kalangan "nasionalis" terhadap kelompok Islam tidak berubah. Padahal, kelompok Islam telah banyak melakukan pembaruan, termasuk dalam konteks politik.

Itu bisa dirasakan. Dan, saya kira itu sah-sah saja, wajar. Yang lebih penting, dalam melihat keyataan ini mestinya kalangan Islam harus lebih percaya diri untuk tampil dan kehadirannya bisa dipahami publik. Bahwa orang masih menilai minor, itu kan anggapan orang. Makanya perlu proses. Ide tentang pluralisme kan juga sudah banyak dibicarakan oleh orang Islam sendiri.

Selain penggunaan simbol-simbol Islam oleh partai politik, kini masih juga semarak penggunaan unjuk massa. Anda melihat fenomena apa ini?

Simbol-simbol itu selalu melekat pada setiap kelompok umat, seperti dua sisi mata uang saja. Itu harus dipahami dengan kelapangan hati. Artinya kenyataan itu tak bisa dielakkan. Persoalannya, kenapa itu muncul lagi. Menurut saya, karena ada tantangan yang minta dijawab lewat simbol. Tapi pada suatu saat simbol itu tidak menjadi faktor dominan. Simbol itu kan memiliki perekat dan efektif untuk sebuah seruan. Pada zaman revolusi, suara takbir kan bisa memberi getaran tersendiri. Ada dua sisi maknanya, selain menyentuh kedalaman juga menjadi simbol. Karena itu saya selalu mengatakan, jaga deh umat Islam, jangan dikutik-kutik hingga marah. Kalau sudah marah, tampil dengan seruan takbir saja bisa lain persoalannya.

Sekarang sudah marah belum?

Nggak tahulah. Tetapi ada suasana seolah terpojokkan. Maka, apa pun yang mereka miliki yang dianggap bisa memberi daya tahan akan dikeluarkan. Saya mengalami masa itu. Masjid-masjid dijadikan markas perjuangan dengan bambu runcingnya karena di sana

memang dijadikan simbol kesakralan umat yang tidak bisa diukur secara matematis. Pada peristiwa G-30-S *kan* yang muncul juga simbol-simbol seperti itu.

Pada zaman reformasi, unjuk kekuatan itu apa masih relevan?
Persoalannya bukan relevan atau tidak. Pada umumnya, simbol-simbol itu muncul kalau ada tantangan. Dan itu bukan hanya milik umat Islam. Itu milik semua agama.

Tapi mengapa tuduhan penggunaan massa itu kok selalu tertuju kepada kelompok Islam?
Dalam suasana ketika masing-masing menampilkan kekuatan sebagai dirinya, pasti dia akan membawa seperangkat, misalnya simbol. Yang namanya apel akbar, *istighatsah*, dalam keadaan *adem-adem* saja, kan nggak pernah ada. Tapi begitu terusik, tawon saja, pasti akan bereaksi.

Orang bilang Islam sekarang jadi lakon. Banyak hal dihubung-hubungkan dengan Islam. Mengapa demikian?
Bukan hanya dijadikan lakon, tetapi juga dijadikan umpan. Tema-tema agama dijadikan penyulut, sampai-sampai transmigrasi disebutnya sebagai islamisasi. Tentu ini persoalan politik. Kasus santet di Banyuwangi juga demikian. Sebenarnya kan itu soal lama. Tapi setiap momentum selalu dimanfaatkan. Pertanyaannya, ada apa di balik itu, apakah ada gejala polarisasi atau desintegrasi? Memang, agama, selain menjadi faktorintegrasi bisa juga dijadikan faktor desintegrasi. Menjadi faktor integratif jika melahirkan kerja sama dan kebersamaan dengan memahami seluruh perbedaan yang ada di setiap agama. Sebaliknya, dia menjadi faktor desintegratif apabila ditempatkan dalam posisi saling berhadapan. Terus terang, sekarang dihadapkan pada kenyataan seperti itu, agama dijadikan sebagai pemicu.

Sejauh pengamatan Anda, hal demikian itu mengganggu kerukunan kehidupan beragama atau tidak?
Ya. Itu mengganggu, baik intern agama, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dan pemerintah.

Fenomenanya?
Di intern umat Islam saja dipakai oleh partai-partai Islam, misalnya penggunaan standar akidah. Juga, seperti memilahkan kelompok Islam dan non-Islam. Mestinya nggak perlu dipertentangkan.

Kalau kita menyadari betul, dalam Islam khususnya, setelah iman itu kan kemanusiaan. Itulah mengapa Cak Nur sering menyitir Ibnu Taimiah: "Lebih baik memilih pemimpin kafir tapi adil ketimbang pemimpin Islam yang tidak adil lagi zalim." Yang penting *kan* bagaimana dia menegakkan nilai-nilai Islam. Apa gunanya berkuasa jika nilai-nilai Islam tidak tegak, misalnya tetap terjadi penyelewengan dan korupsi.□
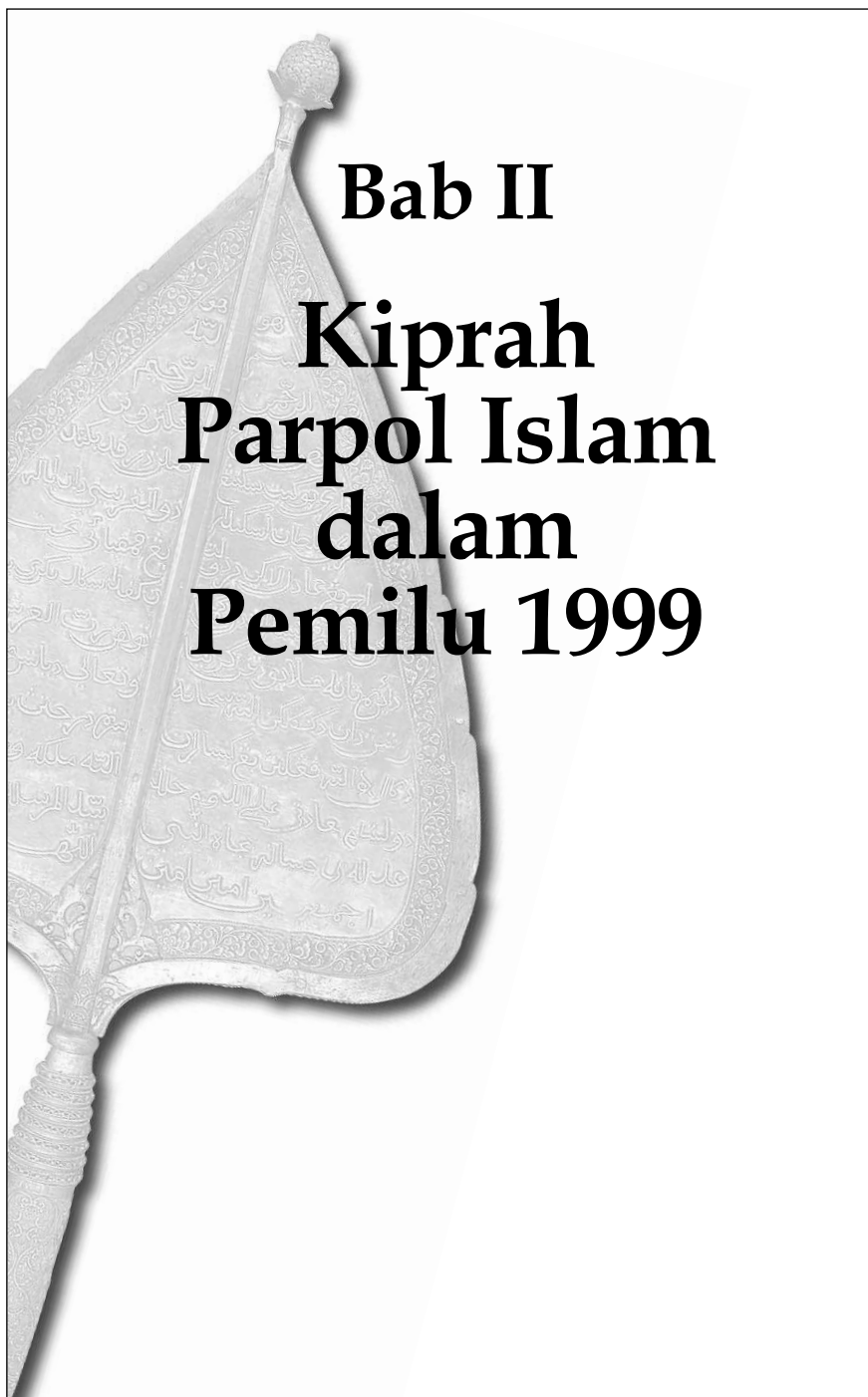
Bab II

Kiprah Parpol Islam dalam Pemilu 1999

Partai Islam : Antara Gembira dan Ragu

Oleh **Arif Zulkifli**

BANYAK yang menilai "partai Islam" dari tokoh yang memimpinnya. Hanya 29 persen responden yang menyatakan akan memilih partai politik berazaskan Islam.

Runtuhnya rezim Orde Baru di samping meninggalkan kehancuran seperti ekonomi yang centang-perenang juga membawa banyak berkah. Setelah tiga puluh tahun eksistensi partai politik Islam dipinggirkan dan diperas ke hanya satu partai (PPP), sekarang ini ibarat "musim tanam" bagi berdirinya partai Islam. Departemen Dalam Negeri, kantor yang mengurus pendaftaran partai, sampai saat ini telah mencatat ada 31 partai dengan embel-embel Islam baik dalam azas maupun nama.

Sejalan dengan ramainya pendirian partai, tanggapan pro-kontra pun muncul. Mereka yang pro berargumen bahwa munculnya partai politik Islam merupakan suatu yang tidak terhindarkan seiring dengan melajunya iklim reformasi. Sementara mereka yang berseberangan pendapat menilai partai politik Islam merupakan ancaman bagi kemajemukan bangsa.

Lalu bagaimana komentar publik? pandangan responden jajak pendapat TEMPO yang dilakukan dua pekan lalu terbelah juga. Sebagian responden menyambut kehadiran partai Islam dengan gembira. Mereka menganggap partai-partai itu merupakan saluran politik baru bagi umat Islam setelah peran politik mereka selama Orde Baru disumbat. Mereka yakin partai-partai berbendera Islam tidak akan membingungkan umat dalam menentukan politiknya. Sementara itu, sebagian lainnya, dalam porsi kurang lebih berimbang me-

Apakah akan memilih partai Islam dalam pemilu kelak?

Ya	**29%**
Tidak	**15%**
Rag-ragu	**56%**

Apakah partai Islam menguntungkan Anda sebagai warga negara ?

Ya	**32%**
Tidak	**30%**
Tidak tahu	**38%**

nyatakan hal sebaliknya.

Sebagai pendatang "baru" mayoritas responden berusia kurang dari 40 tahun atau masih kecil ketika era partai Islam Masyumi muncul, wajar jika mereka belum ada "pemihakan opini" yang tegas terhadap partai politik Islam. Tiga dasawarsa hilangnya Islam dalam wacana politik formal membuat banyak orang tak punya memori; seperti apa sih wajah partai Islam yang sebenarnya.

Kegamangan itu bertambah kental ketika responden ditanyakan dari mana mereka mengidentifisikasikan sebuah partai yang merupakan partai Islam.

Umumnya, responden berpendapat bahwa keislaman sebuah partai ditentukan oleh tokoh yang memimpin partai itu. Artinya, ketokohan dan keislaman seorang pemimpin menjadi nilai jual yang tinggi bagi sebuah partai politik untuk menarik massa Islam. Persentase itu bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan identifikasi berdasarkan azas yang digunakan atau program kerja. Sementara itu, yang lainnya mengidentifikasikannya dari lambang yang dipakai partai tersebut.

Jika jajak pendapat itu bisa dijadikan patokan, kenyataan itu cukup mengkhawatirkan. Soalnya, ketokohan bukan jaminan

Sumber Identifikasi partai Islam

Dari pemimpinnya	**36%**
Dari lambangnya	**22%**
Dari azasnya	**19%**
Dari Programnya	**12%**
Dari namanya	**9%**
Lain-lain	**2%**

Apa agama yang Anda anut?

Islam	**88,3%**
Non-Islam	**11,7%**

bagi diterapkannya nilai-nilai Islam oleh sebuah partai politik. Hal yang sama berlaku jika identifikasi yang dipakai adalah sekadar lambang. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya manipulasi simbol Islam terbuka lebar. Bisa saja jika sebuah partai "Islam" mendapat suara mayoritas, tapi kemudian loyo ketika harus memperjuangkan semangat Islam, seperti mewujudkan pemerintahan yang bersih, birokrasi yang efisien, dan sebagainya.

Kalau hal ini berlanjut bukan tidak mungkin fakta tersebut menjadi bumerang bagi partai Islam sendiri. Dan yang paling tertohok adalah mereka yang mendirikan partai Islam dengan niat yang tulus, seperti membangun landasan dan etika moral yang kukuh dalam praktek berpolitik.

Pendapat tentang partai Islam

	Setuju	Tidak setuju	Tidak tahu/ ragu-ragu
Partai Islam merupakan saluran politik bagi umat Islam	**51%**	**30%**	**19%**
Partai Islam merupakan jawaban terhadap dibatasinya peran politik umat Islam	**36%**	**36%**	**27%**
Partai Islam merupakan ancaman bagi kemajemukan bangsa	**20%**	**59%**	**21%**
Partai Islam membingungkan umat Islam	**36%**	**40%**	**24%**

Lalu, akankah partai Islam unggul dalam pemilu kelak? Mayoritas responden tampaknya masih bingung. Lebih dari separo responden tidak tahu atau masih ragu-ragu dalam menentukan pilihan. Hanya 29 persen yang dengan tegas menjawab ya dan sisanya menjawab tidak. Tapi ini tentu bukan harga mati. Masih terbuka kemungkinan partai Islam mendapat suara lebih banyak. Syaratnya, mereka mau menerapkan Islam bukan hanya dalam tingkat simbol.□

Peta Politik bagi Umat Islam

Oleh **Kuntowijoyo**

BANYAK orang Islam kebingungan, peta politik semrawut. Sama-sama warga NU, di masa prakampanye PPP dan PKB bentrok di Jepara dan Pekalongan. Sama-sama orang Muhammadiyah, PPP dan PAN tidak akur di Yogya. Sama-sama NU tapi punya empat partai (PKB, PKU, NU dan SUNI). Sama-sama eks-Masyumi punya tiga partai (Masyumi, Masyumi Baru, PBB). Sama-sama PSII ada dua partai (PSII dan PSII 1905). Mengapa ada PUI, mengapa ada KAMI, mengapa ada PK, mengapa ada PP?

Umat Islam justru dibuat bingung oleh elitnya sendiri. Ada ulama mewajibkan umat untuk memilih hanya partai yang jelas-jelas berasas Islam. Ada ulama yang memilih berasas Pancasila daripada Islam, seperti PIB dan PAY. Melihat singkatan nama-nama saja, umat Islam awam tidak tahu kepanjangannya. Pemilu kali ini rasanya semrawut bagi umat Islam.

Untuk memberi peta kepada komunikasi Islam itulah Salahuddin Wahid dari Partai Kebangkitan Umat (PKU) dalam wawancara dengan *SCTV* tanggal 18 Maret 1999, berusaha membuat klasifikasi yang menarik mengenai partai-partai yang ikut Pemilu 1999. Di dalamnya ia mengatakan bahwa ada tiga jenis partai, yaitu partai Islam, partai sekuler, dan partai yang ada di antara Islam dan sekuler.

Dalam partai Islam di antaranya dimasukanya PKU, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PBB (Partai Bulan Bintang), dan PK (Partai Keadilan). Termasuk dalam partai sekuler ialah PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan, dan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Dan yang berada di antara keduanya adalah Partai Golkar (Golongan Karya) serta PAN (Partai Amanat Nasional). Tentu saja itu se-

buah kemajuan berpikir. Dulu dalam Pemilu 1955 orang hanya membagi dua, Islam dan sekuler, sedangkan sekarang menurut PKU pembagian itu menjadi tiga. Tidak lagi putih-hitam, tapi putih-hitam-kelabu.

Sasaran tembak dari pernyataan pimpinan PKU itu ialah bahwa PKB yang secara resmi diakui oleh PBNU sebagai satu-satunya partai yang sah untuk warga *nahdliyin*. Ingin dikatakannya bahwa PKB sebenarnya bukanlah partai Islam tetapi partai sekuler. Sasaran umumnya secara tersirat ia ingin mengatakan bahwa hendaknya orang Islam memilih partai dengan asas Islam. Pertanyaannya —ini persoalan lama— ialah apakah untuk menjadi Islam sebuah partai harus secara eksplisit mencatumkan asas Islam?

Tentu saja ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak. Mereka yang menjawab ya, mengartikan Islam sebagai simbol; dan mereka yang mengatakan tidak, mengartikan Islam sebagai substansi. Atau dengan istilah lain, yang pertama ialah Islam formal, sedangkan yang kedua ialah Islam material.

Artikel di hadapan Anda ini mendukung gagasan kedua, partai bagi umat Islam tidak harus berasas Islam, tetapi berasas Islam tentu juga baik. Selanjutnya, artikel ini menemukan bahwa partai-partai di Indonesia tidak hanya bisa diklasifikasikan menjadi tiga jenis saja, tetapi empat jenis, yaitu partai berasas Islam, partai yang melakukan objektivikasi, partai yang cenderung kepada spesialisasi, dan partai sekuler (tanpa konotasi *pejoratif*). Perlu diketahui bahwa tidak satu pun partai berasas Islam menghendaki Negara Islam, pada umumnya mereka merumuskannya dengan bukan negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler. Pembentukan Masyarakat Madani, Negara Kesatuan, serta Pancasila dan UUD '45 pada umumnya menjadi rujukan mereka.

Partai berasas Islam

Kalau dihitung-hitung, hanya 11 partai yang jelas-jelas berasas Islam, yaitu PUI (Partai Umat Islam), PKU (Partai Kebangkitan Umat), Partai Masyumi Baru, PPP, PSII (Partai Syarikat Islam), PSII 1905 (Partai Syarikat Islam 1905), Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi), PBB, PK, PNU (Partai Nahdlatul Ummat), dan PP (Partai Persatuan).

Partai- partai itu menganggap bahwa satu-satunya jabaran bagi Islam dalam politik ialah Islam sebagai ideologi. Tentu saja Islam se-

bagai ideologi itu mempunyai sejarah yang panjang, kembali pada SI (Sarekat Islam) dan Masyumi. Dan mereka berada di satu garis lurus dengan para pendahulunya. Mereka lupa bahwa baik SI maupun Masyumi itu sangat kontekstual. Konteks SI adalah pemiskinan dan penindasan kolonial, dan Islam menjadi sarana yang tepat sebagai *rallying point* dan *battle cry* melawan kolonialisme. Masyumi menghadapi ideologi komunis, dan satu-satunya jalan yang tepat ialah menjadikan Islam sebagai ideologi. Lalu pertanyaannya, apakah konsteks kita sekarang masih sama?

Barangkali terobosan baru dalam berpolitik terjadi ketika Ketua Umum PK Nur Mahmudi Ismail mengomentari aliansinya dengan PAN dan PPP menyatakan bahwa persoalan politik sekarang bukan "Islam versus sekuler", tapi "reformis versus nonreformis". Sebelumnya sudah ada komunike bersama antara PKB, PDI Perjuangan, dan PAN yang bagi partai berasas Islam ala PKU nampak seperti aliansi "kaum sekuler", kecuali PAN yang berada di antaranya dengan maksud menggalang kekuatan-kekuatan reformis. Dengan pernyataan itu berarti bahwa PK sudah meninggalkan rumus "halal-haram" dalam politik dan menggantikannya dengan "*mubah*". Memang dalam Al-Qur'an dinyatakan, "Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil; dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui " (*Al-Baqarah*, 2: 42). Bagi PK politik bukan lagi masalah ibadah, tapi masalah muamalah.

Sementara itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak akan berkoalisi. Kalau pernyataan itu berdasarkan perhitungan politik, tentu saja itu hak mereka. Akan tetapi, kalau alasannya ialah soal agama yang prinsipil, maka orang yang merasa memiliki Islam berhak bicara. Kalau alasan agama itu betul, kiranya PBB mempunyai *fixed idea* tentang "Islam versus sekuler" seperti dipatok dalam Pemilu 1955. Memang hidup ini adalah ibadah, tetapi harus ada pemilahan (pembedaan) dan bukan pemisahan.

Kita berharap jangan sampai hanya karena untuk kepentingan politik (yang sementara) hukum Islam disusutkan, dari lima (halal /fardlu/wajib-sunah-mubah-makruh-haram) menjadi hanya dua (halal-haram). Banyak tokoh Islam menjadi reduksionis dadakan gara-gara pemilu. Konflik antara PPP-PKB di Jepara dan Pekalongan dan antara PPP dan PAN di Yogya pasti disebabkan oleh penyusutan hukum Islam itu.

Patut dicatat adanya perkecualian-perkecualian. KAMI (Partai

Kebangkitan Muslim Indonesia) berasaskan Al-Qur'an dan Hadis Nabi, tapi menolak disebut partai Islam (kampanye dialogis TVRI bersama Murba dan PAN). Alasan yang dikemukakan, partai Islam adalah kelompok sedangkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi bersifat universal. Sebaliknya, juga bisa terjadi. PID (Partai Islam Demokrat) mencantumkan asasnya adalah Pancasila, kemudian ada klarifikasi (*Kedaulatan Rakyat* 24/5/1999) bahwa asasnya adalah Islam. KAMI dan PID akan dimasukkan ke dalam partai yang melakukan objektivikasi.

Partai berdasar objektivikasi

Mengenai hubungan antara agama dan negara, sebuah partai dikatakan melakukan objektivikasi bila (a) mengakui adanya pluralisme masyarakat dalam SARA, (b) menjadikan moral agama sebagai landasan gerakan, (c) berusaha supaya moral agama (kemanusiaan, keadilan, kemajemukan) itu menjadi kenyataan objektif, (d) menjadikan Pancasila sebagai asas. Partai berdasarkan pluralisme (a), artinya terbuka bagi siapa saja, dari segi agamanya bisa Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Kong Hu Cu.

Mengenai agama, (b) dan (c) mohon dibaca "sesuai agama masing-masing", dalam hal ini ialah Islam. Berdasar Pancasila (d), artinya tidak menginginkan negara agama, tapi juga tidak negara sekuler.

Berdasarkan kriteria di atas, maka partai-partai di bawah ini termasuk partai yang melakukan objektivikasi, meskipun tidak mungkin mengetahui secara detail dan tuntas: PIB (Partai Indonesia Baru), KAMI, PAY (Partai Abul Yatama), PAN, PID, SUNI (Partai Solidaritas Nasional Indonesia), PUMI (Partai Ummat Muslimin Indonesia).

Selain itu perlu disebut partai-partai yang berusaha melaksanakan moral agama (Islam), seperti PDR (Partai Daulat Rakyat) yang berusaha supaya ajaran tentang dhuafa terlaksana dan Partai Cinta Damai yang mengusahakan terlaksananya ajaran tentang salam. Keduanya bisa digolongkan dalam partai yang melakukan objektivikasi.

Artikel ini ingin merujuk pada buku *Identitas Politik Umat Islam* tentang perlunya objektivikasi. Dalam buku itu juga diterangkan tentang perkembangan sistem pengetahuan umat Islam yang terbagi ke dalam tiga periode, yaitu mitos, ideologi, dan ilmu. Periode sekarang

ialah periode ilmu. Artinya, dalam berpolitik umat Islam harus ilmiah, terbuka, objektif, dan canggih.

Partai berdasar spasialisasi

Spasialisasi berasal dari kata *space*, artinya ruang. Agama mempunyai tempatnya sendiri dalam urusan kenegaraan, tetapi antara keduanya terpisah secara jelas. Dengan kata lain, agama ditempatkan di ruangnya sendiri, agama hanya urusan personal bukan urusan publik. Agama berpengaruh pada person dan pada gilirannya person pada negara. Pengaruh agama pada kebijakan publik tidak ada. Seperti itulah pendapat para teologian (Kristen) di negara-negara sekuler, seperti pendapat Paul Tillich di Amerika.

Letak PKB kiranya di sini dan tidak pada jajaran partai sekuler. Klasifikasi ini pasti berbeda dengan pendapat PKU diatas, dan mungkin juga persepsi PKB mengenai diri sendiri. Sebab, KH. Abdurrahman Wahid sering menyatakan bahwa dalam hal hubungan antara agama dan negara, NU adalah sekuler. Kiranya pendapat itu tidak berdasarkan kesadaran penuh mengenai implikasinya. Sekuler berarti tidak ada uang satu sen pun untuk kepentingan agama. Ini artinya penghapusan Departemen Agama, Pengadilan Agama, pelajaran agama dari semua jenjang, dan Urusan Haji.

Memang untuk sementara swastanisasi urusan agama akan menguntungkan NU, sebab para kiai dan institusi NU akan dapat menggantikan semuanya. Akan tetapi, pandangan sekuler itu berarti menganulir semua perjuangan umat selama ini. Kita tidak bisa membayangkan reaksi negatif para kiai kalau ide politik yang sekuler semacam itu disosialisasikan secara terperinci. Kita tidak percaya kalau PKB secara keseluruhan menghendaki sekularisasi. Maka, ada baiknya kalau tidak memahami istilah "sekuler" tapi "spasial".

Partai Golkar, Pari (Partai Rakyat Indonesia), dan semua partai yang tidak benar-benar sekuler dapat digolongkan di sini. Mereka yang kebanyakan orang religius pasti memilih spasialisasi ketimbang sekularisasi. Artikel ini tidak sempat membahas partai apa saja yang melakukan spasialisasi. Kalau ada partai mengatakan setuju dengan sekularisasi, tapi menolak sekularisme, yang dimaksud adalah spasialiasan.

Partai sekuler

Mungkin saja ada partai sekuler, dalam arti tidak peduli dengan

nilai-nilai agama. Akan tetapi untuk secara terang-terangan menganut sekularisme, pasti mengandung risiko besar. Sebab, pertama tidak objektif. Kedua, tidak sesuai dengan budaya Timur. Ketiga, tidak kontekstual. Tidak objektif, karena penganut agama adalah mayoritas di negeri ini yang pasti menentang habis-habisan sekularisme. Tidak sesuai dengan budaya Timur, karena peradaban Timur bersifat religius. Tidak kontekstual, karena dalam sejarah dunia Islam, sekularisasi hanya mungkin ditegakkan lewat militerisme (Aljazair) atau setidaknya bekerja sama dengan kelompok militer (Turki). Padahal, antimiliterisme sedang berkembang di Indonesia.

Tidak pernah ada tradisi transparansi ideologis di Indonesia, selalu remang-remang saja. Orang "membeli kucing dalam karung" bukan dalam soal capres saja, tapi juga soal mencoblos partai. Karena itu dalam ketidaktahuan ideologinya, kita ingin menunjuk PDI Perjuangan, Murba (Partai Musyawarah Rakyat Banyak), dan PRD (Partai Rakyat Demokratik) sebagai partai sekuler. Kalau PDI Perjuangan sudah punya catatan prestasi sebagai partai sekuler, kita hanya menduga-duga soal Murba dan PRD. Kita tidak tahu di mana akan memasukkan PDI, PNI-Front Marhaenis, PNI Massa Marhaen, dan PND (Partai Nasional Demokrat). Demikianlah, harus diakui bahwa kita tidak banyak tahu.

Penutup

Secara internal ke dalam umat sendiri : (1) Dalam politik konsep *shirathal mustaqim* yang digambarkan sebagai "titian rambut dibelah tujuh" atau "wot ogal-agil" yang sedikit saja terpeleset orang masuk neraka, perlu diganti dengan gambaran tentang jalan tol yang lurus dengan jalur yang banyak, sehingga dapat menampung berbagai pikiran. (2) Umat Islam adalah tiga bersaudara yang sedang berlomba lari *fastabiqul khairaat*, dengan partai berasas Islam di sebelah kanan, partai berdasar objerktivikasi di tengah, dan partai berdasar spasialisasi di sebelah kiri.

Secara eksternal dalam urusan kebangsaan, umat harus : (1) Menggantikan cara berpikir berdasar polarisasi (pengkutuban) antara "Islam versus sekuler" menjadi cara berpikir berdasar *range* (rentang) di mana ada partai berasas Islam, ada partai berdasar objektivikasi, ada partai berdasar spasialisasi, dan ada partai sekuler. (2) Kebiasaan cara berpikir "kita lawan mereka" atau "*We* lawan *They*" perlu digantikan dengan "*We* lawan *It*".

Dengan kata lain, bangsa ini bersama-sama sedang menghadapi banyak masalah, seperti kemiskinan, kesenjangan, demokratisasi, penegakan hukum, dan sebagainya. Umat Islam (*We*) adalah bagian bangsa yang tengah dirundung masalah (*It*). Musuh Islam bukan orang, tapi permasalahan. Musuh partai Islam dan partai bernuansa Islam bukanlah partai non-Islam, tapi problematika bangsa.

Islam tidak akan maju-maju selama umat masih beranggapan bahwa musuh besarnya ialah kelompok lain (Muslim dan non-Muslim), dan lupa bahwa ada masalah yang meminta perhatian sungguh-sungguh. Seluruh energi kita tumpahkan untuk memerangi "musuh palsu" yang sebenarnya bukan sasaran, sehingga ketika kita menghadapi "musuh" yang sebenarnya energi sudah habis.□

Problem Empiris Politik Islam

Oleh **Khamami Zada**

KUATNYA antuasiasme partai-partai Islam mengikuti Pemilu 1999 merupakan suatu gambaran yang menakjubkan, mengingat proses marginalisasi politik Islam di masa lalu telah melahirkan citra negatif Islam pernah disebut sebagai antipembangunan di mata militer dan pemerintahan Orde Baru. Semangat ini semakin memperlihatkan betapa dalamya keterlibatan Islam dalam pergumulan politik. Karenanya, Allan A. Samson, seorang pengamat politik Indonesia, berani menyimpulkan bahwa Islamlah yang paling teguh menjalin hubungan langsung antara agama dan politik. Tapi, secara faktual-aktual, bangkitnya politik Islam yang sangat menjanjikan *representativeness* kelompok Islam —meminjam bahasa Amien Rais— atau sebagai penyalur aspirasi umat Islam, tidak sepenuhnya berjalan mulus. Karena, masih ada beberapa problem mendasar yang membayangi politik Islam.

Pertama, probelem kemajemukan kelompok politik Islam. Ini terlihat dengan berdirinya PKB, PAN, PBB, PUI, PK, PSII, Masyumi Baru, PKU, PNU, dan parpol lainnya yang senafas. Mereka adalah partai-partai yang berasaskan Islam, atau minimal konstituennya Muslim. Mengapa mereka tidak mendirikan satu wadah partai Islam saja? Kenapa satu Islam, banyak partai? Mengapa mereka malah ramai-ramai mendirikan partainya masing-masing? Bukankah mereka satu keyakinan agama, Islam ?

Fenomena ini merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan kepentingan kelompok Islam. Bahkan, secara sosiologis refleksi kemajemukan masyarakat Islam. Inilah yang semakin meyakinkan kita bahwa masuknya Islam ke tanah air disebarkan oleh kelompok-

kelompok Islam yang beragam, yang secara otomatis ikut mewarnai corak keislaman penduduknya, di samping keragaman kultural bangsa Indonesia.

Dimensi kemajemukan inilah yang mengakibatkan kelompok-kelompok Islam tidak (bisa) bersatu dalam wadah parpol, mengingat keragaman kepentingan dan perjuangannya. Bahkan, kita tidak bisa melupakan sejarah bahwa selama dua periode kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru kekuatan politik umat Islam tidak pernah bisa dipersatukan dalam satu parpol. Eksperimen pertama di masa Orde Lama yang berusaha mempersatukan kekuatan politik Islam melalui Partai Masyumi waktu itu, mengalami kegagalan setelah keluarnya NU dan PSII. Eksperimen kedua di masa Orde Baru melalui fusi beberapa partai Islam ke dalam PPP meskipun ini adalah strategi politik kekuasaan (negara) untuk memarginalisasi kekuatan Islam juga tidak berhasil, lagi-lagi dengan keluarnya NU.

Kedua, akibat kemajemukan partai Islam ini, maka mereka sangat rentan terhadap potensi konflik. Lihat saja konflik antarpartai Islam, baik secara psikologis (lewat hujatan) maupun secara fisik (lewat bentrokan fisik), yang menghiasi kampanye partai. Memang sangat ironis, justru di antara kekuatan Islam sendiri terjadi konflik dan saling menjatuhkan, bukan malah mempersatukan. Inilah akibat polarisasi kepentingan politik yang ingin diraih masing-masing partai Islam. Pada wilayah ini, *ukhuwah islamiyah* (solidaritas Islam) sudah tidak tercermin secara nyata, sebagai akibat dari kepentingan politik yang berbeda.

Ketiga, politik Islam di Indonesia secara umum belum berhasil mencapai efektivitas politik (*political effectivity*). Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya seorang pemimpin pemersatu. Maka tak heran, jika faktor inilah yang sering dikeluhkan umat Islam sendiri. Karena, umat Islam tidak memiliki seorang pemimpin yang bisa diterima semua kelompok. Ini berbeda dengan negara-negara Islam lainnya, yang umumnya mempunyai simbol kepemimpinan pemersatu umat. Umat Islam Indonesia tidak mempunyai seorang Khomeini yang berhasil dengan memimpin revolusi Irannya, atau Saddam Hussein di Irak yang berhasil mempersatukan rakyatnya untuk melawan Amerika. Keduanya menjadi simbol pemimpin yang dapat diterima oleh semua kelompok. Itulah sebabnya, Samson melihat adanya perbedaan pandangan antara pimpinan partai Islam tentang hubungan keyakinan keagamaan dengan aksi politiknya (*reli-*

gious belief and political action).

Keempat, adanya estimasi yang berlebihan dari partai-partai Islam dengan jumlah mayoritas umat Islam. Padahal, secara empiris-historis, meskipun umat Islam mayoritas, partai Islam tidak pernah memenangkan pemilu. Kita masih ingat dengan Pemilu 1955 yang disebut-sebut sebagai pemilu paling demokratis di Indonesia ternyata partai-partai Islam kalah. Perolehan suara NU, Masyumi, PSII, Perti, PPTI, dan AKUI hanya 45,2 persen, masih di bawah partai nasionalis plus partai non- Islam yang memperoleh 54,8 persen. Fenomena ini terulang lagi pada Pemilu 1971: NU memperoleh suara 18,67 persen, Parmusi 7,36 persen, PSII 2,39 persen, dam Perti 0,70 persen. Padahal Golkar mendapatkan perolehan suara 62,8 persen, PNI 6,94 persen, Parkindo 1,34 persen, dan Partai Katolik 1,11 persen. Bahkan dalam Pemilu 1977 —setelah fusi 1973— perolehan suara kelompok Islam lewat PPP merosot: 29,3 persen. Kemerosotan ini tetap berlanjut dalam pemilu-pemilu selanjutnya: 1982 (27,8 persen) dan 1987 (16,0 persen).

Fenomena ini sepatutnya disadari oleh elit politik Islam: Bahwa jumlah mayoritas bukan jaminan memperoleh banyak suara. Karena, umat Islam kini semakin rasional dalam memilih partai, tidak lagi hanya karena primordialisme (agama).

Mempersatukan politik Islam

Problem-problem ini dapat saja semakin mengukuhkan kekalahan politik Islam atau Islam politik. Penulis tidak bermaksud pesimis dengan kekuatan politik Islam. Tapi, secara empirik telah dibuktikan bahwa dalam setiap perhelatan pemilu, partai-partai Islam selalu kalah. Bahkan bisa disimpulkan bahwa afinitas ideologis umat Islam kepada partai-partai Islam tidaklah kuat. Sebaliknya, klaim partai-partai Islam sebagai satu-satunya yang "memperjuangkan kepentingan Islam" atau "penyalur aspirasi umat Islam" seperti yang sering dimunculkan dalam kampanye sulit diterima dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Itulah sebabnya kekuatan umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia harus semakin disadari menyimpan potensi yang kuat dalam membangun bangsa dan negara, *nation building*, bukannya dimanfaatkan untuk komoditas politik. Peran aktifnya adalah pembangunan. Maka, resepnya adalah bersatu atau dalam bahasa agama, "*ukhuwah Islamiyyah*". Bukankah Nabi pernah mengingatkan kepada kita.

"Umat Islam terhalang oleh Islam sendiri ?" Bukankah kekalahan perang Uhud disebabkan tidak bersatunya iktikad umat Islam sendiri ?

Harapan besar sebenarnya diamanatkan pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang diselenggakan MUI 3-7 November tahun lalu. Karena di situlah berkumpulnya elit-elit Islam yang sudah terpolarisasi dalam partai-partai politik. Tapi, apa boleh buat, KUII ternyata tidak bisa membawa "ukhuwah islamiyah", malah semakin memperlihatkan friksi dalam kelompok-kelompok Islam. KUII ternyata malah dipolitisasi sedemikian rupa untuk menghantam lawan politiknya.

Apakah ini suatu tanda atau isyarat bahwa kelompok-kelompok Islam tidak dapat dipersatukan? Apakah ini warisan laten yang tidak bisa dihilangkan? Jawabnya, tentu dilematis. Di satu pihak, secara historis telah dibuktikan bahwa kelompok-kelompok Islam sulit dipersatukan, sementara di pihak lain ada iktikad untuk mempersatukannya.

Maka dari itulah, kita perlu meyakinkan kembali pentingnya inklusivisme politik Islam. Yakni, partai-partai Islam tidak hanya memperjuangkan kepentingan umat Islam semata, tapi juga untuk kepentingan semua umat beragama secara menyeluruh. Dalam bahasa agama "rahmatan lil 'alamin". Karena Islam datang tidak diperuntukkan untuk umat Islam saja, tetapi untuk semua umat. Inilah kunci politik Islam untuk bisa tampil di garda depan pembangunan bangsa.□

Fragmentasi Partai Islam

Oleh **M. Arskal Salim GP**

PERBEDAAN VISI, orientasi dan kepentingan elit politik merupakan masalah yang terutama dialami oleh sejumlah partai Islam. Tetapi menyangkut pelaksanaan Pemilu 1999, problem aktual yang dihadapi adalah identitas nama yang kembar, tanda gambar yang hampir serupa, dan klaim-mengklaim konstituen. Bukan suatu hal yang kebetulan bahwa partai-partai Islam yang mengalami persoalan internal semacam itu ternyata justru adalah partai-partai Islam yang pernah menjadi peserta Pemilihan Umum pada tahun 1955, yaitu Masyumi, NU, PSII, PERTI, dan PPTI. Mungkin karena sudah populer, nama, tanda gambar, dan konstituen partai-partai itu jadi rebutan.

Dengan demikian, partai-partai Islam mantan kontestan Pemilu 1955 itu mengalami reinkarnasi pada Pemilihan Umum 1999 ini. Akan tetapi, reinkarnasi tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan, melainkan mengandung berbagai kerumitan dan problem, khususnya karena timbulnya berbagai fragmentasi di dalam setiap partai mantan kontestan Pemilu 1955 itu. Namun, fakta ini dengan jelas menunjukkan kebenaran sebagian analisis sementara pengamat yang melihat fenomena Pemilu 1999 tak lebih sebagai repetisi dari Pemilu 1955.

Kini, misalnya, ada dua partai yang sama-sama menggunakan nama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Bagaimana persoalan itu diatasi? Untuk tidak membingungkan, kalangan pers membedakan dua partai PSII itu menjadi PSII Matraman pimpinan Taufik Tjokroaminoto dan PSII Latumenten pimpinan Bustaman. Belakangan, PSII pimpinan Bustaman membuat tambahan kata menjadi "PSII 1905"

sebagai ciri pembedanya. Persaingan dua partai kembar ini kian seru, karena keduanya lolos sebagai kontestan Pemilu 1999.

Selain itu, ada tiga partai Islam yang jika disingkat masing-masing menggunakan akronim PPTI. Persoalan nama yang dihadapi oleh partainya para pengikut Tharikat itu lebih terlihat pada akronimnya, bukan pada kepanjangannya. Satu di antaranya merupakan kepanjangan dari Partai Persatuan Tharikat Islam yang diketuai oleh Muchtar Doyah. Lainnya adalah Partai Politik Tharikat Islam pimpinan Rahman Sabon Nama, dan yang terakhir adalah Partai Pengamal Thareqatt Indonesia pimpinan Masykur Loamena. Agaknya, dengan adanya persoalan akronim nama yang kembar pada partai-partai tarekat itu dapat ditafsirkan bahwa ada semacam konflik intern berupa perbedaan kepentingan dan macetnya komunikasi di dalam kelompok/partai itu. Lebih dari itu, disayangkan sekali bahwa tak satu pun dari tiga PPTI yang merupakan partai Islam mantan kontestan Pemilu 1955 itu lolos menjadi peserta Pemilu 1999.

Partai-partai Islam yang mengaku sebagai pewaris dan pelanjut perjuangan Masyumi ternyata juga mengalami fragmentasi. Dua di antaranya masih menggunakan kata Masyumi. Meskipun demikian, partai Masyumi pimpinan Ridwan Saidi menambahkan kata "Baru" (PMB) sebagai ciri pembedanya dari Partai Politik Islam Masyumi (PPIM) pimpinan Abdullah Hehamahua. Bukan itu saja, Masyumi pimpinan Ridwan Saidi kepanjangannya bukanlah Majelis Syura Muslimin Indonesia, tetapi Masyarakat Umat Muslimin Indonesia.

Selain dua partai di atas, partai Islam yang dianggap paling orisinal mewarisi Masyumi adalah partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra. Hanya saja, nama partai yang dipimpinnya itu tidak menggunakan kata Masyumi, melainkan kata Bulan Bintang atau disingkat PBB. Yusril punya alasan mengenai hal ini. Menurut dia, nama partai dengan kata Masyumi sendiri dapat menimbulkan problem. Pasalnya, Keppres No. 200/1/1960 buatan Soekarno yang melarang keberadaan Masyumi di Indonesia masih tetap berlaku. Itu sebabnya, Yusril Ihza Mahendra cs. tidak mau menggunakan nama Masyumi untuk partai yang mereka dirikan, tetapi Bulan Bintang, yang merupakan simbol partai Masyumi yang amat populer sejak masa Orde Lama. Dalam pandangan Yusril, partai manapun yang menggunakan nama Masyumi akan menghadapi ganjalan yuridis, sehingga dapat mengalami kesulitan memperoleh pengakuan eksistensi dari pemerintah. Dengan argumen semacam ini kita mudah mema-

hami mengapa Ridwan Saidi menambahkan imbauan “Baru” sesudah kata “Masyumi” dan Abdullah Hehamahua memasukkan empat kata “Partai Politik Islam Indonesia” sebelum kata “Masyumi”.

Beda halnya dengan tiga partai dari lingkungan PPTI yang tak satupun berhasil menjadi peserta pemilu, maka ketiga partai dan lingkungan Masyumi ini semuanya lolos sebagai kontestan Pemilu 1999. Hanya saja, tanda gambar tiga partai itu (PBB, PMB, PPIM) hampir serupa, yaitu Bulan Sabit dan Bintang. Bahkan, nomor gambar partai PPIM dan PBB berurutan. PPIM mendapat nomor urut 21 dan PBB menomor urut 22. Untunglah, dalam pemilu ini kertas suara dicetak di atas kertas berwarna sehingga tanda gambar dua partai kelihatan jelas perbedaannya. Jika PPIM menggunakan lambang bulan dan bintang hitam-putih, maka PBB memakai warna dasar hijau dengan lambang bulan dan bintang berwarna kuning.

Persoalan yang cukup menarik terjadi pada partai-partai yang mengklaim memiliki basis-basis massa PERTI, yaitu umat Islam yang berpaham *Ahlu Sunnah wal Jamaah* yang tergabung dalam ormas keagamaan. Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Setidaknya ada empat partai yang mengaku mempunyai pertalian daerah dengan PERTI, partai Islam mantan kontestan Pemilu 1955 itu, yakni Partai Aliansi Kebangkitan Muslim Sunni Indonesia (AKAMSI), Partai Kebangkitan Kaum Ahlu Sunnah Wal Jamaah (PAKKAM), Partai Era Reformasi Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Partai Bhakti Muslim (PBM). Sayangnya, dari empat partai ini tak satu pun yang lolos seleksi Tim Sebelas dan berhak mengikuti Pemilu 1999, sehingga bisa dikatakan, di luar PPP, tidak ada partai khusus yang mengakomodasi warga PERTI dalam pemilu tahun ini.

Partai-partai Islam yang mengaku berakar dari tradisi NU setidaknya ada empat buah dan semuanya lolos menjadi kontestan Pemilu 1999, yaitu PKB, PKU, PNU dan Partai SUNI. Selain probelm visi, orientasi dan kepentingan, masalah yang dihadapi oleh tiga dari empat partai warga NU itu, minus partai SUNI, adalah keserupaan tanda gambar, suatu masalah yang juga banyak dihadapi oleh partai-partai lain kontestan Pemilu 1999, seperti dari lingkungan Masyumi, Sarekat Islam, dan PNI.

Ketiga partai tersebut (PKB, PNU, PKU) sama-sama menggunakan tanda gambar bola dunia yang dikelilingi oleh sembilan bintang, mirip lambang NU, dengan berbagai perbedaan variasi oleh setiap partai. Walau begitu, PBNU hanya mengakui PKB sebagai partai

tunggal bagi penyaluran aspirasi politik warga NU. Karena itu, Salahuddin Wahid (Ketua PKU) mengkritik maklumat PBNU itu sebagai bertentangan dengan jiwa khittah NU, yang menjaga kenetralan NU dengan semua organisasi politik manapun. (*Republika*, 3/10/1998).

Keserupaan tanda gambar partai-partai di lingkungan NU itu jelas akan membingungkan konstituen utamanya pada saat pemilu. Betapapun tanda gambar PKB yang tidak memuat tulisan/huruf Arab, seperti halnya lambang NU, akan terkesan kurang akrab dengan massa pemilihnya. Boleh jadi, PNU yang tanda gambarnya mengandung tulisan/huruf Arab, akan memetik keuntungan dari massa NU yang sebagian besar masih berpandangan tradisional.

Maka, suara warga NU pun terbelah-belah mengalir masuk ke partai-partai tersebut. Belum lagi, dengan munculnya tanda gambar Ka'bah milik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hamzah Haz yang berasal dari unsur NU sebagai Ketua Umumnya, telah menimbulkan spekulasi bahwa telah lahir partai kelima di lingkungan NU.

Jika partai-partai Islam mantan kontestan Pemilu 1955 di atas mengalami fragmentasi, maka beberapa partai Islam yang secara historis tidak punya hubungan dengan Pemilu 1955 malam melakukan merger dalam wadah Partai Indonesia Baru (PIB). Dalam partai yang menempati nomor urut 1 dalam pemilu ini, tiga partai Islam yang tak mengikuti seleksi (baca: gagal) sebagai partai politik peserta Pemilu 1999 turut bergabung bersama lima partai lainnya yang non-afiliasi keagamaan. Tiga partai itu adalah Partai Era Reformasi Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Amanah Masyarakat Madani (PAMM), dan Partai Kesatuan Umat Indonesia (PKUI).

Sebuah catatan akhir yang penting ditambahkan bahwa sekarang ini sebagian besar partai Islam sudah dapat menerima keanggotaan non-Muslim. Ini berarti, partai Islam mulai tidak bersifat eksklusif. Dalam konteks partisipasi non-Muslim di dalam partai Islam, mungkin kita bisa mengklasifikasikan partai-partai Islam menjadi tiga kategori. Pertama, partai Islam eksklusif yang membatasi keanggotaannya hanya pada umat Islam. Kedua, partai Islam inklusif yang membuka kesempatan non-Muslim menjadi anggota partai. Hanya saja akses untuk menjadi pengurus partai atau pun calon legislatif partai relatif amat terbatas, untuk tidak mengatakan nihil sama sekali. Jumlah partai Islam semacam ini merupakan yang terbanyak.

Ketiga, partai Islam pluralis yang bukan saja menerima keang-

gotaan dari non-Muslim melainkan juga memberi kesempatan yang sama untuk terlibat baik dalam jajaran pengurus teras partai maupun calon legislatif partai. PAN adalah satu-satunya contoh konkret partai dalam kategori ini. Dalam penilaian Nurcholish Madjid (*Suara Karya*, 13/1/1999), realitas semacam itu "merupakan suatu kemajuan yang luar biasa yang pada tahun 1950-an tidak terbayangkan dan bisa dianggap kafir".□

Satu Islam Dua Pemilu

Oleh **Azyumardi Azra**

".....MENJAGA sungguh-sungguh agar perbedaan paham di lapangan politik jangan sampai merusakkan *ukhuwah Islamiyah*; bersama-sama menciptakan suasana tidak saling menyerang dalam kegiatan (yang bersifat) menyarankan pendirian dan program masing-masing dalam menghadapi pemilihan umum; bertindak sesuai dengan pernyataan ini."

Jangan salah paham. Butir-butir pernyataan itu dikeluarkan bukan menjelang Pemilu 1999 ini, tetapi sebelum Pemilu 1955. Dan, pernyataan yang diteken beberapa tokoh terkemuka partai Islam itu —antara lain Mohammad Natsir (Masyumi), Arudji Kartawinata (PSII), K.H.M. Dahlan (NU), dan H. Rusli Abdulwahid (Perti)— bisa dibaca pada harian *Abadi* edisi 16 Juni 1955.

Bisa diduga, pernyataan itu memang dikeluarkan oleh para pemimpin partai Islam akibat peningkatan ketegangan di antara partai-partai Islam, yang berlomba mendapatkan pendukung dan perolehan suara sebanyak-banyaknya, menjelang Pemilu 1955. Ketegangan itu terjadi terutama di daerah-daerah, tempat fanatisme politik lokal lebih cepat mengalami kristalisasi dan bahkan radikalisasi. Di beberapa tempat di Jawa Timur dan Jawa Tengah, misalnya, ketegangan terjadi antara pendukung Masyumi dan NU, sedangkan di Sumatera antara Masyumi dan Perti, serta partai-partai Islam tradisional lainnya.

Toh, penting dicatat, ketegangan dan benturan di kalangan partai-partai Islam peserta Pemilu 1955 itu tidak sampai mengakibatkan banyak umat Islam tewas. Sebab, saat itu, ketegangan dan konflik lebih banyak berupa adu mulut daripada adu fisik dan kekerasan.

Kenapa? Karena ketegangan di kalangan partai-partai Islam waktu itu terutama lebih diwarnai oleh pertikaian (*khilafiyah*), perbedaan pendapat dalam masalah-masalah yang "bukan pokok" dalam agama, tetapi "cabang" atau "ranting".

Masalah-masalah *furu'yyah*, seperti soal ijtihad, taklid, mazhab, *qunut, talqin*, memang merupakan tema yang cukup dominan pada masa itu. Akibatnya, sulit dielakkan, partai-partai Islam pada Pemilu 1955 sedikit banyak membawa masalah *furu'iyyah* tersebut ke dalam politik. Tapi, itu disesuaikan dengan keyakinan "kebenaran" dan "kesahihan" paham keagamaan masing-masing.

Sementara itu, konflik yang telah meningkat menjadi kekerasan di kalangan pendukung partai-partai Islam menjelang Pemilu 1999 ini hampir sama sekali tidak disebabkan oleh *furu'iyyah*. Bahkan, masalah *furu'iyyah* telah kehilangan relevansinya dengan politik. Itu terlihat jelas karena konflik dan kekerasan justru sering terjadi pada partai-partai Islam yang satu aliran, satu mazhab. Misalnya, yang sama-sama menganut paham *aswaja (ahlusunah waljamaah)*, seperti antara massa PPP dan para pendukung PKB, yang saat ini dipimpin tokoh-tokoh asal NU. Dengan demikian, pertikaian yang melibatkan kekerasan sekarang ini hampir sepenuhnya merupakan masalah murni politik.

Karena itu, bentrokan yang mengakibatkan kematian sejumlah orang, seperti yang terjadi di Jepara, sungguh menyedihkan. Lebih ironis dan menyedihkan lagi, bentrokan itu melibatkan dua partai dengan basis pendukung utama kaum *nahdliyin*. Mengingat tensi politik akan terus meningkat di hari-hari mendatang, tentu dikhawatirkan bentrokan semacam itu akan bertambah. Tidak hanya antara sesama warga *nahdliyin*, tetapi juga antara warga *nahdliyin* dengan massa partai Islam lainnya. Atau bahkan dengan massa partai lain yang tidak berbasis massa Islam.

Jika "teori *furu'iyyah*" tidak dapat menjelaskan bentrokan di antara massa pendukung *nahdliyin*, lalu bagaimana kita dapat memahami hal itu? Teori yang agaknya paling sahih adalah, bentrokan itu merupakan hasil khilafiyah, atau tepatnya perseteruan, yang sangat akut dalam lapisan elit partai-partai itu sendiri.

Dalam konteks massa *nahdliyin*, perseteruan dalam lapisan elit NU itu selain disebabkan oleh hal-hal yang bersifat historis dan personal, juga akibat pertarungan untuk memegang hegemoni makna tentang NU dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Hal itu ter-

lihat dari sikap lingkaran elit NU —secara tegas atau terselubung— hanya merestui partai warga *nahdliyin* tertentu dan cenderung tidak mengakui partai warga *nahdliyin* lainnya.

Itulah yang kemudian menimbulkan protes dan rasa sakit hati lingkungan yang tidak mendapat restu. Celakanya, hal itu segera mengimbas ke tingkat massa. Paternalisme dan fanatisme umat NU kepada pemimpin faksinya masing-masing dengan segera pula diterjemahkan oleh massa akar rumput ke dalam *defense mechanism* yang sangat tinggi dan sikap meletup sewaktu-waktu. Padahal, letupan-letupan itu pada hakikatnya merupkan *self-affliction*, kalau bukan *suicide* umat itu sendiri.

Alangkah pahitnya reformasi, alangkah mahalnya *social and religious cost*, yang harus dibayar umat. Karena itu, jika para elit politik Muslim betul-betul memiliki kepedulian kepada umat, seyogyanya mereka mempertimbangkan kembali pertikaian dan perseteruan di antara mereka.

Para elit politik Muslim pada Pemilu 1955 telah memberi contoh yang baik untuk mencegah atau meminimalkan dampak negatif pemilu melalui kesepakatan yang mereka tuangkan dalam pernyataan seperti dikutip di awal tulisan ini. Dan, bagi para elit politik Muslim sekarang ini, masih belum terlambat untuk melakukan hal yang sama. Demi keselamatan umat, bangsa, dan negara.□

Tragedi Jepara dan Ideologisasi Agama

Oleh **Muhammad AS Hikam**

KATA "tragis" barangkali belum cukup tepat menggambarkan peristiwa Jepara yang menewaskan sedikitnya lima orang dan, konon, 14 orang hilang itu. Bentrokan fisik antara pendukung PPP dan PKB tersebut —di Jepara, keduanya notabene warga *nahdliyin* (NU)— juga ironis, menyedihkan, dan sekaligus memalukan. Ironis, karena hal itu menunjukkan, apa yang selama ini dianggap sebagai karakter NU —sikap toleran dan menjaga keseimbangan dalam berperilaku— ternyata tak terbukti di lapangan.

Menyedihkan, karena tindak kekerasan di daerah itu, mungkin, sudah diketahui semua elit NU. Sebab, sebelumnya, hal tersebut telah dilaporkan bukan saja di Jepara, tapi juga di daerah "rawan" lain, seperti Pekalongan. Toh, kekerasan tetap terjadi tanpa dapat dikontrol para elit itu. Maka, peristiwa itu pun lantas bisa dianggap sebagai bukti paling konkret bahwa elit NU, termasuk para ulamanya, ternyata lebih memprioritaskan kepentingan politik ketimbang kemaslahatan umat pada umumnya dan warga *nahdliyin* pada khususnya.

Sudah barang tentu, segudang dalih akan dilontarkan para elit PPP, PKB dan NU. Dan, saya yakin, dalih yang paling mudah adalah menimpakan semua kesalahan kepada "provokator" dari luar. Tapi, hemat saya, terlepas dari ada-tidaknya provokator, penyebab paling utama dari peristiwa Jepara (dan bisa saja daerah lain) adalah faktor internal, yaitu perpecahan di kalangan elit NU karena politisasi organisasi yang tinggi dan pemunculan kembali ideologisasi agama.

Politisasi terhadap NU berlangsung dengan kecepatan dan in-

tensitas tinggi menyusul keterbukaan ruang politik setelah Orde Baru tumbang. Proses penataan yang rasional dan proporsional hampir tidak dapat dilakukan elit NU. Sebagai akibatnya, para politisi hampir-hampir mendominasi wacana dan kiprah organisasi. Kemunculan partai-partai yang mengklaim berbasis NU (PKB, PKU, PNU, dan SUNI) ditambah dengan dukungan warga NU dalam PPP yang masih kuat, membuka peluang konflik-konflik politik di dalam batang tubuh jam'iah itu.

Problem struktural tersebut diperburuk lagi oleh kemarakan ideologi agama setelah pembebasan partai-partai dari keharusan berasas Pancasila. Kendati secara teoretis pluralisasi ideologi itu tidak selalu berdampak negatif, dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, hal itu perlu dicermati secara hati-hati. Hemat saya, proliferasi ideologi yang terjadi saat ini lebih banyak dilandasi visi sektarianisme dan primordialisme ketimbang visi pluralisme. Ideologisasi agama yang terjadi lebih dimaksudkan untuk menumbuhkan sentimen dan solidaritas primordial di dalam masyarakat, bukan untuk membangun sebuah perpolitikan pluralis dan demokratis.

Implikasinya adalah berkembangnya penggunaan ajaran agama untuk mobilisasi dukungan partai politik, yang memang masih cukup ampuh. Elit agama yang juga berperan sebagai pemimpin partai-partai politik kemudian dengan mudah melakukan manipulasi terhadap ajaran dan simbol-simbol agama dalam usaha mereka memobilisasi dukungan dari para pengikutnya. Dalam kasus NU, para kiai yang kebetulan menjadi fungsionaris partai-partai politik lantas dimanfaatkan agar dapat memberi fatwa-fatwa untuk memperkuat legitimasi partai di mata warga *nahdliyin*. Tak pelak lagi, "perang" ayat dan "fatwa" antar kiai-kiai NU pun tak terelakkan. Dan, dalam kondisi NU mengalami disorientasi karena perubahan cepat dalam ruang politik makro, kontrol yang dicoba dijalankan tidak efektif. Ujung-ujungnya, warga *nahdliyin* pun rentan terhadap friksi-friksi di dalam, sehingga membuka peluang bagi konflik-konflik terbuka.

Jika demikian halnya, kasus yang terjadi di Jepara dan sebelumnya di Surabaya, Pekalongan, Yogyakarta, dan sebagainya, tak terlalu tergantung pada kehadiran provokator dari luar. Dan, jika ternyata para petinggi partai dan NU tidak berhasil memberi bukti cukup akurat mendukung sinyalemen peran provokator, niscaya mereka akan semakin kehilangan kredibilitas di mata umat dan warga *nahdliyin* sendiri. Seharusnya, tindakan yang perlu dilakukan

lebih dahulu adalah "melihat ke dalam", sehingga upaya-upaya penyelesaian konkret dan tuntas dapat dilakukan. Barangkali, sudah saatnya PBNU membuat semacam *code of conduct* bagi mereka yang terlibat dalam kampanye atau sebagai aktivis parpol, sehingga dapat membatasi kecenderungan konflik dan penggunaan kekerasan.

Namun, yang lebih penting, bagaimana para elit NU, khususnya para ulama yang menjadi panutan umat, secara konsisten menempatkan agama sebagai landasan normatif dan etis kehidupan, dan bukan sebagai ideologi politik yang sarat kepentingan jangka pendek. Jika agama menjadi ideologi, telah terjadi reduksi terhadap peran dan fungsinya yang melampaui batas-batas kepentingan kelompok ataupun individual di dalam kehidupan duniawi. Agama yang berubah menjadi ideologi niscaya akan mudah diselewengkan para elit agama yang berpretensi memiliki monopoli tafsir atasnya, sehingga ia akan menjadi alat pengabsahan kepentingan.

Tragedi Jepara seharusnya membuat kita sadar, kekerasan politik yang terjadi tidaklah selalu diakibatkan oleh pengaruh dari luar semata. Kekerasan politik bisa muncul dari dalam batang tubuh masyarakat sendiri karena ketidakmampuan para pemimpinnya menyiasati perubahan. Ideologi agama yang seharusnya telah ditinggalkan, justru malah dihidupkan kembali. Dan, dengan cara itulah mereka akan dapat melakukan mobilisasi.□

Stembus Accoord dan Caleg Non-Muslim

Oleh **Hartono Mardjono**

DUA berita politik besar yang mencuat hampir bersamaan waktu dalam sepekan terakhir ini adalah tentang munculnya lebih dari 50 persen caleg non-Muslim yang diajukan oleh PDI Perjuangan berikut keterangan Kwik Kian Gie-nya, dan tentang kesepakatan *stembus accoord* partai-partai Islam. Munculnya dua berita besar itu terjadi secara koinsidental (berkebetulan). Tak ada yang merekayasa. Yang satu muncul ketika diumumkan Daftar Calon Tetap Anggota-anggota DPR RI/DPRD I/DPRD II dari PDI Perjuangan; dan yang lain muncul ketika menjelang berakhirnya masa kampanye, tersiar berita bahwa partai-partai Islam telah bersepakat melakukan *stembus accoord* yang akan disampaikan kepada Komite Pemilihan Umum (KPU).

Dua berita besar itu tentu paling menarik bagi umat Islam. Berita pertama yang berkaitan dengan calon-calon PDI Perjuangan yang lebih dari 50 persen non-Muslim berikut keterangan Kwik Kian Gie, ternyata telah membukakan mata, hati, dan pikiran kaum Muslimin untuk memahami siapa dan bagaimana PDI Perjuangan. Bagi kalangan kaum Muslimin pasti peristiwa ini akan mengingatkan, betapa kaum Muslimin selama masa rezim Orde Lama dan Orde Baru telah dipinggirkan perannya di dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

Kekuatan-kekuatan politik dan ideologi sekuler atau anti-Islam tak pernah secara formal berani tampil dalam satu wadah formal mereka. Mereka selalu menggunakan kendaraan kekuasaan, atau kekuatan-kekuatan politik lain yang mereka perhitungkan akan dapat memberikan harapan bagi mereka untuk secara tersembunyi di balik

baju penguasa atau kendaraan politik itu, toh mereka secara efektif dapat berkuasa.

Ambil contoh konkret seperti yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang tegas-tegas anti-Islam itu berhasil menguasai Front Nasional yang berada di bawah komando Soekarno, dan berhasil menyelundupkan Ir Surahman ke dalam Partai Nasional Indonesia (PNI), bahkan bisa menjabat sebagai sekjennya. Keberhasilan menyelundupkan kader-kader PKI ke dalam PNI inilah yang kemudian membuat PKI berhasil menggunakan PNI A-SU (Ali Sastroamidjojo-Surahman) sebagai kendaraan politik PKI.

Di bawah rezim Orde Baru, kekuatan-kekuatan anti-Islam berhasil menguasai berbagai birokrasi kekuasaan, baik sipil maupun militer, di samping Golkar. Di lingkungan militer dan aparat keamanan, mereka berhasil menguasai pimpinan ABRI, Opsus, Asisten Pribadi Presiden, Bais, dan Bakin. Di lingkungan birokrasi sipil, hampir seluruh bidang kekuasaan pemerintahan umum dan ekonomi/keuangan mereka kuasai. Di lingkungan Golkar, mereka berhasil menempatkan kader-kadernya di puncak-puncak pimpinannya di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, di samping di DPR RI/MPR RI, DPRD I, dan di DPRD II.

Pada kedua peristiwa faktual sejarah itu nampak dengan jelas betapa lincahnya mereka berganti kendaraan politik. Ketika rezim Orde Lama jatuh, mereka cepat keluar dari kendaraan Front Nasional dan PNI A-SU. Dan ketika Orde Baru jatuh, mereka cepat pindah kendaraan dari birokrasi dan Golkar untuk beralih ke PDI-P.

Keterangan Kwik Kian Gie yang menyatakan bahwa dalam menetapkan calon-calon legislatif, PDI Perjuangan tidak mendasarkan pada agama para calon tetapi kepada kemampuan para calon itulah yang nampaknya ditangkap betul oleh kekuatan politik sekuler atau anti-Islam.

Terlepas dari kejelian kekuatan sekuler dan/atau mereka yang anti-Islam itu dalam memanfaatkan setiap peluang, bagi banyak kalangan masyarakat, keterangan Kwik Kian Gie tetap saja merupakan tanda tanya besar. Kwik Kian Gie menyatakan bahwa yang dijadikan ukuran penilaian oleh PDI Perjuangan dalam menentukan calon-calon legislatif adalah masalah kemampuan atau kapabilitas tiap calon. Bukan agama yang dipeluk para calon.

Keterangan Kwik sedemikian ini sulit diterima akal, sebab Kwik melupakan bahwa pencalonan ini adalah pencalonan untuk anggota

legislatif, yaitu para wakil rakyat yang akan diamanati untuk selalu menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, hampir 90 persen beragama Islam. Bagaimana mungkin jika wakil-wakil rakyatnya yang mayoritas tidak beragama Islam itu akan berkemampuan menyampaikan aspirasi umat Islam?

Kemampuan dalam konteks wakil rakyat bukanlah sekadar kemampuan teknis yang hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat profesionalistis dalam suatu bidang pekerjaan, tetapi adalah juga kemampuan untuk sanggup menangkap getaran-getaran aspiratif rakyat. Bagi para wakil rakyat, kemampuan yang terakhir inilah yang semestinya lebih dominan.

Contoh para wakil rakyat selama rezim Orde Baru telah membuktikan kebenaran premis tersebut. Badan-badan perwakilan dan permusyawaratan rakyat di era Orde Baru telah dipadati dengan mereka yang berkemampuan teknis profesional jauh lebih tinggi dan lebih baik daripada wakil-wakil rakyat pada era demokrasi tahun 1945-1959. Namun rakyat dapat menyaksikan bahwa DPR periode tahun-tahun itu jauh lebih representatif mewakili rakyat, karena mampu menyuarakan aspirasi rakyat, maupun dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan, daripada DPR Orde Baru yang hanya bisa berkata "ya" dan berfungsi untuk sekadar melegitimasikan kehendak penguasa, sehingga pada gilirannya telah melahirkan pemerintahan yang sangat korup.

Menyaksikan dua peristiwa politik yang terjadi dalam sepekan terakhir ini, yaitu peristiwa kesepakatan *stembus accoord* partai-partai Islam dan pengajuan calon-calon legislatif PDI Perjuangan ini, kaum Muslimin jadi teringat akan firman Allah SWT yang berbunyi: *"... Wa makaruu wa makarallah Wallahu khoirul maakiriin..."* Manusia boleh saja berencana, tetapi rencana Allah-lah yang baik (yang akan) berlaku.

Mudah-mudahan firman Allah yang sangat erat kaitannya dengan kedua peristiwa ini dapat mengingatkan kaum Muslimin yang masih berada di lingkungan PDI Perjuangan, khususnya mereka yang memegang tapuk pimpinannya, agar mereka tidak mengulangi sejarah penunggangan PNI A-SU oleh kekuatan-kekuatan anti-Islam yang kemudian terbukti pernah menjerumuskannya. Bila mereka tetap juga lalai, setidak-tidaknya firman Allah dan kedua peristiwa itu akan dapat mengingatkan kaum Muslimin dalam menggunakan hak pilihnya pada tanggal 7 Juni 1999 mendatang.□

Umat yang Gugup

Oleh **Ulil Abshar-Abdalla**

MALAM tanggal 6 Juni yang lalu, saya ikut hadir dalam acara Malam Dzikir untuk menyukseskan pemilu yang diselenggarakan oleh MUI di Masjid Istiqlal. Acara itu sangat biasa, tidak mengandung sesuatu yang khusus dan unik. Acaranya tidak terlalu meriah, bahkan terkesan agak kurang mendapat sambutan dari umat Islam di kawasan Jakarta.

Yang menarik adalah dibagikannya beberapa buah poster di luar masjid yang mengandung anjuran agar umat Islam hati-hati memberikan suaranya dalam pemilu esok harinya. Umat Islam dianjurkan jangan sampai memberikan suaranya kepada sebuah partai yang calegnya didominasi oleh calon-calon yang tidak beragama Islam. Imbauan itu tidak menunjuk kepada partai tertentu, tapi jelas PDI Perjuanganlah yang dituju.

Yang menarik adalah sebuah "fatwa", dibuat oleh Front Pembela Islam yang ditandatangani oleh Habib Muhammad Rizieq Syihab tentang haramnya umat Islam memberikan suara buat partai yang menetapkan calegnya dari kalangan non-Muslim melebihi 15%. Argumen yang diajukannya tidak main-main, yaitu tiga buah ayat dalam surah yang berbeda-beda: 4:144; 5:51; dan 60:1.

Dalam setiap proses politik yang kita lalui di negeri ini, kartu Islam atau agama secara umum selalu dimainkan dengan cara yang agak kurang hati-hati. Kartu ini memang terbuka untuk digunakan oleh siapa saja. Nurcholish Madjid pernah menggambarkan Islam sebaga kartu "gratis" yang bisa diperoleh oleh siapa saja. Tetapi, demikian Cak Nur mengingatkan, begitu kartu itu dimainkan, maka akan terjadi efek "bola salju" yang bisa menendang siapa saja.

Ada beberapa catatan yang patut kita buat untuk kasus penggunaan kartu Islam ini. Pertama, ternyata tiap kali suatu kelompok memainkan kartu itu, maka dalam tenggang yang tidak lama lagi akan muncul kelompok Islam lain yang menggunakan kartu yang sama untuk tujuan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan tujuan kelompok yang pertama. Ini tentu, lagi-lagi, karena kartu Islam yang tidak bisa dikangkangi oleh kelompok tertentu. Kenyataan seperti ini kemudian memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat bahwa mereka tidak boleh cepat percaya begitu ada kelompok tertentu menggunakan kartu ini. Mereka langsung bertanya: kelompok yang mana lagi ini?

Dengan kata lain, meski Islam adalah agama mayoritas, namun kartu Islam tak pernah bisa meyakinkan sebagai "kartu politik". Contoh menarik adalah munculnya isu PAM Swakarsa pada saat SU Istimewa November 1998. Pada saat itu, bahkan penduduk awam Jakarta pun tak bisa diyakinkan bahwa "pasukan sukarela" itu memang benar-benar "berjihad" untuk kepentingan Islam.

Kedua, kartu Islam seolah-olah dimainkan oleh kelompok yang sama dari dulu, sekurang-kurangnya sejak Mei 1998. Tanpa harus menyebut kelompok tertentu, sayangnya kelompok ini selalu memainkan "kartu Islam" pada saat yang justru kurang menguntungkan bagi Islam sendiri. Kartu Islam tampaknya dimainkan justru untuk mendukung *status quo*. Ada kesan yang kuat, kelompok ini justru menggunakan Islam untuk melawan arus reformasi itu sendiri.

Kita ambil contoh kasus penggunaan kartu Islam untuk melawan PDI Perjuangan sekarang ini. Jelas sekali bahwa dalam berbagai cara —baik langsung maupun tidak— PDI Perjuangan merupakan salah satu pilar utama dalam proses reformasi selama ini. Menggunakan isu "caleg legislatif nonMuslim" untuk menyerang PDI Perjuangan yang dipandang sebagai wakil dari kelompok abangan, jelas kurang menguntungkan. Jika kelompok Islam hendak memenangkan pertarungan politik, hendaknya menggunakan cara yang lebih elegan dan *civilized* serta menjauhi kesan menjadi bagian dari *status quo*.

Ketiga, setelah pengalaman begitu lama dengan Orde Baru yang tidak boleh diingkari pernah memperlakukan secara kasar kelompok Islam dalam periode yang lampau, ada kesan bahwa umat Islam ingin mengulangi kembali pengalaman yang sama tetapi dengan cara yang terbalik. Jika dahulu golongan minoritas mendominasi ke-

kuasaan, maka sekarang golongan mayoritas haruslah mendominasi.

Kesimpulan seperti ini jelas tak pernah dikatakan secara verbal oleh elit-elit kelompok yang sering menggunakan kartu Islam itu. Tetapi retorika-retorika mereka bisa membimbing kita ke arah kesimpulan semacam itu. Cara berpikir "giliran mendominasi" semacam itu sebetulnya kurang sehat dilihat dari segi penguatan demokrasi di Indonesia. Ini semacam "*qishash* politik", atau balas-membalas dalam politik, yang akibatnya akan menimbulkan efek eskalasi spiral dari perasaan cemburu dan curiga yang tak pernah ada ujungnya.

Saya heran, mengapa lapisan umat Islam tertentu di kota-kota besar seperti Jakarta bersikap begitu tergopoh-gopoh, bahkan terkesan agak kurang percaya diri, dalam menghadapi situasi-situasi politik yang kritis seperti sekarang ini. Benarkah komentar yang sering dilontarkan sejumlah pengamat bahwa Islam di Indonesia adalah agama mayoritas dengan mental minoritas?

Amat menarik bahwa para elit politik yang sering menggunakan kartu Islam di Jakarta itu hanyalah mewakili suatu golongan Islam yang minoritas. Yang amat menakjubkan adalah bahwa dua tokoh Islam yang mewarisi dua organisasi Islam besar di Indonesia, yakni Abdurrahman Wahid dan Amien Rais, memperlihatkan kepercayaan diri yang begitu besar dan tanpa rasa gugup mengulurkan tangan kepada kelompok "non-Islam" untuk membangun suatu tradisi politik yang sama sekali baru: Gus Dur bereksperimen dengan PKB, dan Amien Rais dengan PAN.

Saya rasa, rasa gugup dan kurang percaya diri umat Islam, dalam pelbagai seginya, kurang menguntungkan masa depan demokrasi di Indonesia.□

Eksperimentasi Islam Politik Jilid III

Oleh **M. Alfan Alfian M.**

PEMILU 1999 merupakan kesempatan emas bagi komunitas Islam politik di Indonesia, setidaknya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, sebagaimana telah dilakukannya di masa lalu. Bila —meminjam Lance Castles— Pemilu 1999 merupakan pemilu kedua dalam sejarah pemilu jurdil di Indonesia, maka siapa pun tidak bisa mengelak bahwa inilah momentum yang amat berharga bagi setiap kekuatan politik di tanah air untuk memulihkan harga diri politiknya —termasuk dalam konteks ini, partai-partai politik Islam.

Dalam khasanah Islam politik mutakhir, kita menyaksikan bangkitnya partai-partai politik Islam menjelang Pemilu 1999. Terakhir, saat kampanye pemilu tampak kegairahan berpolitik umat tidaklah mengecewakan. Hanya saja, bila dibandingkan kuatnya kelompok-kelompok politik lain, kekuatan politik Islam yang disimbolisasikan lewat 12 partai politik berasaskan Islam tetaplah mengkhawatirkan. Titik tekan kekhawatiran itu tampak tatkala partai-partai politik berideologi Nasionalisme-Sekuler tampak begitu kuat. PDI Perjuangan, misalnya, tampak tak bisa dibendung untuk menjadi kekuatan politik lima besar pasca-Pemilu 1999. Yang lebih merisaukan, sebagian besar calon legislatif yang mereka sodorkan, non-Muslim.

Para elit politik Islam (delapan partai politik berasaskan Islam) lantas membikin kesepakatan awal untuk memenangkan Islam politik, lewat *stembus accoord*. Ini strategi awal bagi partai-partai politik Islam untuk bertarung habis-habisan dalam Pemilu 1999. Dari perspektif ini, hingga kampanye pemilu berakhir, mulai terlihat peta kekuatan politik kita sesungguhnya.

Ada tiga kekuatan politik di tanah air, yang berhadap-hadapan,

atau setidaknya beririsan satu sama lain: kekuatan Islam politik formal, Islam politik informal, dan —tanpa mengesampingkan kekuatan politik non-Muslim— Nasionalisme-Sekuler. Pertama, kekuatan Islam politik formal. Kekuatan ini direpresentasikan oleh partai-partai Islam yang belakangan ini melakukan *stembus accord*.

Dimungkinkan di belakang hari, mereka hendak mewujudkan fraksi Islam di legislatif, dan lebih dari itu —meminjam analisis Saleh Khalid— skenario lurusnya menunjukkan menuju konfederasi partai-partai politik Islam. Kekuatan ini berhadapan secara frontal dengan kekuatan politik nasionalisme sekuler, namun dimungkinkan akan beririsan secara politik dengan partai-partai Islam "informal", semacam Partai Amanat Nasional (PAN) —tapi tidak dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang condong dekat dengan kekuatan politik Nasionalisme-Sekuler.

Kedua, kekuatan Islam politik informal. Kekuatan politik ini berbasiskan masa politik Islam, namun memiliki *platform* pluralisme, semisal PAN dan PKB. Tidaklah bisa dihindari kedua partai politik ini memiliki basis masa politik kalangan Muhammadiyah dan NU. Sementara partai-partai politik berlabelkan Islam, tapi berasas Pancasila tergolong dalam kelompok ini —walaupun boleh dibilang mereka tergolong partai gurem.

Kekuatan politik ini bisa beririsan dengan kekuatan politik Islam formal, sekaligus dengan kelompok Nasionalisme-Sekuler. Komunike politik jilid I antara PAN, PKB dan PDI Perjuangan, misalnya merupakan fenomena irisan politik kekuatan Islam informal dengan kekuatan politik Nasionalis-Sekuler. Sementara komunike politik jilid II antara PAN, PPP, merupakan irisan politik antara kekuatan politik Islam formal dengan informal.

Ketiga, kekuatan politik nasionalisme-sekuler. Representasi utama dari kekuatan ini menggumpal di PDI Perjuangan pimpinan Megawati. Inilah kekuatan politik yang paling "ditakuti" oleh kelompok politik Islam formal. Tidaklah mengherankan bila isu yang dilontarkan untuk "menggembosi" PDI Perjuangan ialah lewat realitas banyaknya caleg non-Muslim. Fakta politik yang ada memang mencatat bahwa caleg PDI Perjuangan didominasi caleg-caleg non-Muslim. Fenomena ini, bisa jadi bakal menjadi titik balik kekuatan politik Nasionalisme-Sekuler. Namun, boleh jadi pula isu caleg non-Muslim ini mempan untuk menggembosi kekuatan ini.

Eksperimentasi jilid III

Kekuatan Islam politik formal pada masanya pernah mengalami kejayaan, yakni era demokrasi liberal tahun 1950-an. Namun itupun boleh dikata gagal menjalankan pesan-pesan politiknya secara optimal. Masyumi, yang muncul pertama kali sebagai satu-satunya kekuatan politik Islam pasca maklumat nomor X, sedianya menjadi partai politik nomor wahid dalam pemilu 1955, bila saja PSII dan NU tidak keluar dari barisan politiknya. Akibatnya cukup fatal, suara Masyumi dikalahkan oleh PNI —yang sebenarnya nyaris sejajar. Bila saja NU tidak keluar, pastilah kekuatan politik Islam tidak tertandingi di Indonesia saat ini.

Di masa Orde Lama, eksperimentasi Islam politik —sebut saja eksperimentasi politik jilid I— bolehlah dikatakan gagal. Soekarno sebagai pemimpin politik yang mendukung faksi Nasionalisme-Sekuler. NU dan Komunisme yang tergabung dalam ideologi Nasakom, jelas tidak mau melihat eksistensi Masyumi sebagai kekuatan Islam modernis yang menolak konsep Nasakom. Kuatnya politik figur Soekarno di masa Orde Lama menyurutkan peran kekuatan Islam formal (kecuali NU).

Namun, justru di masa Orde Baru, kekuatan politik Islam mencoba untuk mengkonsolidasikan dirinya —katakanlah ini merupakan eksperimentasi Islam politik jilid II. Rehabilitasi Masyumi ditolak rezim Soeharto. Rekayasa —rekayasa politik— rezim Orde Baru tidak memberikan kesempatan bagi kekuatan Islam politik untuk bangkit kembali. Tahun 1973 fusi paksa dilakukan dan bergabunglah partai-partai Islam ke dalam PPP. Tahun 1985, asas Islam PPP terpaksa diganti dengan Pancasila, karena kebijakan asas tunggal.

Setidaknya ada dua hal yang menyebabkan eksperimentasi Islam politik gagal. Pertama, kekuatan eksternal, yakni rezim Orde Baru yang tidak mau melihat kekuatan Islam politik tampil menjadi kekuatan politik yang dominan. Kedua, terpecahnya orientasi politik umat Islam. Di satu pihak, mereka sepakat mendorong bangkitnya partai politik Islam, sementara di pihak lain mereka —dan ini mayoritas— terpaksa mendukung kekuatan politik bikinan Orde Baru, yakni Golkar.

Kini, Pemilu 1999, umat Islam di Indonesia memasuki sebuah wilayah-waktu eksperimentasi Islam politik jilid III. Hal ini ditandai dengan tiga hal. Pertama, terjadi varian-varian politik yang tumpang-

tindih satu sama lain atas kekuatan Islam politik, Masyumi di satu sisi dan NU di sisi lain. Banyak partai politik terinspirasikan oleh ideal-ideal Masyumi dan NU. Kedua, variasi-variasi politik demikian juga dialami oleh kekuatan politik Nasionalisme-Sekuler. Ketiga, suasana politik secara umum mengesankan adanya kehendak untuk perubahan secara radikal, lewat isu-isu reformasi. Isu reformasi merupakan isu yang paling laku, sehingga nyaris semua kekuatan sosial-politik dalam masyarakat menyatakan dirinya reformis, dan "bebas *status quo*".

Apakah eksperimentasi Islam politik jilid III saat ini akan menemui kegagalannya sebagaimana dialami masa-masa lalu? Apakah isu-isu politik yang dilontarkan kekuatan Islam politik formal, bakal laku dan efektif untuk meredam kekuatan Nasionalisme-Sekuler? Ada beberapa fenomena menarik dalam konteks ini sebagai kekuatan positif. Pertama, elit politik Islam secara intensif mengajak pada umat Islam untuk, selain mengidentifikasi dirinya, juga menumbuhkan rasa percaya diri di kalangan umat untuk berpolitik. Akibatnya, *ghirah* politik umat Islam pun terpompa.

Kedua, sentimen agama (Islam), bagaimana pun dalam hal ini merupakan faktor perekat yang cukup efektif untuk menumbuhkan kembali cita-cita politik Islam, sekaligus mengingatkan kegagalan eksperimentasi Islam politik jilid I dan jilid II. Ketiga, Islam politik formal kini menyebar dan memiliki karakteristiknya masing-masing —namun tetap menonjolkan simbol-simbol Islam— sehingga fenomena ini mampu membuat umat Islam banyak pilihan politik atas partai-partai politik Islam. Mereka dihadapkan pada pilihan politik yang jelas-jelas membela Islam, dengan merek yang berbeda-beda.

Namun, hingga kini perlulah dievaluasi dan direfleksikan sejauh mana kekuatan Islam politik formal di tanah air tidak mengalami kegagalan ketiga kalinya dalam berpolitik. Evaluasi ini penting, untuk melihat potensi kekalahan mereka dalam Pemilu 1999. Setidaknya ada tiga catatan yang berpotensi negatif. Pertama, isu-isu politik yang dilontarkan acapkali terlambat untuk diimplementasikan secara real. Isu koalisi partai-partai Islam, sebenarnya sejak lama berkembang, lewat berbagai dialog dan seminar. Namun, kesepakatan *stembus accord* baru dilakukan beberapa hari setelah kampanye pemilu dilakukan. Boleh dibilang manuver politik ini cukup terlambat, terutama bila dilihat dari dinamika politik yang cukup tajam.

Kedua, isu-isu politik yang dilontarkan boleh dibilang acapkali

kurang signifikan dan terlambat. Banyaknya caleg non-Muslim di PDI Perjuangan, bagaimanapun tidak menjadi soal dalam demokrasi. PDI Perjuangan merupakan partai politik yang tidak mendasarkan diri pada asas agama, maka banyaknya caleg non-Muslim merupakan konsekuensi logis belaka dari permainan elit politik non-Muslim di dalamnya.

Memang bila dilihat secara proporsional, fenomena tersebut mengesankan "melecehkan umat Islam" yang mayoritas. Kekuatan Islam politik formal, terpaksa mengedepankan isu ini, untuk menarik simpati —sekaligus konsumsi politik— umat Islam, agar tidak terjebak pada pilihan yang keliru. Lontaran isu ini pun boleh dibilang agak terlambat, sehingga beberapa besar pengaruhnya pada perolehan suara partai-partai Islam, sulit memprediksinya.

Ketiga, isu-isu politik yang dilontarkan partai-partai Islam memang radikal —setidaknya dibandingkan dengan isu-isu politik yang pernah dilontarkan PPP di masa Orde Baru. Mereka berasas Islam dan memperjuangkan syariat Islam, meskipun menolak untuk mengatakan hendak mendirikan "negara Islam". Namun, bila dilihat dari faktor moderatisme umat Islam selama Orde Baru, bukankan isu-isu radikal itu belum bisa diterima sepenuhnya oleh umat Islam? Lonjakan dari pendekatan Islam kultural menjadi Islam politik, bagaimanapun merupakan *gambling* politik yang bisa menemui risiko kegagalan.

Kita berharap apa-apa yang telah dilakukan oleh kekuatan Islam politik formal menghadapi Pemilu 1999 tidaklah menemui kegagalannya secara signifikan. Mereka diuntungkan —untuk tidak mengatakan dimanjakan— oleh imbauan-imbauan yang dikeluarkan oleh MUI dan beberapa ormas Islam, yang intinya menyarankan agar memilih caleg atau pemimpin yang datang dari umat Islam. Namun, menggantungkan pada faktor itu saja tidaklah menjamin — mengingat derajat kewibawaan MUI selama ini menipis.

Untuk sukses dan tidak gagal dalam momentum politik Pemilu 1999, kekuatan Islam politik formal mau tidak mau harus berjuang keras, untuk mencapai suara mayoritas. Bila pun angka mayoritas tidak tercapai, mereka harus mampu memetik pelajaran agar pemilu kelak tidak terjerembab pada lubang yang sama.□

Aliansi Islam

Oleh **Kacung Marijan**

DI ANTARA lebih dari 150 partai yang ada, sedikitnya 10 yang secara khusus hendak memperjuangkan kepentingan dan berbasis ideologi Islam. Ini wajar saja, mengingat pemilih yang beragama Islam memang mayoritas. Karena itu, kalau hendak melakukan pendulangan perolehan suara dalam pemilihan umum (pemilu), mau tidak mau harus melihat dan mempertimbangkan kelompok Islam. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah partai-partai berbasis Islam akan memperoleh suara besar? Meskipun Islam merupakan mayoritas, dalam sejarahnya, pengaruh Islam secara politik tidaklah begitu besar. Memang, di Nusantara pernah ada sejumlah kerajaan Islam. Tetapi, *the ruling class*-nya saja yang Islam, sedangkan konstruksi sosial politik yang ada tidaklah kental warna Islamnya. Yang mengedepan, khususnya di Jawa, adalah adanya konstruksi sosial politik sinkretis, tempat nilai-nilai Islam bisa dibaurkan dengan nilai-nilai lokal.

Pada masa Indonesia kontemporer, konstruksi seperti itu juga masih berlangsung. Kekuatan politik Islam tidaklah sebesar kuantitas penduduk yang memeluknya. Pada Pemilu 1955, total perolehan suara partai-partai Islam hanya 44%. Pada pemilu-pemilu selanjutnya, persentasenya mengalami penurunan, bahkan selalu di bawah 30%. Pemerintah sendiri, khususnya pada masa Orde Baru, cenderung tidak menoleransi Islam politik, dan hanya mendukung Islam kultural.

Adanya jarak antara realitas dukungan terhadap partai-partai Islam dengan kuantitas penganut Islam itu, antara lain, karena kurangnya *sense of political* Islam di antara pemeluknya. Atau, kalau meminjam istilah Clifford Geertz, tak semua penganut Islam di Indone-

sia terkategori santri. Tidak sedikit di antara mereka masuk kategori abangan. Dalam kategori terakhir, betapapun beragama Islam, mereka masih memiliki keterikatan dengan nilai-nilai pra-Islam.

Meskipun demikian, para pengelola partai-partai Islam sekarang yakin bahwa partai yang mereka pimpin masih akan memperoleh dukungan besar. Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Hartono Mardjono, misalnya, yakin bahwa total perolehan suara partai-partai Islam sekitar 60%. Optimisme itu didasari bukan hanya pada kuantitas yang besar. Secara kualitas, penganut Islam juga diyakini mengalami kenaikan. Konsekuensi lanjutannya, *sense of politics* umat Islam juga lebih meningkat. Umat seperti itu akan cenderung menyalurkan aspirasi politik mereka ke partai-partai berbasis Islam.

Agar kekuatan umat Islam tidak terserak-serak, sejumlah partai Islam sudah mengadakan serangkaian pertemuan, membentuk forum silaturahmi. Bahkan, lebih konkretnya, ada gagasan agar sesama partai Islam menjalin kerja sama pada masa kampanye. Hal demikian diintroduksi sebagai langkah awal menuju koalisi pascapemilu. Kalau keyakinan bahwa perolehan suara partai-partai Islam 60% tersebut benar, langkah awal menuju koalisi itu memang strategis dilakukan.

Tapi, optimisme bahwa partai-partai Islam akan memperoleh suara 60% tampak berlebihan. Perkiraan itu tidak hanya ahistoris, karena dalam sejarahnya kekuatan politik Islam memang tidak besar. Keyakinan bahwa umat Islam saat ini secara kualitatif lebih baik, ada benarnya. Tetapi peningkatan kualitas peribadatan itu belum tentu diikuti oleh peningkatan *sense of political* Islam. Kalau ini yang terjadi, belum tentu umat Islam menyalurkan aspirasi politiknya ke partai-partai Islam.

Di samping itu, kelompok santri yang secara tradisional merupakan pendukung partai-partai Islam secara politik sudah terpilah-pilah. Ada yang masih bersikukuh untuk mendirikan partai-partai Islam, dan ada yang memutuskan tidak harus membentuk partai Islam. Nahdlatul Ulama (NU), misalnya, tidak secara khusus membentuk partai Islam, melainkan partai bernuansa Islam-nasionalis, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sementara itu, sejumlah pucuk pimpinan Muhammadiyah mendirikan partai bernuansa inklusif, Partai Amanat Nasional (PKB). Diperkirakan, sebagian besar warga NU akan menyalurkan aspirasi politiknya ke PKB, dan tidak sedikit warga Muhammadiyah akan memilih PAN. Padahal,

NU dan Muhammadiyah merupakan pilar pokok kelompok santri. Dengan demikian, apakah perolehan suara partai-partai Islam sebesar 60% itu rasional?

Di samping itu, kalau mempertimbangkan jaringan sosial, figur kepemimpinan, basis ideologi dan program, dana, aturan main di dalam pemilu, serta pengaruh nonpartisipan, diperkirakan hanya empat partai yang memperoleh suara di atas 10% pada pemilu mendatang. Partai-partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PKB, Golongan Karya, dan PAN. Kalau perkiraan ini benar, berarti harapan kumpulan partai-partai Islam bisa memperoleh suara 60% sulit dicapai.

Meskipun demikian, aliansi politik partai-partai Islam sekarang ini cukup strategis untuk mengantisipasi hasil-hasil pemilu. Kalau perolehan suaranya lumayan besar, mereka bisa berkoalisi di lembaga perwakilan rakyat. Kalau perolehan suaranya kecil, mereka bisa mulai memikirkan perlunya merger agar kekuatannya tampak lebih besar.

Pikiran yang terakhir itu didasari oleh pertimbangan bahwa dalam pemilu kali ini diberlakukan *electoral threshold*, batas minimal persentase perolehan suara untuk bisa ikut pemilu lima tahun mendatang. Batas tersebut adalah 3% atau setara dengan 15 kursi di DPR. Perkiraan saya, partai-partai Islam yang memperoleh suara di atas 3% hanya dua partai. Bila perkiraan ini benar, banyak partai Islam yang akan terkena kartu merah. Dalam kondisi demikian, tidaklah salah kalau aliansi politik partai-partai Islam sekarang dilanjutkan dengan fusi. Mungkinkah?□

Memahami Perilaku Pemilih Muslim

Oleh **Abdul Munir Mulkhan**

SETELAH bangkit kembali dari tidurnya selama hampir setengah abad, kinerja partai-partai berbasis Islam ternyata belum banyak berubah. Mereka dalam banyak hal lebih mengandalkan basis normatif kewajiban syariah dan jumlah nominal pemilih Muslim. Padahal, pendataan mengenai tingkat partisipasi terhadap aturan syariah dan terhadap kegiatan keagamaan belum pernah dilakukan. Demikian pula penelitian tentang pola perilaku pemilih Muslim dan dukungan mereka terhadap partai politik berbasis Islam atau partai lainnya. Dengan demikian, tanpa reformasi pemahaman terhadap pola perilaku pemilih Muslim tersebut bisa diduga berakibat partai berbasis Islam akan kembali gagal merebut simpati mayoritas pemilihnya.

Di sisi lain, masa Muslim cenderung tidak menjadikan pilihan politik sebagai pilihan keagamaan (baca: syariah), tetapi sebagai ekspresi pertemanan atau perkoncoan selain pola hubungan kliental. Bagian terbesar pemeluk Islam yang terdiri dari kaum buruh dan petani miskin, jauh lebih berteman dengan elit lokal di luar referensi keagamaan daripada elit agama. Hal ini menjelaskan mengapa imbauan MUI dan juga beberapa organisasi Islam agar pemilih Muslim tidak memilih partai yang calegnya didominasi non-Muslim menjelang hari pencoblosan dalam Pemilu 1999, menjadi tidak manjur.

Selanjutnya, jika salat Jumat dijadikan indikator ketaatan syariah, hanya sekitar 25% dari pemeluk Islam yang secara ajeg memenuhi kewajiban tersebut. Angka stastistik ini masih harus dikurangi jamaah anak-anak, karena secara syariah belum wajib Jumat. Berdasarkan angka statistik ini dapat disimpulkan pendukung partai berbasis Islam, baik dalam pemilu 1955 atau pun 1999, sebenarnya berada di

atas angka statistik pemeluk Islam yang taat syariah tersebut. Pada 1955, jumlah perolehan suara Masyumi di Yogyakarta misalnya, mencapai sekitar 200% dari jumlah pengunjung salat Jumat.

Hubungan kliental dan perkoncoan itu sebenarnya bisa dijadikan dasar bagi strategi pemenangan pemilu partai berbasis Islam. Namun untuk itu diperlukan suatu infrastruktur politik —sesungguhnya paling kaya dimiliki partai berbasis Islam— yaitu organisasi dan gerakan Islam. Persoalannya bagaimana berbagai kegiatan sosial-dakwah bisa dijadikan pendekatan kultural sebagai dasar strategi di satu pihak dan syariah sebagai paradigma. Dengan demikian gerakan sosial dan dakwah Islam diharapkan bisa mengembangkan pola hubungan perkoncoan dan kliental dengan massa umat yang cenderung tidak taat syariah itu.

Secara sosio-kultural, massa umat yang cenderung tidak taat syariah itu bukan karena rendahnya komitmen keagamaan mereka, tapi karena kecenderungan elitis dari hukum formal syariah. Hal ini tidak hanya dialami oleh gerakan Islam tetapi juga berbagai gerakan keagamaan seperti Kristen dengan lembaga gerejanya. Bagi mayoritas umat lapis bawah yang buruh atau petani miskin, pusat kehidupan mereka bukanlah keagamaan formal, melainkan dunia spiritual sebagai akibat belitan kemiskinan yang membuat masa depan mereka serba tidak jelas. Karena itu, tradisi slametan, kenduri, tahlilan dan berbagai kegiatan budaya berbau Islam lainnya jauh lebih penting daripada ritual formal salat atau puasa. Jika mereka pergi ke masjid atau salat hari raya hingga pergi haji, bukanlah ketaatan formal syariah itu yang penting melainkan partisipasi terhadap dunia spiritual. Selain itu, seni rakyat seperti wayang, ludruk, janger hingga tayuban dan jathilan atau reog adalah bagian dari cara mengambil bagian kedalam dunia spiritual tersebut.

Dalam hubungan inilah, gerakan NU sebenarnya memiliki basis kultural yang membuat gerakan ini lebih dekat pada kehidupan lapis bawah tersebut. Sayangnya, hal ini belum dijadikan bahan utama pengembangan strategi gerakan. Selain itu, sosialisasi Islam oleh NU atapun gerakan dakwah lainnya justru bersifat normatif-doktrinal dengan membuat batas yang tegas antara seni dan tradisi keagamaan rakyat dengan aturan syariah. Hal ini membuat massa rakyat terus-menerus mengalami alienasi terhadap 'rumah' Islamnya. Gerakan dakwah Islam gagal membuat mereka *'at home'* ke dalam komunitas Islam dan juga gagal *'ngewongke'* (memanusiakan; Jawa) atau meng-

hargai martabat mereka seperti apa adanya.

Sementara PNI dan PKI pada masa lalu, sebaliknya menjadikan tradisi keagamaan dan seni rakyat sebagai basis hubungan, sehingga partai ini menjadi identitas kultural rakyat. Hal serupa juga dapat dilihat dari PDI-P yang juga belum jelas bagaimana mereka membela kepentingan rakyat kecil tersebut. Keuntungan PDI-P ialah kemampuan mengakomodasi tradisi keagamaan dan seni rakyat, sehingga merasa aman di dalamnya tanpa khawatir dicerca. Sementara dakwah Islam, khutbah dan pengajian selalu mengecam tradisi keagamaan dan seni rakyat karena dianggap melanggar syariah, dosa dan ancaman neraka tanpa berusaha menghilangkan kemiskinan sosial-ekonomi yang menjadi penyebab tumbuhnya tradisi keagamaan dan seni rakyat tersebut.

Jika fakta sosio-kultural rakyat itu tidak dijadikan dasar strategi dakwah dan pemenangan pemilu, bisa diduga dalam pemilu lima tahun mendatang, partai berbasis Islam akan tetap menderita kekalahan serupa. Seperti halnya 'kekalahan' PAN bukan karena ketuanya terus memproduksi pernyataan keras dan cenderung kasar. Penyebabnya lebih karena partai ini dikesankan sebagai partainya Muhammadiyah, identitas kelas elit kaum terpelajar dan kurang mengembangkan pendekatan kultural mayoritas pemilih buruh dan petani. Partai ini cenderung berjaya di kota-kota besar di mana terdapat perguruan tinggi yang komunitasnya cenderung kritis seperti Yogyakarta atau yang dikenal berbasis Islam modernis seperti Sumatera Barat. Sementara partai berbasis Islam modernis seperti PBB dan PK, popularitasnya tersita oleh kekritisan ketua PAN. Perolehan suara PPP relatif mampu mempertahankan pendukungnya, mengalahkan popularitas PAN dan kekentalan kiai-umat dalam tubuh PKB.

Berdasar kerangka pemikiran di atas, kita bisa mencoba memahami dengan jernih hasil pemilu 1999 yang menempatkan PDI-P pada posisi teratas jauh meninggalkan seluruh partai berbasis Islam. Jika kita membaca hasil pemilu 1955 dan keberagaman mayoritas pemeluk Islam pada lapisan bawah seperti di atas, bukanlah barang aneh jika PDI-P memperoleh kemenangan cukup signifikan dalam pemilu tahun ini. Dalam pendekatan formal syariah, para elit gerakan dan partai berbasis Islam mungkin sulit memahami mengapa mayoritas pemilih Muslim itu tidak memilih partai berbasis Islam. Namun jika kita bersedia menggunakan pendekatan budaya dan eko-

nomi, mungkin kita akan bisa memahami mengapa partai berbasis Islam jauh di belakang PDI-P.

Kerangka pemikiran tersebut juga dapat dijadikan penjelas mengapa pada tahun 1955, PNI menang dan PKI berada pada posisi keempat. Bisa dipastikan bahwa pendukung PNI dan PKI juga PDI-P pada pemilu 1999 mayoritas adalah pemeluk Islam yang sebagian tidak lagi dapat digolongkan sebagai kaum abangan dalam kategori Clifford Geertz. Hal yang sama dapat menjelaskan mengapa mayoritas anggota BPUPKI dalam sidangnya pada 1945 tidak mendukung gagasan negara Islam, meski mayoritas anggota BPUPKI itu pemeluk Islam yang tergolong santri.

Selain itu, perdebatan tentang wanita presiden dalam masyarakat yang mayoritas memeluk Islam semakin penting ketika pemilu 1999 tidak melahirkan partai mayoritas, terutama di MPR. Pencalonan Megawati sebagai presiden dari PDI-P menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama setelah perhitungan sementara menunjukkan kemenangan partai ini mengungguli seluruh partai berbasis Islam dan Golkar. Di luar problem syariah tersebut yang perlu dijelaskan ialah kegagalan partai berbasis Islam memenangkan pemilu sejak kemerdekaan. Masalahnya bukan sekadar benar-salah, taat atau tidak, tapi seberapa ketentuan itu dipahami dan dirasakan manfaat praktisnya bagi kepentingan sosio-ekonomi mayoritas publik yang awam tersebut. Dari sini formula syariah mengenai hubungan publik itu harus berhadapan dengan prinsip demokrasi ketika masyarakat yang mayoritas memeluk Islam itu secara sosial harus mengakomodasi ide-ide dan praktek demokrasi.

Selain itu, masih harus diperhatikan satu model lain pemahaman keagamaan Islam yang dalam khasanah Islam dikenal dengan Sufisme. Model ini lebih mementingkan dimensi esoterik (baca; batin dan spiritual) daripada dimensi ekstorik (legal formalistik) model syariah. Kelenturan pendekatan Sufisme yang batiniah dan substansial, mungkin dapat dijadikan dasar bagi pengembangan hubungan sosial yang lebih menghargai keberagamaan rakyat apa adanya. Reformasi pemahaman terhadap perilaku keagamaan dan politik rakyat menjadi penting di dalam menempatkan mereka sebagai bagian integral umat melintasi batas kelas sosial-ekonomi dan juga 'kelas' syariah.□

Sikap Muslim Memilih Partai

Oleh **N. Syamsuddin Ch Haesy**

SALAH satu hal menarik yang patut menjadi perhatian kaum Muslimin dalam menyikapi hari pencoblosan Pemilu 1999 adalah seruan yang dikeluarkan Majelis Utama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah, setelah berdialog dengan beberapa lembaga dan organisasi kemasyarakatan Islam. Pada seruan itu, secara spesifik umat Islam dipandu untuk menggunakan hak pilih mereka —sebagai wujud konkret tanggung jawab mereka terhadap bangsa dan negara yang sedang sakit parah ini — untuk sungguh kritis menilai siapa calon legislatif yang pantas mereka dukung. Tentu, semua itu sekaligus mengandung makna bahwa MUI dan Muhammadiyah memberikan isyarat partai mana yang sesungguhnya pantas dipilih oleh umat Islam.

Tanpa hendak memilah-milah partai berdasarkan pengelompokan agama, dan tanpa maksud memobilisasi konsistuen Muslim untuk bersikap antipati dan tak mendukung partai politik yang sekuler, dan masih dalam konteks ke-Indonesia-an yang paripurna, penulis melihat seruan itu tepat adanya. Menganjurkan agar kaum Muslimim Indonesia lebih berpihak kepada partai Islam dan partai yang mencerminkan keberpihakan mereka terhadap Islam, boleh dibilang sebagai tanggung jawab sosial MUI dan Muhammadiyah yang terpenting terhadap umat yang mayoritas di negeri berlambang Burung Garuda Pancasila ini.

Kendati demikian, tentu dalam konteks keseluruhan kepentingan bangsa, kita harus menerjemahkan seruan itu secara lebih proporsional dan fungsional. Artinya, di samping faktor Islam sebagai identitas konkret yang membedakan religiusitas dan sekularitas, sebagai

warga negara dan warga bangsa yang beragama Islam, kita pun perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor dalam menentukan pilihan kita.

Pertama, *platform* dan program partai peserta pemilu. Sepanjang kampanye Pemilu 1999 kita telah menerima dengan seksama berbagai orasi, paparan, dan promosi seluruh partai. Tentu, kita telah bisa menyeleksi dengan ketat, rasional, dan proporsional *platform* dan program partai mana saja yang sungguh pas (atau selaras) dengan visi kita sendiri tentang masa depan Indonesia.

Karena dari apa yang mereka sampaikan itu kita dapat melihat dengan jenih, partai mana yang sungguh dapat memenuhi harapan kita. Paling tidak untuk mencapai kembali situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang stabil. Sehingga bangsa ini bisa melanjutkan langkahnya ke depan, membangun tatanan baru yang jauh berbeda dengan (dan tidak merupakan kepanjangan kultur politik kekuasaan) Orde Lama atau pun Orde Baru. Secara kritis dan cerdas kita harus mampu melihat, *platform* dan program partai mana yang sungguh baru mencerminkan kesejatian diri sebagai kaum reformis.

Kedua, *track record* tokoh-tokoh partai. Soal ini teramat penting untuk kita, lantaran dari begitu banyak tokoh yang tiba-tiba muncul dengan 48 partai, terdapat begitu banyak orang atau kelompok orang yang memiliki catatan kelam di masa silam. Di antara mereka, bahkan terdapat orang-orang yang merupakan bagian penting dari kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru —yang telah melakukan proses penzaliman dan pengukuhan kultur politik— yang terbukti telah membuat negeri ini porak-poranda begini macam.

Untuk itu, kepedulian kita terhadap nama-nama calon anggota legislatif menjadi penting maknanya. Karena keterhanyutan kita terhadap tanda gambar dan retorika politik, akan membuat kita terkelabui kembali seperti hari-hari kemarin. Dalam konteks ini, jelas bagi kita, ukuran penting yang harus kita perhatikan adalah, partai mana yang secara selektif telah menyeleksi dan hanya mencalonkan anggota legislatif (yang secara formal akan mewakili kita di DPR dan MPR) yang memenuhi kriteria *akhlaqul karimah*, yaitu: *siddiq, amanah, tabligh, fathonah*, dan *rabbiyah*. Selama kampanye berlangsung, kita tentu sudah dapat menyeleksi mereka atas dasar kriteria tersebut.

Ketiga, latar historis. Karena pada Pemilu 1999 ini banyak bermunculan kembali partai-partai lama (termasuk yang bernama

baru), yang terpaksa berfusi ke dalam tiga partai selama Orde Baru, maka kita perlu secara selektif memahami benar atau historis masing-masing partai, bagaimana sepak terjang mereka menurut catatan sejarah, sehingga kita akan faham benar, dari partai-partai lama itu yang mana pula yang memang pantas dipilih dan pantas menerima suara kita.

Sebagai Muslim, hal utama yang harus ada di benak kita adalah kewajiban memberikan suara hanya untuk partai yang memenuhi standar kepatutan menerima suara kita. Yaitu, partai yang memiliki *platform* dan program yang sungguh akan menjadikan bangsa ini sebagai suatu *baldah* yang *thayyib* dan *ghafuur*. Bangsa yang memberikan kemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia warga negaranya, khususnya kaum Muslimin sebagai penduduk terbesar, dalam suatu masyarakat madani sebagaimana dicontohkan Muhammad SAW.

Itulah suatu masyarakat madani yang menjunjung tinggi moralitas dalam suatu pemerintahan yang amanah, bersih, demokratis, dan mampu melayani rakyat. Masyarakat yang menempatkan hukum secara suprematif, sehingga mampu mengembalikan keamanan dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pendek kata bangsa yang mampu merentangkan kembali silaturahmi untuk memperkuat persatuan bangsa dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Bukan bangsa yang dipimpin oleh penguasa atau golongan yang hendak mengulang kembali kebiasaan meminggirkan atau memarginalisasikan Islam dan kaum Muslimin.

Islam yang kita maksudkan dari seruan MUI dan Muhammadiyah, tidak berhenti hanya pada sebagai pribadi dan partai semata. Melainkan juga Islam sebagai sistem nilai dan orientasi perkhidmatan.

Beranjak dari pemikiran di atas, jelas sudah seruan MUI dan Muhammadiyah harus kita anggap sebagai panduan penting yang semestinya kita ikuti. Karena lepas dari bagaimana sikap dan pandangan kita terhadap MUI dan Muhammadiyah, yang jelas substansi seruan itu patut menjadi referensi penting bagi kita. Sekurang-kurangnya untuk tidak mengulangi kembali kesalahan kita selama ini. Baik menyangkut proses kultus individu, penyimpangan, dan penyalahgunaan kekuasaan (tidak hanya sebatas nepotisme, kolusi, dan korupsi belaka), sampai pada proses marginalisasi Islam sebagai sistem nilai dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karena, sejak bergelindannya gerakan reformasi sejak setahun silam, fokus perhatian hanya pada sebatas ketiga hal di atas, dan kita nyaris lupa bahwa di antara euforia reformasi bermunculan kembali secara proaktif berbagai upaya sosialisasi marginalisasi Islam, termasuk pengembangan Islamo-phobia.

Untuk dan atas nama reformasi, revitalisasi nasionalisme dan berbagai retorika politik lain yang menyertainya, kita menyaksikan bagaimana masyarakat Muslim dihadapkan oleh berbagai aksi provokasi dan eksploitasi simbol-simbol agama untuk kepentingan politik —terutama melalui pers nasional dan internasional. Aksi-aksi terencana, yang bila tak disikapi dan diwaspadai dengan cerdas akan menyebabkan munculnya friksi dan konflik antarsesama kaum Muslim.

Kewajiban kita, kaum Muslim, untuk hanya memberikan suara kita bagi partai-partai Islam dan islami, tidak harus diterjemahkan sebagai sikap sektarian, dan tidak pula harus kita fahami sebagai tindakan inklusif. Sikap demikian, sama sekali tidak berurusan dengan inklusivisme dan bahkan nasionalisme, karena nasionalisme dan ke-Indonesia-an telah menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari sikap kita memberikan dukungan terhadap partai-partai Islam dan Islami. Apalagi, partai-partai sekuler, sepanjang pelaksanaan kampanye yang baru lalu, lebih banyak menjadikan simbol-simbol ke-Islam-an hanya sebagai alat untuk merekrut suara umat Islam sebanyak-banyaknya, sementara plaform dan program mereka sama sekali tak mencerminkan kepedulian untuk menjadikan umat Islam berdaya dan berjaya.

Oleh sebab itulah, sambil tetap mengusung semangat *kitorang basodara* dan meyakini sepenuhnya bahwa Indonesia bukanlah negara berdasarkan agama, kita tetap harus waspada dan semakin konsisten meneguhkan sikap bahwa hanya dengan kemenangan Islam dan penerapan sistem nilai dengan kemenangan Islam dan penerapan sistem nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, bangsa dan negara ini tidak terpuruk lagi di masa depan. Sejarah sudah membuktikan, bagaimana Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap menjalankan pemerintahan secara demokratis, sidiq, amanah, tabligh, fathonah dan rabbiyah. Pemerintahan yang menyejahterakan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat atas alam semesta.□

Partai Semangka, Mangga, dan Mentimun

Oleh **Eep Saefulloh Fatah**

DALAM perjalanan pulang dari sebuah kota di luar Jawa, April lalu, saya bersua dengan pemimpin sebuah partai Islam peserta Pemilu 1999. Di tengah cerita *ngalor ngidul*, ia tak bisa menyembunyikan optimismenya. Ia yakin, di Jawa Barat saja partainya bisa meraih 28 kursi. Pun ia yakin bisa meraih 40 persen kursi yang diperebutkan di Sumatera. "Minimal kami akan meraih 50-75 kursi parlemen pusat, "katanya optimistis.

Terus terang, saya tak terkejut oleh optimisme yang menggelembung itu. Partai, tanpa kecuali, memang sedang berlomba-lomba optimistis. Ketika berbicara tentang kans pendulangan suara, mereka selalu menyebut persentase fantastis. Maka, ketika persentase itu dijumlahkan, kita tak menemukan angka 100 persen, melainkan lebih dari 600 persen.

Membangun optimisme besar-besaran bukan dosa, melainkan bahaya. Adalah bahaya manakala semua partai menyiapkan diri hanya dengan stok optimisme berlebih tanpa menyiapkan diri untuk kalah dan kecewa. Ketidakikhlasan mereka untuk kalah dan ketidakmampuan mereka mengelola rasa kecewa bisa menjadi energi yang sangat destruktif pasca-pemilu 1999. Pada titik inilah optimisme partai-partai menjadi soal serius dan mencemaskan.

Optimisme bermasalah itu tak terkecuali berserak di kalangan "partai Islam", yang jumlahnya 20 dari 48 partai peserta Pemilu 1999. Umumnya partai Islam optimistis akan meraih suara besar karena tersedia pemilih Muslim dan jumlah besar. Optimisme sebagian dari mereka juga ikut digelembungkan lantaran keterpesonaan akan hasil

Pemilu 1955, yang menunjukkan besarnya basis dukungan bagi partai Islam.

Saya amat khawatir optimisme itu bertepuk sebelah tangan. Partai-partai Islam itu lupa bahwa mereka hidup di tengah musim semangka, mangga, dan mentimun.

Banyak pemilih Muslim yang lebih tertarik pada tawaran-tawaran humanistis dan progresif, bahkan pada model-model perlawanan radikal. Sebaliknya, mereka tidak atau kurang tertarik pada "pendekatan saling rangkul dengan kekuasaan", yang semenjak akhir 1980-an justru banyak dipakai oleh kalangan Islam politik.

Mereka adalah semangka: terlihat hijau pada kulitnya, tapi merahlah isinya. Umumnya partai Islam tidak bisa mewadahi semangat progresif, humanistis, dan radikal kaum semangka. Yang justru atraktif bagi kaum ini adalah partai-partai non-agama yang menawarkan pendekatan lebih progresif-radikal atau yang kelihatannya progresif-radikal: bisa PUDI, bahkan PRD, tapi terutama PAN dan PDI Perjuangan. Di kalangan partai Islam, hanya Partai Keadilan yang bisa menembus kebun semangka ini.

Pemilu 1999 juga dilanda musim mangga. Banyak pemilih Muslim yang lebih tertarik pada kenyamanan dan kepastian jangka pendek yang sangat pragmatis. Mereka cenderung "kedap reformasi" dan sangat konservatif dalam memandang dan menyikapi banyak hal. Kulit mereka memang hijau, tapi dagingnya kuning.

Itulah basis pemilih Muslim yang setelah Pemilu 1955 mengalami "Golkarisasi" selama lebih dari tiga dasawarsa. Mereka akan cenderung memilih Golkar ketimbang partai Islam.

Semangka dan mangga bersemi bersama mentimun. Diantara calon pemilih Muslim, berserakan banyak massa apolitis atau apatis atau bingung. Boleh jadi mereka tak percaya bahwa Pemilu 1999 adalah jalan keluar yang efektif dari krisis politik dan ekonomi. Boleh jadi mereka tak tergiur oleh tawaran dari satu pun partai. Boleh jadi mereka bingung harus memilih partai mana. Boleh jadi mereka kekurangan informasi.

Mereka memang terlihat hijau pada kulitnya, tapi berdaging putih. Merekalah kantong golput terbesar dalam Pemilu 1999. Dan sebagian besar golput itu bukanlah "golput politik" yang memang menjadi golput sebagai ekspresi perlawanan politik. Mereka adalah "golput teknis", yang tak memilih lantaran sebab-sebab "teknis" semacam bingung, tak percaya, atau kurang informasi. Musim se-

mangka, mangga, dan mentimun itulah yang menjebak partai-partai Islam ke dalam gelembungan optimisme berlebihan. Jika dijelaskan secara agak rumit, keterjebakan itu dilatari oleh kekeliruan mereka dalam memahami proses pewarisan partai antargenerasi —bahwa anak cucu Masyumi, bahkan juga NU, yang tersedia sekarang tidaklah menerima warisan Masyumi atau NU secara ideologis, melainkan sekadar genealogis. Masyumi dan NU tidak menjadi identitas ideologis, tapi biologis.

Di tengah musim semangka, mangga, dan mentimun itulah optimisme partai-partai Islam mengidap persoalan lataran potensial mendatangkan ketidakikhlasan-kalah atau rasa kecewa yang tak terkelola. Dalam konteks inilah saya teringat pada Irving Louis Horowitz —*Winners and Losers* (1984)— yang bercerita bahwa sebuah masyarakat semacam masyarakat Amerika menjadi tangguh lantaran terdidik untuk menjadi pemenang dan pecundang bergantian. Saya pikir ada perlunya partai-partai peserta Pemilu 1999 "membaca" Horowitz.□

Radikalisme dan Ekstremisme Bukan Ajaran Islam

Wawancara **Nur Mahmudi Ismail**

"TERUS TERANG, Partai Keadilan memakai istilah presiden untuk pemimpinnya, supaya istilah presiden tidak sakral, sehingga tidak seorang saja bisa menjadi presiden," kata Ketua Partai Keadilan (PK), **Dr Ir Nur Machmudi Ismail MSc**.

Kehadiran PK memang cukup menarik perhatian para pengamat politik. Dalam waktu singkat, partai baru ini telah memiliki 23 dewan pimpinan wilayah (DPW). Berarti partai ini hanya perlu mendirikan empat DPW lagi untuk hadir di seluruh propinsi di Nusantara. Suatu prestasi yang tak mudah ditandingi oleh partai-partai lain yang tampil di era reformasi.

Sebelum memimpin PK, bapak tiga anak ini aktif di bidang dakwah. Sejak 1985 ia mengajar mata kuliah Metodologi Penelitian di Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Dan pada 1997, peneliti di BPPT ini duduk sebagai anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Pendidikan formalnya dia jalani di Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (1980-1984). Kemudian di Fakultas Peternakan, Texas A & M University, sampai meraih gelar doktor (1994) dengan predikat *cum laude*.

Mubalig kelahiran Kediri, 11 November 1961 ini berbicara tentang berbagai hal, semisal asal-usul dan basis PK, sikap politik partainya, kesiapannya untuk berkoalisi dengan partai lain, termasuk PDI Megawati, soal *stembus accord*, dan berbagai langkah untuk menyatukan kekuatan partai Islam di MPR. Berikut petikan wawancaranya

yang dirangkum dari Majalah *UMMAT* dan Harian *Republika*:

Dalam waktu singkat, PK memiliki cukup banyak DPW. Di mana saja basis partai ini?

Sebenarnya Partai Keadilan adalah kelanjutan dari berbagai kegiatan kawan-kawan yang terlibat dalam dakwah Islam. Selama masa Orde Baru, kita tahu, umat Islam dengan berbagai formatnya didiskreditkan, dikecilkan, dan dipinggirkan. Ini yang menyebabkan aktivis dakwah, ulama, kiai, ustad, dan ustadzah mencoba mengekpresikan diri dengan berbagai format. Mulai dari majelis taklim sampai pesantren. Namun sering mendapat hambatan. Baru sekarang ada kesempatan membuka wacana baru.

Jadi, massa Partai Keadilan bukan saja berasal dari aktivis kampus, tapi kombinasi dari seluruh format, termasuk mereka-mereka yang aktif dalam bidang pendidikan dan bimbingan belajar.

Apakah PK yang berasal dari gerakan dakwah ini becermin pada gerakan Ikhwanul Muslimin yang digerakkan Hasan al-Bana di Mesir?

Tidak terlalu jauh seperti itu. Seperti yang diungkapkan dalam deklarasi PK, tentu tiap orang menginginkan negara yang aman, adil, dan makmur.

Kita ingin umat Islam memiliki kapasitas dengan negaranya. Artinya, ia bisa hidup dengan agama lain, bisa hidup dengan golongan lain. Kita ingin di negara ini tercipta keadilan, kemakmuran, kewibawaan, dan kemajuan.

Namun, yang paling penting adalah kita ingin mengubah wacana kelembagaan negara dari lembaga kekuasaan menjadi lembaga pelayanan. Sehingga, masyarakat itu semakin terhormat.

Dengan menjadikan pemerintah sebagai lembaga pelayanan, maka konsekuensinya partai harus berjuang bagaimana menggaji tinggi para birokrat dan militernya, sehingga masyarakat bisa menuntut keprofesionalan mereka. Dengan ini diharapkan rakyat lebih berwibawa.

Apa sikap politik utama PK?

Yang paling utama saat ini adalah tiga paket UU yang diusulkan pemerintah: UU Politik, UU Pemilu, dan Susunan DPR/MPR. Kalau UU ini tak mampu mencerminkan suasana yang menyenangkan rakyat, saya kira pemilu yang akan datang juga menjadi *nonsen*. Dalam

artian, tak akan menumbuhkan pemerintahan yang *legitimate*.

Anda melihat pemerintah sekarang sudah mengarah ke sana?

Lho, rancangan undang-undangnya tampaknya terlalu ilmiah. Dari sisi pelaksanaan pemilu, dengan sistem distrik-proporsional, itu indah memang: secara demokratis bisa dipertanggungjawabkan, secara ilmiah bisa diperdebatkan. Kenyataan sekarang —seperti yang telah kami sampaikan ke F-KP dan F-PP DPR RI— saya tegaskan, lebih baik kita mengambil sistem proporsional saja. Ada yang menambahkan dengan dinuansai oleh distrik.

Tetapi, betul-betul proporsional. Yang dimaksud dengan dinuansai distrik, calon-calonnya itu memang mewujudkan tokoh-tokoh daerah. Walaupun, tidak 100 persen. Agar apa? Otonomi ini akan muncul. Orang semakin bangga dengan wakil-wakilnya betul-betul dari daerahnya.

Ini untuk sekarang saja atau untuk selanjutnya?

Masalah proporsional ini hanya untuk sekarang. Kami memesan, di Sidang Umum MPR 1999/2000 nanti segera dibahas kemungkinan sistem distrik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sejak 1971 sampai 1997 tidak satu orang pun, termasuk anak SLTP, yang merasa puas dengan pelaksanaan pemilu. Kecuali orang yang berniat menipu, itulah yang paling puas.

Selama ini Anda melihat penipuan itu?

Bukan saya yang melihat, tapi semua orang mengatakannya begitu.

Kalau sistem proporsional dilaksanakan sekarang, jangan-jangan penipuan itu akan terulang, karena pemerintah sekarang kan orang-orang lama?

Kalau saya justru melihat sebaliknya. Kalau saat ini kita menumbuhkan sistem distrik, yang terjadi adalah harusnya muncul tokoh-tokoh. Tapi yang terjadi selama 30 tahun, kita tidak dididik untuk memunculkan tokoh-tokoh. Sebagai ilustrasi, selama ini dengan tetangga saja tidak kenal.

Lalu, menurut Anda, untuk jangka panjang idealnya yang mana?

Idealnya tentunya distrik. Menurut saya, memang harus dilihat benar. Jadi, tidak langsung distrik. Kenapa kami *concern* dengan sis-

tem proporsional pada pemilu sekarang? Karena kami memperjuangkan tegaknya kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu itu.

Karena itu, yang kami tekankan adalah infrastruktur dan mekanisme sistem kepanitiaan pemilu berjalan dengan baik: menggambarkan sistem demokratisasi dan jaminan akan adanya kejujuran serta keadilan.

Dengan nama Partai Keadilan, mengapa Anda memilih Islam sebagai asas?

Kami jelas mengambil Islam sebagai asas partai. Tapi juga perlu dijelaskan, itu adalah asas kami dalam berparpol dan berormas dalam negara yang berlandaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.

Perjuangan kami menggunakan asas Islam, sama dengan perjuangan kami untuk meminta agar agama lain juga menggunakan agamanya sebagai asas partai. Ini bukti proses demokratisasi yang kami perjuangkan. Bukan berarti kami memperjuangkan asas Islam, *tok*.

Kita kan punya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, tiap insan mempunyai tanggung jawab *rabbaniah*. Baik Kristen, Budha, Hindu, maupun Protestan. Bukan menjadi orang yang *split personality*. Menjadi masyarakat yang oportunis dan pragmatis. Yang enak dilaksanakan, yang tidak enak dilaksanakan.

Tidakkah asas ini akan membuat PK dicap sebagai kelompok Islam radikal?

Justru inilah yang kita harus perjuangkan. Perjuangan kita membuktikan bahwa orang Islam itu tidak pernah berbuat sesuatu yang merusak. Hanya karena desakan orang-orang tertentu yang membuat umat Islam apatis. Sedangkan ajaran agamanya, jelas *rahmatan lil alamin*.

Selama ini Partai Keadilan mampu menunjukkan massanya tidak berbuat radikal. Massanya juga tidak berbuat keributan.

Tapi bisa jadi ada unsur ketakutan agama lain bahwa kalau PK menang, Indonesia akan menjadi negara Islam?

Betulkah ajaran Islam itu mendiskreditkan agama lain? Saat ini yang terjadi adalah, di kala umat Islam minoritas, mereka malah dikejar-kejar. Kalau non-Muslim minoritas, mereka *adem ayem* dan

damai. Justru itu yang menjadi tantangan kita, umat Islam harus mampu membuktikan bahwa radikalisme dan ekstremisme bukan ajaran Islam.

Melihat asas PK, terlihat ada kemiripan partai ini dengan partai lain, seperti Partai Bulan Bintang, Partai Ummat Islam, Partai Kebangkitan Bangsa. Kenapa tidak *merger* saja?

Saya kira, kalau dengan PKB, bukan, karena mereka menggunakan asas Pancasila. PAN juga Pancasila. Kalau PUI berasas Islam. Kami dengan PUI akrab. Kami membentuk forum komunikasi partai-partai Islam. Saat ini berbicara tentang nasib bangsa.

Peserta forum komunikasi ini siapa saja?

Seluruh partai yang secara jelas menggunakan asas Islam: PUI, Partai Islam Pembaruan Indonesia, Partai Serikat Islam, Partai Tharikat Islam, Partai Masyumi (Mawardi Noer), dan Partai Keadilan.

Kenapa tidak berkoalisi saja seluruh partai itu?

Itu sedang kita diskusikan. Memang ada satu partai yang belum ingin mengembangkan sayapnya, ada juga yang berpendapat lain. Pokoknya saat ini sedang tahap penjajakan. Kalau koalisi, itu adalah visi kami. Terbentuknya persatuan umat Islam, adalah salah satu visi utama PK

Apakah koalisi PK hanya dengan sesama partai Islam saja?

Tidak. Koalisi kami berdasarkan persamaan visi dan misi. Dengan siapa saja bisa, selama menegakkan keadilan, kejujuran, dan punya sikap amanah dalam kebirokrasian.

Termasuk dengan PDI Megawati?

Saya kira tidak ada masalah.

Tapi asasnya kan berbeda?

Justru itu yang akan kita lihat. Kalau kami mengatakan niscaya asas Islam, asas Kristen, dan asas lainnya, apakah partai asas Pancasila itu berbeda dengan PK dalam konteks kenegaraan? Kita harus melihat tidak berbeda.

Justru yang sulit bagi kita apakah partai itu berjuang untuk kekuasaan atau berjuang untuk nilai? Dalam hal ini PK berjuang untuk menegakkan nilai. Jadi, akan terbuka terhadap partai mana pun, asal perjuangannya untuk menegakkan nilai, bukan kekuasaan.

Kalau negara lain presiden partai siap menjadi presiden, bagaimana dengan Anda?

Kalau kami, belum menentukan. Soalnya, di negara kita bermacam-macam situasi berjalan tak menentu. Secara prinsip kami siap dengan seluruh risikonya untuk mengurus negara. Kalau memang parlemen dan partai lain mendukung saya, saya juga tidak boleh menolak. Itu juga kewajiban kami yang dipercayai. Tapi sementara ini tak ada keputusan dari PK agar saya maju ke depan.

Banyak orang mensinyalir PK belum punya pemimpin yang bisa diandalkan...

Saya kira tergantung dari mana kita melihat pengandalannya. Toh, diandalkan atau tidak, itu tergantung pada penerimaan masyarakat.

Apakah saya diandalkan atau tidak, menurut saya ukurannya bukan kemampuan saya. Sebenarnya, kemampuan anggota kabinet itu yang membuat seseorang dapat memimpin negara. Tapi, *insya Allah*, saya mampu. Kalau masalah andalan-andalan, Soeharto itu diandalkan itu, toh runtuh juga.

Dalam mengurus negara, saya kira tidak harus orang itu berpengalaman sekian tahun. Kita sudah diajari sejak SMP bahwa kemampuan mengurus negara itu ada dalam diri kita. *Wa fi anfusikum afalaa tubsyirun*, di dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikan ada tanda-tanda mengelola sebuah negara.

Artinya, dalam tubuh kita, agar tubuh kita berwibawa, sehat, dan memiliki sistem keamanan dan mengurusi badan sehari-hari, semua itu diatur dalam sebuah sistem kontrol syaraf sadar dan tidak sadar.

Sebagai Presiden PK, siapkah Anda menerima tantangan Amien Rais dan Yusril Ihza untuk melakukan debat terbuka?

Karena saya bukan calon Presiden RI, saya setuju dengan ide itu. Dalam artian menumbuhkan profesionalisme. Agar semua pihak bisa melihat dengan baik apa yang dimaui oleh calon pemimpin mereka. Ini ide sangat bagus dan perlu digalakkan. Ini sangat dewasa.

Apakah KAMMI itu memang tulang punggung PK?

Bukan KAMMI yang harus kita lihat, karena tidak seluruh massa KAMMI masuk PK. Mereka ada di seluruh partai. Jadi, lihat saja *person*-nya.

Soal *stembus accord*, Apa urgensi dan arti penting upaya ini ba-

gi partai Islam?

Arti penting pertama, ini menunjukkan bahwa di antara kedelapan parpol Islam ternyata telah memiliki kelapangan dada dalam sikap *ukhuwah islamiyah*. Proses pelimpahan sisa suara ini jelas mengarah kepada pengentalan sikap ini sekaligus membantah perkiraan pendapat masyarakat seolah-olah di antara partai-partai Islam kondisinya terpecah-pecah. Ternyata kedelapan parpol ini tetap bersatu.

Hal lain yang menggembirakan, saya melihat kedelapan parpol Islam ini bersama-sama bergerak untuk menyukseskan arah reformasi. Bukan hanya untuk kepentingan untung rugi sasaran politik sesaat. Tidak mustahil, ini bisa menjadi potensi awal untuk bisa berbicara dalam konteks lebih luas lagi.

Bisa Anda jelaskan lebih rinci?

Artinya, SA tidak hanya berfungsi untuk pelimpahan sisa suara agar tidak *mubadzir*. Kedelapan parpol ingin membuktikan bahwa mereka bisa bicara lebih jauh lagi dalam masalah reformasi. Ini penting sebab saat ini kata reformasi memang ada gejala mengalami deviasi arti. Kita juga ingin menunjukkan ke TNI dan Kepolisian bahwa di antara politisi sipil ternyata mulai ada kedewasaan bersikap dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis dan tertata lebih rapi. Saat ini kan ada asumsi bahwa sipil tidak bisa mengelola negara. Seolah-olah di antara politisi sipil terus terjadi percekcokan seperti pada era Orde Lama. Hal serupa juga kami harapkan dari anggota Parlemen yang mewakilki Utusan golongan dan Daerah. Karena itu, kita menagih TNI dan Kepolisian agar mereka siap mendukung dan bisa bekerjasama dengan siapa saja yang nanti terpilih di Parlemen. Jadi, mereka tidak hanya memberikan dukungan ke Golkar atau parpol-parpol lain yang ada kaitannya dengan rezim lama. Namun, TNI dan Kepolisian harus siap bekerja sama dengan siapa saja sehingga diperoleh pemerintahan yang *legitimate*.

Forum silaturahmi partai Islam sebagai bidan kesepakatan ini. Bagaimana ceritanya terbentuk lembaga itu?

Forum ini sudah berlangsung lama, tepatnya pada 28 September 1998. Anggota awal dari Forum ini ada enam partai, yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Ummat Islam (PUI), Partai Masyumi (PPIIM), Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905), Partai Politik Thareqat Islam (PPTHI) dan Partai Islam Persatuan Indonesia (PIPI). Na-

mun, setelah verifikasi dari Tim 11, anggota Forum tinggal empat karena PIPI dan PPTHI tidak lolos. Dalam perjalanannya, Forum ini mengalami perluasan. Awalnya hanya berbentuk kaukus karena dari PPP hanya mengirimkan Pak Zarkasih Nur selaku pribadi. Tapi, itu terus berkembang dengan bergabungnya Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdlatul Ummat (PNU) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Pembicaraan di dalam Forum tidak hanya menyangkut masalah SA tapi juga sampai pada masalah persiapan menjelang Sidang Umum mendatang.

Apakah tidak ada pihak yang dirugikan dengan formulasi sisa suara diberikan kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar?

SA pada prinsipnya menghindari kemubadziran sisa-sisa suara. Secara prinsip, tidak ada partai yang akan mengalami kerugian akibat SA ini. Bahkan, partai-partai yang tanpa SA tidak dapat kursi akan mendapat kursi karena proses ini. Sebagai contoh, kedelapan parpol Islam tanpa SA kemungkinan gagal mendapat kursi karena jumlah suaranya tidak mencukupi kuota. Namun, saat sisa suara digabung kemungkinan mereka bisa mendapatkan jatah satu atau lebih kursi. Maka, jatah kursi ini akan diberikan ke parpol yang memiliki sisa suara terbanyak setelah diranking. Hal ini tidak akan terjadi jika kedelapan parpol tidak melakukan upaya SA.

Kenapa usulan Partai Masyumi yang berharap SA bisa mendongkrak parpol kecil agar bisa memenuhi kuota 2 persen ditolak?

Secara teknis ini sulit dilakukan karena banyak variabel yang harus diperhitungkan. Ternyata dalam pelaksanaannya sangat ruwet sehingga jangan-jangan malah membuat percekcokan di dalam. Selain itu, ini juga akan mengusik prinsip keadilan. PK memang pernah mengusulkan adanya mekanisme 'sedekah' bagi parpol yang belum mendapat kursi, tapi ini juga sulit untuk dilakukan.

Apakah SA sebagai langkah awal dari proses koalisi di antara kedelapan parpol Islam?

Bagi PK, saat ini yang terpenting adalah bagaimana meluruskan agenda reformasi terlebih dahulu sebab saya melihat ada upaya-upaya melencengkan gerakan reformasi. Indikasi ke arah itu ada.

Kita bisa membicarakan berbagai masalah untuk menghindari proses disintegrasi bangsa.

Ada yang memperkirakan SA untuk menghadang *common ene-*

***my* umat Islam?**

Saya tidak melihat ke arah situ tapi lebih ke arah meluruskan arah reformasi. Kita tidak ingin kembali terjebak ke arah sektarian. Kalau programnya diarahkan ke situ saya kira kita tidak akan pernah menjadi lebih dewasa dan rasional sebab kita hanya memikirkan masalah sentimen tertentu. Semua parpol dari mana pun akan kita dukung asal menunjukkan komitmen ke arah reformasi.

Apakah SA akan dilanjutkan menjadi satu Fraksi Islam di Parlemen kelak?

Kami belum memikirkan ke arah situ. Bagi PK, jika PK mendapat 10 persen suara sehingga bisa membentuk fraksi sendiri, pintu PK tetap terbuka bagi parpol Islam lain. Asal, mereka sama-sama serius menyukseskan agenda reformasi. Tidak hanya itu, PK juga terbuka bagi parpol lain.□

Politik Islam Sekarang Jauh Lebih Majemuk

Wawancara **Robert William Hefner**

SELAIN melakukan penelitian tentang suku tengger di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, Robert William Hefner juga dikenal sebagai pengamat soal dialektika antara Islam modernis dan Islam tradisionalis. Dia juga pernah mempelajari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Antropolog yang akrab dipanggil Bob ini lahir di Ohio, Amerika Serikat, 28 Mei 1952. Mulai Januari 1999 ia bertugas sebagai dosen tamu di Universitas Gajah Mada dan akan berakhir Agustus 1999.

Yang menarik dari desertasi Bob adalah pengamatannya atas perubahan sosial di pedesaan Jawa setelah pembantaian massal pada tahun 1965. Pengamatannya ini cukup relevan dengan kondisi pada saat menjelang pemilu 1999 lalu, di mana ada polarisasi dan dikotomi yang cukup kuat antara kaum abangan atau nasionalis dengan kaum santri. Berikut penuturannya kepada majalah *D&R*:

Di disertasi Anda ditulis telah terjadi perubahan sosial besar-besaran di masyarakat setelah pembantaian oleh orang-orang NU terhadap orang-orang yang terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagaimana kondisi sosial saat itu?

Ciri yang paling menonjol dari situasi masyarakat setempat itu tidak hanya terjadi di Jawa Timur, tapi juga sebagian besar Jawa Tengah: tidak ada dikotomi atau polarisasi antara kaum abangan atau nasionalis dengan kaum santri atau agamis yang setara. Polarisasi ini justru terjadi pada akhir 1950 dan awal 1960-an.

Kalau kembali ke karangan Greetz, yang saya sendiri masih

menganggap sebagian besar cukup bagus, ada beberapa tesis di dalamnya yang saya kira keliru. Persaingan di antara kedua kelompok atau kedua kubu itu —kejawen/abangan dan santri— merupakan persaingan yang banyak berubah selama lebih dari 500 tahun; dan selalu seintensif dan dan seekstrem yang dialami Greetz pada dasawarsa 1950-an. Saya kira sebagian dari penelitian pedesaan Jawa belakangan ini, baik dari dalam maupun luar negeri, melihat situasi yang agak lain dibanding yang digambarkan Geertz.

Sebelum dasawarsa 1950-an, dikotomi atau polarisasi itu tidak begitu ekstrem. Yang terjadi pada dasawarsa 1950-an adalah politisasi kultur dan agama setempat akibat ketegangan yang sebagian menjadi komoditas politik antarelite nasional. Kalau kita coba menarik kesimpulan dari jaman itu, saya kira kesimpulannya cukup jelas: yang menyebabkan memburuknya persaingan pada tingkat lokal antara Islam atau santri dengan abangan adalah persaingan pada tingkat elite. Apabila elite tidak campur tangan, tidak mencoba memobilisasi dari tingkat nasional sampai di tingkat pedesaan, saya kira polarisasi dan dikotomi yang begitu menonjol pada dasawarsa 50-an tidak separah itu.

Setelah itu memang ada politisasi yang cukup ekstrem. Tapi, di beberapa daerah seperti yang saya lihat, misalnya di Pasuruan dan Malang, walaupun ada ketegangan yang jauh lebih ekstrem dibanding dasawarsa 1940-an atau 1930-an, apalagi pada awal abad ini, itu tidak terlalu keras. Jadi, saya kira sekali lagi, peristiwa pada tingkat nasional-lah yang membuat kerusuhan pada tingkat lokal.

Ketegangan macam apa yang terjadi pada tahun 1950-an sehingga polarisasi menjadi sangat ekstrem?

Ada upaya mobilisasi setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 1955 akibat ketidakmenangan kaum nasionalis atau agamis Islam dalam pemilu. Sebelum pemilu, sebagian besar pengamat politik Indonesia menganggap pasti suatu koalisi Islam akan menang, walaupun koalisi itu terdiri dari kaum modernis dan tradisionalis, yaitu NU. Tapi, setelah ketidakmenangan kaum nasionalis ataupun kaum Islam, terus ada upaya dari partai-partai politik untuk terjun ke desa untuk menghindari *deadlock* pada tingkat nasional, tingkat elite. Upaya ini dilakukan lewat mobilisasi massa.

Pada awal mobilisasi itu, misalnya di Malang dan Kediri, PKI mempunyai beberapa "keuntungan": ekonomi sebenarnya sangat

begitu merosot, yang mengakibatkan banyak orang desa atau orang biasa mengalami krisis ekonomi. Nah, akibat itu, imbauan PKI sebetulnya mencapai sasaran. Banyak orang dengan krisis ekonomi dan krisis politik seperti itu lari ke PKI. Tapi dari segi yang lain, keuntungan itu suatu pura-pura. Dalam arti, 88 persen pendukung PKI ada di Jawa dan Bali dan mereka sebenarnya banyak yang masih baru, banyak yang sebetulnya petani biasa dan tidak begitu tahu apa-apa.

Akibatnya, dukungan mereka terhadap PKI dibandingkan massa NU atau massa Islam pada umumnya jauh kalah kualitasnya. Saya kira salah satu kekeliruan atau salah tafsir dari segi taktik yang mewarnai strategi PKI pada dasawarsa 1950-an sampai awal 1960-an adalah mereka menyimpulkan mempunyai banyak pendukung, mereka jauh lebih besar, jauh lebih kuat daripada partai-partai yang lain. Mobilisasi NU, Muhammadiyah, dan Majelis Syuro Muslimin Indonesia tidak sebesar PKI, tapi mereka mempunyai massa di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa dan Bali. Dan massa yang mereka miliki fanatik.

Mengapa kemudian timbul pembantain terhadap orang-orang PKI di pedesaan pada periode tahun 1965-an?

Kekuatan PKI sebetulnya tidak sedalam yang mereka bayangkan. Dan, mobilisasi mereka dipandang tokoh-tokoh muslim sebagai suatu ancaman, tidak hanya terhadap partai, tapi juga bagi *way of life* mereka, suatu tata cara hidup, suatu kehidupan sosial Indonesia. Ancaman itu sebetulnya menjadi ancaman mutlak. Akibatnya, sebagian massa muslim waktu itu —sebenarnya tidak hanya muslim, misalnya juga umat Hindu Bali— menganggap PKI tidak hanya musuh politik, tapi suatu musuh mutlak yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Tapi, kalau masih menganggap ketegangan yang mewarnai ketegangan politik 1965-1966, pembantaian dan proses politik tidak sampai separah yang kita lihat.

Yang memperburuk politik pada saat itu adalah persepsi bahwa pada tingkat elite nasional ada suatu pelanggaran terhadap politik Indonesia, yakni munculnya kudeta 30 September 1965. Akibat itu ada suatu mobilisasi total, baik dari ABRI maupun sebagian massa melawan PKI.

Jadi, kemenangan PKI ketika itu karena tawaran programnya memang sesuai dengan yang dirasakan rakyat?

Sebetulnya, PKI dan kondisi politik pada waktu itu harus ditafsirkan dengan kaca mata yang sedikit berbeda dibanding kalau mengamati kondisi politik sekarang. PKI sendiri menjadi suatu fenomena kultural, fenomena kultur politik, ketika kegagalan sistem perlementer dan krisis politik menimbulkan suatu harapan di masa menjelang milenium. Menjadi suatu harapan untuk suatu perubahan sosial yang mutlak, total.

Harapan itu timbul tidak hanya di kalangan orang PKI, tapi juga di kalangan sebagian orang muslim. Mereka akan melihat atau akan mengalami suatu perubahan total. Kalau kita membaca *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1963 dan 1964, saya kira pada tahun-tahun itu sangat aneh karena diwarnai dengan harapan yang betul-betul revolusioner.

Biasanya, kita menganggap orang Muhammadiyah cukup waspada, sabar dan tidak cepat emosi. Padalah, kita melihat hampir semua aliran politik pada waktu itu dipengaruhi suatu harapan, suatu semangat atau selera zaman yang menganggap Indonesia akan masuk pada zaman yang betul-betul baru, suatu reformasi atau revolusi yang mutlak yang total.

Tidak hanya orang PKI yang punya sikap semacam itu, tapi ada di sebagian besar golongan politik. Nah, yang jadi susah, walaupun semua atau sebagian besar aliran punya harapan mitologis, jelas harapan itu tidak mungkin terwujud. Mengapa? Karena, visi di belakang harapan itu sangat berbeda antargolongan dan antarpartai. Jadi, katakanlah ada semacam krisis, suatu benturan peradaban atau benturan cita-cita politik yang sakral.

Kalau kita mau menarik kesimpulan umum —di luar masalah pembantaian, kekerasan, dan sebagainya— saya kira kita bisa mengamati tahun-tahun itu dari ilmu politik, sosiologi politik. Kita bisa lihat Indonesia mengalami suatu degradasi kerukunan dan keramahan politik.

Politik tidak hanya tergantung pada institusi-institusi formal, tapi sikap atau budaya yang umum pada masyarakat. Agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, kultur politik yang dimiliki masyarakat harus menunjukkan sikap yang ramah atau toleran terhadap perbedaan pendapat. Padahal, pada tahun itu, saya kira ada sakralisasi mutlak dari ideologi di hampir semua pihak, dengan akibat jalan keluar dari persaingan itu jadi agak sulit dibayangkan.

Apakah situasi politik sekarang juga mirip ketika itu, ketika

Muhammadiyah dan golongan Islam yang lain mengeluarkan fatwa-fatwa menjelang pemilu lalu.

Kalau kita mulai dengan contoh Muhammadiyah, yang lebih menonjol bagi saya belakangan ini adalah eksperimen Amien Rais. Saya kira eksperimen itu menunjukkan suatu sikap yang sangat sesuai dengan keramahan politik yang dibutuhkan untuk suatu demokrasi. Di lain pihak, di luar kelompok Amien Rais dan Partai Amanat Nasional (PAN), di Muhammadiyah pasti ada beberapa orang yang mencoba memakai agama sebagai komoditas politik.

Tapi, saya kira, sumbangan yang —sekali lagi kalau kita hanya mencontohkan Muhammadiyah— akan tahan lebih lama jelas bukan orang yang memakai agama Islam sebagai komoditas politik, tapi eksperimen Amien Rais. Nah, saya kira sama dengan di NU dan kepemimpinan Abdurrahman Wahid, jelas di kalangan NU ada sebagian yang cenderung juga memakai agama sebagai alat politik.

Tapi, saya kira, hasil pemilu ini, sebagian besar dari pemilih Indonesia baik yang muslim maupun nonmuslim menolak politik seperti itu. Dalam hal ini, saya menangkap, sebetulnya kultur politik Indonesia sekarang ini jauh berbeda dengan akhir 1950-an atau awal 1960-an, walaupun tetap ada beberapa orang yang cenderung memakai agama sebagai bendera eksklusif.

Apakah kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi bukti itu?

Saya tidak menganggap yang nomor satu dikalahkan dalam pemilu ini adalah partai Islam. Itu tergantung pada definisi yang kita pakai tentang partai Islam. Buat saya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PAN itu partai yang mayoritas muslim dan partai yang memperjuangkan cita-cita Islam. Jelas menjadi hak orang lain untuk menafsirkan keislaman mereka secara berbeda. Dan, mereka bisa menarik kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan, misalnya, tentang Abdurrahman Wahid atau Amien Rais.

Tapi, saya kira yang lebih menonjol dalam Pemilu ini bukan kekalahan partai-partai Islam, tapi kekalahan partai yang memakai bendera yang sempit, baik itu bendera etnis maupun bendera agamis. Termasuk juga, jangan lupa partai-partai Kristen dalam hal ini. Yang jauh.lebih menonjol dalam pemilu ini adalah tekanan tentang inklusivisme. Di Golkar sendiri, saya kira, aliran yang inklusif cukup besar, walaupun seperti kalangan yang lain ada beberapa orang yang

menolak kecenderungan itu.

Kalau PDI-P sendiri dari satu segi bisa dianggap lanjutan dari kaum sekuler nasionalis atau Pancasila nasionalis saya kira istilah *Pancasila nasionalis* itu lebih layak daripada *sekuler nasionalis*. Tapi, tetap ada perbedaan yang mendasar juga. Apa? Yaitu persepsi fatal sikap kaum Kristen, kaum abangan —kalau kita tetap mau memakai istilah itu— dan terutama kaum nasionalis di Indonesia terhadap agama dan agama Islam jauh berbeda dengan tahun 1950-an.

Kita harus ingat, sebagian besar dari orang nasionalis kiri pada dasawarsa 1950-an menolak agama, menolak ibadah agama. Sekarang, hal itu bukan masalah untuk sebagian orang nasionalis. Yang lebih pokok, ada harapan bahwa jangan sampai keimanan dibuat komoditas politik. Di satu pihak, kaum nasionalis mempunyai suatu sikap yang juga lebih inklusif, dalam arti sebagian besar dari mereka menganggap agama dan agama Islam itu bagian dari dirinya.

Padahal, kalau kita mau kembali ke dasawarsa 1950-an, gerakannya tidak hanya menolak negara Islam, tapi juga mau keluar dari Islam. Orang Muslim statistik mau keluar dari agama Islam. Ketegangan seperti itu yang saya kira hampir dikatakan tidak ada secara signifikan sekarang ini.

Jadi, kemenangan PDI-P sekarang ini tidak akan menimbulkan perubahan sosial, seperti waktu itu?

Kita belum sampai pada kesimpulan bahwa PDI-P betul-betul menang. Sebab, sekarang ini, politik nasional masih dalam tahap negosiasi. Tapi, jika PDI-P berhasil membentuk suatu koalisi reformis, ya saya tidak menganggap sama sekali bahwa Indonesia akan kembali ke peta polar, dikotomi, seperti yang kelihatan pada akhir 1950-an atau awal 1960-an. Tapi, saya kira suatu bahaya, baik untuk PDI-P maupun untuk NU, Muhammadiyah, dan golongan muslim: pasti akan ada upaya dari oknum-oknum tertentu untuk memakai. agama bagi kepentingan politik yang sempit

Bagaimana pandangan Anda tentang Megawati yang disebut-sebut pantas jadi presiden?

Saya sendiri tidak punya pendapat tentang itu. Saya tegaskan, masalah pencalonan presiden itu isu buat orang Indonesia. Tapi, sebagai orang luar yang mengamati politik Indonesia sekarang, saya kira kans Megawati masih cukup besar untuk jadi presiden. Orang Indonesia dan pengamat luar negeri semua menunggu tindakan dari

dia. Jadi 35 atau 36 persen dari pemilih belum merupakan kemenangan mudah, harus ada inisiatif dari Bu Megawati untuk membuat suatu koalisi yang inklusif. Saya kira, semakin koalisi itu inklusif semakin besar kans dia. Tapi, ya, ini namanya politik dan politik demokrat.

Ada yang bilang kemenangan PDI-P itu mutlak karena faktor Mega, baik sebagai anak Bung Karno maupun figur tertindas yang harus dibela. Bagaimana pendapat Anda?

Saya setuju dengan komentar-komentar banyak pengamat politik Indonesia, termasuk Umar Kayam yang kemarin dulu mengatakan: fenomena Megawati dipengaruhi simbolisme. Dia (Megawati) betul-betul jadi orang tertindas, tidak hanya tertindas dari satu golongan, tapi dari banyak orang macam-macam golongan. Saya sendiri bergaul dengan tokoh-tokoh Islam yang pada hari-hari terakhir pada pemilu secara diam-diam memilih Megawati, dengan alasan bahwa mereka mau mengirimkan pesan kepada mereka sendiri dan juga kepada rezim yang lama bahwa mereka harap ada suatu perubahan yang.besar. Kalau itu betul, saya kira tidak mengherankan.

Di mana-mana di dunia ini, politik berjalan atas simbolisme seperti itu. Dan motivasi seperti itu masih riil. Tapi kalau itu memang betul, berarti simbol itu masih harus diberikan isi. Jadi, program PDI-P dan koalisinya harus betul-betul diwujudkan. Dan mungkin ada, kalau kita mendengar suara-suara belakangan ini, setelah pemilu ada orang yang sedikit tanya, akhirnya apa isi program itu. Saya sendiri kalau mengamati situasi politik sekarang menganggap salah satu alasan yang menyebabkan isi itu masih belum jelas cukup sederhana, yaitu forum atau bentuk koalisi politik yang akan berkuasa juga belum jelas. Jadi, sekali lagi, banyak tergantung pada tindakan Megawati atau pesaingnya.

Koalisi mana saja yang paling ideal menurut Anda?

Wah, saya tidak berhak untuk memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh politik Indonesia. Tapi, kalau saya secara netral mencoba mengamati, kalau Megawati tidak mendirikan suatu koalisi yang inklusif, sekali lagi, itu akan berdampak. Buat saya, itu pesan utama pemilu ini, harapan masyarakat Indonesia untuk suatu kewarganegaraannya yang betul-betul inklusif. Jadi, kalau Ibu Megawati tidak mendirikan suatu koalisi yang betul-betul inklusif, ada kemungkinan pesaingnya akan mencoba mendirikan suatu koalisi alternatif.

Saya kira, walaupun kans Megawati masih besar sekali, ada kemungkinan juga negosiasi yang berjalan di MPR akan menimbulkan kemungkinan lain.

Apakah langkah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selama ini bisa dikatakan jadi saingan Megawati, nanti?

Saya kira banyak orang menganggap Gus Dur untuk sementara menjadi pesaing Megawati.Tapi, saya kira kesimpulan itu terlalu ekstrem. Yang saya lihat, Gus Dur meyakini Bu Megawati belum mempunyai suara cukup untuk membentuk suatu koalisi yang stabil. Jadi, dia lewat tindakannya mencoba mengingatkan Bu Megawati bahwa dia harus betul-betul mulai bertindak.

Nah, jelas dalam kunjungannya, yaitu Gus Dur dan tokoh-tokoh yang lain muncul pembicaraan tentang segala macam kemungkinan. Karena namanya politik, semua harus dibicarakan. Tapi, kalau saya membaca tindakan Gus Dur umumnya, saya kira dia masih menganggap tugas yang paling pokok buat dia adalah membentuk koalisi yang inklusif itu.

Meski Gus Dur mengatakan masih mendukung Mega, dia juga bilang kalangan ulama NU belum sepakat soal perempuan menjadi presiden. Bagaimana pendapat Anda?

Saya kita itu benar bahwa ada cukup banyak, walaupun saya kira bukan mayoritas, kiai NU yang agak keberatan dengan kepemimpinan perempuan. Dari satu segi, Gus Dur harus bertindak sebagai tokoh nasional, tapi di pihak lain harus juga mewakili aspirasi organisasinya. Dalam hal ini saya menganggap Gus Dur mau mengingatkan, tidak hanya Bu Megawati, tapi para pejuang PDI-P, bahwa mereka harus mengakui, menghadapi, dan akhirnya harus berjuang atau berusaha agar oposisi bisa dikurangi. Jadi, jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang tidak harus diperhatikan. Nah, itulah yang saya dengar dalam pernyataan Gus Dur.

Bisa dijelaskan penelitian Anda tentang Islamisasi Jawa di Jawa Timur?

Pada waktu itu, saya menggambarkan perubahan sosial di pedesaan Pasuruan dan Malang. Di sana, akibat pembentukan Orde Baru terjadi perubahan yang cukup mendasar pada tingkat publik. Yang dulu dijalankan sebagai tradisi abangan, sebagian besar mengalami krisis, malah krisis yang.besar sekali. Kalau dulu ada bersih desa dan

sebagainya, sekarang pada dasawarsa 1980-an tidak dijalankan lagi.

Jadi, ada suatu erosi tradisi Jawa abangan dan di lain pihak ada suatu kebangkitan agama Islam, tidak hanya di tingkat kelas menengah dan nasional, tapi juga di desa. Saya masih tetap menganggap proses yang mirip itu terjadi di sebagian besar Jawa. Riset saya belakangan ini di Yogyakarta menunjukkan, di Yogya pun kebangkitan agama Islam sebagai agama yang paling berperan di tingkat publik itu cukup menonjol.

Dari satu segi juga, itu merupakan keberakhiran dari ketegangan pada dasawarsa l995-an, yaitu dengan berubahnya era politisasi agama dengan pengurangan pemakaian simbol-simbol agama sebagai alat politik. Ada suatu kesempatan untuk orang yang dulu menolak agama Islam.karena mereka menganggap itu musuh partai lain. Untuk meninjau kembali keimanan mereka cukup dari mereka menganggap sebetulnya agama Islam itu bagian dari "saya".

Tapi, di lain pihak, jangan sampai tesis saya itu direduksikan jadi terlalu sederhana. Saya tidak menganggap dan sejak dulu memang tidak menganggap depolitisasi agama yang terjadi pada zaman Orde Baru dan kebangkitan Islam berarti partai Islam dan Islam sebagai filsafat politik atau bendera politik akan semakin kelihatan. Malah, dalam artikel itu dan artikel satunya lagi, menurut saya, kemungkinan besar sebagian dari santri baru itu sebetulnya tidak mau kalau keimanan mereka dipolitisasi.

Kembali ke diskuisi kita tentang pemilu, saya sempat omong dengan beberapa kawan saya yang abangan dan sekarang cukup saleh dan menjadi santri baru. Mereka tetap menganggap sebetulnya cita-cita Islam paling pokok adalah kebenaran dan keadilan. Itu tidak berarti bentuk negara atau filsafat politik yang betul-betul Islam itu cuma satu. Jadi, saya kira, dampak politik dari kebangkitan Islam yang saya gambarkan dari akhir 1970-an dan 1980-an tidak seperti dibayangkan beberapa pengamat politik, yang cenderung menarik kesimpulan bahwa kalau abangan berubah langsung diterjemahkan ke dalam suatu kemenangan untuk politik Islam. Politik Islam sekarang jauh lebih majemuk, jauh lebih pluralis, dan jauh lebih demokrat daripada dasawarsa 1950-an.

Kapan perubahan itu mulai tampak?

Paling menonjol pada akhir l970-an, akibat dari pendidikan agama pada tingkat nasional, juga akibat perubahan sosial pada tingkat

pedesaan. Memang sebagian besar tradisi abangan sebetulnya merupakan tradisi masyarakat lokal. Jadi roh leluhur, cikal-bakal, diingatkan untuk dihormati, dihargai. Itu sebetulnya kalau kita membandingkan Jawa dengan Jepang. Itu bisa dilestarikan saja.

Tapi, untuk sebagian orang abangan, anak dari generasi baru, mereka menarik kesimpulan bahwa mereka sekarang bagian dari dunia besar. Dan mereka mencari keimanan, mereka mencari diskursus agama yang bagi mereka lebih sesuai tuntutan zaman pada satu dunia yang tidak hanya berdasar pada tingkat lokal, roh leluhur, dan sebagainya, tapi pada suatu tindakan yang lebih transenden.

Di era Orde Baru ada masa ketika IsIam dijauhi penguasa dan ada masa ketika Islam didekati penguasa. Bagamaina Anda melihat hal ini?

Saya sendiri pernah memakai istilah Islam pembangunan untuk diskursus islamis yang dikembangkan Orde Baru, ketika sebagian fokus agama yang dikembangkan adalah fokus yang menyangkut pembangunan. Bahkan, tidak hanya pembangunan, tapi depolitisasi aliran Islam. Kembali ke pembicaraan tadi, saya masih menganggap politik Islam jauh lebih majemuk sekarang dibanding dulu. Salah satu alasan untuk itu bukan karena orang menerima Islam versi Orde Baru, tapi karena mereka menganggap terjadi dehierarki nilai dalam agama Islam. Dan di dalamnya, pendirian negara Islam dan sebagainya mungkin tidak menonjol seperti yang dibayangkan tokoh-tokoh partai Islam pada dasawarsa 1950-an.

Akhirnya, dalam keislaman mereka, keimanan mereka, orang yang saya gambarkan tadi, yaitu santri baru, menjalankan satu keimanan yang cukup independen, yang akhirnya terwujud sesuai dengan cita-cita mereka sendiri, tidak menurut program yang diperintahkan tokoh-tokoh Orde Baru. Saya harus tegaskan juga, di umat Hindu dan di kalangan Kristen dan Katolik, sikap yang sama cukup menonjol, yaitu walapun selama 32 tahun ada upaya untuk mengontrol, bahkan mengotak-ngotakan agama dalam suatu bentuk yang sesuai dengan kepentingan rezim, itu umumnya ditolak. Jadi, kebangkitan Islam dan kebangkitan agamis yang kelihatan di Indonesia pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an akhirnya membuahkan suatu situasi politik yang berbeda dengan dasawarsa 1950-an dan berbeda juga dengan apa yang diharapkan rezim Soeharto.

Apakah itu juga bisa menjelaskan bahwa pemilih multipartai

sekarang tidak menghasilkan polarisasi?

Ya, saya kira begitu. Jadi, saya kira ada perubahan mendasar, kembali sekali lagi ke NU, Muhammadiyah, PAN, dan PKB. Di PDI-P juga, jangan lupa, masih banyak orang muslim. Juga di Golkar, yang saya kira massa Golkar tidak begitu senang dengan politisasi agama. Jadi, pesan umum dalam pemilu ini dan era pasca-pemilu sekarang adalah, "jangan sampai agama yang tercinta ini direduksikan dalam kepentingan komoditas politik".

Kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia sekarang ini sudah mencapai tahap panas atau masih biasa-biasa saja?

Saya untuk sementara termasuk orang yang optimistis. Hasil pemilu sangat bagus dan pesan yang dikirimkan golongan terbesar dalam pemilu, tidak hanya yang dari PDI-P tapi juga dari sebagian besar partai-partai, adalah suatu pesan kondisi politik yang terbuka, transparan, reformis, dan terutama inklusif. Jadi, itu sebagai landasan bagi suatu demokrasi yang baru. Saya kira merupakan suatu kondisi yang sangat sehat. Saya untuk sementara mengakui, ada orang yang mau memanaskan situasi politik, tapi mereka termasuk golongan yang kecil. Dan tawar-menawar yang kita lihat sebetulnya layak menurut konstitusi yang masih berjalan tidak hanya boleh, tapi bahkan perlu.□

Bab III

Kekalahan Partai Islam

Mengevaluasi Parpol Islam Pascapemilu

Oleh **Farid Wadjdi**

PEMILU 1999 baru saja usai. Dan kini hasil pemilu "transisi" yang diikuti 48 partai politik (parpol) itu terus dihitung. Melihat hasil-hasil perolehan sementara sampai hari ini tampaknya peluang menang bagi parpol berasas Islam sangat diragukan atau bisa jadi sangat tipis. Hasil *polling* di berbagai media massa sebelumnya juga menunjukkan partai-partai yang *notabene* sekuler-lah tampaknya akan menang. Prediksi kekalahan partai Islam ini bisa dilihat dari banyaknya pendukung partai-partai sekuler pada masa kampanye. Mungkin indikator ini —sebagaimana juga *polling*— masih banyak diragukan oleh banyak pihak.

Kakalahan parpol Islam dalam pemilu kali ini bisa dilihat dari minimnya pemahaman masyarakat tentang parpol Islam itu sendiri. Sebagai perbandingan, dalam Pemilu 1955 saja PNI yang dikenal sebagai partai berbasis sekuler muncul sebagai pemenang. Padahal saat itu umat sangat terdidik secara ideologis dengan nilai-nilai Islam. Dan mereka juga sangat terbiasa dengan pertentangan ideologi antara Islam dan sekuler. Pembinaan keislaman di tengah masyarakat juga sangat bersifat ideologis dan politik.

Sebaliknya dalam kondisi sekarang, pehamanan umat akan politik Islam sangatlah dangkal. Akibat rekayasa Orde Lama dan Orde Baru, secara ideologi dan politik, umat terjauhkan dari pemahaman Islam. Pembinaan keislamanan terjerumus pada pembinaan yang sifatnya individual, akhlak, ibadah ritual. Jadi diduga umat tidak akan banyak terlalu memperhatikan faktor agama dalam politik. Tidak terlalu peduli apakah parpol itu berideologi Islam atau sekuler, ma-

syarakat Indonesia yang mayoritas Islam bisa jadi malah mendukung habis-habisan partai sekuler tersebut. Siap mati untuk sekulerisme.

Pelajaran dari kekalahan

Melihat kekalahan partai Islam dalam pemilu kali ini seharusnya mendorong partai-partai Islam untuk mengkaji ulang konsep maupun langkah-langkah yang selama ini telah dilakukan. Ada banyak faktor yang sebenarnya membuat partai Islam mengalami kekalahan.

Antara lain, *pertama*, masyarakat kita belum memiliki pemahaman yang mendorong mereka untuk memilih partai Islam. Artinya masyarakat kita belum memiliki kesadaran politik Islam yang tinggi. Hal ini sangat wajar terjadi karena secara sistematis umat mengalami proses sekularisasi (pemisahan agama dari kehidupan). Islam selama ini digambarkan hanya sebagai agama ritual yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Pemikiran Islam yang berkembang di tengah masyarakat cenderung hanya seputar ibadah dan akhlak (moral).

Umat belum terbina akan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang ideologis, dalam pengertian bahwa Islam adalah agama yang memecahkan segenap persoalan kehidupan manusia secara menyeluruh. Islam adalah agama yang mengatur mulai masalah individu sampai politik, ekonomi, pendidikan, dan persoalan kemasyarakatan lainnya. Sebagai agama yang ideologis, Islam akan sangat berbeda dengan sistem ideologi lain seperti Kapitalisme dan Sosialisme.

Kedua, kondisi ini diperparah dengan dominannya sistem ideologi asing di tengah umat. Serbuan ideologi asing —terutama dari Barat— ini secara bulat-bulat diadopsi oleh umat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Umat tanpa sikap kritis menerima konsep-konsep kapitalisme seperti sekulerisme, pluralisme, demokrasi, HAM, nasionalisme, liberalisme dan globalisasi. Adopsi pemikiran-pemikiran kapitalisme ini pada gilirannya menjauhkan umat dari akidah dan hukum-hukum Islam. Umat akhirnya tidak melihat tawaran-tawaran ideologis yang ditawarkan parpol Islam sebagai hal penting bagi mereka.

Kedua faktor di atas, sebaliknya membuat umat malah seolah "alergi" terhadap konsep-konsep ideologis Islam. Bukankah kita me-

lihat bahwa orang Islam sendiri —bahkan para intelektual Islam dan ulama— yang menolak partai yang berasas Islam? Mereka malah "menuduh" asas Islam sebagai sesuatu yang tak pantas, menakutkan, fundamentalis, mengkotak-kotakkan, dan tuduhan-tuduhan keji lainnya. Bukankah kita melihat orang Islam sendiri yang "alergi" terhadap hukum-hukum Islam? Menganggapnya kejam, sektarian, tidak sesuai dengan perikemanusiaan, ketinggalan zaman, dan sederet celaan yang keji lainnya. Wajar kalau kemudian, bagi sebagian umat Islam parpol Islam malah menakutkan buat mereka.

Kelemahan internal parpol Islam

Faktor ketiga adalah dari sisi parpol Islam itu sendiri. Berdirinya parpol yang mengatasnamakan Islam, nantinya akan tetap gagal untuk melayani umat kalau tidak memperbaiki empat perkara yang sering menimpa parpol Islam.

Dalam kitab *at Takattul al Hizbi*, Syekh Taqiyuddin merangkum beberapa kelemahan dari partai-partai politik Islam secara internal. *Pertama*, parpol Islam (yang berdiri secara terburu-buru itu) berdiri dengan membawa konsep pemikiran (*fikrah*) umum tanpa batasan yang jelas. Sehingga pemikiran mereka menjadi kurang serius, samar, kabur, dan tidak jelas. Dalam hal ini seharusnya parpol Islam dibangun atas basis ide (*fikrah* atau pemikiran) yang benar-benar dipersiapkan. Karena politik adalah mengurus umat, sebuah parpol Islam seharusnya membuat konsep matang untuk mengurus umat, dan memecahkan persoalan-persoalan umat secara menyeluruh.

Pertanyaan-pertanyaan seperti apa bangunan masyarakat Islam itu, bentuk pemerintahannya, bagaimana pengaturan Islam dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, seharusnya dijawab dan dipersiapkan dengan serius. Sehingga parpol Islam memang kelihatan datang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat secara Islam. Bukan hanya mendudukkan orang-orang Islam di kekuasaan.

Kedua, banyak parpol Islam tidak mengenal metode (*thoriqoh*) untuk menerapkan ide-ide Islam (*fikrah*). Sebagai contoh, bagaimana seharusnya jalan yang ditempuh sehingga seluruh interaksi masyarakat bisa diatur berdasarkan Islam. Juga bagaimana untuk mewujudkan tujuan dari parpol Islam tersebut. Jelas, masalah ini harus terpecahkan.

Dengan demikian parpol Islam memiliki agenda langkah yang je-

las untuk menyelesaikan persoalan umat. Kalau tidak, umat akan menilai adanya parpol Islam tidak berarti bagi mereka dan upaya yang sia-sia. Lebih memprihatinkan lagi kalau parpol Islam itu akhirnya berjalan di tempat atau terjebak pada persoalan-persoalan kecil dan bukan utama.

Ketiga, banyak parpol Islam hanya bertumpu pada orang-orang yang sepenuhnya belum mempunyai kesadaran yang benar, niat yang lurus. Sebagian besar hanya mengandalkan semangat. Dan yang *keempat*, parpol Islam tersebut tidak memiliki ikatan yang benar. Hanya terikat oleh aturan administrasi, keorganisasian, simbol-simbol atau slogan-slogan organisasi. Atau ikatan antar anggotannya diikuti figuritas orang-orang tertentu. Anggotanya tidak memiliki pemikiran dan persepsi yang sama. Akibatnya pertentangan internal dalam parpol seperti ini mudah terjadi. Parpol Islam seperti ini akhirnya sibuk membenahi diri mereka sendiri.

Untuk menjadi parpol yang kuat, mandiri, dan mengakar, parpol Islam nantinya harus menghilangkan keempat faktor yang berbahaya tersebut. Artinya, parpol Islam harus benar-benar berlandaskan pada *fikrah* Islam berikut aturannya. Tanpa ini, parpol Islam hanyalah merupakan kekuatan yang mengambang (*floating mass*), tidak memiliki kesadaran yang penuh atau tahan uji akan berbagai cobaan. Adalah sangat berbahaya kalau parpol Islam beranggotakan orang-orang yang tidak memiliki kesadaran Islam yang penuh. Akan mudah dihasut, dijadikan alat atau legitimasi kepentingan kelompok tertentu, terpecah atau melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan Islam.

Parpol Islam juga harus bekerja untuk kepentingan ideologi Islam, yang bermuara pada pemeliharaan urusan-urusan rakyat. Pendirian parpol itu tidak hanya dilandasi oleh semangat, atau peluang politik yang muncul, namun harus benar-benar dipersiapkan.

Penyadaran umat

Sebagai sebuah partai, parpol Islam haruslah lebih dahulu menentukan target apa yang dilakukan untuk memperbaiki masyarakat. Untuk menentukan target paling tidak ada dua perkara yang harus diketahuinya: (1) persoalan utama umat; (2) bagaimana memecahkan persoalan utama umat tersebut.

Dalam konteks pertama, jelas bahwa persoalan utama umat Islam sekarang ini adalah tidak diterapkannya aturan Islam secara total di

tengah-tengah masyarakat. Inilah pangkal kehancuran umat Islam. Dalam konteks kedua, target parpol Islam haruslah mengarahkan untuk memecahkan persoalan ini. Untuk itu target (tujuan) parpol Islam adalah bagaimana agar bisa melanjutkan kehidupan Islam ini secara total (*ist'naful hayatil Islamiyah*). Untuk bisa mencapai tujuan tadi sebagai *thoriqoh* (langkah operasionalnya) adalah dengan mendirikan daulah Khilafah Islam.

Untuk itu secara internal, parpol Islam harus melakukan pembinaan kembali terhadap kader-kadernya. Telah terbukti selama ini, banyak kader partai yang justru tidak tahu apa yang sedang diperjuangkan partainya. Antaranggota partai pun terjadi konflik internal akibat tidak adanya persamaan ide. Akan lebih parah lagi kalau kader parpol tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk masyarakat.

Tujuan pembinaan dan pengkaderan ini adalah untuk membentuk kader-kader inti parpol dengan membentuk *syakhsiyah Islamiyah*-nya. Yakni terbentuknya *aqliyah* dan *nafsiyah* yang berdasarkan Islam. Kader parpol Islam ini haruslah dibina dengan *tsaqofah-hizbiyah* (pemikiran-pemikiran kepartaian) yang sama, karena kesamaan pemikiran itulah yang nantinya akan mengikat mereka secara langgeng. Kesamaan pemikiran para kader partai ini nantinya akan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan partai.

Berikutnya adalah fase yang sangat penting, yakni interaksi di tengah-tengah masyarakat dan melakukan pergolakaan pemikiran. Tujuannya adalah untuk mengubah opini di tengah masyarakat dan kemudian mendapat kekuasaan yang diperoleh dari elit penguasa di bawah dukungan masyarakat.

Pada fase ini, hal yang harus dilakukan parpol Islam adalah mengubah pemahaman masyarakat, sehingga mendukung dan searah dengan pemahaman dan tujuan dari parpol Islam. Untuk itu masyarakat harus disadarkan terutama tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap Islam, umat harus menerapkan aturan-aturan Islam secara menyeluruh dalam segenap kehidupan mereka. Dorongan keimanan inilah yang pertama kali harus dibangkitkan di tengah masyarakat agar mereka menuntut penerapan Islam (aqidah dan syari'ah) dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Harus juga disadarkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur dan memecahkan segenap persoalan kehidupan mereka mulai dari pribadi, ekonomi, politik, pendidikan, dan aspek-aspek kemasyarakatan lainnya. Kelalaian dari penerapan Islam secara menyelu-

ruh menjadi pangkal kehancuran umat dan jelas merupakan dosa bagi umat.

Di samping itu harus dibentuk opini dan kesadaran untuk menolak setiap pemikiran-pemikiran rusak yang bertentangan dengan ideologi Islam seperti sekularisme, demokrasi, pluralisme, dan ide-ide yang menyesatkan lainnya. Bersamaan dengan itu Islam harus dijadikan sebagai pengganti yang konkret dari sistem-sistem yang rusak tersebut.

Perubahan pemikiran masyarakat dan penolakannya terhadap setiap sistem yang bertentangan dengan Islam inilah sebagai kunci utama penerimaan ide-ide parpol Islam yang ideologis oleh masyarakat. Pada gilirannya nanti mereka akan mendukung penuh parpol yang memang benar-benar memperjuangkan Islam. Bahkan mereka menuntut terhadap penguasa yang ada untuk menerapkan aturan-aturan Islam dalam segenap kehidupan mereka.

Jadi inilah salah satu tugas paling pokok dari parpol Islam: Yakni penyadaran umat akan pemikiran Islam yang sesungguhnya. Tanpa ini, pastilah umat akan meninggalkan parpol Islam, bahkan bisa putus asa. Bisa-bisa malah alergi dan membenci parpol Islam.□

Kalah-Menang bagi Parpol Islam

Tanggapan atas Tulisan Farid Wadjdi

Oleh **Efa Ainul Falah**

PENGHITUNGAN jumlah suara terus berlangsung. Perolehan suara sementara menunjukkan bahwa parpol yang masuk dalam *the big five* berhasil mengumpulkan jumlah suara cukup berarti. *The big five* terus melaju jauh meninggalkan 43 parpol lainnya. Meski perolehan suara baru sementara, lima besar itu bisa dipastikan akan tetap ditempati oleh PDI Perjuangan, PKB, Partai Golkar, PPP dan PAN. Kalaupun terjadi perubahan, paling sekadar berganti posisi di antara kelima parpol tersebut. Dari 12 parpol Islam, hanya PPP yang masuk dalam lima besar. Itu pun masih terkalahkan oleh PDI Perjuangan, PKB dan Golkar, sementara 11 parpol Islam lainnya jauh tertinggal di belakang. Bahkan untuk memperoleh jumlah suara yang dapat memenuhi kuota dua persen dari jumlah kursi di DPR saja, mereka masih harus terus menunggu.

Fenomena keterpurukan —sebut saja demikian— parpol-parpol Islam pada Pemilu 7 Juni 1999 memang patut dievaluasi. Demikian, Farid Wadjdi menyoroti hal ini dalam kolomnya, "Mengevaluasi Parpol Islam Pasca-Pemilu", (*Republika*, Kamis 10 Juni 1999). Ia menilai kekalahan parpol Islam selain kelemahan internal parpol Islam itu sendiri —seperti kematangan konsep pemikiran partai (*fikrah*), metode untuk menerapkan pemikiran (*thoriqoh*), niat yang tulus dan ikatannya— juga karena faktor dominasi ideologi asing dan faktor konstituen yang minim pemahamannya tentang partai politik Islam.

Ironis memang, parpol Islam harus menerima kekalahan ditengah 116 juta pemilih yang mayoritas umat Islam. Tentu saja kekecewaan banyak kalangan muncul terlebih jika kemudian ternyata partai yang

tidak berbasis massa Islam dapat menyedot suara Islam. Kekecewaan ini secara implisit terungkap pula dalam tulisan Saudara Farid Wadjdi yang terungkap dengan perkataan "siap mati untuk sekulerisme".

Evaluasi kekalahan parpol Islam, hemat saya, lebih penting ditinjau dari segi sosio-politik ketimbang dari segi sosio-religius yang bersifat ideologis. Tinjauan sosio-politik akan mengungkap variabel secara lebih jelas mengenai hubungan relasional antara keberadaan partai dengan kemenangan atau kekalahannya tanpa mempertanyakan eksistensi partai itu sendiri sebagai partai Islam. Sebaliknya tinjuan sosio-religius hanya akan terjebak kepada simplikasi persoalan yang seolah-olah faktor keagamaan yang harus dipertanyakan — baik *performance* partai atau kualitas religius pemilih. Tinjauan yang terakhir ini hanya kembali berkutat pada perdebatan antara "Islam kultural" dan "Islam formal". Lebih jauh dari itu, pendekatan sosio-religius justru akan memperkuat asumsi bahwa "Islam struktural" atau "Islam formal" tidak lagi relevan untuk konteks Indonesia.

Terlepas dari perbedaan "Islam struktural" dan "Islam kultural", kehadiran parpol Islam secara praktis memang dibutuhkan. Parpol Islam dibutuhkan bukan sekadar untuk menjamin adanya keterwakilan aspirasi umat, tetapi jauh dari itu untuk mewarnai konstelasi politik nasional dengan nuansa religius. Dengan munculnya parpol Islam dimensi moral agama dalam percaturan politik termasuk produk kebijaksanaannya tidak diabaikan seperti sering terjadi pada masa sebelumnya. Hal ini tidak cukup jika hanya direpresentasikan lewat individu-individu Muslim yang bertebaran di partai lain. Tentu saja yang dibutuhkan bukan sekadar parpol Islam, tetapi parpol Islam yang *genuine*.

Kini kehadiran parpol Islam dihadapkan pada kenyataan pahit setelah melihat penghitungan jumlah suara. Parpol Islam yang semula diharapkan dapat mendulang jumlah suara umat Islam ternyata tidak terwujud. Bahkan kalaupun jumlah suara parpol-parpol Islam digabungkan melalui *stembus accoord* yang pernah disepakati, masih belum cukup menempati peringkat teratas. Pertanyaan yang muncul sekarang jelas: Kenapa parpol Islam tidak banyak dipilih alias terpuruk? Apakah masyarakat "alergi" dengan parpol Islam, ataukah parpol Islam lemah dalam menarik dukungan, ataukah pula ada faktor lain yang menyebabkan demikian?

Untuk menjelaskan hal ini memang diperlukan pengkajian ulang

—baik menyangkut partai itu sendiri maupun konstituen. Mengevaluasi partai berarti menyoroti strategi politik partai yang ditempuh, sedangkan mengevaluasi konstituen berarti menyoroti psikopolitik mereka.

Analisa politik terhadap keterpurukan parpol Islam melibatkan variabel cukup banyak, baik primer maupun sekunder, baik menyangkut partai itu sendiri maupun konstituen. Variabel ini ada yang bersifat umum, yang tidak hanya berkaitan dengan parpol Islam tetapi juga parpol lainnya, dan ada pula yang bersifat khusus. Variabel yang disebut terakhir ini sarat dengan perdebatan teologis, tergantung dari kacamata mana yang kita pakai. Paparan Farid Wadjdi merupakan salah satu sudut pandang dan tentu saja mengartikan versinya.

Di antara variabel penting yang bersifat umum adalah *pertama*, kesiapan partai peserta pemilu sangat minim, terutama partai baru yang sama sekali belum mempunyai basis massa. Fakta politik menunjukkan dari 48 partai, ada partai yang betul-betul siap berlaga di kancah politik, ada yang setengah-tengah, dan ada pula yang tidak siap. Partai yang mengalami kekalahan terutama yang memperoleh jumlah suara sedikit harus diakui tidak siap tampil mengikuti pemilu secara *all out*. Hal-hal yang menjadi prasyarat partai tidak dimiliki dengan baik, mulai dari sarana dan prasarana hingga sumberdaya manusia.

Banyak partai tampil apa adanya bahkan ada kesan dibuat-buat hanya untuk menghindari rasa malu di depan publik. Padahal seperti diketahui, partai ibarat suatu toko yang menyediakan barang dagangan untuk dibeli pembelinya. Jika toko tersebut tidak bisa berpenampilan yang dapat menarik pembeli, maka jangan harap dagangannya akan dibeli. Lagi-lagi berbicara tentang kesiapan partai, kita harus kembali kepada pertimbangan soal waktu. Mengenai hal ini, partai Islam mengalami dilema yang sama.

Kedua, common issue yang terus beredar dan menguat di tengah masyarakat adalah isu keterpasungan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan *nation state*. Masyarakat yang selama ini hak-haknya terabaikan, jadi sadar bahwa mereka hanya dijadikan alat legitimasi politik untuk melanggengkan kekuasaan elit tertentu. *Common issue* kemudian dengan sendirinya melahirkan *common enemy* bagi masyarakat. *Common enemy* ini tiada lain adalah mereka yang selama ini telah menebar janji dan membayarnya dengan kebohongan belaka,

yakni kelompok elit yang tergabung dalam rezim Orde Baru.

Pada kesempatan pemilu kali ini sebagian besar masyarakat —termasuk di dalamnya umat Islam— ingin mengekspresikan perlawanannya terhadap musuh bersamanya. Konsekuensi logisnya masyarakat tidak ingin mempertaruhkan pilihannya kepada partai yang dianggap belum jelas, karena khawatir ikut mendukung kembali Orde Baru. Demikian psikopolitik yang ada di masyarakat dan hasil pemilu kali ini adalah salah satu cerminannya. Di sini parpol Islam kurang mempunyai tempat. Parpol Islam bahkan disinyalir akan menjadi penyangga munculnya kekuatan neo-Orde Baru.

Common issue jelas menguntungkan partai yang jauh sebelumnya telah berada pada posisi kontra atau bahkan sama-sama bernasib terpasung. Akibat *common issue* itu masyarakat lantas memberikan pilihannya kepada partai yang posisi atau nasibnya sama. Mereka bukan hanya simpati, bahkan ada yang mendukung habis-habisan, kepada partai tersebut; karena dengan mendukung berarti ikut berjuang melawan musuh bersama. Isu bersama ini sama sekali tidak bersinggungan dengan *platfrom* atau ideologi partai. *Platfrom* yang disebut-sebut harus dikedepankan supaya diketahui dan didukung massa ternyata jauh terkalahkan pengaruhnya dengan isu bersama.

Demikian pula ideologi, bukan karena tidak dijadikan landasan partai atau tidak dipahami masyarakat, tapi ideologi kini bukan lagi *trade mark* partai. *Platfrom* bisa dijual hanya untuk kalangan tertentu yang berpandangan idealis —seperti intelektual dan kaum terpelajar— sedangkan ideologi untuk kalangan yang berpaham keharusan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama. Kenyataannya, *silent majority* yang cukup signifikan menentukan kemenangan tidak termasuk dua kategori itu.

Ketiga, budaya politik masyarakat masih mencerminkan kuatnya feodalisme. Pilihan masyarakat, terutama *silent majority* didasarkan pada figuritas seorang tokoh kharismatik, bukan pada pertimbangan rasional. Terbukti partai yang menempati posisi lima besar adalah partai yang pimpinan atau calon presidennya merupakan figur populer di masyarakat. Apalagi kini telah terjadi pergeseran pandangan masyarakat terhadap kefiguran dari figur keagamaan atau sosial kemasyarakatan kepada figur politik.

Jadi parpol Islam justru tidak mempunyai ikatan figuritas; dan ikatan itu untuk saat sekarang merupakan komoditas tersendiri untuk menarik dukungan. Figur-figur Islam yang cukup kuat dan telah

lama menjadi tokoh sentral tidak berada di parpol Islam atau malah berada di luar parpol sama sekali.

Ketiadaan figur sentral dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat, sebab selama ini mereka masih menganggap figur sebagai wakil atau malah pemimpin —baik ekstra-institusional maupun intra-institusional. Figur bisa jadi satu-satunya orang yang dipercaya sebagai pembela kepentingan dan penyalur aspirasi mereka. Figur ini sekaligus juga menjadi simpul kelompok tertentu yang dapat mengikat kuat anggotanya.

Sebut saja Megawati sebagai figur dan simpul dari Nasionalis-Sukarnois dan masyarakat kecil atau tertindas (bukan institusi), Gus Dur figur dan simpul dari NU, Amien Rais figur dan simpul dari Muhammadiyah. Sedangkan Akbar Tanjung dan Hamzah Haz merupakan figur politk lama bagi pendukung partainya masing-masing. Mereka selalu dielu-elukan, bahkan dikerumuni, ketika bertemu pendukungnya masing-masing.

Selain ketiga variabel di atas, menyertai pula variabel lainnya termasuk di antaranya *money politics*. Ada pun variabel khusus yang menentukan perolehan suara parpol Islam antara lain:

Pertama, pendirian partai tidak memperhatikan pola strategi politik. Kebanyakan parpol Islam dibuat asal jadi dan tidak memikirkan peluang politik yang bisa dicapai. Aktivis parpol bukannya bersatu merumuskan partai yang kuat, malah berlomba mendirikan parpol sendiri-sendiri; sementara strategi politik pendirian partai tidak dipertimbangkan matang-matang. Bahkan dapat dibaca bahwa tujuan mereka itu adalah politik itu sendiri. Dengan bahasa lain seperti Laswell dengan ungkapan *how to get power, where, and when*, atau lebih spesifik lagi disingkat materi dan bukan kepentingan lebih luas. Padahal kalau strategi politik dipakai, parpol Islam mestinya jangan sampai berjumlah duabelas, agar peluang terbuka lebih lebar.

Kedua, kehadiran parpol Islam tidak mendapatkan momentum yang baik dan bahkan sebaliknya. Kondisi sosial masyarakat kini tengah mengalami semacam disharmonisasi antara satu kelompok dengan kelompok lain, termasuk antara kelompok agama. Perbedaan dan pertentangan yang semula sudah relatif mencair kini mengalami ketegangan kembali karena konon keharmonisan yang terjadi bersifat semu. Ini ditandai oleh banyak peristiwa seperti Ketapang, Kupang, Ambon dan Sambas, ditambah dengan isu santer disintegrasi bangsa. Kontan saja kondisi seperti ini berakibat adanya kekhawatir-

an yang bukan hanya dari non-Muslim tetapi dari umat Islam sendiri yang dapat menyadarinya. Kekhawatiran ini sifatnya wajar dan bukan sebagai ketidakmengertian atau pun "alergi".

Kehadiran partai Islam dengan sejumlah jargon keagamaan dan simbol-simbolnya bisa saja diyakini masyarakat dapat mempertajam persoalan dan menimbulkan konflik baik tertutup maupun terbuka. Para tokoh masyarakat —termasuk tokoh agama— sendiri kerap menyeru masyarakat agar jangan terpancing oleh isu SARA yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, perdamaian, dan persatuan. Karena itu, masyarakat belum tertarik dengan kehadiran suatu parpol; apakah membawa label tertentu yang sesuai dengan agamanya atau tidak. Meski para pimpinan parpol telah menegaskan bahwa Islam bersifat universal dan kalau parpol Islam menang tidak akan merugikan kelompok lain, tetapi kondisi yang ada sekarang tidak mendukung penegasan tersebut. Untuk saat sekarang sebagian umat cukup memilih partai pluralis yang komitmen keagamaan elitnya dipercaya.

Ketiga, parpol Islam belum menampakkan inklusivitasnya. Inklusivitas bukan berarti adanya dukungan konkret dari non-Islam, tetapi inklusif dari segi program, pemikiran, dan perjuangan terhadap semua kepentingan yang bersifat umum. Parpol Islam masih memperlihatkan Islam-sentris atau kelompok-sentris, bahkan faham sentris, sehingga sulit untuk menarik pendukung lebih luas, kalaupun didukung hanya oleh kelompok terbatas.

Parpol Islam lebih memilih untuk memperlihatkan simbol dan atribut keagamaan yang kadang-kadang bernada provokasi ketimbang citra Islam itu sendiri yang *rahmatan lila'alamin*. Padahal dengan memposisikan diri inklusif, parpol Islam boleh jadi didukung bukan hanya oleh umat Islam tetapi juga non-Muslim. Sekadar contoh, ketika PPP sendirian memperjuangkan berbagai aspirasi rakyat di MPR, yang simpati dan mendukung bukan hanya umat Islam tetapi masyarakat lebih luas —walaupun memang belum tentu terbawa ke bilik suara.

Sebab itu parpol Islam mesti menegaskan identitas dirinya sesuai dengan citra Islam, tentunya identitas yang menampilkan wajah partai yang bukan eksklusif. Identitas dimaksud adalah karakteristik partai yang membedakan antara satu dan lainnya. Identitas ini muncul dari sebuah konsepsi partai yang dirumuskan secara ideal dalam bentuk perjuangan partai secara konkret. Parpol Islam malah harus

bisa mengeliminasi penggunaan jargon-jargon agama seperti simbol, atribut, retorika, dan slogan-slogan, sebab itu bukan identitas partai yang dapat ditonjolkan. Kita bisa melihat bagaimana atribut dan slogan keagamaan cukup marak digunakan oleh parpol Islam, tapi tampaknya tidak banyak terpengaruh. Selain masyarakat pun tahu bahwa atribut dan semacamnya digunakan untuk kepentingan politik, juga dapat membodohi rakyat.

Setelah keterpurukan parpol Islam, kita tidak harus pesimis atau malah menyalahkan kehadiran parpol Islam. Keterpurukan parpol Islam banyak disebabkan oleh perangkat partai dan realitas politik. Meski pemilu kali ini mendapat perolehan suara cukup tipis, pemilu yang akan datang merupakan kesempatan yang harus diraih dengan sukses. Jalan terus parpol Islam!□

Kekalahan Partai Politik Islam

Oleh **Mochtar Naim**

ADA beberapa pihak yang ingin membetulkan letak persoalan kekalahan umat Islam dalam Pemilu 1999, yakni dengan mengatakan bahwa yang kalah itu bukanlah Islam tetapi adalah partai-partai Islam. Sementara umat Islam sendiri ada yang menang dan ada yang kalah, tergantung kepada partai mana yang mereka pilih dan di mana tempat tegak mereka. Ungkapan bernada apologetik dan cenderung berupaya melepaskan beban dan tanggung jawab moral terhadap kekalahan umat Islam itu, bagaimanapun ada benarnya, jika pada analisa pertama kita memisahkan antara Islam yang teologikal dengan Islam yang sosio-kultural.

Dengan menimpakan kesalahan pada kelompok umat yang memilih jalur politik untuk memperjuangkan tegaknya Islam dan syariat Islam di bumi Indonesia ini, maka kelompok umat yang lebih mendahulukan taktik dan strategi daripada prinsip —yakni yang memilih atau pun mendirikan partai-partai nasionalis sekuler sebagai wahana perjuangan politiknya— terselamatkan. Mereka tidak kalah, bahkan menang. Yang kalah itu hanyalah mereka yang mendahulukan prinsip daripada taktik dan strategi, yakni dengan mendirikan partai berasaskan Islam itu. Menurut mereka, ini adalah kesalahan politik (*political blunder*) dan kekeliruan taktik dan strategi politik.

Dari segi ini sekaligus terlihat bahwa permasalahan umat Islam, khususnya di Indonesia ini, bukan sekadar pergumulan menghadapi lawan-lawan eksternal di luar umat, tetapi juga pergumulan ke dalam sendiri: Perbedaan visi, versi, dan bahkan misi antarfraksi yang cukup beragam dan kompleks dalam tubuh umat Islam sendiri.

Proses transisi

"Kekalahan " ini sendiri sesungguhnya adalah bawaan alamiah dari sebuah situasi di mana umat Islam sedang berada dalam proses pergumulan "ke luar" dan "ke dalam" untuk menyelesaikan dirinya. Umat Islam saat ini sedang berada dalam proses transisi dari abad kegelapan di masa yang lalu ke abad pencerahan di masa datang. Dan proses ini telah berjalan praktis sepanjang abad ke-20 ini, sementara abad ke-21 dan selanjutnya diperkirakan adalah abad pencerahan dan kebangkitan kembali seluruh dunia Islam, sebagaimana diprediksi para futurolog.

Selama masa transisi di sepanjang abad ke-20 ini kita melihat bahwa kekalahan demi kekalahan telah dialami, tetapi kekalahan itu sendiri adalah pertanda adanya geliat, dinamika *the will to survive and revive* yang berkelanjutan. Di balik itulah secara berangsur mereka menyadari letak kelemahan dan kesalahan mereka, dan di mana pula letak potensi dan kekuatan mereka. Proses ini akan berlanjut dan di bawa terus sampai ke gerbang dan bahkan jauh masuk ke abad ke-21, untuk akhirnya kebangkitan yang sesungguhnya mulai menampakkan diri. Pada waktu itu Islam, dan sekaligus umat Islam, mulai diperhitungkan dan secara berangsur tetapi pasti merebut dominasi dan hegemoninya kembali di pentas peradaban dunia.

Sebuah skenario trans-historikal ini, bagaimanapun, kita perlukan untuk membedakan mana yang pertempuran, yang peperangan, yang episode, dan mana pula yang *trend* secara global. Dan kekalahan ini adalah bukti *ipso facto*, karena ia bagian dari dinamika perjuangan jatuh-bangun yang bercorak global itu.

Ini semua juga untuk mengatakan bahwa yang kalah itu bukan hanya partai-partai Islam, tetapi seluruh umat Islam, baik yang bertekad mendirikan partai-partai berasaskan Islam maupun yang memilih masuk ke dalam partai-partai nasionalis-sekuler atau pun mendirikan partai berasas nasionalis dan sekuler itu. Bahwa jumlah mereka yang merupakan kelompok mayoritas terbesar itu dalam kenyataannya terpecah-pecah ke dalam fraksi-fraksi yang banyak, dan bagian banyak juga memilih jadi obyek seperti sediakala ketimbang subyek yang harus menentukan sendiri nasib dan masa depan mereka.

Melihat kekalahan umat Islam ini, sekaligus harus melihat mereka yang berada di jalur inklusif maupun jalur eksklusif. Masing-ma-

sing mempunyai persoalannya dan sisi-sisi kelemahan maupun kekuatan yang sangat berarti untuk dicermati.

Kekalahan yang diderita partai Islam, yakni partai-partai memberanikan diri kembali berasaskan Islam di masa reformasi ini sembari melepaskan keterkaitannya dengan Pancasila sebagai asas tunggal (yang dipaksakan berlakunya selama Orde Baru), adalah jelas. Kecuali PPP, yang sesungguhnya diciptakan oleh rezim Orde Baru sebagai *bumper* dan *buffer* untuk melunakkan *tone* dan reaksi kelompok Islam, nyaris tak satu pun dari partai berasas Islam yang keluar sebagai pemenang. Jumlah kursi yang mereka dapatkan pun tak cukup untuk membikin mereka ke luar dari persyaratan minimal dua persen untuk bisa tampil lagi pada pemilu lima tahun mendatang.

Sementara itu ada dua partai di luar PDI-P dan Golkar yang lahir dari kandungan ormas Islam, tetapi —karena pertimbangan taktis-strategis-politis tertentu— memilih melahirkan partai nasionalis terbuka berorientasi sekuler. Kedua partai itu adalah PAN dan PKB di bawah Amien Rais dan Gus Dur dan dari kandungan ormas Muhammadiyah dan NU. Karena pilihan mereka adalah pada taktik dan strategi, dan bukan pada prinsip, sulit untuk mengkategorikan mereka sebagai juga kelompok partai Islam maupun ke dalam kelompok partai nasionalis sekuler karena nuansa keislamannya yang juga cukup menonjol itu. Mereka adalah *buffer* antara kedua partai unggulan pertama (PDI-P dan Golkar) yang seluruhnya sekuler dengan partai-partai kecil berasaskan Islam. Dan mereka juga pada waktu yang sama memainkan peranan sebagai "pedagang sapi dalam pasar politik".

Faktor penyebab

Penyebab *pertama* kekalahan partai-partai berasaskan Islam mungkin adalah keberanian mereka untuk berjuang dengan *platfrom* Islam itu. Dua generasi selama empat dekade nyaris telah berlalu di mana Islam sebagai kekuatan politik telah dikesampingkan, yakni sejak dibubarkannya Masyumi di tahun 1962 dan dikeluarkannya Dekrit Presiden Juli 1959 tiga tahun sebelumnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan kekuasaan absolut berada di tangan presiden. Sepanjang masa yang terisi oleh dua rezim —Orde Lama dan Orde Baru— itu Islam sebagai kekuatan politik telah dilumpuhkan, dan lebih menampakkan wajahnya sebagai umbul-umbul perisai untuk tujuan-tujuan seremonial dan upacara-upacara keagamaan.

Politik Islam dari kedua diktator Soekarno dan Soeharto adalah identik dengan politik Islamnya pemerintahan kolonial. Islam sebagai agama peribadatan dan seremoni dibolehkan, dan bahkan bila perlu ditunjang; tetapi Islam sebagai kekuatan dan budaya politik, jangan. Tradisi pemasungan politik Islam yang berlaku selama empat dekade berturut-turut inilah yang telah menyebabkan Islam diterima oleh generasi muda lebih dalam bentuknya yang seremonial dan lembut daripada yang integral dan utuh menyeluruh (*kaffah*) yang revolusioner dan dinamis.

Ada ketakutan dan kerisihan terhadap Islam sebagai kekuatan politik yang dihidupkan kembali, karena Islam sebagai kekuatan politik selalu diidentikkan dengan gerakan-gerakan DI-TII di masa lalu, serta gerakan-gerakan teroris dan militan lainnya dari dunia Islam lain yang dihembus-hembuskan oleh pers Barat, padahal gerakan mereka tidak lebih dari gerakan menuntut kemerdekaan seperti yang berlaku di belahan mana pun.

Politik Islamofobia inilah yang telah menyebabkan bagian terbesar umat justru tidak memilih partai-partai Islam, walau jelas-jelas dinyatakan bahwa partai-partai Islam menginginkan tegaknya Islam dan berlakunya syariat Islam bagi para pemeluk Islam seperti bunyi *Jakarta Charter*. Ketakutan terhadap Islam ini tidak hanya terjadi sekarang, tetapi sudah bersalin dari generasi ke generasi, yang banyak juga dihembuskan oleh pihak penjajah sendiri di masa yang lalu. Ini karena pemberontakan melawan penjajahan di masa sebelumnya dan perjuangan menegakkan kemerdekaan sejak dekade pertama abad ke-20 juga terutama dipelopori gerakan radikal keislaman.

Alasan ketakutan dan kerisihan terhadap Islam politik inilah agaknya juga yang mendasari pemikiran PKB dan PAN untuk tidak berasaskan Islam. Mereka memilih berasas nasional terbuka dan menerima anggota dari berbagai latar belakang agama dan kesukuan. Relatif banyaknya mereka mendapat perolehan suara terutama dari kelompok umat sendiri adalah karena taktik dan strategi ini, di samping jalur primordial yang memang diharapkan dari para pendukung setia ormas mereka sendiri.

Bagaimanapun, walau membukakan diri terhadap kelompok warga yang beragama lain (terutama Kristen) dan bersuku lain (terutama Cina), dalam pemilu kemarin, hanya sedikit dari kelompok warga yang beragama dan bersuku lain itu yang memberikan suaranya kepada PAN maupun PKB. Sebagaian terbesar dari mereka me-

milih PDI-P, Golkar, dan partai-partai sekuler lainnya, di samping yang benar-benar berasas Kristen, Buddha, dan sebagainya. Dari antara unsur elit mereka sementara itu memang sengaja ada yang masuk ke PAN dan PKB, karena ikut melibatkan diri dan mengatur dari dalam akan berbeda dengan hanya sekadar pengamatan dari luar.

Kedua, sudah peluang yang tersedia untuk memperlihatkan diri sangat terbatas (karena hanya hitungan bulan dari berdirinya sampai pemilu dilaksanakan), jumlahnya pun sampai belasan, sehingga kelompok umat sendiri bingung tidak tahu mana yang akan dipilihnya. Apalagi perbedaan-perbedaan berarti dalam hal asas, tujuan, dan program-program antara sesama partai Islam itu hampir tidak terlihat, sehingga sukar bagi kelompok umat di kelas awam untuk menjatuhkan pilihannya kepada partai-partai Islam itu. Hubungan-hubungan emosional secara primordial pada akhirnya lebih menentukan. Dan inilah yang membantu perolehan suara PAN dan PKB, karena mereka memiliki kelompok primordial yang relatif setia itu walau nyata-nyata yang mereka dirikan bukanlah partai Islam sekalipun.

Ketiga, tentu saja adalah duit. Perolehan suara dengan tingkat kemenangan yang diperoleh partai-partai yang bertarung kemarin ini, kelihatannya juga berbanding sejajar dengan jumlah dana yang mampu mereka gaet. Partai-partai Islam, secara keseluruhan, adalah dari antara yang paling miskin dan tidak punya dana. Kecuali mungkin satu-dua yang berhasil mendapatkan dana dari luar, secara keseluruhan merekan mencukupkan saja dari apa yang ada, khususnya yang dibantu oleh pemerintah secara serba sedikit itu.

Keempat, mungkin yang lebih sensitif dan juga lebih memilukan, adalah kecenderungan egosentrisme para pemimpin partai-partai Islam itu sendiri, yang lebih suka melihat perbedaan daripada persamaan di antara sesama mereka. Akibatnya, sukar bagi mereka untuk mengubur perbedaan-perbedaan, trivial dan bahkan artifisial, yang bisa dikesampingkan demi kesepakatan dan kebersamaan untuk tujuan bersama.

Betapapun tingginya tingkat pendidikan mereka dan luasnya tingkat pergaulan mereka, namun sisa-sisa arogansi budaya feodalisme dan aristokratisme masih terbawa dalam cara dan lagu-lagak hubungan sosial di antara mereka, di mana emosi dan sentimen kadang lebih menonjol dari pertimbangan rasional yang dingin.

Kecenderungan melihat perbedaan daripada persamaan di antara

sesama mereka diwujudkan lewat kehadiran partai-partai berakar sama. Untuk dicatat: Ada empat, atau bahkan lima, partai yang ke luar dari rumpun Masyumi: Masyumi Baru, Masyumi saja, PBB, PUI, dan PAN. Ada empat partai yang ke luar dari perut NU: PKB, PKU, PNU, dan SUNI. Sementara PSII pun pecah menjadi PSII 1905 dan PSII saja; juga polarisasi Jawa dan non-Jawa.

Ini berarti semangat ajaran Islam yang menekankan pada persatuan dan kesatuan sesama umat, pada kerjasama dan saling bantu antara sesama umat, dan akan keharusan untuk menyusun satu barisan yang tersusun rapi (*Ash-Shaf; 4*), kurang terhayati, walau tiap kali jadi hiasan bibir dalam berbicara mengelu-elukan Islam. Mereka rata-rata terkena oleh kritik uluhi: "Kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan?" (*Ash-Shaf; 2-3*).

Hanya setelah bencana berada di depan mata, dan lawan-lawan politik Islam menjadi lawan bersama mereka, barulah mereka menyadari akan perlunya upaya merapatkan barisan itu. Berdirinya forum silaturrahmi ataupun forum ukhuwwah antar partai Islam yang semula disertai dengan sikap separuh hati, akhirnya menjadi satu keniscayaan, karena hanya dengan langkah itulah musuh bersama dapat dihadapi. Tapi itu pun nyaris terlambat.

Kelompok inklusif

Akan halnya kelompok-kelompok umat yang jumlahnya justru terbesar, dan yang lebih memilih bernaung di bawah partai-partai nasional sekuler, baik Golkar, PDI-P, PAN, PKB, dan sekian banyak partai kecil nasional-sekuler lainnya, mereka pertama-tama bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok besar sejalan dengan tingkat kesadaran dan artikulasi politik mereka. Yang elit (menengah ke atas) dan yang awam (menengah ke bawah).

Yang elit maupun yang awam ini pun bisa dikategorikan lagi ke dalam dua orientasi dan sikap keagamaan mereka: Yang menerima Islam secara sepenggal-sepenggal dan yang Islamnya jatuh ke dalam kategori abangan. Bagian terbesar dari umat Islam di Indonesia sebenarnya jatuh ke dalam kedua kategori ini. Sedang yang menerima Islam secara *kaffah*, utuh-menyeluruh, seperti yang dianut oleh mereka yang memilih partai-partai berasas Islam, justru adalah kelompok minoritas dalam peta keberagamaan di Indonesia sejak dari dahulu sampai pun sekarang.

Faktor-faktor sejarah politik dan sejarah kebudayaan pun telah

membikin orang Islam Indonesia sesungguhnya hanya menerima Islam secara sepenggal-sepenggal dan tidak *kaffah*. Pertama adalah karena Islam yang masuk pada masanya itu sangat toleran dengan budaya-budaya lokal yang telah ada, sehingga proses sinkretisme lebih berlaku daripada sintesisme. Kedua karena feodalisme yang sekaligus juga bernuansa paternalisme yang dianut oleh suku-suku pribumi lebih menyerahkan semua urusan transendental apalagi duniawi kepada para raja, karena raja sekaligus adalah juga pendeta (*pandhita ratu*).

Yang berlaku di antara keduanya hubungan patron dan klien. Rakyat yang adalah *kawula* dan *wong cilik* sebenarnya tidak punya apa-apa; tidak juga nalar maupun karsanya sendiri. Tradisi budaya yang seperti inilah yang diterjemahkan kembali ke dalam konsep neofeodalisme yang berlaku dalam partai-partai nasional-sekuler itu. Ketiga dan seterusnya bisa ditelusuri sendiri, yang semua saling mengait.

Kelompok umat yang masuk ke dalam partai-partai nasional-sekuler ini, yang jumlahnya adalah terbesar, adalah yang jauh pemikiran Islam politik. Mereka bahkan terkontaminasi oleh pikiran Islamophobia. Dan mereka lebih menerima Islam dalam artian yang tradisional, bukan sebagai *way of life*, apalagi *a complete set of way of life*.

Selama Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan sekarang di masa reformasi, masuk pula kelompok elit umat yang sesungguhnya punya ilmu dan orientasi pemikiran keislaman yang luas, tetapi cenderung kolaboratif dengan sistem dan kelompok kekuasaan. Semboyan mereka: “Lebih baik mengubahnya dari dalam”. Tapi ternyata mereka yang terseret, bagai tukang pancing yang dilarikan ikan.

Tawakkal

Jika sekarang harus disimpulkan, maka kekalahan partai-partai Islam dan Pemilu 1999 adalah kekalahan seluruh umat. Dari kekalahan ini umat mestinya banyak belajar dan mendapatkan hikmah. Kekalahan demi kekalahan telah dirasakan. Namun ada janji sejarah: “Bahwa masa itu diperedarkan” (*Ali Imran; 140*). Dan abad ke-21 dan abad-abad berikutnya adalah giliran uimat Islam naik panggung. Kekalahan yang diterima dengan tawakkal adalah aset dan moral dasar untuk mencapai kemenangan itu. Dengan azam yang kuat, kerja keras, dan bertawakkal, kemenangan terletak di balik bukit itu.□

Parpol Islam dan Kelanjutan Reformasi

Oleh **Abu Bakar E. Hara**

PROFESOR Mochtar Naim dalam artikel "Kekalahan Parpol Islam", (*Republika*,13/7) membuat beberapa analisis menarik tentang kekalahan politik umat Islam di Indonesia. Prof Mochtar kurang lebih berkesimpulan bahwa umat Islam tidak perlu menghindar dari kenyataan bahwa mereka kalah dalam pemilu lalu dengan mencari alasan yang bersifat apologetik dan dengan saling menyalahkan. Walaupun tidak menyalahkan strategi parpol yang tidak berasas Islam, Prof Mochtar lebih bersimpati pada perjuangan parpol yang berasas Islam dalam pemilu lalu. Parpol berasas Islam, menurut beliau lebih tegas dalam memperjuangkan prinsip, sedangkan parpol berbasis Islam namun tidak berasas Islam lebih mementingkan strategi, taktik dan menomorduakan prinsip. Ini menyebabkan partai-partai jenis kedua ini, menurutnya menjadi objek dan menjadi "pedagang sapi dalam pasar politik".

Ada dua hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut di sini. *Pertama* tentang kekalahan umat Islam dan *kedua* tentang strategi parpol Islam. Tulisan berikut tidak bermaksud membela strategi parpol Islam yang tidak berasas Islam maupun pandangan mereka tentang kemenangan atau kekalahan umat. Tetapi ingin memberi sedikit gambaran tentang kompleksitas yang terjadi di masyarakat dan dalam tubuh umat Islam sendiri yang mengharuskan perlunya parpol Islam yang terbuka. Kadangkala prinsip atau asas Islam dalam parpol Islam bukan saja tidak membantu kemenangan umat Islam, tetapi *counter-productive* terhadap perjuangan menegakkan demokrasi, yang artinya juga perjuangan untuk memenangkan umat Islam itu

sendiri.

Framework yang melihat kekalahan parpol Islam dalam pemilu lalu sebagai kekalahan umat Islam secara keseluruhan berangkat dari pandangan lama di mana umat Islam dalam berpolitik memfokuskan diri secara frontal untuk menggolkan simbol-simbol Islam dalam politik dan pemerintahan. Pandangan demikian tentu saja mengabaikan perkembangan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya yang begitu cepat. Umat Islam telah menjadi bagian kehidupan masyarakat politik Indonesia. Energi mereka dalam kehidupan politik tidak lagi digunakan untuk isu ideologis yang sempit tapi lebih pada urusan-urusan kenegaraan, termasuk membentuk pemerintahan yang bersih, memperjuangkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia lainnya di masyarakat.

Penanganan soal-soal seperti ini terbukti sangat berat. Apalagi warisan wacana politik untuk mendirikan negara Islam atau setidaknya memakai simbol-simbol Islam dalam politik masih dilekatkan pada setiap parpol berbasis Islam. Partai berbasis Islam yang terbuka agaknya mencoba untuk terbebas dari warisan perjuangan demikian, walaupun tidak sepenuhnya berhasil. Walaupun tidak memperoleh suara cukup besar, setidaknya mereka telah memberikan nuansa baru dalam perpolitikan umat Islam. Penampilan mereka jauh lebih baik daripada partai-partai berasas Islam warisan paradigma lama. Dalam hal ini PPP yang berasas Islam dan memperoleh suara yang cukup signifikan tidak dapat dikatakan sebagai warisan historis Islam politik lama, karena mereka lebih merupakan produk penataan politik Orde Baru.

Paradigma baru Islam politik di atas sebetulnya dalam kadar tertentu cikal bakalnya ada pada masa Orde Baru. Ketakutan pemerintahan Soeharto terhadap Islam atau sering disebut *phobia* terhadap Islam telah melahirkan penyesuaian-penyesuaian dan kompromi dari umat Islam. Kegiatan politik mereka memang dibatasi, tetapi sebagai kompensasinya umat terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan dakwah.

Penyesuaian diri dengan kebijakan pemerintahan Orba telah melahirkan gerakan sosial Islam, yang berusaha mengatasi berbagai masalah umat. Pada1970-1980-an, misalnya, bisa disaksikan munculnya kegiatan masyarakat Islam yang sangat marak. Gerakan dakwah, diskusi agama, aktivitas pemuda masjid dan lembaga dakwah kampus, serta kelompok-kelompok diskusi lainnya mewarnai ge-

rakan-gerakan Islam pada periode ini. Jadi pembatasan oleh Orba telah menyadarkan umat tentang pentingnya menggunakan *frame-work* Islam secara lebih luas dan tidak terbatas pada perjuangan ideologis.

Pengalaman tertindas secara politik para periode ini "memaksa" umat dan kaum muda Islam untuk kreatif bahkan sebagian menjadikan Islam sebagai ideologi sosial alternatif. Tidak dapat dipungkiri gerakan ini berimplikasi pada pembentukan masyarakat madani, suatu masyarakat yang mandiri dan menjaga jarak dari penguasa. Kalau seandainya Presiden Soeharto jatuh pada saat itu dan diadakan pemilu bebas dan demokratis, bukan mustahil partai berbasis Islam-lah yang akan menang. Kita misalnya pernah menyaksikan menangnya PPP di DKI Jakarta, ketika umat Islam tertekan dan ketika masyarakat bawah mengidentikkan diri dengan Islam sebagai ideologi perlawanan.

Basis sosial kebangkitan masyarakat Madani ini tetap ada walaupun kemudian Islam 'dekat' dengan penguasa di awal 1990-an. Munculnya ICMI pada saat-saat akhir pemerintahan Soeharto sebagian telah merepresentasi basis sosial ini dan membawa serta beberapa perangkat-perangkat sosial umat Islam yang ada. Ketika Soeharto lengser, sebagian elit politik Islam yang dekat dengan Presiden itu dengan sendirinya tidak populer. Namun ini tidak berarti bahwa basis sosial yang terbentuk pada periode 1970-1980-an itu juga hancur.

Basis sosial yang terbentuk itu tetap ada. Tetapi afiliasi politik umat kini tidak terfokus pada bentuk perjuangan formal Islam. Generasi Islam baru yang muncul dan pengalaman sosialisasi politik menyebabkan mereka tidak tertarik kepada *appeal* Islam ideologis tradisional tadi. Sebagai mayoritas masyarakat di bumi Indonesia, banyak umat Islam juga menempati bagian yang kurang diuntungkan dalam ekonomi dan politik. Aspirasi sebagai golongan yang tertindas bisa saja tidak memusat pada partai-partai Islam, namun diberikan kepada banyak partai termasuk ke partai seperti PDI-P yang kini mewakili nasib mereka yang tertindas dan paling dirugikan selama 10-15 tahun terakhir masa Orde Baru.

Melihat basis sosial umat, sosialisasi politik, kesenjangan generasi, perubahan peta politik dan afeksi mereka kepada kaum yang tertindas di atas, tidak hanya jaminan bahwa umat akan mendukung partai-partai Islam atau yang berbasis Islam. Umat Islam pada saat ini berada di mana-mana dan dalam banyak parpol. Karena itu ke-

simpulan Prof Mochtar bahwa kekalahan parpol Islam dalam pemilu ini adalah kekalahan umat agaknya terlalu sederhana.

Hal berikut yang patut disorot lebih lanjut dari tulisan Prof Mochtar berkaitan dengan strategi politik parpol Islam. Berbeda dengan harapan Prof Mochtar yang bersimpati pada parpol berasas Islam, tulisan ini melihat parpol berasas Islam mempunyai halangan ideologis dan struktural untuk menang. Cukup jelas bahwa partai-partai yang berasas Islam, seperti tampak dalam kampanye pemilu lalu, masih menggunakan simbol-simbol umum dan mengandalkan kata 'Islam' itu sendiri untuk menggalang pendukung. Hampir tidak ada yang menerjemahkan ideologi Islam misalnya menjadi ideologi orang-orang yang tertindas. Ketika berhadapan dengan parpol berasas Islam, umat sebetulnya dihadapkan pada realitas bahwa wacana yang berhasil dikembangkan oleh ideologi Islam dari partai-partai Islam itu miskin dan kurang relevan dengan persoalan politik, sosial dan kemasyarakatan yang makin kompleks.

Masyarakat yang kompleks ini menginginkan penjabaran lebih lanjut dari apa yang ditawarkan oleh ideologi atau prinsip Islam itu. Adalah jelas misalnya bahwa prinsip Islam sangat anti pada korupsi, nepotisme dan kolusi, tapi bagaimana hal itu dituangkan dalam bahasa rakyat sangat penting. Demikian juga kalau ditanya bagaimana sistem demokrasi dan masyarakat madani model Islam, biasanya dijawab seperti pada zaman Nabi. Jawaban demikian tentu saja simplistis, jauh dari tuntas dan memuaskan karena masyarakat kini adalah jauh lebih kompleks daripada pada zaman Nabi. Daftar wacana politik yang belum ditawarkan ideologi Islam dari parpol-parpol Islam waktu pemilu tambah panjang kalau diikutkan soal-soal seperti hubungan antar individu dengan negara, hak-hak asasi, hak-hak minoritas, hak-hak perempuan, soal-soal ekonomi dan berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

Dengan menggunakan Islam sebagai asas, prinsip dan ideologi, partai-partai berasas Islam hanya menggunakan simbol yang umum untuk membedakan dirinya dengan partai-partai lain, tanpa mencoba untuk menggali dan mencari secara lebih rinci detail penjabarannya. Dengan menjadikan Islam sebagai ideologi simbolis seperti ini, parpol mengandaikan Islam secara keseluruhan sedang berhadapan dengan satu musuh yang harus dilawan yang mempunyai ideologi berbeda. Adalah sifat dari suatu ideologi bahwa ia meniscayakan adanya ideologi dari kelompok lain yang harus dilawan. Di sini par-

pol dengan ideologi Islam membayangkan adanya partai lawan yang punya ideologi mengancam umat Islam.

Islam dengan demikian disempitkan dalam suatu ideologi untuk melayani kepentingan partai dalam upayanya menghadapi kelompok atau partai lain dan untuk meraih pendukung fanatis. Perkembangan demikian sebetulnya *counter-productive* karena biasanya menutup penafsiran lain dan menjadikan Islam hanya milik segelintir orang.

Paradigma berpikir ideologis tentang adanya musuh yang mengancam terlihat pula dalam manuver politik belakangan ini, dengan munculnya ide fraksi Islam atau penggalangan kekuatan umat Islam lainnya. Asumsi adanya ancaman terhadap kepentingan Islam sebetulnya tidak jelas karena memang tidak pernah didefinisikan kepentingan yang mana dan kepentingan siapa. Ini lebih bersifat memobilisasi umat untuk mendukung satu pandangan politik tertentu. Perjuangan umat Islam karena itu sebenarnya jauh lebih luas daripada untuk mencapai tujuan-tujuan pendek. Selain tetap bertawakal dan menanti masa transisi kesuraman Islam lewat, seperti yang diungkapkan oleh Prof Mochtar, umat Islam juga semestinya mendukung lahirnya suatu sistem demokratis di masyarakat. Suatu sistem yang demokratis dapat mencegah stagnasi pemikiran karena perumusan ideologi Islam tertentu. Sistem demokratis memberi kebebasan kepada tiap orang untuk berpikir kritis terhadap setiap penafsiran politik tentang Islam. Sistem demokratis juga menjamin definisi kepentingan Islam yang tidak didominasi suatu kelompok Islam. Hanya dengan suatu sistem demokrasi umat Islam dapat diselamatkan terutama dari perangkap pandangan sempit, stagnasi dan pengerasan satu model tertentu ideologi Islam.

Dalam situasi politik yang belum pasti saat ini, tokoh-tokoh politik umat Islam seharusnya pandai-pandai dalam memilih langkah. Orientasi seharusnya diarahkan pada upaya membangun suatu sistem politik yang demokratis, yang akan menjamin keselamatan umat dan kelangsungan pemikiran Islam yang terbuka. Umat Islam tetap berada dalam posisi penting dalam menentukan masa depan umat dan juga demokrasi di Indonesia walaupun partai-partai yang mengklaim sebagai partai Islam kalah.□

Islam dan Politik di Indonesia

Oleh **Sugiono**

KEKALAHAN telak partai-partai berasas Islam atau partai-partai berbasis massa Islam dari partai nasionalis (PDI Perjuangan) dalam pemilu pertama di era reformasi ini memunculkan banyak kesimpulan. Salah satu kesimpulan yang kurang benar adalah, agama (Islam) sebaiknya tidak dibawa-bawa ke dalam percaturan politik karena yang demikian itu menodai kesucian atau kefitrahan agama. Politik harus dipisahkan dari agama karena politik yang berpijak pada nilai-nilai agama dianggap sektarian dan tidak cocok hidup di bumi Indonesia yang penuh dengan kemajemukan.

Tentu saja, kesimpulan itu tidak tepat, apalagi mayoritas penduduk negeri ini pemeluk Islam. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan universalitas nilai-nilai Islam, pemisahan antara politik dan Islam itu jelas menyempitkan, bahkan merendahkan Islam. Islam dipandang hanya sebagai agama yang mengurusi ibadah ritual individual semata. Padahal, syariat Islam yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan —termasuk politik— lebih banyak daripada yang mengatur ibadah ritual individual semata. Sungguh, ini merupakan penyempitan atau pengerdilan Islam sebagai agama yang memiliki kebenaran mutlak dan universal (*rahmatan lil 'alamien*) itu.

Memang, semasa Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi sekarang, banyak muncul isu yang memutarbalikkan atau memanfaatkan Islam untuk kepentingan politik. Ayat-ayat Al-Qur'an ditukar hanya dengan harga yang sangat kecil, yaitu kepentingan politik sesaat yang sangat hedonistis. Yang demikian ini jelas tidak benar, bahkan sangat dikutuk atau dilaknat Allah. Karena itu, setiap Muslim wajib menjauhi tindakan atau perilaku semacam ini.

Tetapi, itu tidak berarti Islam harus diceraikan talak tiga dengan politik. Setiap Muslim harus memandang politik sebagai salah satu aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang pelaksanaannya harus tetap mengacu kepada syariat Islam. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang membicarakan masalah politik, kekuasaan, atau kepemimpinan. Yang tidak boleh, bahkan dilarang keras, adalah memutarbalikkan, menyalahtafsirkan, menyalahgunakan, atau menjual ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi demi kepentingan sesaat yang sangat hedonistis. Pelarangan ini berlaku juga dalam kehidupan ekonomi, keuangan/perbankan, sosial, budaya, hukum, hankam, dan sebagainya. Singkatnya, setiap Muslim wajib mengikuti syariat Islam dalam segala aspek kehidupan.

Pancasila saja, yang merupakan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, sama sekali tidak menafikan agama (Islam) sebagai sumber normatif yang tidak akan pernah habis digali. Penafsiran atas sila-sila Pancasila sebagai ideologi terbuka pun sama sekali tidak dapat mengesampingkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam. Karena itu, kehidupan politik di negara Pancasila yang mayoritas penduduknya pemeluk Islam seharusnya tidak alergi terhadap norma-norma berpolitik yang bersumber pada ayat-ayat Al-Qur'an maupun sunah-sunah Nabi. Dengan demikian, di negara yang lebih dari 90 persen penduduknya mengaku memeluk Islam ini mestinya tidak ada yang berkata, ''Jangan bawa-bawa Islam ke dalam politik!''

Yang menjadi masalah, mengapa di negara yang lebih dari 90 persen penduduknya beragama Islam justru muncul pendapat atau keinginan memisahkan agama (Islam) dengan politik. Jika dikaitkan dengan hasil Pemilu 7 Juni lalu, mengapa di negara yang lebih dari 90 persen penduduknya beragama Islam justru partai-partai berasas Islam atau partai-partai berbasis massa Islam tidak bisa menang, bahkan kalah telak.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut secara tepat diperlukan pemetaan yang jelas atas komunitas Islam di Indonesia. Memang, di negeri ini pemeluk Islam tercatat lebih dari 90 persen. Tetapi, ini hanya catatan di atas kertas. Realitasnya, komunitas Islam di negeri ini sangat beragam, sekurang-kurangnya terdiri atas: Islam modernis, Islam tradisional, dan Islam abangan.

Komposisi ketiga komunitas Islam itu tidak berada dalam kondisi seimbang. Populasi terbesar ditempati komunitas Islam tradisional

dan abangan. Sedangkan komunitas Islam modernis sangat kecil dan menempati urutan buncit dalam kuantitas. Tetapi, kualitas Islam modernis relatif lebih tinggi daripada Islam tradisional, apalagi Islam abangan.

Komunitas Islam modernis lebih banyak hidup di kota -meski ada yang tinggal di pedesaan- dengan taraf hidup relatif lebih baik daripada komunitas Islam tradisional dan Islam abangan. Sementara itu, komunitas Islam tradisional atau Islam abangan lebih banyak tinggal di pedesaan -meski ada yang tinggal di perkotaan. Hanya, kualitas intelektual maupun keberagamaan komunitas Islam tradisional relatif lebih baik daripada komunitas Islam abangan.

Kualitas intelektual maupun keberagamaan komunitas Islam abangan berada di urutan buncit. Karena itu, komunitas ini bisa disebut *muallaf* meski mereka sudah bertahun-tahun atau secara turun-temurun memeluk Islam. Sebab, pemahaman, pengamalan, dan komitmen keislaman mereka relatif sangat rendah. Komunitas Islam abangan juga lazim disebut Islam KTP; keislamannya sekadar tertulis di KTP, sementara ibadah ritual jarang atau tak pernah dilaksanakan, apalagi ibadah sosial kemasyarakatan.

Karena itu, partai-partai berasas Islam atau partai-partai berbasis massa Islam pun sama sekali tidak laku dijual di komunitas Islam abangan. Sebab, dalam pemahaman komunitas ini, Islam seolah hanya kependekan dari isya, subuh, lohor, asar, dan magrib (salat lima waktu). Yang menonjol dari komunitas ini hanya seremonial keagamaan, misalnya, saat khitan, menikah, dan upacara kematian. Sedangkan yang prinsipal, substansial, dan esensial justru terlupakan atau tertinggalkan.

Dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, yang meliputi ekonomi, keuangan/perbankan, politik, sosial, budaya, hukum, hankam, dan sebagainya, komunitas Islam abangan sama sekali tidak mencerminkan pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan dalam kehidupan politik, sangat besar kemungkinan komunitas ini menyalurkan aspirasi mereka ke partai-partai nasionalis, terutama PDI Perjuangan.

Sementara itu, komunitas Islam tradisional —meski populasinya besar— dalam Pemilu 7 Juni lalu massanya diperebutkan banyak partai. Yang berhasil menyedot massa ini paling besar adalah PKB dan PPP. Sedangkan partai lain yang juga berbasis massa Islam tradisional —PKU, PNU, dan Partai SUNI— memperoleh suara sangat kecil. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan massa komunitas ini

menyeberang ke PDI Perjuangan, Golkar, dan PAN. Seandainya seluruh massa Islam tradisional terkumpul ke dalam satu parpol, dapat dipastikan parpol itulah yang berpeluang menang dalam pemilu.

Adapun komunitas Islam modernis, yang populasinya paling kecil di antara ketiga komunitas Islam, massanya juga diperebutkan banyak partai. Yang berhasil menyedot paling besar dari massa ini adalah PAN, PBB, dan PK. Tidak tertutup kemungkinan sebagian massa komunitas ini menyeberang ke Golkar, PPP, PUI, Partai Masyumi dan Masyumi Baru, serta PSII dan PSII 1905. Karena itu, partai-partai berbasis massa Islam modernis pun tidak ada yang memperoleh suara besar dalam Pemilu 7 Juni lalu.

Seandainya seluruh massa Islam modernis menyalurkan aspirasi mereka hanya kepada satu parpol pun, suara partai itu tidak akan lebih besar daripada suara partai yang berbasis massa Islam tradisional atau Islam abangan. Sebab, realitasnya, komunitas Islam di Indonesia ini masih didominasi kelompok tradisional dan abangan. Barangkali, jika kelak komunitas Islam modernis bisa mencapai separo lebih dari seluruh komunitas Islam di negeri ini, insya Allah, partai-partai berasas Islam atau partai-partai berbasis massa Islam akan menang. Pada saat itulah baru bisa diharapkan nilai-nilai Islam akan teraktualisasikan dalam percaturan politik di negeri yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini. □

Pemilu dan Elit Politik Islam

Oleh **Bahtiar Effendy**

HINGGA sepekan lebih setelah pemilu berlangsung, belum cukup banyak hasil penghitungan suara yang masuk ke KPU. Hitungan royal mana pun akan menunjukkan bahwa angka belum mendekati 50% dari seluruh suara yang telah dihitung. Karenanya, masih belum dapat diketahui secara pasti kira-kira siapa yang bakal tampil sebagai pemenang pemilu —menang dalam arti memperoleh suara terbanyak, kendati bukan dalam pengertian mayoritas.

Meski begitu, kenyataan ini tidak menghalangi banyak orang untuk menduga-duga —bahkan dengan kadar yang relatif pasti— bahwa partai tertentu bakal keluar sebagai pemenang. Dalam hal ini, sedikit —bahkan mungkin tidak ada— orang yang keberatan kalau partai tertentu itu dikonkretkan sebagai PDI Perjuangan.

Dengan mempertimbangkan penghitungan suara yang telah dilaporkan oleh tenaga-tenaga "tak resmi" ke berbagai lembaga yang "tak resmi" pula (yakni organ-organ partai yang ditugaskan untuk memantau hasil perolehan suara) di satu pihak, dan —di pihak lain— yang lebih penting adalah bahan-bahan sosial-historis serta politik real "kekuatan" tiap-tiap partai, di bawah PDI Perjuangan adalah Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB atau PK, dan seterusnya. Kira-kira partai-partai inilah yang akan tampil sebagai lima sampai enam partai besar, tiga puluhan partai lebih akan turun panggung karena tidak berhasil memenuhi *threshold* dua persen dari seluruh jumlah kursi di DPR.

Terlepas dari itu, kesan utama dari pesta demokrasi kali ini adalah bahwa pemilu telah memunculkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dan menempatkan partai-partai Islam pada posisi kalah. Paling

tidak, suara perolehan partai-partai Islam tidak seperti yang dibayangkan. Kendati begitu, harus dipahami bahwa ini hanya sebatas kemenangan pemilu, bukan secara otomatis kemenangan kepresidenan.

Apa yang disebut partai Islam demikian pula politik Islam merupakan sesuatu yang secara akademis-teologis bisa diperdebatkan. Tidakkah itu termasuk PAN yang meskipun lintas agama, tokoh-tokoh sentral dan mayoritas pendukungnya adalah kaum Muhammadiyah? Bukankah partai Islam itu juga termasuk PKB, yang kendati tidak menggunakan Islam sebagai asas konstituennya adalah eksklusif kaum *nahdliyin* —walaupun tidak semua orang NU ada di situ. Sementara PPP, PK, PBB, PNU, PKU, SUNI, Abul Yatama, dan yang sejenis, secara formal dianggap partai-partai Islam.

Akan tetapi, dalam konteks perebutan kekuasaan melalui pemilu kali ini, yang oleh banyak pihak dinilai mempunyai tingkat kejurdilan yang sebanding dengan Pemilu 1955, tak ada penilaian lain kecuali yang telah disebutkan tadi. Dalam kerangka seperti itu, apa sebenarnya yang terjadi dengan partai-partai Islam atau konstituen politik Islam?

Untuk membantu memahami persoalan tersebut, "bahan-bahan" yang ada di sekeliling PDI Perjuangan dapat digunakan sebagai *flashback*. Tak dapat dipungkiri bahwa pemilu kali ini diselenggarakan dalam *setting* ekonomi-politik tertentu. Dalam hal ini, reformasi (ekonomi maupun politik) dan keharusan untuk "melipat" dan "menekuk" *status quo* —dengan segala ramifikasinya— dipersepsi sebagai isu utama. Seolah-olah itulah dagangan yang akan dibeli publik.

Dengan tingkat konsistensi relatif tinggi, PDI Perjuangan justru tidak menganggap isu-isu tersebut sebagai sesuatu yang harus mereka jual —bahwa ada pihak-pihak lain yang menjualnya, tidak perlu dihalangi! Partai berlambang banteng ini, dan khususnya Megawati, memilih untuk "diam". Ia memilih untuk berkampanye tanpa "hujatan".

Untuk membangun dukungan politik, partai ini cukup mendasarkan strategi taktiknya pada kenyataan bahwa selama tiga dasawarsa lebih ia merupakan pihak yang dikesampingkan. Kesiapan untuk memimpin in ditunjukkan dengan begitu *assertive* melalui konvoi, kampanye marak, dan posko. Dan untuk memobilisasi "suara Islam", semua orang tahu bahwa PDI Perjuangan hanya membutuhkan dukungan Gus Dur —pihak yang juga merasa tidak

terintegrasikan dengan negara Orde Baru.

Lebih penting dari itu adalah bahwa seluruh tahapan kampanye dilalui dengan tingkat soliditas yang cukup kuat. Ini bukan dalam artian kemampuan untuk menutupi faksionalisme yang ada pada PDI-P, tetapi lebih pada kemampuan untuk berlaku konsisten atas strategi dan taktis penggalangan dukungan yang telah digariskan.

Inilah yang absen dalam strategi dan taktik kampanye yang digelar partai-partai Islam. Bahwa asas dan simbol keagamaan memainkan peran untuk memperoleh dukungan adalah hal-hal yang bersifat afirmatif. Demikian pula halnya dengan isu-isu yang berkaitan dengan program dan agenda partai.

Akan tetapi, itu semua hilang makna politiknya ketika elit-elit partai memainkan peran-peran politik yang mengesankan *semrawut* —kalau malah bukan perpecahan. Secara internal, mungkin saja para elit politik Islam ini telah menjalin hubungan-hubungan strategis dan taktis guna mendapatkan suara bagi sebesar-besarnya kepentingan "umat".

Masih kental dalam ingatan bahwa itu semua —pertemuan-pertemuan intern dengan segala skema permainan— tidak muncul keluar. Yang ditangkap publik melalui berbagai pernyatan di koran, majalah, radio, dan televisi justru —pandangan-pandangan yang berbeda, dan bahkan berbenturan. Maka kesan kesemrawutan menjadi tak terhindarkan. Dalam situasi seperti ini, bukankah dukungan lebih baik diberikan kepada "pihak lain"?

Dalam pemilu jurdil, ini merupakan pelajaran kedua yang kurang lebih sebanding tingkatannya antara tahun 1955 dan 1999 yang dialami partai-partai Islam. Kalau memang "persatuan", "koordinasi", atau apa pun maknanya merupakan utopia dalam kehidupan politik Islam, maka seperti kata teman saya, Salim Said —kalangan nonpartai Islam tak perlu merasa takut.□

Tukang Azan dan Kekalahan Partai Islam Modernis

Oleh **Hajriyanto Y. Thohari**

MESKI penghitungan suara hasil Pemilu 1999 belum final, perolehan akhir masing-masing partai politik sudah dapat diperkirakan: PDI Perjuangan mendulang suara terbesar. Partai Golkar, yang atas nama reformasi dan semangat anti-*status quo* diinginkan harus lengser menyusul Soeharto, benar-benar merosot drastis. Partai yang berbasis massa Islam "tradisional" (Nahdlatul Ulama), menunjukkan, sekali lagi, kemampuan bertahan yang luar biasa.

Sementara itu, partai-partai Islam modernis, atau yang berbasis massa Islam modernis, mengalami "kecele politik" yang luar biasa menyakitkan. Lihatlah, perolehan Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat Islam (PUI), Partai Masyumi (baik yang pakai kata "baru" maupun tidak), Partai Keadilan (PK), bahkan Partai Amanat Nasional (PAN) —panglima reformasi yang suaranya seperti geledek—sekalipun, perolehan suaranya cuma segitu.

Kegagalan kelompok Islam modernis pasti mengundang ironi. *Pertama*, partai-partai kelompok ini didirikan dan dipimpin oleh para aktivis Islam reformis yang sangat terpelajar, yang banyak di antaranya bergelar profesor dan doktor. Bahkan, bukan sembarang doktor, melainkan doktor ilmu-ilmu sosial (baca: kemasyarakatan) di bidang politik. Asumsinya, mereka itu orang-orang yang cukup memahami kecenderungan yang berkembang di tengah masyarakatnya, utamanya politik. Tapi, nyatanya, mereka gagap, sehingga miskalkulasi. Meski mengandung aroma dramatisasi, agaknya benar kata Dr. Nurcholish Madjid bahwa mereka itu ahli politik yang tidak tahu politik: suaranya kayaknya besar, tapi ironis, kinerja politiknya

begitu-begitu saja.

Kedua, tokoh-tokoh kelompok modernis itulah yang paling "berjasa" menghantam Golkar atas nama reformasi dan anti-*status quo*. Benar, memang, hampir semua tokoh dan cendekiawan menghantam Golkar, tapi yang dilakukan aktivis politik Islam cenderung overdosis. Prof. Dr. H.M. Amien Rais, MA, misalnya, dengan "gagah dan berani"-nya berpidato di mana-mana, bahwa Partai Golkar dengan calon presiden B.J. Habibie-nya adalah pro-*status quo*. Bahkan, kekuatan *status quo* itu harus dikubur sedalam-dalamnya.

Kecaman-kecaman yang cenderung overdosis terhadap Golkar itu telah membentuk opini publik dan kesadaran kolektif untuk meruntuhkan Golkar. Tetapi, karena keterbatasan *vocab*, massa di lapangan menerjemahkan kecaman-kecaman keras tersebut bukan dalam wacana politik yang *civilized*, melainkan dalam bentuk tindakan-tindakan konkret yang mengekspresikan sikap antipati secara eksesif. Bukan hanya berupa cemoohan dan pembakaran bendera, melainkan juga pelemparan batu dan aksi-aksi vulgar lainnya.

Bagi elit, pasti, kecaman-kecaman tersebut adalah sekadar statemen politik yang lazim disuarakan para kompetitor semata-mata, dalam konteks *political game*. Tetapi, massa di bawah, yang tidak biasa membedakan apa yang dikenal di Barat dengan pesaing politik *(political opponent)* dan musuh politik *(political enemy)*, menerjemahkannya dalam pengertian musuh *(enemy)* dalam pengertian yang sebenarnya, yang harus dilumat habis. Akibatnya, jangankan massa, bahkan petinggi Partai Golkar pun konon menjadi gamang untuk menang. Dan benar, sebagaimana keinginan publik yang telah tercipta, Golkar terkalahkan.

Tetapi, hukum "Tabung Archimides" tidak berlaku dalam politik. Golkar memang bangkrut, tetapi suara yang pergi meninggalkannya bukannya mengalir ke tabung partai-partai yang dipimpin para aktivis politik Islam modernis itu, melainkan ke tabung PDI Perjuangan. Sangat meyakinkan, pemilih PDI Perjuangan sekarang ini adalah pemilih Golkar pada pemilu-pemilu lalu. Artinya, pimpinan partai Islam yang menanam, tapi PDI Perjuangan yang mengetam.

Satu hal yang membuat banyak orang mengelus dada: Partai Golkar yang dipojokkan adalah Partai Golkar yang sedang dipimpin oleh seorang aktivis Muslim "modernis" yang mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam, yang disebut-sebut oleh Ahmad Wahib (almarhum) dalam catatan hariannya, *Pergolakan Pemikiran Islam*

(1981:173), merupakan kekuatan operasional politis dari pikiran-pikiran keagamaan Nurcholish Madjid. Artinya, modernis menghantam modernis, sang banteng yang melenguh panjang tersenyum menuai keberuntungan.

Kini semuanya memang belum berakhir. Tapi, aneh bin ajaib, seperti ungkapan "pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna", konon mereka mulai menuai sesal. Bukanlah penyesalan itu yang kita sesalkan, melainkan simplifikasi yang menyertai kekalahan tersebut yang menggemaskan: Islam kalah. Padahal, semua orang pasti tahu, sebagai agama, Islam tidak kalah, dan tidak akan pernah kalah. Bagaimana mungkin orang percaya bahwa agama yang didesain Tuhan untuk selamanya dapat dikalahkan oleh sebuah pemilu.

Kini lagi-lagi sebuah pelajaran dapat ditarik: politik itu tidak cukup hanya bermodal semangat dan keberanian, apalagi yang egoistis. Kita masih perlu banyak belajar agar tidak selalu menjadi tukang azan alias muazin: *Hayya 'ala* reformasi, *hayya' ala* koalisi, *hayya 'ala* menggebuk *status quo*! Sementara yang menjadi imam lagi-lagi orang lain. Barangkali tidak lazim, memang, muazin menjadi imam. Untuk menjadi imam, kita masih perlu bersekolah lagi. Ayooo, sekolah!□

Kegagalan Islam Politik

Oleh **Riza Sihbudi**

JUDUL tulisan di atas diilhami sepenuhnya oleh buku karya Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* yang aslinya d tulis dalam bahasa Prancis, *L'echec de l'Islam Politique* (London: I. B. Tauris, 1994). Di buku itu, Roy mengkaji kegagalan gerakan Islam politik di beberapa negara Timur Tengah, Afrika, dam Asia Selatan. Menurut pakar filsafat-politik dan peneliti senior di CNRS (*Centre National de la Recherche Scientifique*) Paris itu, kegagalan gerakan Islam politik atau Islamisme atau "neofundamentalisme" Islam di beberapa negara (kecuali Iran) disebabkan sejumlah faktor. Misalnya, ketidakmampuan para pemuka gerakan Islam politik menawarkan gagasan-gagasan alternatif yang konkret di bidang ekonomi dan cenderung defensif terhadap serbuan ide-ide Barat. Di samping itu, kegagalan gerakan Islam politik juga disebabkan segmentasi etnis dam kesukuan, manuver politik persaingan pribadi bahkan korupsi, masih kuat.

Lalu, bagaimana dengan nasib gerakan Islam politik di Indonesia? Kekalahan begitu telak yang dialami partai-partai berasas, berbasis, dan bersimbol Islam dalam Pemilu 7 Juni 1999 memang masih menjadi salah satu perbincangan dan perdebatan cukup menarik hingga detik ini. Betapa tidak. Hipotesis yang dikembangkan sementara kaum elit politik Islam bahwa "Islam politik akan meraih kemenangan jika pemilu sungguh-sungguh berlangsung secara demokratis" tidak terbukti sama sekali. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang sudah dibombardir berbagai isu primordialisme, seperti dominasi calon anggota parlemen non-Muslim atau "keharaman" wanita menjadi pemimpin, ternyata tetap tegar dan tak tergoyahkan.

Sudah banyak analisis yang dikemukakan para pakar politik peri-

hal keberhasilan PDI-P dan keterpurukan partai-partai berasas, berbasis, dan bersimbol Islam.Toh, tampaknya, perlu dibedakan, kendati tidak bisa dipisahkan sama sekali, antara kemenangan PDI-P dan Megawati di satu sisi dan kekalahan partai-partai lslam di sisi lain.

Pertama, suka atau tidak, PDI-P dan Megawati sudah dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap kesewenangan dan penindasan, seperti halnya gerakan Imam Khomeini dari kaum Mullah di Iran pada masa kekuasaan Syah Reza Pahlevi. Kemudian, sosok atau figur Megawati itu sendiri, yang di dalam dirinya melekat nama Soekarno, salah seorang *founding father* Republik ini. Sulit dipastikan apakah PDI-P juga akan meraih kemenangan seandainya partai itu tidak dipimpin keturunan Bung Karno.

Kedua, kekalahan partai-partai Islam kali ini tampaknya tidak lepas dari kelemahan utama partai-partai itu sendiri. Dengan kata lain, sebenarnya mereka sudah “kalah” sebelum bertanding. Sebelum pemilu berlangsung, misalnya hampir tidak ada satu pun elit politik Islam (kecuali Abdurrahman Wahid) yang merasa yakin bahwa partainya akan mampu meraih kemenangan. Sayangnya “kesadaran” terhadap kelemahan yang ada dalam diri para pemimpin partai-partai Islam itu tidak segera mereka implementasikan ke dalam langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Yang muncul ke permukaan justru sikap-sikap arogansi dan saling menghujat di media massa, yang justru membuat masyarakat awam semakin apatis dan bahkan antipati terhadap mereka.

Memang sungguh sulit dimengerti, mengapa para pemuka Islam politik tidak pernah mau belajar dari sejarah ataupun menengok pengalaman negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya. Dari berbagai pengalaman itu sebenarnya bisa dibangun sebuah hipotesis yang sangat sederhana: Jika Islam politik hanya tampil dengan satu partai, mereka belum tentu akan meraih kemenangan: jika mereka tampil dengan lebih dari satu partai, bisa dipastikan kemenangan itu tidak akan pernah mereka raih. Dalam Islam sendiri ada pesan yang sangat dikenal, yakni “kezaliman yang terorganisasi rapi akan mampu mengalahkan kebaikan yang tak terorganisasi”. Sangat mustahil jika para elit politik Islam tidak mengenal pesan itu.

Idealnya, di Indonesia hanya ada satu atau maksimal dua partai Islam; katakanlah yang satu mewakili kaum “modernis” dan yang lain mewakili kaum “tradisionalis”. Namun, yang terjadi justru muncul belasan partai politik Islam. Jangankan berfusi, berkoalisi

pun mereka enggan. "Dalam Islam, perbedaan adalah rahmat", begitulah kira-kira dalih mereka. Memang benar. Tapi, perbedaan tidak sama dengan perpecahan. Perbedaan adalah rahmat, tapi perpecahan jelas bencana. Yang terjadi dalam kancah Islam politik di masa prapemilu 1999 sangat sulit untuk tidak diakui sebagai suatu perpecahan. Apa boleh buat *ukhuwah Islamiah* (persaudaraan Islam) tampaknya masih dalam taraf retorika, yang sangat mudah diteriakkan di masjid-masjid, tapi sangat sulit d diwujudkan dalam realitas sosial-politik.

Kekalahan partai-partai Islam di Indonesia dalam Pemilu 1999 tampaknya akan menambah deretan kegagalan Islam politik di negara-negara lain, sebagaimana sudah diinventarisasi oleh Oliver Roy. Dan barangkali benar apa yang dikatakan Azyumardi Azra (Rektor IAIN Ciputat) bahwa partai Islam di Indonesia memang sangat tidak prospektif. Sebab, "elit Islam di sini membentuk partai lebih didorong semangat persaingan politik pengaruh, dan sekaligus persaingan merebut kekuasaan" (*Panji*, 23 Juni 1999). Namun, yang masih menjadi pertanyaan, akankah mereka segera berintrospeksi dan berbenah diri atau justru kembali mengulangi kesalahan yang sama? *Wallahualam*.□

Kekalahan Partai Islam

Oleh **Syaiful Mujani**

PERHITUNGAN suara perolehan pemilu masih berlangsung. Kalau angka-angka suara masuk ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara acak, sudah dapat diperkirakan bahwa partai-partai Islam akan kalah. Perolehan suara mereka tidak signifikan, rata-rata di bawah 2%, kecuali Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sekitar 10%.

Masyarakat politik di Tanah Air dengan mudah menunjuk partai-partai yang berasaskan Islam sebagai partai Islam, seperti yang Partai Keadilan (PK), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat Islam (PUI), PPP, dan sebagainya. Tapi, pengamat terkadang juga memasukkan partai-partai yang konstituennya berafiliasi dengan ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, sebagai partai Islam. Dalam pengertian ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang konstituennya mayoritas kaum *nahdliyin* dan partai Amanat Nasional (PAN) yang diperkirakan didukung mayoritas anggota Muhammadiyah adalah juga partai Islam.

Tapi, para elit PKB dan PAN tidak mendefinisikan partai mereka sebagai partai Islam. Mereka melihat bahwa politik ini tidak bisa didefinisikan secara ekslusif dan sederhana sebagai ruang pergumulan antara Islam versus non-Islam, atau politik Islam versus politik sekuler. Bahkan, lapisan elit PAN terdiri atas figur-figur yang heterogen secara sosial-keagamaan. Sementara itu, PKB merupakan pelembagaan pemikiran-pemikiran sosial-politik keagamaan Gus Dur yang dikenal sebagai figur yang mengedepankan demokrasi dan kebangsaan dalam konteks perpolitikan umat Islam di tanah air. Pesaing PKB dari kaum *nahdliyin* sendiri, seperti Partai Nahdlatul Ummat (PNU) dan Partai Kebangkitan Ummat (PKU), menyebut PKB

partai "sekuler".

Sebagian elit umat menganggap PKB dan PAN tidak mewakili aspirasi Islam. Para aktivis Islam percaya bahwa kalau pemilu berlangsung demokratis, maka partai-partai Islam akan jaya dalam meraih suara pemilih, mengingat mayoritas massa pemilih beragama Islam. Lagi-lagi, politik elektoral dibaca dengan asumsi Islam versus non-Islam.

Para aktivis partai Islam berpendapat bahwa umat Islam adalah kelompok mayoritas yang diminoritaskan, terutama secara politik dan ekonomi. Pada 1950-an dan 1960-an, orang-orang Islam yang bergabung dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dianggap abangan. Sementara, kedua partai itu dianggap tidak merepresentasikan kepentingan Islam. Di Zaman Orde Baru, Golkar yang didukung mayoritas orang-orang Islam juga dianggap tidak merepresentasikan aspirasi kelompok Islam. Pada masa reformasi sekarang partai-partai yang tidak berasaskan Islam juga dianggap tidak merepresentasikan kepentingan Islam. Inilah klaim-klaim besar para aktivis partai Islam.

Sekarang telah terbukti bahwa klaim-klaim itu tidak valid, setidaknya kalau kita bercermin pada perolehan suara dalam dua pemilu demokratis yang pernah bangsa ini laksanakan pada 1955 dan 1999. Dalam pemilu 1955 partai-partai Islam gagal meraih suara mayoritas. Dan, dalam perhitungan sementara hasil Pemilu 1999 ini, sebagian besar partai Islam memperoleh suara jauh di bawah klaim-klaim yang besar itu. Hanya PPP yang memperoleh suara cukup signifikan (sekitar 10%).

Sukses PPP dibanding partai-partai Islam lainnya terutama terletak pada tingkat sosialisasi partai ini yang sudah cukup luas karena sudah berkiprah cukup lama dalam politik kepartaian di Tanah Air. Kesempatan sosialisasi ini telah menumbuhkan apa yang disebut "identifikasi partai" *(party ID)*, yakni identifikasi diri pendukung dengan partai ini. Seorang ibu rumah tangga di Jakarta, misalnya, ketika saya tanya beberapa hari menjelang pemilu partai apa yang akan ia pilih, jawabnya, "PPP". Kenapa P3? "Karena dalam pemilu-pemilu sebelumnya saya selalu *nyoblos* PPP," jelasnya. Jadi PPP melekat di hati ibu ini, bukan karena alasan asas, figur, ataupun program-program yang dikedepankan PPP, melainkan karena sudah biasa dengan partai ini.

Sementara, partai-partai Islam lain, seperti PK, PBB, PUI dan lain-

lain, karena belum cukup tersosialisasi, sulit untuk mendapat suara signifikan. *Party-ID* belum tumbuh secara berarti untuk partai-partai ini di kalangan massa pemilih. Di samping itu, basis massa partai-partai Islam lebih bersifat simbolik, tidak real. Mereka menyebut "umat Islam " sebagai massa pendukung, padahal mereka tidak pernah mampu mendefinisikan secara real apa yang mereka maksud dengan "umat Islam".

Konsep mereka tentang "Islam" dan "umat Islam" terbatas pada *imagined* Islam, suatu Islam yang hanya dibayangkan. Sementara itu, mereka gagal menangkap dan mengapresiasi *imagined* Islam oleh elit-elit Islam lain. Sebaliknya, para pendukung PKB dan PAN, juga pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, atau bahkan Partai Rakyat Demokratik (PRD), tidak berpretensi mewakili umat Islam. Sebab, mereka sadar bahwa begitu banyak *imagined* Islam itu.

Aktivis partai Islam barangkali menganggap kekalahan partai-partai mereka dikarenakan umat Islam Indonesia tidak memahami Islam. Tapi, dengarkanlah suara seorang pemilih seperti ini: "Kami sekeluarga memperaktikkan rukun Islam: sembahyang, puasa dan membayar zakat seperti umumnya orang Islam di sini. Dan dalam pemilu kemarin, saya *nyoblos* partai Mbak Mega". Berapa besarkan pemilih berkarakteristik seperti ini? Akankah mereka dikeluarkan dari entitas umat Islam?□

Kemenangan Partai Terbuka

Oleh **Denny J. A.**

DARI perhitungan sementara hasil pemilu, ada pola yang menarik. Pemilu kali ini agaknya dimenangkan oleh partai terbuka. Empat dari lima partai teratas adalah partai yang berasaskan Pancasila (PDI Perjuangan, PKB, PAN, Golkar). Di antara lima partai teratas, hanya PPP yang menjadikan Islam sebagai asasnya. Partai berasaskan Islam yang lain berada dalam peringkat lebih rendah.

Peringkat seluruh partai yang berjumlah 48 itu masih mungkin berubah. Namun, untuk lima partai teratas tadi, dominasi mereka sulit bergeser. Ini menjadi fenomena menarik. Mengapa yang menduduki peringkat teratas adalah partai terbuka, bukan partai yang berasaskan Islam? Bukankah mayoritas pemilih (sekitar 90%) beragama Islam?

Mengapa partai yang berasaskan Islam malah menduduki peringkat lebih rendah? Padahal, seminggu sebelum pencoblosan, gerakan antipartai yang banyak calon anggota legislatif non-Muslimnya gencar dilakukan. Berbagai partai yang berasaskan Islam sudah pula merapatkan barisan, untuk menggabungkan sisa suara, dan melabel kelompok lain sebagai nasionalis sekuler.

Hasil pemilu adalah gambaran keinginan politik masyarakat Indonesia. Ada empat penyebab mengapa yang menang pemilu kali ini adalah berbagai partai terbuka.

Pertama, masih berlanjutnya apa yang disebut Geertz dengan dikotomi Islam santri dan Islam abangan. Dalam Pemilu 1955, jumlah Islam abangan itu lebih dari 50%. Jumlah ini diambil dari pemilih Islam yang tidak menyalurkan suaranya ke partai Islam.

Islam abangan adalah Islam statistik. Mereka memang beragama

formal Islam, namun tidak mempunyai aspirasi politik Islam. Secara kultural, Islam abangan bukanlah mereka yang taat dalam ritual agama. Bahkan, tak jarang, pemahaman agama bersinkretasi (bercampur) dengan agama dan kepercayaan lain. Aspirasi politik Islam, termasuk motif membangun komunitas politik Islam, tidak kuat dalam kelompok abangan. Kelompok Islam abangan ini lebih tergetar oleh partai yang berasaskan nasionalisme dan kerakyatan. Dalam pemilu kali ini, mereka yang termasuk dalam Islam abangan lebih tertarik memberikan suaranya ke partai terbuka, seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, dan PAN.

Kedua, Islam santri mengalami perubahan. Islam santri dilabelkan kepada penganut Islam yang taat secara ritual, dan digerakkan oleh sentimen keislaman. Namun, sejak Orde Baru, terjadi mobilisasi kesejahteraan ekonomi serta pendidikan. Sebagian dari mereka terekspose ke dunia global, simbol modernisasi dan ideologi dunia seperti demokrasi. Mereka sendiri mungkin menjadi motor reformasi dan pluralisme. Akibatnya, sebagian dari Islam santri ini tidak pula tergerak memberikan suara mereka ke partai yang berasaskan Islam. Apalagi jika mereka merupakan bagian dari kelas menengah kota. Mereka cenderung memberikan suaranya kepada partai terbuka, seperti PAN, Golkar, atau PKB.

Ketiga, pengaruh para tokoh Islam. Tiga tokoh Islam yang paling berpengaruh saat ini adalah Gus Dur, Amien Rais, dan Nurcholish Madjid. Gus Dur adalah pemimpin organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama. Amien Rais pernah memimpin Muhammadiyah. Setelah menjadi tokoh reformasi, ia lalu menjadi ketua partai. Sedangkan Nurcholish kini menjadi suhu dalam komunitas Islam yang pandangannya banyak didengar.

Massa Islam yang dipengaruhi ketiga tokoh itu tidak memberikan suaranya ke partai yang berasaskan Islam. Jika *takzim* ke Gus Dur, suara mereka berikan kepada PKB, partai terbuka. Jika kagum pada Amien Rais, PAN akan mereka pilih. Jika mereka terpesona oleh Nurcholish, bukan partai Islam pula yang mereka dukung. Nurcholish sejak dulu memberikan "fatwa" bahwa *"Islam, yes; Partai Islam, no"*.

Keempat, variabel terakhir adalah derasnya angin reformasi. Umumnya, kelas menengah kota dan kelas bawah mendukung partai terbuka, dengan alasan berbeda. Kelas menengah kota sudah lama diromantisasi oleh isu demokrasi, hak-hak asasi, dan reformasi.

Mereka menyadari bahwa isu itu melampaui batas dan sekat agama. Partai terbuka lebih sesuai dengan reformasi yang berlandaskan pluralisme, ketimbang partai Islam.

Sedangkan bagi kelas bawah, keterimpitan ekonomi dan ketidakpuasan atas kesejahteraan membuat mereka menjadi golongan pemarah yang antisistem. Kemarahan mereka lebih dapat ditampung oleh berbagai tokoh yang sudah telanjur dilabel reformis, seperti Megawati, Gus Dur, dan Amien Rais, yang kini menjadi pemimpin partai terbuka.

Empat variabel itu mampu menjelaskan mengapa partai yang berasaskan Islam justru tidak populer di mata pemilih yang 90% beragama Islam. Justru partai terbuka yang menikmati panen besar dalam pemilu kali ini, padahal partai itu (terutama PDI Perjuangan) mendapat serangan para ulama secara tajam.

Sebaiknya memang partai terbuka yang mendominasi pemerintahan baru. Partai terbuka adalah Indonesia dalam bentuknya yang mini. Sebagaimana Indonesia, dalam partai terbuka, seseorang tidak akan dibedakan hanya karena perbedaan warna kulit, jenis kelamin, ras, atau agama yang dipeluknya.□

Apakah Politik Islam Kalah?

Oleh **Fathi Siregar**

PEMILU 1999 yang baru lalu, mengingatkan kita pada Pemilu 1955. Sebagaimana yang diketahui Pemilu 1955 diikuti oleh berbagai partai politik. Apa yang menarik dari hasil akhir "Pesta Politik" itu adalah munculnya empat besar kekuatan politik: Nasionalis, "Islam Modernis", "Islam Tradisionalis", dan Komunis. Kekuatan politik kaum nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mendapat suara terbesar. Kekuatan Islam "Modernis" diwakili oleh Masyumi yang menduduki posisi kedua dan disusul oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada posisi ketiga. Posisi keempat, yakni kaum komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Sampai dengan lahirnya dekrit Presiden 5 Juli 1959, keempat kekuatan politik inilah yang mengharubirukan dunia politik Indonesia.

Tetapi, dalam konteks judul di atas, Pemilu 1955 ini melahirkan kejutan tersendiri. Yaitu, kenyataan bahwa Islam tidaklah menjadi pilihan politik rakyat Indonesia. Ini penting dinyatakan di sini karena sebelumnya terdapat asumsi yang hampir bersifat mitos bahwa Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, karena itu secara praktis Islam akan menjadi kekuatan politik terbesar di negeri ini. Baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, tampaknya mitos tersebut diakui, bukan saja oleh para politisi Islam, melainkan juga oleh kekuatan-kekuatan politik lainnya. Karenanya, kecuali kalangan politisi Islam, kekuatan-kekuatan politik pada waktu itu memasuki tahap-tahap Pemilu 1955 dengan rasa berdebar-debar. Sebaliknya, para politisi Islam melangkah dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan memenangkan pertarungan merebut simpati massa. Namun dalam kenyataannya, mitos tersebut hanya berhenti sebagai

mitos. Gabungan perolehan suara PNI dan PKI yang dianggap partai sekuler —ditambah dengan partai-partai "gurem" non-Islam lainnya— melebihi seluruh perolehan partai-partai Islam (Masyumi, NU, dan PSII). Untuk pertama kalinya, kalangan politisi Islam harus menerima kenyataan pahit berbedanya realitas dengan mitos yang berkembang sebelumnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kita memahami realitas politik yang dilahirkan oleh Pemilu 1955? Dalam konteks kualitatif, sifat Pemilu 1955 dan 1999 relatif hampir sama. Keduanya berlangsung dengan lebih transparan. Partai-partai politik bisa secara leluasa mengembangkan gagasannya, mengeluarkan pikirannya, dan menyerukan aspirasinya dengan bebas. Di samping mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional, penyelenggaraan Pemilu 1955 mendapatkan perhatian dari kalangan independen pada tingkat domestik. Hal yang sama juga kita saksikan pada Pemilu 1999. Di bawah pemerintahan B.J. Habibie, pemilu kali ini bukan saja berlangsung transparan, melainkan boleh dikatakan hampir tak ada campur tangan pihak TNI dan pemerintah yang bisa membuat pemilu itu cacat secara hukum maupun secara etis. Ringkasnya, hasil Pemilu 1955 dan 1999 mempunyai kualitas yang hampir sama: kebebasan berekspresi tanpa tekanan. Dengan demikian hasil "murni" tentang kekuatan-kekuatan politik dapat segera dilihat secara lebih objektif.

Toh, dalam situasi semacam ini, kita seakan-akan menyaksikan pengulangan sejarah politik. Sebagaimana dimuat dalam berbagai media massa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati tampil menjadi pemenang pertama pemilu kali ini. Kemenangan ini mengingatkan kita ke masa lalu, karena secara historis PDI-P —yang memenangkan 153 kursi DPR— bisa kita lihat sebagai warisan dari PNI. Pada anak tangga kedua kita lihat Partai Golkar pimpinan Akbar Tanjung dengan jumlah perolehan 120 kursi. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menempati urutan ketiga dengan 58 kursi yang diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 51 kursi. Selanjutnya, secara berturut-turut Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing mendapat 34 dan 18 kursi.

Dari lima partai besar pemenang Pemilu 1999 ini, partai berbasis Islam hanya dua : PPP dan PBB. Gabungan kursi mereka hanya 76. Angka ini menunjukkan bahwa kekuatan partai-partai Islam —

bahkan jika ditambah dengan perolehan Partai Keadilan (PK), Partai Masyumi, Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan lainnya yang berbasis Islam— jauh tertinggal dibandingkan dengan perolehan kursi PDI-P. Dengan demikian, secara resmi partai-partai politik berbasis Islam sesungguhnya kalah populer dengan partai-partai "sekuler" lainnya. Mengapa? Karena jangankan menghitung gabungan perolehan kursi PKB dan PAN yang tak mencantumkan Islam sebagai asasnya, hanya dengan PDI-P saja kursi parlemen yang diperoleh partai-partai Islam jauh berada di bawahnya. Ini artinya bahwa kita secara resmi menyaksikan terulangnya sejarah Pemilu 1955 ke dalam pemilu yang baru saja berlalu.

Maka, dalam perspektif label-label politik resmi, kita bisa menyaksikan bahwa Islam tetap tidak punya daya tarik dalam kancah politik di Indonesia. Persoalannya, apakah realitas ini bisa kita telan secara utuh?

Pertanyaan ini mengandung jawaban yang problematis. Dalam pengertian bahwa batas politik Islam menjadi sangat kabur dan tak definitif. Bisakah, misalnya, kita menyebut bahwa PPP dan PBB berarti lebih Islam dari Golkar? Bisakah Partai Masyumi atau PKU atau juga Partai Nahdlatul Ummat (PNU) lebih Islam dari PDI-P? Siapakah yang berhak menentukan bahwa salah satu di antara partai-partai tersebut paling Islam dari lainnya?

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, tak ada jawaban yang paling mutlak atas pertanyaan di atas. Untuk sebagian, absennya jawaban mutlak tersebut adalah karena partai-partai non-Islam belum tentu tak Islami. Kasus Partai Golkar bisa kita jadikan contoh. Kendatipun tak berasas Islam, namun telah menjadi rahasia umum bahwa hampir seluruh jajaran dan pendukung orsospol beringin ini adalah juga kalangan Islam. Bahkan, seluruh karier dan perjuangan Akbar Tanjung, Ketua Umum Partai Golkar, hampir tak terpisahkan dengan gelora keislaman Indonesia. Sebab, bukankah ia bekas Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI)? Kenyataan yang sama kita lihat pada PKB dan PAN. Betapapun ada hasrat memisahkan agama dan politik pada PKB, tak bisa disangkal bahwa elemen keislaman sangat kental terikat dengannya. Bisakah, misalnya, kita membayangkan keberadaan PKB tanpa dukungan kaum ulama dan massa *nahdliyin*? Bukankah deklarator PKB adalah tokoh-tokoh *Syuriah* dan *Tanfiddziah* NU yang merupakan "inti" kekuatan massa *nahdliyin*, komunitas Islam terbesar Indonesia?

Dalam nafas yang sama, kita juga memergoki kenyataan tak berbeda dengan PAN. Siapa pun mengetahui bahwa Ketua Umum partai "Matahari" ini adalah tokoh Islam sejati, jauh sebelum menjadi orang pertama di Muhammadiyah. Lagi pula tidak bisa kita abaikan dengan begitu saja nama-nama besar yang membidani dan mengurus partai ini: AM Fatwa, M Dawam Rahardjo, Taufik Abdullah, dan tokoh-tokoh lainnya. Semua mereka ini adalah para pejuang Islam. Bahkan AM Fatwa harus mengorbankan dirinya "terpasung" dan tersiksa secara fisik dalam memperjuangkan Islam di masa Orde Baru. Lagi pula, kita mendapatkan kenyataan bahwa dukungan terbesar PAN berasal dari massa Muhammadiyah, organisasi sosial Islam terbesar kedua di tanah air. Dengan melihat ini, dapatkah PAN kita nyatakan bukan partai yang bersifat Islami?

Maka, lepas dari perhitungan politik praktis —dalam arti terdapatnya kecenderungan koalisi antarpartai berbasis Islam dengan tak berbasis Islam— secara substansial sesungguhnya hasil Pemilu 1999 bukanlah pengulangan sejarah Pemilu 1955. Sebab, aktor-aktor politik dan konstituen partai-partai utama pemenang Pemilu 1999 pada dasarnya berlatar belakang santri dalam pengertian yang sebenarnya. Dengan hanya secuil pengecualian, gabungan suara yang diperoleh PPP, PAN, PKB, Partai Golkar, PBB, dan PK secara praktis mengungguli PDI-P, partai yang secara kasatmata bersifat sekuler-nasionalis —kendati harus diakui mendapat simpati dari massa Islam.

Apa yang ingin dikemukakan dengan tinjauan ini adalah bahwa tak ada alasan sedikit pun untuk bersikap tak optimis tentang perkembangan Islam dan politik di Indonesia. Bahwa, bukan saja pengulangan kekalahan politik Islam pada Pemilu 1955 bisa dielakkan, melainkan juga telah terjadi verifikasi tokoh-tokoh dan aktor-aktor politik Islam ke dalam barisan utama politik nasional, walau tak berlabel Islam. Di dalam beberapa hal, inilah yang antara lain dicita-citakan intelektual Nurcholish Madjid di masa lalu. Bahwa, Islam harus meresap ke berbagai bidang kehidupan dan berbagai kekuatan politik tanpa harus terikat dengan cap-cap keresmian. Maka, secara kualitatif, bisalah dikatakan bahwa politik Islam justru kian berkembang dalam era reformasi dewasa ini.□

Stembus Accoord “Malaikat” Penyelamat Partai Islam

Oleh **Husin M. Al-Banjari**

BAGI delapan parpol Islam, *stembus accord* dalam Pemilu 1999 bukan sekadar wujud kebersamaan, melainkan lebih sebagai “malaikat penyelamat”; pertolongan “luar” yang tidak pernah terbayangkan akan memberikan manfaat politik yang signifikan.

Keandalan konsep “amal bersama lebih baik daripada amal pribadi” ternyata efektif juga dalam politik. Sejumlah 40 kursi DPR dari hasil *stembus accoord* partai Islam adalah penyelamatan politik yang tidak bisa dianggap remeh.

Hartono Mardjono dalam analisisnya, (*Republika*; 29/5) yang mengaitkan secara integralistik dampak politik dan dampak keagamaan *stembus accoord*. "*Stembus accord* partai-partai Islam itu juga memiliki makna lebih mendalam, baik *duniawiyah* maupun *ukhrawiyah*,” tegasnya.

Menurut Hartono, dampak politik-keagamaan *stembus accoord* ada empat. (1) Meminimialisasi terjadinya kemubaziran sisa suara. Dengan *stembus accoord* ada kemungkinan malah menambah jatah kursi. (2) *stembus accoord* sendiri sebenarnya sudah merupakan bukti solidaritas antarpartai Islam. (3) Memanfaatkan wewenang partai untuk memilih figur pemersatu untuk mewakili kursi *stembus accoord* sehingga proses *wihdatul ummah* (satu umat) bisa lebih mudah dijembatani. (4) Lebih jauh bisa mewujudkan fraksi Islam di lembaga legislatif.

Ketika analisis itu diturunkan Hartono belum memiliki bayangan berapa “hasil” kursi yang diperoleh dengan *stembus accoord* itu. Mungkin partai Islam sendiri saat itu tidak pernah mengira bahwa

stembus accoord itu akan menghasilkan 40 kursi.

Bobot Manajerial Politik

Partai Islam secara sendiri-sendiri, jika yang diukur adalah perolehan suara, memang kalah dalam Pemilu 1999, namun menang dalam berjamaah. Suara-suara sisa yang sebenarnya sudah hangus justru menghidupkan kembali nyali umat Islam. Tidak banyak disadari bahwa hal ini memiliki bobot politis yang luar biasa bagi perpolitikan di Indonesia, khususnya partai Islam. Bukan mustahil di masa depan model *stembus accoord* yang dipertontonkan partai Islam pada pemilu 1999 akan menjadi model bagi partai-partai lain pada pemilu mendatang.

Dilihat dari segi bobot manajerial-politik, partai Islam-lah yang paling memberikan harapan. Di bawah ini beberapa alasan sekaligus harapan untuk itu.

Pertama, kerapian organisasi. Partai Islam terlihat cukup sigap ketika *stembus accoord* yang mereka buat, selain sah diakui oleh KPU, juga termasuk dini dalam melakukannya (ditandatangani 28 Mei 1999). Artinya, dari segi manajemen dan kepahaman terhadap mekanisme berpartai-politik, partai-partai Islam bisa dinilai memiliki kemampuan lebih. Penilaian "kemampuan lebih" ini didasarkan pada kenyataan bahwa dari lima *stembus accoord* yang diajukan partai-partai kepada KPU, hanya dua yang sah dan disetujui. Alasan tidak diterimanya jelas, seperti kekurangan administrasi dan terlambat (meski sudah diulur-ulur hingga 4 Juni). Di sinilah nilai-nilai kerapian dan kepahaman berbicara.

Kesan kerapian manajerial ini juga terihat ketika penyelesaian soal DCS dan DCT. Mereka lebih rapi dan tampak termotivasi dan taat hukum. Tidak terjadi kesan-kesan kurang *fair* seperti "jual kucing dalam karung" atau kesan sengaja mengulur-ulur waktu. Dalam batas-batas toleransi tertentu, cara-cara kampanye mereka pun relatif lebih "berbudaya" dan *genial*.

Dalam konteks ini, partai Islam boleh di bilang menang. Ini modal penting. Partai yang rapi dan taat hukum akan menjadi andalan di masa depan, yaitu ketika massa sadar dan mengerti partai apa yang harus dipilihnya dalam pemilu. Dengan pendidikan politik yang cukup intensif di era reformasi ini, bukan mustahil harapan Prof. Syafii Maarif tentang kondisi pemilih pada Pemilu 2004 yang memiliki *furqon* (kemampuan memilah dan memilih) akan tercapai.

Kedua, *stembus accoord* ini tidak syah lagi menaikkan bobot wibawa politik umat Islam. *Stembus accoord* berbeda secara substansi dari sekadar komunike. Pernyataan "sisa kekuatan" sendiri sudah berhasil diubah menjadi "kekuatan bukan sisa". Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sebenarnya cita-cita *wihdatul ummah* itu sudah lama bersemayam di dada masyarakat Muslim. Di antara suara-suara mereka sudah terdengar amat gusar mengkritik banyaknya partai Islam. *Stembus accoord* adalah satu wujud harapan umat itu.

Pengalaman sukses umat Islam dalam menggalang kebersamaan, khususnya melalui *stembus accoord*, ini diperkirakan akan diperhitungkan dengan cermat oleh rival politik partai Islam di lembaga legislatif. Persaingan asal sehat dibutuhkan dalam demokrasi. Dalam perspektif ini, solidnya partai Islam membuka sebuah harapan baru bagi masa depan bangsa Indonesia. Hanya partai yang berbobot yang memiliki peluang dan kiprah nyata bagi masa depan bangsa.

Ketiga, menggapai terwujudnya *wihdatul ummah*. Mungkin, di antara umat masih juga belum puas dengan "sekadar" *stembus accoord*. Mereka ingin persatuan umat itu terwujud dalam bentuk satu partai atau setidak-tidaknya satu fraksi Islam di lembaga legislatif. Cita-cita itu tampaknya sedang dalam perjalanan.

Keempat, umat bisa memainkan peran oposisi. Harus buru-buru dicatat, oposisi yang dimaksudkan bukan semata-mata dalam pengertian demokrasi (Barat), tapi lebih merupakan terjemahan bebas dari gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* (mendorong yang baik dan melarang yang buruk). Karena itu, fungsi utamanya lebih sebagai kekuatan *check and balance*.□

Kemenangan Mega Bukan Kekalahan Islam

Wawancara **Dr. Moeslim Abdurrahman**

CUMA sedikit sosok seperti **Dr. Moeslim Abdurrahman**: Cendekiawan yang besar dalam tradisi Muhammadiyah tapi sangat akrab dengan corak pemikiran NU. Konon, cuma ada dua sosok yang seperti itu —dia dan kolumnis Mohamad Sobary. Dua pekan lalu, Moeslim terlihat mengggandeng tangan Gus Dur, menemui Presiden Habibie di rumahnya, Jl Patra Kuningan, untuk sarapan pagi. Di tengah-tengah gonjang ganjing politik kekuasaan menjelang SU MPR ini, Moeslim yang selama ini dikenal sebagai tokoh LSM, bersama kandidat presiden PKB, bertandang ke rumah calon presiden dari Golkar?

Padahal, selama kampanye lalu, Moeslim cukup sibuk ke daerah-daerah untuk berkampanye untuk PAN. Maklum, dia salah seorang ketua. Dan, ketika penghitungan tengah berlangsung, pada saat kelompok Islam mengkhawatirkan kemenangan PDI Megawati, Moeslim bersuara, "Kemenangan Mega bukan Kekalahan Islam." Kepada wartawan *Panji* yang mewawancarainya, Moeslim mengungkapkan pandangannya seputar kemenangan PDI-P dan kekalahan parpol Islam. Berikut hasil wawancaranya:

Apa komentar Anda tentang kekalahan Partai-partai Islam? Bukankah itu di luar dugaan sebelumnya yang menunjukkan bahwa seolah-olah massa Islam cukup besar dan pengerahan massa terjadi di mana-mana?

Itu menunjukkan bahwa selama ini, PBB misalnya, mereka memang bukan *mainstream*. Terlepas orang mau mengakui atau tidak —

bahwa PKB itu NU dan PAN itu Muhammadiyah— yang jelas, hasil pemilu ini menunjukkan siapa yang *mainstream* di Indonesia. Tetap saja NU dan Muhammadiyah.

NU-Muhammadiyah *mainstream*, tapi kalau dibandingkan dengan PDI Mega, mereka kok tetap lebih kecil?

PDI Mega beruntung karena terjadi kristalisasi di mana-mana. Bahkan, meski semua partai berbau Islam digabung —PPP, PKB, PAN, PBB, PK— mereka masih kalah dibanding PDI-Mega.

Tapi jangan lupa menyertakan golkar, dong. Golkar juga berbasis Islam, kan? Coba lihat seperti Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, semua itu kan Islam. Dan lihat saja persentase Islam dalam kepengurusan Golkar, mayoritas, kan. Akbar Tanjung itu apa, kalau bukan Islam?

Fenomena Golkar adalah fenomena yang menunjukkan bahwa selama ini sebagian besar dari kelompok modernis Islam sudah merangkak di birokrasi. Mereka sudah lama terserap ke sana dan menjadi tulang punggungnya Golkar.

Jadi, tidak relevan mengatakan bahwa ini kekalahan politik Islam?

Nggak bisa. Islam sudah di mana-mana, kok.

Tapi, buktinya beberapa kalangan masih terus mempertanyakan, kok caleg-caleg PDI mayoritas non-Muslim?

Ya, karena itu kan jadinya seperti melawan kenyataan sosiologis. Kok daerah berpenduduk mayoritas Islam, tiba-tiba muncul banyak caleg yang non-Islam. Ya, dengan sendirinya, toh, orang-orang itu ribut. Cuma lucunya sekarang ini, kok yang mempertanyakan itu justru orang-orang yang tidak nyoblos PDI Mega. Ya, ndak benar toh, kalau mereka ribut sementara yang nyoblos tenang-tenang saja. Kalau yang nyoblos itu merasa tidak terima, ya baru pas. Kenapa tidak? Tapi sekarang ini kan bukan. Jadi, kesannya agama cuma di-*politicking*.

Lalu, bagaimana Anda melihat sikap para ulama yang khawatir bahwa saat ini politik Islam sedang kalah?

Ah, ulama-ualam itu kan, kadang-kadang, nggak bisa menghitung politik. Artinya, mereka sering salah membaca politik real. Menurut saya, lebih bagus Islam di mana-mana, dan lembaga seperti

MUI jangan naif begitu berbicara tentang politik Islam. Pada akhirnya lembaga itu kan menjadi partisan.

Anda tidak setuju isu agama dibawa-bawa dalam dunia politik?
Sebenarnya sah-sah saja orang memakai simbol-simbol agama untuk kepentingan politiknya. Asal jangan terjadi, "O, dia orang kafir!" hanya karena beda sikap politik. Itu yang tidak boleh.

Jadi menurut Anda masih mungkin mengeksploitasi agama dalam politik?
Lho, setiap orang kan punya kewajiban. Seperti yang Anda lihat. Masih ada kan yang mempersoalkan pencalonan Mega karena alasan gender. Itu, kalau dirut-urut, sebenarnya memang ada kitabnya. Sebaliknya, orang yang tidak mempersoalkan gender Mega, diurut-urut juga ada kitabnya. Ya sudah, dibuka saja, memangnya kenapa? Biarkan diskursus itu berkembang dan biarkan masyarakat yang menilai.

Sama dengan dulu, ada perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya negara Islam. Satu kelompok menyatakan perlu, sementara yang lain berpendapat tidak. Masalah itu dilemparkan ke tengah publik, toh akhirnya berakhir juga. Jadi, asal perdebatan itu berjalan tidak dalam teror, tidak dalam kekerasan, menurut saya sah-sah saja.

Karena menyangkut keyakinan agama, biasanya perdebatannya akan meruncing.
Lha, bagaimana lagi, itu memang bagian dari keyakinan agama mereka. Kok mau dihalang-halangi. Dan orang Islam, masa tidak boleh mengartikulasikan gagasan politiknya melalui bahasa keimanannya. Harus boleh, dong.

Kalau dipakai untuk *politicking*, untuk menjegal lawan?
Silahkan masyarakat yang menilai, apakah *politicking* atau tidak. Yang penting bahwa ada proses pembelajaran masyarakat dari perdebatan itu. Dan itu harus berjalan secara demokratis saja.

Ada kesan, usai pemilu Umat Islam jutru sibuk sendiri. Terakhir, para ulama NU di Rembang dan ulama MUI saling bantah lewat pernyataan. Fenomena apa ini?
Ini hanyalah indikasi bahwa masyarakat yang sedang memperoleh kebebasan untuk mengekspresikan sikap politik mereka ke tengah publik. Dulu kan banyak sekali larangan. Ini nggak boleh, Itu

nggak boleh. Mau khutbah saja harus pakai ijin dulu. Sekarang sudah tidak begitu.

Jadi, ini baik-baik saja. Seruan Rembang itu, misalnya, adalah cerminan sikap ulama NU yang selama ini merasa bahwa MUI itu tidak merepresentasikan aspirasi mereka. Menariknya, perdebatan itu terjadi di publik.

Jadi, ini bukan bagian dari kepanikan sebagian elit Islam terhadap hasil pemilu? Bahwa mereka ternyata kalah?

Ya, ndak, dong. Sebelumnya, menjelang pemilu masyarakat kan sudah diberi kesempatan seluas-luasnya. Yang mau bikin partai, ya bikinlah. Maka bermunculanlah puluhan partai Islam. Walaupun ternyata pada kalah, toh tetap positif karena mereka sudah diberi kesempatan untuk untuk melakukan ekspresi sebebas-bebasnya. Kebebasan itu lalu berlanjut sampai sekarang.

Tentang perolehan suara PAN yang di luar dugaan, menurut Anda apa penyebabnya?

Ya, partai seratus hari, Mas. Tapi PAN bisa meraih seperti yang sekarang ini pun, menurut saya, sudah luar biasa. Pertama, karena sentimen sosial masih tinggi. Ketika dibicarakan di seminar sih gampang, *platform* PAN lebih unggul dan sebagainya. Tapi kan ada keputusan-keputusan yang ternyata orang tidak gampang meninggalkan sentimen primordialnya. Ada yang ketika akan mencoblos tiba-tiba ingat kakeknya yang dulu masuk partai tertentu. Ini kan repot. Terus, orang Muhammadiyah kan sudah pada masuk ke Golkar, birokrasi, dan sebagainya. Kedua, orang Muhammadiyah itu sendiri sebenarnya belum jelas berapa jumlahnya. Pemilu kan hitung kepala, bukan adu isi kepala.

Dibanding figur Amien Rais yang sedemikian menonjol, kok rasanya nggak imbang dengan perolehan PAN?

Ya, kurang apa tegasnya, kurang apa terbukanya Amien itu, sampai orang menilai, mana ada tokoh Islam yang belajar lebih banyak untuk terbuka dibanding Amien Rais. Tapi, ya, perolehannya cuma segitu saja.

Sama halnya jika Anda terbiasa makan di warteg, kini diajak makan hamburger. Anda tahu hamburger itu lebih higienis dan lebih bergengsi. Tapi toh Anda tetap ingin makan di warteg. Nah, keputusan-keputusan politik kita memang masaih seperti itu, masih ba-

gian dari soal makan.

Karena PAN terlalu mewah?
Ya, mewah dalam arti elitis.

PKB juga mencoba untuk mewah?
Lho, PKB itu kan mewahnya cuma di Jakarta. Di daerah, semuanya tergantung kepada mulut kiai. Tanpa melihat yang di atas apapun, kalau kiainya ngomong A, ya A. Sentimen *leaders* dan *followers* dalam PKB kan tinggi sekali.

Kenapa PAN tidak punya jaringan seperti PKB?
Belum sempat. PKB kan ditunjang oleh jaringan subkultur pesantren yang sudah ada selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Sampai sekarang, sentimen subkultur pesantren itu tetap hidup dan kuat. Buktinya, meskipun Gus Dur sudah ngomong kasar bahwa PKB itu telur dan partai dari NU lainnya itu tahi ayam, toh Gus Dur tetap didukung habis-habisan. Ini menunjukkan pengaruh dia tidak bisa digoyang.

Tapi, perolehan PKB sendiri sebenarnya jauh dari yang diharapkan. Anggotanya disebut-sebut 35 juta orang, tapi perolehan suaranya kan tidak sebanyak itu?
Ya itu tadi, Slamet Effendi Yusuf yang NU ada di Golkar, juga adik Gus Dur sendiri. Bahkan *grass root* PDI Mega pun juga santri.

Bukan abangan seperti yang disebutkan banyak orang?
Abangan dalam politik, mungkin ya. Tapi secara kultur, mereka sudah tidak terlalu disekat lagi dengan mushala, sudah sembahyang, dan macam-macam. Abangan dulu dengan sekarang beda. Semangat nasionalisme mereka terpelihara untuk menjaga pilar abangan dalam politik.□

Mega Boleh Menang, tapi.....

Wawancara **Hartono Mardjono**

KEKALAHAN partai-partai Islam di satu pihak dan kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara signifikan di lain pihak, di mata Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Hartono Mardjono lebih bersifat insidental. Kemenangan ini karena efek psikologi massa, hal yang pada situasi normal takkan memperoleh dukungan seperti sekarang. Mencermati kecenderungan politik PDI-P, terutama ketidaktegasannya dalam memenuhi tuntutan reformasi, PBB siap menjadi oposisi bila Megawati maju sebagai presiden. Berikut penuturannya kepada *Panji Masyarakat*.

Menurut Anda, mengapa banyak parpol Islam kalah pada pemilu 1999?

Ibarat kompetisi lari, parpol Islam kan baru mendapat kesempatan beberapa bulan. *Pertama*, selama ini, partai Islam terkuat kan Masyumi. Tapi selama 39 tahun *sunset*. Sementara PDI-P selama orde baru eksis terus. *Kedua*, pemerintahan Orde Baru juga tidak membudayakan pendidikan politik sehingga rakyat sebetulnya tidak pernah mengenyam pendidikan politik. *Ketiga*, sejarah perjuangan bangsa ini, terutama dalam menjaga bangsa dan negara selama Orla dan Orba, kan terhapus total.

Karena itukah, sebenarnya, Islam politik saat ini dalam kondisi lemah?

Banyak istilah dihambur-hamburkan seperti itu. Saya tidak mengerti jika ada orang yang memisahkan Islam politik dan Islam budaya. Menurut saya, Masyumi itu juga berbudaya.

Tapi, mengapa seolah-olah partai politik Islam saat ini tidak

mengundang minat rakyat?

Bagaimana bisa dibandingkan, partai politik yang sejak sebelum Orla hingga Orba seperti PNI, diakui eksistensinya sementara Masyumi dibabat.

Jadi, dalam pemilu kali ini PBB baru menggali kembali memori sejarah yang makin kabur dari pengikutnya?

Itu salah satunya. Ibaratnya anak yang baru lahir 6 bulan, diadu balapan lari dengan orang yang sudah berusia empat puluh tahun. Ya nggak seimbang dong. Tapi, meskipun baru berusia enam bulan kurang satu hari, PBB bisa berdiri di 27 propinsi dengan 328 pengurus daerah tingkat II. Tanpa latar belakang sejarah yang kuat, hal ini susah dicapai. Memang, untuk memenangkan pemilu dalam waktu sesingkat itu, berat melawan Golkar dan PNI yang kemudian berwujud PDI. Mereka *kan* tetap eksis selama 32 tahun.

Penggembosan suara partai Islam di antaranya karena banyak lahir partai Islam. Menurut Anda?

Dengan minimnya perolehan suara oleh parpol Islam lainnya, jelas sekarang PBB adalah kekuatan penerus dari *grand ideas* Masyumi di antara keluarga Bulan Bintang lainnya. Meski demikian, saya bisa memaklumi jika di antara mereka sama-sama berijtihad melahirkan parpol baru.

Apa itu bukan eforia reformasi?

Bisa juga. Begitu ada kebebasan, mereka langsung mengekspresikannya.

Apa lantaran tidak ada figur yang kharismatik sehingga partai Islam tidak mendapat dukungan yang signifikan?

Oh, bukan. Itu semua punya hikmah. Jika ada pun, dalam waktu singkat mengikuti pemilu juga susah. Hasil saat ini sudah merupakan prestasi. Di sisi lain, jika kita lihat partai pemenang, PDI-P misalnya, partai ini menang karena mendapatkan simpati. Bukan karena program atau ideologinya, melainkan karena teraniaya dalam pada masa Orba.

Ketika itu, apakah partai-partai Islam tidak menyadari bahwa untuk mendapatkan suara besar harus merebut simpati rakyat?

Andaikata pemilu dilakukan sepuluh tahun lalu, saya yakin partai Islam yang menang karena saat itu partai Islam teraniaya. Bagai-

manapun, psikologi massa akan simpatik pada kelompok yang teraniaya. Saya yakin yang memilih PDI-P sekarang bersifat temporer di tengah situasi yang tidak jelas. Sementara orang benci setengah mati pada Orde Baru, maka PDI-P menjadi smbol perlawanan pada awal reformasi hingga pemilu.

Dan sebagian besar suara umat Islam terbawa ke sana?

Yang memilih PDI-P sebenarnya semata eforia saja, terutama generasi muda yang sebenarnya tadinya apolitis.

Menurut Anda, format poltik Islam pascapemilu sebaiknya seperti apa?

Saya kira belum perlu mengubah format. Kalau kita diberi waktu, kita melewati angka 2%, saya yakin lima tahun ke depan akan lain.

Benarkah visi politik umat Islam saat ini tidak berpihak kepada partai Islam?

Tidak benar. Ini situasi temporer. Dalam situasi normal saya yakin hasilnya akan berbeda. Massa Islam akan kembali ke partai Islam.

Jika nanti Mega berkuasa, bagaimana sikap partai Islam?

Keberhasilan dia untuk tampil saja saya kira susah karena dia tidak mencapai *single mayority*. Koalisi dengan PKB saya kira berat karena harus menghadapi oposisi kiai-kiai di NU. Dengan Golkar-pun juga tidak mungkin karena mereka musuh bebuyutan. Dengan PAN, Amien Rais sudah bilang *no way*. Kalau PDI-P tetap memforsir Megawati jadi presiden, apa programnya? Yang jelas, dia anti amandemen UUD 1945. Dilihat dari kriteria reformis atau tidak saja, dia sudah gugur. Belum lagi keengganan mencabut Dwifungsi ABRI dan pemenuhan tuntutan rakyat untuk mengadili Soeharto.□

Partai Islam Tidak Prospektif

Wawancara **Azyumardi Azra**

KELAMBANAN perhitungan suara menimbulkan protes dan kekecewaan dari partai-partai peserta pemilu. Namun, bagi partai-partai Islam, itu hanyalah bagian kecil dari kekecewaan yang mereka rasakan. Kekecewaan yang jauh lebih besar adalah keterpurukan mereka dalam perolehan suara, jauh di bawah PDI Perjuangan yang tergolong partai sekuler nasionalis. Megawati yang selalu dikritik tidak reformis, tidak punya komitmen ke-Islaman, bahkan tidak cerdas, ternyata berhasil membuktikan diri sebagai tokoh yang paling dipilih rakyat —justru pada pemilu era reformasi, di negara yang 87% penduduknya Muslim dan di kala Islam sedang naik daun.

Apa yang sedang terjadi dalam dunia politik Indonesia? Kekalahan Parpol Islam itu akankah kembali meminggirkan partisipasi Islam di pentas politik. Bagaimana sebenarnya politik Islam diperjuangkan? **Prof. Dr. Azyumardi Azra**, ahli sejarah Islam dan juga pengamat di bidang gerakan ke-Islaman, mengamati fenomena itu secara rinci. Berikut hasil wawancaranya dengan redaktur khusus *Panji*, Ulil Abshar-Abdalla:

Penghitungan suara masih berlangsung, tapi sudah bisa diperkirakan bahwa partai-partai berasaskan Islam tidak memperoleh suara yang signifikan. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini?

Formalisme politik Islam- lewat pendirian Parpol yang secara tegas memakai simbol-simbol Islam- sejak dulu, 1955, memang tidak begitu prospektif. Partai-partai semacam itu sangat sulit untuk menjadi kekuatan yang betul betul signifikan dan menentukan. Mengapa? Ini berkaitan dengan sosiologi masyarakat Muslim Indonesia yang bercorak tidak terlalu menekankan formalisme atau sim-

bolisme keagamaan. Proses perkembangan Islam di Indonesia, kalau kita pakai kerangka Taufik Abdullah, adalah proses konflik dan akomodasi. Tapi dalam prosesnya yang lebih lanjut, yang lebih banyak terjadi sebetulnya adalah akomodasi dengan kekuatan-kekuatan lokal ataupun kekuatan-kekuatan Islam yang sudah mengalami indigenisasi (asimilasi dengan unsur lokal). Itulah yang sering terjadi.

Akhirnya, Islam sebagai identitas politik tidak meyakinkan?

Tidak meyakinkan. Jadi, dalam konteks Indonesia, jangan terlalu berharap formalisme Islam bisa tampil sebagai sebuah kekuatan politik yang betul-betul kuat seperti *Ikhwanul Muslimin* di Mesir. Kita bisa lihat dalam perjalanan sejarah, gerakan-gerakan yang menekankan pada formalisme Islam, misalnya gerakan Padri di Minangkabau pada akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19, cenderung tidak populer. Dia menghadapi semacam oposisi dari masyarakat Muslim sendiri. Dalam batas tertentu, hal semacam itu juga dihadapi oleh Muhammadiyah.

Itu yang membuat Muhammadiyah mengalami indigenisasi ?

Mengalami indigenisasi juga agar bisa berkembang. Lain halnya dengan NU, tentu saja, yang sejak awal sudah diwarnai dengan corak ke-Indonesiaan yang kental. Ringkasnya, melihat perjalanan historis sosiologis Islam seperti itu, saya melihat peluang partai-partai yang eksplisit Islam itu memang agak sulit untuk menjadi kekuatan yang betul-betul signifikan.

Tapi, sekarang ini muncul kelompok kecil di kota-kota besar yang mencoba membangkitkan kembali Islam sebagai identitas politik, seperti Partai Keadilan. Menurut saya, ini semacam terobosan juga. Bagaimana Anda melihatnya?

Partai Keadilan sebenarnya mempunya corak yang relatif sama dengan Muhammadiyah. Semangatnya juga semangat *salafi*, semangat reformisme Islam, pemurnian Islam, atau dalam istilah mereka, kembali kepada Islam yang *kaffah*. Tapi ada bedanya, bahwa Muhammadiyah telah mengalami proses indigenisasi, sementara PK —atau katakanlah kelompok yang mendukungnya seperti berbagai *harakah, usrah*, rohis (rohani Islam) di kampus-kampus— baru dalam tahap yang paling awal. Yang membedakannya dengan Muhammadiyah adalah keyakinan mereka bahwa Islam sebagai sebuah identitas politik formal merupakan sebuah alternatif yang sangat *viable*.

Alasannya, mereka melihat pengalaman Iran sebagai sebuah model bagi keberhasilan sistem politik Islam atau viabilitas sistem politik Islam. Meskipun, tentu saja, mereka lupa bahwa Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di Iran. Islam di Iran bercorak Syi'ah sehingga ada hegemoni makna yang dipegang oleh satu kepemimpinan yang sentral, sementara di Indonesia kan tidak.

Dibandingkan dengan pemilu 1955, pada pemilu sekarang ini jumlah partai yang secara jelas-jelas mengambil Islam sebagai simbol jauh lebih banyak.

Saya melihat kemunculan banyak partai sekarang ini disebabkan persoalan kekuasaan saja, bukan persoalan *khilafiyah* atau *furu'iyah*. Islam di Indonesia kalau kita mau sederhanakan, kan hanya terdiri dari dua sayap, yaitu yang biasa disebut tradisionalis dan yang kedua biasa disebut modernis reformis. Nah, sekarang ini kan kaum tradisionalis sendiri terpecah-pecah, begitupun kaum modernis. Ada beberapa partai di tubuh NU dan ada beberapa partai di kalangan reformis modernis.

Kenapa begitu banyak partai di kalangan yang sama, menurut saya, karena banyak sekali yang mau jadi jenderal, tapi tak ada yang mau jadi kopral. Ringkasnya, kemunculan demikian banyak partai Islam sekarang ini betul-betul karena motif politik, bukan karena motif agama.

Atau, dengan kata lain, ini akibat dari persaingan antar pribadi atau antar kelompok?

Ya. Dalam istilah Cak Nur, Egoisme politik atau provinsialisme kelompok. Saya tidak menggunakan istilah sektarianisme. Provinsialisme itu tingginya rasa kelompok dari tiap-tiap kelompok. Itulah yang terjadi di Indonesia. Elit Islam di sini membentuk partai lebih didorong oleh semangat persaingan politik, pengaruh, dan sekaligus persaingan merebut kekuasaan.

Kesimpulannya, melihat peta politik semacam ini, hampir mustahil kita bicara mengenai kekuatan Islam yang besar dan menentukan?

Saya kira, ya. Secara sosiologis dan historis, juga eksperimen yang lalu, itu jelas tidak mungkin. Apalagi kemudian belum ada satu presiden, contoh atau model yang menunjukkan keberhasilan eksperimen formalisme politik Islam. Bahkan juga tidak di Mesir. Di Malay-

sia, partai Islam, PAS, hanya menjadi partai kecil yang tidak berkembang, kecuali di negara bagian Kelantan.

Melihat kenyataan ini, sepertinya benar bahwa pendapat beberapa orang yang menyatakan bahwa Islam sebagai sumber nilai, ya, tapi Islam sebagai agenda politik memang tidak meyakinkan?

Ya, karena sampai sekarang pun masih ada persoalan konseptual mengenai hubungan Islam dengan politik Sebagian umat Islam, jumlahnya lebih kecil, percaya mengenai hubungan yang simbiotis antara agama dan politik. Ini yang memunculkan formalisme politik Islam. Sementara yang lain, lebih banyak, percaya bahwa sesungguhnya kalau Islam mau dibawa ke dalam politik, itu hanya dalam konteks nilai-nilai substantif berupa pesan-pesan universal Islam, seperti soal keadilan, soal demokrasi dan sebagainya.

Dengan latar belakang sosiologis semacam itu, bagaimana Anda melihat isu Islam dan non-Islam menjelang pemilu yang lalu? Padahal secara sosiologis kan hal itu tidak relevan?

Ya, itu karena bagaimanapun juga persoalan hubungan antara Islam dan politik sampai sekarang tidak tuntas dan mungkin memang tidak akan pernah tuntas. Apalagi kalau kita lihat pandangan pakar seperti Ernest Gellner bahwa Islam adalah agama yang paling kuat resistensinya terhadap sekularisasi, sepertinya memang akan selalu muncul dalam masyarakat Islam kelompok-kelompok yang punya asumsi-asumsi semacam itu, terlepas dari realitas sosiologis yang tidak mendukung.

Kasus menjelang pemilu itu tidak main-main karena didukung MUI?

Saya melihatnya lebih karena sensitifitas politik. Walau bagaimanapun, kenyataan demografik bahwa pemeluk Islam jauh lebih banyak dibanding pemeluk agama lain sulit diingkari. Karena itu, parpol besar, siapapun juga, meskipun tidak dijadikan prinsip partai, kenyataan demografis itu tetap harus dipertimbangkan. Sistem politik manapun, kalau kita bicara demokrasi, maka itu persoalan representasi. Apalagi di Indonesia yang pemilihan parlemen atau presidennya belum secara langsung, persoalan representasi itu sangat penting. Oleh karena itulah, kalau MUI mengeluarkan seruan semacam itu, menurut saya, sah-sah saja, dilihat dari konteks demokrasi. Saya melihatnya bukan dalam pengertian polarisasi agama, anti-

Kristen atau anti non-Muslim. Ini lebih pada asas proporsionalitas. Meskipun kemudian ada implikasinya, yaitu terkait langsung dengan caleg-caleg yang kebetulan non-Muslim di tubuh PDI Perjuangan.

Berbicara mengenai prospek kekuatan-kekuatan Islam perkotaan yang mewarisi ide reformasi Islam seperti PK. Berkat kemajuan teknologi yang membuat kontak-kontak antarmereka di tingkat internasional lebih mungkin dan lebih cepat, apakah desakan indigenisasi bisa lebih dihindarkan? Mereka tidak akan terpengaruh untuk mengakomodasi unsur-unsur lokal, tapi terus menerus menjadi kekuatan yang lebih signifikan? Anda melihat kemungkinan ke arah itu?

Islam di Indonesia terlalu kompleks untuk bisa mengarah ke perkembangan itu dalam waktu yang singkat. Apalagi basis dari PK ini kan relatif terbatas, terutama di kampus-kampus umum, kelompok-kelompok pengajian yang itu juga terbatas orangnya. Jadi, kalau kita lihat lapisan kepemimpinan PK, hanya ada dua kelompok besar saja, yaitu mereka yang berasal dari pendidikan di Barat dan mereka yang berasal dari Timur Tengah.

Mahasiswa yang belajar di Barat memang cenderung terbagi dalam dua kelompok besar. *Pertama*, mereka yang menjadi lebih adaptif dan lebih apresiatif terhadap aspek-aspek tertentu dari peradaban Barat. *Kedua*, mereka yang resisten atau justru mengentalkan resistensinya terhadap peradaban Barat yang mereka anggap sebagai kebudayaan yang sedang bangkrut. Itu gejala umum pelajar Indonesia di AS, Eropa, dan sebagainya. Kelompok kedua inilah yang mencoba mengembangkan konsep atau gagasan kembali kepada Islam secara *kaffah* dalam berbagai segi termasuk juga kelembagaannya. Kelompok ini bertemu dan bersinergi dengan alumni Timur Tengah karena mereka memiliki beberapa persamaan. Yaitu, kecenderungan kuat untuk memahami Islam secara lebih apa adanya, lebih literal. Semangat ini yang menyatukan mereka. Nah, karena komposisi sosiologis masyarakat Muslim Indonesia begitu kompleks, gerakan-gerakan seperti itu hanya akan mendapatkan pengaruh di lingkungan terbatas. Bahkan, saya melihat kecenderungan, melihat proses yang dilalui gerakan-gerakan lain, mereka akan mengakomodasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik dalam kerangka-kerangka keagamaan, maupun dalam praktek-praktek keaga-

maannya, agar mereka bisa *survive*.

Kalau kondisinya semacam itu, bagaimana Anda menerjemahkan cita-cita politik Islam ke depan?

Saya menyarankan penerjemahan gagasan-gagasan politik Islam pada tingkat yang lebih substantif, lebih bermakna, dan tidak formalis. Misalnya, Islam menekankan pada keadilan, ya kita terjemahkan konsep keadilan itu ke dalam sistem politik atau sistem ekonomi. Islam menekankan sikap toleran pada agama lain, maka kita harus kembangkan itu, termasuk dengan membangun sikap respek terhadap pluralitas, dan sebagainya. Jadi, kita harus beralih mengangkat tema-tema yang sebetulnya sangat pokok dalam Islam tetapi sering dilupakan karena terlalu sibuk dengan semangat formalisme.

Atau, misalnya juga, mungkin sebagian kita telah membahas tema-tema itu, tapi kemudian hampir tidak pernah kita membangunnya menjadi sebuah kerangka yang tidak lagi hanya menjadi acuan pada tingkat konsep tapi ke tingkat yang lebih operasional.

Sepanjang pengamatan Anda, apakah cita-cita yang substantif itu tercermin pada partai-partai yang mengaku sebagai partai Islam?

Secara formal, pada sebagian mereka ada. Cuma, ya itu tadi, relatif belum di-*break-down* ke tingkat yang *workable.*

Bila PDI Perjuangan tampil sebagai pengumpul suara terbanya di pemilu kali ini, bagaimana prospek cita-cita politik Islam yang Anda sarankan tadi? Bisakah terwujud?

Kalau PDI Perjuangan betul-betul memegang kekuasaan, mungkin agak berat karena dia adalah partai yang bisa kita sebut nasionalis sekuler. Yang mungkin membawa cita-cita Islam yang substansial, menurut saya, adalah partai-partai non-agama tapi juga bukan sekuler seperti PDI Perjuangan. Misalnya PAN, PKB, atau Golkar.

Saya mengkategorikan partai menjadi tiga: partai nasionalis religius seperti PK atau Partai Krisna yang memakai agama sebagai ideologi. Kemudian partai nasionalis sekuler seperti PDI-P dan PKP. Lalu, partai abu-abu, bukan sekuler tapi juga bukan agama seperti PAN, PKB, dan Golkar. Yang terakhir inilah yang bisa membawa biali-nilai substansi Islam.

Kalau demikian, kemenangan partai nasionalis sekuler cukup "membahayakan" cita-cita politik Islam?

Tidak begitu juga. Sebab, kalau kita lihat dalam perspektif perbandingan, kelompok sekuler di Indonesia tidak akan pernah terbentuk menjadi sebuah kelompok yang solid sebagai mana yang ada di Timur Tengah. Jadi, sebetulnya, tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan dari kelompok nasionalis sekuler ini. Termasuk juga dari PDI-P. Ini kalau kita lihat dari perspektif perbandingan. Sebab, kaum sekuler di Turki atau Mesir luar biasa kuat, betul-betul *die hard* kaum sekuler, ideologinya bisa terbentuk menjadi kerangka yang sangat solid, misalnya Partai Baath di Irak dan Suriah atau Partai Kemalis di Turki.

Nah, kaum sekuler di Indonesia kan tidak pernah menjadi kelompok yang benar-benar solid, yang sepanjang waktu berhadap-hadapan dengan kelompok Islam, *head to head*. Kecuali memang dalam momen-momen tertentu karena memang ada persoalan yang memicu. Ini hal yang positif dari Pancasila. Pancasila mengakomodasikan agama, karena tidak memberikan lahan yang begitu subur bagi sekularis untuk betul-betul menjadi solid. Dan, pada saat yang sama, Pancasila yang mengakomodasikan agama ini juga tidak memberikan peluang kepada kelompok-kelompok keras atau radikal dalam agama untuk menemukan alasan yang kuat untuk menentang Pancasila.

Kalau Megawati terpilih sebagai presiden, bagaimana kira-kira respon umat Islam?

Umat Islam dalam pengertian luas —tidak hanya di parpol Islam tapi juga di Golkar, PAN, PKB dan seterusnya— menurut saya tidak akan mempersoalkan Mega dengan alasan agama. Kecuali, mungkin, secara sporadis oleh sebagian tokoh di PKB, Partai Masyumi-nya Abdullah Hehamahua, atau PK.

Penolakan terhadap Mega lebih banyak karena alasan kepemimpinan Mega masih diragukan, ientelektualitasnya rendah, dan seterusnya. Ringkasnya, penolakan yang signifikan terhadap Megawati sebenarnya bukan atas dasar agama, tapi atas dasar kapabilitas.□

Semua Orang Diberikan Hak Bermimpi

Wawancara **Mitsuo Nakamura**

SUATU ucapan yang dilihat **Mitsuo Nakamura** terbukti pada pascapemilu ini adalah ucapan Nurcholish Madjid pada tahun 70-an: *Islam yes, partai Islam no.* Ini terbukti karena rakyat lndonesia sekarang tidak lagi terpaku pada partai-partai politik berbaju Islam, melainkan motivasi dan keyakinanlah yang menuntun pilihan mereka pada Pemilu 7 Juni lalu.

Mitsuo Nakamura memang tidak asing lagi di kalangan antropolog Indonesia. Antropolog kelahiran Manchuria, 19 Oktober 1933 ini dikenal akrab dengan kelompok Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain ramah, antropolog dari Universitas Chiba, Jepang, itu mau berbaur dengan muktamirin yang hadir dalam beberapa kali muktamar NU. Apalagi, ke mana-mana selalu didampingi istrinya, Ny. Hisako Nakamura, juga antropolog yang luwes berpakaian kebaya lengkap dengan kerudung menutup kepalanya.

Bahasa Indonesia yang mulai dipelajarinya di Univesitas Cornell dan Yale, AS, sejak tahun 1966, semakin mempermudah pergaulannya dengan kalangan Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama. Walaupun diawali dengan mengamati gerakan Muhammadiyah saat menyusun disertasinya di Universitas Cornell, AS, yang belakangan dibukukan dengan judul *Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin*, studi tentang gerakan Muhammadiyah di Kotagede 1900-1970, Nakamura juga mengamati gerakan organisasi keagamaan lain, yaitu Nahdlatul Ulama. "Saya menyusun buku tentang muktamar NU di Cipasung," kata pengamat yang oleh ketua Umum PBNU dipanggil *kiai Mamat* itu. Berikut wawancaranya dengan wartawan *D&R*

seputar perkembangan Islam mutakhir di Indonesia:

Sejak Anda meninggalkan Indonesia, apakah Anda terus memonitor perkembangan umat Islam di Indonesia sampai hari ini?

Betul, dan boleh dikatakan, titik mulanya saya melakukan penelitian tarekat ini, perkembangan Islam di Indonesia ini, perhatian saya dimulai pada Muhammadiyah. Tetapi makin lama makin tertarik pada latar belakang yang lebih luas dan lebih panjang dari pada Muhammadiyah itu. Muhammadiyah *kan* baru dilahirkan pada tahun 1912. Jadi, sebelumnya ada sejarah yang panjang dalam perkembangan masyarakat Islam di Indonesia yang dimulai dengan Walisongo atau gerakan kerajaan Islam di Sumatera. Jadi, boleh dikatakan, saya meluaskan pandangan saya dari gerakan Muhammadiyah yang berdasarkan atau diberikan segenerasi pemikiran dari Muhammad Abduh, pemikir besar dari Mesir pada permulaan abad ke-2O ini ke muatan gerakan yang lebih *ahlus sunnah waljamaah*.

Jadi, yang *mainstream*-nya di Asia Tenggara, ya, Indonesia. Perhatian saya diperluas sampai mencakup NU, dan untung waktu itu mulai saya mengenal Gus Dur yang baru pulang dari Timur Tengah. Kedua kali saya datang ke Indonesia pada tahun 1975 sampai awal tahun 1977, dua tahun lagi. Pada waktu itu saya mengajar di Universitas Indonesia sebagai tenaga asing yang membantu Bapak Mochtar Buchori di Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Pada waktu itu karena saya ditempatkan di Jakarta, saya mulai bergaul dengan cendekiawan Islam seperti Nurcholish Madjid yang masih muda sekali. Dialah yang ketika itu menyatakan bahwa *Islam yes, politik no*. Gus Dur, yang ketika itu baru mulai mengajar di Tebuireng, lantas sering ke Jakarta untuk mengikuti simposium atau seminar. Dan di LP3ES, saya juga mengenal Dawam Rahardjo yang mulai membahas masalah peranan Islam dalam pembangunan, pesantren sebagai agen dari perubahan pembaruan. Untung saya mulai bergaul dengan para cendekiawan Islam itu. Justru saya merasakan saya harus memperluas pandangan saya supaya masuk ke dalam perspektif saya. Dan beruntung sekali pada tahun 1979 saya diajak oleh Gus Dur mengikuti muktamar NU yang diadakan di Semarang, saat desakan supaya NU kembali ke Kittah 1926 muncul sebagai satu gerakan di dalam NU yang diwakili oleh Gus Dur. Jadi, mulai pertengahan tahun 1970-an, saya mulai mencakup NU di dalam pandangan saya.

Perubahan apa yang Anda lihat pada umat Islam di Indonesia

sejauh ini, apakah mereka semakin sentimental atau rasional atau malah cenderung emosional?

Secara garis besar, menurut pengalaman saya, partai-partai politik dan kekuatan-kekuatan sosial keagamaan yang berasaskan Islam itu memang merasa kecewa karena hasil pemilu akhir-akhir ini. Tapi, melalui pengalaman itu —mungkin ini pandangan saya yang secara optimistis, *wishful thinking*— mudahan-mudahan mereka melihat bahwa makin lama makin kurang relevansinya unsur keagamaan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Menurut saya, yang paling penting adalah kebijakan yang tepat dan dapat mengatasi krisis-krisis. Dan dalam membantu menciptakan kebijakan dan melaksanakannya, saya rasa unsur keagamaan itu tidak begitu besar perannya. Kecuali, masalah motivasi dan akhlak itu.

Jadi, pemisahan antara agama dan politik dalam bidang penciptaan kebijakan itu agak berkurang pada hari depan. Saya rasa itu perkembangan yang sangat konstruktif supaya unsur keagamaan tidak menjadi penyebab konflik konflik sosial.

Kecenderungan perubahan umat Islam yang lebih tinggi menurut Anda ke arah mana, apakah ke arah emosional, ke arah sentimental, atau ke arah rasional itu tadi?

Saya rasa rasional dalam arti yang diutamakan itu hitung-menghitung, kalkulasi keuntungan politik. Lalu, politik itu kan *bargaining*, berdasarkan kekuatan masing masing. Jadi, harus ada kompromi atau kesepakatan untuk melakukan sesuatu bahwa tidak seperti ini, masyarakat maupun negara itu terganggu dan itu membawa kerugian terhadap semua orang. Jadi, kalkulasi rasional yang seperti itu akan menguasai keadaan. Memang pemilu ini belum baik betul, jadi masih ada unsur emosional, dan kekecewaan

Penyebabnya apa?

Saya rasa mungkin karena kebebasan berpolitik. Semua orang yang berpartisipasi dalam proses politik itu diberikan hak bermimpi, ha ha ha. Tapi, setelah pestanya selesai, mereka bangun kembali terhadap kenyataan, ha, ha, ha, ha. Saya rasa unsur emosional itu, walau pun pengamatan saya pribadi agak kecil kemarin itu, tidak menimbulkan gejolak yang berdampak luas. Kebetulan saya juga datang sebagai pemantau yang dikirim pemerintah Jepang. Ada 20 orang utusan dari pemerintah Jepang, 5 orang dari unsur pemerintah dan 15 orang dari swasta, saya termasuk yang swasta. Mereka dise-

barkan ke tiga daerah, Medan, Jakarta, dan Ujungpandang.

Menurut Anda, kekalahan partai-partai Islam di dalam pertarungan pemilu ini merupakan gejala apa?

Seperti saya katakan tadi, mereka kalah terhadap keinginan mereka sendiri, bukan kekalahan yang obyektif. Karena, partai politik yang bernapas Islam itu boleh dikatakan berambisi berpolitik kembali berdasarkan Islam. Oleh karena itu, munculnya 20 partai politik bernapaskan Islam itu menurut saya boleh dikatakan kelebihan karena bermimpi, ha, ha, ha. Tidak melihat kenyataan·

Apakah Anda melihat realitas bahwa bangsa Indonesia ini sudah tidak bisa dikebiri dengan politisasi agama seperti itu?

Saya rasa kalau kita dapat menarik suatu pelajaran, kehidupan politik di Indonesia ini menjadi lebih dewasa daripada tahun lima puluhan. Jadi masalah agama itu tidak menjadi unsur pemisah warga dengan negaranya. Memang boleh dikatakan ada kemungkinan terdapatnya keberadaan partai politik yang bernapaskan Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), tetapi nasib mereka pada hari depan bukan sebagai partai politik yang mengemukakan agama sebagai tuntunan utama, tapi mewakili umat mereka atau konstituante dasar sosial pendukung mereka. Dan yang akan diadakan itu bukan politik keagamaan, tetapi politik yang bermotivasi atau diberikan nilai agama yang kebijakannya terbentuk berdasarkan kalkulasi politik yang obyektif dan dapat bekerja sama dengan partai politik yang lain.

***Mainstream* dari partai-partai politik ini ada dua, NU dan Muhammadiyah, apakah Anda juga melihat ada perubahan pada kedua *mainstream* ini?**

Seakan begitu, mungkin karena unsur NU maupun Muhammadiyah itu masih ada di Golkar.

Munculnya Partai Keadilan itu menampilkan sosok apa dalam politik umat Islam Indonesia?

Mungkin peranan dari Partai Keadilan itu adalah suatu eksperimen dan sampai berapapa jauh eksperimen itu, saya harus melihat perkembangan selanjutnya ke depan. Sama saja, di dunia Islam, di seluruh dunia terdapat gerakan seperti PK. Ada Hamas di Palestina. Jadi, itu bukan berarti organisasi yang bersejarah panjang seperti NU dan Muhammadiyah, kurang berhasil menampungnya.

Apakah ada keinginan untuk menumbuhkan *genre* baru Islam di Indonesia, kekecewaan atas tampilnya *mainstream* Islam atau alasan apa lagi?

Tapi berdasarkan pengalaman saya, walaupun mereka sangat bergairah dan organiasinya solid-sekali, sampai berapa jauh mereka bisa memperoleh dukungan dari umat Islam, itu tanda- tanya besar. Karena referensi mereka kurang terhadap kerangka bernegara secara keseluruhan, tapi titik tolaknya selalu berdasarkan umat Islam. Jadi, di dalam ini ada semacam kontradiksi menurut saya. Kalau ingin memperoleh kemajuan atau sukes tertentu dalam kehidupan politik, *reference point* atau kerangka pemikiran titik tolaknya selalu negara dan bangsa. Bukan kepentingan-kelompok.

Melihat kejadian-kejadian seperti bentrokan antar-sesama partai Islam pada masa-masa kampanye menjelang pemilu kemarin turut mencemaskan. Apakah Anda melihat peran NU dan Muhammadiyah sebagai *mainstream* Islam di dalam membina umat sudah pudar?

Saya rasa, untuk memasuki persaingan yang sehat, benar-benar memang ada kejadian-kejadian bentrokan dan gontok-gontokan lokal itu. Tapi, para pemimpin mereka bijaksana dan dapat meredam bentrok itu. Dan kalau mereka kurang berhasil meredam bentrok itu di dalam umat Islam, apakah mereka bisa berhasil meredam konflik dengan non-Islam? Saya rasa boleh dikatakan mereka berhasil mengatasinya.

Bagaimana Anda melihat Amien Rais dan PAN-nya yang semula begitu menggebu-gebu, tapi setelah perolehan suara hasil pemilu menampilkan sosok-PAN?

Saya rasa itu namanya nasib seorang pejuang yang harus mencetuskan diri kapan dia tampil ke depan, ke tengah, dan kadang-kadang harus memutuskan harus mengundurkan diri. Itu nasib seorang pejuang. Sejak semula saya mengagumi Amien Rais, orangnya berani dan jujur. Luar biasa

Selama ini antara NU dan Muhammadiyah terkesan ada *gap* yang dalam, mengapa itu bisa terjadi?

Itu memang salah satu hal dalam sejarah. Ini tidak bisa dihilangkan. Tidak hanya sejarah kelompok, tapi sejarah keluarga, sejarah daerah, sejarah organisasi. Jadi mungkin kita tidak bisa hidup

dalam kungkungan kenyataan-kenyataan sosial yang bergenerasi itu ada di belakang kehidupannya. Jadi, itulah salah satu sebabnya. Kedua, kenyataan sosiologis yang menganggap sebagian besar masyarakat Indonesia masih berada dalam lingkungan yang solidaritas kekeluargaan dan kampung dan sebagainya di bawah pimpinan para kiai sangat ketat. Jadi, pola seperti itu dibandingkan dengan tata kehidupan perkotaan modern yang kehidupannya berdasarkan keluarga individu, individualisme yang berkuasa itu lain sekali suasananya. Saya kira, perbedaan NU dengan Muhammadiyah itu akan terus-menerus berlangsung. Dan itu wajar. Itu tidak bisa dihindari, apalagi dijadikan satu secara paksa.

Apakah Anda melihat kemungkinan antara PAN dan PKB berkoalisi?

Saya kira ada kemungkinan. Karena, itu masalah hitung-menghitung seperti saya katakan tadi. Kalau kalkulasinya dirasakan menguntungkan buat kedua pihak, maka ada kemungkinan itu terjadi. Nah, paling tidak ini bukan *zero sum game*.

Soal kemungkinan presiden wanita, sekarang masih menjadi perdebatan. Anda sendiri melihatnya bagaimana?

Menurut pendapat saya, isu atau perdebatan ini mudah-mudahan tidak jadi topik perbedaan dalam politik Indonesia ini. Kalau kenyataannya tetap begitu, saya agak khawatir bangsa Indonesia akan menjadi sasaran tertawaan dunia.

Mengapa jadi tertawaan?

Alasannya, masalah politik itu *kan* bukan masalah gender. Siapa pun yang bisa memimpin masyarakat bisa jadi pemimpin.

Mungkinkah akhirnya rakyat Indonesia akan menerima pemimpin wanita?

Masalah pemimpin itu bukan masalah perseorangan, kelompok, atau partai, atau beberapa partai berkoalisi. Tapi ini masalah kolektif. Jadi yang paling penting itu kebijakan kemampuan melakukan kebijakan yang tidak membahayakan kehidupan rakyat itu. Jadi, semakin cepat isu ini hilang, makin baik buat bangsa Indonesia.

Selama ini ada kesan bahwa Habibie itu menunggangi Islam untuk dapat mempertahankan kursi presidennya lewat beberapa organisasi Islam?

Tapi itu kan sudah dikunci menjelang tanggal 7 Juni kemarin itu. Pernyataan-pernyataan dari organisasi yang menamakan diri sebagai organisasi Islam yang menganjurkan pemilih untuk memilih caleg yang dari partai Islam itu tak ada pengaruhnya sama sekali. Kebanyakan pemilih merasakan masalah itu bukan masalah kepartaian, tapi motivasi dan keyakinan diri. Jadi pada akhirnya semboyan yang dicetuskan oleh Cak Nur, *Islam yes, politik no*, pada tahun 70-an itu saya rasa terwujud melalui pemilu ini

Di antara kedua *mainstream* Islam tadi, mana yang Anda lihat punya pengaruh yang lebih besar terhadap umat Islam?

Memang, pemilu menunjukkan, yang masih berpengaruh lebih besar adalah NU. Tapi Muhammadiyah juga cukup besar. Jangan mengangkat perolehan suara untuk membayangkan kekuatan Muhammadiyah seperti itu. Partai Persatuan Pembangunan menampung Muhammadiyah, Golkar juga begitu. Muhammadiyah itu dibagi-bagi. Itu wajar. Tak ada ketentuan politiknya harus begitu.

Kalau Mega tampil sebagai presiden, apakah kabinet yang disusunnya nanti akan bisa membawa rakyat Indonesia ini menuju masyarakat madani?

Mudah-mudahan begitu. Pengalaman pemilu yang secara garis besar sukses, ya, memberi landasan yang cukup kuat untuk menciptakan masyarkat madani. Itu langkah yang sangat besar dalam pembentukan masyarakat madani.

Yang paling krusial yang harus dilakukan Indonesia saat ini menurut Anda?

Bermusyawarah dengan baik dan dengan kepala yang dingin. Itu saja. Dan harus memikirkan kepentingan masyarakat luas. Kalau masalah politiknya tidak diselesaikan dengan cepat, nanti kehidupan material masyarakat itu belum mengambil pilihan pada keadaan lingkungan dunia yang baik. Dan negara-negara sahabat seperti Jepang siap-siap membantu Indonesia. Kalau masalah dalam rumah tangga tidak diselesaikan dengan cepat, susah teman-teman yang ingin membantu datang ke rumahnya.□
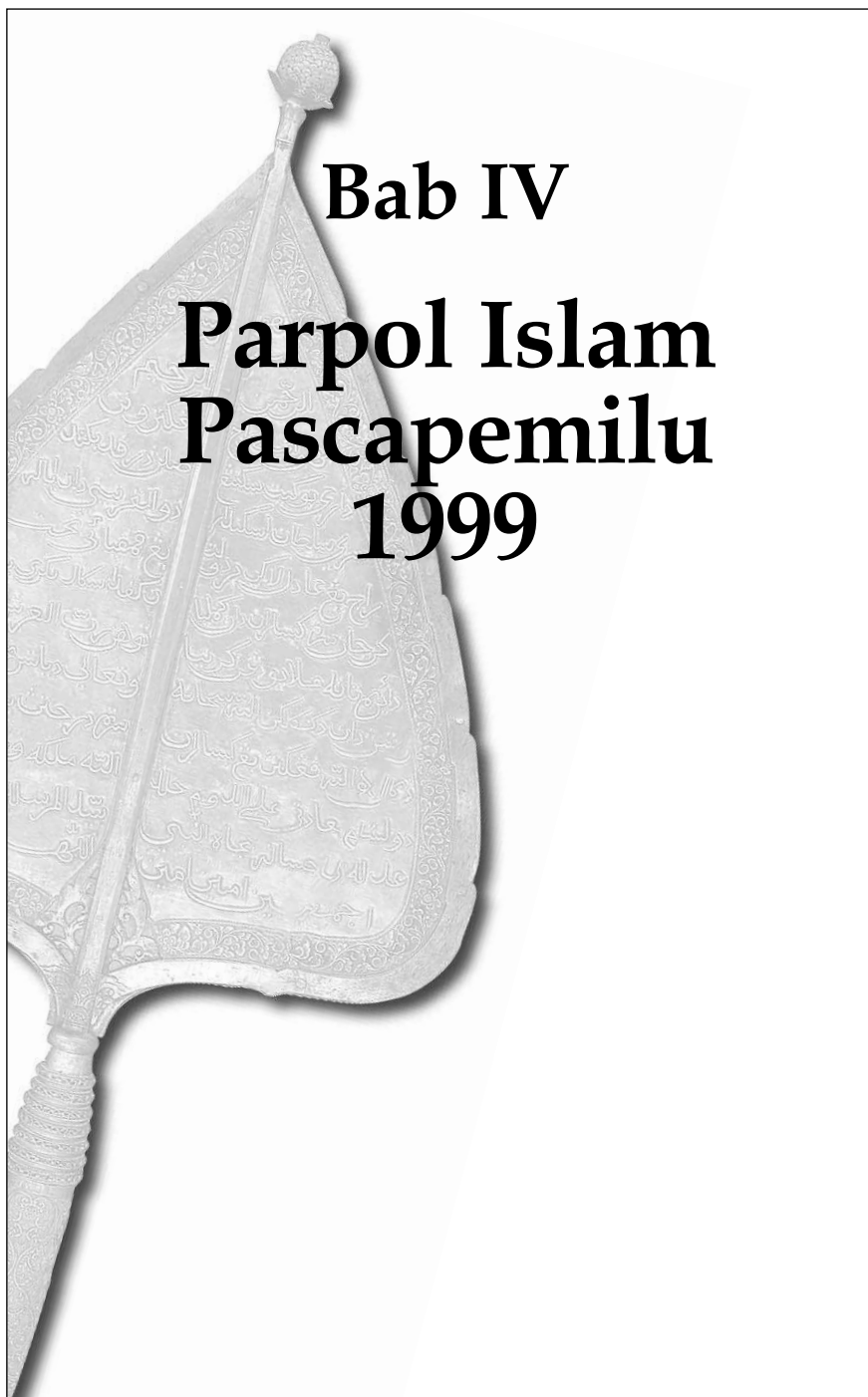
Bab IV

Parpol Islam Pascapemilu 1999

Hikmah di Balik Kekalahan Partai Islam

Oleh **Fahruddin Salim**

SELAMA era Orde Baru (Orba), percaturan Islam politik mengalami eliminasi bahkan terpinggirkan dari panggung politik. Sistem politik Orba yang sekuler telah menghilangkan peluang munculnya kekuatan Islam politik yang pernah berjaya pada era Orde Lama (Orla).

Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan dengan munculnya kembali kekuatan Islam politik pasca Orba. Pertama; lengsernya rezim Orba telah membawa banyak perubahan terutama dalam pengelolaan politik dan terbukanya ruang partisipasi politik, yang diikuti kebebasan mendirikan partai politik (parpol), termasuk parpol berlabel Islam.

Kedua; berdirinya parpol berlabel Islam bisa dipahami, karena secara empiris Indonesia memiliki basis agama yang kuat. Sementara itu, secara historis, parpol Islam pernah mewarnai sejarah kontemporer politik Indonesia.

Ketiga; kebijakan sekularisasi ideologi politik dan konvergensi ideologi selama rezim Orba, telah menyebabkan peran agama terasa diskriminatif dan cenderung menegaskan sehingga agama tersisih dari sistem politik dan tidak memiliki kesempatan membangun basis politik.

Selama pemerintahan Orba memang ada usaha untuk mengkooptasi dan mencampuri wilayah agama ke dalam politik melalui pengembangan karakteristik religius dengan memadukan gagasan dan simbol-simbol agama ke dalam wilayah publik. Tetapi perubahan posisi itu dilakukan dalam kerangka untuk melebur beberapa aspek

agama, dengan sedapat mungkin menghindari agama membangun basis kekuatannya. Bahkan agama dimanfaatkan sebagai selubung politik kekuasaan atau bahkan untuk melegitimasi kekuasaan itu sendiri.

Persoalan yang muncul sekarang ini adalah mengapa partai Islam dalam Pemilu 7 Juni 1999 lalu tidak mampu meraih suara secara meyakinkan? PPP, PBB dan PK yang merupakan representasi partai Islam, ternyata hanya mampu meraih kursi sekitar 10 persen.

Sementara PDI-P, PKB dan PAN serta Golkar yang secara ideologis tidak mencatumkan asas Islam, justru meraih suara secara meyakinkan. Apakah ini artinya partai Islam telah gagal menampilkan diri sebagai partai yang mampu memperjuangkan aspirasi umat Islam?

Secara politis, aspirasi umat Islam tidak hanya diwakili oleh partai-partai Islam. Umat Islam dari kalangan konservatif seperti NU memiliki PKB. Meskipun partai ini lintas agama, tetapi basis suara pemilihnya tetap mengandalkan massa organisasi keagamaan NU. Demikian halnya dengan PAN yang mengandalkan *mass based* dari Muhammadiyah.

Dengan adanya kekalahan partai Islam, apakah kekuatan Islam politik masih dianggap sebagai ancaman kekuatan politik sekuler? Ancaman yang dimaksud adalah kemungkinan pelembagaan agama dalam pentas politik.

Zero Sum Game

Selama ini, politik sekuler melihat kekuatan Islam politik sebagai ancaman terutama dari pelembagaan agama bagi kepentingan politik. Terutama jika agama ditarik ke dalam kepentingan politik dan berubah menjadi etatisme agama yang paralel dengan otoritarianisme negara. Demikian pula, pelembagaan agama dalam pentas politik akan mempersempit ruang gerak politik sekuler.

Persaingan politik seperti ini memang sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan demokrasi. Sebab persaingan politik lebih bersifat *zero sum game*. Artinya, siapa yang menang akan menghabisi yang kalah. Apalagi jika masing-masing kekuatan politik tidak mampu menyelaraskan pola hubungan antara negara dan masyarakat serta mengintegrasikan berbagai kelompok sosial dan politik dalam suatu sistem.

Kekalahan Islam politik (partai Islam) harus dilihat secara konstruktif, tidak emosional. Kekalahan partai Islam, tidak berarti umat

Islam kalah dan akan terpinggirkan sementara aspirasinya tidak didengarkan.

Kekalahan partai Islam hanyalah pada simbol belaka. Sementara secara substansial nilai-nilai Islam tidak mengalami demoralisasi. Perjuangan Islam sekarang ini tidak lagi diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol Islam ke permukaan. Tetapi sejauh mana nilai-nilai Islam mampu mengembangkan kehidupan yang demokrasi dan menjunjung hak asasi serta keadilan.

Kekalahan partai Islam dalam Pemilu 1999 juga bisa menjadi pelajaran berharga dan harus diambil hikmahnya. Pertama; secara empiris, simbol-simbol Islam saat ini sudah tidak lagi mampu menjadi daya tarik bagi pemilih Islam. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh seruan MUI agar umat Islam memilih wakil rakyat yang beragama Islam. Hasilnya, seruan itu tidak mampu menjadi alat politik yang efektif.

Apakah ini artinya MUI sudah menjadi organisasi yang tidak layak menjadi panutan? Tentu saja tidak. Masalahnya, MUI sudah masuk wilayah politik. Sementara hak politik rakyat tidak ada hubungannya dengan agama. Di sisi lain, selama Orba, MUI banyak mengakomodasi kepentingan negara, sementara rakyat adalah hal lain. Negara dalam era Orba sangat represif dan MUI tidak memihak kepentingan rakyat.

Kedua; kekalahan partai Islam juga berarti menunda pelembagaan agama bagi kepentingan politik. Selama kampanye, partai Islam masih memunculkan simbol-simbol agama dalam pentas politik. Atau ideologisasi agama masih menjadi alat politik yang efektif.

Padahal, politisasi agama dalam pentas politik sangatlah rawan dan mudah menjadi pemicu konflik. Alasannya, secara sosiologis masyarakat kita sangat pluralistik. Sementara itu, masyarakat tidak bebas konflik. Konflik itu bisa bersumber dari perbedaan entitas berbasis agama, kesukuan dan bentuk-bentuk primordialisme lainnya.

Perbedaan entitas parpol terutama yang dibangun atas basis agama, kesukuan dan bentuk-bentuk primordialisme lainnya, juga merupakan faktor yang paling krusial dalam mewujudkan tatanan demokrasi. Termasuk timbulnya bibit-bibit konflik antar kekuatan ideologis yang berbasis agama.

Potensi konflik itu terjadi jika masing-masing golongan atau kekuatan politik lebih mengutamakan entitas yang dianutnya daripada apa yang semestinya menjadi ideologi bersama. Jika proses ini tidak

berhasil, maka akan berkembang suasana politik saling curiga, sikap permusuhan beserta primordialisme akan makin meningkat. Termasuk risiko timbulnya anarkisme, karena masing-masing merasa benar dan mau menang sendiri.

Proses demokratisasi juga bisa menghadapi tantangan serius manakala kekuatan politik belum bersikap dewasa dan menerima perbedaan serta menerima kekalahan. Padahal, proses demokratisasi harus mencirikan proses saling memberi dan saling menerima (*take and give*) serta tidak saling mematikan terhadap eksistensi kekuatan politik minoritas serta meniadakan tirani minoritas.

Dalam kerangka memantapkan ideologi demokrasi, representasi kekuatan Islam politik harus mampu tampil secara wajar tanpa menimbulkan kecurigaan dengan meminimalisasi risiko terjadinya konflik baik secara internal maupun dengan kekuatan politik lainnya. Demikian pula parpol sekuler, tidak harus menafikan kenyataan bahwa masyarakat memiliki basis agama yang kuat sehingga perlu mendengarkan aspirasi mereka.

Demokrasi tidak sekadar sebagai representasi kekuasaan mayoritas, dan jika yang diinginkan adalah melegitimasi suatu kekuasaan oleh kelompok mana saja yang terbesar jumlahnya atau demokrasi bermakna sebagai kehendak mayoritas, maka dapat menimbukan banyak problem dalam proses demokratisasi.

Demokrasi tidak sekadar melegitimasi kekuatan mayoritas tetapi juga kompromi dan kontrol. Jika demokrasi sebagai kehendak mayoritas, maka akan menimbulkan banyak penyimpangan yang pada akhirnya berakibat fatal dalam proses menuju demokrasi.□

Membangun *Ukhuwah* Politik

Oleh **Khamami Zada**

TRAGIS memang, umat Islam yang jumlahnya mayoritas di negeri ini, kebanyakan tidak memilih partai Islam sebagai wadah politiknya. Lihat saja, partai-partai Islam rontok mengenaskan. Perolehan suaranya jauh di bawah partai-partai nasionalis. Praktis hanya PPP yang mampu bertahan di posisi lima besar. Tampaknya, umat Islam sudah tidak lagi melihat label Islam dalam menentukan pilihan politiknya.

Ketertarikan umat Islam bukanlah pada partai-partai Islam. Dengan demikian, umat Islam tidak secara otomatis menjadi pendukung partai-partai Islam. Dukungan mereka tersebar ke berbagai partai politik. Nah, pada pemilu kali ini, ternyata partai nasionalis yang berhasil merebut simpati umat Islam. Apakah ini pertanda berakhirnya kekuatan politik Islam sekaligus berarti kemenangan partai-partai nasionalis?

Sungguh sangat menyedihkan yang dialami partai-partai Islam, padahal sebelum diselenggarakan pemilu sudah berbagai upaya dilakukan. Forum silaturrahmi Ulama NU digalang tiga partai Islam: PKU, PNU, dan PPP yang menyatakan sepakat berkoalisi. Disusul, rencana koalisi dari kalangan partai-partai yang berasaskan Islam. Tercatat, ada sembilan partai ; Partai Keadilan (PK), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1905, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Masyumi, Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nahdhlatul Umat (PNU). Bahkan, di hari-hari menjelang pemilu, MUI dan organisasi-organsasi Islam menyerukan untuk tidak memilih partai yang calegnya didominasi orang-orang non-Muslim. Tapi,

semuanya ini seakan tidak ada gunanya. Praktis, tidak mempengaruhi simpati masyarakat terhadap partai-partai Islam.

Lalu, apa kurangnya? Bukankah, kerja sama antarpartai Islam lewat *stembus accoord* juga sudah dilakukan oleh delapan partai Islam? Apa yang tidak beres di dalam tubuh partai-partai Islam ?

Dalam konteks ini, sejatinya, elit politik tidak menyadari satu hal; "ukhuwah politik". Dalam kamus teologis Islam, Istilah ini memang tidak dikenal. Kalau pun ada, bukan *ukhuwah* politik namanya, melainkan ukhuwah Islamiyah. *Ukhuwah* politik ini sejatinya dimaksudkan untuk membangun solidaritas Islam dalam kehidupan berpolitik sebagai akibat dari polarisasi elit-elit politik Islam yang tercermin dalam berbagai partai Islam.

Dengan kata lain, mempersatukan kembali kekuatan politik Islam yang dilandasi doktrin ukhuwah Islamiyah. Karena, secara teologis, paradigma ini dilandasi spririt teologis-Islam: "Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah bermusuh-musuhan), maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu darinya". (QS. Ali Imran : 103-104).

Kesantunan berpolitik

Selain itu, Islam memberikan kerangka politik untuk menjalin persatuan dan kerja sama sebagaimana tertuang dalam doktrin "*ummah wahidah*". Bukankah ini menunjukkan bahwa umat Islam secara teologis adalah umat yang satu? Karena itulah, Azyumardi Azra mengingatkan bahwa ummah wahidah harus tetap dijaga dalam kesadaran beragama, sebab akan berhadapan dengan realitas sosio-budaya dan politik yang mengkonstruksi perbedaan-perbedaan dan bahkan konflik. Inilah yang kini terjadi dalam realitas politik Indonesia. Maka tidak lain, persaudaraan Islam mesti menjadi kekuatan pengikat untuk mempersatukan umat Islam secara sosial dan politik. Inilah yang dinamakan kesatuan berpolitik dalam Islam.

Namun sayangnya, doktrin ini dilupakan oleh elit-elit politik Islam. Mereka mengabaikan ukhuwah, bahkan mereka cenderung bertengkar sendiri. Lihat saja, berapa banyak partai Islam yang mengaku mewarisi Masyumi, berapa banyak NU mendirikan partai, belum lagi PSII pecah menjadi dua dan sebagainya. Mereka terpecah-

pecah, dan bahkan cenderung konflik. Sejak awal pendirian partai saja sudah terjadi perbedaan dan tidak dapat diselesaikan. Akhirnya berdirilah banyak partai Islam. Dalam satu aliran ada dua-tiga partai, apalagi Islam yang memiliki banyak aliran; ada NU, Muhammadiyah, Persis, DDII, PII dan sebagainya. Apakah ini memang *sunnatullah* bahwa kekuatan politik Islam sulit dipersatukan?

Pengalaman Pemilu 1955 telah membuktikan bahwa umat Islam memiliki empat partai; Masyumi, NU, PSII dan Perti. Padahal, pada awalnya hanya ada satu partai Islam, yakni Masyumi. Tapi, dalam tubuh Masyumi sendiri banyak aliran yang mewarnai gerak partai. Akibatnya, Masyumi tidak mampu menjaga daya "ukhuwah"-nya. Terbukti dengan keluarnya NU dan PSII dari aliansinya dengan Masyumi. Belum lagi konferensi Umat Islam Indonesia (KUII) tahun lalu yang gagal mempersatukan umat Islam untuk duduk bersama dalam satu wadah politik.

Memang, kuatnya aliran dalam tubuh Islam sendiri tidak memberikan satu jalan lurus untuk mempersatukan elit-elit politik dengan semangat ukhuwah Islamiyyah dalam kehidupan berpolitik. Karena boleh jadi yang ada di dalamnya adalah saling menjegal antarkekuatan Islam sendiri. Ini bisa dilihat mengapa NU dan PSII keluar dari Masyumi di Pemilu 1955. Ujung-ujungnya adalah ada usaha menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu di dalam partai atau saling rebut jabatan. Buktinya dalam kabinet yang dipegang Masyumi, NU tidak mendapat jatah menteri di pemerintahan. Padahal, ketika kabinet dipegang PNI, NU masih diberi jatah menteri di pemerintahan.

Maka tak heran, jika NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai sendiri. Pada gilirannya, dalam pergulatan politik nasional selanjutnya NU lebih dekat dengan kelompok nasionalis. Ini bisa dilihat dari artikulasi dengan politik NU —PKB— yang lebih dekat dengan PDI-P daripada dengan partai-partai Islam.

Konflik kepentingan

Di masa Orde Baru pun, fusi partai-partai Islam ke dalam PPP tidak lepas dari konflik, karena persinggungan kepentingan masing-masing aliran. Kita telah menyaksikan NU menarik diri dari PPP dengan dalih kembali ke Khittah 1926. Padahal, yang terjadi sebenarnya adalah konflik —saling menjegal— antara kelompok Islam sendiri. NU merasa dipinggirkan, meski sumbangan massanya terbilang

cukup besar. Inilah yang bisa menjadi faktor tidak bersatunya partai-partai Islam.

Memang benar, apa yang dikatakan Nurcholish Madjid, bahwa elit-elit politik Islam waktu itu sudah tidak lagi menjadi penyalur aspirasi umat Islam secara keseluruhan, melainkan lebih banyak berujung untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Bahkan, M. Syafi'i Anwar sudah menunjukkan dalam bukunya *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia* bahwa dalam dekade 1980-an, PPP sudah diwarnai konflik-konflik internal yang parah. "Konflik kepentingan, persaingan pribadi di kalangan elit partai, saling menjegal di antara unsur partai telah menyebabkan partai ini bukan saja kehilangan pamor, tetapi telah menurunkan kredibilitasnya sebagai partai Islam", paparnya Ingat, dalam berpolitik itu yang dikejar adalah "*who get what*" (siapa mendapat apa).

Sesungguhnya saling menjegal sesama kelompok Islam adalah merugikan umat Islam sendiri. Pada gilirannya, partai Islam akan kehilangan pamor dan menurunkan kredibilitasnya sebagai partai yang mengklaim ingin menegakkan ajaran-ajaran Islam. Padahal, di dalamnya cakar-cakaran, saling berebut posisi, jegal-menjegal, dan konflik. Inilah bencana besar (*al-fitnah al-kubra*) yang bisa berakibat pada hancurnya umat Islam sendiri. Inikah yang menyebabkan partai-partai Islam kalah dalam Pemilu 1999?

Berpijak pada perolehan suara partai-partai Islam di pemilu sekarang sudah seharusnya umat Islam melalui elit-elit politiknya melakukan introspeksi, kemudian melihat celah-celah yang memungkinkan untuk mengartikulasikan aspirasi politik Islam secara tepat. Oleh karena itu, langkah awal yang mestinya dilakukan elit-elit politik Islam adalah segera mengagendakan ukhuwah politik sebagai jabaran-operasional dari ajaran ukhuwah Islamiyah secara otentik dan *genuine*. Bukan lagi menjadi klaim yang tidak pernah dipraktekkan dalam kehidupan berpolitik.

Kembalilah pada satu Islam yang otentik, gererik, dan *genuine*. Berjuanglah untuk Islam, bukan untuk kepentingan kelompok. Janganlah pergunakan "nama" Islam untuk sekadar kepentingan politik kelompok. Bersatulah atas nama Islam dan doktrin *ukhuwah Islamiyah*. Maka, seruan ukhuwah Islamiyah yang dioperasikan ke dalam kehidupan berpolitik ini adalah wujud dari itikad untuk menegakkan ajaran agama secara benar.

Dengan agenda ini, Islam sebagai agama mayoritas akan menjadi

kekuatan politik yang diperhitungkan di dalam percaturan politik nasional. Islam tidak diremehkan dan dipinggirkan dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Islam akan kembali menjadi kekuatan politik yang tangguh dan berwibawa. Masa depan politik Islam tidak akan suram dan kelam.□

Membangun Visi Baru Politik Islam

Dukungan terhadap Tulisan Khamami Zada

Oleh **Ahmad Zubaidi**

UMAT Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Islam dipahami tidak sekadar agama, tetapi juga sebagai instrumen untuk memahami dunia. Lebih jauh pandangan itu mengatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok pemisah antara yang spiritual dan yang temporer. Beberapa kalangan malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai 'masyarakat madani', 'peradaban yang lengkap', atau bahkan 'agama dan negara'. Sejalan dengan perspektif ini, para pemikir tradisional meyakini bahwa Islam adalah sebuah sistem kepercayaan di mana agama mempunyai hubungan erat dengan politik.

Implikasi pandangan ini, maka timbul keyakinan di sebagian besar kaum muslimin bahwa cita-cita luhur politik Islam adalah berdirinya negara yang berdasarkan ketentuan Islam (*nidzom al-Islami*), atau lebih tegasnya "negara Islam". Sebagian besar kaum muslimin meyakini bahwa eksistensi Islam akan nyata apabila suatu negara telah mampu menjamin teraktualisasikannya syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammad Natsir, seorang tokoh modernis Indonesia, pernah menyatakan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir gerakan nasionalis Islam, melainkan sampai terbentuknya negara yang diatur menurut sistem kenegaraan Islam.

Wacana pemikiran politik Islam dalam konteks historis Indonesia, pada awal-awal kemerdekaan sampai tahun 1960 mengarah pada keyakinan ini. Namun secara faktual gerakan ini belum menunjukkan kesuksesannya. Bahkan gerakan ini menyebabkan hubungan tidak harmonis antara Islam dan negara, yang berakhir dengan kebuntuan,

permusuhan ideologis dan politis, dan bahkan kekerasan. Kondisi ini justru semakin mempersempit ruang gerak Islam politik, terbukti rezim Orde Baru pun tidak mau merehabilitasi Masyumi. Serta secara kasat mata, rezim Orde Baru menampakkan sikap "Islamophobia", suatu sikap yang sangat menyakitkan umat Islam.

Sederetan pengalaman sejarah, tampaknya tidak memberikan angin segar bagi tumbuh berkembangnya Islam politik di Indonesia. Terakhir, nasib Islam politik pada Pemilu 1999 sangat mengenaskan. Partai-partai Islam tidak memperoleh suara yang signifikan. Tampaknya massa Muslim cenderung tidak menjadikan pilihan politik sebagai pilihan keagamaan, tetapi sebagai ekspresi ekspektasi akan perbaikan sosial ekonomi di masa depan. Bagian terbesar pemeluk Islam yang terdiri dari kaum buruh dan petani miskin, jauh lebih tertarik dengan tema-tema politik yang berbau imbauan MUI dan juga organisasi Islam agar pemilih Muslim tidak memilih partai yang calegnya didominasi non-Muslim menjelang pencoblosan Pemilu 1999, menjadi tidak manjur. Tetapi anehnya fakta ini tidak dijadikan alat instropeksi para elit Islam politik. Justru mereka cenderung bersikap apologis dengan berlindung di balik sempitnya waktu kampanye.

Bahkan, para elit masih menaruh ekpspektasi bangkitnya Islam politik di pemilu mendatang. Karena itu wajar, menurut Abdurrahman Wahid (1996), jika sementara orang menyatakan pertumbuhan Islam kini menuju kepada kelompok "sektarian". Padahal di kalangan umat sendiri ada kecenderungan "pembebasan diri" dari simbolisme agama dalam kehidupan sosial politik. Dipertegas dengan sikap umat yang "enggan" mendukung Islam politik. Kecenderungan ini sebenarnya sudah tampak sejak prakemerdekaan. Sarekat Islam (SI) yang semula mendapat dukungan besar rakyat setelah mempertegas diri sebagai gerakan Islam, justru menjadi semakin kecil karena ditinggal pendukungnya (*Bahtiar Effendy*, 1998). Apakah ini menunjukkan kebodohan umat dalam memahami "pesan-pesan" Islam?

Terlalu tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan demikian. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Abdul Munir Mulkhan (1999), bahwa jika Salat Jumat dijadikan indikator ketaatan syariah, hanya sekitar 25% dari pemeluk Islam yang secara ajeg memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan angka statistik ini dapat disimpulkan pendukung partai berbasis Islam, baik dalam pemilu 1955 ataupun

1999, sebenarnya di atas angka statistik pemeluk Islam yang taat syariah. Pada 1955 jumlah perolehan suara Masyumi di Yogyakarta misalnya, mencapai sekitar 200% dari jumlah pengunjung Salat Jum'at. Data statistik ini mengindikasikan tidak semua pemilih partai Islam adalah pemeluk-pemeluk Islam yang taat. Artinya, konstituen Muslim yang memilih partai Islam bukan karena pemahamannya terhadap pesan-pesan Islam. Demikian sebaliknya, mereka yang memilih partai nasionalis bukan disebabkan ketidakmengertiannya terhadap pesan-pesan Islam. Fakta ini justru menunjukkan adanya kecenderungan sikap inklusif pada umat. Karena itulah, keterlibatan Islam dalam kancah politik nasional perlu didefinisikan kembali.

Mempertegas sekularisasi

Sekularisasi yang dihalusbahasakan oleh penggagasnya sendiri, Nurcholish Madjid (Cak Nur), dengan ungkapan "devaluasi radikal" atau "desakralisasi" merupakan preferensi yang sangat tepat untuk membuat format politik Islam di Indonesia. Ide ini sudah bergulir sejak tahun 70-an, namun tampaknya masih banyak kalangan Islam yang alergi dengan istilah ini. Beberapa kalangan Islam yang mendirikan partai berasaskan kebangsaan pun belum berani menyatakan secara tegas '*platform*' sekularisasi. Padahal secara substantif, *platform* partainya mengarah ke pemikiran ini. Tampaknya, sebagian elit politik Islam masih khawatir bila terlalu menonjolkan 'isu sekularisasi', umat tidak akan memilih partainya.

Pemisahan agama dari negara sangat penting, terutama untuk menghindari sakralisasi hal-hal yang bersifat duniawi. Tentunya, bukan dalam pengertian mengabaikan begitu saja aspek normatif Islam dalam proses sosial politik dan mekanisme pemerintahan negara. Cak Nur (1970), sebagai penggagas sekularisasi pertama di Indonesia, menyatakan bahwa memandang dunia dan segala apa yang ada di dalamnya dengan cara yang sakral atau transendental secara teologis dapat dianggap bertentangan dengan inti ajaran monotheisme Islam. Di samping itu, konflik politik sering berakhir dengan kekerasan manakala agama dijadikan alat legitimasi. Bentrok massa partai hijau (terutama massa PKB dengan massa PPP) menjelang Pemilu 1999 yang merupakan konflik politik paling parah di kalangan internal umat Islam pascakemerdekaan yang tidak perlu terulang.

Tawaran format baru politik Islam yang substantif, inklusif, dan pluralis tidak akan terwujud tanpa langkah sekularisasi. Karena per-

soalan mendasar terletak pada keyakinan teologis watak holistik Islam. Selama keyakinan ini masih kuat di kalangan elit politik Islam, maka perjuangan menuju cita-cita Islam politik akan tetap besar. Itulah sebabnya, harus ada keberanian dari aktivis politik Islam yang mempertegas gerakan "sekularisasi". Tanpa keberanian ini, politik Islam akan bergulir seperti dalam lingkaran setan. Dalam babakan sejarahnya selalu menghadapi konflik ideologis yang justru menyebabkan Islam terpinggirkan dari kancah politik nasional. Akankah kita mengulangi sejarah?

Sekularisasi juga dapat dijadikan jembatan menuju demokrasi yang benar-benar mempresentasikan perwakilan dalam masyarakat. Sebagian kalangan Islam bersikap ambigu ketika menyikapi caleg dari PDI-P yang disinyalir terdiri dari mayoritas non-Muslim. Di satu sisi, mereka mengecam kebijakan PDI-P tidak demokratis, di sisi lain mereka juga mengecam bila ada tokoh-tokoh Islam yang dekat atau bergabung dengan PDI-P. Padahal penyebab "langka-nya" tokoh-tokoh Islam dalam daftar caleg PDI-P karena tokoh-tokoh Islam lebih suka bergabung dengan partai yang dianggap Islami. Sementara ada anggapan PDI-P tidak Islami. Andai saja tidak ada sekat-sekat agama, tentu saja, banyak tokoh Islam yang berada di PDI-P. Dan dengan sendirinya umat Islam akan mempunyai perwakilan yang memadai di badan legislatif.

Semangat ini didukung kenyataan bahwa dalam ajaran Islam sendiri tidak ada tuntutan yang jelas tentang konstruksi negara Islam. Al-Qur'an maupun Alsunnah lebih banyak memberikan prinsip etis yang relevan dengan cara mengatur negara dan mekanisme pemerintahannya. Al-Qur'an berulang kali menyebut gagasan normatif tentang musyawarah (*syura*), keadilan (*adil*) dan egalitarianisme (*musawah*). Prinsip-prinsip inilah yang ditunjukkan dalam tradisi politik Islam awal, khususnya pada masa Nabi Muhammad.

Dengan demikian sudah saatnya, umat Islam tidak lagi bervisi kaku dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an dan hadis. Apalagi dalam konteks bangsa Indonesia yang plural ini. Bangsa ini perlu dibangun dengan landasan "kesatuan bangsa" (*nation state*) agar masa depan kesatuan Indonesia tetap utuh. Juga agar umat Islam dapat andil secara nyata dalam membesarkan bangsa ini, tanpa dicurigai mempunyai agenda politik tersembunyi. *Wallahu A'alm bis-sawab.*□

Ukhuwah politik : Antara Teori dan Problem Empiris

Oleh **Husin M Al-Banjari**

KHAMAMI ZADA dalam artikelnya, "Membangun *Ukhuwah* politik", memberikan ulasan menarik tentang keharusan umat untuk menggalang solidaritas Islam dalam kehidupan berpoltik. Untuk itu Khamami mengajukah konsep "*ukhuwah* politik". Dalam tulisannya itu ia menggambarkan sekaligus menyesalkan carut-marutnya politik yang diperagakan umat Islam.

Dari sisi judul, sebenarnya artikel Khamami itu menjanjikan harapan kepada kita, kiranya tulisan itu akan menjelaskan lebih banyak penekanannya pada konsep "membangun" ketimbang "mengevaluasi". Bahkan kita berharap tulisan itu bisa menanamkan *fikrah* tentang pentingnya ukhuwah politik, khususnya bagi para fungsionaris dan elit politik. Lalu setelah itu, dan ini yang terpenting, tulisan itu diharapkan lagi mampu menunjukkan upaya membangun prosedur bagaimana fikrah itu secara sistematis diwujudkan dalam kehidupan politik nyata.

Namun, anatomi statistik artikel yang disusun terdiri dari 17 paragraf itu lebih di dominasi oleh kegiatan "mengevaluasi" ketimbang "membangun". Menurut catatan penulis, tidak kurang dari 11 paragraf (64,7%) yang secara melebar melakukan evaluasi atau kritik terhadap perilaku sejarah perjuangan politik umat Islam.

Porsi demikian, hemat penulis, kurang imbang. Di sini terkesan ada kontradiksi antara keinginan untuk "membangun" ukhuwah politik versus kuantitas dan intonasi bahasa yang dipakai dalam "membangun" itu. Problem-problem sejarah umat Islam sudah banyak diketahui orang, justru yang belum banyak digali adalah

bagaimana menyelesaikan problem itu. Dalam hal ini tulisan Khamami belum memberikan perhatian secara memadai. Selain itu, kita juga harus menghindari kesan *nu borok dirorojok* (Sunda: yang luka ditambah luka, atau yang salah disalah-salahkan).

Dengan berkaca pada apa yang disebut Khamami sebagai *al-fitnah al-kubro* (bencana besar) yang menimpa umat, maka sebagai penutup ia menyediakan buat kita beberapa tawaran solusi : (1) melakukan introspeksi, (2) mengartikulasikan aspirasi politik Islam secara tepat, (3) segera mengagendakan *ukhuwah* politik sebagai jembatan operasional dari ajaran *ukhuwah Islamiyah* secara otentik dan *genuine*.

Semua langkah teoretis ini, Khamami menyebutnya sebagai agenda, bisa digolongkan berdasarkan teori Kuntowijoyo kepada pendekatan klasik yang menekankan syariah dan akhlak. Sama sekali belum tampak di dalamnya bagaimana konsep operasionalnya. Padahal sisi praktek inilah yang lebih penting dan dibutuhkan oleh para elit politik Islam dewasa ini.

"Pendekatan syariah dan akhlak itu sangat fundamental dalam Islam, tetapi menimbulkan kesan seolah-olah umat Islam hanya pandai berbicara hal-hal yang baik, tidak mau tahu tentang kenyataan." (Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, 1999, h.XXVI).

Kini kita sangat berhajat kepada pemikiran transformatik; sebuah pemikiran yang tidak hanya berisi penjelasan dan pengetahuan untuk mengubah fenomena sosial politik, tapi juga interpretasi, arah, kreativitas, kepeloporan, serta gerak perubahan konkret bagi pencapaian nilai-nilai kebenaran yang toleran (*al-hanifiyat al-samhah*, Nurcholish Madjid) sehingga nilai-nilai itu benar-benar nyata dari wujud alam praktek kehidupan sosial politik.

Kita sadar, kita punya problem empiris, kita belum pernah punya contoh atau model teladan dalam kehidupan politik kekinian kita. Kita sama-sama punya pertanyaan besar, bagaimana ukhuwah politik yang ideal itu, dirajut di alam nyata? Meski demikian, hemat penulis, di era reformasi ini riak-riak ke arah ukhuwah politik itu sudah terasa ada. Pertama, *stembus accoord*. Menjelang diselenggarakannya Pemilu 1999 sudah terjadi kesepakatan delapan partai Islam untuk melakukan *stembus accoord*. Iktikad penggalangan kekuatan (tepatnya sisa desimal "kekuatan" suara) yang wujud dalam *stembus accoord* itu ternyata melahirkan berkah luar biasa bagi partai Islam. Tidak kurang dari 39 kursi DPR disumbangkan untuk partai Islam oleh "malaikat penyelamat" *stembus accoord* itu.

Dari pengalaman empiris kecil dan seolah "tak sengaja" ini, umat semakin yakin terhadap salah satu konsep dasar "*ukhuwah* politik" bahwa berjemaah lebih afdhol ketimbang *munfarid* (individual). Kita menyaksikan dalam pemilu ini, betapa harga satu kursi itu amat mahal. Apalagi, untuk meraih 39 kursi, pasti bukan soal gampang. Hingga kini, yang sudah pasti berhasil melampaui angka itu baru empat partai dari 48 peserta pemilu.

Dari raihan kursi *stembus accoord* partai Islam yang tidak disangka-sangka berjumlah besar itu, tampaknya pada pemilu mendatang *stembus accoord* akan dijadikan salah satu model kerja sama antar partai oleh parpol-parpol peserta pemilu.

Kedua, fraksi Islam. Setelah mendapat suntikan 39 kursi *stembus accoord* itulah untuk pertama kali nyali umat bangkit lagi, yang kemudian berlanjut dengan munculnya isu Fraksi Islam meski sempat kontroversial soal penamaannya.

Ketiga, Poros Tengah. Hemat penulis, isu Fraksi Islam adalah embrio ukhuwah politik. Embrio itu menemui wujudnya yang lebih "elegan" setelah mendapat "sentuhan" dari reformator Amien Rais. Jadilah isu itu semakin inklusif, juga tampil dengan nama baru 'Poros Tengah'.

Fenomena Poros Tengah yang kini kian bergulir, semakin memperbesar harapan ke arah wujudnya *ukhuwah politik* itu. Sebagai bukti bahwa dalam Poros Tengah itu terdapat sinyal ukhuwah politik, misalnya hubungan antara NU dan Muhammadiyah yang dalam sejarahnya dikenal seperti "kucing-anjing" kita lihat sudah mulai mencair. Malah baru-baru ini Amien Rais yang berbasis tradisional Muhammadiyah itu justru "melamar" Gus Dur jadi capres Poros Tengah, dan tampaknya Gus Dur menerimanya.

"Perkawinan" politik Amien-Gus Dur, adalah sebuah kemajuan besar dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Meskipun, kita tetap berhak ragu atas masa depan dan keawetan "perkawinan" itu, karena orang pun masih ada yang bertanya, mana yang benar perkawinan politik atau perkawinan politis? Jika ilustrasi empiris ini bisa diterima, maka Poros Tengah inilah barangkali yang akan menjadi cikal-bakal wujudnya cita-cita "ukhuwah politik" seperti Khamami dambakan.□

Islam Pascapemilu

Oleh **Moeslim Abdurrahman**

PERHITUNGAN suara hasil pemilu memang belum selesai. Tapi, yang hampir pasti, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan akan menang. Ada dua hal, paling tidak, yang bisa diajukan sebagai pertanyaan politik sehubungan dengan kemenangan PDI Perjuangan. Pertama, mengapa partai ini menang, sedangkan kalau dilihat dari segi visi politiknya, toh bisa dikatakan sangat konservatif. Sementara, dilihat dari segi tubuh partainya, tidak bisa dikatakan partai ini berhasil menang karena memang memiliki mesin politik yang efisien dan kelebihan strategi kampanye yang jitu.

Pertanyaan kedua, sudah tentu, ialah mengapa partai-partai Islam tidak bisa mengambil alih peranan sebagai katarsis politik massa yang tertindas sehingga mereka kalah tidak bisa menyaingi popularitas PDI Perjuangan? Jawabnya, ya gampang saja, kalau hendak dikaitkan dengan penjelasan spekulasi analisis di atas. Yaitu bahwa sentimen yang dijadikan untuk membangun solidaritas pemilih dikalangan partai-partai Islam masih saja didasarkan pada sentimen lama yang sangat klasik, seperti soal-soal yang berkaitan dengan *Islamic schism* yang selama ini justru menjadi garis polarisasi umat.

Memang cara seperti itu tetap memiliki kekuatan yang efektif dalam menyusun jargon kampanye politik, tetapi dengan maju ke medan politik melalui banyaknya bendera partai Islam kecil-kecil dengan tokoh muda yang popularitasnya sedang-sedang saja, apa boleh buat pengaruhnya belum mempunyai akar yang kuat karena *political trust*-nya masih terbatas. Sementara itu, tokoh Islam dengan bobot seberat Amien Rais, melalui ijtihad politiknya yang berani menanggung risiko, dengan mencoba menawarkan ideologi politik

terbuka, dengan slogan "pluralismenya" —apalagi hanya dengan waktu seratus hari menjelang pemilu.

Slogan politik PAN semacam itu, bagi umat di kalangan bawah masih susah dicerna. Misalnya dengan pertimbangan apa untungnya buat Islam? Sementara itu, bagi kalangan menengah ke atas, gagasan politik PAN yang sangat reformis dengan sikapnya tentang pentingnya mengembalikan peranan militer, tentang kemungkinan membicarakan konsep negara federal, dan tentang pentingnya melakukan amandemen UUD 45, jelas bagi mereka, gagasan politik seperti itu sangat memukau. Tapi, pada gilirannya akan mencoblos bisa jadi di antara mereka ternyata masih ragu-ragu, apakah betul PAN akan menjadi partai orang banyak dan bukan lagi bagian dari rangkaian gerbong politik umat Islam saja? Sebab, nyatanya, isu tentang Islam dan umat Islam tetap saja dalam *the real political*-nya PAN masih dominan.

Nah, pengalaman dari hasil pemilu kali ini, apa yang fundamental untuk dijadikan otokritik Islam buat masa depan politik Islam Indonesia? Saya kira, satu hal yang sudah saya singgung sebelumnya ialah bahwa Islam tetap harus dicegah menjadi entitas politik. Apalagi sebagai bendera partai, kalau Islam tetap ingin menjadi kerangka moralitas dan spiritual masyarakat. Ini berarti warna Islam kultural harus tetap dibuka seluas-luasnya agar tetap bisa dimiliki orang banyak.

Hasil Pemilu kali ini untuk kedua kalinya membuktikan setelah Pemilu 1955 bahwa the *political Islam* bukanlah pilihan yang cocok buat masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dengan menempatkan budaya Melayu yang majemuk dan toleran. Yang kedua, apa pun terminologi Islam yang dipakai untuk menyatakan ketidakadilan atau kezaliman, tapi jika masyarakat bawah yang merasa tertindas dalam kehidupannya sehari-hari tidak merasakan kaitan makna istilah itu dalam realita yang nyata, jangan diharapkan kalau mereka bisa mengartikulasikan dalam menyalurkan resistensi politik atau sebagai katarsis sosial. Oleh sebab itu, potensi rasa menderita secara politik dan sosial yang terdapat dalam masyarakat tidak mungkin bisa dilawan hanya dengan fatwa atau selebaran politik Islam ke masjid-masjid. Sebab, *social and political unrest* itu sesungguhnya ada di luar tempat ibadah. Inilah salah satu logika PDI Perjuangan menang. Karena, toh Mega dan logo bantengnya hidup dalam realita, bukan dalam pengajian dan sentimen retorika agama.

Dengan jalan pikiran semacam itu, apa sesungguhnya yang harus menjadi agenda politik Islam setelah pemilu? Saya kira, yang penting ialah tokoh-tokoh Islam yang berpolitik bisa membuktikan bahwa mereka bisa membawa bangsa ini ke era demokratisasi, khususnya kepada dunia luar. Atau paling tidak, apakah orang-orang Islam yang menjadi anggota legislatif bisa menjadi wakil rakyat yang sungguh-sungguh memperjuangkan nasib rakyat yang nyata dalam kerangka kuatnya masyarakat madani dan bukan menutupi kelemahannya dengan retorika aneh, seperti untuk menutupi kelemahannya mereka berlindung atas nama sentimen subjektif (primordialisme).

Masalah lain, yang saya kira tidak kalah pentingnya dengan soal kenegarawanan itu yang berkaitan dengan peran politik tokoh Islam dalam rangka terbentuknya masyarakat madani ialah soal program pendidikan politik. Semua orang tahu bahwa dalam jadwal pemilu dan kampanye yang baru lalu sebenarnya tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan pendidikan politik. Partai-partai pada umumnya hanya berteriak kepada massa agar mencoblos gambar dan pentingnya mengingatkan agar jangan lupa terhadap nomor partainya. Mirip seperti agen bus yang saling berebut penumpang di terminal.

Oleh karena itu, pendidikan politik pascapemilu merupakan program bangsa yang harus dipikirkan secara sungguh-sungguh, baik oleh partai maupun oleh kalangan LSM. Dalam kaitan ini, karena Islam merupakan bahasa keimanan masyarakat, sudah sepatutnya bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata dan positif. Artinya, yang menjadi tantangan Islam apakah dalam pendidikan politik ini Islam bisa membawa kesadaran masyarakat dari kesempitan identitas sebagai bagian dari keumatan menjadi bagian dari anggota masyarakat madani yang merupakan bagian dari kesadaran politik rasional dan objektif. Jika Islam gagal melaksanakan pendidikan politik kepada umatnya ke arah ini, jangan harap Islam bisa keluar dari stereotip politiknya sehingga bisa menyuarakan nurani politik masyarakat dalam rangka amar makruf nahi munkar yang sesungguhnya. *Insya Allah.*□

Megawati, Hadiah Gratis bagi Umat Islam

Oleh **Eep Saefulloh Fatah**

PADA Jum'at tengah malam (11/6/99) saya didatangi oleh empat orang aktivis muda Islam yang kelihatan galau. Ternyata sumber kegalauan mereka adalah (kemungkinan) kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999 dan kemungkinan terpilihnya Megawati menjadi presiden baru menggantikan Habibie. Mereka galau atas apa yang mereka sebut sebagai "fenomena kekalahan politik Islam".

Saya tahu diri. Di depan aktivis yang begitu galau saya tak boleh hadir sekadar sebagai pengamat politik namun juga penghibur dan pemompa semangat. Sekadar menghadirkan diri sebagai pengamat boleh jadi bakal membuat mereka makin patah arang, sebab realitas politik Indonesia hari ini memang tak menyediakan kemudahan melainkan penuh kesulitan. Menjadikan diri sekaligus sebagai penghibur dan pemompa semangat berarti menyajikan analisis rasional sambil menyelipkan kemasan emosional. Maka, jadilah penjelasan seperti ini.

PDI Perjuangan dan Megawati adalah hadiah gratis dari Tuhan bagi umat Islam untuk bisa merevitalisasi diri setelah sekian lama tertelan oleh kekeliruan-kekeliruan yang dibuatnya sendiri. Terlampau lama umat Islam berpuas diri membangun kerumunan dan gagal menggalang barisan sehingga mereka berhenti sebagai mayoritas statistik dan minoritas politik. Terlalu lama umat Islam dihantui oleh teori "konspirasi pihak luar yang tidak terlihat" dan kurang mau berkaca diri untuk melihat sumber-sumber kekeliruan dalam dirinya yang jauh lebih mendasar. Terlampau panjang waktu yang dihabiskan umat Islam untuk tak sadarkan diri bahwa pertama-tama

mereka tak dikalahkan oleh rezimentasi yang kuat produk penguasa melainkan oleh dirinya sendirinya —semacam proses bunuh diri perlahan-lahan yang tidak disadari seperti halnya orang merokok.

Manakala Pemilu 1999 menampilkan kepemimpinan baru baik dalam bentuk partai maupun figur presiden yang dipahami secara awam oleh kalangan Islam sebagai "kepemimpinan umat" atau "kepemimpinan Islam", maka jangan-jangan proses sejarah yang penuh kekeliruan itu akan dilanjutkan. Kepemimpinan seperti itu akan membuat umat tidak terjaga dan sulit diajak siaga. Kepemimpinan yang secara simbolik, sekali lagi secara simbolik, akomodatif bagi umat justru akan memanjakan umat Islam dan membuatnya terlelap seolah-olah perjuangan politik sudah usai dan semua perlengkapan kompetisi boleh disimpan di gudang. Kepemimpinan Islam yang segera terbentuk hari-hari ini jangan-jangan bakal melestarikan kerumunan umat dan membuat mereka lupa pada agenda pembangunan barisan.

Ada tiga sebab yang membuat saya berpikir seperti itu. Pertama, umat Islam hari ini adalah umat yang belum sembuh dari penyakit kronis yang diderita sejak lama: gampang terpesona oleh aktor, tidak oleh wacana yang diproduksinya. Hadirnya kepemimpinan yang terlihat akomodatif bagi kepentingan Islam secara terburu-buru sangat boleh jadi akan mempersulit penyembuhan penyakit yang sudah akut itu.

Kedua, manakala hari-hari ini umat disuguhi secara terlampau gampang kepemimpinan yang mereka pandang akomodatif, maka sebuah bahaya serius mengancam: banyak agenda pembangunan infrastruktur politik keumatan yang bakal terbengkalai lantaran tertenggelamkan oleh proyek membangun rezim dan memoles wajah penguasa baru. Jika ini yang terjadi, masa depan politik Islam sungguh suram karena tidak beranjak dari fenomena Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia sebagai pohon gantung dan bukan pohon tanam. Sang pohon kelihatan megah dengan daun dan bunganya yang menjuntai ke atas hingga menyentuh atap. Ketika dicermati secara seksama, sang pohon bisa seperti itu lantaran ditanam dalam pot dan digantung di dekat plafon; bukan pohon yang ditanam di kebun dan dengan akarnya yang kuat berdiri gagah menyentuh atap.

Ketiga, kepemimpinan politik Islam ditandai oleh mandeknya regenerasi. Karena itu, yang duduk berperan sebagai "lokomotif" gerakan Islam politik hari-hari ini adalah generasi yang sebetulnya su-

dah cukup berumur. Sangat sedikit kalangan muda yang bisa menjadi lokomotif. "Keberhasilan" terburu-buru kalangan Islam mengangkat pemimpin nasional dari kalangan mereka boleh jadi "menyenangkan hati" kalangan tua yang memang tidak pernah memperoleh giliran berkuasa. Namun, pada saat yang sama, soal kemandekan regenerasi bakal makin parah di masa depan. Di samping itu, pembentukan gerakan sosial prodemokrasi di kalangan Islam yang baru beranjak di tahap awal bakal dirusak oleh gejala-gejala *tinggal glanggang colong playu*.

Dalam konteks itulah hadirnya PDI-P dan Megawati sebagai sang pemenang bukanlah sumber kerisauan melainkan jalan keluar. Megawati dan PDI-P dihadiahkan kepada umat Islam agar tetap terjaga, siaga, membangun pengawasan terhadap kekuasaan dari luar pagar, dan tercambuk untuk menyiapkan barisan agar tidak mengulang kekalahan di masa datang. Kemenangan PDI-P dan Megawati justru mesti disyukuri. Bahkan, dengan rasa syukur yang optimal karena tidak ada instrumen lain yang bisa lebih efektif dibandingkan Megawati dan PDI-P untuk mendesak kalangan Islam membangun barisan dan meninggalkan model kerumunan.

Kepada aktivis muda Islam itu, saya juga mengingatkan bahwa kemenangan Megawati dan PDI-P membuktikan bahwa meminjam bahasa mereka "kalangan nasionali-sekuler yang minoritas tapi tergalang bisa mengalahkan kalangan Islam yang mayoritas namun tak tergalang". Karena itu, kalangan Islam harus menerima secara ikhlas dan jantan kemenangan itu sejauh dicapai melalui mekanisme dan prosedur yang demokratis.

Saya senang karena penjelasan saya tampaknya memuaskan para aktivis muda yang galau itu. Mereka pulang dengan wajah lebih sumringah ketika malam telah menjadi dinihari. Namun, sepeninggal mereka justru saya yang tercenung disergap oleh pikiran yang telah saya lontarkan sendiri. Benarkah pikiran-pikiran itu?

Boleh jadi, sebagian besar benar dan sebagian kecil keliru. Kemenangan PDI-P dan Megawati bukanlah refleksi dari politisasi yang *genuine* sebuah kelompok atau kekuatan. Megawati dan PDI-P dimanjakan sejarah —dan Tuhan tentu saja— sebagai simbolisasi perlawanan sekaligus penderitaan. Plus aroma Soekarno yang menyengat dan basis massa bawah yang memang memiliki tabungan kekecewaan dan kemarahan yang sangat besar maka jadilah Megawati dan PDI-P yang "besar". Kemenangan mereka bukan saja layak di-

terima secara ikhlas namun juga mesti disyukuri sebagai cambuk demokratisasi. Dalam banyak kasus transisi, kepemimpinan yang diragukan karakter dan komitmennya pada demokrasi justru sangat bermanfaat untuk mengakselerasikan proses demokratisasi.

Tetapi, bagaimana jika sejarah berkata lain; kepemimpinan baru pasca Pemilu 1999 bisa direbut oleh figur yang dinilai secara awam sebagai "kepemimpinan Islam"? Jawabannya: Pekerjaan revitalisasi politik Islam sungguh menjadi lebih sulit. Atau, jika dibahasakan secara lebih positif: Di hadapan aktivis Islam prodemokrasi, politik Indonesia menjadi lebih menantang dan menjebak. *Wallahu a'lam bish-shawab*.□

Haz dan Ihza

Oleh **Haidar Bagir**

ALKISAH, adalah Eep Saefulloh Fatah yang dengan berhasil telah memeras hikmah dari apa yang disebut-sebut sebagai "kekalahan politik Islam di Indonesia ". Tapi, refleksi segar dan kreatif untuk menyikapi fenomena ini justru datang dari politisi Islam semacam Hamzah Haz dan Yusril Ihza Mahendra.

Dalam suatu forum tablig akbar di Masjid Al-Azhar, Hamzah menyatakan bahwa tak benar kekuatan politik Islam di negeri ini sudah berakhir. Untuk mendukung pendapatnya itu, ia berhujah bahwa jika digabung menjadi satu niscaya perolehan kursi partai-partai Islam itu masih melampaui partai-partai besar manapun.

Persisnya, hal ini bisa terwujud jika parpol yang berbasis Islam (Muslim) dan berasas Islam bergabung dalam satu fraksi Islam di SU MPR mendatang. Maka, selain PPP, PBB, PK, PNU, Masyumi, dan PSII, ia pun memasukkan PKB dan PAN.

Yang sesungguhnya lebih menarik lagi adalah pendapat Yusril Ihza Mahendra di forum yang sama. Ketua PBB ini optimistis kekuatan Islam di SU MPR masih kuat. "Sebab, kepentingan umat Islam tidak hanya dibawa parpol Islam, tapi juga ada di Golkar, ABRI, dan bahkan di PDI-P sendiri. (*Republika*, 5 juli 1999).

Kalau kita simak benar-benar, pernyataan kedua tokoh Islam ini sesungguhnya sangat "radikal". Hamzah Haz tampak seperti tanpa beban ketika harus memasukkan ke dalam kelompok kekuatan Islam bukan saja PKB, yang oleh sejumlah kelompok Islam dianggap sebagai tak tegas karakter keislamannya kalau tak malah sering dianggap berseberangan dengan kepentingan Islam, melainkan juga PAN yang merupakan partai terbuka yang dipimpin juga oleh tokoh-

tokoh non-Muslim. Yusril malah lebih jauh dalam hal kepercayaannya bahwa PDI-P —yang calegnya disinyalir didominasi oleh non-Muslim dan, oleh sejumlah kelompok Islam, dianggap sekuler kalau tak malah anti Islam— bisa jadi kendaraan untuk membawa aspirasi Islam.

Boleh jadi yang dimaksud adalah para caleg Muslim yang ada di partai-partai tersebut. Meskipun demikian, menurut saya, jika pikiran-pikiran seperti ini dikembangkan menjadi suatu wacana baru dalam pemikiran politik Islam di Indonesia, dampaknya tak kurang revolusioner. Mari kita lihat.

Pertama, pemikiran tersebut akan memberikan suatu daya baru bagi perwujudan suatu ideal Islam yang selama ini selalu mengalami hambatan, yakni ukhuwah Islamiyah. Gagasan tersebut telah menimbuni gap yang selama ini tercipta di antara kelompok-kelompok Islam yang biasa dikotakkan ke dalam yang fundamentalistik dan yang liberal, atau yang eksklusivistik dan yang inklusivistik.

Kedua, bahwa aspirasi Islam tak mesti diperjuangkan lewat upaya-upaya yang nyata-nyata mengusung simbol-simbol Islam. Dengan kata lain, substansi lebih penting dari simbol, entah diperjuangkan oleh "Islam politik" atau pun "Islam kultural".

Lontaran gagasan yang amat penting inilah yang saya lihat tertimbun di bawah segala hiruk-pikuk tentang gagasan pembentukan fraksi Islam di MPR mendatang. Padahal, tanpa adanya wacana baru ini, menurut saya, segala gagasan persatuan Islam ini seperti di masa-masa yang lampau —lagi-lagi akan membentur dinding tebal perbedaan di antara berbagai kelompok Islam yang ada.

Sebaliknya, jika wacana baru tentang strategi politik Islam seperti yang dicanangkan Hamzah dan Yusril bisa dikembangkan, maka pembentukan suatu fraksi Islam, atau sekadar kaukus, hanya merupakan persoalan teknis yang baru perlu dibahas belakangan.

Di sisi lain, risiko munculnya cara pandang kawan-musuh antara kelompok "Islam politik " dan kelompok-kelompok politik lainnya bisa diminimumkan. Agar jadilah setiap kelompok yang ada dinilai dari apakah mereka memperjuangkan nilai-nilai masyarakat madani atau tidak, dengan simbol apa pun nilai-nilai itu diungkapkan.

Jika demikian halnya, saya pun sepenuhnya akur, bahwa sesungguhnya kekuatan Islam belum habis di negeri ini. Sebaliknya, boleh jadi inilah awal suatu kebangkitan baru.

Bi 'awnil-lah.□

Atas Nama Umat Islam

Oleh **Ulil Abshar-Abdalla**

AGAK mengherankan perangai para elit Islam yang kerap kali berbicara mengenai (dan atas nama) "umat Islam" dengan nada yang agak tinggi hati; serta dengan keyakinan yang mendalam, seolah tidak ada sesuatu yang harus diragukan dalam kata "umat Islam" di situ. Setiap kali kata "umat" disebut, ada pengandaian yang jarang dipersoalkan bahwa sungguh-sungguhkah ada wujud yang rapat dan utuh dalam kata "umat Islam". Keragaman unsur dalam umat yang secara sosiologis ada di luar sana dengan sengaja (atau tidak tahu) diabaikan.

Pemilihan umum (pemilu) pada 7 Juni 1999 lalu sekurang-kurangnya memberikan banyak pelajaran kepada kita. Pertama, meskipun statistik tidak pernah menggambarkan secara lurus kenyataan konkret di lapangan, hasil pemilu sekarang ini menunjukkan bahwa yang ditunjuk oleh kata "umat Islam" itu ternyata tidak seragam dan tunggal. Sebab,jika benar bahwa umat adalah wujud yang tunggal, sudah pasti sebuah partai Islam yang paling dipercaya umat akan memperoleh "mandat politik" yang paling besar. Sebaliknya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang oleh para elit Islam digambarkan sebagai kekuatan yang mengancam "kepentingan umat" karena melibatkan unsur-unsur "non-umat" ke dalam tubuhnya dalam jumlah yang signifikan, justru memperoleh suara yang begitu besar.

Kedua, fragmentasi yang terjadi dalam tubuh umat, ternyata, begitu mendalam, jauh di luar pengandaian yang selama ini ada di benak para elit Islam. Pemilu yang baru lalu sekurang-kurangnya diikuti oleh 12 partai yang secara langsung atau tidak bisa dikatakan sebagai "partai Islam", jumlah yang sudah pasti lebih banyak ketim-

bang pada Pemilu 1955, yakni delapan partai. Corak sosiologis umat di Indonesia, tampaknya, tidak malah menunjukkan kian kuatnya organisasi-organisasi massa yang sudah ada, tapi terpecah-pecahnya organisasi itu ke dalam derivat-derivat kecil yang kian rumit. Dari Nahdlatul Ulama (NU) lahir empat partai yang saling bertikai, di samping Partai Persatuan Pembangunan yang masih mengaku sebagai bagian dari keluarga NU juga. Dari dalam tubuh Masyumi juga lahir empat partai yang, meski dari segi cita-cita politik berdekatan, tidak dapat diikat dalam satu partai besar saja, misalnya Partai Masyumi. Di luar kedelapan partai itu masih ada partai-partai Islam kecil yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan dua tradisi besar Islam di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah/Masyumi.

Yang aneh, meski terdapat kecenderungan fragmentasi yang kian luas dalam tubuh umat, para elitenya masih tetap saja berbicara dengan nada yang begitu mantap mengenai "Umat" dengan huruf kapital. Fragmentasi secara sosiologis tampaknya mereka abaikan, untuk kemudian lari kepada suatu hipotesis teologis mengenai "Umat Islam" sebagai *ummatan wahidah* (umat yang padu). Ini seperti raja-raja Jawa: meskipun wilayah kekuasaannya hanya sebatas Yogyakarta, Sleman, dan Bantul, mereka mengaku dirinya sebagai "Hamengku Buwono", pemangku "dunia".

Jadi, pertanyaannya: ketika elit Isfam berbicara mengenai "umat Islam" yang tidak boleh diabaikan kepentingannya dalam proses-proses politik ke depan, unsur umat yang mana yang hendak ditunjuk dengan kata itu? Bahkan, klaim yang diajukan oleh satu unsur dalam umat kerap kali dibatalkan dan disangkal oleh unsur yang lain. Ini masalah "sosiologi umat" yang tak pernah secara sungguh-sungguh dilihat oleh elit Islam.

Ketiga, pemilu yang lalu ternyata memperlihatkan bahwa Islam sebagai "ideologi politik", yang bisa mempersatukan pelbagai unsur yang centang-perenang dalam tubuh umat, tidak cukup meyakinkan. Kesadaran akan keumatan sebagai "identitas politik" (atau lebih tepat "ideologi politik") ternyata belum tertanam secara mendalam di dalam pandangan umat Islam. Belum ada kesadaran pada tingkat umat *for itself* —jika boleh menggunakan istilah kaum kiri. Kesadaran umat barulah pada tingkat umat *in itself*, yaitu kesadaran pada tingkat komunal.

Kenyataan-kenyataan semacam itu membuat publik politik kita agak sinis ketika mendengar elit-elit Islam mengoar retorika menge-

nai "kepentingan umat Islam". Sebab, dalam kenyataannya, memang ada kesenjangan yang cukup lebar antara realitas numerik umat yang begitu besar dan kesadaran politik mereka. Atau lebih tepatnya: umat, yang dari segi jumlah begitu banyak, ternyata tidak menggunakan Islam sebagai landasan artikulasi politiknya.

Dengan kenyataan seperti itu, setiap orang yang mendengar seorang tokoh Islam berbicara mengenai pembelaan atas kepentingan umat Islam layak bertanya: umat yang mana? Benarkah pembelaan atas umat itu merupakan cita-cita politik massa Islam? Atau hanya dagangan politik elit-elitnya?□

Politik Garam

Oleh **Bahtiar Effendy**

TIDAK diketahui secara pasti, siapa sebenarnya yang mengenakan istilah "politik garam". Meskipun demikian, jika mendengar istilah itu, kesadaran publik akan segera merujuk pada strategi yang pernah dimainkan oleh komunitas politik Islam beberapa waktu lalu. Bambang Pranowo, antropolog lulusan Monash University, misalnya mengaitkan pilihan atas "politik garam" dengan "politik gincu". Apa yang ia maksudkan dengan pasangan istilah tersebut —"politik garam" versus "politik gincu"— adalah bahwa Islam sesungguhnya akan lebih pas jika difungsikan sebagai landasan etis dalam berpolitik, daripada berperan sebagai bendera. Baginya, mungkin juga bagi sebagian masyarakat Islam, yang penting adalah bahwa nilai dan substansi Islam ikut "menggarami" politik Indonesia.

Demikianlah, maka Nurcholish Madjid —jauh sebelum Bambang— juga berbicara tentang hal yang sama dalam perspektif substansialisasi politik Islam sejak awal 1970-an. Abdurrahman Wahid meletakkan persoalan tersebut dalam kerangka "Islam sebagai faktor komplementer". Dan Amien Rais, praktis sejak ia memimpin Muhammadiyah pada awal 1990-an, fasih mendeskripsikan tema di atas dalam konteks *high politics*. Dengan semangat yang kurang lebih sama, penceramah terkenal KH Zainuddin MZ merumuskannya secara agak personal bahwa dirinya tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana.

Pendeknya, istilah "politik garam" merujuk pada upaya kalangan Islam untuk ikut memberi rasa dalam adonan politik Indonesia, tanpa harus "mengibar-ngibarkan bendera". Sebab, yang terakhir ini, yaitu soal "mengibar-ngibarkan bendera", dalam konteks ideologis

pernah berperan sebagai salah satu faktor yang ikut memperuncing antagonisme Islam terhadap negara —dan sebaliknya.

Meskipun dimaksudkan untuk ikut memberi warna, strategi "politik garam" sebenarnya juga merupakan jalan keluar bagi perkembangan politik Islam yang (pernah —mungkin juga masih) sumpek. Kesumpekan ini, untuk sebagian besar disebabkan oleh intelektualisme dan aktivisme para pemikir dan pelaku politik Islam yang —merujuk alur pemikiran di atas— lebih menonjolkan "gincu".

Dalam konteks demikian, maka yang menonjol adalah format dan bukan makna. Demikianlah, maka ideologis Islam — dalam pengertian yang sebenarnya— merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Inilah yang kemudian menyebabkan proses negosiasi untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan politik menjadi sesuatu yang bukan hanya sulit, tetapi juga tidak mungkin untuk dihasilkan.

Ketika struktur penyangga politik Indonesia (dalam hal ini adalah negara itu sendiri) tidak lagi bersifat kompetitif, maka "politik gincu" —demikian juga ekspresi politik lainnya, yang tidak mencerminkan arus utama politik nasional— merupakan obyek yang harus dijinakkan dan dilemahkan. Antara lain atas pertimbangan seperti itu, Presiden Soekarno berlaku keras terhadap Masyumi. Partai Islam lainnya, seperti Nahdlatul Ulama dihadapkan pada situasi di mana ia harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang pada tingkat tertentu dapat disebut "kebablasan" —seperti nampak dalam penjelasan teologis para elitenya tentang mengapa Nasakom harus diterima.

Meskipun beda dalam hal intensitas dan cakupannya, pada dasarnya pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan (penjinakan dan pelemahan politik Islam) yang sama. Bahkan pada masa inilah, komunitas politik Islam, khususnya para pemikir dan aktivisnya, harus menanggung akibat-akibat dari proses negosiasi yang dihentikan pada akhir 1950-an. Ingatan kolektif tentang "politik gincu" Islam yang dibangun oleh para penyelenggara negara sejak dasawarsa 1940-an telah melahirkan stereotip tertentu, di mana membendung Islam politik —*at all cost*— adalah perlu. Inilah kemudian yang dikeluhkan oleh antara lain, Mohammad Natsir, bahwa negara telah melakukan komunitas poltik Islam seperti kucing kurap.

Kondisi ini mengilhami generasi baru pemikir dan aktivis Islam untuk melahirkan gagasan agar dapat keluar dari situasi terpuruk secara politik di satu pihak, dan adanya mutual antagonism dengan pihak negara di pihak lain. Pilihan untuk mengembangkan strategi

"politik garam" dan —meminjam terminologi Amien Rais— menekuk, melipat, serta memasukkan pendekatan "politik gincu" ke dalam kotak merupakan pilihan yang dianggap menjanjikan. Dengan itu, yang ingin dihadirkan adalah Islam yang tidak begitu ideologis (menurut ukuran tahun 1950-an), tetapi relevan dengan kebutuhan masa kini termasuk ke dalam politik!

Perkembangan politik nasional satu tahun terakhir ini memunculkan sejumlah pertanyaan tentang strategi "politik garam" di atas. Apakah pilihan itu bersifat expediem —dimunculkan jika situasi menghendaki, atau apakah "politik garam" merupakan pikiran alternatif —karenanya bisa berlangsung relatif lebih lama— dari imajinasi politik Islam, baik yang dipersepsikan oleh umatnya atau kalangan lain, tentang ketidakterpisahan antara agama dan persoalan-persoalan keduniawian?

Realitas politik Islam dewasa ini memberikan jawaban atas pertanyaan di atas secara tidak tunggal. Euforia politik yang membuat orang tidak hanya merasa rileks dan terbebaskan, tetapi juga merasa "boleh berbuat apa saja", telah ikut mendorong lahirnya partai-partai Islam. Dalam hal ini, ada yang melakukan reformalisasi politik Islam secara terang-terangan dengan menampilkan asas dan simbol Islam. Ada pula yang melakukannya secara malu-malu, asas boleh tidak Islam, tetapi konsekuensinya eksklusif Islam. Dan Amien Rais, setelah mengalami pergulatan politik-spiritual yang melibatkan PPP di satu pihak, dan keluarga Bulan Bintang di pihak lain, akhirnya memilih untuk membangun institusi politik yang bersifat lintas-agama —PAN.

Akan tetapi, apakah wacana di atas secara sederhana dapat disimpulkan sebagai refleksi dari dua pola atau strategi politik yang berbeda? Apakah yang dilakukan oleh para praktisi politik Islam dewasa ini merupakan cerminan bipolar —"politik gincu" verus "politik garam"?

Membaca kumpulan tulisan tentang partai-partai Islam (*Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi; Lima Partai dalam Timbangan: Analisis dan Prospek*), saya tidak yakin bahwa yang muncul adalah "politik garam" yang diidealisasikan, atau "politik gincu" yang ditakutkan atau dikhawatirkan. Meskipun memakai nomenklatur atau bahasa politik Islam —sesuatu juga dilakukan oleh fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa— substansi dari *platfrom* partai-partai Islam tidak menunjukkan semangat primordialisme yang berlebihan. Bah-

kan, seperti ditunjukkan dalam *partai-partai politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program*, di sana-sini terjadi duplikasi yang agak berlebihan.

Hari-hari akhir kampanye memang diwarnai oleh semangat primordialisme keagamaan yang agak kentara. Akan tetapi, semua itu terjadi bukan karena adanya kesadaran untuk membangun preferensi atau primordialisme politik tertentu. Seperti dilukiskan dengan baik oleh Arbi Sanit, yang terjadi adalah tidak sensitifnya kekuatan-kekuatan politik tertentu terhadap realitas politik Indonesia —termasuk kenyataan bahwa Islam merupakan agama mayoritas. Atas dasar itu, komunitas Islam memberi respons secara wajar untuk tidak mau hanya dijadikan sebagai mesin pemberi suara.

Jika demikian ceritanya, maka sebenarnya agak aneh kalau strategi "politik garam" justru dimainkan oleh kalangan mayoritas (predikat mayoritas ini terpaksa digunakan untuk memperjelas persoalan). Kenyataan itu sama anehnya dengan soal tidak diintegrasikannya politik Islam ke dalam negara tentu bukan dengan pengertian formalistik-ideologis. Hal yang lebih mengundang teka-teki (*puzzling*) adalah kenyataan bahwa untuk waktu yang relatif lama telah terbangun antagonisme dan *mutual distrust* antara Islam dan negara. Dan itu semua terjadi di sebuah negara di mana mayoritas warga negaranya adalah beragama Islam.

Dilihat dari sudut logika kewajaran politik, adalah kalangan minoritas (lagi-lagi penggunaan istilah ini tidak dengan pretensi religio-ideologis tertentu, tapi sekadar untuk memperjelas argumen) yang sebenarnya paling berkepentigan untuk mengembangkan strategi "politik garam". Keterbatasan kuantitas mengharuskan mereka untuk berlaku seperti "garam". Bercermin pada *real politics* Indonesia, bukankah fenomena seperti ini yang tengah berlangsung meskipun tidak disertai retorika panjang lebar?□

PR Umat Islam

Oleh **Deliar Noer**

BERANGKAT dari fenomena kekalahan partai-partai Islam, saya ingin menelaah beberapa hal yang bisa dijadikan PR bagi umat Islam. Menurut saya, kalau masih ada keinginan umat Islam di Indonesia untuk mengembalikan citra Islam yang telah memberi warna positif bagi tanah air dan bangsa serta perkembangannya di masa lalu, maka perlu sekali disusun langkah-langkah konkrit untuk menghadapi masa selanjutnya.

Keinginan berkiprah kembali ini tentu ada, malah merupakan kewajiban seorang muslim. Anak cucu kita tentu berharap supaya warisan yang mereka terima bisa lebih baik dari pada yang kita peroleh dari orang tua kita. Malahan merupakan dosa sekiranya kesulitan demi kesulitan, kekurangan demi kekurangan, keterbelakangan demi keterbelakangan yang kita wariskan kepada mereka.

Oleh sebab itu potensi untuk bangkit merupakan anugerah Allah SWT kepada kita. Malah mungkin sekali keterpurukan yang kita hadapi merupakan balasan dari Tuhan karena kita tidak atau kurang setia terhadap ajaran-ajarannnya. Masjid yang bertambah, shalat berjama'ah di departemen-departemen, hotel-hotel dan semacamnya, pada waktu lalu bagai tak berarti. Sebab, itu senantiasa diimbangi oleh segala macam maksiat dan KKN.

Langkah-langkah selanjutnya tentu harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang harus kita tegakkan, dengan memberikan saham kembali untuk perjuangan. Maka pada tempatnyalah bila umat, ormas, dan terutama partai Islam, memikirkan dan memperhatikan beberapa kemungkinan kerja seperti berikut. *Pertama*, perlu sekali dibulatkan tekad terlebih dahulu untuk meninggalkan segala yang bersifat

negatif di masa lalu, dan menumbuhkan segala hal yang bersifat positif. Oleh sebab itu, kemauan ke arah itu pun hendaknya senantiasa terus dipupuk. Termasuk, atau apalagi, peran Islam dalam politik.

Kedua, salah satu segi hidup yang perlu dipupuk itu adalah rasa *ukhuwah* (persaudaraan). Jangan hendaknya rasa bersaudara ini tinggal slogan. Senantiasa diucapkan oleh para dai tapi tidak berwujud sama sekali dalam kenyataan. *Ukhuwah* antargolongan, dalam rangka umat, akan memudahkan kerja bersama selanjutnya.

Ketiga, kerja sama sesama muslim (tentu juga antara sesama bangsa) perlu dibina. Dalam lingkup RT, RW, lingkungan mushala, mesjid, lembaga pendidikan, kerja sama ini hendaknya bisa berkesinambungan. Dalam hal ini, politik hendaknya tidak terlalu dikedepankan. Namun, *ukhuwah* ini pada waktunya diharapkan bisa menumbuhkan kebersamaan dalam berpolitik.

Keempat, kerja sama ini perlu dilanjutkan antarormas, antarpartai, terutama ormas dan partai Islam. Juga dalam rangka ini pengurus tingkat ranting dan semacamnya, kemudian daerah, sampai ke wilayah dan pusat, pada tiap tingkat harus menegakkan pergaulan yang mempererat persaudaraan itu. Yang ranting, cabang, daerah, dan sebagainya tentu dalam rangka yang lebih terbatas, sedangkan yang pusat berkaitan dengan rencana dan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional.

Kelima, lembaga pendidikan Islam kita hendaknya menyadari perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Islam maupun umum. Kita perlu menyadari bahwa pusat pendidikan Islam di dunia bagai bertempat di Universitas Oxford kini, serta juga di Hedron, AS (Internasional institute of Islamic Thought). Malah sejarah tanah air kita memupuk kebersamaan umat —sebangsa, setanah air, wilayah (seperti Asia Tenggara), kaitan kita dengan Timur Tengah, kemudian dengan dunia lain.

Keenam, lembaga pendidikan Islam kita juga perlu memperhatikan perkembangan kaitan ilmu-ilmu agama dengan "umum". Apa yang disebut "Islamisasi ilmu pengetahuan", yang diusahakan mempraktekkannya dalam berbagai lembaga perguruan tinggi Islam di Malaysia, Pakistan, malah ada juga di Turki, Oxford, serta berbagai tempat di AS, hendaknya dapat kita imbangi dengan penemuan-penemuan keberhasilan kita sendiri. Penerbitan buku-buku dalam rangka ini akan sangat bermanfaat.

Ketujuh, perekonomian kita yang ditinggalkan itu perlu dikaitkan

dengan ajaran Islam sebagai dasar. Masalahnya bukan semata-mata soal bunga, melainkan peralatan yang diperlukan untuk membangun perekonomian ini. Kita perlu ingat, dalam sejarah negeri kita, yang bisa berkompetisi dengan orang-orang Cina dan India dua-tiga abad lalu hanyalah pedagang dan pengusaha Islam. Kita bisa menyalahkan kolonialisme tentang kemunduran kita, namun mengapa setelah kita merdeka 55 tahun masih saja kita tertinggal? Tentu ini menghendaki perubahan drastis dari sikap dan kebijakan yang ditempuh pemerintah, tapi juga perubahan sikap serta perjuangan pedagang dan pengusaha kita sendiri.

Kedelapan, akhirnya politik sangat menentukan: Politik bisa membawa kita kepada keadilan, kerukunan, kesejahteraan bersama, tetapi juga ketidakadilan, pertikaian, dan lanjutan kesenjangan yang tumbuh antara yang kaya dan yang miskin. Tentu yang pertama yang harus kita tegakkan. Tapi ini menuntut kerja sama antarpartai Islam, kalau bisa penyatuan partai-partai ini ke dalam aliansi, dan akhirnya fusi.□

Demokrasi dan Posisi Umat Islam

Oleh **Ahmad Syafii Maarif**

DEFINISI umat dalam konteks indonesia kontemporer adalah sebuah definisi yang rancu dan bersifat *adhoc*. Secara sosiologis, yang dikategorikan sebagai umat Islam itu adalah yang mendekati 90 persen itu. Sementara secara ideologis, definisi itu sangat ditentukan oleh era tertentu dalam sejarah. Pada tahun 1950-an dalam era Demokrasi Liberal, umat ideologi itu adalah mereka mereka yang memilih partai-partai Islam dalam pemilu 1955 dengan perolehan116 kursi dari 257 kursi dalam parlemen. Kemudian pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965/66), setelah masyumi dibubarkan dan terbentuknya DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) jumlah kursi mereka dalam kursi dewan menurun drastis. Pada era berikutnya, era Orde Baru (11 Maret 1966-21 Mei 1998), apalagi setelah ditetapkan UU kepartaian dan keormasan 1985, definisi umat ideologis itu menjadi “ kacau “ sama sekali.

Dengan sedikitnya pengantar itu, diskusi ini ingin melihat posisi umat dalam wacana demokrasi yang masih dalam proses mencari format yang pas di era transisi yang sangat kritis setelah sistem Orde Baru runtuh.

Umat dan demokrasi

Berbeda dengan kebanyakan bangsa Muslim di Asia Barat dan Afrika Utara yang menolak sistem demokrasi, umat Islam Indonesia menerima dan memperjuangkan sistem ini dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Mereka melihat demokrasi sebagai sesuatu yang kompatibel dengan doktrin syura dalam Al-Qur’an. Selain karena doktrin, data sosiologis mayoritas penduduk Muslim

Indonesia semakin mengukuhkan keyakinan mereka bahwa hanya melalui sistem demokrasi cita-cita dan aspirasi politik mereka dapat tersalur secara proporsional.

Asumsi dasar di atas secara teoretis tidak pernah mengalami perubahan sejak proklamasi, sekalipun dalam realisme politik sering muncul dalam bentuk yang zig-zag. Tekanan budaya politik feodal-otoriter sejak Dekrit 5 Juli 1959 sampai dengan tumbangnya Orde Baru adalah faktor utama mengapa cita-cita demokrasi umat Islam menjadi kandas dalam perjalanannya. Dalam berpapasan dengan sistem otoriter, umat dalam arti ideologis terbelah menjadi dua dengan variannya masing-masing. Pada masa Demokrasi Terpmpin, faksi Liga Muslim memasukan diri ke dalam sistem itu demi *survival*, sementara Masyumi melawannya dengan risiko dihancurkan. Pada era Orde Baru tak satupun partai politik yang independen, semua dikuasai oleh sebuah pusat kekuasaan otoriter yang bernaung di bawah payung Pancasila dan UUD 1945.

Baik Demokrasi Terpimpin maupun sistem Orde Baru yang anti-demokrasi sama-sama berujung dengan malapeteka politik dan ekonomi yang harus diderita oleh bangsa ini secara keseluruhan, khususnya rakyat kecil yang sejak zaman penjajahan tidak berdaya. Rakyat kecil inilah yang sering terombang-ambing oleh janji dan retorika politik yang menyesatkan sampai hari ini. Sekalipun kita sedang berada dalam kondisi yang serba tidak menentu dan agak mencemaskan, cita-cita demokrasi yang sehat tidak boleh lenyap dari kalbu umat yang berpikiran waras, yang mampu melihat bahwa untuk menegakkan sebuah bangunan demokrasi ternyata tidak mudah.

Kebebasan yang dipasung selama hampir enam dekade telah menempatkan bangsa ini pada posisi yang harus belajar kembali menjadi dewasa secara politik (*a nation in learning*, kata seorang pengamat). Kemenangan kedua partai non-religius dalam Pemilu 1999 pada 15 dan 11 daerah pemilihan merupakan fenomena politik yang menarik untuk dicermati lebih jauh, sekalipun saya melihat bahwa kemenangan ini tidak akan permanen mengingat faktor-faktor di bawah ini:

Pertama, keterpasungan politik selama hampir enam dekade hingga munculnya era B.J. Habibie sejak setahun yang lalu tidak memungkinkan rakyat untuk berpikir obyektif dan jernih dalam menentukan pilihan pada pemilu baru-baru ini. Sampai batas-batas yang jauh, yang terjadi adalah "kemenangan" kekuatan irrasional

berhadapan dengan kekuatan rasional.

Kedua, kebanyakan pemilih tidak mengerti betul mana kekuatan yang betul-betul dapat dikategorikan sebagai pendukung cita-cita reformasi dan mana kekuatan yang hanya kelihatannya reformis. Bahkan yang lebih ironis lagi ialah sebagian orang tidak menghiraukan perbedaan kekuatan reformis substantif dan kekuatan reformis retorik. Euforia politik telah mengaburkan perbedaan antara substansi dan kulit. Tetapi semuanya ini adalah ongkos yang harus dikeluarkan untuk sebuah demokrasi.

Ketiga, pada saatnya nanti rakyat akan keluar secara sadar dari euforia politik itu. Mereka akan tampil sebagai *critical-mass* yang cerdas dalam pemilu yang akan datang. Pada saat itu diharapkan kekuatan rasional akan mengalahkan kekuatan irrasional yang pada hakikatnya lebih merupakan beban sejarah.

Memang dalam situasi yang serba emosional dan irrasional orang tidak boleh berharap terlalu banyak akan tampilnya sebuah demokrasi yang bulat. Wajah gepeng pasti akan menjamur di mana-mana. Panorama yang bukan mustahil akan muncul adalah fenomena "tukang ojek" bakal terpilih menjadi bupati. Tetapi inilah biaya demokrasi yang harus dilunasi sampai pada suatu titik di mana orang muak dengan segala topeng dan kepalsuan politik. Saya melihat bahwa umat secara keseluruhan akan tampil sebagai *avant-garde* kekuatan rasional pada Pemilu 2004 dengan catatatan bahwa mereka mau belajar secara jujur dan cerdas dari pengalaman Pemilu 1999.

Dengan optimisme di atas, pilihan strategis yang terbuka di depan kita adalah mengoreksi diri sejujur-jujurnya, mengatur siasat secermat mungkin, membuang jauh-jauh egoisme golongan dan partai, dan memilih pemimpin melalui sistem syura-demokrasi yang sehat, dewasa, dan lapang dada. Islam, bila dipahami secara benar dan cerdas, sepenuhnya berpihak kepada akal sehat dan kedewasaan berpikir.

Antara substansi dan simbol

Pada saat umat Islam muncul ke permukaan sejarah abad ke-7 M di Arabia, Islam simbol terkait secara organik dengan substansi ajaran. Simbol mencerminkan substansi. Jadi posisinya kokoh sekali dan punya daya magnit yang luar biasa. Doktrin tauhid sebagai substansi menyatu dengan kekuatan sejarah dengan wajah keadilan dan egalitarianisme. Nabi dan para sahabatnya bekerja keras agar antara

substansi dan simbol selalu tercipta kolerasi positif dan kreatif.

Dengan demikian dalam situasi sejarah yang tidak adil dan bopeng ketika itu, Islam datang dengan panji-panji keadilan yang dibawa turun ke bumi. Al-Qur'an dalam surat-surat *Makkiyah* dan *Madaniyah* sarat dengan pesan keadilan ini. Yang sangat impresif bagi para pengamat sejarah Islam adalah pembawa panji-panji itu sama-sama berpengaruh teguh kepada filsafat "satunya kata dengan perbuatan".

Bila gagasan di atas digumulkan dengan situasi umat Islam di Indonesia, maka yang sering terlihat adalah masih menganganya jurang yang lebar antara substansi ajaran dengan simbol yang dipampangkan ke permukaan. Salah satu risiko dari fenomena di atas adalah semakin menipisnya kepercayaan rakyat kepada kepemimpinan Islam simbol, dan korup lagi. Simbol kopiah haji, misalnya belum tentu mencerminkan perangai yang saleh dan jujur. Inilah di antara problem serius yang harus kita atasi dalam tempo yang dekat ini, sekalipun untuk perubahan sikap mental bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun kita tidak punya alternatif lain, kecuali menjadikan simbol sebagai wakil yang sahih dari substansi ajaran.

Untuk terciptanya sebuah bangunan demokrasi yang sehat di Indonesia, saatnya sudah sangat tinggi bagi para pemimpin umat agar membebaskan diri dari kebiasaan memainkan simbol-simbol agama bila semuanya itu tidak terbukti mencerminkan doktrin Islam yang substantif. Al-Qur'an dan periode dini sejarah Islam harus diajak berunding dalam usaha menyusun strategi dan langkah-langkah politik yang akurat, cerdas, dan dewasa, semata-mata untuk kebaikan dan kepentingan sesama: Muslim dan non-Muslim. Bila optimisme tanpa langkah strategis yang jitu, maka bangunan demokrasi di Indonesia masih memerlukan tempo yang agak lama untuk terwujud.□

SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan

Oleh **Husin Al-Banjari**

TERDAPAT sebuah partai yang posisinya semacam 'terjepit' di antara SA (*stembus accoord*) dan ET (*electoral threshold*), yaitu Partai Keadilan (PK). Sisi *pertama*, sesuai konstitusi, lolos tidaknya sebuah partai untuk pemilu mendatang tergantung pada tercapai tidaknya ET dua persen. Sisi *kedua*, ET ini dalam kaitannya dengan SA, khusus bagi PK, amat 'dilematis': tanpa SA pasti PK tidak lolos karena hanya memperoleh tujuh kursi, tapi dengan SA (versi delapan partai) PK bisa lolos karena mendapat tambahan lima kursi sehingga total memperoleh 12 kursi DPR.

Jika 'hitung-hitungan' ini kita kaitkan dengan salah satu keputusan KPU yang menolak SA, 30 Agustus 1999, mungkin ada relevansinya dengan kesimpulan analisis terhadap kinerja KPU dan PPI selama ini oleh Hartono Mardjono '*Stembus Accord* dan Penyimpangan' di Harian ini, Rabu (1/9). ''Rangkaian perbuatan mereka tampak secara nyata merupakan mata rantai perbuatan yang tidak terputus-putus, menuju dan menyatu pada satu tindakan yang bersifat konspiratif untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan politik...,'' tegasnya.

Khususnya bagi para simpatisan PK yang sedikit *over*-optimistis melihat posisi PK yang berpeluang besar untuk melewati ET melalui dukungan SA, mungkin sekali di antara mereka ada yang mengembangkan tafsir, bahwa di balik pleno KPU 30 Agustus itu, ada upaya pihak tertentu untuk 'menggebuk' Partai Keadilan. Persepsi mereka tak bisa begitu saja disalahkan, apalagi melihat 'gaya' orang-orang KPU yang propembubaran SA tidak terlihat risih sekalipun mereka harus melabrak konstitusi. Betapa tidak, dalam pandangan mereka

yang 'terzalimi' ini, KPU yang semestinya menentukan mekanisme eksekusi SA, malah melikuidasi keberadaan SA itu sendiri.

Kejadian serupa ini memaksa nurani kita bertanya, apa yang sedang terjadi dengan bangsa kita saat ini? Masih adakah harapan terhadap keadilan di negeri ini? Meski kita wajib tetap optimistis, namun selanjutnya menarik kita tunggu, bagaimana pemerintahan Habibie, para pakar, politisi, dan para pengaku pendekar demokrasi bereaksi terhadap ketidakadilan serupa ini.

Partai baru yang menyimpan harapan

Terlepas dari 'tontonan menarik' yang diperagakan KPU —yang bagi kalangan tertentu cukup menyesakkan dada— itu, setiap elemen bangsa hendaknya tetap bisa berpikir positif dan bertindak rasional dalam meniti jalan demokrasi ini. 'Setiap musibah selalu ada hikmahnya', setidak-tidaknya dalam kasus seperti *stembus accoord* ini, segala macam keluh-kesah dan gonjang-ganjing KPU-PPI harus dilihat sebagai upaya pencerdasan dan pembangunan kesadaran politik bangsa. Toh, nurani bangsa tetap tidak bisa dibohongi, bahkan sudah merupakan aksioma sejarah bahwa kebenaran dan kejujuran akan selalu mendulang wibawa. Pikiran dan perilaku bangsa pada akhirnya akan mengikut dan terikat pada keteladanan dan kemuliaan para tokoh yang benar-benar memiliki kepeloporan, jiwa besar, dan reformis.

Jika PK *committed* pada klaim dirinya sebagai 'partai dakwah', maka siap untuk 'disakiti' adalah salah satu investasi dan bukti kesiapan diri guna membangun peradaban bangsa besar di masa depan. Keyakinan ini, boleh jadi, akan dianggap oleh sementara orang hanyalah utopia, namun perkataan beberapa pakar jauh-jauh hari sebelum Pemilu 7 Juni 1999 digelar, patut kita pertimbangkan juga.

''Fenomena Partai Keadilan itu sendiri sangat menarik untuk dicermati.... Maka kalau Partai Keadilan nanti muncul sebagai salah satu partai yang penting, saya kira, tidak terlalu mengherankan.... Oleh karena itu, banyak alasan bagi mereka untuk optimistis'' (*Dr Nurcholish Madjid*, Mei 1999).

''Saya melihat ada dua partai masa depan yang kita miliki, yaitu PAN dan Partai Keadilan. PAN disebut partai masa depan dalam pengertian bahwa PAN ini membangun sebuah eksperimen yang melompat dilihat dari konteks sejarah politik Indonesia.... Partai Keadilan disebut sebagai partai masa depan dalam pengertian bah-

wa mereka itu hampir satu-satunya partai yang membangun basis awalnya dari generasi baru'' (*Eep Saefulloh Fatah*, Mei 1999).

Partai Keadilan yang disebut-sebut dalam buku *Tujuh Mesin Pendulang Suara* oleh dua cendekiawan kondang itu sebagai partai masa depan, ternyata mendapat sandungan 'kerikil' dari voting KPU, 30 Agustus 1999. Bagi partai dakwah, prinsip yang harus mengedepan dalam menghadapi persoalan seperti ini adalah, Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia (QS 41:34).

Membangun watak bangsa

Kiranya tepat sekali, jumlah dan nama-nama partai yang diprediksi oleh buku *Tujuh Mesin Pendulang Suara*, LkiS Yogyakarta, Mei 1999. ''Buku yang ada di hadapan sidang pembaca sekarang ini, adalah rekaman deskriptif tujuh partai dari 48 partai yang ikut serta dalam ajang Pemilu 1999. Ketujuh partai ini —yaitu secara alfabetis: PAN, PBB, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PK, PKB, dan PPP- diperkirakan banyak pengamat akan tampil sebagai pendulang suara terbesar dalam pemilu nanti'' (hlm. v).

PK yang sering menyebut dirinya —dengan istilah yang belum populer di telinga masyarakat 'Partai Dakwah'— itu, memprioritaskan upaya-upaya perubahan mendasar: (1) membangun watak bangsa (*character building*), (2) sinergi cendekiawan-aparat-ulama, (3) konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, dan (4) reorientasi terhadap struktur dan pentahapan pembangunan Indonesia di masa depan dalam rangka memulihkan kembali potensi bangsa di atas puing kehancuran ekonomi, politik, dan sosial Orde Baru.

Guna merealisasikan cita-cita membangun watak bangsa ini, yang pada intinya bekerja terfokus pada perubahan moral, maka PK telah mengajukan paradigma Partai Dakwah itu. Agaknya sudah diyakini PK, hanya dengan dakwah perubahan moral itu bisa dimungkinkan (QS 13:11). Dan hanya dengan moralitas yang sehat, KKN bisa diberantas, pemerintahan yang bersih bisa dibentuk, dan karakter bangsa bisa dibangun.

Teori partai dakwah sebenarnya sudah banyak dikemukakan orang. Misalnya, 12 tahun lalu Dr Amien Rais dalam sebuah artikelnya yang dikumpulkan dalam bukunya *Cakrawala Islam* (cet III, 1991)

menyebut partai dakwah sebagai *high politics* atau politik berbudaya tinggi. ''Karena politik adalah alat dakwah, maka aturan permainan yang mesti ditaati juga harus paralel dengan aturan permainan dakwah,' tegasnya.

Berbeda dari opini orang terhadap partai pada umumnya, Partai Dakwah tidak memforsir dirinya menuju kekuasaan. ''Kekuasaan bukanlah tujuan utama,'' tegas presiden PK Nur Mahmudi. Tampaknya yang terpenting bagi PK justru bagaimana partai ini bisa memberikan kontribusi positif sebesar-besarnya bagi pembangunan watak bangsa. Maka dalam konteks ini, benarlah apa yang diungkapkan oleh Cak Nur, sapaan akrab bagi Dr Nurcholish Madjid, dalam buku yang sama: ''Jadi, ekspresi politik merupakan kelanjutan atau kontinum dari gerakan dakwah.''

Maka tak heran, jika sejak kemunculannya Partai Keadilan mendapat perhatian banyak kalangan. Bahkan perhatian pers dunia terhadap partai fenomenal ini juga ada. Van Zorge Hefferman & Associates, edisi 23 April 1999, memberikan laporan tentang *Indonesia's political map* tepat enam pekan menjelang Pemilu 1999. Van Zorge berhasil memotret segitiga kekuatan politik Indonesia: (1) *status quo* atau penguasa (*incumbent*) dan Golkar di puncaknya, (2) nasionalis-sekular (*secular-nationalists*) dan PDI-P di puncaknya, dan (3) Islam (*Islamic camp*) dan PK di puncaknya.

Main Camps and Parties Relative Positions

Amat menarik apa yang dipotret oleh Van Zorge itu, khususnya posisi PK yang 'dipojokkan' di puncak *Islamic Camp*. Dikatakan menarik, karena mengundang pertanyaan, mengapa 'posisi terhormat' itu, misalnya, tidak diduduki oleh partai Islam yang besar dan mapan? Boleh jadi, posisi ini membuat PK, *pertama*, merasa dirinya memperoleh 'kehormatan' dari mata dunia. Eksistensi jatidiri PK dengan citra Islam paling murni (*each of these parties are assumed to represent the purest definition of their respective camps* —Van Zorge) telah benar-benar terwujud dan diakui. Ini modal paling berharga bagi sebuah partai yang memiliki cita-cita membangun watak bangsa.

Kedua, dalam pandangan politik 'orang luar', boleh jadi PK adalah harapan masa depan Indonesia. Sifat-sifat dasar reformis seperti cerdas, jujur, rapih, dan damai adalah kisi-kisi bobot persaingan politik masa depan, ketika sistem partai massa bergeser ke partai media, lalu ke partai program. Di sana pemilih tidak lagi berciri *floating mass,*

don't know, atau *swing voters*, sehingga kejujuran dan hasil kerja nyata dari program-program partailah yang akan menjadi taruhan utama bagi eksistensi partai masa depan. Dan dalam kadar yang agak memadai sifat-sifat itu dimiliki oleh Partai Keadilan. *Idem ditto*, ini juga modal amat berharga untuk membangun watak bangsa.

Ketiga, tafsiran yang paling optimistis menyebutkan, posisi PK yang strategis itu menunjukkan bahwa PK-lah pada lima atau sepuluh tahun mendatang yang akan mampu memimpin tanding untuk menghadapi dua kekuatan raksasa Golkar dan PDI-P.

Namun seperti kata peribahasa, 'tiada gading yang tak retak', begitulah kiranya dengan PK. Kolom Evaluasi, *Sabili*, edisi 28 Juli 1999, mengetengahkan tiga buah kritikan bagi PK yang amat menarik untuk dicermati: (1) *Ghurur* yang diartikan kehebatan semu yang menipu, (2), eksklusifisme, dan (3) tidak memiliki figur publik.

Khususnya untuk kelemahan nomor (2), Van Zorge juga menilai senada dan memberi istilah modernis-eksklusif (*modernist-exclusivist*) buat PK. Kecenderungan terlalu besar ke arah eksklusif akan menyulitkan partai ini untuk maju, dan bahayanya bagi, PK akan potensial untuk 'layak dimusuhi' oleh kawan-kawan penganut Islam Kultural. Dan celakanya, justru eksklusifisme adalah lawan paling potensial bagi cita-cita membangun watak bangsa. Watak bangsa tidak mungkin dibangun paralel dengan eksklusifisme.

Meski demikian, bagi PK sendiri sebenarnya dalam soal ini ada pembelaan cukup bijak dari Cak Nur, ''Jika ada isu fundamentalisme atau eksklusifisme (terhadap PK —*pen*.), menurut hemat saya, hal itu hanyalah kesan, merupakan tanggapan psikologis atau tanggapan yang lebih banyak bersifat kejiwaan,'' (*Tujuh Mesin Pendulang Suara*, hlm 193).

Prospek dan titik terang menuju ke arah partai inklusif juga sudah dimiliki PK. Misalnya, meski Van Zorge memberikan kritik ''eksklusif'' bagi PK, tapi secara objektif memberikan juga penilaian 'inklusif'. PK yang diakuinya sebagai partai *reformist* dan *unique* itu, disebut-sebut sebagai partai yang gampang berkompromi dan bekerja sama ketika berhadapan dengan realitas politik. "*Partai Keadilan has demonstrated a willingness in the past to compromise and work within the confines of political realities*," demikian Van Zorge.

Dari berbagai kiprah nyata PK dan komentar para pakar, maka ke depan kita tertarik untuk mencermati PK lebih jauh; sebuah partai baru yang disebut-sebut oleh para pengamat sebagai partai masa de-

pan ini. Pengamat komunikasi Dedy Djamaluddin Malik adalah salah seorang yang menantikan kiprah PK itu, ungkapnya: ''Sebenarnya, kita masih menunggu lahirnya parpol-parpol seperti Partai Keadilan yang fenomenal itu. Apakah ia bisa bertahan di balik *political game* yang keras di lahan politik Indonesia? Ini akan menjadi contoh menarik yang layak kita simak. Partai ini adalah contoh yang baik, kemunculan partai di alam reformasi yang dalam perpektif iklan politik sama sekali tidak sekadar menampilkan figur, tapi pada misi dan visi partai.''

Adanya potensi soliditas moral yang dimiliki PK, ditambah berbagai teropongan ke depan yang dilontarkan oleh para pakar, maka tidaklah berlebihan jika PK disimpulkan memiliki prospek masa depan, khususnya untuk turut serta membangun watak bangsa. Ini sama berlaku, PK ikut atau tidak ikut pada Pemilu 2004.□

Menggagas Konfederasi Partai-Partai Islam

Oleh **Saleh Khalid**

DALAM sebuah seminar partai-partai Islam di Institut Pertanian Bogor beberapa waktu lalu, penulis melontarkan ide perlunya dipikirkan sebuah fraksi Islam —yang bersifat konfederatif di DPR, menyusul ide koalisi partai-partai Islam. Gagasan ini disambut baik oleh para partai-partai Islam dan peserta yang hadir. Penulis menangkap kesan yang serius bahwa para elit partai-partai Islam dan umat Islam di Indonesia pada umumnya menghendaki adanya kekuatan politik Islam yang kokoh dan sinergis, serta tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama —sebagaimana telah dilakukan di masa-masa lalu.

Langkah-langkah untuk menuju koalisi antar partai Islam agaknya secara aktif telah mulai dilakukan. PPP, misalnya, telah mengawali dengan baik, yakni menyetujui koalisi dengan PKU dan PNU. Belakangan beberapa partai Islam menyepakati pula *stembus accoord*, agar kekuatan mereka kelak semakin mantap dan sinergis. Bila dicermati, para elit partai Islam kini tengah merumuskan teknik-teknik yang strategis untuk menuju kearah koalisi partai-partai Islam. Dalam konteks ini wacana koalisi menuju fraksi Islam di DPR perlu dikaji secara mendalam.

Refleksi kekuatan Islam

Sebelum membedah ide fraksi Islam, perlulah disimak kembali sejauh mana potensi kekuatan politik Islam di Indonesia dewasa ini. Umat Islam di Indonesia, bagaimanapun merupakan komunitas politik yang secara kuantitatif terbesar. Sejak zaman pergerakan,

tatkala strategi perjuangan menuju kemerdekaan dirintis secara organisasional, umat Islam merupakan kekuatan sosial-politik yang dinamis. Berdirinya pergerakan-pergerakan keislaman pada masa prakemerdekaan —semisal Muhammadiyah, Sarekat Islam (yang kemudian menjadi Partai Sarekat Islam), Jong Islamieten Bond, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya— merupakan suatu catatan yang menunjukkan betapa potensi sosial-politik umat Islam yang tidak bisa diabaikan. Mereka mewarnai dinamika sosial-politik di tanah air.

Setelah merdeka, Pemerintah RI mengeluarkan Maklumat Nomor X tanggal 3 November 1945, tentang Pembentukan Partai-partai Politik. Muncul 36 parpol yang siap menyemarakkan dinamika demokrasi di tanah air. Partai Islam yang muncul saat itu hanyalah satu, yakni Masyumi, yang boleh dibilang merupakan satu-satunya representasi kekuatan politik Islam di Indonesia. Namun, pada perkembangannya, konflik internal menghendaki keluarnya PSII (tahun 1954) dan NU (tahun 1952). Wadah tunggal parpol Islam tidak ada lagi. Pada Pemilu 1955, peta kekuatan politik Islam terpecah menjadi lima parpol, yaitu Masyumi, PSII, Perti, PPTI dan NU.

Konsekuensinya, jumlah suara yang diraup Masyumi kalah dengan PNI. Masyumi berada di level kedua (21,50 persen) disusul NU (18,92 persen). Bila saja NU tidak keluar dari Masyumi, tentu mereka mampu mengungguli PNI, apalagi bila seluruh kekuatan politik Islam digabung. Akumulasi perolehan suara seluruh parpol Islam saat itu memang tak lebih dari 50 persen, tepatnya hanya 44,93 persen. Untuk kasus pemilu multipartai, akumulasi jumlah suara itu termasuk mengagumkan.

Dalam konteks ini, setidaknya ada dua catatan yang mencuat, pasca-pemilu 1955 —yang menjadikan mereka lemah. Pertama, partai-partai Islam kala itu ternyata sulit melakukan koalisi. Beberapa perbedaan (politik) sesama mereka menyebabkan mereka tidak dapat membentuk pemerintahan koalisi. Koalisi yang terjadi justru dilakukan antara partai Islam dengan partai non-Islam (berhaluan Nasionalis dan Sosialis). Dengan kata lain, partai-partai Islam tampak tak mampu melakukan koordinasi politik yang mapan dan signifikan melalui satu koalisi politik yang kuat dan sinergis.

Kedua, kekuatan politik Islam menjadi terpinggir setelah rezim Soekarno membekukan. Masyumi, sembari menerapkan —meminjam Ahmad Syafii Maarif— "politik belah bambu" dengan menggulirkan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme).

Seluruh kekuatan politik di tanah air kala itu —termasuk partai-partai Islam— berada di bawah bayang-bayang Soekarno.

Setelah rezim Soekarno tumbang, pamor partai-partai Islam pun tak juga membaik, bahkan mulai memudar. Rezim Orde Baru tidak memberi kesempatan bagi tumbuhnya partai-partai politik Islam yang kokoh di kancah perpolitikan nasional. Pada pemilu pertama Orde Baru tahun 1971, partai-partai Islam menjadi partai gurem yang mendapat perolehan suara kurang dari 10 persen (kecuali NU yang 18,67 persen). Hal ini disebabkan (1) terlalu lamanya partai-partai Islam non-NU "meninggalkan" pentas politik nasional, dan (2) karena munculnya kekuatan politik baru —sebagai rekaan Orde Baru— yakni Golkar.

Dengan maksud menghindari pertikaian politik —sebagaimana terjadi di era multipartai masa Orde Lama— dan untuk merontokkan kekuatan-kekuatan politik— terutama partai politik Islam— rezim Orde Baru melakukan fusi paksa terhadap semua parpol pada tahun 1973. Parpol berhaluan Islam di paksa melakukan fusi ke dalam PPP —yang lain ke dalam PDI. Upaya sistematis dalam rangka merontokkan parpol ini, untuk beberapa waktu membuahkan hasil seperti yang diharapkan rezim Orde Baru: (1) Mereka jadi terkendali, dan (2) friksi internal yang berkepanjangan.

Friksi internal yang dimaksud tak lepas dari benturan-benturan kepentingan politik antarunsur penopang partai. Selain itu intervensi pemerintah ("negara" sebagai *invisible hands*) amatlah mencolok. Suara arus bawah bakal diabaikan, tatkala "negara" menghendaki lain. Realitas Orde Baru memang demikian. Semua kekuatan politik harus tunduk pada skenario besar "negara".

Namun, fusi paksa ini adakalanya memberi pelajaran bagi kekuatan politik Islam untuk menunjukkan diri secara konstruktif bagi kepentingan dan penyaluran aspirasi umat. Secara matematis, selama Orde Baru PPP merupakan kekuatan politik kedua setelah Golkar (bila dilihat dari persentase perolehan suara setiap kali pemilu). PPP getol menyuarakan aspirasi Islam. Kasus RUU Perkawinan (1974) dan RUU Aliran Kepercayaan (1978), serta *walk out*-nya FPP dari arena SI MPR menyangkut jumlah kursi tentara di DPR beberapa waktu lalu, menunjukkan bahwa PPP konsisten memperjuangkan aspirasi umat Islam, sekaligus memiliki citra reformis. Selama Orde Baru PPP nyaris berjuang sendirian dalam menyuarakan aspirasi politik umat Islam.

Kini PPP kembali menggunakan asas Islam sebagai asas partai sejak tahun 1985, tatkala Asas Tunggal Pancasila diberlakukan. Tentu saja PPP bersama parpol Islam yang lain telah memantapkan diri untuk mampu menampung aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Dalam konteks ini penggalangan kekuatan politik Islam perlu dilakukan secara optimal agar partai-partai Islam mampu mengalahkan kekuatan politik nasional-sekuler, serta kelompok-kelompok politik non-Islam bila kita tak ingin mereka mendominasi.

Dari koalisi ke fraksi

Kebutuhan akan kekuatan politik Islam yang tangguh dan kokoh di era reformasi ini merupakan hal yang mendesak untuk segera diimplementasikan. Adanya kekuatan politik Islam yang signifikan dan amat berpengaruh dalam konstelasi perpolitikan di tanah air, bagaimanapun merupakan dambaan umat Islam secara keseluruhan. Umat Islam, yang selama Orde Baru terpinggir dari panggung politik akibat proses depolitisasi, kini tampak menginginkan kembali munculnya kekuatan politik Islam yang kokoh dan dinamis.

Banyaknya partai Islam (ada 12 parpol berasaskan Islam) dewasa ini, tentu saja menambah peta persaingan politik terutama antarkekuatan politik Islam di tanah air kian menajam. Bila saja partai-partai Islam tidak mampu melakukan kerjasama yang sinergis dan saling menopang satu sama lain, maka upaya menuju terciptanya kekuatan politik Islam yang kokoh dan dominan akan sia-sia. Oleh sebab itulah, persatuan di antara mereka merupakan dambaan umat Islam.

Bagi umat Islam, persatuan ini amatlah didambakan, terutama setelah mereka terpinggirkan dari sejarah perjalanan bangsa, serta agar tidak membingungkan umat Islam sendiri dalam rangka menyalurkan aspirasinya. Secara makro, persatuan partai-partai Islam diharapkan mampu melaksanakan optimalisasi perjuangan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Untuk menuju terwujudnya fraksi Islam di legislatif, setidaknya dibutuhkan empat syarat yang signifikan untuk koalisi partai-partai Islam. Pertama, adanya niat yang tulus dan ikhlas antarparpol Islam dalam konteks penyatuan visi politik, semata-mata demi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Cara-cara berpolitik yang bermoral dan bermartabat haruslah ditonjolkan. Kedua, dibutuhkan

upaya-upaya yang bersifat ukhuwah-dialogis, saling menghormati setiap perbedaan pendapat, tidak saling menjegal (*politicking*) dengan cara menghujat, menghasut dan memfitnah, serta justru saling menopang satu sama lain. Hal ini dimaksudkan agar ghirrah politik umat Islam tidak luntur, bahkan semakin menebal.

Ketiga, partai-partai Islam harus bisa belajar dan mengambil hikmah dari sejarah politik Islam yang panjang, agar tidak terjerumus pada perpecahan yang tidak perlu. Oleh karenanya perlu diciptakan mekanisme atau prosedur yang secara prinsip harus disepakati dan dipatuhi bersama. Keempat, dibutuhkan upaya-upaya untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam *frame* kebaikan dan kesabaran. Dengan kata lain, prinsip *chek and balance* dibutuhkan di antara partai-partai Islam, lewat evaluasi-evaluasi yang konstruktif.

Keempat syarat tersebut bila dipenuhi akan mampu menyatukan potensi politik umat Islam secara konkret lewat parpol-parpol Islam yang ada. Koalisi parpol Islam diharapkan bakal mengerucut pada terbentuknya fraksi Islam yang kokoh dan sinergis di legislatif.

Urgensi fraksi Islam di legislatif mampu terlihat, setidaknya dari dua sudut pandang. Pertama, fraksi Islam tentu akan mewarnai kompetisi politik formal di tubuh legislatif, dan tentu saja fenomena ini akan berpengaruh secara signifikan bagi kemajuan bersama dalam konteks reformasi dan demokratisasi di Indonesia. Kedua, kekuatan politik Islam setidaknya akan lebih mudah dalam memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam praktek politik nasional. Sebagai contoh, dimensi-dimensi Islam sebagaimana terpancar dalam syariah akan mewarnai sistem hukum nasional lewat perjuangan fraksi Islam yang optimal.

Model konfederasi

Pertanyaannya, seperti apa fraksi Islam itu diwujudkan? Di sini model konfederasi menemukan relevansinya. Konfederasi partai-partai Islam merupakan formula dan bentuk persatuan partai-partai Islam yang paling tepat dan efektif. Konfederasi merupakan sebuah bentuk dan formula kerjasama dua buah organisasi atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara fungsional dan strategis, dengan menonjolkan visi yang sama. Namun eksistensi organisasi yang bersangkutan tetap terjaga.

Secara harfiah, konfederasi tidak bisa dilepaskan dari hakikat federasi, yang berarti "gabungan beberapa perhimpunan yang beker-

jasama dan seakan-akan merupakan satu badan, tetapi masing-masing perhimpunan tetap berdiri sendiri" (KBBI 1995). Berdasarkan makna di atas, kerjasama berbentuk federasi yang dinamis dan sinergis, walaupun di dalamnya terdapat kesatuan-kesatuan organisatoris yang eksis dan mandiri. Dalam konteks koalisi parpol Islam, jelas dibutuhkan permanensi dalam bentuk konfederasi, sebagai cara yang paling efektif dan tepat.

Kita perlu belajar, misalnya, pada koalisi konfederasi Barisan Nasional di Malaysia. Barisan Nasional merupakan koalisi konfederatif antara UMNO (United Malay National Organization) dengan beberapa parpol di sana. Dalam koalisi konfederatif itu memang UMNO merupakan parpol terbesar namun tak dapat dipungkiri bahwa parpol lain juga turut menopang kebesaran UMNO. Dalam koalisi itu, UMNO tidak merasa dikecilkan atau menjadi kecil, demikian pula parpol lain didalamnya, senantiasa merasa eksis dan survive. Dengan menerapkan koalisi konfederatif Barisan Nasional di Malaysia hingga kini merupakan kekuatan politik formal yang kokoh di parlemen dan pemerintahan.

Setidaknya ada tiga alasan menyangkut urgensi adanya fraksi Islam yang konfederatif. Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa realitas politik yang melingkupi umat Islam di era reformasi ini amatlah beragam (plural). Menggabungkan ke dalam wadah tunggal parpol Islam merupakan satu hal yang sulit dilakukan, mengingat realitas lapangan menunjukkan telah terbentuknya bermacam-macam partai Islam. Kongres Umat Islam 1998 pun "gagal" menggiring mereka untuk bersatu dalam wadah tunggal. Melihat fakta tersebut, justru kemudian di sinilah model konfederasi segera memperoleh signifikasinya.

Kedua, model konfederasi adalah psikologis tidak akan sampai pada perasaan-perasaan naif antara yang satu dengan yang lain, karena prinsip kesederajatan atau kesetaraan menonjol. Ibaratnya yang besar tidak akan pernah merasa kecil, dan yang kecil akan merasa semakin eksis. Mereka saling menopang dalam satu kesatuan visi yang hendak diperjuangkan bersama. Makna-makna fungsional pun bakal terwujud secara aktual, misalnya prinsip *the right man on the right place* secara otomatis akan berjalan secara konstruktif dan sinergis.

Ketiga, konferensi parpol Islam merupakan hal paling memungkinkan dilakukan dibandingkan dengan alternatif lain, semisal upaya mewadahtunggalkan atau memfusikan partai-partai Islam. Tidak

ada cara lain yang mampu dilakukan oleh masing-masing kekuatan politik Islam di masa depan kecuali harus melakukan kaolisi-koalisi strategis guna menghadapi kekuatan-kekuatan politik lain. Mengingat eksistensi partai Islam bersangkutan kurang, justru semakin merasa kuat, maka energi politik umat Islam pun mampu terhimpun secara signifikan.

Kita berharap agar upaya-upaya koalisi antar partai Islam mampu terus berjalan, sehingga fraksi Islam yang konfederatif di legislatif mampu diwujudkan. Semoga upaya menuju ke sana tak menemukan aral yang melintang, sehingga para elit parpol Islam yang memegang amanah untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam di Indonesia dengan sabar dan cerdas mampu menerjemahkan aspirasi umat Islam dengan strategi politik yang efektif dan optimal.□

Islam Tidak Akan Kalah

Wawancara **Nurcholish Madjid**

HASIL pemilu kemarin mencerminkan, simbol dalam politik tak lagi penting. Rakyat lebih melihat substansi. Diam-diam bangsa kita telah mencatat dalam kemajuan politiknya. Itu kata **Nurcholish Madjid**. Soal kekalahan partai Islam, ia juga mengingatkan orang Islam agar instropeksi bahwa selama ini memang tidak fit untuk menang karena mereka keliru. Yang mereka pentingkan adalah panggilan sentimentil-emosional, tapi malas mengembangkan wacana.

Cak Nur juga menilai seruan MUI dan beberapa partai politik Islam agar masyarakat tidak memilih parpol yang calegnya mayoritas non-Muslim sebagai gelagat ketakutan yang tidak mendasar. Simplifikasi dan sentimen berdasarkan agama dalam kehidupan politik, menurut Cak Nur, tidak relevan dalam kehidupan poltik, sekalipun Islam adalah agama yang dipeluk rakyat secara mayoritas. Selain tidak relevan, jika sikap emosional semacam ini tetap dikembangkan membuat umat Islam tidak bakal maju dalam kehidupan politik tanah air. Untuk itulah, Cak Nur mengusulkan agar partai politik yang kalah menjadi oposan. Berikut wawancara dengan Rektor Universitas Paramadina Mulya ini yang dirangkum dari majalah *Panji Masyarakat, Forum,* dan *D&R*:

Bagaimana penilaian Anda terhadap proses Pemilu sejauh ini?

Saya sedikit terhibur. Dulu, saya ditanya apakah pemilu akan aman atau kacau. Walaupun tidak berani definitif, saya bilang mungkin akan lebih aman. Karena kebebasan sudah ada, sudah kita angsur sejak Mei 1998, sehingga pemilu tidak menjadi sangat istimewa. Tak seperti pemilu sebelumnya, saat rakyat ditekan selama lima tahun, lalu masa kampanye dijadikan satu-satunya cara mengekspre-

sikan kebebasan, sehingga terjadi ledakan. Penting bagi kita untuk menggarisbawahi bahwa kebebasan berkorelasi dengan kedamaian. Kalau orang bebas bicara, pers bebas, dan sebagainya, perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui wacana atau diskursus, bukan melalui gontok-gontokan fisik. Nah, di situ Pak Harto salah. Dia melihat "keributan omong" sebagai gangguan keamanan dan stabilitas. Jadi, kebebasan dibungkam. Kini anggapan begitu tidak benar.

Dalam pemilu kali ini, ada kesan partai Islam kurang laku ketimbang partai sekuler. Mengapa?

Sekuler dan tidak, sebetulnya tidak dipahami dengan benar. Hanya retorika politik. Amerika serikat, misalnya, disebut sebagai negara sekuler. Oke. Tapi, mereka pun amat religius. Etikanya etika Kristen. Itu terbaca dengan jelas kalau ada krisis yang menyangkut moral. Seperti kasus Clinton-Monica Lewinsky. Jadi, kita tidak bisa menilai AS sebagai negara sekuler. Sekularisme paling ekstrem terdapat di Prancis. Di sana, gereja sama sekali tidak boleh ikut serta dalam soal negara dan tidak boleh mempengaruhi publik. Karena itu, ketika orang Islam di sana menghadapi persoalan jilbab, dikira itu diskriminatif terhadap Islam. Padahal tidak, lha, biarawati boleh berkerudung. Itu baru sekularisme. Tapi Indonesia tidak akan menuju ke sana.

Lantas mengapa partai-partai Islam kalah dalam pemilu ini?

Sebab, orang Islam kini menyebar, terutama yang berpendidikan baru, moderen. Di mana kini orang Masyumi? Seandainya masih ada, bisa ditakar di mana kebanyakan mereka berada. Ya, di Golkar. Bukan di PDI-P, PPP, dan sebagainya. Nah, di sini terbukti bahwa pemilu mempunyai efek seleksi yang ilmiah. Dengan pemilu, kebenaran klaim-klaim pribadi diuji. Misalnya, ada klaim, saya disayangi rakyat. Oke, ikut pemilu. Nanti dibuktikan apa betul klaim itu. Begitu juga dengan klaim kelompok.

Pemilu sebenarnya adalah proses penataan ulang peta politik yang sangat alami. Karena itu, kita harus menerima beginilah kenyataan. Cuma, barangkali, karena baru pertama kali kita melaksanakannya dalam suasana bebas, pemilu kemarin itu masih tercampur dengan hal-hal yang bersifat psikologis, emosi. Misalnya, ada tafsiran tentang mengapa orang santri memilih PDI-P. Itu mungkin karena memprotes Orde baru yang selama 32 tahun diwakili Pak Harto, Golkar, termasuk Habibie.

Bagaimana relevansinya dengan dengan pernyataan Anda dulu, "Islam yes, partai Islam no"?

Itu sebetulnya membacanya kurang pas. Kegagalan partai-partai yang mengaku Islam itu adalah kegagalan simbol yang juga dialami Partai Nasionalis Indonesia. Misalnya, orang-orang mendirikan partai Islam dengan lambang bulan-bintang. Itu kan ada semacam mitos bahwa tanda gambar bulan bintang begitu kuat daya tariknya untuk memobilisasi dukungan. Tapi, ternyata tidak. Tapi, jangan lupa, yang gagal bukan hanya bulan bintang. Gambar banteng dalam segitiga dengan nama Partai Nasional Indonesia-nya juga. Demikian juga gambar Nahdlatul Ulama kalau kita lihat kasus Partai Kebangkitan Umat dan Partai Nahdlatul Umat. Begitu juga Ka'bah kalau kita lihat kasus Partai Persatuannya-nya HJ Naro dan lain-lain. Kalau seandainya partai Kristen, Partai Kristen Indonesia, muncul dan Partai Katolik juga muncul, saya kira juga tidak seberhasil seperti yang mereka harapkan, seperti terbukti dari kasus Partai Kristen Nasional Indonesia dan Partai Katolik Demokrat. Saya berani taruhan bahwa seandainya Partai Komunis Indonesia diijinkan ikut pemilu dengan tanda gambar palu arit dan nama PKI, pasti juga gagal.

Jadi, bangsa kita sebetulnya diam-diam mengalami kemajuan besar dalam wacana politik. Dengan demikian, sekarang ini bangsa kita sudah berada dalam *platform*nya yang berbeda sekali dari pada tahun 1950-an. Inilah yang harus dibaca, *platform* politiknya bergeser. Simbol menjadi tidak begitu penting. Orang mencari esensi.

Sejauh ini, bagaimana pengamatan Anda seputar aktifitas parpol Islam dalam konteks pendidikan politik dan proses demokratisasi?

Peran mereka memang belum optimal. Tapi saya melihat itu karena waktunya cukup pendek. Kita kan inginnya pemilu segera direalisasi. Partai-partai ini muncul dalam waktu yang relatif pendek. Mereka tampaknya belum siap merumuskan gagasan-gagasan dasarnya. Mereka sering menyebut *platform*, tapi tidak ada yang bikin. Tapi, harapan kita bila pemilu nanti terjadi dan lima tahun setelah pemilu, partai-partai ini harus tumbuh sebagai partai yang tangguh.

Ada yang khawatir mereka ini hanya memakai label Islam untuk kepentingan politiknya?

Dari mana kita tahu indikasi semacam itu? Tudingan semacam itu kan harus dibuktikan. Membaca hati orang tidak boleh menurut aga-

ma. Itu intervensi wewenang Tuhan. Nabi bersabda bahwa takwa itu di dalam dada. Al-Qur'an juga menyatakan bahwa takwa seorang itu hanya Allah yang tahu. Jadi, kita tidak boleh berkata semacam itu. Kalau toh ada kekhawatiran semacam itu, harus didasarkan pada fakta-fakta.

Partai-partai Islam kelihatannya kurang kompak dan cenderung memunculkan calon presidennya sendiri-sendiri. Bagaimana Anda melihat gejala ini?

Ini wajar. Mereka bikin partai karena ingin berkuasa. Karena masing-masing punya keinginan untuk menang, ya mereka melakukan persiapan untuk menang. Salah satu persiapannya, ya harus punya calon presiden. Itu tak perlu dikhawatirkan.

Bagaimana sosok capres yang ideal bagi umat Islam?

Mengapa selalu berpikir tentang umat Islam? Itu yang saya tidak suka. Negeri ini 90 persen Muslim. Itu yang saya bilang cara berpikir yang kuno. Jadi, pertanyaannya, seharusnya yang ideal bagi rakyat, bukan bagi umat Islam. Itu yang membikin pecah belah dan orang lain takut.

Seruan MUI untuk tidak memilih caleg non-Muslim —yang sepertinya ditujukan ke PDI Perjuangan— agaknya tidak berpengaruh. Menurut Anda, apa sebenarnya yang melatarbelakangi kelompok Islam mengeluarkan seruan itu?

Saya kira, mungkin semacam kepanikan. Ketakutan yang tidak beralasan sebenarnya. Kita harus ingat bahwa PDI Perjuangan itu kan gabungan dari faksi-faksi non-Islam. Jadi kita dengan sendirinya harus sudah bisa menduga bahwa wakilnya banyak berasal dari non-Muslim. Apalagi, PDI Perjuangan menyatakan dirinya tidak membedakan agama. Wajar kalau kriterianya pada mereka yang telah memberikan sumbangannya kepada aktivitas partainya. Jadi, itu masalah intern mereka. Yang sering kita lupa adalah kampanye negatif itu kan tidak boleh. Soalnya, itu merupakan bagian dari kejujuran. Orang tidak boleh mengatakan jangan pilih itu. Tapi boleh mengatakan, pilihlah saya dengan alasan ini dan itu.

Jika kita lihat hasil pengumpulan suaranya, agaknya malah kontraproduktif. Menurut Anda?

Saya kira ya. Saya baru dapat cerita dari sopir taksi dari Jurangmangu. Katanya, dulu daerah itu basis PPP, hampir mutlak di sana.

Sekarang PDI Perjuangan mutlak, padahal mereka kebanyakan orang Betawi juga, yang selama ini dikenal pendukung fanatik PPP. Tapi, sekarang nyatanya ada keinginan berubah.

Fenomena seperti kampanye untuk tidak memilih partai lain, dalam wacana demokrasi Indonesia ke depan merupakan sebuah kemajuan atau kemunduran?

Karena ini yang pertama kalinya tidak bisa dikatakan sebagai kemunduran atau apa. Tapi, paling tidak, itu suatu kekhilafan barangkali. Anggap saja itu sebagai proses pertumbuhan yang belum selesai.

Menurut Anda, pemilih mana yang terpengaruh oleh imbauan seperti itu?

Agak susah ditentukan. Kalau orang Betawi selama ini mendukung PPP, tetapi seperti kasus di Jurangmangu justru memilih PDI Perjuangan. Kalau kaum terpelajar kan dengan sendirinya tidak terpengaruh. Dugaan yang terpengaruh dari orang-orang *grass root level*, ternyata juga meleset. Karena Masyumi bubar, tiga puluh sembilan tahun lalu, maka ada keterputusan penghayatan demokrasi di kalangan umat Islam khususnya. Masyumi sendiri juga membuat kesalahan karena terlalu banyak menekankan hal-hal yang tidak strategis yang membuatnya bubar itu. Kalau saja kecanggihan politik Masyumi sama dengan PKI, lalu bertahan, kita akan menikmati perkembangan demokrasi yang jauh lebih baik daripada sekarang.

Selama ini, kalau ada upaya penggalangan seperti dilakukan kelompok Islam selalu saja mereka mendapat tuduhan sektarianis. Apakah kalangan nasionalis juga bukan kelompok yang bisa mendapat julukan sama?

Sama saja memang. Fanatisme itu tidak hanya kultus agama tetapi juga pada paham. Dulu para pengikut komunisme juga sangat fanatik. Nasionalisme juga.

Jika sebelum pemilu saja PDI Perjuangan mendapat reaksi demikian ketatnya, menurut Anda reaksi mana lagi yang bakal dihadapi partai pemenang itu jika berkesempatan berkuasa?

Secara sehat, orang Islam harus introspeksi bahwa selama ini memang tidak fit untuk menang karena salah. Itu berkali-kali saya bilang dari dulu. Habis yang dipentingkan panggilan sentimentil-emosional dan malas mengembangkan wacana. Pekerjaan terakhir ini

kan sulit.

Bukannya kenyataan bahwa gagasan-gagasan pluralisme dan persamaan justru lebih berkembang di kalangan Islam daripada persepsi kalangan nasionalis yang tidak berubah terhadap kelompok pertama?

Memang. Tetapi juga ketika muncul retorika-retorika seperti pada selebaran yang sepintas lalu seolah telah menghapus semuanya. Itu kerugiannya. Kan ada pepatah panas setahun hilang karena hujan sehari.

Jika PDI Perjuangan menang, bisa nggak dikatakan sebagai potret kemenangan kalangan nasionalis?

Bisa juga, tetapi mereka sendiri kan tidak bicara ideologi nasionalisme, tetapi reformasi. Jadi sebenarnya bukan kemenangan kaum nasionalis tetapi kemenangan orang-orang yang tidak suka pada Pak Harto. Ini definisi yang paling pas saya kira. Apa betul mereka atas nama nasionalisme, itu persoalan terakhir.

Dan kekalahan Islam?

Islam tidak kalah. Sebagai agama Islam tidak akan kalah. Bung Karno saja sponsor Islam. Dia yang mentradisikan peringatan-peringatan hari besar Islam di Istana atas saran Agus Salim dan dikaitkan dengan tradisi keraton. Itu kan luar biasa dampaknya seperti juga membangun masjid di Istana dan Masjid Istiqlal. Perhitungan kalah menang itu terlalu pesimistis. Itu hanya suatu pandangan stereotipikal aktivis Islam. Orang Islam sering tidak konsisten. Katanya, di satu pihak mengakui rakyat mayoritas beragama Islam tetapi tidak mau mengakui orang-orang yang bukan kelompoknya sebagai bukan Islam, seperti Pak Harto, Bung Karno, ataupun Megawati. Itu kan nggak konsisten.

Ternyata yang paling menderita egoisme politik itu orang Islam sendiri. Contohnya Deliar Noer. Saya menyesal sekali. Dia kan senior saya yang kita anggap sebagai pelopor ilmu sosial terdepan di bidang politik. Ternyata kayak gitu. Dia seorang ahli politik yang tidak tahu politik. Akhirnya kan suaranya kecil. (Deliar Noer adalah Ketua Umum Partai Ummat Islam, *Ed.).*

Bukankah pemilih mayoritas PDI Perjuangan umat Islam juga?

Dengan sendirinya.

Bisa tidak dikatakan bahwa ikatan-ikatan agama saat ini tidak lagi menentukan?

Kalau itu menjadi persoalannya, sebetulnya dibanding dengan tahun 1955, porsi PKI dan PNI plus unsur-unsur yang lain seperti Parkindo dan Partai Katolik, PDI Perjuangan saat ini masih lebih kecil dari gabungan partai seluruhnya. Jadi tidak bisa diingkari dari sudut agama.

Faktor apa yang sebenarnya menentukan kemenangan PDI-P dalam pemilu kali ini?

Pertama, yang paling dominan adalah faktor psikologis. Ada semacam *protest vote* (suara protes) terhadap Orde Baru. Jadi kemenangan PDI-P merupakan ekspresi keinginan untuk perubahan, sehingga Mega menjadi simbol yang lebih lengkap dibanding yang lain. Dia *dikuya-kuya* (disia-siakan) Pak Harto. Jadi, selama Orba, dia terkesan *underdog*. Di sini berlaku psikologi *underdog*: orang selalu memihak *underdog* karena merasa kasihan. Kedua, Megawati adalah anak Bung Karno. Faktor ketiga, yang jelas unsur PNI dan unsur PKI, yang selama Orde Baru dipinggirkan jauh sekali, kini masuk ke sana. Jadi, jangan heran kalau PDI-P menjadi besar seperti sekarang.

Ada analisis, PDI-P menang karena umat Islam Indonesia lebih banyak yang abangan?

Ah, nggak. Orang PDI-P juga ada yang santri. Persoalannya bukan di situ.

Mengapa PDI-P bisa mengungggguli PKB di Jawa timur yang merupakan basis santri?

Itu artinya politik aliran tidak berlaku lagi. Istilah santri dan abangan tidak relevan lagi. Orang santri sudah menyebar ke mana-mana. Pada tahun 1950-an, tidak terbayangkan PNI membuka acara dengan membaca Al-Qur'an. Kini, dalam acara PDI-P, paling tidak dibuka dengan assalamu'alaikum. Bahkan, pamflet-pamfletnya, sudah membawa-bawa Islam. "Islam agamaku, Ka'bah kiblatku, PDI-P pilihanku." Ya, boleh-boleh saja. Dari dulu saya bilang, Islam harus terbuka untuk semuanya. Siapa saja boleh menggunakannya. Gratis. Tidak boleh dimonopoli. Tahun 1955, mana bisa begitu. Kalau orang Islam mengatakan partainya terbuka untuk non-Muslim, itu bisa disebut *bid'ah*. Kalau partai Islam bilang begitu, pasti disebut partai sekuler. Kalau memakai ukuran tahun 1950-an, partai Islam saat ini

sekuler semua (tertawa). Sebab, mereka menyatakan terbuka untuk non-Muslim.

Mengapa banyak tokoh Islam yang kurang bisa menerima hasil pemilu sekarang ini?

Ya, harus bisa menerima,dong. Dari dulu kan selalu diingatkan, kalau mendirikan partai harus berani kalah. Jadi, mereka harus tulus mengakui bahwa mereka memang tidak dipilih rakyat. Harus begitu, dong. Kalau tidak, buat apa pemilu. Saya betul-betul terharu dengan pernyataan Farid Prawiranegara di harian *Kompas* kemarin. (Dalam wawancara dengan *Kompas*, selaku ketua Partai Bulan Bintang, Farid mengingatkan agar semua pihak berbedar hati menerima hasil pemilu dan apa yang kelak dihasilkan SU MPR. Mengutip pesan almarhum mantan perdana menteri M. Natsir, ia juga mengajak umat Islam agar tidak perlu khawatir dengan masa depan mereka berkaitan dengan hasil pemilu kali ini. "Pak Natsir pernah berpesan, dahulukanlah kepentingan bangsa ini. Apa yang terbaik bagi bangsa ini, pasti terbaik pula bagi umat Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam," katanya).

Anda menyarankan partai Islam menjadi oposisi?

Ya. Hanya umat Islam tidak bisa dibagi pada garis agama, tapi garis politik saja. Orang Islam tidak bisa dibagi antara yang berkuasa atau oposisi. Orang Islam lebih efektif menjadi oposisi sambil belajar untuk menjadi berkuasa, nantinya.

Apa tidak sebaiknya mereka bersatu dalam satu partai?

Biarkan saja begitu. Nggak usah diatur dari atas. Itu kan Orde Lama dan Orde Baru. Orde demokrasi kan harus dibiarkan apa adanya. Karena setiap kali kita mengatur itu berarti kitalah yang tahu itu yang baik dan yang tidak. Bagaimana itu? Lebih baik kita percayakan kepada rakyat. Cita-cita persatuan partai Islam itu sudah kuno. Itu harus ditinggalkan dan mengganggu sekali karena tidak bisa realistis, sedangkan yang merasa sama-sama pewaris Masyumi saja bermacam-macam.

Mereka juga selalu punya alasan mengapa harus mendirikan partai. Tanya saja Deliar Noer, mengapa harus bikin Partai Ummat Islam. Tanyakan kepada siapa saja. Dan kalau mereka bilang ingin bersatu, maksud bersatunya itu mereka yang pimpin. Jadi, persatuan itu tidak mungkin. Oleh karena itu, biarkan saja berkompetisi bebas, dan

biarkan pasar yang menentukan, laku atau tidak jualannya.

Manfaat signifikan oposisi sendiri apa?

Sebetulnya garis oposisi dan pemerintah tidak mengikuti garis agama. Kita harus belajar menghilangkan itu. Orang Islam selalu saja terjerat, karena itu tidak maju-maju. Jangan lalu mengatakan, PKB meninggalkan Islam karena koalisi dengan PDI Perjuangan. Siapa itu yang menentukan meninggalkan dan tidak meninggalkan.

Sistem demokrasi memperhatikan asas proporsionalitas. Dan bagaimana Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia?

Agama dalam hal ini tidak relevan. Mayoritas atau minoritas dalam politik itu adalah mayoritas atau minoritas yang dibuktikan melalui pemilu. Tidak bisa apriori dengan mengatakan umat Islam mayoritas dan oleh karena itu harus berkuasa. Soal berkuasa atau tidak itu kan persoalan politik. Karena itu pemilu, salah satu hikmahnya adalah membuktikan klaim-klaim orang. Wah saya ini hebat, tapi betul nggak di pemilu dipilih rakyat. Jadi jangan kemudian setelah pemilu dilaksanakan masih protes, umat Islam kan mayoritas. Tapi buktinya dalam pemilu nggak menang, bagaimana?

Ada yang bilang, Megawati berkuasa mungkin melahirkan *status quo* baru, atau ada yang menyebutnya, Orde Lama jilid II. Indikasinya, tidak tegas sikapnya terhadap dwifungsi ABRI, tidak mau amandemen UUD 45, bahkan tidak akan mengusut Soeharto. Menurut Anda?

Itu yang paling mengkhawatirkan. Tapi mudah-mudahan itu konsumsi jangka pendek Megawati setelah diketahui Wiranto. Jadi mudah-mudahan setelah itu tidak. Kan banyak juga orang-orang di sekeliling Megawati yang pikirannya reformis. Tapi kalau indikasi itu memang strateginya, ya jelas akan berhadapan dengan kecenderungan yang sangat kuat dari kaum reformis. Mengenai Pak Harto sebagai misal. Sedangkan Andi Ghalib dan Habibie saja sudah seperti itu, apalagi kalau Megawati tetap berpegang pada pernyataannya bahwa memang dia tidak mau mempersoalkan Pak Harto, ya jelas akan berhadapan dengan kepentingan orang banyak. Susah dibayangkan nanti. Di situlah persoalannya; ironisnya, Pak Harto menang melalui musuhnya. Dan itu, lagi-lagi kecerdikan Pak Harto. Dan Megawati kan bisa saja kita "kepung" bersama-sama dalam konteks sistem kontrol sosial.

Bagaimana pandangan Anda terhadap kepemimpinan Megawati jika nanti memimpin pemerintahan?

Nggak apa-apa. Kira-kira nanti seperti Cori Aquino, orang yang baik yang mengerti saja. Tapi seperti Cori, kita harapkan dia menyiapkan Indonesia yang betul-betul demokratis. Jadi pemilihan umum pada 2004 nanti adalah betul-betul pemilu yang demokratis. Artinya, perangkat undang-undangnya betul-betul tidak mengandung unsur darurat, tidak seperti pemilu kali ini yang masih ada unsur daruratnya.

Apa arti penting dari gagasan membentuk fraksi Islam, termasuk upaya mereka membangun "Poros Tengah" dengan menggandeng Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa?

Kalau saya melihat, tidak usah dilihat negatif dulu, tapi pada nilai eksperimennya dalam berdemokrasi. Siapa tahu? Demokrasi kan intinya partisipasi. Dan setiap percobaan dalam melakukan partisipasi itu adalah hak orang.

Termasuk mestinya mereka berani memunculkan calon presiden sendiri, tidak perlu terpolarisasi pada nama Mega dan Habibie?

Oh, ya. Itupun usaha. Cuma semuanya itu kan pasti bakal terkena analisis dan penilaian orang. Orang berhak menganalisis.

Soal calon presiden dari Poros Tengah?

Siapa saja boleh dimunculkan. Karena pemilu itu kemarin proporsional, salah satu konsekuensinya seperti itu. Asalkan, yang penting, proses pemilihannya nanti adil dan jujur Betul, sebagai pendidikan politik boleh-boleh saja memberikan alternatif polarisasi yang lain.

Kalau ada anggapan bahwa partai-partai Islam sedang berusaha menaikkan posisi tawarnya untuk kemudian mengalihkan dukungannya ke Habibie dengan konsesi tertentu?

Ya, partai-partai Islam itu kan kenyataannya punya wakil di sana, itu berarti dikehendaki rakyat. Jadi, mereka mewakili rakyat. Kalau mereka maunya Habibie, ya, hak mereka sebagai wakil rakyat. Jadi, tak bisa lagi digugat, tak bisa disalahkan. Orang boleh saja mengatakan, memilih Habibie sebagai kekeliruan. Tapi, kriteria benar atau salah dalam politik itu kan tidak bisa dihitung di atas kertas putih begitu, tapi dari pemilu sendiri.□

Bab V

Fraksi Islam, Fraksi Reformasi, dan Poros Tengah

Fraksi Islam, Perlukah?

Oleh **Bahtiar Effendy**

GAGASAN tentang perlunya fraksi Islam terus bergulir. Sejumlah praktisi politik Islam memberikan komentar tentang fraksi Islam yang pada dasarnya bersifat afirmatif. Tak kurang Hamzah Haz, Deliar Noer, maupun Achmad Tirtosudiro terlibat dalam mengembangkan wacana tentang fraksi Islam. Jika ide itu terlaksana, diharapkan Islam politik akan tetap berkibar di lembaga legislatif. Karenanya, berbeda dengan anggapan orang yang mengatakan Islam politik bakal habis, dengan berkumpulnya aktivis Islam politik dalam satu fraksi wadah kekuatan Islam politik akan lebih nampak.

Tidak sulit mengapa gagasan seperti itu muncul pada saat seperti ini. Meskipun mungkin masih merupakan suatu yang sifatnya *debatable*, berkembangnya gagasan mengenai fraksi Islam itu erat kaitannya dengan situasi elektoral hasil pemilu. Situasi elektoral hasil pemilu yang dimaksud adalah sedikitnya perolehan suara partai-partai Islam.

Dalam hal perolehan suara ini, sebenarnya sejak hari-hari pertama perhitungan suara, publik sudah dapat melihat arah kecenderungan dari situasi elektoral. Akan tetapi, karena lambatnya proses penghitungan baru hari-hari ini sajalah masyarakat dapat mengetahui secara lebih pasti meskipun belum diumumkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang (dalam hal ini KPU) tentang konfigurasi perolehan suara secara lebih pasti.

Dalam konteks yang disebutkan di atas, kecuali PPP tak ada satu pun partai Islam yang memperoleh suara yang membanggakan. Bahkan, perolehan-perolehan suara itu sedemikian mengejutkan adanya sehingga menimbulkan kesan pada sebagian masyarakat

bahwa menjadikan Islam sebagai suatu kategori politik adalah hal yang tidak *marketable*. Sejumlah analisis yang pernah muncul tentang lebih lakunya partai-partai politik yang bersifat lebih melebar merupakan indikator dari fenomena ini.

Kalau laporan sejumlah media massa dapat dibenarkan, maka akan diperoleh angka seperti berikut. Data yang diolah dari informasi PPI menyebutkan bahwa PPP bakal memperoleh kursi 40-an. Sementara PBB, KPU, PSII, PK dan PP mendapatkan masing-masing 2, 1, 1, 1, 1, dan 1 kursi. Angka perolehan ini segera akan berubah ketika dimasukkan suara dari *stembus accoord* yang jumlahnya bisa sampai 39 kursi itu. Dengan memasukkan perolehan dari *stembus accoord*, akan diperoleh angka lonjakan yang cukup lumayan. PPP misalnya bakal memperoleh 58 kursi; sementara PBB, PK, PNU, Masyumi, dan PSII bisa menikmati 15, 8, 5, 1, dan 1 kursi. Bila digabungkan maka akan diperoleh angka sebesar 80-an lebih.

Kelayakan teknikal

Dari segi teknis, gagasan tentang fraksi Islam ini lebih pada soal penggabungannya, dan bukan namanya! Merupakan 'keharusan'. Ini dalam pengertian tata tertib lembaga legislatif yang mengharuskan adanya fraksi, dan bahkan sempat dikait-kaitkan dengan pengaturan komisi-komisi di DPR. Sebagai kilas balik, kursi PDI di DPR sekarang yang hanya berjumlah 11 itu katanya sempat merepotkan penyusunan komisi-komisi.

Kalau melihat *draft* naskah tata tertib MPR/DPR, pada periode mendatang fraksi-fraksi masih akan ada. Fraksi ini dipahami sebagai 'pengelompokkan anggota berdasarkan kekuatan sosial politik yang mencerminkan partai politik hasil pemilihan umum, atau gabungan partai politik hasil pemilihan umum dan ABRI yang diangkat'. Kalau dalam naskah tata tertib lalu, nama-nama fraksi sudah disebutkan (misalnya, ABRI, Karya Pembangunan, PDI, dan Persatuan Pembangunan), maka dalam draft naskah yang baru, nama-nama itu tidak disebutkan. Sebagai gantinya, tertulis "fraksi…ditetapkan kemudian oleh Dewan dalam Rapat Paripuna."

Atas dasar itu, dari segi teknis sebenarnya pembentukan fraksi merupakan "keharusan". Mengingat kekuasaan real (kursi) dari partai-partai Islam yang sangat kecil jumlahnya itu —setelah memperhitungkan hasil *stembus accoord* hanya PPP dan PBB yang cukup lumayan— maka penggabungan kekuatan dipandang sesuatu yang

harus dilakukan. Penggabungan ini juga sebenarnya mempermudah tugas DPR ketika merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan jumlah komisi dan siapa-siapa yang duduk di sana.

Di pihak lain, bagi partai-partai politik Islam, dengan penggabungan kekuatan itu, pengaruhnya juga akan lebih besar. Ini terutama dalam hal tingkat keterwakilan di komisi-komisi DPR yang akan terbentuk. Bayangkan saja —apalagi jika hanya dengan mendasarkan perolehan suara murni (artinya hasil perolehan dari *stembus accoord* tidak dimasukkan)— bagaimana publik bisa mengharapkan kinerja yang memuaskan dari partai-partai Islam dengan jumlah perolehan suara yang sangat minim itu bahkan tidak memenuhi *threshold* (2%) yang telah ditetapkan (masih belum diketahui apa yang akan terjadi dengan peraturan mengenai *threshold* ini, mengingat wakil dari partai-partai di KPU masih mempersoalkannya).

Dalam prespektif persoalan seperti digambarkan di atas, sebenarnya penggabungan merupakan *win-win solution* sesuatu yang rasanya aneh dalam politik baik bagi partai-partai Islam dan kemudahan menetapkan komisi-komisi di DPR beserta aturan-aturannya.

Kontroversi nama

Dengan mempertimbangkan soal kelayakan teknis di atas, perdebatan yang sekarang muncul tentang fraksi Islam sebenarnya hanya berkaitan soal nama. Yakni, bahwa penggabungan ini mungkin saja demi kemudahan teknis belaka memakai nama fraksi Islam. Dalam tradisi politik Indonesia, menjadikan Islam sebagai kategori politik bisa menimbulkan presepsi-presepsi yang kurang mengenakkan. Presepsi itu tidak mesti muncul dari kalangan non-Islam, bahkan juga dari kalangan Muslim sendiri. Dalam konteks fraksi Islam ini, perdebatan tentang hal ini yang dilakukan Aisyah Amini (PPP) dan Khofifah Indar Parawansa (PKB) dalam waktu yang belum terlalu lama, keduanya adalah praktisi-praktisi politik Islam handal di PPP yang melibatkan isu-isu yang bersifat aliran, merupakan indikator tentang pandangan stereotip sebagian masyarakat terhadap penggunaan Islam sebagai *trademark* politik. Dan belum tentu semuanya itu semata-mata disebabkan oleh ideologi Islamophobia.

Atas dasar itu, yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana substansi gagasan itu bisa tetap bergulir, tanpa harus mengalami hambatan-hambatan prematur hanya karena soal nama. Konfigurasi perolehan suara hasil pemilu 7 Juni 1999 merupakan justifikasi poli-

tik bagi partai-partai Islam untuk mencuatkan perlunya penggabungan kekuatan-kekuatan mereka dalam sebuah fraksi. Dengan demikian, ide itu sendiri jelas merupakan reaksi politik yang bersifat sangat alamiah. Ia berkaitan dengan kelanjutan kehidupan politik masing-masing partai, khususnya yang memperoleh suara sangat sedikit. Jika demikian halnya, maka sebenarnya nama hanya merupakan sesuatu yang sifatnya sekunder. Dan perdebatan sebenarnya tidak perlu diarahkan pada soal nama, tetapi substansi persoalan tentang keperluan dan kelayakan penggabungan kekuatan partai-partai Islam dalam sebuah fraksi.

Fraksi atau satu partai Islam

Disadari atau tidak pemilu kali ini, khususnya dari sudut perolehan suara, telah memberi pelajaran berharga pada banyak aktivis politik Islam. Dan, masih dalam hal yang sama, *stembus accoord* telah membukakan mata-hati mereka bahwa bersatu itu jauh lebih menguntungkan daripada mengayunkan perjuangan secara fragmentaris, yang terpolarisasikan dalam bentuk partai-partai Islam yang jumlahnya amat banyak itu. Kalau pembentukan fraksi Islam, atau apapun namanya, telah dirasakan keperluannya oleh para praktisi politik Islam, bukankah sudah saatnya mereka membuka kembali kemungkinan-kemungkinan untuk mendorong gagasan tersebut ke arah sesuatu yang lebih konkret dan tidak menimbulkan penilaian stereotip yang bukan-bukan? Dalam hal ini, yang dimaksud adalah keperluan menggabungkan kekuatan partai-partai Islam ke dalam sebuah wadah politik yang lebih solid. Gagasan seperti ini sebenarnya akan mudah terealisasikan kalau para praktisi politik Islam itu mau berpikir kolegial dan pragmatis. Sayangnya, seperti dibuktikan pada beberapa bulan terakhir ini, masing-masing lebih terpengaruh pada keinginan untuk memanfaatkan liberalisasi dan relaksasi politik yang terbuka sejak satu tahun terakhir ini dalam bentuk dan cara-cara yang lebih individual.

Dalam kaitannya dengan itu, tanpa harus berlaku diskriminatif, betapapun harus diakui bahwa PPP merupakan partai Islam yang paling solid. Perolehan suara yang masih cukup lumayan itu, meskipun harus bersaing ketat —dalam pengertian yang sebenarnya— dengan PKB, merupakan bukti konkret. Itu semua merefleksikan sumberdaya yang dimiliki oleh PPP baik dalam hal pendukung atau jaringan institusi kepartaian. Dan yang lebih penting lagi adalah sum-

berdaya yang bersifat *party identification,* sesuatu yang paling berpengaruh untuk menarik suara, lebih dari kampanye itu sendiri.

Kalau dilihat bahwa PPP jualah sebenarnya yang berada di garda depan dalam soal pembentukan fraksi Islam ini, apa tidak lebih baik kalau semua usaha itu diarahkan pada peleburan kekuatan-kekuatan politik Islam ke dalam PPP? Yang paling tahu atas kemungkinan-kemungkinan ini adalah 'kalangan dalam' sendiri. Mereka yang berada di luar tidak mempunyai kelengkapan informasi dan —yang paling penting adalah— psikologi politik dari para tokohnya setelah dihadapkan pada kenyataan yang kurang menggembirakan ini.

Waktu yang tersedia tidak terlalu lama sebenarnya, kalau Sidang Umum MPR yang dijadikan ukuran mungkin sulit untuk dikatakan cukup. Merealisasikan terwujudnya fraksi Islam dalam Sidang Umum MPR mendatang, dilihat dari segi waktu, mungkin lebih gampang. Akan tetapi, dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan hambatan yang bakal ditemui mungkin lebih berat. Ini bukan dalam pengertian peraturan-peraturan draft naskah tata tertib tidak mengisyaratkan hal itu tetapi lebih pada wacana yang bakal bermunculan di hari-hari mendatang. Apalagi kalau hal itu dikait-kaitkan dengan dukungan terhadap seorang calon presiden.

Dengan asumsi-asumsi seperti itu, barangkali merealisasikan terwujudnya satu partai politik Islam adalah lebih mudah. Ini bisa saja dilakukan dengan cara mendeklarasikan penggabungan partai-partai Islam ke dalam satu partai yang dianggap memungkinkan. Dalam hal ini, isyarat yang ditampilkan di atas adalah PPP. Langkah demikian relatif bebas dari hambatan-hambatan yang bersifat Islamophobia itu. Karena sosok PPP sudah sangat dikenal oleh masyarakat politik Indonesia sejak pertama kali partai ini diciptakan. Perubahan asas dan simbol yang dialami PPP tidak menimbulkan akibat-akibat yang cukup berarti dalam konteks persoalan yang dimaksud.

Jika gagasan ini terlaksana, bukan saja soal penggabungan kekuatan bisa diselesaikan, dan tuduhan sektarianisme bisa relatif ditepiskan; langkah ini sekaligus dapat membantu mematahkan mitos tercerai-berainya kekuatan politik Islam. Apalagi, demikian kalau impian ini mau diteruskan, jika mau melibatkan partai-partai politik berbasis Islam (menurut kalangan PK termasuk PKB dan PAN) beserta kalangan Islam yang berada di partai-partai lain, bisa jadi hal itu akan menciptakan kekuatan dahsyat. Tentu, dalam hal ini, kita tidak bicara dalam konteks fraksi atau satu partai, tapi kaukus.□

Fraksi Islam, Oposisi, dan Reposisi

Oleh **Alfan M. Alfian**

RAKORNAS ICMI di Bandung beberapa waktu lalu menggulirkan satu wacana menarik bagi perkembangan Islam politik di tanah air, yakni perlunya dibentuk Fraksi Islam di MPR. Gagasan itu sebelumnya telah menjadi gagasan bersama partai-partai Islam untuk bergabung dalam satu fraksi politik di DPR-MPR. Tipisnya perolehan suara atas masing-masing partai politik Islam di Pemilu 1999, semakin mengkristalkan gagasan ini untuk segera direalisasikan. Pertimbangannya sederhana, bila tidak bersatu dalam satu kekuatan politik, maka kelompok Islam akan mengalami marginalisasi kembali. Dalam konteks ini, dukungan ICMI tersebut bisa dipahami.

Nama fraksi Islam, dalam konteks ini absah dipakai untuk menyebut gabungan partai-partai politik beridentitas Islam, sebagaimana absah pula bila kelompok politik lain membikin fraksi Kristen atau fraksi Nasionalis. 'Islam' di sini merupakan kelompok politik dengan pengedepanan simbol-simbol Islam politik. Ia hanya label semata untuk menandai himpunan politik yang mewujud dalam satu fraksi politik. Terlepas dari makna ini, kehadiran partai politik dan fraksi Islam di DPR-MPR tentu lebih dituntut untuk tidak mengecewakan umat Islam yang beragam persepsinya dalam memandang politik.

Secara teknis gagasan M Saleh Khalid mengenai wujud fraksi Islam yang sifatnya konfederatif perlu dipertimbangkan. Artinya, fraksi Islam tetap menjaga wilayah kedaulatan masing-masing anggota di dalamnya, tanpa perlu merasa mengecilkan. Mereka saling menopang dan menjaga eksistensi masing-masing, agar tetap padu dan kuat —tidak selalu reaktif, tapi lebih banyak proaktif. Bila ini terjadi

maka satu ijtihad politik model baru bakal terjadi di Indonesia.

Secara eksplisit, gagasan perlunya fraksi Islam menegaskan masih adanya peluang atau kesempatan yang bisa diraih secara politis, bila partai-partai Islam bersatu. Artinya, mereka masih punya kesempatan 'mengendalikan kekuasaan' secara signifikan tanpa harus memformalkan diri menjadi kelompok oposisi —mengingat wacana yang sempat berkembang belakangan cenderung menyarankan agar Islam politik sebaiknya menjadi 'kelompok oposisi'. Partai-partai Islam tidak harus menjadi 'kelompok oposisi', bila ternyata mereka berhasil menggalang kekuatan politik yang padu di legislatif, dan memperoleh posisi yang signifikan di pemerintahan. Bila demikian, apakah pemikiran Fraksi Islam di DPR-MPR ini dimaksudkan menangkal pemikiran oposisionalisasi?

Oposisi

Pemikiran bahwa sebaiknya partai-partai Islam memfungsikan dirinya sebagai kelompok oposisi, bagaimanapun merupakan pemikiran politik rasional. Tatkala eksperimentasi Islam politik menunjukkan kegagalannya secara optimal dalam peta perolehan suara pemilu 1999, maka alternatif oposionalisasi terhadapnya amat logis. Gagasan optimalisasi fungsi oposisi politik acapkali dilontarkan Nurcholish Madjid. Bahkan Cak Nur berharap agar kekuatan oposisi terlembagakan. Menyangkut posisi politik umat Islam Cak Nur menilai ''orang Islam lebih efektif menjadi oposisi sambil belajar berkuasa, nantinya'' (*Panji Masyarakat*, 16/6/1999).

Terlepas dari itu, untuk menjadi kekuatan politik yang handal dan kuat, mutlak perlu dilakukan koalisi politik. Sebab, dalam situasi politik multipartai, koalisi politik merupakan kemestian yang harus dilakukan partai-partai politik manapun. Logikanya sederhana: Pertama, tidak ada kekuatan politik yang memperoleh suara mutlak bila dibandingkan dengan gabungan partai-partai lain sekalipun. Kedua, koalisi politik menekankan adanya satu persamaan tujuan atau persepsi, juga kedekatan ideologis. Kondisi politik pasca Soeharto menggerakkan isu politik sentral, yaitu entitas politik reformis melawan *status quo*. Kedekatan ideologis merupakan faktor utama yang mampu merekatkan pola koalisi politik menjadi kokoh, dan terkadang mengalahkan pertimbangan-pertimbangan lain. Ketiga, pemilu multipartai mengisyaratkan adanya pola politik posisi kontra oposisi. Maka, koalisi politik tak bisa dihindarkan adanya.

Dalam konteks partai-partai politik Islam, koalisi mesti dilakukan, setidaknya karena dua sebab. Pertama, ada kedekatan ideologis yang sangat kuat untuk mempersatukan mereka dalam satu gugus politik. Bagaimanapun, partai-partai Islam akan memiliki pemikiran dan barangkali tindakan yang sama bila dihadapkan pada persoalan-persoalan politik yang mengancam eksistensi mereka. Pendekatan ideologi dalam koalisi merupakan satu kecenderungan yang wajar dan paling memungkinkan —bila mereka merasa ada *common enemy* yang secara substantif mengancam pijakan ideologis mereka.

Kedua, ada persamaan kepentingan politik. Partai-partai Islam dalam hal-hal tertentu memiliki kesamaan kepentingan yang mesti diperjuangkan bersama-sama, agar lebih kuat dan hasilnya optimal. Dalam konteks pascapemilu kepentingan bersama itu perlu digumpalkan untuk membendung laju 'kekuatan politik lawan' —dalam konteks ini partai-partai Nasionalis-Sekuler dan Non-Muslim. Selain itu, kepentingan-kepentingan politik lain yang dimaksudkan antara lain tantangan di seputar amandemen UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, komposisi kabinet mendatang, posisi TNI, serta agenda-agenda lain semisal menggolkan kepentingan-kepentingan ''hukum Islam'' ke hukum nasional, serta aspek-aspek hukum lain yang tidak merugikan umat Islam. Bila zaman Orde Baru PPP banyak berjuang sendirian dalam menyuarakan aspirasi politik umat Islam, kini banyak partai Islam yang harusnya lebih siap dan kompak dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Bersamaan dengan itu konflik-konflik politik yang tidak perlu harus ditinggalkan.

Kebutuhan fraksi Islam di DPR-MPR, bagaimanapun tidak akan lepas dari fungsi-fungsi oposisionalisasi. Hal ini didasari atas kenyataan bahwa tidak ada satu arus tunggal kekuatan politik yang meniadakan kekuatan politik lain. Maka ketika fraksi Islam eksis, sebenarnya ia juga melakukan fungsi-fungsi oposisi politik. Tarik-menarik antarkekuatan politik, yang bila disederhanakan terjadi antara kelompok Islam dengan kelompok Nasionalis-Sekuler, senantiasa terjadi dalam konteks oposisi kontra oposisi.

Reposisi

Upaya ICMI mendukung terbentuknya fraksi Islam, bisa juga dibaca sebagai upaya reposisi politik atas kekuatan politik Islam pascapemilu. Pemikiran oposisi memang sah-sah saja, namun sebelum

itu terjadi upaya reposisi politik perlu dijalankan mengingat kekuatan politik Islam kini bisa jadi faktor penentu di SU MPR mendatang. Fraksi Islam akan memiliki sederet peluang dan kemungkinan di SU MPR kelak, sehingga posisi kekuatan Islam politik di parlemen tidak terombang-ambing.

Kini, seolah-olah ada dua kubu capres yang mengedepan sebelum SU MPR, yakni kubu Megawati dan kubu B.J. Habibie. Dalam konteks ini, reposisi politik bagi partai-partai Islam bermakna signifikan sebagai salah satu faktor politik penentu. Tapi, semua masih bakal berproses. Bisa jadi fraksi Islam memiliki calonnya sendiri sebagai alternatif yang dinilai paling memungkinkan. Bila ini yang dimaksud, eksistensi partai Islam di arena SU MPR kelak, tidaklah bisa disepelekan.

Pemikiran perlunya fraksi Islam, dalam konteks ini dimaksudkan untuk memposisikan kembali kekuatan politik Islam, sehingga agenda-agenda politik bersama mampu diperjuangkan dengan elegan dan optimal. ICMI pasca Rakornas di Bandung, agaknya telah mengambil 'garis tegas' ihwal apa sebaiknya yang dilakukan partai-partai politik Islam. Penilaiannya terhadap B.J. Habibie sebagai capres terbaik, membikin ICMI dengan mudah dituduh sebagai ormas yang tidak mampu lagi menunjukkan independensinya —walaupun menilai, bukan berarti mendukung.

Upaya yang dilakukan ICMI dan partai-partai politik Islam untuk menggolkan ide fraksi Islam, dalam kacamata demokrasi adalah hal yang wajar —meskipun banyak pihak yang menilai langkah ini dapat membuat mundur demokrasi. Tapi, bukan tanpa risiko, semisal cap sektarian, menjual agama dan sebagainya. Karenanya hal-hal sedemikian harus diantisipasi, selain lewat pendekatan konstitusi, juga lewat pendekatan kultural. Fraksi Islam memperjuangkan kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia dalam konteks yang luas.

Dalam arena SU MPR kelak diperkirakan akan terjadi aliansi dan realiansi politik, sehingga skenario politik yang bisa diperkirakan pun amat variatif. Aliansi dan realiansi politik pada akhirnya lebih ditentukan pertimbangan *who gets what*, mengatasi pertimbangan-pertimbangan lain. Satu catatan untuk fraksi Islam, *who gets what* dalam konteks ini jelas —dan harus konsisten bahwa yang lebih penting kekuatan politik Islam mendapat posisi yang strategis untuk memperjuangkan aspirasi politik umat secara luas. Apalagi, salah satu faktor perekatnya adalah adanya *common enemy*, baik secara

politis maupun ideologis. Aliansi atau koalisi politik Islam akan terus diuji sejauh manakah daya banting atau daya tahannya dalam menghadapi dinamika politik yang tampak makin kompleks.

Jelaslah situasi pascapemilu membikin kelompok politik Islam dihadapkan pada situasi yang lain dari yang lain. Selain telah dibangunkan dari 'tidur panjangnya', Islam politik di Indonesia ternyata harus menyesuaikan diri dengan alam realitas. Berpolitik tidaklah sederhana, sebagaimana yang mereka bayangkan secara apriori, bahwa karena secara statistik umat Islam mayoritas, pasti akan nomor satu. Buktinya, tidak selalu demikian. Inilah risiko demokrasi. Maka, pekerjaan rumah yang panjang pun menanti: elit partai politik Islam harus *step by step* kembali dalam merumuskan strategi yang tepat untuk merayu umat yang secara politis banyak yang belum sadar politik, apalagi ideologis. Oleh karenanya eksperimentasi fraksi Islam tidak boleh gagal, terutama dalam memompa semangat politik umat untuk mengikuti secara seksama makna Islam bila diimplementasikan secara politis. *Wallahua'lam*.□

Fraksi Islam

Oleh **Azyumardi Azra**

FRAKSI Islam cukup potensial untuk lebih variabel, mampu bertahan, dibanding fraksi-fraksi lain. Keberhasilannya tentu saja masih bergantung pada menggalang kerja sama dan kesediaan para pemimpin dan elit parpol-parpol dalam Fraksi Islam itu untuk mengedepankan kompromi dan akomodasi diantara mereka sendiri.

Sebuah fraksi besar agaknya akan muncul di DPR/MPR hasil Pemilu 1999. Fraksi itu adalah "Fraksi Islam", yang dibayangkan para penggagasnya sebagai koalisi antara delapan parpol Islam, yaitu PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PPII Masyumi, PSII 1905, PUI, plus PKB dan PAN. Menurut prediksi Hamzah Haz, Ketua Umum PPP yang merupakan penggagas utama rencana itu, Fraksi Islam tersebut akan memperoleh sekitar 178 kursi di DPR. Angka itu tentu saja melebihi prediksi perolehan kursi PDI-P sebanyak 151 kursi dan Partai Golkar sejumlah 125 kursi. Atas dasar prediksi tersebut, Hamzah Haz memandang Fraksi Islam itu akan menjadi salah satu kekuatan dalam Sidang Umum (SU) MPR mendatang.

Gagasan tentang Fraksi Islam itu mengisyaratkan bahwa sayap politik Islam belum habis dengan kekalahan parpol-parpol Islam dalam pemilu lalu. Bahkan, kekalahan itu kelihatannya dijadikan momentum untuk mengkonsolidasi diri. Dari segi itu, gagasan tersebut dapat dikatakan sebuah terobosan untuk mengatasi fragmentasi yang cukup akut dalam kepemimpinan politik Islam. Toh, ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih jauh. Misalnya, seberapa besar *feasibility* dan *viability* Fraksi Islam itu. Lantas, apa dampak kemunculannya bagi perkembangan politik Indonesia di hari-hari mendatang.

Gagasan atau rencana pembentukan fraksi tersebut, menurut

hemat saya, *feasible* dan *viable*. Paling tidak, karena ada empat alasan.

Pertama, parpol-parpol Islam, khususnya delapan parpol yang tergabung dalam *stembus accoord*, tampak relatif solid atas dasar kesamaan asas sebagai partai Islam dan semangat ukhuwah Islamiah, kecuali tentunya PKB dan PAN yang bukan parpol Islam. PKB dan PAN, yang masing-masing berbasis utama dua organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, kelihatannya masih menjajaki berbagai kemungkinan memperoleh *bargaining position* yang lebih menguntungkan dalam koalisi dengan pihak mana pun. Tapi, penting dicatat, jika PKB dan PAN berkoalisi dengan PPP dan parpol-parpol Islam *stembus accoord* lainnya, mereka akan berada dalam posisi relatif kuat. Sebaliknya, jika PKB dan PAN berkoalisi dengan PDI-P atau Partai Golkar, keduanya berada pada posisi di bawah angin.

Kedua, Fraksi Islam itu tidak melibatkan pihak yang terbebani *historical burden*, beban sejarah, seperti yang dengan sangat berat harus dipikul Partai Golkar. Di antara parpol-parpol Islam yang bergabung, memang, PPP sama dengan Partai Golkar sebagai warisan Orde Baru. Tapi, berbeda dengan Partai Golkar —meski telah melakukan berbagai upaya pembaruan, sehingga menyebut dirinya "Golkar Baru"— PPP dapat mengklaim dirinya sebagai kekuatan *dissent*, kalau tidak oposisi, menghadapi mesin kekuasaan Orde Baru. Jadi, PPP terbebas dari *historical burden* dan stigma negatif, apalagi parpol-parpol Islam lain ataupun PKB dan PAN.

Ketiga, Fraksi Islam itu memiliki *platform* reformasi yang relatif sama. PAN, PPP, dan parpol Islam lainnya hampir sama-sama tegas dalam menuntut pengadilan bagi mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan dwifungsi ABRI, dan amandemen terhadap UUD 1945. Sikap kompromistik dan akomodatif dalam hal-hal pokok reformasi ini ditawarkan PKB. Dari segi itu, Fraksi Islam secara keseluruhan dapat dikatakan paling, atau setidaknya, lebih reformis dibanding "Fraksi PDI-P" ataupun "Fraksi Partai Golkar", yang *platform* reformasi mereka masing-masing sampai saat ini masih menjadi tanda tanya.

Keempat, dan ini agaknya cukup penting, Fraksi Islam juga bisa terbebas dari eskalasi politik akibat kristalisasi dua calon presiden terkuat, yakni Megawati, yang menurut PDI-P tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan B.J. Habibie, yang masih menjadi calon tunggal Partai Golkar. Memang, pada tahap sekarang ini masih terlalu dini berbicara tentang calon presiden alternatif, termasuk kemungkinan calon

presiden lain dari Fraksi Islam. Namun, jika ramalan bakal terjadi *deadlock* dalam pemilihan presiden benar-benar terjadi pada SU MPR, calon presiden dari Fraksi Islam bisa menjadi jalan tengah dan kompromi.

Dengan berbagai alasan itu, Fraksi Islam —jika nanti benar-benar terbentuk— cukup potensial untuk lebih *viable*, mampu bertahan, dibanding fraksi-fraksi lain. Keberhasilannya tentu saja masih tergantung pula pada kemampuan menggalang kerja sama atau bahkan "koalisi informal" dengan pihak-pihak yang mungkin diajak berkoalisi dalam SU MPR nanti. Prasyarat *viability* lainnya adalah kesediaan para pemimpin dan elit parpol-parpol dalam Fraksi Islam itu mengedepankan kompromi dan akomodasi di antara mereka sendiri di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Jika ini bisa mereka lakukan, elit politik Muslim telah memberikan teladan kepada umat mereka tentang aktualisasi demokrasi dan *ukhuwah Islamiah* yang sering mereka dengungkan. Dalam konteks ini, pembentukan Fraksi Islam merupakan *moment of truth*, tidak hanya bagi elit politik Muslim, tapi juga bagi umat secara keseluruhan.

Pembentukan Fraksi Islam, lebih jauh, dapat disebut sebagai langkah awal menuju *imamah* politik bagi kaum Muslimin. Dari situ selanjutnya dapat dikembangkan imamah program, kesatuan visi, dan gerak program untuk memajukan umat, bangsa, dan negara. Di situ, dikotomisasi antara "Islam politik" dan "Islam kultural", yang belakangan ini ramai dibicarakan, agaknya dapat sekaligus diminimalisasi. Dan, dengan demikian, pemimpin, cendekiawan, dan umat Islam tidak lagi disibukkan perdebatan dan pertengkaran yang tidak perlu.□

"Fraksi Islam" dan "Poros Tengah"

Oleh **Hartono Mardjono**

LAHIRNYA gagasan untuk mendirikan Fraksi Islam di MPR di kalangan partai-partai Islam yang melakukan *stembus accoord* telah menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra, suatu hal biasa dalam sebuah negara demokrasi. Demikian pula ketika Amien Rais untuk pertama kali menyampaikan pikirannya tentang "Poros Tengah".

Munculnya kedua fenomena tersebut —"Fraksi Islam" dan "Poros Tengah"— ternyata kemudian telah menimbulkan berbagai penafsiran yang tidak sesuai dengan realitanya. Sebab, ada yang beranggapan Fraksi Islam dengan sendirinya telah tak ada lagi karena telah mengembang dan menjadi masuk ke dalam kelompok yang lebih besar, yaitu kelompok "Poros Tengah". Anggapan seperti itu tentu tidak tepat, karena tak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada dan terjadi.

Fraksi Islam lahir tidak secara tiba-tiba atau mendadak lantaran sesuatu sebab yang bersifat situasional. Ia telah berproses panjang. Dimulai sejak berdirinya Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) pada menjelang tahun 1980, yang antara lain dipelopori oleh almarhum Mohammad Natsir dan almarhum KH Masykur. FUI beranggotakan eksponen-eksponen para tokoh umat Islam, baik yang berasal dari ormas-ormas Islam, organisasi-organisasi dakwah Islam, maupun pribadi-pribadi. Selain kedua tokoh pemrakarsa tersebut antara lain duduk para tokoh dan eksponen dari NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah, Persis, PUI, SI, Perti, Al Washliyah, Al Irsyad, Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Seluruh Indonesia (BKSPPI), dan lain-lain.

FUI didirikan dalam suasana umat Islam menghadapi keadaan yang sangat mencekam yang dirasakan seluruh masyarakat, khusus-

nya umat Islam, akibat tekanan-tekanan penguasa Orde Baru. Kehidupan demokrasi sudah tak lagi ada, badan-badan permusyawaratan dan perwakilan rakyat dibentuk sangat artifisial (semu) yang tak lagi menyuarakan aspirasi rakyat, namun sekadar sebagai pemberi legitimasi bagi setiap kehendak penguasa. Mekanisme demokrasi dan konstitusi tak lagi menunjukkan substansialitasnya, tetapi hanya bersifat formalistik semata-mata.

Kesemuanya itu telah melahirkan maraknya kehidupan korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sisi-sisi kehidupan lainnya. Umat Islam yang merupakan mayoritas di negeri ini kian hari kian dipinggirkan dan dipojokkan, bahkan selalu dijadikan sasaran fitnah dan pancingan. Aspirasinya selalu dicap sebagai aliran sektarianisme atau primordialisme yang tak pernah terkait memikirkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara secara keseluruhan, yang di dalamnya termasuk kepentingan semua golongan.

Sejarah perjuangan umat Islam, dengan segala aspirasi dan motivasinya untuk memerdekakan bangsa ini, kemudian membela dan mempertahankannya dari berbagai ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam, yang kesemuanya bersumber pada akidah Islamiyah yang mereka yakini, oleh dua rezim Orde Lama dan Orde Baru seakan hendak dinafikan. Penafian itu mereka lakukan sekadar untuk menghapuskan kebenaran dari sejarah perjalanan bangsa dan negara ini, dan sekaligus untuk mereka jadikan dalih bagi pembenaran jargon politik yang mereka ciptakan sendiri, bahwa Islam dan umatnya bersifat dan selalu bersikap sektarian dan primordial.

Peran dan jasa umat Islam, yang antara lain di bawah seorang tokoh militer Muslim Panglima Besar Jenderal Sudirman terus bergerilya melawan tentara kolonial Belanda dan peran tokoh partai Islam Syafruddin Prawiranegara yang telah membentuk Pemerintah Darurat RI, tatkala pemerintahan negeri ini sudah tidak ada karena para pemimpinnya ditangkap dan ditahan Belanda di Pulau Bangka, mereka hapuskan dari sejarah. Demikian pula ketika tokoh partai Islam Mohammad Roem tampil menghadapi diplomasi Belanda, sehingga melalui kesepakatan Roem-Royen berhasil mengembalikan seluruh daerah yang diduduki tentara kolonial Belanda kembali ke pangkuan RI, maupun tokoh partai Islam Mohammad Natsir yang berhasil menyatupadukan kembali negara ini ke dalam Negara Kesatuan RI.

Pembuktian atas semangat mereka yang lahir dari dasar akidah Islamiyah untuk membela bangsa dan negara ini seakan hendak mereka campakkan, hanya sekadar untuk memberikan legitimasi atas "kebenaran" jargon politik mereka, bahwa Islam adalah sektarian dan primordial. Niat dan tekad tidak fair demikian hingga saat ini masih saja dimunculkan, justru tatkala kedua rezim itu tak lagi berkuasa secara fisik.

Belum berhasilnya upaya para pemimpin umat untuk hanya menampilkan sebuah partai politik Islam sejak lahirnya FUI, sebenarnya lebih disebabkan karena dua hal. Pertama, pada awalnya karena pada tahun 1980-an sampai tahun 1997, kesempatan memang sama sekali tertutup. Sikap represif dan pemaksaan kehendak dari penguasa terhadap hak-hak demokrasi rakyat sangat kuat, baik secara yuridis formal maupun secara fisik. Kedua, kesempatan yang kemudian terbuka, yaitu pada pertengahan tahun 1998, waktu yang tersedia untuk mengupayakan hal itu menjadi sangat sempit, karena sudah didesak untuk segera ikut di dalam Pemilu 1999. Itulah sebabnya, akhirnya dicapai suatu "pengertian" di antara para tokoh itu untuk masing-masing mendirikan partai Islam sendiri-sendiri, tetapi dengan *tetap* pada tekad untuk bersatu dalam persepsi, visi, dan misi, bahwa partai-partai itu, dengan landasan akidah Islamiyah berjuang demi kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara.

Keislaman dan keindonesiaan akan tetap menjadi *platform* dan merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisah-pisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Tak ada sedikit pun pemikiran untuk bersikap eksklusif dari kemajemukan kehidupan bangsa ini. Itulah sebabnya, partai-partai Islam itu bersepakat untuk membentuk forum silaturahmi di antara mereka, yang sejak berdirinya secara kontinu dan efektif selalu melakukan musyawarah. Hal-hal positif yang mereka capai, antara lain, kesepakatan untuk bertabligh akbar bersama, bahkan melakukan bentuk-bentuk kampanye bersama guna mensosialisasikan gagasan-gagasan bersama berdasarkan aspirasi umat Islam bagi kepentingan nusa dan bangsa.

Hasil lain adalah kesepakatan *stembus accoord* yang ternyata tidak mengecewakan, dan berhasil melahirkan sebuah "kekuatan ketiga" dari dua kubu kekuatan politik yang selama ini sudah lebih menampakkan tanda-tanda berkesepihakan dalam upaya menggolkan calon presidennya masing-masing. Dua kubu itu sudah tidak lagi berbicara tentang komitmennya terhadap cita-cita dan tekad kita bersama un-

tuk mewujudkan reformasi.

Tekad partai-partai Islam untuk bersatu dalam berjuang bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara menjadi semakin dipacu oleh adanya realita demikian. Karena itu mereka pun, dengan membentuk satu kelompok kerja, bersama-sama menyiapkan konsep-konsep pemikiran bersama dalam menghadapi Sidang Umum MPR, agar dapat menyajikan yang terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara, di samping berusaha untuk mengajak semua pihak yang mempunyai komitmen yang sama terhadap tekad untuk mewujudkan cita-cita reformasi, bersama-sama duduk dalam satu meja guna memecahkan masalah-masalah nasional.

Dalam pengamatan penulis, Fraksi Islam tidak pernah berbicara tentang siapa yang bakal dicalonkannya menjadi presiden, apalagi berbicara untuk mendukung atau menjegal salah satu calon yang selama ini diramaikan. Fraksi Islam bekerja justru lebih untuk meyakinkan semua pihak, baik yang terlibat dalam pertikaian maupun yang tidak, agar mereka menyadari, bahwa semua persoalan yang tengah dihadapi bangsa dan negara ini adalah persoalan bersama, bukan persoalan mereka masing-masing. Menjadi obsesi Fraksi Islam, bagaimana agar semua pihak —termasuk Fraksi Islam sendiri— yang notabene seimbang kekuatannya, mau duduk bersama dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan nasional, baik tentang konsep-konsep pemecahan masalah maupun kelak untuk menetapkan, siapa yang sepatutnya menjadi presiden, yang diperhitungkan bakal mampu memikul amanat untuk menjalankan konsep-konsep tersebut.

Bila Fraksi Islam secara sepihak ikut-ikutan memunculkan seorang nama calon presiden, maka hasilnya hanya akan menambah keruwetan, karena calonnya toh hanya akan didukung oleh konstituennya sendiri. Nama calon presiden sebaiknya lahir dari forum kebersamaan yang duduk di satu meja tadi, sesudah mereka bersama-sama berhasil merumuskan komitmen untuk mewujudkan cita-cita reformasi.

Karena itu, sesuai dengan pengamatan penulis, Fraksi Islam akan tetap menjaga jarak yang sama terhadap kekuatan-kekuatan politik yang ada, seperti PDI-P, Golkar, PKB, dan PAN, maupun TNI. Siapa pun boleh ikut bersama-sama membawa “tongkat sikap perjuangan” Fraksi Islam tersebut, sepanjang tidak akan membawanya lari sendiri dan menukarnya dengan “tongkat” lain, seperti pengajuan calon

presiden. Karena itu, dalam pandangan Fraksi Islam, yang dimaksud dengan "Poros Tengah" adalah siapa saja yang sepakat dengan prinsip-prinsip pemikiran Fraksi Islam sebagaimana diuraikan di atas. Bukan pihak yang pagi-pagi sudah berbicara sepihak tentang siapa calon presiden.□

Membabat Habis Mitos Jumlah Terbesar

Oleh **Kuntowijoyo**

HARI-HARI ini, dua pihak yang berseberangan, yaitu partai-partai berasas Islam dan PDI Perjuangan (PDI-P), sedang prihatin berat. Partai-partai berasas Islam sedang susah, karena bagaimana mungkin di negeri yang mayoritasnya beragama Islam, mereka bisa kalah suara dengan PDI-P yang dipersangkakan sebagal anti-Islam. Sebaliknya, PDI-P merasa menjadi partai yang memenangkan pemilu, tapi khawatir setengah mati kalau-kalau calon presidennya, Megawati Soekarnoputri, tidak terpilih di sidang MPR gara-gara adanya kekurangan pada pribadinya.

Reaksi dari partai-partai Islam masih berada di tingkat elit, yaitu dengan rencana pembentukan fraksi Islam di MPR sesudah mereka mengadakan *stembus accoord* pada prapemilu. Reaksi PDI-P seram. Seperti mau Bharatayudha, mereka menyelenggarakan aksi "cap jempol darah" di tingkat *grass roots*.

Kedua reaksi itu mempunyai sebab yang sama, yaitu mitos tentang jumlah yang terbesar. Selain itu, keduanya hampir-hampir mempunyai sejarah yang sama. Di bawah rezim Orde Baru, Islam politik dan PDI-P mengalami marjinalisasi, sekalipun Islam politik jauh lebih lama dan penuh darah. Partai-partai berasas Islam kecewa pada sejarah yang tidak berpihak pada mereka, PDI-P khawatir pada sejarah yang akan datang.

Kita pun berhak khawatir pada sejarah yang akan tiba, sebab keduanya berpotensi besar membuat Indonesia kacau. Selama ini, pihak Islam politik masih dapat menahan diri. Reaksi mereka masih konstitusional. Harapan kita ialah, jangan sampai hal-hal yang tak

resmi, seperti cap jempol darah, ancaman hubungan diplomatik dengan Israel, dan ancaman *walk out* dari MPR oleh PDI-P, dirasakan sebagai tantangan terhadap Islam politik. Ada baiknya, PDI-P juga dapat menahan diri. Sungguh, kita tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kedua anak bangsa itu berkelahi. Pasti keduanya mempunyai sayap radikal dan militan.

Keduanya mempunyai *track record* dalam kekerasan politik, sebelum dan selama kampanye Pemilu 1999. Bedanya, kekerasan politik dari Islam politik ditujukan ke dalam tubuh umat Islam sendiri. Sedangkan kekerasan politik PDI-P ditujukan ke luar. Massa PPP bentrok di beberapa tempat dengan massa PKB, padahal keduanya sama-sama warga Nahdlatul Ulama. Massa PPP juga bentrok dengan massa PAN, padahal keduanya sama-sama warga Muhammadiyah.

PDI-P sangat agresif. Ancaman, serangan, pencabutan bendera, perusakan kantor, pengacauan kampanye, semuanya ditujukan kepada Partai Golkar. Jajaran elit PDI-P tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan membenarkan ulah massanya itu. Kita sungguh khawatir, aksi balas dendam politik akan terjadi jika PDI-P berkuasa. Sejarah menunjukkan, balas dendam politik barangkali mentradisi dalam sejarah Indonesia. Ingat, sesudah Proklamasi, ada Peristiwa Tiga Daerah di pantai utara Jawa Tengah, Perang Cumbok di Aceh, dan pembunuhan bangsawan di Sumatera Timur/Utara. Juga pada 1966, di Jawa Timur dan Bali ada kekerasan politik terhadap orang-orang PKI.

Sekarang ini, kalau sampai terjadi kekerasan politik, elit keduanya tidak bisa lari dari tanggung jawab. Cap jempol darah itu, misalnya, dimulai dari rumah Ketua Umum PDI-P Jawa Timur, jadi setidaknya setengah resmi. Sesungguhnyalah, cap jempol darah itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, agar partai-partai Islam tidak merasa tertuduh sebagai "penjegal Mega". Jangan sampai umat Islam merasa ada cukup *raison d'etre* untuk mengadakan aksi balasan, misalnya dengan jihad yang bisa berkepanjangan.

Kalau Islam politik dan PDI-P bentrok, itu artinya sejarah Indonesia mundur, kembali pada politik aliran yang menonjol dalam Pemilu 1955. Secara kultural bahkan lebih mundur lagi. Jauh ke sejarah pertentangan antara santri dan abangan zaman Demak. Pemikiran ke arah Islam yang inklusif (serba *ngrengkuh*) meninggalkan Islam yang eksklusif akan sirna begitu saja. Usaha-usaha yang

sabar untuk mendekatkan kedua anak bangsa melalui mobilitas kultural, seperti pendidikan, penerangan, kebudayaan, dan kesenian sepanjang masa kemerdekaan, akan hilang. Juga usaha-usaha mendekatkan keduanya secara politik oleh PKB dan PAN akhir-akhir ini akan sia-sia.

Maka, baik partai-partai Islam maupun PDI-P yang mengidap penyakit "Mitos Jumlah Terbesar" perlu memikirkan betul langkah-langkahnya. Bukan lagi "apa yang menguntungkan golongan", melainkan "apa yang menguntungkan bangsa". Jangan miopis, berpandangan pendek. Berpikirlah jauh ke depan menuju lndonesia Baru.

Untuk itu, rencana pembentukan fraksi Islam di lembaga legislatif bagi partai-partai Islam rupanya lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Kiranya pembentukan kaukus Islam yang *ad hoc*, seperti diusulkan A.M. Fatwa, lebih bermanfaat. Demikian pula bagi PDI-P, cap jempol darah itu harus dihentikan supaya tidak menimbulkan ekses: ketakutan bagi umum, tidak produktif bagi PDI-P sendiri, dan akan menimbulkan reaksi balik bagi "lawan" PDI-P, yaitu partai-partai Islam.

Berjuanglah hanya melalui saluran-saluran konstitusional, dan demokrasi yang dewasa. Kita ingin menyerukan pada keduanya untuk membuang egosentrisme kelompok, dan nanti menerima keputusan apa saja dari MPR.

Elit-elit partai perlu mengadakan demitologisasi, membabat habis "Mitos Jumlah Terbesar", dan kembali ke akal sehat.□

Pertarungan Perjuangan Politik Umat Islam

Oleh **Ahmad Rusli Arsyad**

MENURUT Jalaluddin Rakhmat, sebagaimana yang dikutip M Alfan Alfian, bahwa kebangkitan "Islam politik" saat ini merupakan jeritan dari *dying civilities*, yaitu peradaban yang akan punah. Dengan demikian, bagi Jalaluddin, Islam politik cepat atau lambat bakal menemui kebangkrutannya. Pendapat Kang Jalal tersebut bukanlah omong kosong belaka. Pasca pemilu ini, partai-partai politik Islam tidak laik jual ke pangsa pasar yang justru mayoritas penduduknya Muslim. Yang masih bertahan secara dominan hanya dua partai (PPP dan PBB) ditambah dengan partai politik Islam hasil *stembus accoord*. Itu pun, PBB diselamatkan oleh penghitungan secara proporsional tingkat propinsi.

Dengan demikian partai politik Islam yang boleh mengikuti pemilu mendatang hanya diwakili oleh PPP dan PBB. Artinya, kebangkitan Islam politik hanyalah sebuah semangat "emosional" untuk menanamkan ideologisasi Islam secara legal-formal dalam kehidupan ketatanegaraan. Tapi dampaknya justru cukup menyakitkan. Parpol Islam kalah telak dengan parpol yang berideologi nasionalis. Walau demikian, perjuangan untuk memformat politik umat Islam tidaklah berhenti sampai di situ. Dengan dimotori PPP —sebagai partai yang sudah kaya pengalaman politik— serta merta mengikutkan parpol Islam lain dengan berusaha membentuk fraksi Islam (fraksi reformasi/poros tengah) sebagai format perjuangan politik umat Islam. Sebab menurut mereka, fraksi ini dalam perolehan kursi DPR justru melebihi Golkar dan hampir mengimbangi PDI-P yang menjadi pemenang pemilu. Dengan optimisme yang sangat

kuat poros tengah menjadi primadona politik yang akan diperebutkan oleh kedua kubu; Habibie dan Megawati.

Persoalannya kemudian, apakah adanya fraksi Islam merupakan alternatif pilihan final dalam memperjuangkan politik umat Islam? Atau apakah untuk menjadi Islam murni harus secara eksplisit mencantumkan simbol Islam secara legal-formal atau dengan memformat politik dengan berbagai nama yang mengintegrasikan semua partai politik Islam? Lalu bagaimana dengan partai lain, non partai Islam yang ternyata turut pula memperjuangkan nasib umat Islam?

Polarisasi perjuangan

Setidaknya ada tujuh partai besar yang akan menduduki kursi DPR mendatang, yaitu PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB dan partai-partai hasil *stembus accoord* (baik parpol Islam maupun nasionalis). Dari ketujuh parpol itu sesungguhnya umat Islam mendominasi perolehan kursi di Senayan. PDI-P misalnya sekitar enam puluh persen calegnya beragama Islam, Golkar sekitar delapan puluh persen, PKB dan PAN sekitar sembilan puluh sembilan persen, serta PPP dan PBB seratus persen beragama Islam. Dengan demikian perjuangan politik umat Islam mengalami polarisasi yang sangat serius, sehingga tak layak kalau kita katakan bahwa perjuangan politik umat Islam terhenti hanya sampai pada pembentukan fraksi Islam yang kini menjadi poros tengah. Artinya, *ijo royo-royo* umat Islam sedikit banyaknya akan mewarnai perpolitikan nasional terutama mengenai nasib umat Islam sendiri. Bahkan pernyataan Megawati melalui pidato politiknya mengenai nasib umat Islam yang mayoritas akan diperhatikan dan menjadi "tanggung jawab" wakil rakyat dari partainya.

Karena itu kekhawatiran akan terjadinya penghadapan antara umat Islam yang "merasa Islami" dengan umat Islam yang "nasionalis-sekuler" perlu ditinjau kembali, terlebih penghadapan antara umat Islam vs non-Islam. Yang terjadi saat ini justru adanya polarisasi Islam-Islam atau setidaknya umat Islam dalam partai Islam vis a vis umat Islam dalam partai lainnya. Adalah wajar bila polarisasi itu terjadi dalam parlemen kita, selain sebagai konsekuensi demokratisasi juga menunjukkan adanya realitas pluralisme keindonesiaan dan keislaman yang harus direalisasikan lewat keberadaan berbagai partai politik yang mewakili mereka. Sehingga umat (Islam) dan rakyat (umumnya) merasa terwadahi secara formal-kon-

stitusional dalam partai yang dipilihnya pasca pemilu lalu.

Jika demikian adanya maka setidaknya ada dua polarisasi yang terjadi dalam tubuh umat Islam untuk memperjuangkan politiknya. Pertama, struktur politik yang mengedepankan Islam sebagai ideologi. Menurut mereka politik Islam harus ditampilkan secara formalistik-simbolistik dalam kehidupan kenegaraan termasuk dalam parlemen. Islam dijadikan sebagai sebuah "aksi/gerakan" politik yang menonjolkan tampilan serba Islam, serta memberi kecenderungan pembelaan terhadap kepentingan Islam dan umat Islam *an sich*. Adanya fraksi Islam dengan jubah fraksi reformasi atau poros tengah merupakan format perjuangan politik umat model Islam ideologi.

Konsekuensi dari format ini adalah eksklusivitas terhadap apa yang diperjuangkannya. Sehingga format ini lebih tertarik memperjuangkan kepentingan umat (Islam) ketimbang rakyat. Visi yang diperjuangkannya masih dalam tataran simbolik, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Kasus UU Peradilan Agama misalnya merupakan contoh paling konkret dalam masalah ini.

Kedua, adanya penonjolan identitas Islam. Penguatan identitas dengan adanya fraksi Islam akan melahirkan identitas pula bagi umat beragama lain atau partai lain, seperti fraksi Kristen, fraksi Hindu, atau fraksi Nasionalis. Tentu saja adanya identitas ini hanya akan mementingkan satu umat, yaitu umat Islam, sementara umat secara keseluruhan (umat non Islam) menjadi terabaikan. Implikasinya, umat Islam harus menyampaikan aspirasi politiknya, bahkan keagamaannya, hanya kepada fraksi Islam. Jika berpindah kepada fraksi lain maka hukumnya menjadi "haram". Untuk apa ada fraksi Islam, kalau umat Islam ingin menyampaikan "uneg-unegnya" kepada fraksi lain? Mubazir jadinya, demikian apologi mereka.

Implikasi selanjutnya adalah konsep *rahmatan lil alamin* menjadi terdistorsi karena memberikan pembedaan kelas Muslim antara santri dengan abangan atau priyayi. PDI-P sebagai Muslim abangan, Golkar sebagai Muslim priyayi dan fraksi Islam sebagai Muslim santri.

Dan ketiga, adanya primordialisme dan sektarianisme Islam. Adanya ikatan emosi keagamaan secara mendasar memungkinkan penyatuan senyawa antarpartai politik Islam, sehingga perjuangan politiknya masuk dalam lingkup keluarga "Islam" yang dapat berteduh di rumah "fraksi Islam" secara nyaman, tanpa sedikit pun gang-

guan. Kalau pun ada, hal itu hanyalah sebatas "riak" demokrasi, yang dalam keluarga tentu saja terdapat anak yang berbeda pendapat atau pandangan. Primordialisme dan sektarianisme politik Islam ini akan melahirkan sifat konfederatif —meminjam istilah Alfan Alfian— terhadap internal anggota partai Islam yang tergabung di dalamnya. Inilah caranya sebagai uji kualitas ketakwaan kepada Allah SWT. Artinya, realisasi kualitas takwa harus diimplementasikan ke dalam bentuk fraksi Islam untuk lebih memperjuangkan primordial Islam.

Sedangkan polarisasi yang kedua adalah struktur politik yang mementingkan Islam sebagai substantivis. Dalam sikap berpolitiknya mereka lebih mengutamakan nilai-nilai keislaman yang bersifat universal. Perjuangan politiknya tidak perlu memakai simbol keislaman, tapi justru melebur dalam jiwa kebangsaan. Visinya lebih tertarik memperjuangkan kepentingan rakyat (bangsa), yang dengan itu kepentingan umat Islam pun secara tak langsung ikut serta di dalamnya. Tentu saja bila berurusan dengan konsep universalisme Islam seperti keadilan, kejujuran, kemerdekaan, demokratisasi, persamaan di depan hukum dan penegakan HAM.

Pada hakikatnya perjuangan Islam substantivis merupakan reaksi atas kecenderungan Islam ideologi yang semakin kuat dan selalu mengambil perannya dalam politik praktis. Juga dalam rangka mengimbangi dan membendung ekstremitas ideologi yang serba Islam. Implikasi dari format Islam politik substantivis ini adalah inklusivitas Islam dalam bernegara. Bahwa permasalahan yang dihadapi bangsa ini adalah bukan milik umat Islam *an sich*, tapi rakyat kebanyakan. Sehingga orientasi perjuangan bukanlah hanya pada tataran keagamaan, tapi justru orientasi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Yang kedua, adanya hubungan secara simbiotik, yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Penekanannya pada bimbingan etika dan moral politik-sosial-ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga agama ditempatkan sebagai dasar nilai-nilai keagamaan yang luhur yang memberi pengaruh bagi terbentuknya watak anak bangsa dengan dimensi akhlak individual dan sosial. Karenanya agama memerlukan negara dan negara memerlukan agama sebagai pembimbing etika dan moral. Substansi ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin* tidaklah memberikan ruang perbedaan antara partai Islam dengan partai lain, karena hal itu dilihat sebagai

tanggungjawabnya secara pribadi dan sosial baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan. Konsep rahmatan lil alamin menafikan eksklusivitas, identitas dan primordialitas serta bukanlah mutlak untuk umat Islam belaka, tapi umat lain pun perlu diperhatikan kepentingannya. Sehingga kepentingan bukanlah untuk kepentingan kelompok, partai atau agama, tapi justru untuk kepentingan bersama secara nasional. Dengan kata lain, Islam politik substantivis dengan penekanan ajaran universalisme rahmatan lil alamin menjadi perjuangan multi-lintas; lintas sektoral, agama, suku, kelompok dan partai.

Struktur politik Islam substantivis ini memberi pemahaman bahwa Islam dimanifestasikan sebagai sebuah "budaya" politik yang memberikan pengaruh pada setiap pribadi untuk memperjuangkan nasib bangsa ini. Atau dalam bahasa Kuntowijoyo agama diharapkan akan mempengaruhi person dan pada gilirannya person kepada negara.

Format perjuangan

Dari kedua polarisasi perjuangan politik umat Islam, yang tampak akan diterima oleh semua pihak adalah model struktur politik substantivis. Sebab, di antara enam partai besar, empat di antaranya (PDI-P, Golkar, PKB, PAN) lebih memilih menganut paham politik substantivis sebagai format perjuangannya. Keberadaan umat Islam di PDI-P dan Golkar tidaklah bisa dipandang sebelah mata, sebab bagaimanapun komitmen politiknya terhadap nasib umat Islam dan agamanya yang tergolong mayoritas memberikan nuansa pluralis, insklusif dan toleran terhadap apa yang dialami umat Islam (khusus) dan rakyat kebanyakan. Sungguh naif bila umat Islam yang mayoritas yang kini akan menduduki kursi legislatif tidak mau memperhatikan kualitas kehidupan umat Islam dan tidak mau melindungi kelompok non-Islam. Kasus penolakan PDI terhadap RUU Peradilan Agama dalam parlemen Orde Baru yang lalu menjadi pelajaran tersendiri bagi PDI-P yang memenangkan pemilu. Apalagi adanya cita-cita mendirikan negara Islam merupakan hal yang absurd yang sudah direndam dalam-dalam oleh para pimpinan partai Islam. Sehingga tidak perlu lagi ada rasa ketakutan atau kekhawatiran akan adanya cita-cita mendirikan negara Islam tersebut.

Tentu saja peningkatan kualitas kehidupan umat Islam, bukan terletak pada formalisme partai dengan simbol-simbol Islam, tapi justru komitmen individu-individu yang berada di berbagai partai

politik dalam membangun perjuangan kehidupan politik yang lebih beradab, adil, demokratis, egaliter, insklusif, jujur, persamaan hukum dan penegakan HAM. Dalam perspektif ini soal Islami atau tidak Islami tergantung dari komitmen perjuangannya untuk membangun bangsa yang lebih beradab sebagai perjuangan politiknya. Artinya, sangat boleh jadi partai (fraksi) "nasionalis" akan lebih Islam dibandingkan partai (fraksi) Islam sendiri. Ini jika fraksi nasionalis itu memang mengemban komitmen perjuangan untuk membangun kehidupan bersama yang lebih beradab, adil, egaliter, demokratis, insklusif dan jujur. Tampaknya, fraksi seperti inilah yang layak dijadikan sebagai sarana atau format memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat dengan struktur politik substantivis.

Tentu saja pilihan politik Islam substantivis sebagai perjuangan politik umat Islam bukanlah pilihan final. Kita tak bisa meremehkan begitu saja adanya pilihan politik Islam ideologi dengan pembentukan fraksi Islam sebagai alat perjuangan umat. Bagaimanapun juga kedua pilihan itu sangat dibutuhkan dalam percaturan politik bangsa karena satu sama lain dapat memposisikan diri sebagai penyeimbang dan pengontrol terhadap roda pemerintahan dan kenegaraan baik yang berada di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bisa saja keduanya mempunyai peran yang berbeda atau adanya pembagian peran dalam lembaga legislatif. Islam ideologi dengan fraksi Islam-nya lebih memfokuskan pada masalah keagamaan umat Islam. Sedangkan Islam substantivis dengan fraksi nasionalis-nya lebih memfokuskan pada permasalahan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Apakah hal itu bisa terjadi. Tentu saja sejarah yang akan berbicara.□

Fraksi Reformasi

Oleh **Saiful Mujani**

GAGASAN fraksi-reformasi (FR) menarik dicermati. Ide ini mengasumsikan kemungkinan pembagian kekuasaan antara PKB, PPP, PAN, PBB, PK, PNU, PSII, dan PKU. Agenda jangka pendeknya adalah memenangkan calon presiden dari FR sebagai alternatif terhadap calon dari kubu Megawati dan kubu Habibie. Adapun calonnya adalah Abdurrahman Wahid dari PKB.

Realistiskah ide tersebut? Apa dampaknya terhadap persaingan kubu Mega versus kubu Habibie?

Realistis-tidaknya ide itu bergantung pada proporsi kursi di MPR dari partai-partai dalam FR. Untuk ini, setiap kursi di MPR harus betul-betul diperhitungkan, mengingat perbedaan perolehan kursi antara partai-partai besar (PDI-P, Golkar, PPP, PKB, dan PAN) dan TNI tak begitu jauh.

PDI dan PDR misalnya, yang hanya memperoleh. kursi dua dan satu, tak bisa diabaikan. Dari PPI kita tahu jumlah kursi di DPR dari partai-partai FR sekitar 169. Sementara jumlah kursi dari PDI-P ditambah jumlah dari partai nasionalis lain (PKP, PNI Front Marhaen, PNI Massa Marhaen, Partai IPKI, dan PBTI) dan partai Kristen (PDKB) juga sekitar 169. Perhitungan ini mengabaikan kemungkinan tak bergabungnya PDI Budi Hardjono dan TNI dengan PDI-P. Sementara Golkar yang kemungkinan didukung TNI, PDI, dan PDR akan memperoleh suara di bawah jumlah dua kubu ini.

Melihat kemungkinan proporsi tersebut, ide FR cukup realistik. Mereka punya kekuatan real di MPR nanti yang tak bisa dibaikan oleh kubu Mega dan kubu Habibie. Kesimpulan ini sangat bergantung pada benar-tidaknya pengelompokan partai-partai politik itu

dan mengandaikan adanya disiplin partai dari setiap wakil partai di MPR.

Bagaimana dengan suara. utusan daerah dan. utusan golongan yang 200 itu? Dua unsur ini memang menambah keruwetan, menurunkan prediktibilitas arah pengelompokan suara-suara di MPR, dan merusak demokrasi. Tapi karena sudah disepakati, dua unsur ini harus juga dperhitungkan.

Kalau mau menyelamatkan hasil pemilu demokratis yang telah dilakukan, dua unsur ini seharusnya mencerminkan proporsi jumlah kursi di ketiga kubu tersebut. Kalau prinsip ini berjalan, yang bakal bersaing ketat pada SU MPR adalah kubu FR versus kubu PDI-P. Dalam persaingan ini, siapa yang akan menang? Mega atau Gus Dur?

Kalau arahnya seperti itu, yang berdampak pada kemungkinan penurunan disiplin partai, Gus Dur mungkin akan menang. Sebab, di antara anggota MPR dari Golkar dan PDI-P ada orang-orang NU yang jumlahnya signifikan yang bisa memberikan suara untuk Gus Dur, terutama jika voting dilakukan secara tertutup.

Kekuatan semacam itu tak dimiliki oleh Mega atau Habibie. Ini saya kira menentukan kenapa Gus Dur yang dikedepankan FR untuk bersaing dengan Habibie dan Mega. Selain itu, di antara elit partai partai dalam FR, Gus Dur paling baik komunikasi politiknya baik dengan kubu Habibie maupun kubu Mega. Sehingga, ia punya daya akseptabilitas sangat baik —satu faktor penting lain dalam politik elit.

Dengan kekuatan tersebut, ide FR tak bisa dikesampingkan. Setidaknya, kubu Mega yang sampai kini enggan berkoalisi dengan partai-partai lain harus meninjau ulang sikapnya. Namun, kita belum tahu aspirasi politik utusan-utusan daerah dan golongan. Juga aspirasi politik utusan dari TNI.

Kalau kubu PDI-P telah menguasai utusan-utusan yang menggerogoti demokrasi yang ingin kita bangun, tentu Mega punya peluang menjadi presiden. Tapi, kalkulasi ini sangat riskan bagi PDI-P. Selain itu, politik elit makin kurang bisa diprediksi, terutama bagi massa pemilih yang sudah memberi mandat kepada para elit untuk membuat politik nasional menjadi jelas dan terbaca.

Kekuatan kubu Mega yang dibangun dengan asumsi bahwa utusan daerah, utusan golongan, dan utusan TNI akan berpihak padanya, bukan saja membuat jarak antara massa pemilih dan elit menja-

di makin ruwet, melainkan juga makin jauh. Sebab, langkah-langkah yang diambil makin tak terbaca oleh massa pemilih. Dengan kata lain, akuntabilitas publik manuver kubu Mega menjadi menurun.

Kubu Mega tentu akan menolak kesimpulan tersebut mengingat yang disuarakan selama ini PDI-P telah keluar sebagai pemenang pemilu —dan karena itu Mega harus jadi presiden. Tapi ini klaim yang menafikan kenyataan bahwa mayoritas pemilih tak memilih PDI-P. Walaupun PDI-P mendapat suara terbanyak (sekitar 35%) dari seluruh jumlah suara dibanding partai-partai lain, nyatanya yang sekitar 65% itu tak memilih PDI-P.

Dengan sistem pemerintahan sekarang yang berbau parlementarisme, adalah sah kalau suara pemilih yang diperoleh partai-partai non-PDI-P digabung hingga membentuk suara mayoritas di MPR dan' menyingkirkan aspirasi politik kubu Mega. Kenyataan ini tampaknya diabaikan kubu Mega. Sementara kubu FR memanfaatkan konstitusi kita sebagai kesempatan dan insentif politik.

Ini agak ironis. FR yang bermain di atas *rule of the game* (UUD 45) adalah kubu yang paling getol dengan isu amandemen atas UUD 1945. Sementara kubu Mega, yang menghindari UUD 45 dalam isu pemilihan presiden terkesan menyakralkannya (tidak boleh diubah). Di sini kubu FR terlihat cerdik.

Kecerdikan itu bisa juga mengarah pada-hasil yang berbeda sama sekali dari ide awal FR. FR bisa muncul sebagai taktik jangka pendek untuk memecah dukungan partai lain, terutama PKB dan PAN, pada kubu Mega. Sebab, tanpa dukungan dua partai ini kubu Mega sudah hampir dapat dikalahkan oleh kubu Habibie yang terdiri atas Golkar, PPP, partai-partai Islam lain dan TNI.

Di sini, PPP dan partai-partai Islam lain bisa berperan sebagai agen kubu Habibie dalam FR. Ini harus diantisipasi faksi Amien dan Gus Dur di FR, kalau ternyata di FR betul-betul disepakati dan berjalan. Jangan sampai PAN dan PKB jadi "mainan" politik jangka pendek Golkar, TNI, PPP, dan partai-partai Islam lain. Tapi masyarakat politik di Tanah Air percaya pada kepiawaian politik elit Gus Dur dan Amien Rais. Semoga saja.□

Gus Dur dan Fraksi Reformasi

Oleh **Muhammad A. S. Hikam**

KALANGAN Islam mencairkan "kebekuan" politik belakangan ini dengan menggulirkan topik "Fraksi Islam". Amien Rais pun menyorongkan gagasan poros tengah dan mengusulkan Gus Dur sebagai calon presiden alternatif. Gus Dur tak menolak. Ini menunjukkan kedua tokoh ini tidak mendukung Megawati sebagai calon presiden.

Usulan Ketua Umum PAN, Amien Rais, agar Gus Dur menjadi calon presiden alternatif, sempat membuat orang bengong, terutama para pendukung Gus Dur. Soalnya, bukan usulan itu benar yang mengejutkan, melainkan sumbernya yang kelewat muskil baik buat telinga warga *nahdliyin* maupun pendukung PKB. Kalau saja usulan itu datang —katakanlah— dari Pak Harto atau Pak Habibie, mudah untuk dicarikan alasannya.

Umpamanya, Ketua Umum PBNU itu sudah sembilan kali bolak-balik *sowan* kepada yang pertama dan empat kali melapor kepada yang belakangan. Jadi, kalau lantas kedua "Bapak" tadi mengusulkan nama Gus Dur, ya rada masuk akal. Hitung-hitung sebagai hiburan politik karena sudah begitu sering *disowani* dan dilapori meski tidak diminta. Tentu saja, buat warga *nahdliyin* yang nalar, usulan seperti itu cuma ditanggapi dengan *cengengesan* karena dianggap lucu dan tidak serius.

Tapi, lain soal kalau usulan itu datang dari Pak Amien yang juga mantan Ketua PP Muhammadiyah. Dalam tradisi politik NU, tidak ada referensi historis ataupun dalil yang bisa dipakai untuk memberi penjelasan atas tindakan politik itu. Tidak pada masa Orde Lama, Orde Baru, apalagi Orde Reformasi yang masih pendek ini. Maka,

tak aneh jika sikap PKB dan tokoh-tokoh teras NU, semacam K.H. Hasyim Muzadi dari Jawa Timur, begitu hati-hati.

Ibarat seekor tikus menghadapi sepotong dendeng. Jangan-jangan dendeng itu, kendati baunya sedap dan potongannya menggiurkan, cuma umpan untuk sebuah perangkap. Atau, kalau itu terlalu berbau *suudzon* (buruk sangka), setidaknya usulan itu perlu penafsiran dan pentakwilan seksama sebelum diterima atau ditolak. Namun, karena soal takwil itu adalah otoritas para kiai sepuh dan kiai khos yang merupakan andalan NU, bagi orang awam, bagiannya paling banter hanya tafsir biasa.

Tafsiran mengenai usulan itu, pertama, mesti dilihat dari asal-usul dan konteksnya. Itu berarti, pencalonan Gus Dur sebagai calon presiden berkaitan erat dengan kemelut politik pascapemilu, khususnya mengenai siapa yang bakal menjadi presiden keempat di Republik ini. Seperti diketahui, hasil akhir pemilu ternyata tidak menampilkan partai pemenang mayoritas tunggal sehingga koalisi, khususnya di kalangan partai-partai reformis, merupakan keharusan. Namun, di situlah soalnya. Koalisi yang mestinya sudah direncanakan dan dibangun sebelum pemilu ternyata baru sampai pada tingkat komunike yang tidak memiliki implikasi politik mengikat. Tak pelak lagi, ketika pemilu usai, spekulasi bermunculan seputar kemungkinan calon presiden yang bakal unggul.

Posisi dua calon yang selama ini diunggulkan, B.J. Habibie dan Megawati, tiba-tiba guncang. Sebab, kendati PDI-P memperoleh suara terbanyak dibanding partai lain dalam Pemilu, jumlah perolehan kursi mereka di DPR masih belum mencukupi. Dan karena itu perlu didongkrak dengan koalisi. Sementara Golkar yang mula-mula "stel yakin" akan menangguk perolehan suara cukup besar hanya memperoleh 20 persen lebih sedikit. Sedang dukungan yang diharapkan dari partai-partai Islam ternyata mengalami perubahan. Pertama, karena kecilnya perolehan mereka dan, kedua, karena tak semua pendukung mereka sepakat dengan calon tunggal Habibie. Ditambah ketidakakuran di dalam elit Golkar sendiri tentang calon presiden tunggal, prospek Habibie semakin buruk.

Karena perkembangan tersebut, peta politik menjelang SU MPR pun sontak mengalami pergeseran. Salah satu akibatnya, terjadi upaya rekonfigurasi koalisi-koalisi dan figur-figur calon presiden. Manuver untuk membuat apa yang disebut "Fraksi Islam" yang lantas disulap menjadi "Fraksi Reformasi" atau "Poros Tengah" adalah

contoh paling mutakhir. Motor manuver itu tak lain adalah PPP yang semula cukup *comfortable* dengan kemungkinan menjalin aliansi dengan Partai Golkar. Tetapi, mereka ternyata harus merevisinya kembali manakala konjungtur politik berubah total.

Dengan merayu partai-partai seperti PAN dan PKB agar ikut serta, PPP berharap akan tetap ikut mempengaruhi SU MPR. Manuver itu mencuat karena konstelasi politik yang masih belum mengkristal antara PDI-P, PKB, dan PAN yang seharusnya telah membuat koalisi bersama pascapemilu. Berbagai kritik yang dilontarkan terhadap Megawati dalam wacana publik pun lantas digunakan untuk memberi justifikasi pentingnya membuat koalisi "Poros Tengah" itu.

Upaya PPP merayu PAN dan Amien Rais ternyata tak begitu sulit dibanding dengan PKB. "Partai Bintang Sembilan" itu tampaknya masih cukup bersabar menunggu sikap PDI-P dan sampai saat ini tetap *committed* mendukung Megawati sebagai calon presiden. Tak pelak lagi, sebuah balon percobaan harus dilontarkan dan muncullah nama Gus Dur.

Akankah upaya itu berhasil? Yang jelas, reaksi pihak PKB tampaknya dingin dan bahkan cenderung skeptis atas maksud tersembunyi *move* itu. Sikap Gus Dur yang cenderung tidak jelas dalam merespon usulan Pak Amien, agaknya, telah mengganjal efektivitas manuver tersebut dan karena itu dapat dibaca sebagai penolakan.

Walhasil, ide menciptakan "Poros Tengah" melalui koalisi fraksi Islam, baik dari sisi pragmatis maupun normatif, rasanya tidak memiliki masa depan terlalu cerah. Dari sisi pragmatis, fraksi tersebut tidak memiliki dukungan real yang kuat di MPR yang mampu mendukung calonnya untuk tampil sebagai calon presiden. Dari sisi normatif, fraksi itu akan bisa menjadi tempat persemaian eksklusivisme politik. Tetapi, jika kelompok Ciganjur tetap bergeming dalam kebisuan dan kemelempemannya, bukan tidak mungkin gagasan dan manuver lain yang sejenis akan muncul kembali. Dan akibatnya, jelas akan mempersulit pembentukan kekuatan reformasi di MPR.□

Poros Tengah: Antara Ada dan Tiada

Oleh **Hajriyanto Y. Thohari**

GERAKAN Non-Blok mulai kehilangan *raison d'etre*-nya seiring dengan berakhirnya era Perang Dingin, tapi "nonblok jilid kedua" lahir di Indonesia. Itulah Fraksi Reformasi atau "poros tengah", semacam *the third way*-nya Amien Rais dan kawan-kawan.

Ada kemiripan *raison d'etre* bagi kelahiran keduanya. Yang pertama, berlangsungnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang dikomandani Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, "perang dingin" antara blok B.J. Habibie, calon presiden hasil Rapat Pimpinan Partai Golkar, versus blok Megawati, calon presiden hasil Kongres PDI Perjuangan. Dan genderang perang sudah ditabuh, seperti tampak pada fenomena cap jempol darah yang membuat kita bergidik itu.

Ada kecenderungan, keduanya melihat politik bukan sebagai sebuah seni (*the art of the possible*). Bahkan, dengan sengaja atau tidak, ada yang mengembangkan apa yang disebut "politik menarik diri" (*political withdrawal*), yakni politik yang sedikit-sedikit gampang mengancam, dan situasi negara akan rusuh atau terjadi disintegrasi. Kecenderungan saling mengeluarkan (*mutual exclusion*) terasa pekat dalam kehidupan politik kita.

Dalam konteks ini, kelahiran poros tengah bisa dibaca sebagai jawaban terhadap ketegangan politik pascapemilu yang terus bereskalasi secara eksesif itu: politik *detente* atau peredaan ketegangan. Yang menarik, prakarsa kelahirannya dilakukan kalangan partai politik Islam. Fraksi yang semula akan muncul dengan nama Fraksi Islam itu, dalam perkembangannya, bermetamorfosis menjadi Fraksi Reformasi, berkat sentuhan Amien "Midas" Rais. Tentu, nama yang

pertama terlalu formalistik, simbolistik, dan dikhawatirkan menggiring ke arah eksklusivisme.Yang kedua lebih cerdas dan canggih, lebih inklusif dan substansialistik.

Untuk memainkan peran sebagai poros tengah, fraksi ini bukan hanya harus benar-benar ada di tengah, melainkan juga harus kuat dan solid. Pertanyaannya: bisakah angka potensial 174 kursi itu mengaktual, sehingga benar-benar menjadi kekuatan baru yang solid?

Pandangan yang optimistis akan menjawab positif. Karena, pertama, kelompok ini memiliki kesamaan ideologis (Islam), dan konstituen (massa Islam). Kedua, kelompok ini disatukan oleh fakta kesamaan nasib: secara politik dan ekonomi mengalami marjinalisasi, periferalisasi, dan deprivasi selama Orde Baru. Ketiga, oleh karena mereka menjadikan Islam sebagai asas —paling tidak, demikianlah klaimnya— tentu mereka memiliki obsesi yang sama untuk mentransformasikan dirinya menjadi "umat tengahan" (*ummatan watsatan*), sebagai kekuatan mediator sekaligus moderator.

Pandangan yang pesimistis akan menjawab negatif. Pertama, mereka memiliki kecenderungan fragmentasi yang sangat tinggi, sehingga sejak semula tidak pernah bisa bersatu dalam satu wadah. Kedua, meski mencoba menutupnya dengan sikap romantis dan sentimental untuk saling mencalonkan di antara mereka, sudah menjadi rahasia umum bahwa egoisme dan kecurigaan di antara tokoh-tokohnya, utamanya antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan partai-partai Islam lainnya, kelewat overdosis. Dan ketiga, ini yang terpenting, sejarah mengajarkan: sebuah kebersamaan yang otentik mustahil dibangun di atas fondasi negativisme.

Sebagaimana Non-Blok yang bertolak dari sikap negativisme (tidak-Barat, tidak-Timur, *la syarqiyah wa la gharbiyah*), poros tengah jauh lebih negativistik. Setidaknya, sampai saat ini, mereka bersikap tidak-Megawati dan tidak-Habibie.

Mereka enggan mendukung Megawati karena alasan-alasan: ketidakjelasan agenda reformasi, ketiadaan sensitivitas keislaman PDI Perjuangan (terbukti dengan tidak proporsionalnya dalam mengakomodasi kalangan non-Muslim), dan sebagian lagi karena alasan jender yang agak naif itu.

Mereka juga sungkan mendukung blok B.J. Habibie, yang dinilai terlalu *taken for granted* dalam memandang dukungan partai-partai Islam. Atau, semata-mata karena ia secara formal adalah calon Partai

Golkar, yang mereka jadikan bulan-bulanan sebagai kekuatan *status quo*, yang membawa stigma masa lalu yang berat. Sebuah sikap negativisme yang agak kelewatan.

Maka, sebagai poros tengah yang mengklaim reformis dan tentunya demokrat, sungguh aneh bin ajaib kalau efek penghadangan dari gerakan pendirian fraksi ini terhadap kedua kandidat presiden yang didukung secara relatif oleh rakyat itu justru yang dominan. Kalau dimensi penghadangan itu yang dominan, maka poros tengah niscaya kehilangan signifikansi politis dan relevansi moralitas politiknya. Dan akhirnya, hilanglah landasan moral dan idealisme bagi eksistensinya yang, konon, bersemangat peredaan ketegangan itu.

Kalau itu terjadi, kita berhak membayangkan —seperti halnya kasus Non-Blok yang kehilangan relevansi dengan mencairnya Blok Barat dan Blok Timur— poros tengah akan kehilangan relevansi, bahkan *raison d'etre*-nya. Terlebih lagi, manakala polarisasi kutub Habibie dan Megawati —meski kata orang hampir mustahil— cair.

Orang sering lupa, kemungkinan mencairnya poros yang lebih luas, yakni Blok Kebagusan dan Blok Slipi, sebagai sesama partai pluralis, tidak tertutup untuk terjadi. Politik adalah *the art of the possible*, dus gampang berubah. Kalau ini yang terjadi, maka poros tengah akan benar-benar menjadi repetisi gerakan Non-Blok. Inilah Non-Blok jilid kedua: *wujuduhu ka 'adamihi*, ada dan tiadanya tiada berbeda. *Wallahualam*.□

Membaca Peluang "Poros Tengah"

Oleh **Salahuddin Wahid**

MEDIA CETAK hari Selasa, 20 Juli 1999, memberitakan pendapat Zarkasih Nur fungsionaris DPP PPP, mengenai terbentuknya Fraksi Refornusi yang berintikan PKB, PAN, PPP dan beberapa partai Islam lainnya Media cetak hari Rabu, 21 Juli 1999, memberitakan hal yang sama tetapi dari sumber yang berbeda, yaitu dari Ketua Umum PAN, Amien Rais. Pak Amien mengatakan bahwa dirinya dan Gus Dur telah sepakat untuk membangun "poros tengah" dengan mencalonkan Gus Dur menjadi presiden mendatang.

Selanjutnya Amien Rais mengatakan bahwa pihaknya bersama Gus Dur telah membahas soal perkembangan masyarakat yang seolah-olah telah berhadapan satu sama lain, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa akibat terbelahnya masyarakat menjadi dua kelompok yang mendukung Megawati dan Habibie untuk menjadi presiden mendatang. Menurut Amien diperlukan suatu poros tengah, perlu ada kekuatan reformis sejati, perlu ada semacam payung besar untuk menanggulangi proses awal dari keretakan bangsa. Dan Amien menjelaskan selain PAN dan PKB, yang terlibat dalam poros tengah itu adalah PPP, PBB, PK, dan parpol lainnya.

Lepas dari setuju atau tidak, diakui bahwa munculnya "poros tengah" itu merupakan alternatif terhadap PDI-P dan Golkar yang menjadi dua partai terbesar tapi capresnya dianggap bermasalah oleh beberapa pihak. Dapat dilihat bahwa masyarakat politik masih belum bisa menentukan sikap yang tegas terhadap dua pilihan yang dianggap bermasalah itu. Menurut hemat saya memang gagasan itu menarik dan mempunyai harapan untuk dikembangkan, tetapi pada saat ini masih belum bisa diperkirakan bagaimana peluangnya.

Belum ada tanggapan dari para fungsionaris PAN, PPP, PBB, dan partai Islam lainnya. Yang sudah muncul adalah tanggapan pribadi dari Ketua Umum PKB Matori Abdul Djalil di layar TV yang intinya masih berpegang pada kesepakatan yang sudah diterima di PKB, yaitu mendukung pencalonan Megawati, dan mencurigai Iewat usulan ini adalah untuk memisahkan Gus Dur dengan Megawati. Ketua DPP PKB Alwi Shihab menyatakan bahwa PKB masih ingin memperjuangkan koalisi PKB-PDI-P-PAN, tetapi menyatakan bahwa bagi PKB pencalonan Gus Dur oleh PAN merupakan suatu kehormatan.

Pihak PBNU yang secara resmi sudah mengusulkan Gus Dur menjadi calon presiden tentunya menyambut baik usulan Amien Rais itu. Selain itu perlu juga didengar tanggapan dari kalangan PDI-P dan Golkar termasuk yang berasal dari kalangan NU, sebab mereka sedikit banyak mempunyai keterkaitan emosional dengan Ketua Umum PBNU yang dicalonkan untuk menjadi presiden oleh "Poros Tengah" itu. Tanggapan dari berbagai kalangan perlu juga diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana usulan Amien Rais ini memperoleh sambutan sebagaimana diharapkan.

Memang tidak mudah untuk memperkirakan tanggapan warga NU yang tersebar di beberapa partai. PKB untuk sementara mungkin akan terpecah dua, sebagian akan memilih bergabung dengan PDI-P, sebagian lagi bergabung dengan "Poros Tengah". Ada yang mendasarkan pilihannya pada kesamaan *platform*, menganggap "Poros Tengah" bersifat primordial karena kental keislamannya dan ada yang berdasar kepentingan, jelasnya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Tetapi diperkirakan nantinya sebagian besar warga NU di beberapa partai akan ikut bergabung dengan "PorosTengah".

Bagaimana dengan para wakil rakyat dari Golkar, seberapa jauh kemungkinan mereka untuk ikut mendukung "Poros Tengah"? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak bisa melakukannya secara langsung. Tentunya akan ada pertanyaan, sampai seberapa jauh Golkar diberi akomodasi oleh kelompok "Poros Tengah"? Bagi Golkar sangat penting untuk menjaga keadaan Golkar di masa mendatang, yang hanya mungkin dilakukan kalau Golkar ikut di dalam pemerintahan, siapa pun presidennya.

Peluang "Poros Tengah"

Walaupun masih terlalu dini untuk membuat penilaian, tidak ada

salahnya untuk membaca peluang dari kelompok "Poros Tengah". Partai yang diperkirakan akan mendukung adalah PAN (34), PKB (50), PPP (59), PBB (13), PK (7), PKU (1), PSII (1), PP (1), dengan jumlah 168 suara. Selain itu mungkin diperoleh dukungan wakil rakyat dari NU di Golkar dan PDI-P yang jumlahnya sekitar 20 orang. Juga wakil rakyat dari Golkar yang sejak awal tidak mendukung Habibie yang jumlahnya tidak jelas, katakan saja ada 20 orang. Anggota MPR dari Utusan Golongan yang diharapkan ikut mendukung katakan saja 20 orang, sedangkan dari Utusan Daerah diper kirakan berjumlah 35 orang. Maka jumlah seluruh suara yang diperkirakan mendukung kelompok "Poros Tengah" akan mencapai jumlah 264 suara.

Jumlah suara ini lebih besar daripada jumlah suara kelompok PDI-P maupun Golkar. Diperkirakan suara PDI-P dalam MPR sekitar 200, karena walaupun PDI-P menyatakan bahwa mereka tidak akan berkoalisi dengan partai mana pun untuk mengegolkan Megawati menjadi presiden, beberapa partai kecil akan mendukung Megawati. Kita bertanya-tanya bagaimana cara PDI-P mengegolkan Megawati menjadi presiden hanya dengan 200 suara di MPR, apakah dengan tekanan dari massa PDI-P kepada para anggota MPR di dalam SU? Suara Golkar, partai lainnya dan Utusan Gulongan akan berjumlah sekitar 175, sedangkan Fraksi ABRI akan berjumlah sekitar 65 suara (termasuk Utusan Daerah).

Dengan perhitungan kasar seperti di atas yang masih mungkin berubah, maka dapat disimpulkan bahwa gagasan "Poros Tengah" secara kualitatif cakup baik dan memperoleh tanggapan yang positif dari berbagai pihak. Tetapi secara perhitungan suara walaupun masih kusar belum bisa dianggap bahwa "Poros Tengah" akan bisa memperoleh keberhasilan dalam SU MPR. Kalaupun Fraksi ABRI mendukung "Poros Tengah", baru akan mencapai 329 suara, masih terpaut 22 suara dari batas minimum yang dibutuhkan untuk bisa memetik kemenangan dalam SU MPR. Padahal belum tentu seluruh wakil rakyat dari PKB dan PAN, dan juga dari PPP serta partai Islam, akan mendukung kelompok "Poros Tengah"

Di samping itu kita semua mengetahui bahwa Gus Dur mempunyai masalah kesehatan. Pihak-pihak yang dirugikan tentunya berusaha untuk menolak pencalonan Gus Dur dengan alasan kesehatan, yang akan berakibat retaknya "Poros Tengah". Diperlukan penjelasan resmi dari tim medis yang menangani Gus Dur tentang kondisi kesehatan beliau. Jangan sampai setelah terpilih, terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan yang akhirnya menyebabkan munculnya masalah baru di kemudian hari. Tetapi bagaimana pun juga, langkah Gus Dur dan Amien Rais ini tidak harus ditolak secara apriori, tetapi dianggap sebagai upaya untuk memberi alternatif terhadap dua pilihan yang kurang pas, yang juga merupakan suatu pendidikan politik. Kalau Bambang Triantoro mengatakan bahwa Gus Dur, Amien Rais dan Hamzah Haz itu haus kekuasaan, sejarah yang nanti akan membuktikan apakah memang demikian halnya.

Dapat disimpulkan bahwa munculnya "Poros Tengah" tidak menghasilkan suatu kepastian adanya tokoh yang akan meraih 351 suara dalam SU MPR. Oleh karena itu masih perlu dilakukan "*lobbying*" yang intensif antara beberapa partai besar dan juga TNI untuk memperoleh konsensus tentang siapa presiden yang dianggap paling aspiratif bagi sebanyak mungkin kalangan, sekaligus mempunyai kemampuan yang diharapkan. Karena itu kita biarkan saja ketiga calon itu bertarung secara sehat di dalam MPR untuk menentukan siapa sebenarnya yang memang diberi kepercayaan oleh rakyat melalui para anggota MPR. Siapa pun yang muncul sebagai pemenang harus kita dukung sepenuhnya untuk bisa memimpin bangsa dan negara dalam upaya mengatasi krisis. Jangan sampai presiden terpilih itu kemudian diganggu dan dipersulit dengan berbagai cara, apa pun alasannya.□

Kendala Menyatukan Islam Modern-Tradisional

Oleh **Mundzar Fahman**

EMPAT parpol yang berbasis massa Islam: PAN, PPP, PBB, dan PKU membentuk fraksi poros tengah. Ketua Umum DPP PAN (Partai Amanat Nasional) Amien Rais berulang kali menyatakan, pihaknya menjagokan Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) sebagai calon presiden. Namun, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pencalonan itu baru sebatas usul pribadi Amien Rais. Yusril lebih memilih mencalonkan Hamzah Haz (ketua umum DPP PPP). Alasannya, kursi PPP adalah yang terbesar dibanding empat parpol yang bergabung dalam fraksi poros tengah, dan bahkan lebih besar dibanding kursi yang diraih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilu 1999.

Meski begitu, Gus Dur menyatakan bersedia menerima pencalonan dirinya dari Amien Rais itu. Namun Ketua Umum DPP PKB Matori Abdul Djalil, termasuk juga Katib Am PBNU Dr Said Agil Siradj masih mencurigai manuver politik poros tengah. Menurut Said Agil, poros tengah merupakan jebakan untuk memecah belah PKB dan PDI-P. (*Jawa Pos*, 26 Agustus 1999).

Apa yang bisa disimpulkan dari ilustrasi di atas? Pertama, ada upaya untuk mempersatukan kelompok-kelompok Islam, namun sangat sulit dilakukan. Sesama kelompok Islam moderen sulit disatukan, begitu pula sesama kelompok Islam tradisional. Apalagi antara kelompok Islam moderen dengan kelompok Islam tradisonal.

Kedua, hingga kini masih ada perasaan saling curiga di antara kelompok Islam. Kelompok Islam tradisional, bisa jadi, masih curiga terhadap kelompok Islam moderen. Ini, antara lain, tergambar dari

pernyataan Said Agil tentang sepak terjang politik poros tengah yang dimotori Amien Rais.

Trauma Masa Lalu

Di panggung perpolitikan Indonesia, umat Islam, khususnya ormas-ormasnya, pernah beberapa kali punya pengalaman kurang menyenangkan. Mereka yang semula bisa disatukan dalam wadah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), akhirnya satu persatu keluar dari wadah ini akibat adanya perbedaan pendapat dan perasaan kecewa di antara ormas-ormas Islam. NU keluar dari Masyumi pada 1952, dan kemudian menjadi parpol dan ikut Pemilu 1955.

Empat parpol Islam: PSII, Perti, Parmusi, dan NU, berfusi ke dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada 1973. Namun, sekali lagi, kesediaan mereka tinggal dalam satu wadah secara harmonis itu hanya berumur beberapa tahun. Menghadapi Pemilu 1977, barangkali bisa disebut sebagai klimaks dari keharmonisan empat parpol Islam dalam wadah PPP. Sebab, setelah itu, pada Pemilu 1982, keharmonisan itu sudah terkoyak-koyak, dan akhirnya NU menyatakan kembali ke Khitthah 1926 dalam muktamarnya yang ke-27, 8-12 Desember 1984 di Situbondo. Keputusan NU kembali ke Khitthah 1926 yang intinya NU tidak lagi menjadi pendukung PPP dan memberikan kebebasan warganya mendukung parpol yang ada, merupakan salah satu akibat dari kekecewaan eks unsur NU selama bergabung di PPP. NU menilai, sepak terjang politik H J. Naro dan Soedardji (almarhum) dari Parmusi sayap Islam moderen, mengingkari kesepakatan pada awal fusi tentang komposisi dan jatah kursi di Dewan, dan banyak merugikan NU dari sayap tradisional.

Dari pengalaman pahit itu, wajar jika hingga kini ada kelompok Islam yang masih curiga terhadap kelompok Islam lain dalam soal politik. Said Agil menyatakan, sudah beberapa kali NU dijebak. Pada awalnya NU diberi kesempatan dengan dalih persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah), tetapi kemudian NU ditinggalkan. Namun, pertanyaannya, jika betul NU beberapa kali terkena jebakan, lalu mengapa ormas ini bisa dijebak?

Modern *vs* Tradisional

Trauma masa lalu itu merupakan salah satu kendala untuk mempersatukan kelompok-kelompok Islam dalam satu wadah yang harmonis. Akibat pengalaman itu, masih ada kelompok Islam yang

mencurigai kelompok lainnya, dan bahkan cenderung bersikap apriori.

Kendala lain dalam upaya penyatuan kelompok Islam ialah adanya dikotomi Islam moderen dan Islam tradisional. Di Indonesia, NU sering disebut-sebut sebagai kelompok Islam tradisional. Sedangkan kelompok lain, misalnya Muhammadiyah, disebut-sebut sebagai kelompok Islam moderen.

Banyak orang Islam yang setuju dan bahkan bangga dengan dikotomi seperti itu. Mereka yang merasa dari kalangan Islam moderen sering menganggap bahwa mereka lebih berkualitas, lebih intelek, dan lebih moderen dibanding kalangan Islam tradisional. Sekaitan dengan ini, kalangan Islam yang berasal dari kelompok tradisional merasa dinomorduakan, merasa dimarjinalkan oleh kelompok moderen.

Pengelompokan umat Islam ke dalam moderen dan tradisional ini juga menjadi salah satu kendala menyatukan kelompok Islam. Mereka yang merasa moderen, seringkali memandang sebelah mata, terutama dalam hal kualitas dan intelektualitas, terhadap Islam tradisional. Sementara kalangan Islam tradisional tidak mau begitu saja dipandang seperti itu. Akibatnya, ada gap di antara dua kelompok yang sulit disatukan.

Yang perlu disadari umat Islam, penyebutan Islam tradisional untuk NU, dan penyebutan Islam moderen untuk Muhammadiyah, sebenarnya sangatlah tidak tepat. Sebab pada kenyataannya, sikap NU, cara berpikir dan bertindaknya tidak semata-mata berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun temurun. Baik dalam hal politik, sosial, maupun hukum agama, NU selalu mengkaji ulang apa-apa yang sudah pernah diputuskan, dan banyak disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Karena itu, untuk mempersatukan kelompok-kelompok Islam, sudah seharusnya semua pihak berusaha menghapuskan berbagai kendala tersebut. Di antara sekian banyak kendala itu adalah adanya trauma di masa lalu, dan dikotomi Islam moderen dan Islam tradisional. Jika Islam mengajarkan agar umatnya bisa berhubungan dengan baik dengan semua golongan, mengapa ada kelompok Islam sulit berhubungan dengan sesama kelompok Islam?□

Poros Tengah, Quo Vadis?

Oleh **Moch Sa'dun M**

HASIL Pemilu 1999 menempatkan lima partai besar di tangga perolehan kursi DPR. PDI Perjuangan meraih kursi terbanyak yaitu 154. Disusul kemudian Partai Golkar (124), PPP (59), PKB (51), dan PAN (35). Adapun kursi yang diraih partai lainnya tidak terlalu signifikan yaitu PBB (13 kursi), PK dan PKP masing-masing enam kursi. Sedangkan PDKB, PNU, dan PBI masing-masing kebagian tiga kursi dan PDI (2 kursi). Partai yang hanya mendapatkan satu kursi di antaranya adalah PKU, PSII, PNI-FM, Partai IPKI, PNI-MM, PP, dan PDR.

Dengan hasil yang demikian maka koalisi politik pascapemilu merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh partai politik manapun (Alfan, 1999). Logikanya sederhana: Pertama, tidak ada kekuatan politik yang memperoleh suara mutlak bila dibandingkan dengan gabungan partai-partai lain sekalipun. Karena itu tidak ada satu pun partai politik yang berhak mengklaim sebagai *single majority party*. Kemenangan PDI Perjuangan merupakan *single majority party* karena tidak mencapai 50 persen plus satu dari kursi yang tersedia.

Kedua, koalisi politik akan terjadi jika terdapat kesamaan tujuan atau persepsi serta kedekatan ideologis. Kondisi politik pasca-Soeharto terdapat isu politik sentral, yakni entitas politik reformis dan nonreformis. Sementara kedekatan ideologis merupakan faktor utama yang mampu merekatkan pola koalisi menjadi kokoh —yang terkadang mengalahkan pertimbangan-pertimbangan lain. Ketiga, pemilu multipartai mengisyaratkan adanya pola politik posisi kontra oposisi. Dalam proses persaingan itu, koalisi politik tak bisa dihindarkan adanya.

Pembentukan Poros Tengah kecuali didasari atas keharusan koalisi di atas tampaknya terdapat alasan lain, yaitu terdapat keadaan yang memaksa untuk melawan kelompok politik yang dipandang "lebih kuat" dan bertindak secara arogan. Dalam hal ini, partai-partai politik —termasuk yang akan bergabung dalam Poros Tengah— jelas memiliki kesempatan untuk membentuk perimbangan politik pascapemilu maupun sebagai kekuatan baru yang memiliki *bargaining power* yang strategis.

Karena itu kemunculan kekuatan penyeimbang di antara kekuatan *single majority party* merupakan hal yang wajar. Lahirnya Poros Tengah yang oleh Dimyati Hartono disebut sebagai poros halang karena dianggap menghadang laju Mega, sebenarnya perlu disikapi secara arif. Meskipun disadari bahwa kemunculan Poros Tengah sebagai gabungan dari kekuatan elektoral partai Islam tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik yang ada.

Di sinilah pembentukan Poros Tengah dianggap sebagai langkah mundur, dan menunjukkan sikap ekslusivisme golongan. Bahkan Mochtar Pabottingi menuduh Poros Tengah tidak menghormati pilihan rakyat (antidemokrasi). Pendapat serupa juga banyak dilontarkan oleh kalangan partai yang merasa terancam keberadaannya. Karena Poros Tengah memang dapat berfungsi sebagai kekuatan yang diametral dengan kekuatan partai yang lain.

Lain dengan yang setuju, keberadaan Poros Tengah justru dianggap sebagai varian untuk menghindari mengerasnya konflik dua kekuatan politik. Yang jelas, Poros Tengah memegang peranan yang amat strategis dalam konstelasi politik pascapemilu. Apalagi Poros Tengah memiliki kekuatan yang cukup besar, kira-kira 118 kursi, terdiri dari PPP (59), PAN (35), PBB (13), PK (6), PNU (3), PKU dan PSII masing-masing satu kursi. Jika PKB berubah pikiran dan bergabung di dalamnya maka Poros Tengah akan memiliki 169 suara dan akan menjadi kekuatan utama dibanding PDI Perjuangan dan Partai Golkar.

Kekuatan itu akan semakin mantap jika dalam waktu dekat Poros Tengah mampu menampilkan daya tekan yang dapat mengurangi sikap aroganisme kekuatan partai yang sedang bersaing. Dalam kaukus politik seperti itu, Poros Tengah secara normatif bertujuan untuk menghindari pertikaian dan disintegrasi bangsa sebagai akibat meruncingnya persaingan capres B.J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri dalam perebutan kursi presiden.

Skenario Pertarungan

Dengan melihat kekuatan politik yang sedang berkembang, terdapat lima skenario yang mungkin akan terjadi. Pertama, Poros Tengah dan Golkar berhadapan dengan PKB, PDI Perjuangan dan partai-partai lainnya. Dengan kata lain, yang terjadi adalah koalisi politik antara kelompok Islam politik formal bersisian dengan Islam politik informal (PAN) dan Golkar (yang kebetulan juga didominasi Islam modernis) memiliki satu kepentingan bersama untuk mematahkan gerak kelompok politik Nasionalis-Sekuler yang bersekutu dengan Islam politik informal (PKB).

Skenario pertama akan terjadi bila Habibie dan Amien Rais sebagai capres di satu sisi, Megawati dan Gus Dur di sisi lain. Dalam skenario ini Poros Tengah dan Partai Golkar jelas tidak menghendaki Megawati atau Gus Dur duduk di kursi presiden, maka capres alternatif yang muncul ialah Habibie dan Amien Rais —tidak menutup kemungkinan, nama-nama semisal Yusril Ihza Mahendra dan Didin Hafidhuddin muncul, tapi segera tenggelam. Di sini tampak pula ada satu kepentingan politik yang menempatkan Megawati dan Gus Dur sebagai *common enemy*. Bila tidak ada intervensi politik yang signifikan dari TNI, kemunculan nama Wiranto sulit dipastikan, kecuali di dalam tubuh koalisi ini retak dalam konteks capres, dan *deadlock*, hingga terpaksa menerima capres alternatif, yakni Wiranto —bisa juga Nurcholish Madjid yang datang dari kalangan sipil.

Kedua, PAN, PDI Perjuangan dan partai-partai Nasionalis lainnya, dan PKB (populer disebut "Amanat Perjuangan Bangsa") versus Golkar dan Poros Tengah minus PAN. Dengan kata lain, PAN sebagai kekuatan politik tengah —yang bisa beririsan dengan kelompok politik manapun—, memilih menindaklanjuti komunike Ciganjur. Hal ini, tentu saja sulit diterima oleh partai-partai Poros Tengah.

Sementara capres yang mengedepan adalah Amien, Megawati atau Gus Dur di satu sisi dan Habibie di sisi lain. Partai-partai Islam tentu keberatan dengan sosok-sosok capres yang digulirkan "kelompok reformis", dan lebih sepakat memilih B.J. Habibie sebagai presiden. Demikian pula, Golkar memiliki kepentingan yang sama. Skenario kedua tetap mengisyaratkan capres-capres lain, semisal Wiranto atau Nurcholish Madjid, —bahkan mungkin pula Akbar Tanjung— bila kompromi-kompromi politik di legislatif terhadap calon dari masing-masing kubu menemui jalan buntu (*deadlock*).

Ketiga, Poros Tengah plus PKB dan Golkar versus PDI Perjuangan dan partai-partai Nasionalis lainnya. Sentimen ideologis Islam versus Nasionalis-Sekuler mengental, ditambah dengan kepentingan politik untuk menjegal laju Megawati —bisa jadi ini diingini oleh PAN, PKB, dan Golkar, merupakan sebuah kemungkinan dari skenario ketiga. Dan ini skenario politik yang paling radikal, di mana PDI Perjuangan dikepung oleh faksi politik kekuatan penyeimbang ditambah Golkar, yang secara eksplisit tidak menghendaki Megawati sebagai sosok presiden mendatang.

Kubu penyeimbang dan Golkar, dalam konteks ini kompak dalam satu suara, Megawati dan kekuatan politik PDI Perjuangan sebagai *common enemy*. Dengan kata lain, mereka menghadang kekuatan Nasionalis-Sekuler. Capres yang mencuat adalah Habibie, Amien Rais, Gus Dur di satu sisi dan Megawati di sisi lain. Bila dalam realitasnya kemudian tak ada kesepakatan bulat di tubuh faksi politik pertama dalam penentuan capres, apalagi dengan capres Megawati, maka Wiranto bisa menjadi capres alternatif —atau kemudian muncul nama TNI atau sipil yang lebih populer untuk bisa diterima semua kelompok semisal Susilo Bambang Yudhoyono dan Nurcholish Madjid atau Adi Sasono.

Keempat, PKB versus Golkar dan berhadapan dengan PDI Perjuangan dan partai nasionalis sekuler lainnya. Dalam skenario keempat ini kekuatan yang semula bergabung dalam Poros Tengah terpecah, mendukung Golkar dan PKB. Hal ini dapat terjadi dengan melihat potensi warga NU yang menjadi anggota legislatif cukup banyak yaitu sekitar 157 orang. Jika hal itu terjadi maka figur yang tampil sebagai calon presiden adalah Gus Dur, B.J. Habibie, dan Megawati yang berlaga dalam pertarungan segitiga. Akibatnya tarik-menarik kekuatan politik dalam konstelasi nasional akan semakin rumit, tetapi amat menarik untuk diamati.

Kelima, akan terjadi pertarungan segi empat di mana Partai Golkar, PDI Perjuangan, Poros Tengah, dan PKB berposisi saling berhadapan karena masing-masing bertahan dengan capresnya. Adapun capres yang muncul adalah B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, Amien Rais, dan Gus Dur. Alternatif ini dapat pula memunculkan Yusril Ihza Mahendra, Didin Hafidhuddin, Hamzah Haz dari Poros Tengah. Nama Wiranto hanya ada jika terdapat *common enemy* yang dapat mengancam disintegrasi bangsa dan proses di Sidang Umum tidak terjadi kompromi. Sedangkan Nurcholish

Madjid atau tokoh alternatif lainnya seperti Adi Sasono memiliki peluang yang sama besarnya dengan Wiranto. Jika skenario yang kelima yang terjadi maka posisi kunci yang memegang peranan adalah suara fraksi TNI, utusan golongan, dan utusan daerah. Lepas dari pertarungan yang sengit, skenario ini menandai kehidupan demokrasi yang lebih maju, khususnya untuk menyelamatkan kekalahan capres dalam pemilihan.

Dalam lima skenario tersebut tampak bahwa faktor siapa capres yang hendak didukung dengan sepakat bulat oleh masing-masing kelompok politik, amatlah menentukan pola-pola koalisi politik yang terjadi. Ini bisa dimaklumi mengingat posisi presiden di masa mendatang amat strategis, apalagi sistem yang ada masih sistem presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan kabinetnya.

Kecuali itu terdapat kekuatan politik lain yaitu fraksi ABRI (berubah jadi fraksi TNI?) dan Utusan Daerah (165 kursi), serta Utusan Golongan (35 kursi) yang hingga kini belum dibagi. Ketiga kekuatan tersebut juga sebagai faktor yang tidak boleh disepelekan. Terlebih TNI yang tanpa ikut pemilu, memiliki 38 suara di legislatif. Dinamika politik pasca-Pemilu 1999, berikut skenario di atas, tentu akan berkembang secara dinamis. Akankah Poros Tengah benar-benar lahir sebagai salah satu kekuatan politik nasional? Kita tunggu saja.□

Sebenarnya, Indonesia Negara Sekuler

Wawancara **Greg Barton**

PARTAI ISLAM berguguran. Dari hasil perhitungan suara, hampir pasti sebagian besar partai Islam tersisih. Perolehan suara mereka tidak cukup untuk meloloskan wakil-wakilnya ke DPR. Juga tak memenuhi syarat untuk ikut pemilu mendatang. Paling tidak, hanya ada tiga partai Islam yang bakal punya wakil di DPR, yakni PPP, PBB, dan PK.

Namun, dua partai yang didukung oleh organisasi massa Islam tapi tidak berdasarkan Islam, yakni PAN yang di-*back up* Muhammadiyah dan PKB yang dilahirkan NU, mampu meraih suara yang lumayan.

Mengapa partai politik Islam kurang diminati? Pengamat politik Indonesia dari Australia, **Greg Barton**, melihat hal itu berawal dari pembentukan partai Islam yang diwarnai romantisme. "Para pemimpinnya menaruh harapan terlalu tinggi," ujar Greg. Begitupun, menurut Greg, Islam tetap mampu memberi pengaruh politik melalui organisasi massa atau tokoh intelektualnya.

Greg, yang dosen Departemen Studi-studi Agama Universitas Deakin, Australia, mengamati perkembangan partai politik Islam sebelum dan sesudah pemilu 1999. Berikut hasil pengamatannya yang dituturkan kepada wartawan *Panji Masyarakat*, Elly Burhaini Faizal.

Pernyataan "Islam Yes, Partai Islam No" yang diungkapkan oleh Nurcholish Madjid terbukti pada pemilu lalu. Padahal sebelumnya orang mencemooh dan menganggap itu sebagai pemikiran sekuler?

Tampaknya begitu. Cak Nur mengatakan hal itu pada tahun 1970 atau hampir 30 tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa partai sektarian

memang tidak akan pernah memperoleh dukungan karena masyarakat memang lebih suka partai yang nasionalistis.

Apakah kekalahan parpol Islam akan menyebabkan wibawa para pemimpin Islam merosot?

Ucapan saya ini terasa kasar. Tapi tampaknya para pemimpin Islam sejak dulu agak menipu diri sendiri. Mereka menaruh harapan terlalu tinggi. Mereka percaya punya dukungan massa yang luar biasa dan sering mengatakan "kita harus dengarkan suara rakyat, suara orang kecil. Dan kita harus mendengarkan suara orang Islam yang menginginkan negara ini dibangun secara lebih Islami". Tapi sebenarnya itu tidak ada bukti. Bukannya rakyat tidak memperhatikan soal agama dan prinsip dalam Islam, melainkan mereka memang tidak menginginkan partai politik yang eksklusif.

Apa sebenarnya penyebab kekalahan partai Islam itu? Disorientasi karena terlalu banyak wadah ataukah akibat pendidikan politik yang belum berhasil?

Itu terjadi karena banyak faktor. Bagi saya, pemilu lalu kurang canggih dan penuh simbol. Tidak cukup kesempatan bagi partai-partai untuk melakukan pendidikan politik. Kalaupun cuma ada satu partai politik Islam, tetap saja tidak akan meraih lebih dari 20% suara, kalau tidak ada dukungan massa. Meskipun perolehan suara PPP cukup lumayan, tapi itu lebih karena tradisi orang memilih PPP. Mereka mendukung PPP bukan karena ia partai Islam, tapi karena itu sudah menjadi kebiasaan sejak pemilu terdahulu.

Apakah lebih baik ada satu partai Islam agar dukungan umat terkonsentrasi?

Sulit dikatakan karena belum ada bukti empiris. Kalau lebih banyak waktu serta lebih banyak *resources*-nya, partai Islam bisa mendapatkan dukungan besar. Saya kira rakyat tidak ingin mengulangi kejadian pada tahun 1950-an ketika terjadi politik aliran. Mereka tampaknya tidak ingin di Indonesia muncul kejadian seperti yang terjadi di Pakistan. Rakyat juga tidak mau agama dipergunakan untuk kepentingan politik semata.

Setelah kekalahan ini, apakah politik Islam tetap akan mampu memainkan perannya di masyarakat?

Tentu saja.

Bukankah orang menganggap kekuatan politik Islam formal sudah usai?

Pemberian pengaruh tidak harus lewat partai, tapi bisa lewat organisasi massa dan masyarakat sipil. Saat ini kekuatan lembaga masyarakat sipil ada pada Islam. Ini bisa dilihat dari organisasi massanya yang berasal dari Muhammadiyah dan NU. Kemudian pengaruh dari masyarakat sipil tampak dari keberadaan tokoh-tokoh cendekiawan Muslim. Keberadaan cendekiawan seperti Gus Dur membawa peranan penting. Begitu juga Nurcholish Madjid yang ternyata masih berpengaruh. Ini menarik sekali.

Kalau Anda cermati, kekuatan Islam sekarang terbagi dalam beberapa kubu?

Pertama adalah kubu Golkar. Mungkin juga bersama-sama dengan PPP. Kalaupun semula ada rencana kekuatan pro-*status quo* itu untuk merangkul partai politik Islam, harus diakui rencana itu gagal. Saya kira memang sejak awal, lewat Partai Bulan Bintang, ada rencana untuk menambah perolehan suara. Sementara Partai Keadilan saya pandang lebih independen. Partai ini dipenuhi semangat orang muda yang cenderung naif, romantis, tapi jujur.

Kemenangan PDI-P akankah mengubah Indonesia menjadi sebuah negara sekuler?

Sebenarnya Indonesia sudah menjadi negara sekuler. Tetapi keberadaan Pancasila menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, melainkan negara teistik. Artinya, kewibawaan Tuhan diakui. Tapi, lebih dari itu, untuk mendukung salah satu agama, tidak ada upaya dilakukan. Indonesia benar-benar menjadi negara non-sektarian. Indonesia sekarang sudah menjadi negara sekuler, tapi teistik. Salah satu keberhasilan rejim Soeharto adalah pemusatan Pancasila dalam daya pikiran rakyat. Saya kira itu tidak akan diubah.

ICMI mengusulkan adanya fraksi Islam di DPR. Bagaimana pendapat Anda?

Pada dasarnya hal itu berbahaya. Saya tidak keberatan dan memang tidak fair bila ada keberatan bahwa Islam harus mempengaruhi politiknya. Tapi, sebaiknya jangan ada politik aliran. Ya, oke untuk sementara memang wajar. Untuk sementara memang ada PKB yang sangat erat dengan Nahdlatul Ulama. Tapi, untuk jangka panjang, lebih baik yang non-sektarian dan terbuka. Sebab, nantinya

akan ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Ada umat Islam yang mau A dan ada lagi yang mau B. Jadi, sebaiknya jangan dilembagakan sehingga secara resmi atau struktural akan ada politik aliran.

Ya karena itu saya sangat berharap bahwa PAN akan bekerja sama dengan PKB dan PDI Perjuangan justru supaya di dalam pemerintahan yang baru itu ada yang dari kaum modernis, ada yang dari nasionalis, ada yang santri, dan abangan. Jadi, itu akan lengkap. Nah, di pihak oposisi sama juga. Dari PPP dan partai yang lain juga. Juga, sebaiknya, PAN jangan ikut dalam kelompok oposisi. Supaya tidak gampang muncul politik aliran. Sebab, ada yang bilang pemerintahan Megawati kurang Islami. Lalu, yang oposisi menjadi lebih Islami. Karena, pada dasarnya hal itu kurang sehat.

Terlebih untuk dampak di masa yang akan datang, maksudnya?

Memang ada dampak ke depan. Sebab, itu kan bermain api. Tanpa disadari, hal itu akan menjadi bom waktu juga kalau kita menggunakan agama untuk kepentingan politik.

Jadi, kebijakan yang dilakukan ICMI lewat pernyataan dukungan kepada Habibie dan mengusulkan Fraksi Islam merupakan bom waktu juga?

Maksud saya begini, ICMI punya hak dan sudah wajar kalau mereka bikin statemen mendukung Habibie. Saya kira itu sudah wajar dan harus diterima karena itu hak mereka. Tapi, sebaiknya jangan dilembagakan menjadi frkasi Islam dalam MPR dan DPR. Atau, jangan dikatakan kalau nanti Golkar dan PPP ada dalam oposisi bersama PPP dan PBB dan yang lain, jangan dikatakan fraksi Islam atau partai Islam, sementara yang lain bukan. Itu kurang canggih, kurang sehat dan kurang benar juga. Kan banyak orang Islam di PDI-P walaupun saya setuju mengkritik PDI-P karena pemilihan calegnya kurang arif. Harus saya setujui bahwa dalam hal itu memang mereka kurang arif.

Tapi, jelas banyak orang Islam di dalam PDI Perjuangan. Kalau di PKB, lebih jelas lagi. Jadi, kemudian tidak fair, kalau ada yang bilang, ini yang pihak Islam dan ini pihak yang non- Islam. Atau, ini pihak yang lebih setia kepada Islam dan ini yang tidak setia. Sebab, ini saya kira yang berbau kemunafikan. Dan, ya, tidak merupakan tindakan yang jujur. Kan orang lebih memperhatikan kepentingan politik dari pada kepentingan agama.

Seberapa besar pengaruh fraksi Islam jika kelak dilembagakan di DPR?

Memang harus diakui bahwa fraksi Islam ini cukup besar dan cukup penting karena mereka merupakan blok kursi, atau fraksi, yang ketiga. Kalau diingat konstelasi kekuasaannya di DPR, potensi mereka sangat kelihatan. Blok pertama, walaupun belum pasti, ialah PDI-P, PKB, PAN, yang mampu mendapatkan mayoritas mutlak. Kedua blok Golkar. Ketiga ialah fraksi Islam. Yang jelas fraksi Islam itu bisa memperkukuh blok pertama dan membentuk sebuah pemerintahan yang baru yang diinginkan rakyat. Atau, bisa dimungkinkan kebangkitan kembali Golkar dan Habibie.

Akankah Fraksi ini akan mampu menyuarakan aspirasi umat Islam secara keseluruhan?

Tentu itu tidak mungkin. Alasannya sederhana tapi kuat. Bagaimana mungkin kita tahu apa 'aspirasi umat Islam secara keseluruhan' itu? Satu-satunya cara yang obyektif dan punya arti yaitu pemilu kemarin, tanggal 7 Juni itu. Nah, harus diingat bahwa umat Islam merupakan 87 persen dari umat bangsa Indonesia. Dan, sudah terbukti bahwa lebih dari separo dari itu semua warga negara memberi suaranya kepada PDI-P atau PKB atau PAN, yakni yang disebut "*common front* untuk reformasi."

Baiklah, kita bicarakan saja umat Islam dalam artian umatnya orang Islam yang santri (yang sering dimaksudkan walaupun jarang diakui). Jelas juga bahwa hampir semua (mungkin lebih dari 90%) pendukung PKB dan PAN ialah santri. Dari pendukung PDI pun mungkin ada cukup banyak juga yang boleh disebut orang santri. Mungkin sekali kan bahwa ada lebih banyak santri yang mendukung commont front itu daripada yang memilih kedelapan partai itu. Tanpa PPP, fraksi Islam itu cuma beberapa persen walaupun mengalami simplifikasi jumlah kursinya karena *stembus accord*. Dalam konteks ini —entah kenapa— tidak ada *stembus accord* antara PDI-P, PKB, dan PAN.

Kalau begitu, bagaimana peta sesungguhnya umat Islam di Indonesia? Apakah benar bahwa umat Islam di Indonesia memang terjerumus dalam kotak-kotak yang sulit sekali dipersatukan?

Sebenarnya tidak sesederhana itu. Kalau akhirnya PAN, PKB dan PDI bisa bekerja sama (dan saya tetap percaya bahwa itu mungkin sekali dan masuk akal), aliansi itu akan menjadi buktinya. Bahwa

kaum modernis dan tradisionalis mampu bersatu untuk kepentingan reformasi dan nasib bangsa. Kalau perbedaan yang lain, sebaiknya kita sadar bahwa ada dua tipe, atau dua macam perbedaan. Pertama, perbedaan visi politik (dan kepentingan politik) dan perbedaan agama. Yaitu, perbedaan pendapat atu tafsiran tentang hal-hal *diniyah*. Saya merasa bahwa yang terjadi sekarang ini sangat kelihatan. Memang ada yang mencoba mencampurkan perbedaan politik dengan perbedaan agama, baik karena betul-betul bingung maupun karena kepentingan politiknya. Tetapi, kita harus lebih canggih dari itu dalam pemikiran kita. Demokrasi itu berarti pluralitas, berarti perbedaan pendapat dan perbedaan visi. Dan, sebenarnya perbedaan itu harus saling menghormati.

Perbedaan pendapat dan pluralitas keyakinan dan konviksi bukanlah sesuatu yang menakutkan. Mungkin kesadaran itu belum lagi tercapai. Tetapi, harus tetap diperjuangkan. Inilah salah satu bagian dari pendidikan demokrasi.

Alasan paling dominan soal peran serta umat Islam dalam kepemimpinan nasional adalah bahwa sebagai agama terbesar penganutnya di Indonesia ini partisipasinya selalu "dikalahkan" oleh minoritas non-Muslim. Anda melihat alasan ini masih relevan, khususnya jika dikaitkan dengan isu fraksi Islam?

Mungkin pada masa otorotarianisme ada relevansinya. Tetapi, ketakutan ini juga sangat dipergunakan untuk kepentingan sendiri oleh pihak yang berkuasa. Namun, pada era demokrasi tidak relevan lagi. Seperti dijelaskan di atas, kebanyakan orang Islam memilih ketiga partai reformasi dari *commont front* itu. Malahan, kebanyakan santri juga tampaknya memilih begitu. Tetapi, walaupun begitu, semua pihak harus bekerja keras untuk mengatasi perasaan curiga dan takut. Dalam hal ini harus diakui bahwa PDI-P memang kurang arif dalam hal memilih calegnya. Ini yang harus dikoreksi.

Komponen delapan partai yang memunculkan ide itu adalah partai-partai yang gagal memperoleh kursi dalam jumlah banyak di DPR. Dengan memunculkan fraksi Islam, apakah ini merupakan upaya untuk memperoleh kursi lebih banyak? Kalau begitu, apakah fraksi Islam ini hanya sekadar isu sampingan semata? Artinya, mereka tidak murni mengemukakan problem pemberdayaan umat Islam dalam lingkup kekuasaan.

Kehendak rakyat sudah jelas. Sebaiknya yang mau memberi sum-

bangan jangan sampai menentang kehendak rakyat yang sudah diperjelas dalam pemilu kemarin.

Jika fraksi Islam jadi dilembagakan, apakah Anda melihat reaksi dari kelompok non-Muslim yang tentu ingin pula memiliki fraksi yang mewakili kepentingan mereka? Bukankah ini justru makin memunculkan pertikaian yang makin runcing dan besar?

Sayang sekali kalau fraksi Islam dilembagakan. Karena, itu merupakan salah satu bagian dari taktik "*divide and rule*" dari era Soeharto. Sekarang kita sudah masuk era demokrasi. Jadi, tidak patut kita tetap memakai "*politics of fear*" dan "*politics of hate*". Potensi bangsa Indonesia dan potensi umat Islam di Indonesia menjanjikan hal yang jauh lebih baik dan lebih canggih daripada sisa era otoritarian itu.□

Saya Sudah Bulat Mencalonkan Gus Dur

Wawancara **M. Amien Rais**

POROS TENGAH ternyata gagasan **M. Amien Rais**, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Amien sebenarnya tidak ngotot idenya harus diterima. Ia cuma melontarkan alternatif. "Siapa tahu dalam 'ketidakjelasan perpolitikan' kita ini bisa membantu menjernihkan masalah," kata mantan Ketua PP Muhammdiyah ini. Bila Poros Tengah atau Fraksi Reformasi, yang terdiri dari partai-partai Islam, kemudian mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai kandidat presiden, Amien memang melihat deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu layak dicalonkan. Berikut wawancara dengan Amien yang dirangkum dari majalah *D&R* dan *Forum Keadilan* edisi Juli dan Agustus 1999.

Apa sebenarnya yang diinginkan oleh fraksi reformasi atau Poros Tengah ini?

Saya sesungguhnya menncoba dengan kesungguhan hati untuk menawarkan solusi alternatif bagi perkembangan politik nasional yang serba tidak pasti. Dalam serba-ketidakpastian itu, terselip satu bahaya yang kalau kita lihat dengan jujur memang tidak bisa diremehkan. Pertentangan dua kubu, antara Megawati dan B.J. Habibie, sudah mulai tampak di berbagai peristiwa dan di beberapa daerah. Tentang sumpah darah, tentang ancaman-ancaman dari para petinggi tiap-tiap kubu sudah direkam dengan baik oleh media massa. Buat orang yang berpikir jauh ke depan dan bertanggung jawab, jelas sekali, pilihan Megawati atau Habibie itu tidak menjanjikan.

Mengapa?

Misalnya, saya pernah mendapat informasi yang bisa dipercaya bahwa tokoh-tokoh Aceh akan lebih cepat memisahkan diri kalau Megawati menjadi presiden. Mereka mengatakan, tentu Megawati tidak akan banyak bedanya dengan bapaknya. Menurut orang-orang Aceh, Bung Karno dianggap menipu Aceh. Sudah dibantu dibelikan kapal terbang Seulawah dan dukungan dana dari rakyat Aceh, kemudian Aceh dilupakan, dibengkalaikan dalam masa Soekarno. Pada masa Soeharto, Aceh diinjak-diinjak hak-hak asasinya, dan kemudian diporoti sumber daya alamnya.

Sebaliknya, kalau Habibie menjadi presiden lagi, saya memantau dunia mahasiswa tidak bisa menerima. Kemudian rakyat yang bergabung di PDI Peruangan (PDI-P) juga akan mengambil altenatif hancur-hancuran. Selain itu, Habibie akan semakin dikeroyok oleh media-massa, baik dalam maupun luar negeri,baik cetak maupun elektronik.

Bagaimana sebenarnya proses lahirnya fraksi reformasi atau Poros Tengah itu sendiri?

Ini gagasan saya. Setelah melihat hasil pemilu, ternyata ada kekuatan tengah, yang disebut sebagai kekuatan poros tengah atau mungkin fraksi reformasi yang jauh lebih kuat daripada PDI-P dan Golkar, karena jumlah perolehan kursi jauh mengungguli yang diperoleh Partai Golkar maupun PDI-P. Kalau poros tengah ini bisa dibentuk degan bagus, kemudian bisa menawarkan resep-resep pemecahan masalah bangsa dengan paket *sharing* kekuasaan, sekaligus program-program yang jelas, mungkin akan menjadi kekuatan yang bisa melampaui dan mengakhiri konflik tajam antara dua kubu seperti kita lihat di panggung politik nasional.

Mengapa Anda tidak menggunakan nama fraksi Islam?

Itu bisa menimbulkan konotasi primordialisme dan eksklusivisme. Selain itu, motor Poros Tengah, yaitu PAN dan PKB, kan partai terbuka. Kalau Poros Tengah ini digulirkan, dua kubu yang sekarang bertikai akan terbuka matanya. Ada kekuatan lain yang lebih besar dari mereka. Kami tidak mau didikte bahwa seolah-olah hanya harus memilih Mega atau Habibie.

Mengapa kemudian Gus Dur yang dijadikan calon presiden oleh fraksi ini?

Pilihan itu berdasarkan banyak pertimbangan. Citra Gus Dur se-

lama ini positif. Ia mudah diterima oleh teman-teman minoritas, kemudian teman-teman TNI saya kira akan netral terhadap Gus Dur. Mungkin masyarakat internasional dan reaksi pasar juga tidak akan negatif (terhadap Gus Dur). Dan buat sebagian pendukung PDI-P saya yakin mereka bisa menerima Gus Dur. Jadi, di antara yang tidak ideal, Gus Dur masih sedikit banyak ideal.

Bukankah dalam wacana demokrasi atau dalam upaya demokratisasi, kemenangan PDI-P sebaiknya diterima, dan PKB dan PAN mendukung PDI-P?

Saya dengan kepemimpinan Megawati memiliki reservasi yang tidak pernah saya tutup-tutupi. Saya bisa menghilangkan reservasi ini kalau Megawati segera tampil, bicara, dan dalam waktu tiga bulan ini meyakinkan orang bahwa dia adalah pilihan yang lumayan bagus dibandingkan dengan yang lain. Tapi, Mega diam saja; kemudian susunan caleg yang mengejutkan, di mana ada pat-gulipat sehingga mengejutkan kalangan Islam; ini sudah menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan.

Lebih dari itu, sebagai orang yang belajar demokrasi belasan tahun, tidak ada ceritanya dalam sistem multipartai, sebuah partai yang memenangkan 33 persen suara terus mengklaim bahwa semuanya harus mengikuti partai tersebut. Lain ceritanya kalau PDI-P memperoleh 50 persen atau lebih, maka saya adalah orang yang berada di barisan paling depan untuk menyokong PDI-P dan siapa pun yang ditokohkan. Jadi, yang dilupakan oleh rakyat kita, yang masih belajar demokrasi, yang masih ingusan, seolah-olah klaim bahwa 33 persen suara sudah menang mutlak. Itu yang tidak bisa diterima oleh kamus demokrasi manapun.

Aturan demokrasi yang universal, siapa pun yang memegang mayoritas sederhana atau *single majority*, yaitu 50 persen plus 1, itu berarti sudah menang. Tapi, sebuah partai yang memenangkan pemilu dengan persentase tertinggi, selama masih belum 50 persen lebih, kadang-kadang dikalahkan oleh partai lain yang persentasenya kalah tinggi karena partai lain itu dapat membangun koalisi dengan mayoritas sederhana. Nah, oleh karena itu, yang diperlukan oleh PDI-P itu bukan ramai-ramai sumpah darah dan sebagainya, tapi berusaha secara terbuka dan elegan, bagaimana PDI-P dapat meyakinkan partai-partai lain supaya bergabung untuk mencapai 51 persen suara. Kalau itu tercapai, selesailah sudah perbincangan soal

kursi presiden itu. Dan saya yakin, semua rakyat akan menerima dengan legawa.

Dengan lahirnya fraksi Poros Tengah, menjadi ada tiga kubu apakah ini tak lalu membuat SU MPR menjadi lebih sulit?

Oke, saya bisa memahami itu. Jadi, sekarang, Megawati itu yang diminta aktif untuk menghubungi partai-partai, termasuk PKB, PAN, dan lain-lain. Tapi, anehnya, Megawati tetap diam seribu bahasa, dengan alasan menunggu hasil final pemilu dan lain-lain. Padahal, untuk membangun kepemimpinan nasional yang bagus, itu kan diperlukan rasa saling percaya. Bagaimana saling percaya itu bisa dibangun kalau tokoh yang diharapkan itu membisu dan penuh misteri?

Karena itulah, saya ingin membuat sebuah alternatif atau perspektif yang lebih segar. Dan *on top of that*, saya memang yakin ada proses obyektif dan demokratis dari setiap wacana atau diskursus politik. Kalau memang gagasan saya ini cukup sehat, cukup rasional, kemudian membawa manfaat besar bagi rakyat Indonesia, itu akan laku. Mungkin pemasyarakatannya butuh waktu satu-dua bulan. Dan kemudian akan diimplementasikan. Sebaliknya, kalau gagasan saya lemah atau rapuh, karena dianggap tidak rasional oleh masyarakat politik di negeri ini, gagasan itu akan hilang bersama angin.

Apakah gagasan Anda ini di dalam tubuh PAN sendiri sudah dipertimbangkan?

Dalam tubuh PAN sendiri, kalau gagasan sang ketua umum lucu, tentu tidak akan laku. Kalau dalam tubuh PAN ada satu-dua oknum yang meresistensi, itu sesuatu yang wajar. Tak usah dalam partai politik, sewaktu saya masih memimpin Muhammadiyah yang lebih homogen, selalu ada pro dan kontra. Menurut saya, yang kontra dalam PAN itu kecil-kecil saja.

Dengan demikian kesepakatan ini memang kesepakatan antara PAN dan bukan hanya kesepakatan antara pribadi Gus Dur dan pribadi Amien Rais?

Mengapa saya bicara intensif dengan Gus Dur, karena *Godfather*-nya PKB itu Abdurrahman Wahid. Apa yang dikatakan oleh Gus Dur menjadi semacam pegangan dari PKB. Tentu ada orang yang bilang, "lho, Pak Amien sebagai seorang demokrat kok justru melihat dengan kacamata yang tidak demokratis. Gus Dur yang secara struk-

tural bukan PKB, kok, dihubungi untuk bicara sama PKB." Tapi saya harus realistis. Seperti Golkar, itu adalah Soeharto, bukan Sudharmono atau Harmoko, Abdul Gafur, dan lain-lain.

Tapi, Matori Abdul Jalil, Ketua Umum PKB, menentang keras rencana ini, bahkan ia anggap sebagai upaya mengegolkan presiden....

Cara berpikir Pak Matori itu agak kelewatan. Karena, logika itu tidak berdasar. Justru Poros Tengah ini untuk menghindari munculnya baik Megawati maupun Habibie yang tampaknya akan membawa risiko sangat besar.

Benarkah pencalonan Gus Dur hanya cara untuk menarik simpati PKB, karena Hamzah Haz dan partai-partai Islam yang lain lebih *sreg* dengan Anda?

Dalam tiga kesempatan, secara eksplisit maupun implisit, Gus Dur selalu mengatakan, tidak ingin menjadi orang kedua. Saya kutip secara *letterlijk*, dia mengatakan, "Mas Amien, *I am second to nobody*." Ia tidak bisa menjadi nomor dua dari siapa pun. Artinya, dia ingin mencoba untuk menjadi nomor satu Buat saya, itu sah-sah saja. Malahan ketika saya mengatakan, "Gus Dur, Anda ini memang cukup sehat, tetapi penglihatan Anda itu tidak sempurna," jawab Gus Dur, "Mas Amien, tetapi Jimmy Carter kepada saya juga mengatakan, di dunia ini tidak ada aturan yang melarang orang yang visi atau penglihatannya tidak sempurna menjadi presiden."

Apakah nominasi poros tengah kepada Gus Dur bisa diterima oleh publik Indonesia yang sangat beragam ini, itu tentu tidak bisa kita paksakan. Tetapi bahwa Gus Dur juga memenuhi banyak syarat —kecuali penglihatannya yang kurang jelas— itu sulit terbantahkan. Gus Dur ini di kalangan minoritas dihormati dan dipercaya. Teman-teman Katolik, Kristen, Tionghoa itu melihat Gus Dur seorang tokoh yang bisa memberikan proteksi untuk kehidupan berkomunitas di Republik Pancasila ini. Kemudian, di kalangan santri, saya yakin sebagain besar bisa menerima Gus Dur. Dari kalangan pasar dan juga masyarakat internasional, saya belum pernah melihat ada kritik tajam kepada Gus Dur. Apakah itu *Newsweek, Time, Asiaweek, Far Eastern Economic Review*, media tersebut positif terhadap Gus Dur.

Kemudian TNI, paling tidak netral. Gus Dur dengan petinggi-petinggi TNI, saya lihat, ada hubungan yang sangat baik. Saya pernah bertanya, "Kalau Anda betul menjadi presiden dengan takdir dari

langit, kira-kira bagaimana massa PDI-P. Dia mengatakan "Sebagian besar bisa menerima saya. Andaikata ada yang melakukan resistensi, itu insya Allah, kecil saja."

Walaupun demikian, saya kembali pada pendirian semula. Siapa pun yang terpilih sebagai presiden, kalau melalui proses yang benar dan terbuka, tidak menggunakan politik suap, tidak menggunakan politik tekanan, kasak-kusuk, dan lain-lain, saya akan menerima dengan segenap dukungan saya- apakah itu Megawati, apakah itu Gus Dur, bahkan apakah itu Habibie atau tokoh yang lain.

Dalam pidato Peringatan 27 Juli lalu, secara eksplisit Megawati tidak setuju dengan ide pembentukan "Poros Tengah" yang Anda lontarkan baru-baru ini...

Saya gagal memahami, mengapa teman-teman pimpinan PDI-P, kok, tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri. Padahal, andaikata saya sebagai pimpinan partai yang memperoleh suara sebanyak PDI-P, saya amat sangat percaya diri. Sebab, ibarat orang yang berlomba, PDI-P tinggal menyelesaikan satu etape lagi yang tersisa. Dengan sekitar 35 persen perolehan suara dari total suara hasil pemilu, PDI-P sudah berada paling depan. Tidak ada alasan untuk tidak percaya diri sampai harus menggelar aksi yang aneh-aneh, seperti sumpah darah dan sebagainya. Aksi itu justru akan menimbulkan situasi yang makin panas di tengah masyarakat

Teorinya sangat sederhana: partai mana pun yang memperoleh 351 suara di SU MPR nanti, dialah yang menentukan siapa presiden mendatang. Nah, dari hitungan sederhana tentang hasil final pemilu itulah PDI-P tinggal secepat mungkin —tapi secara kreatif dan meyakinkan— mendekati partai-partai politik lainnya untuk membangun koalisi yang cukup aspiratif. Demikian pula Golkar yang memperoleh suara terbanyak kedua, tentunya tak mau kalah. Golkar yang sudah punya jam terbang cukup tinggi itu pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, karena itu, sesungguhnya aneh bin ajaib jika kubu Megawati harus melakukan hal-hal yang ekstrademokrasi. Artinya, dengan membuat hal-hal yang bersifat kurang lebih meneror rakyat seolah-olah jika Megawati gagal jadi presiden, akan terjadi huru-hara atau kiamat kecil di negeri ini.

Saya tidak bisa memahaminya. Semuanya itu seharusnya kita mainkan dengan jelas, seksama, proporsional, dan elegan. Oleh sebab itu, untuk meramaikannya, saya menemui Gus Dur beberapa

kali. Kami membicarakan mengenai kemungkinan membangun sebuah "Poros Tengah" sebagai kekuatan yang cukup reformatif yang tidak usah ditarik-tarik atau didikte-dikte antara kekuatan Habibie dan Megawati.

Apakah "Poros Tengah" ini semata-mata taktik untuk menggolkan Habibie?

Oh, bukan. Bukan itu.

Atau barangkali Anda sendiri?

Saya mempunyai kelemahan yang sudah *built in*: perolehan suara PAN yang 7,5 persen itu, rasa-rasanya dari ukuran demokrasi mana pun, berat. Saya harus tahu diri. Ide "Poros Tengah" ini begini, ya. Sesungguhnya, mula-mula saya memang bisa menerima pendapat yang mengatakan bahwa siapa pun presidennya dicoba dulu. Nanti kalau enggak mampu langsung diganti. Misalnya, Megawati dicoba dulu. Kalau tidak berhasil, diganti. Lo, ini bagaimana? Dalam mengelola negeri yang segede Indonesia, kita tidak bisa *trial and error* atau main eksperimen begitu. Kalau Megawati atau Habibie dicoba dulu, siapa tahu sukses, kalau tidak, ya, diganti, itu seperti mengurus warteg (warung nasi Tegal) di pinggir jalan. Ini urusan 210 juta warga yang sedang memasuki Abad XXI yang amat rumit dan penuh tantangan. Karena itulah saya memberanikan diri menyimpulkan setelah berkonsultasi dengan teman-teman dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan, dan partai-partai kecil lain-mengapa tidak kita sodorkan sebuah alternatif yang lebih menjanjikan, atau, dengan kata yang lebih halus, "mungkin" lebih menjanjikan?

Ada yang menilai, "Poros Tengah" dimaksudkan untuk mengganjal Mega.

"Poros Tengah" itu akan mengganjal dua-duanya, baik Megawati maupun Habibie. Itu kalau pandangannya dari sudut ganjal-mengganjal. Tapi lihatlah secara lebih positif. Dengan adanya alternatif "Poros Tengah", tampaknya kedua poros atau kedua kubu (Megawati dan Habibie) yang sekarang berhadapan atau bertikai itu tiba-tiba terbelalak matanya. Bahwa mereka tidak mungkin membangun pemerintahan tanpa lampu hijau dari "Poros Tengah". Sehingga saya tak usah menutup-nutupi seperti layaknya seorang politisi yang mengatakan politik merupakan *business as usual*, dalam arti menga-

takan hijau padahal yang diinginkan biru, atau menyatakan biru yang diinginkan kelabu dan lainnya. Tapi, ya hanya ingin mengatakan bahwa, dengan adanya "Poros Tengah" ini *bargaining position* (posisi tawar-menawar) kaum reformis menjadi sangat tinggi.

Apakah cuma sekadar menaikkan *bargaining position*?
Tentu ada tujuan maksimal dan minimal. Yang minimal, kami menaikkan *bargaining position*. Tujuan maksimalnya, kami akan melampaui Golkar dan PDI-P, kemudian Gus Dur tampil sebagai presiden RI. Tapi andaikata itu tak tercapai, tetap ada *win-win solution*. Yaitu, akan muncul sebuah kekuatan dengan posisi tawar yang sangat tinggi sehingga siapa pun nanti yang mendominasi pemerintahan, baik PDI-P maupun Golkar, mereka tidak akan pernah bisa menyepelekan tuntutan reformasi. Sebab, Poros Tengah ini berintikan kekuatan kaum reformis, atau idealismenya reformasi.

Tapi, Gus Dur sendiri sampai sekarang masih menyatakan mendukung Mega..
Ya, iya. Tapi, bagi masyarakat yang cerdas, Gus Dur tidak perlu memberi cek kosong kepada kubu Megawati. Perhatikan saja Gus Dur selalu saja membuat pernyataan yang multinterpretatif. Kalau diformulasikan, kira-kira sebagai berikut: "Saya pribadi mendukung Megawati. Tapi, ya, terserah hasil proses dalam Sidang Umum MPR nanti," Atau, "Saya mendukung Mega. Tapi harus diingat, banyak hal yang tidak sependapat dengan saya. Padahal, saya berada di bawah komando para kiai." Atau, "Saya mendukung Megawati. Tapi, harus dibedakan antara mendukung dan memperjuangkan." Atau, ungkapan lain yang sejalan. Dari ungkapan-ungkapan ini, saya menganggap Gus Dur masih membuka pintu yang sangat lebar dan demokratis untuk mendorong alternatif presiden baru.

Apakah semua partai yang diajak masuk "Poros Tengah" sudah bersepakat dalam satu kubu?
Ya, kami sudah mengadakan pertemuan membahas hal itu.

Tapi, apakah mungkin tokoh seperti Yusril Ihza Mahendra (PBB) dan Nur Mahmudi (PK) juga sepakat menjagokan Gus Dur?
Dalam hal ini, saya harus jujur bahwa semuanya memang belum bulat. Kalau saya sendiri sudah bulat menjagokan Gus Dur. Tapi, memang teman-teman dari unsur "Poros Tengah" lainnya masih menimbang-nimbang. Kita juga harus menghargai pendapat mereka

itu. Namun, umumnya bisa dikatakan dari unsur "Poros Tengah" itu, yang paling kuat memang Gus Dur karena beberapa catatan yang tidak bisa diingkari. Pertama, Gus Dur ini punya citra sebagai guru bangsa yang mempunyai semangat menyala tanpa padam untuk melihat persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, kelompok minoritas, baik Kristen maupun keturunan Cina, hampir dipastikan bisa menerima.

Ketiga, sejauh yang saya ketahui, TNI juga tak pernah mempunyai masalah dengan Gus Dur. Malah, bisa dikatakan, andaikata kekuatan *status quo* mau menjegal, jika dengan Gus Dur, mereka cukup hormat. Sebab, sejak dulu, Gus Dur sudah membuka saluran dengan Soeharto. Sampai sekarang pun ia masih sering bertemu Tutut. Jangan lupa, bagi sebagian besar pendukung Megawati, figur Gus Dur juga merupakan alternatif yang *acceptable* (diterima). Kalau memang tuntutannya sekarang ini bermuara kepada tokoh pemersatu yang bisa melampaui problematika Mega maupun Habibie, saya tidak bisa melihat orang selain Gus Dur.

Seandainya Gus Dur tidak mau, Anda cenderung memilih Megawati atau Habibie?

Sampai sekarang Gus Dur berketetapan hati untuk maju. Apalagi dalam dua minggu ini dia mau ke Amerika Serikat untuk memulihkan penglihatannya. Kalau saya sekarang berandai-andai seperti itu, nanti bisa dianggap melemahkan. Jadi, soal pengandaian itu, nanti saja. Tapi, Gus Dur pernah mengatakan "*I'm second to nobody*, saya tidak mungkin menjadi orang kedua." Ini artinya Gus Dur mantap untuk berlomba secara kesatria untuk berebut kursi presiden.

Tapi, bagaimana dengan faktor kelemahan fisiknya?

Memang ada kendala fisik yaitu kesehatan. Sementara, ada pernyataan obyektif yang menyebut kelemahan fisik merupakan salah satu titik lemah seorang presiden. Tapi, misalnya sekarang, mau pilih yang mana, seorang pemimpin yang pemimpin yang segar, tapi mungkin tidak siap secara mental untuk memimpin bangsa yang besar ini, serta tidak ada jaminan untuk menanggulangi KKN, ataukah seorang yang cacat penglihatan tapi mampu mempersatukan bangsa Indonesia dan menberantas KKN. Memang pilihan saat ini tidak Ideal. Tapi, saya yakin dengan menginginkan Gus Dur, saya pun telah memecahkan mitos bahwa penilaian kita kepada seorang pemimpin itu bukan hanya kemampuan fisik, tapi juga

kesempurnaan kepribadian dan mental. Buat apa seseorang yang kelihatannya sehat walafiat, tapi invalid secara kepemimpinan, sehingga tidak bisa apa-apa.

Bagaimana dengan faktor TNI, apa mungkin mereka mendukung "Poros Tengah"?

Harus diingat faktor TNI memang sangat strategis. Saya punya *husnudzan* (prasangka baik) bahwa TNI tentu akan memilih pilihan yang paling menjanjikan dan berjangka panjang untuk kepentingan bangsa. Kalau terbukti Poros Tengah nantinya dianggap TNI sebagai pilihan yang terbagus, seperti dikatakan pimpinan TNI, mereka tidak akan pernah netral, melainkan akan selalu membela siapa pun yang paling menguntungkan kepentingan bangsa. Tidak tertutup kemungkinan bahwa "Poros Tengah akan mendapatkan, paling tidak, dukungan moral dari TNI.

Apakah soal Wapres juga sudah disinggung dalam Poros Tengah maupun PAN?

Terus terang belum dibicarakan. Dari kubu Megawati maupun Habibie juga belum pernah menampilan calon wapres. Jadi, kita tunggu permainan selanjutnya. Seperti orang main caturlah..., kita tunggu move mereka.□

Poros Tengah Ibarat Cewek

Wawancara **Yusril Ihza Mahendra**

HINGGA KINI belum ada gambaran yang jelas siapa yang akan terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR nanti. Banyak kalangan menilai, kans Megawati dan Habibie masih *fifty-fifty*. Pada saat itu, muncul "Poros Tengah". Kelompok ini, menurut gagasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Amien Rais, bisa menjadi kunci penentu kemenangan salah satu kubu di kancah pemilihan presiden.

Sudah sejauh mana konsolidasi "Poros Tengah" yang dimotori partai-partai politik bernapas Islam itu? Berikut petikan wawancara wartawan *Forum Keadilan,* Tony Hasyim dan Anton Bahtiar Rifa'i dengan **Prof. Yusril Ihza Mahendra**. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini ditemui pada Jumat pekan silam.

Sudah sejauh mana penggalangan "Poros Tengah"?

Kalau untuk kelompok Islam, sih, cukup solid. Inti "Poros Tengah" itu kan diawali gagasan pembentukan Fraksi Islam. Terakhir, dua hari yang lalu, kami berbicara dengan semua partai Islam. Waktu itu, saya usul supaya di MPR nanti kami muncul dengan satu fraksi, sedangkan di DPR tetap ada fraksi setiap partai. Nah, saya mengusulkan —dan ini saya kemukakan dalam pertemuan pimpinan partai-partai dan Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka— yang menjadi dasar pembentukan fraksi di DPR adalah *threshold* (batas minimum perolehan suara) dua persen itu. Jadi, kalau partai mencapai angka di atas dua persen, dia mesti diberi peluang untuk membentuk fraksi. Usulan itu diterima dalam rapat di DPP Partai Persatuan Pembangunan, kemarin. Masalahnya, kalau menggunakan ukuran itu, berarti hanya ada dua partai Islam yang

bisa membentuk fraksi. Yakni, PPP dan PBB. Yang lain bagaimana? Akan bergabung ke mana? Bergabung ke PPP, PBB, atau bagaimana? Nah, ini belum bisa dijawab. Tapi, yang pasti kami sudah sepakat akan membentuk satu fraksi di MPR.

Di tengah jalan, datang Amien Rais. Dia nimbrung pembicaraan di DPP PPP, lalu mengusulkan "Fraksi Islam Plus" dengan menambahkan Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dia menamakannya Fraksi Reformasi atau "Poros Tengah". Memang, kalau ditotal, bisa mencapai 174 suara. Artinya, lebih besar dari suara Golkar maupun PDI Perjuangan. Nah, soal ini masih diproses. Pertemuan rutin berjalan terus. Saya juga bertemu Gus Dur, di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bersama Amien dan Zarkasih Nur. Cuma, karena ibunya sakit, seminggu ini Amien kurang aktif. Gus Dur juga sedang berjalan ke mana-mana. Sehingga pembicaraan mengenai "Poros Tengah" belum tuntas. Yang pasti, delapan partai Islam —inti "Poros Tengah"— sudah solid.

Apakah bisa dipastikan "Fraksi Islam plus PAN dan PKB" akan terwujud?

Kalau Amien, saya kira, iya. Gus Dur pun, harapan saya, akan begitu. Dia paham betul tentang kekuatan "Poros Tengah". Tapi, menyangkut PKB secara keseluruhan, kelihatannya masih ada perbedaan antara Gus Dur dan Matori. Perubahan politik Gus Dur kan cepat sekali. Barangkali, itu tidak sepenuhnya bisa ditangkap Matori. Mudah-mudahan nanti semua setuju. Karena, bagaimanapun juga, ada akar Islam yang cukup kuat pada PAN dan PKB. Kalau ini bergabung akan menjadi kekuatan yang cukup besar.

Setahu Anda, bagaimana sikap Matori?

Dia agak ragu-ragu.

Apa sebabnya?

Wallahualam. Kami jarang berbicara dengan Matori. Dia sebetulnya kawan baik saya. Tapi, dia agak menghindar berbicara mengenai "Poros Tengah". Saya enggak tahu, mungkin dia sudah diiming-imingi PDI-P (tertawa). Tapi, sikap PKB itu kan tergantung Gus Dur dan para kiai. Proses pengambilan keputusan dalam PKB agak *complicated* (rumit).

Lantas, bagaimana dengan pencalonan Gus Dus sebagai presiden?

Itu kan usulan Amien Rais. Sewaktu pertemuan di PBNU, dia menegaskan dukungannya pada Gus Dur untuk jadi presiden. Saya menyatakan "Poros Tengah" tidak punya calon presiden. Kalau Gus Dur dimajukan, ya, itu adalah usulan Amien. Belum menjadi keputusan "Poros Tengah". Cuma, saya berpendirian bahwa "Poros Tengah" itu —kalau demikian istilahnya— masih bisa mengklaim diri sebagai "Poros Tengah" sepanjang dia tidak punya calon presiden. Kalau punya, dia bukan "Poros Tengah". Tapi, kelompok ketiga di antara Megawati dan Habibie. Jadi, secara teoretis, sebenarnya kelompok ini bisa bergabung ke sana-sini, tergantung negosiasi. Agak sulit bagi kelompok tengah untuk mengajukan calon presiden karena tiap partai anggotanya kan tidak sebesar Golkar dan PDI-P. "Poros Tengah" besar karena berupa gabungan. Jadi, kalau ditanya pada saya, ya, saya merasa tahu dirilah. Masak dengan perolehan kursi PBB belasan begitu, kok, saya mau jadi presiden. Kan aneh.

Bagaimana bila PKB tak ikut "Poros Tengah", tapi bergabung dengan PDI-P?

Ya, tetap saja tidak bisa membikin Habibie atau Megawati menang. Oleh sebab itu, kelompok tengah sebaiknya tidak mengajukan presiden. Nanti bisa *deadlock*. Tiga-tiganya tidak bisa menang. Tapi, kalau cuma dua yang maju, Habibie dan Megawati, maka kelompok "Poros Tengah" akan menentukan siapa yang bakal menang. Itu tergantung negosiasi politik. Oleh sebab itu, saya agak kurang mengerti pernyataan Taufik Kiemas bahwa PDI-P siap menghadapi kubu Golkar maupun "Poros Tengah". Padahal, "Poros Tengah" bukan sesuatu yang harus dihadapi. Kalau dia melihat begitu, berarti dia menghadapi dua kubu, Golkar dan "Poros Tengah" sekaligus. Lalu, apa yang bisa dia perbuat dengan perolehan PDI-P yang 34 persen itu? "Poros Tengah" adalah sesuatu yang harus diajak bernegosiasi. Dan, kelihatannya, kelompok Habibie jeli melihat ini. Dia intensif melobi kelompok tengah ini. Sedangkan sampai hari ini, Megawati masih diam saja. Saya kira, jangan ada orang mimpi jadi presiden seperti Pak Harto lagi. Kalau Pak Harto, setelah memilih dia sebagai presiden, orang menunggu teleponnya untuk diangkat jadi menteri. Pak Harto bisa begitu karena 80 persen MPR sudah dia kantongi. Sekarang tidak ada yang punya dukungan sebanyak itu.

Sudah sejauh apa lobi dari kubu Habibie itu?

Baru pendekatan. Tapi, sudah ada bayang-bayang. Intinya, mere-

ka mengajak karena sadar betul tanpa dukungan "Poros Tengah" Habibie enggak bisa berbuat apa-apa. Pembicaraan konkret belum ada. Tapi, lebih intensif saja. Baik melalui jalur Akbar Tandjung, Marwah Daud, maupun lain-lainnya. Tapi, saya tidak melihat ada sikap proaktif dari PDI-P. Jadi, "Poros Tengah" menunggu saja. Wartawan kan *suudzon* (berprasangka buruk) bahwa kelompok tengah ini mau mendukung Habibie. Padahal, kami enggak mendukung siapa-siapa. Tergantung lobi. Kalau Megawati tidak mau berbicara dengan kelompok tengah, kemudian kami meninggalkan dia, ya, jangan salahkan kami, dong. Ini politik, Bung. Dalam politik tidak ada yang gratis. Kami enggak akan memilih seseorang menjadi presiden, lalu kita menunggu telepon dari dia, model zaman Pak Harto.

Mungkin PDI-P maunya bergabung dengan PKB dan TNI atau dengan partai non-Islam...

Tetap saja enggak bisa. Misalnya, dalam menentukan utusan daerah. Itu kan ada 135 kursi. Kalau, misalnya, kelompok tengah bersekutu dengan Golkar kursi itu bisa diambil semua. Baik Jawa maupun luar Jawa. Sebaliknya, kalau "Poros Tengah" bergabung dengan PDI-P, bisa diambil semua kursi utusan golongan di Jawa. Yang tidak saya mengerti, mengapa Megawati diam saja? Apakah nanti kalau kabinetnya sudah terbentuk baru dijelaskan mengapa dia diam selama ini? Kan aneh. Berpolitik itu kan mesti aktif. Lagipula, sebenarnya, berbicara dengan kelompok tengah ini kan tidak sulit. Komandannya tiga orang. Amien, Hamzah Haz, dan saya (tertawa).

Gus Dur?

Lo, dia kan calon presiden (tertawa). Gus Dur itu sudah syaikhul ulama. Bosnya ulama (tertawa lagi). Formalnya, kalau mau berbicara, ya, harus dengan Matori. Tapi, bagaimana pun Gus Dur punya kapasitas pribadi. Kalau Amien bilang, posisi Gus Dur di "Poros Tengah" kira-kira sama dengan Pak Harto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar (tertawa).

Jadi, kalau Megawati mau jadi presiden dia juga mesti menemui "Poros Tengah"?

Iya, dong. Masak kami yang datang?

Bukankah Taufik Kiemas sudah menemui Anda?

Ya, sekitar sebulan yang lalu. Tapi, Taufik Kiemas hanya salah satu faksi dalam PDI-P. Dalam kapasitas apa dia bertemu saya?

Suami Mega atau apa? *Wallahualam bissawab*.

Sudah ada kesepakatan dalam pertemuan itu?

Kami tak pernah membuat *deal* semacam itu. Dalam mengendalikan PBB, sikap kami bebas aktiflah. Sesudah pemilu, kami bebas mengemukakan apa saja, berbicara dengan siapa saja. Jadi, saya bertemu dengan Taufik Kiemas, Habibie, Akbar. Apalagi lagi dengan sesama partai Islam. Begitu juga dengan Amien, Gus Dur. Cuma, saya belum pernah berbicara dengan Megawati. Karena memang tidak ada sinyal dari sana.

Apa yang dibicarakan Taufik Kiemas waktu itu?

Dia mengajak bekerja sama. Naga-naganya, untuk *sharing* (berbagi). Terutama buat saya pribadi. Saya olok-olok juga: bagaimana ini, kok, ada tawaran-tawaran? Tapi, apa pun, belum ada kata putus.

Apa tawaran Taufik?

Dia menyebut beberapa kalangan dikasih pos itu, pos ini.

Anda sendiri ditawari apa?

Ya, adalah. Di koran saya baca, mau dijadikan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kehakimanlah. Saya dengarkan saja. Saya tidak ada komitmen apa-apa.

Antara Megawati dan Habibie, Anda pribadi cenderung mendukung siapa?

Tergantung perundingan.

Kalau nanti bertemu Megawati, apa saja syarat Anda untuk bisa bekerja sama?

Pertama, apa program kita? Sepakati dulu itu, baru berapa jumlah menteri dalam kabinet. Selanjutnya, pembagian angkanya berapa? Sesudah itu, siapa personalianya? Pembicaraan soal ini pasti akan alot. Sidang Umum MPR kan bulan November. Jadi, kalau PDI-P mau mengegolkan calon presidennya, dari sekarang dia sudah negosiasi dengan kami. Habibie sudah mulai melangkah. Soal program memang belum konkret. Tapi, soal menteri, dia sudah bertanya, bagaimana kalau terdiri dari delapan teknokrat dan 20 orang partai? Kalau Megawati kan belum mulai sama sekali. Kami jangan dituduh yang bukan-bukan. Wartawan selalu bertanya, "Poros Tengah" mau mengganjal Megawati, ya? Itu saja yang *diomongin*. Siapa yang mau mengganjal? "Poros Tengah" ini kayak

cewek. Kalau naksir, ya, berbicara dong dengan kami. Tapi, nanti diambil cowok lain, jangan salahkan kelompok tengah, dong. Salah sendiri, mengapa enggak mau berbicara dengan kami? Sampai sekarang Megawati masih saja berpegang pada Kesepakatan Ciganjur. Padahal, itu sudah *out-of-date* (ketinggalan zaman). Sebelum pemilu, memang ada maknanya. Tapi, formasi politik setelah pemilu sudah berbeda. Amien Rais saja kita enggak tahu ke mana larinya sekarang. Gus Dur sudah ke mana-mana. Tapi, Mega masih saja berpegang pada kesepakatan Ciganjur.

Mengapa Anda tak setuju "Poros Tengah" mengajukan Gus Dur sebagai presiden?

Sulit. Bisa terjadi *deadlock*. Kita harus mau berbicara untuk menghindari *deadlock*. Kebuntuan itu berbahaya. Negara ini bisa tidak terkendali. Orang mau ribut, enggak ada yang tanggung jawab. Saya pikir, Gus Dur menyadari soal itu juga. Walaupun ketika Pak Amien menyatakan dukungannya, sepertinya Gus Dur "syur" juga (tertawa). Jangan menganggap enteng Gus Dur. Walaupun banyak lucunya, pemikirannya tajam sekali. Dia cukup berpeluang untuk menjadi presiden. Tapi, saya kira, dia bukan orang yang ngotot. Bagi dia, posisi presiden itu bukan harga mati. Kalau bagi Megawati atau Habibie kan sudah harga mati.

Tapi, Amien mau mendukung Gus Dur, bukan Habibie atau Megawati...

Ujung-ujungnya, kita juga harus realistis. Kalau ada orang ketiga yang ternyata membuat SU MPR *deadlock*, saya kira bagi kepentingan keseluruhan malah rusak. Bagaimanapun, saya lihat, kalau kelompok "Poros Tengah" mengajukan calon presiden juga, bisa *deadlock*. Bisa dibayangkan enggak kalau proses memilih presiden berlarut-larut sampai sebulan. Bayangkan, Republik ini tidak punya presiden selama sebulan. Misalnya, saat itu krisis Timor Timur memuncak, lalu diserbu negara lain, siapa yang bisa menyatakan perang kalau tidak ada presiden? Jadi, masalahnya amat serius.

Jadi, seharusnya sudah ada gambaran siapa presiden kita sebelum SU MPR?

Negosiasi harus dimulai sekarang. Paling tidak, itu akan memuluskan SU MPR. Mungkin nanti ada perdebatan mengenai amandemen konstitusi. Tapi, yang paling pokok adalah soal presiden.

Kalau soal amandemen UUD 1945 *deadlock*, enggak ada masalah. Tapi, soal presiden, kan enggak mungkin pada saat itu masa jabatan Presiden Habibie diperpanjang selama *deadlock* itu. Jangan ada lagi istilah presiden diperpanjang. Bisa berbahaya, seperti saat Pak Harto ditunjuk sebagai pejabat presiden pada 1967. Itu strategi Jenderal Abdul Haris Nasution. Banyak yang menyesalkan. Saya juga pernah bertanya kepada Pak Nas, dulu kesempatan sudah di tangan, mengapa Pak Nas diam? Dia bilang, "Saya mau jadi presiden yang dipilih MPR. Sebab itulah, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden." Tapi, begitu Pak Harto menjadi pejabat presiden, dia merekayasa semuanya. Di bawah UUD 1945, siapa pun yang ditunjuk sebagai pejabat presiden dengan mudah sekali bisa merekayasa agar dirinya bisa terpilih sebagai presiden tetap. Coba kalau Habibie gila-gilaan. Bisa saja dia mengganti Panglima TNI, ganti semua posisi. Dia memasang semua orangnya, lalu dia menjalankan konsolidasi kekuasaan. Untungnya, Habibie boleh dibilang relatif demokratlah. Padahal, sebenarnya, kalau mau, dia bisa merekayasa seperti itu.□

Amien dan Gus Dur Tidak Mendukung Megawati

Wawancara **Hamzah Haz**

KETUA PAN, Amien Rais, mengusulkan pembentukan "Fraksi Poros Tengah". Ia menyebutnya sebagai "Fraksi Reformasi" yang terdiri dari partai-partai politik di luar PDI-P dan Golkar. Selanjutnya, Amien mendorong fraksi itu mencalonkan Deklarator Partai Kebangkitan Bangsa, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebagai presiden RI mendatang.

Pada saat yang sama, Ketua Umum PPP, **Hamzah Haz**, menyebutkan pembentukan Faksi Islam. Menurut dia, kelompok ini akan menjadi penentu dalam pemilihan presiden RI di Sidang Umum MPR nanti. Adakah benang merah antara kelompok ini dengan gagasan Amien yang mantan ketua PP Muhammadiyah itu? Wartawan *Forum Keadilan*, Tony Hasyim, M. Husni, dan Yus Arianto mewawancarai Hamzah Haz di kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Kamis 22 Juli 1999. Berikut petikannya.

Siapa calon presiden yang akan diajukan PPP?

Kami belum bicara soal calon presiden. Kami baru berbicara mengenai penggalangan "Poros Tengah" yang dulu saya katakan sebagai Faksi Islam. Mengapa saya katakan Faksi Islam? Sebab, beberapa dari partai Islam kan sudah pasti masuk dalam DPR yang akan datang. Di samping PPP, ada Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Umat, Partai Kebangkitan Umat, dan Partai Syarikat Islam Indonesia. Karena mempunyai *platform* yang sama, yaitu asas Islam, kami sebaiknya bergabung dalam satu wadah yang

kami namakan “Fraksi Islam”. Itu sebenarnya ide kami yang utama. Artinya, kelompok partai Islam yang nyata —berdasarkan hasil Pemilu— baru itulah. Jumlah total perolehannya sekitar 80 kursi. Tapi, Faksi Islam membuka diri terhadap Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang ingin bergabung. Melalui Faksi Islam, bisa diselenggarakan kerja sama dalam berbagai *event* tertentu.

Misalnya?

Misalnya, pemilihan presiden. Suatu ketika, Faksi Islam bisa menjadi Fraksi Islam. Jadi, katakanlah, Faksi Islam adalah embrio dari Fraksi Islam nanti. Tapi, sekarang kami mulai merintis dulu dari Faksi Islam ini. Kemarin, Dewan Pimpinan Pusat PPP telah melakukan rapat dan memutuskan bahwa PPP akan mengambil prakarsa membangun Faksi Islam. Sekarang tinggal bagaimana kita melangkah dengan membicarakannya bersama rekan-rekan partai Islam lainnya.

Mengapa PAN dan PKB tidak diikutsertakan dalam faksi ini?

Itu bisa saja nanti. Tahap berikutnya. Kini, kami memulai dulu dari parpol yang *platform*-nya sama. Karena kami menginginkan identitas Islam tetap ada walaupun kami tetap membuka pintu bagi parpol-parpol lain untuk bergabung. Yang jelas, PPP akan membentuk Fraksi Islam. Kalau tidak setuju, ya, sudah, nama kami nanti tetap Fraksi PPP. Iya, kan?

Apakah Faksi Islam sama dengan “Fraksi Poros Tengah” atau “Fraksi Reformasi” yang dilontarkan Amien Rais?

Kami belum sampai bicara ke situ. Kami belum bicara mengenai pengelompokan poros tengah, kok. Saya baru mengemukakan gagasan mengenai Faksi Islam. Kami baru merintis Faksi Islam dengan parpol yang memiliki *platform* sama: Islam. Nantinya, Faksi Islam bisa melebar ke mana-mana.

Apa tidak sebaiknya Faksi Islam menggunakan “Fraksi Reformasi” supaya bisa diterima partai lain yang tidak berasas Islam?

Kalau begitu, justru memperkecil arti Islam itu sendiri. Kalau kata Islam diubah menjadi reformasi, seolah-olah Islam tidak reformasi. Iya kan? Padahal, kita tahu betapa reformisnya Islam. Soal ini bisa dilihat dari sejarah Islam. Rasulullah mengeluarkan umat dari zaman jahiliyah, kan? Apakah Islam menghambat pembangunan? Saya kira, tidak begitu. Mengapa kita takut menggunakan label Islam?

Padahal, Islam kan tidak mengerikan. Kami berbeda dengan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) atau, misalnya, "Komando Jihad". Jangan sampai kita takut pada Islam. Sebab, Islam tetap berada dalam tatanan demokrasi. Kalau, misalnya, kami memakai nama Fraksi Reformasi, apa kelompok yang tidak masuk ke situ berarti bukan reformis? Bagaimana dengan, misalnya, PDI-P?

Apakah kemunculan Faksi Islam sebagai reaksi terhadap banyaknya calon anggota legislatif PDI-P yang non-Muslim?

Bisa dikatakan begitu. Tapi, yang jelas, saat ini kan banyak sekali partai Islam. Sehingga kami berpikir, mengapa tidak disatukan dalam faksi ataupun fraksi? Umat Islam kan sebenarnya cukup membutuhkan satu partai Islam. Banyak partai Islam malah membingungkan umat.

Apakah partai-partai yang Anda sebut sebagai Faksi Islam ini menyepakati juga ide itu?

Ya, kami kan sudah memulainya dengan *stembus accoord* kemarin itu. Bukankah dengan begitu sudah jelas bahwa sejak awal kami menginginkan kerja sama berbentuk *political action* dalam DPR/MPR nanti? Dalam rapat kemarin kami baru mempersamakan persepsi di DPP PPP. Kami sudah sependapat bahwa kami akan memelopori terbentuknya Faksi Islam. Nah, baru nanti kami mengundang partai-partai berasas Islam lainnya untuk bergabung. Apakah mereka mau atau tidak, kami belum tahu. Tapi, sambutan atau harapan umat Islam besar sekali, yakni bahwa umat Islam harus bersatu.

Apa bentuk kerja sama Fraksi Islam di MPR nanti?

Kalau sudah menjadi Fraksi Islam, artinya menjadi struktural, saat masing-masing partai masuk dalam fraksi itu, dia menjadi semacam forum. Masing-masing partai yang masuk memiliki keterikatan yang bulat kendati bisa saja mereka pun masih mempunyai keterikatan dengan dewan pimpinan partainya.

Kalau Fraksi Islam terbentuk, bukankan nanti akan memperuncing pertentangan kelompok agama dengan sekuler?

Saya kira, tidak begitu. Kalaupun Fraksi Islam nanti menguasai pemerintahan, negara ini tidak akan berubah menjadi negara Islam. Kita tetap negara Pancasila. Hukum dan UU yang berlaku sama dengan yang berlaku sekarang. Kami tidak memaksakan Islam sebagai dasar hukum dan UU. Keberadaan Fraksi Islam adalah untuk

menyikapi bila rambu-rambu, UU, atau kebijakan tertentu nanti bertentangan dengan ajaran, syariah, dan akidah Islam. Bukan akibat dikotomi Islam dan non-Islam. Lagipula, Islam kan *rahmatan lil alamin*. Islam memberi rahmat bagi sekalian alam. Jadi enggak usah ditakuti.

Apakah manuver terakhir Amien Rais, yakni mendukung Gus Dur sebagai calon presiden, sudah dibicarakan di PPP?
Kami memang belum membicarakan itu.

Apa yang Anda tangkap dari usul Amien itu?
Dari pernyataannya itu, bisa ditarik bahwa sebenarnya dia tidak menyetujui Megawati menjadi calon presiden. Di lain pihak, dia juga tidak menyetujui Habibie. Jadi, kesimpulannya, Gus Dur dan Amien Rais tidak mendukung Megawati. Gus Dur kan bilang, meskipun ia menyetujui pencalonan Megawati sebagai presiden mendatang, ia juga menerima dukungan Amien Rais. Dia tidak menolak. Artinya, dia juga mau jadi presiden. Jadi, sebenarnya, dia tidak mendukung Megawati.

Bagaimana dengan ide Amien Rais tentang pembentukan "Fraksi Poros Tengah" atau "Fraksi Reformasi" agar bisa mencalonkan presiden alternatif?
Sekarang, jumlah kelompok tengah itu berapa? Kan baru 170 kursi (yang dimaksud Hamzah adalah PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PKU, PNU, dan PSII. Sementara, menurut Amien, poros tengah adalah di luar PDI-P dan Golkar. Jadi, jumlahnya lebih dari 170 kursi). Untuk bisa menjadi mayoritas di DPR kan harus mendapat 351 kursi. Oleh sebab itu, kami masih memerlukan 180-an kursi lagi. Darimana 180-an ekor itu? Padahal, untuk memastikan calon presiden, harus lebih besar lagi, yakni 351 kursi. Jadi, banyak sekali kekurangan kami. Kalau kami memunculkan calon alternatif, siapa yang mau mendukung? Ibarat dalam perusahaan, saham kami kecil, masak mau menawarkan diri menjadi direktur utama?

Kalau begitu, apa gunanya Faksi Islam yang Anda rintis itu?
(Hamzah tertawa) Kami ingin berperan sebagai kelompok yang dominan untuk menentukan siapa presiden nanti.

Siapa yang akan dipilih Faksi Islam, Habibie atau Megawati?
Kita lihat nanti. Bagaimanapun, pada akhirnya, kelompok ini kan

harus bergabung dengan dua kelompok itu (PDI-P atau Golkar). Tapi, sekarang kami belum bisa menentukan pilihan. Kini, kami merintis Faksi Islam dulu. Sebab, kalau Faksi Islam terbentuk, semuanya bisa masuk ke sini. Kan ada kelompok Islam di Golkar, ada kelompok Islam di PDI-P, PAN, dan partai-partai lain. Tapi, seperti yang tadi saya bilang, sekarang dengan 170 kursi itu, kami kan belum mayoritas. Karena itu, kami harus bekerja sama dengan salah satu dari dua itu. Golkar atau PDI-P. Tapi, sampai sekarang tetap belum ada yang dipilih. Sebaliknya, bagi kedua partai itu, tanpa kerja sama dengan kelompok "Poros Tengah" juga tidak mungkin menjadi mayoritas.

Perhitungannya bagaimana?
Begini. Megawati kan memperoleh 154 kursi. Untuk menjadi presiden, dia harus mendapatkan 351 kursi. Artinya, dia membutuhkan 197 kursi lagi. Dari mana mencari kursi yang hampir mencapai 200 itu? Apa mungkin semua Utusan Daerah dan Utusan Golongan masuk ke PDI-P? Kan tidak. Begitu pula dengan Habibie. Golkar memperoleh 125 kursi. Berarti dia memerlukan tambahan 226 kursi. Dari mana dia dapat? Nah, dalam posisi seperti itu, Faksi Islam akan sangat menentukan. Tapi, kalau Faksi Islam mengajukan calon presiden sendiri, jelas enggak bisa.

Artinya, Habibie dan Megawati harus merebut dukungan Faksi Islam...
Persis.

Tentunya, ada syarat yang Anda ajukan kepada mereka...
Jelas, dong. Kami harus menuntut *power sharing* (pembagian kekuasaan) dengan mereka. Kami kan bisa memberi nilai. Jabatan presiden berapa nilainya, jabatan menteri berapa nilainya, ketua MPR berapa nilainya, ketua DPR berapa nilainya. Golkar, dengan suara sekian, berapa dapat jatah menteri. PDI-P berapa pula. Kami juga bisa tawar-menawar: kalau Anda mendapatkan kursi presiden, jangan ambil banyak-banyak lagi kursi menteri, dong. Harus dibagi secara proporsional. Selain itu, kan kami bisa minta agar kelompok reformis harus masuk dalam kepemimpinan nasional.

Tapi, bukankah PPP tidak mungkin berbagi kekuasaan dengan Megawati karena PPP tidak mungkin menyetujui presiden perempuan?

Jelas, dong. Sesama komponen bangsa wajar kalau kami menyampaikan bahwa para ulama kami memberi fatwa yang isinya seperti itu. Semua kan sudah mengatakan begitu. Amien Rais sudah mencalonkan Gus Dur, berarti dia tidak mendukung Megawati, kan. Nah, Gus Dur sendiri tidak menolak pencalonan itu. Kalau Gus Dur mengatakan bahwa dia akan mencalonkan Mega, pasti dia menolaknya. Artinya, yang tidak menghendaki Mega sebagai presiden itu sebetulnya banyak.

Ada yang menilai, Amien Rais mencalonkan Gus Dur sebagai taktik untuk memisahkan Gus Dur dari Mega...

Bukan memisahkan, tapi Amien juga tidak ingin Megawati menjadi presiden.

Mengapa mayoritas penduduk Indonesia tidak memilih partai Islam?

Ya, itulah. Jumlah umat yang salat subuh berjamaah kan memang cuma segitu saja (Hamzah tertawa).

Artinya, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sebetulnya juga tidak setuju partai Islam...

Yang salat subuh berjamaah kan memang baru segitu. Amien Rais saja tidak berani memakai label Islam. Gus Dur juga. Apa sebabnya? Karena, kalau partai Islam, itu dianggap *set back* (mundur), mengurangi era keterbukaan, mengurangi dinamika partai. Jadi, mereka menilai Islam secara negatif. Padahal, kan tidak begitu. Islam kan universal. Saya selalu tegaskan kepada para duta besar asing bahwa kami tidak ingin membentuk negara Islam. Negara kita tetap negara kesatuan, dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya. Itu tidak diubah. Karena inilah yang memang tergambar di Indonesia.

Bagaimana bila kehadiran Faksi Islam nanti malah mendorong pengelompokan faksi agama lain?

Terserah. Tidak ada masalah dengan hal itu, bukan? Apa salahnya, sih, ada pengelompokan agama? Dalam Departemen Agama kan ada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat untuk masing-masing agama. Jadi, mengapa faksi agama dipersoalkan?

Dalam masyarakat modern, bukankah ikatan berbasis agama tidak digunakan lagi?

Nah, itulah yang dikehendaki oleh pihak sana, pihak Barat, yaitu

supaya enggak ada lagi Islam. Apa kita mau begitu?

Tapi, hasil Pemilu menunjukkan ikatan agama sudah kurang populer dalam masyarakat kita...

Tidak juga. Buktinya, tanpa dukungan Islam, sistem ini tidak berjalan. Semua pemimpin partai itu menjadi besar setelah mereka mendekati tokoh-tokoh panutan Islam.

Sebenarnya, PPP menolak Megawati karena dia perempuan atau karena caleg PDI-P didominasi nonMuslim?

Karena dia perempuan. Itu sudah harga mati. Itu sudah pendapat para ulama. Saya orang awam untuk urusan itu. Tapi, yang jelas dalam Islam, perempuan berbeda dengan pria. Meskipun, sebenarnya, wanita dimuliakan dalam Islam. Perempuan banyak diberi keistimewaan dalam Islam. Artinya, Islam sangat menghormati wanita. Tapi, kalau untuk menjadi pemimpin, itu soal lain.

Bukankah dari dulu sudah banyak perempuan yang menjadi pemimpin dalam masyarakat Islam?

Kalau cuma pemimpin organisasi tidak masalah. Tapi, presiden kan pemimpin umat. Yang mengambil kebijakan tertinggi di Indonesia kan presiden. Yang mengendalikan negara sehari-hari kan presiden.

Ulama-ulama NU tampaknya tidak berkeberatan Megawati menjadi presiden...

Kita serahkan saja kan pada MPR. Yang memutuskan, kan, mereka. Jangan dikira bahwa selama ini kami menghalangi Megawati untuk menjadi presiden. Silakan saja. Itu hak mereka untuk maju. Cuma, kami memberi tahu bahwa, dalam Islam, pemimpin perempuan itu tidak diinginkan.

Bagi PPP, ketidaksetujuan terhadap Megawati itu sudah harga mati?

Iya. Tapi bukan berarti kami menghalangi Megawati menjadi presiden. Kami tidak setuju. Itu saja. Artinya, kalau Megawati menjadi presiden, kami menolak dilibatkan dalam pemerintahannya. Kami tidak mau dimasukkan dalam kabinet dia.

Artinya, PPP akan menjadi oposisi?

Bukan oposisi. Kami kembalilah menjadi *amar makruf nahi munkar*.

Bagaimana antisipasi PPP seandainya pendukung Megawati memberontak lantaran dia tidak menjadi presiden?

Justru kami berusaha menghindari itu. Sebelum sampai ke situ, kan, kami sudah memulai pembicaraan dengan Amien Rais dan Gus Dur. Nantinya, kami berharap juga berbicara dengan Megawati. Itu kami usahakan supaya tidak muncul masalah dengan para pendukung Megawati. Kalau nanti ditentukan pemilihan presiden lewat jalan voting, ya, lewat *voting* lah. Itu menjadi kesepakatan bersama. Kita, termasuk pendukung PDI-P, harus menerima apa pun hasilnya nanti.

Ada yang mengatakan, Pemilu lalu merupakan kekalahan umat Islam sehingga ada kekhawatiran kekecewaan ini akan terus mengkristal...

Kita sudah melihat kenyataan bahwa perolehan suara PDI-P seperti itu. Mau apa lagi? Nasi yang sudah menjadi bubur. Sekarang, tinggal bagaimana tanggung jawab masing-masing. Saya kira, kristalisasi itu tidak lagi meruncing. Nah, sekarang tinggal bagaimana umat Islam menjadikannya sebagai pengalaman untuk masa yang akan datang.□

Sumber Tulisan

Bab I Pro-Kontra Partai Islam

1. "Agama Berdimensi Banyak, Politik Berdimensi Tunggal"
   Kuntowijoyo, *Sejarahwan dan pengamat politik Islam UGM.* (Majalah *Ummat*, No. 50 th. III, 6 Juli 1998)
2. "Islam dan Politik"
   Deliar Noer, *Pakar ilmu politik dan Ketua Umum Partai Ummat Islam.* (*Ummat,* No. 36 th. III, 22 Maret 1999)
3. "Islam Politik dan Islam Struktural"
   Masykuri Abdillah, *Dosen Fakultas Syariah/Pascasarjana IAIN Jakarta.* (Harian *Kompas*, 2 Agustus 1999)
4. "Antara Formalisme & Pengembangan Nilai-Nilai Islam"
   Abd A'la, *Mahasiswa program doktor pada Program Pascasarjana IAIN Jakarta.* (*Kompas*, 24 Juni 1999)
5. "Antara Asas Islam dan Asas Pancasila"
   KH Abdurrahman Wahid, *Ketua Umum PBNU dan Deklarator Partai Kebangkitan Bangsa.* (Harian *Media Indonesia*, 7 Maret 1999).
6. "Reformasi Politik Islam"
   Fikri Yathir, *Kolumnis dan ahli ilmu komunikasi.* (*Ummat,* No. 3 th.IV 27 Juli 1998)
7. "Dilema Politik Islam"
   Din Syamsudin, *Ketua Program Pascasarjana Studi Islam UMJ Jakarta.* (*Ummat,* No. 36 th. III, 22 Maret 1998)
8. "Fenomena Partai Islam"
   Bahtiar Effendy, *Dosen Pascasarjana IAIN Jakarta.*

(Majalah *Tempo,* 18 Januari 1999)

9. "Fundamentalisme Islam"
   Azyumardi Azra, *Rektor IAIN Jakarta.*
   (Majalah *D&R,* 21-26 Juni 1999)

10. "Partai Islam, Negara Islam"
    (Opini *Tempo,* 18 Januari 1999)

11. "Hatta dan Partai Islam"
    Deliar Noer, (*Tempo,* 18 Januari 1999)

12. "Noblese Oblige"
    Hajriyanto Y. Thohari, *Mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah.*
    (Majalah *Gatra,* No. 21, 10 April 1999)

13. "Desakralisasi Partai Islam"
    Sukidi, *Staf khusus Dubes RI di Norwegia, Oslo.*
    (Harian *Republika*, 3 Juni 1999)

14. "Partai Islam yang Rasional"
    Wawancara Prof. Dr. **Yusril Ihza Mahendra**,
    Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
    (*Ummat,* No. 50, th. III, 6 Juli 1998 dan 41 th. IV, 26 April 1999)

15. "Era Baru, Butuh Wahana Baru"
    Wawancara Prof. Dr. **M. Amien Rais**,
    Ketua Umum Partai Amanat Nasional.
    (*Ummat,* No. 7, 24 Agustus 1998 dan No. 41, 26 April 1999)

16. "Tak Mungkin Indonesia Jadi Negara Islam"
    Wawancara **Frans Magnis-Suseno**,
    Rohaniwan dan Guru Besar STF Driyarkara.
    (Majalah *Panji Masyarakat*, No. 37, th. II, 9 Januari 1999)

17. "Kalangan Islam Harus Tampil Percaya Diri"
    Wawancara Prof. **Ahmad Malik Fajar**. M.sc, *Menteri Agama RI.*
    (*Panji Masyarakat,* No. 28 th. II, 28 Oktober 1998)

Bab II Kiprah Parpol Islam dalam Pemilu 1999

1. "Parpol Islam: Antara Gembira dan Ragu"
   (Rubrik monitor/polling *Tempo,* 18 Januari 1999)

2. "Peta Politik bagi Umat"

Kuntowijoyo, (*Republika*, 1 Juni 1999)

3. "Problem Empiris Politik Islam"
   Khamami Zada, *Alumnus IAIN Yogyakarta.*
   (*Republika*, 24 April 1999)
4. "Fragmentasi Partai Islam"
   M. Arskal Salim GP, *Staf Peneliti Puslit IAIN Jakarta.*
   (*Kompas*, 26 Juni 1999)
5. " Satu Islam Dua Pemilu"
   Azyumardi Azra, (Majalah *Forum Keadilan*, 23 Mei 1999)
6. "Tragedi Jepara dan Ideologisasi Agama"
   Mohammad AS Hikam, *Pengamat Politik LIPI.*
   (*Forum Keadilan*, 16 Mei 1999)
7. "Stembus Accoord dan Caleg Non-muslim"
   Hartono Mardjono, *Ketua Partai Bulan Bintang.*
   (*Republika*, 2 Juni 1999)
8. "Umat yang Gugup"
   Ulil Abshar Abdalla, *Peneliti Lakpesdam NU.*
   (*Panji Masyarakat*, No. 09, th. III, 16 Juni 1999)
9. "Eksperimen Islam Politik Jilid III"
   M. Alfan Alfian M, *Pengamat Sosial Politik.*
   (*Republika*, 9 Juni 1999)
10. "Aliansi Islam"
    Kacung Marijan, *Staf Pengajar Fisip Unair Surabaya.*
    (*Gatra*, 27 Pebruari 1999)
11. "Memahami Perilaku Pemilih Muslim"
    Abdul Munir Mulkhan, *Pengamat Sosial Keagamaan, Yogyakarta.*
    (*Republika*, 16 Juli 1999)
12. "Sikap Muslim Memilih Partai"
    N. Syamsudin CH Haesy, *Praktisi Komunikasi Massa.*
    (*Republika*, 7 Juni 1999)
14. "Partai Semangka, Mangga, dan Mentimun"
    Eep Saefulloh Fatah, *Pengamat Politik UI.*
    (*Tempo*, 10 Mei 1999)
15. "Radikalisme dan Ekstremisme Bukan Ajaran Islam"

Wawancara **Nur Mahmudi Ismail**, *Presiden Partai Keadilan.* (*Ummat,* No. 16, 26 Oktober 1999 dan *Republika*, 2 Juni 1999)

16. "Politik Islam Sekarang Lebih Majemuk"
Wawancara **Robert William Hefner**, *Antropolog dan Pengamat Politik Islam, AS.* (Majalah *D&R,* 26-31 Juli 1999)

Bab III Kekalahan Parpol Islam

1. "Mengevaluasi Parpol Islam Pascapemilu"
Farid Wajdi, *Peneliti pada Forum on Islamic World Studies Bandung.* (*Republika*,10 Juni 1999)
2. "Kalah-Menang Bagi Parpol Islam"
Efa Ainul Fatah, *Anggota DMLI IAIN Jakarta.* (*Republika*, 11 Juni 1999)
3. "Kekalahan Parpol Islam"
Mochtar Naim, *Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang.*(*Republika*, 13 Juli 1999)
4. "Parpol Islam dan Kelanjutan Reformasi"
Abu Bakar E. Hara, *Staf Pengajar Fisip Universitas Jember.* (*Republika*, 23 Juli 1999)
5. "Islam dan Politik di Indonesia"
Sugiono, *Aktifis LKA Al Bashoir Surabaya.* (Harian *Jawa Pos*, 9 Juli 1999)
6. "Pemilu dan Elit Politik Islam"
Bahtiar Effendy, (*Panji Masyarakat,* No. 10, 23 Juni 1999)
7. "Tukang Azan dan Kekalahan Partai Islam Modernis"
Hajriyanto Y Thohari, (*Gatra,* 19 Juni 1999)
8. "Kegagalan Islam Politik"
Riza Sihbudi, *Peneliti LIPI.* (*Forum Keadilan,* 4 Juli 1999)
9. "Kekalahan Partai Islam"
Saiful Mujani, *Kandidat Doktor Ilmu Politik, Ohio State University, AS.* (Majalah *Gamma,* 27 Juni 1999)
10. "Kemenangan Partai terbuka"
Denny JA, *Direktur Eksekutif Yayasan Universitas Jayabaya, Jakarta.* (*Gatra,* 19 juni 1999)

11. "Apakah Politik Islam Kalah?"
    Fathi Siregar, *Wakil Sekretaris Majelis Nasional KAHMI.*
    (*Republika*, 13 September 1999)
12. "Stembus Accoord: Malaikat Penyelamat Partai Islam"
    Husin M. Al-Banjari, *Ketua DPW Partai Keadilan Jawa Barat.*
    (*Jawa Pos*, 26 Juli 1999)
13. "Kemenangan Mega Bukan Kekalahan Islam"
    Wawancara **Moeslim Abdurrahman**, *Pengamat Sosial Keagamaan*. (*Panji Masyarakat,* No. 13, th. III, 14 Juli 1999)
14. "Mega Boleh Menang, Tapi...."
    Wawancara **Hartono Marjono**,
    (*Panji Masyarakat,* No. 10, th. III, 23 Juni 1999)
15. "Partai Islam Tidak Prospektif"
    Wawancara **Azyumardi Azra**,
    (*Panji Masyarakat,* No. 10, 23 Juni 1999)
16. "Semua Orang Diberi Hak Bermimpi"
    Wawancara Prof. Dr. **Mitsuo Nakamura**, *Antropolog dari Universitas Chiba, Jepang*. (*D&R,* 5-10 Juli 1999)

Bab IV Parpol Islam Pasca Pemilu 1999

1. "Hikmah di Balik Kekalahan Partai Islam"
   Fahruddin Salim, *Anggota Tim Ahli di DPR RI.*
   (Harian *Rakyat Merdeka*, 17 Juli 1999)
2. "Membangun Ukhuwah Politik"
   Khamami Zada, *Editor Pada Yayasan Nuansa Madani.*
   (*Media Indonesia*, 6 Agustus 1999)
3. "Membangun Visi Baru Politik Islam"
   Ahmad Zubaidi, *Alumnus IAIN Jakarta.*
   (*Media Indonesia*, 12 Agustus 1999)
4. "Ukhuwah Politik: Antara Teori dan Problem Empiris"
   Husin M. Al-Banjari, (*Media Indonesia*, 26 Agustus 1999)
5. "Islam Pascapemilu"
   Moeslim Abdurrahman,
   (*Panji Masyarakat,* No. 10, 23 Juni 1999)

6. "Megawati Hadiah Gratis bagi Umat Islam"
   Eep Saefulloh Fatah, (*Republika*, 24 Juni 1999)
7. "Haz dan Ihza"
   Haidar Bagir, *Pengamat Sosial Keagamaan.* (*Republika*, 15 Juli 1999)
8. "Atas Nama Umat Islam"
   Ulil Abshar-Abdalla, (*Tempo,* 27 Juni 1999)
9. "Politik Garam"
   Bahtiar Effendy, (*Republika*, 10 Juni 1999)
10. "PR Umat Islam"
    Deliar Noer, (*Panji Masyarakat,* No. 17, 11 Agustus 1999)
11. "Demokrasi dan Posisi Umat Islam"
    Ahmad Syafii Maarif, *Pjs. Ketua PP Muhammadiyah.*
    (*Republika*, 13 Juli 1999)
12. "SA, ET, dan Prospek Partai Keadilan"
    Husin M. Al-Banjari, (*Republika*, 14 September 1999)
13. "Menggagas Konfederasi Partai-Partai Islam"
    Saleh Khalid, *Wakil Sekjen DPP PPP.*
    (*Republika*, 4 Juni 1999)
14. "Islam Tidak Akan Kalah"
    Wawancara **Nurcholish Madjid**,
    Rektor Universitas Paramadina Mulya.
    (*Forum Keadilan*, No. 12, 27 Juni 1999; *D&R,* 26-31 Juli 1999; dan
    Panji Masyarakat, 16 Juni 1999)

Bab V Fraksi Islam, Fraksi Reformasi, dan Poros Tengah

1. "Fraksi Islam: Perlukah?"
   Bahtiar Effendy, (*Republika*, 19 Juli 1999)
2. "Fraksi Islam, Oposisi dan Reposisi"
   M. Alfan Alfian M, (*Republika*, 29 Juli 1999)
3. "Fraksi Islam"
   Azyumardi Azra, (*Forum Keadilan,* No. 16, 25 Juli 1999)
4. "Fraksi Islam" dan "Poros Tengah"
   Hartono Mardjono, (*Republika*, 28 Agustus 1999)

5. "Membabat Habis Mitos Jumlah Terbesar"
   Kuntowijoyo, (*Gatra,* 31 Juli 1999)
6. "Pertarungan Perjuangan Politik Umat Islam"
   Ahmad Rusli Arsyad, *Wakil Sekretaris Lajnah Falakiah PBNU.*
   (*Republika*, 27 Agustus 1999)
7. "Fraksi Reformasi"
   Saiful Mujani, (*Panji Masyarakat,* No. 16, 4 Agustus 1999)
8. "Gus Dur dan Fraksi Reformasi"
   Mohammad AS Hikam,
   (*Forum Keadilan,* No. 17, 1 Agustus 1999)
9. "Poros Tengah: Antara Ada dan Tiada"
   Hajriyanto Y Thohari, (*Gatra,* 31 Juli 1999)
10. "Membaca Peluang Poros Tengah"
    Salahuddin Wahid, *Ketua Partai Kebangkitan Umat.*
    (*Media Indonesia*, 22 Juli 99)
11. "Kendala Menyatukan Islam Modern-Tradisionalis"
    Mundzar Fahman, *Wartawan Jawa Pos.*
    (*Jawa Pos*, 30 Agustus 1999)
12. "Poros Tengah, Quo Vadis?"
    Moch. Sa'dun M, *Peneliti CIDES.*
    (*Republika*, 19 Agustus 1999)
13. "Sebenarnya, Indonesia Negara Sekuler"
    Wawancara Dr. **Gregory James Barton**,
    Pengamat Politik Indonesia dari Universitas Deakin, Australia.
    (*Panji Masyarakat,* 14 Juli 1999 dan *D&R,* 2-7 Agustus 1999)
14. "Saya Sudah Bulat Mencalonkan Gus Dur"
    Wawancara Prof. Dr. **M. Amien Rais**, (*Forum Keadilan,* No. 18, 8 Agustus 1999 dan *D&R,* 26-31 Juni 1999)
15. "Poros Tengah Ibarat Cewek"
    Wawancara Prof. **Yusril Ihza Mahendra**,
    (*Forum Keadilan,* No. 19, 15 Agustus 1999)
16. "Amien dan Gus Dur Tidak Mendukung Megawati"
    Wawancara **Hamzah Haz**, *Ketua Umum DPP PPP.*
    (*Forum Keadilan,* No. 17, 1 Agustus 1999)

Kekalahan partai-partai Islam benar-benar telak. Dari 17 parpol Islam yang lolos seleksi pemilu 1999, hanya PPP yang meraih suara signifikan. Perolehan PBB jauh di bawah dugaan. Partai Keadilan hanya mendapat 7 kursi DPR, dan bakal terlikuidasi untuk pemilu 2004.

Apa yang sedang terjadi di negeri Muslim terbesar di dunia ini? Mengapa Islam kurang kuat sebagai azas formal? Mengapa mayoritas Muslim justeru mendukung partai-partai Nasionalis-Kristen dan sekular? Benarkah umat Islam makin kurang percaya bahwa aspirasi mereka akan diakomodasi partai-partai Islam; dan makin yakin aspirasi itu akan lebih terakomodasi oleh partai-partai non-Islam?

Mungkin hasil pemilu ini sinyal yang jelas bahwa mayoritas Muslim sudah tak lagi menganggap penting simbol-simbol Islam dalam politik, dan lebih peduli pada substansi.

Berpikir tanpa azas Islam dalam perjuangan, bukanlah sesuatu yang ditentang oleh Islam.
Abdurrahman Wahid

Sebagai agama, Islam tidak akan kalah.... Orang Islam lebih efektif menjadi oposisi sambil belajar untuk menjadi berkuasa....
Nurcholish Madjid

Kalau Habibie dan Megawati dicoba dulu... itu seperti mengurus warteg di pinggir jalan.
Amien Rais

...Mereka kalah terhadap keinginan mereka sendiri, bukan kekalahan yang objektif... munculnya 20 partai politik Islam itu... kelebihan karena bermimpi....
Mitsuo Nakamura

...Baik partai-partai Islam maupun PDI-P yang mengidap penyakit 'Mitos Jumlah Terbesar' perlu memikirkan betul langkah-langkahnya.... Berpikirlah jauh ke depan menuju Indonesia Baru.
Kuntowijoyo

ISBN 979-95821-1-3
9 789799 582119

ALVABET